PEMERINTAH
KABUPATEN SLEMAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025 - 2029



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan di Daerah secara selaras dengan perencanaan pembangunan nasional dan berkelanjutan perlu mewujudkan masyarakat yang maju, adil makmur, lestari, dan berkeadaban;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi dengan mendasarkan pada arah pembangunan Daerah perlu pedoman dalam menyusun rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;

c. bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
dan
BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sleman untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2030.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
4. Bupati adalah Bupati Sleman.
5. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

BAB II
SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 2

RPJMD memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, serta program PD dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dengan mendasarkan pada arah pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:
a. pedoman bagi PD dalam menyusun rencana strategis PD; dan

b. pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
   a. BAB I : PENDAHULUAN
   b. BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH
   c. BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
   d. BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
   e. BAB V : PENUTUP

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI SLEMAN,

HARDA KISWAYA

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 19 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

SUSMIHARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (5, 23/2025);

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Keberhasilan penyelenggaraan program-program pembangunan daerah tidak terlepas dari perencanaan pembangunan daerah yang telah dilakukan dan ditetapkan sebelumnya. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Tahapan perencanaan daerah tersebut meliputi tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Salah satu bentuk perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah RPJMD. Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati terpilih yang berpedoman kepada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional.

RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan dibawah kepemimpinan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. RPJMD tersebut diarahkan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah serta mengacu pada kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045.

Selanjutnya RPJMD menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan RKPD dan Renstra PD bagi satuan kerja di dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 217

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sleman
Tahun 2025-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iv
DAFTAR GRAFIK		ix
DAFTAR GAMBAR		xi
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3	Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	I-6
1.3.1	RPJMD Kabupaten Sleman dengan RPJMN	I-7
1.3.2	RPJMD Kabupaten Sleman dengan RPJMD DIY	I-8
1.3.3	RPJMD Kabupaten Sleman dengan RPJPD Kabupaten Sleman	I-8
1.3.4	RPJMD Kabupaten Sleman dengan Rencana Tata Ruang	I-9
1.3.5	RPJMD Kabupaten Sleman dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	I-10
1.3.6	RPJMD Kabupaten Sleman dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) Daerah (RIPJPID)	I-10
1.3.7	RPJMD Kabupaten Sleman dengan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P)	I-11
1.3.8	RPJMD Kabupaten Sleman dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya	I-11
1.3.9	RPJMD Kabupaten Sleman dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)	I-12
1.4	Maksud dan Tujuan	I-12
1.5	Sistematika Penulisan	I-12
BAB II	GAMBARAN UMUM DAERAH	II-1
2.1	Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1	Aspek Geografi Dan Demografi	II-1
2.1.1.1	Posisi dan Peran Strategis Daerah	II-1
2.1.1.2	Potensi Sumber Daya Alam	II-6
2.1.1.3	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	II-29
2.1.1.4	Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	II-36
2.1.1.5	Lingkungan Hidup Berkualitas	II-40
2.1.1.6	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	II-47
2.1.1.7	Demografi	II-59
2.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-65
2.1.2.1	Kesejahteraan Ekonomi	II-65
2.1.2.2	Kesehatan Untuk Semua	II-73
2.1.2.3	Pendidikan Berkualitas yang Merata	II-82
2.1.2.4	Perlindungan Sosial yang Adaptif	II-90
2.1.2.5	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	II-91
2.1.2.6	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	II-95
2.1.3	Aspek Daya Saing Daerah	II-104
2.1.3.1	Daya Saing Sumber Daya Manusia	II-104
2.1.3.2	IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	II-104
2.1.3.3	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	II-110
2.1.3.4	Transformasi Digital	II-110
2.1.3.5	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	II-110
2.1.3.6	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	II-112
2.1.3.7	Stabilitas Ekonomi Makro	II-121
2.1.4	Aspek Pelayanan Umum	II-123
2.1.4.1	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	II-123
2.1.4.2	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial	II-126
2.1.4.3	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	II-127
2.1.4.4	Standar Pelayanan Minimal	II-128

2.1.4.5 Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan II-131
2.1.4.6 Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah..... II-133
2.2 Gambaran Keuangan Daerah II-236
2.2.1 Realisasi Keuangan Daerah II-237
2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah II-260
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis II-261
2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah II-261
2.3.2 Isu Strategis Daerah II-302

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III-1
3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran III-1
3.1.1 Visi..... III-1
3.1.2 Misi III-2
3.1.3 Tujuan dan Sasaran III-4
3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah III-17
3.2.1 Strategi Daerah III-17
3.2.2 Arah Kebijakan Daerah..... III-30
3.2.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah III-32
3.3 Lokus Pembangunan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025–2029 ... III-45

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV-1
4.1 Program Perangkat Daerah IV-1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah IV-27
4.2.1 Indikator Kinerja Utama IV-27
4.2.2 Indikator Kinerja Daerah IV-35

BAB V PENUTUP V-1
5.1 Pedoman Transisi V-1
5.2 Kaidah Pelaksanaan V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas Kawasan Perkotaan Per Kalurahan di Kabupaten Sleman	II-3
Tabel 2.2.	Sebaran Izin Usaha Perusahaan Pertambangan di Kabupaten Sleman Tahun 2023	II-13
Tabel 2.3.	Luas Perubahan Lahan di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (Ha).	II-16
Tabel 2.4.	Produktivitas Sawah di Kabupaten Sleman Tahun 2024.....	II-17
Tabel 2.5.	Luas Lahan Sawah Berdasarkan Jenis Pengairan di Kabupaten Sleman Tahun 2024	II-17
Tabel 2.6.	Daftar Keanekaragaman Hayati Flora dan Fauna yang Dilindungi di Kabupaten Sleman	II-28
Tabel 2.7.	Proyeksi Daya Dukung Pangan Kabupaten Sleman Tahun 2025-2030.....	II-31
Tabel 2.8.	Proyeksi Daya Dukung Pangan Kabupaten Sleman Per Kapanewon Tahun 2025-2030.....	II-32
Tabel 2.9.	Proyeksi Daya Dukung Air Kabupaten Sleman per Kapanewon Tahun 2025-2030.....	II-34
Tabel 2.10.	Proyeksi Daya Dukung Air Kabupaten Sleman Tahun 2025-2030..	II-35
Tabel 2.11.	Proyeksi Daya Dukung Lahan Bangunan Kabupaten Sleman Tahun 2025-2030.....	II-36
Tabel 2.12.	Indikator Ketahanan Pangan Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024	II-36
Tabel 2.13.	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024.....	II-37
Tabel 2.14.	Kapasitas Air Baku Tahun 2020-2024 (m3/detik).....	II-38
Tabel 2.15.	Jumlah Air PDAM Kabupaten Sleman Disalurkan ke Pelanggan Tahun 2022-2024.....	II-38
Tabel 2.16.	Kondisi Sumber Air Baku Air Sumur dan Mata Air di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024	II-39
Tabel 2.17.	Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024.....	II-39
Tabel 2.18.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024.....	II-40
Tabel 2.19.	Akses Sanitasi Layak dan Aman di Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024.....	II-41
Tabel 2.20.	Pengelolaan Sampah Perkotaan Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024.....	II-43
Tabel 2.21.	Perwujudan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Sleman Tahun 2024.	II-45
Tabel 2.22.	Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Klimatologi Kabupaten Sleman Tahun 2024	II-47
Tabel 2.23.	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024	II-49
Tabel 2.24.	Capaian Indikator Penanggulangan Bencana Kebakaran di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024	II-54
Tabel 2.25.	Indeks Kapasitas Adaptif (IKA), Indeks Kerentanan dan Sensitivitas (IKS) dan Nilai Kerentanan di Kabupaten Sleman Tahun 2019.....	II-56
Tabel 2.26.	Kepadatan Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2024	II-61
Tabel 2.27	Proyeksi Penduduk Tahun 2025-2030 (Jiwa)	II-61
Tabel 2.28.	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Sleman Menurut Kelompok Umur Tahun 2025-2030 (Jiwa).....	II-62
Tabel 2.29.	PDRB Kabupaten Sleman atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (Miliar rupiah).....	II-66
Tabel 2.30.	Struktur PDRB Kabupaten Sleman Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (%).....	II-67
Tabel 2.31.	Pertumbuhan Sektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (%)	II-68
Tabel 2.32.	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sleman, DIY dan Nasional Tahun 2020-2024 (Jiwa).....	II-70
Tabel 2.33.	Komponen Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Sleman Tahun 2024	II-75
Tabel 2.34.	Indeks Pembangunan Olahraga Menurut Dimensi Tahun 2021-2024.....	II-80

Tabel 2.35. Indeks Pembangunan Olahraga per Kapanewon Tahun 2022-2024 II-81
Tabel 2.36. Data Sarana dan Prasarana Olahraga di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ..... II-81
Tabel 2.37. Indeks Literasi Digital Berdasar Pilar Literasi Digital per Kapanewon Tahun 2023 ..... II-90
Tabel 2.38. Cakupan Kepesertaan Jamsostek di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (%) II-90
Tabel 2.39. Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ..... II-91
Tabel 2.40. Kinerja Pelestarian warisan budaya Kabupaten Sleman Tahun 2023-2024 ..... II-94
Tabel 2.41. Indeks Perlindungan Anak dan Komponen Pembentuknya di Kabupaten Sleman, DIY dan Nasional Tahun 2021-2023 ..... II-95
Tabel 2.42. Kinerja Perlindungan Anak di Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024 ..... II-96
Tabel 2.43. Domain Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Sleman Tahun 2023 ..... II-101
Tabel 2.44. Rasio PDRB Industri Pengolahan di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ..... II-106
Tabel 2.45. Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ..... II-106
Tabel 2.46. Data Pelaku Usaha Kreatif di Kabupaten Sleman Tahun 2020 ..... II-107
Tabel 2.47. Nilai Indeks Inovasi Daerah ..... I I-110
Tabel 2.48. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2022-2023 ..... II-110
Tabel 2.49. Nilai PMA dan PMDN Rentang Waktu Tahun 2020-2024 ..... II-111
Tabel 2.50. Data Kondisi Jalan di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ..... II-112
Tabel 2.51. Kondisi Jalan Mantap di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ..... II-113
Tabel 2.52. Kondisi Jembatan Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024 ..... II-113
Tabel 2.53. Jumlah Koperasi di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ..... II-115
Tabel 2.54. Hotel atau Penginapan Lainnya, Kamar, dan Tempat Tidur di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ..... II-116
Tabel 2.55. Data Akses Hunian Layak Kabupaten Sleman 2020-2024 ..... II-117
Tabel 2.56. Status Indeks Desa Membangun di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ..... II-118
Tabel 2.57. Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDRB di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ..... II-121
Tabel 2.58. Capaian Indikator Penegakan Perda di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ..... II-126
Tabel 2.59. Indeks Demokrasi Indonesia di DIY Tahun 2020-2024 ..... II-127
Tabel 2.60. Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 II-127
Tabel 2.61. Indeks Daya Saing Per Pilar Kabupaten Sleman, DIY, Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2024 ..... II-128
Tabel 2.62. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (IPSPM) Kabupaten Sleman Tahun 2024 ..... II-128
Tabel 2.63. Rincian Fasilitas Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan II-132
Tabel 2.64. Sebaran Sumber Daya Pendidikan Negeri per Kapanewon Berdasarkan Tingkatannya di Kabupaten Sleman Tahun 2024 ..... II-139
Tabel 2.65. Sebaran Sumber Daya Pendidikan Swasta per Kapanewon Berdasarkan Tingkatannya di Kabupaten Sleman Tahun 2024 ..... II-141
Tabel 2.66. Perbandingan Jumlah Lembaga Pendidikan, Siswa dan Guru di Kabupaten Sleman tahun 2024 ..... II-143
Tabel 2.67. Capaian Indikator Urusan Kesehatan di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ..... II-144
Tabel 2.68. Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ..... II-154
Tabel 2.69. Capaian Indikator Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ..... II-159
Tabel 2.70. Data Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024 ..... II-159

Tabel 2.71. Capaian Indikator Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ... II-161
Tabel 2.72. Perkembangan Data Kebencanaan di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ... II-162
Tabel 2.73. Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Sleman 2020-2024 (Orang) ... II-164
Tabel 2.74. Capaian Indikator Urusan Sosial Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024 ... II-165
Tabel 2.75. Capaian Indikator Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ... II-166
Tabel 2.76. Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 .... II-168
Tabel 2.77. Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ..... II-170
Tabel 2.78. Capaian Indikator Urusan Pangan Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ... II-172
Tabel 2.79. Capaian Indikator Urusan Pertanahan Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ... II-172
Tabel 2.80. Permasalahan Pertanahan di Kabupaten Sleman Tahun 2024 ..... II-172
Tabel 2.81. Data Tanah Kasultanan dan Tanah Kas Desa di Kabupaten Sleman Tahun 2024 ... II-174
Tabel 2.82. Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ... II-175
Tabel 2.83. Luas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2025 ... II-177
Tabel 2.84. Capaian Indikator Pelayanan Kependudukan Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (%) ... II-179
Tabel 2.85. Klasifikasi BumDes/ BumKal di Kabupaten Sleman Tahun 2020 – 2024 ... II-182
Tabel 2.86. Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama di Kabupaten Sleman Tahun 2023 ... II-182
Tabel 2.87. Status Indeks Desa Membangun di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (Desa) ... II-183
Tabel 2.88. Perkembangan Pasar Desa di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ... II-186
Tabel 2.89. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ... II-186
Tabel 2.90. Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ... II-187
Tabel 2.91. Kelompok Pemberdayaan di Kabupaten Sleman Tahun 2024 ..... II-188
Tabel 2.92. Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ... II-190
Tabel 2.93. Capaian Indikator Urusan Perhubungan Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ... II-193
Tabel 2.94. Data Data Sarana Prasarana Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024 ... II-195
Tabel 2.95. Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024 ... II-197
Tabel 2.96. Perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ... II-197
Tabel 2.97. Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ... II-198
Tabel 2.98. Capaian Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ... II-199
Tabel 2.99. Perolehan Medali Dalam POPDA DIY Tahun 2020-2024 ..... II-201
Tabel 2.100. Capaian Indikator Urusan Statistik Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024 ... II-203
Tabel 2.101. Capaian Indikator Urusan Kebudayaan di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ... II-204
Tabel 2.102. Capaian Indikator Urusan Perpustakaan di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ... II-207

Tabel 2.103. Capaian Indikator Urusan Kearsipan di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ..... II-208
Tabel 2.104. Data Perkembangan Arsip Tahun 2020-2024 ..... II-209
Tabel 2.105. Potensi Objek Wisata Di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ..... II-211
Tabel 2.106. Jumlah Sarana Perdagangan di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ..... II-214
Tabel 2.107. Capaian Indikator Urusan Perindustrian Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ..... II-216
Tabel 2.108. Realisasi Penempatan Transmigrasi Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ..... II-217
Tabel 2.109. Capaian Indikator Unsur Sekretariat Daerah di Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024 ..... II-221
Tabel 2.110. Capaian Indikator Unsur Sekretariat DPRD di Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024 ..... II-222
Tabel 2.111. Capaian Indikator Unsur Perencanaan di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ..... II-223
Tabel 2.112. Capaian Indikator Urusan Keuangan di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ..... II-225
Tabel 2.113. Capaian Indikator Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ..... II-227
Tabel 2.114. Data Kajian/Penelitian di Kabupaten Sleman Tahun 2022 - 2024.. II-228
Tabel 2.115. Data Inovasi di Kabupaten Sleman Tahun 2021 – 2024 ..... II-229
Tabel 2.116. Capaian Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2024 ..... II-229
Tabel 2.117. Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP Kabupaten Sleman Tahun 2022-2024 ..... II-232
Tabel 2.118. Capaian Indikator Urusan Pengawasan di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ..... II-233
Tabel 2.119. Capaian Indikator Unsur Pemerintahan Umum di Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024 ..... II-236
Tabel 2.120. Realisasi APBD Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah) II-237
Tabel 2.121. Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (%) II-240
Tabel 2.122. Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ..... II-242
Tabel 2.123. Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal II-243
Tabel 2.124. Pembiayaan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah) II-252
Tabel 2.125. Neraca Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ..... II-253
Tabel 2.126. Rasio Kas dan Rasio Likuiditas Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ..... II-256
Tabel 2.127. Proporsi Penggunaan Anggaran APBD Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah) II-258
Tabel 2.128. Kapasitas Fiskal Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ..... II-259
Tabel 2.129. Defisit Riil APBD Kabupaten Sleman 2020-2024 (Milyar Rupiah) ... II-259
Tabel 2.130. Proyeksi Kerangka Pendanaan Kabupaten Sleman Tahun 2025-2030 (Milyar Rupiah) II-260
Tabel 2.131. Persentase Pencapaian TPB di Kabupaten Sleman II-304
Tabel 2.132. Capaian Indikator TPB di Kabupaten Sleman II-305
Tabel 2.133. Capaian TPB Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Sleman II-305
Tabel 2.134. Persandingan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 dan KLHS RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 ..... II-361
Tabel 3.1. Keselarasan Misi Pada RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 dengan Misi Pada RPJPD Kabupaten Sleman 2025-2045 ..... III-3
Tabel 3.2. Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kabupaten Sleman III-5
Tabel 3.3. Keselarasan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Asta Cita III-15

Tabel 3.4. Penahapan Pembangunan Jangka Menengah III-30
Tabel 3.5. Arah Kebijakan Berdasarkan Misi RPJMD III-30
Tabel 3.6. Program Strategis Bupati..... III-33
Tabel 3.7. Penyandingan Program Strategis Bupati dan Program Prioritas Pembangunan Dalam Pencapaian Visi Misi..... III-35
Tabel 3.8. Penyandingan Indikator Program Keistimewaan III-43
Tabel 4.1. Program Perangkat Daerah..... IV-2
Tabel 4.2. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sleman..... IV-28
Tabel 4.3. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Sleman..... IV-36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Kedudukan RPJMD Kabupaten Sleman Terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya	I-7
Gambar 2.1.	Peta Administrasi Kabupaten Sleman	II-2
Gambar 2.2.	Peta Kawasan Perkotaan Kabupaten Sleman	II-3
Gambar 2.3.	Peta Topografi Kabupaten Sleman	II-5
Gambar 2.4.	Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Sleman	II-5
Gambar 2.5.	Peta Jenis Tanah Kabupaten Sleman	II-6
Gambar 2.6.	Endapan Merapi Tua Turgo-Plawangan	II-7
Gambar 2.7.	Aliran Piroklastik Bakalan di Kabupaten Sleman	II-8
Gambar 2.8.	Tebing Breksi Piroklastik Purba Sambirejo di Kabupaten Sleman	II-9
Gambar 2.9.	Rayapan Tanah Ngelepen di Kabupaten Sleman	II-10
Gambar 2.10.	Lava Bantal Berbah di Kabupaten Sleman	II-11
Gambar 2.11.	Batugamping Eosen di Kabupaten Sleman	II-11
Gambar 2.12.	Peta Sebaran Izin Tambang Kabupaten Sleman	II-15
Gambar 2.13.	Peta Cekungan Air Tanah dan Daerah Aliran Sungai Kabupaten Sleman	II-15
Gambar 2.14.	Peta Jasa Lingkungan Penyedia Pangan (Atas) dan Air Bersih (Bawah) Tahun 2023	II-19
Gambar 2.15.	Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim (Atas) dan Tata Aliran Air dan Banjir (Bawah) Tahun 2023	II-20
Gambar 2.16.	Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Dari Bencana Alam (Atas) dan Jasa Lingkungan Pengaturan Kualitas Udara (Bawah) Tahun 2023	II-21
Gambar 2.17.	Peta Jasa Lingkungan Jasa Budaya Untuk Ruang Hidup dan Tempat Tinggal Tahun 2023	II-22
Gambar 2.18.	Peta Jasa Lingkungan Jasa Budaya Untuk Ekowisata Tahun 2023	II-23
Gambar 2.19.	Peta Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan Tanah Dan Pemelihara Kesuburan Tahun 2023	II-24
Gambar 2.20.	Jasa Lingkungan Pendukung Produksi Primer (Atas) dan Biodiversitas (Bawah) Tahun 2023	II-25
Gambar 2.21.	Jenis Bambu	II-26
Gambar 2.22.	Varietas Tanaman Lokal di Kabupaten Sleman	II-27
Gambar 2.23.	Peta Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Sleman Tahun 2023	II-30
Gambar 2.24.	Peta Status Air Kabupaten Sleman Tahun 2023	II-33
Gambar 2.25.	Sebaran Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat di Kabupaten Sleman Tahun 2024	II-42
Gambar 2.26.	Peta Perwujudan Kesesuaian Pola Ruang Kabupaten Sleman Tahun 2024	II-46
Gambar 2.27	Peta Bahaya Letusan Gunungapi Merapi	II-49
Gambar 2.28.	Peta Bahaya Banjir Lahan	II-50
Gambar 2.29.	Peta Bahaya Cuaca Ekstrem	II-50
Gambar 2.30.	Peta Bahaya Gempa Bumi	II-51
Gambar 2.31.	Peta Bahaya Tanah Longsor	II-52
Gambar 2.32.	Peta Bahaya Kekeringan Hidrologis	II-52
Gambar 2.33.	Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan	II-53
Gambar 2.34.	Ilustrasi Kuadran Kerentanan Perubahan Iklim	II-55
Gambar 2.35.	Indeks Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim	II-59
Gambar 2.36.	Indeks Keterpaparan dan Sensitifitas Terhadap Perubahan Iklim	II-59
Gambar 2.37.	Infografis Permasalahan Pertanahan di Kabupaten Sleman Tahun 2024	II-174
Gambar 2.38.	Contoh Sistem Informasi Kalurahan Berbasis Web	II-184
Gambar 2.39.	Stasiun Pengisian Tangki Air di Wilayah Sleman Utara	II-281
Gambar 2.40.	Perkembangan Kegiatan Pariwisata di Area Terdampak Langsung	II-291

Gambar 3.1. Keterkaitan Visi RPJMN, RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta, dan RPJMD Kabupaten Sleman III-2
Gambar 3.2. Kawasan Pembangunan Kabupaten Sleman III-46
Gambar 3.3. Fokus Pengembangan Kawasan Sleman Utara Sebagai Kawasan Perlindungan Alam dan Wisata Alam III-47
Gambar 3.4. Fokus Pengembangan Kawasan Sleman Tengah Sebagai Kawasan Perkotaan Cerdas dan Berkelanjutan III-49
Gambar 3.5. Fokus Pengembangan Kawasan Sleman Timur Sebagai Kawasan Cagar Budaya dan Ekonomi Kreatif III-50
Gambar 3.6. Fokus Pengembangan Kawasan Sleman Barat Sebagai Kawasan Lumbung Pangan dan Agrowisata III-51

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Akses Sanitasi Layak (Termasuk Aman) di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2020-2024 (%) II-42
Grafik 2.2. Perkembangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Agregat di Kabupaten Sleman Tahun 2019-2023 (Gg CO2e) II-48
Grafik 2.3. Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024 II-54
Grafik 2.4. Komposisi Penduduk Menurut Umur di Kabupaten Sleman Tahun 2024 (jiwa) II-60
Grafik 2.5. Piramida Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2025-2030 ..... II-62
Grafik 2.6. Proyeksi Proporsi Penduduk Kabupaten Sleman Menurut Kelompok Umur Tahun 2025-2030 (%) II-63
Grafik 2.7. Proyeksi Angka Ketergantungan Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2025-2030 (%) II-63
Grafik 2.8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (%) II-66
Grafik 2.9. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Indonesia Tahun 2020-2024 ..... II-69
Grafik 2.10. PDRB Per Kapita Kabupaten Sleman, DIY, dan Indonesia Tahun 2020 - 2024 ..... II-71
Grafik 2.11. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sleman, DIY, dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-71
Grafik 2.12. Indeks Gini Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Indonesia Tahun 2020 – 2024 ..... II-72
Grafik 2.13. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sleman, DIY, dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-73
Grafik 2.14. Usia Harapan Hidup Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ..... II-74
Grafik 2.15. Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ..... II-75
Grafik 2.16. Indeks Keluarga Sehat Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2024 ..... II-75
Grafik 2.17. Indeks Keluarga Sehat per Kapanewon Tahun 2024 di Kabupaten Sleman II-76
Grafik 2.18. Angka Prevalensi Stunting Kabupaten Sleman Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2020-2024 ..... II-77
Grafik 2.19. Angka Prevalensi Stunting Kabupaten Sleman Pemantauan Status Gizi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat Tahun 2020-2024 ..... II-78
Grafik 2.20. Kondisi Kesehatan Lingkungan Masyarakat Kabupaten Sleman Tahun 2023 ..... II-78
Grafik 2.21. Indeks Pembangunan Olahraga Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024 ..... II-80
Grafik 2.22. Rata–Rata Lama Sekolah Kabupaten Sleman, DIY, dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-82
Grafik 2.23. Gap Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ..... II-83
Grafik 2.24. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sleman, DIY dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-84
Grafik 2.25. Rata-Rata Kemampuan Literasi Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024 ..... II-85
Grafik 2.26. Rata-Rata Kemampuan Numerasi Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024 ..... II-85
Grafik 2.27. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Sleman Tahun 2022-2024 ..... II-86
Grafik 2.28. Indeks Literasi Digital Kabupaten Sleman, DIY dan Nasional Tahun 2021-2023 ..... II-88
Grafik 2.29. Indeks Pilar Literasi Digital di Kabupaten Sleman Tahun 2021-2023 ..... II-89
Grafik 2.30. Persentase Pelestarian Warisan Budaya Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (%) II-93

Grafik 2.31. Jumlah Pelestarian Rincian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024 (objek)..... II-94
Grafik 2.32. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024..... II-94
Grafik 2.33. Indeks Ketahanan Keluarga Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024 II-97
Grafik 2.34. Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024..... II-98
Grafik 2.35. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sleman, DIY, dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-99
Grafik 2.36. Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Sleman dan DIY Tahun 2020-2024..... II-100
Grafik 2.37. Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Sleman Tahun 2020-2023..... II-101
Grafik 2.38. Angka Dependency Ratio Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2020 – 2024 ..... II-104
Grafik 2.39. Rasio Kewirausahaan Kabupaten Sleman dan DIY Tahun 2020-2024 (%)..... II-108
Grafik 2.40. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sleman, DIY, dan Nasional Tahun 2020–2024 ..... II-108
Grafik 2.41. Penanaman Modal Tetap Bruto Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2020-2024 (%) II-111
Grafik 2.42. Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Sleman dan DIY Tahun 2020-2024 ..... II-116
Grafik 2.43. Ketersediaan Rumah Layak Huni dan Layak Huni Terjangkau Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ..... II-117
Grafik 2.44. Persentase Desa Mandiri Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 .. II-118
Grafik 2.45. Angka Kejahatan per 100.000 penduduk (Crime Rate) Kabupaten Sleman 2020-2024 ..... II-119
Grafik 2.46. Data Kasus Kejahatan Jalanan di POLRES Sleman Tahun 2020-2024 (Kasus) II-120
Grafik 2.47. Tingkat Inflasi Kabupaten Sleman dan Indonesia Tahun 2020 - 2024 (%)..... II-122
Grafik 2.48. Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Sleman Tahun 2023-2024 . II-124
Grafik 2.49. Indeks SPBE Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024..... II-125
Grafik 2.50. Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Sleman Tahun 2022-2024... II-125
Grafik 2.51. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD dan SMP di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (%) II-134
Grafik 2.52. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, SD dan SMP di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (%) II-135
Grafik 2.53. Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD, SD dan SMP di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (%) II-136
Grafik 2.54. Anak Tidak Sekolah (ATS) Berdasarkan Jenjang Usia di ..... Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (Anak)..... II-137
Grafik 2.55. Persentase Guru ASN yang Memenuhi Kualifikasi Pendidikan Terakhir S1/D4 yang Bersertifikat Pendidik di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (%) II-137
Grafik 2.56. Persentase Guru yang Layak Mengajar Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (%) II-138
Grafik 2.57. Persentase Sarana Prasarana PAUD, SD, SMP dan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Sleman dalam Kondisi Baik Tahun 2020-2024 (%) II-138
Grafik 2.58. Persentase Satuan Pendidikan PAUD, SD dan SMP Terakreditasi A Tahun 2020-2024 ..... II-139
Grafik 2.59. Angka Kematian Bayi Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ..... II-146
Grafik 2.60. Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ..... II-147
Grafik 2.61. Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup Tahun 2020-2024..... II-147
Grafik 2.62. Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024..... II-178
Grafik 2.63. Persentase Desa Mandiri Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 .. II-184

Grafik 2.64. Total Fertility Rate Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ..... II-190
Grafik 2.65. Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2022-2024 ..... II-204
Grafik 2.66. Tingkat Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat di Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024 ..... II-206
Grafik 2.67. Jumlah Produksi Ikan dan Kebutuhan Ikan di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ..... II-210
Grafik 2.68. Luas Perairan Ikan Budidaya Kolam, Keramba dan Mina Padi di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ..... II-210
Grafik 2.69. Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (orang) II-211
Grafik 2.70. Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara dan Nusantara di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (Hari) II-212
Grafik 2.71. Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara (US$) dan Wisatawan Nusantara (Rp di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ..... II-213
Grafik 2.72. Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ..... II-213
Grafik 2.73. Luas Sawah Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ..... II-214
Grafik 2.74. Nilai Ekspor di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ..... II-216
Grafik 2.75. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 II-218
Grafik 2.76. Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ..... II-219
Grafik 2.77. Nilai AKIP Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ..... II-220
Grafik 2.78. Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2022 ..... II-221
Grafik 2.79. Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Tahun 2021-2024 ..... II-226
Grafik 2.80. Indeks Sistim Merit Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ..... II-226
Grafik 2.81. Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ..... II-230
Grafik 2.82. Nilai Kapabilitas APIP Kabupaten Sleman tahun 2022-2024 ..... II-231
Grafik 2.83. Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024 ..... II-235
Grafik 2.84. Jumlah Kasus NAPZA di Kabupaten Sleman Tahun 2020 - 2024. II-235
Grafik 2.85. SILPA dan Surplus (Defisit) Realisasi APBD Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah) II-241
Grafik 2.86. Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Sleman Tahun 2020 – 2024 ..... II-243
Grafik 2.87. Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 – 2024 ..... II-244
Grafik 2.88. Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 – 2024 ..... II-244
Grafik 2.89. Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 – 2024 ..... II-245
Grafik 2.90. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (Milyar Rp) II-246
Grafik 2.91. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (%) II-246
Grafik 2.92. Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 – 2024 ..... II-247
Grafik 2.93. Pertumbuhan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 ..... II-247
Grafik 2.94. Rincian Pendapatan Transfer APBD Kabupaten Sleman Tahun 2020 - 2024 (Milyar Rupiah) II-248
Grafik 2.95. Persentase Share dan Pertumbuhan Pendapatan Transfer Kabupaten Sleman Tahun 2020 – 2024 (%) II-249
Grafik 2.96. Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 – 2024 (Milyar Rupiah) II-250
Grafik 2.97. Proporsi Komponen Belanja Kabupaten Sleman Tahun 2020 – 2024 ..... II-250
Grafik 2.98. Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 - 2024 (%) II-251

Grafik 2.99. Pertumbuhan Komponen Belanja Kabupaten Sleman Tahun 2020 – 2024 ..... II-251
Grafik 2.100. Persentase Capaian Indikator TPB II-304

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan diperlukan untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Pemerintah daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam menyusun perencanaan pembangunan, berkewajiban mempedomani dan mengacu perencanaan pembangunan nasional dan mengintegrasikan perencanaan daerah dengan pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan hukum dalam perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Terkait dengan pembangunan daerah, undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa untuk setiap periode jabatan kepala daerah, harus disusun perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sejak pelantikan kepala daerah. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) karena RPJMD merupakan penjabaran RPJPD, kemudian RPJMD menjadi pedoman bagi daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi pedoman perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Dra. Hj. Kustini Sri Purnomo sebagai Bupati Sleman dan Danang Maharsa, S.E., sebagai Wakil Bupati Sleman, dan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman terpilih pada tanggal 20 Februari 2025, yaitu H. Harda Kiswaya, S.E.,M.Si dan Danang Maharsa, S.E., maka Pemerintah Kabupaten Sleman berkewajiban menyusun RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029.

RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan tahapan pertama RPJPD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045 untuk mewujudkan Sleman yang Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan, dengan arah kebijakan menguatkan potensi daerah. Pada periode ini, fokus utama pembangunan adalah penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pembangunan sarana prasarana dan ruang wilayah yang kelanjutan. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 ini juga melanjutkan pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, yaitu RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 serta RPJPD Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 harus memperhatikan capaian-capaian yang telah

diwujudkan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sleman 2021-2026 dan RPJPD Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 serta memperhatikan evaluasi kinerja pembangunan lima tahun sebelumnya.

Selain itu, RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 memperhatikan visi pembangunan dalam RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 dan RPJPD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045 yang menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan budaya, pengentasan kemiskinan, serta keberlanjutan lingkungan. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang menekankan pada transformasi ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan sosial, serta pembangunan infrastruktur dan lingkungan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 harus memastikan keterpaduan dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional agar tercipta koordinasi, sinkronisasi dan integrasi berbagai program pembangunan, konsisten, sinergi, dan selaras, sehingga program pembangunan dapat berjalan efisien dan efektif, dan tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal.

Pembangunan daerah pada dasarnya memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun tidak dipungkiri, dengan meningkatnya berbagai tuntutan kehidupan sosial ekonomi masyarakat baik pada arus lokal, nasional, bahkan global, menimbulkan dampak penurunan, baik secara kuantitas maupun kualitas terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup serta terjadinya perubahan iklim (*climate change*) yang menyebabkan banjir, kekeringan, pencemaran udara dan air serta bencana lainnya, tidak terkecuali di Kabupaten Sleman. Hal ini menjadi tantangan dan komitmen Kabupaten Sleman untuk dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dengan memperhatikan kemampuan daya dukung dan daya tampung wilayah, sehingga tercipta keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia dengan keberlanjutan dalam pembangunan dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan. Aspek dalam pembangunan berkelanjutan ini bukan hanya terbatas dalam aspek lingkungan hidup, namun juga dalam aspek sosial, ekonomi dan hukum dan tata kelola. Beberapa isu pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sleman meliputi pelestarian lingkungan hidup, pengembangan dan pemerataan infrastruktur yang berkelanjutan, penguatan sumber daya manusia (SDM) berbasis nilai kebudayaan yang memiliki kepedulian lingkungan hingga pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, merupakan isu yang dalam lima tahun ke depan akan diprioritaskan dalam pembangunan di Kabupaten Sleman untuk mewujudkan pembangunan daerah yang memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Untuk perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, Kabupaten Sleman berkomitmen untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan menuju masa depan yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh dengan menyelaraskan pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan perlindungan lingkungan hidup. Sebagai upaya memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kabupaten Sleman telah menganalisis tujuan pembangunan berkelanjutan secara sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memberikan arahan pembangunan daerah, sehingga tercipta keselarasan antara pemanfaatan sumber daya yang tersedia dengan penggunaannya, terutama dalam mencapai target-target tujuan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 telah

mengintegrasikan isu-isu pembangunan berkelanjutan serta rumusan skenario pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan proyeksi ketercapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) serta kondisi lingkungan hidup yang menjadi daya dukung pencapaian TPB, sesuai dengan levelling RPJMD.

RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi dokumen perencanaan yang komprehensif dan mampu memberikan arah kebijakan yang jelas dalam upaya mewujudkan masyarakat Sleman yang maju, adil, makmur, lestari dan berkeadaban. RPJMD ini akan menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, dengan tetap mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan serta partisipasi aktif masyarakat.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

8. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6840);
15. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
25. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1075);
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 12);
31. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2027 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 10);
33. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 8);
34. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 13);
35. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131);
36. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);

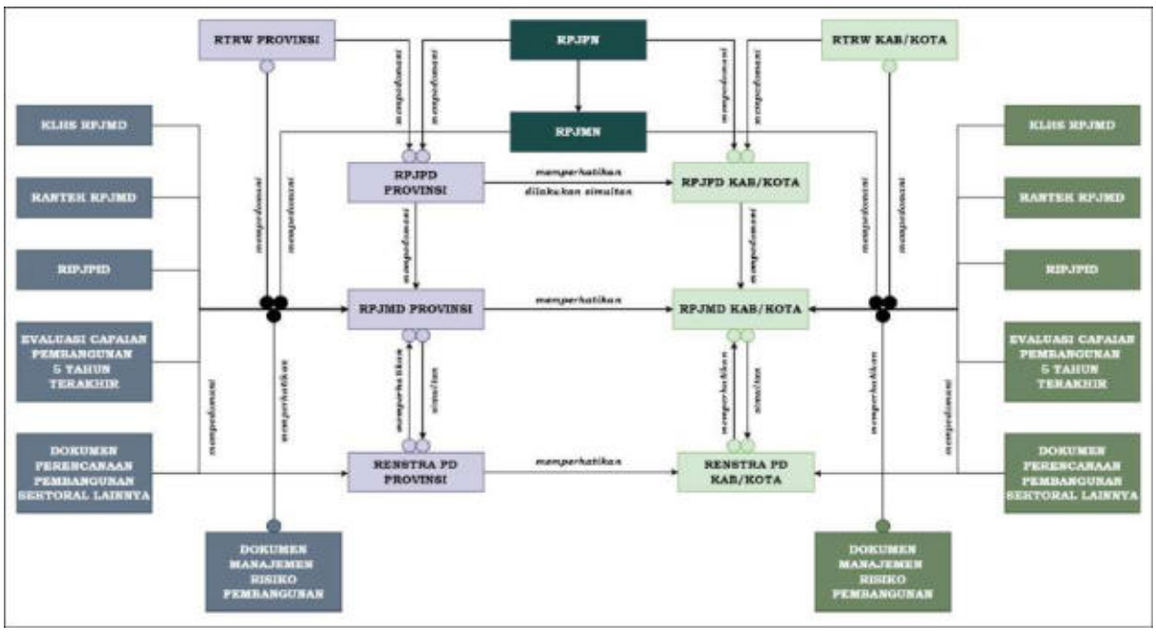
37. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten Tahun 2023-2043 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 9);
38. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2027 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 78);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1 dan 157);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 158);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 6);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 13, Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 182);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 202);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 5).

1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Selama masa jabatan Bupati H. Harda Kiswaya, S.E.,M.Si dan Wakil Bupati Danang Maharsa, S.E., RPJMD ini menjadi acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang memuat antara lain mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 sebagai bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan Nasional dan perencanaan pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dalam penyusunannya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, RPJPD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045, RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027, dan RPJPD Kabupaten Sleman Tahun 2025-

2045. Telaahan terhadap dokumen perencanaan tersebut dimaksudkan agar RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 selaras dengan kebijakan pembangunan Nasional dan pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, sehingga pembangunan antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah selaras dan bersinergi. Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari Gambar 1.1.



Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Gambar 1.1. Kedudukan RPJMD Kabupaten Sleman Terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya

Secara lebih rinci, hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dijelaskan pada bagian di bawah ini.

1.3.1 RPJMD Kabupaten Sleman dengan RPJMN

Dalam rangka penyelarasan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029, dilakukan identifikasi Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai pedoman untuk merumuskan arah pembangunan Kabupaten Sleman yang diselaraskan dengan Visi, Misi dan Janji Politik Kepala Daerah Kabupaten Sleman terpilih. Adapun Visi dan Misi dalam RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Visi Presiden dan Wakil Presiden:

"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

Misi Presiden dan Wakil Presiden:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

1.3.2 RPJMD Kabupaten Sleman dengan RPJMD DIY

Dalam rangka penyelarasan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027, dilakukan identifikasi Visi dan Misi RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pedoman untuk merumuskan arah pembangunan Kabupaten Sleman yang diselaraskan dengan Visi, Misi dan Janji Politik Kepala Daerah Kabupaten Sleman terpilih. Adapun visi dan misi dalam dokumen RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 sebagai berikut:

Visi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta:

"Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi".

Misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta:

1. Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan;
2. Memberdayakan kawasan selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan/ pengelolaan sumber daya setempat;
3. Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi; dan
4. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik.

1.3.3 RPJMD Kabupaten Sleman dengan RPJPD Kabupaten Sleman

Berdasarkan bagan alur pada Gambar 1.1 di atas, bahwa dokumen RPJMD mempedomani RPJPD. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 merupakan RPJMD Tahap I dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045 untuk mencapai Visi dari pembangunan jangka panjang Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045.

Visi RPJPD Kabupaten Sleman tahun 2025-2045 adalah: "Sleman yang Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan". Kata "Maju" dimaknai sebagai keadaan masyarakat yang sejahtera, memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, lepas landas dan memiliki kemampuan dasar untuk menghadapi persaingan dunia global dengan kemampuan budaya dan teknologi yang unggul. Kata "Sejahtera" dimaknai sebagai perwujudan keadaan masyarakat yang

tercukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah baik kebutuhan dasar, kebutuhan tumbuh dan kebutuhan berkembang. Kata “Berbudaya” dimaknai sebagai perwujudan budaya, baik pelestarian dan pemaknaan budaya tradisional serta pengembangan budaya modern yang adaptif dan siap berakulturasi dengan budaya global. Adapun kata “Berkelanjutan” dimaknai sebagai pembangunan yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan serta bersifat inklusif baik bagi mereka yang memiliki perbedaan kemampuan maupun bagi mereka yang tidak berkesempatan menyuarakan kebutuhannya.

Visi ini diwujudkan melalui 5 (lima) Misi, yaitu:

1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Tangkas, Inovatif, dan Akuntabel;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul;
3. Menguatkan Sosial Budaya Masyarakat yang Berbudi Luhur dan Saling Menghargai;
4. Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan; dan
5. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas, Merata, Ramah Lingkungan dan Berkesinambungan.

1.3.4 RPJMD Kabupaten Sleman dengan Rencana Tata Ruang

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan dan mempertimbangkan pola ruang dan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Daerah Istimewa Yogyakarta dan RTRW Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041 sebagai dasar dalam penetapan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Sleman. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 juga memuat strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan sebagaimana tujuan dari RTRW Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang dengan asumsi meliputi:

1. Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional;
2. Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya;
3. Pengembangan kawasan strategis yang berpengaruh dalam bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup; dan
4. Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Telaahan RTRW juga bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan

kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

1.3.5 RPJMD Kabupaten Sleman dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 mempedomani hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029. RPJMD memberikan kerangka teknis dan operasional untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, sementara Kajian Lingkungan Hidup Strategis menganalisis kondisi lingkungan dan dampak potensial dari program pembangunan terhadap lingkungan. Keduanya harus terintegrasi agar perencanaan pembangunan di Kabupaten Sleman memperhatikan aspek lingkungan untuk pembangunan keberlanjutan.

Pengkajian pembangunan berkelanjutan ini mengacu pada tujuan pembangunan berkelanjutan mencakup kondisi umum daerah (daya dukung, daya tampung, geografis, demografi, keuangan daerah), capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan dengan pembagian urusan, kewenangan, dan karakteristik daerah, serta pembagian peran antara pemerintah daerah serta organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya. Dari 203 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tersebut, 65% telah tercapai.

Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 terdapat 7 (tujuh) isu strategis, yaitu sebagai berikut:
1. Pola pikir sumber daya manusia yang belum sejalan dengan pembangunan berkelanjutan;
2. Belum efektifnya tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum;
3. Kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan;
4. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai tata ruang;
5. Infrastruktur yang belum berkonsep pembangunan berkelanjutan;
6. Tingginya kerawanan bencana alam; dan
7. Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.

Selanjutnya, KLHS merumuskan skenario rekomendasi kebijakan pembangunan berkelanjutan. Skenario pembangunan berkelanjutan tersebut berdasarkan proyeksi capaian indikator TPB dengan jangka waktu periode RPJMD dan masa pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2030.

1.3.6 RPJMD Kabupaten Sleman dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) Daerah (RIPJPID)

Pembangunan daerah bukan sekedar pembangunan fisik dan infrastruktur tetapi lebih jauh menyangkut bagaimana masyarakatnya tumbuh menjadi entitas yang mandiri, berdaya saing dan mampu mengelola potensi lokal secara berkelanjutan. Kemandirian masyarakat tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan mencukupi kebutuhan sendiri, tetapi kapasitas untuk menciptakan nilai tambah, membangun jejaring usaha, serta menyerap teknologi dan pengetahuan baru yang relevan.

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan dan penyelesaian masalah harus berbasis riset dan inovasi. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 juga mempedomani Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah. Elemen-elemen ekosistem riset dan inovasi daerah dapat digunakan sebagai pilar penting untuk mengatasi permasalahan

pembangunan daerah, melalui pemanfaatan hasil riset dan inovasi, yang terdiri atas:
1. Kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi di daerah;
2. Kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi;
3. Kemitraan riset dan inovasi;
4. Budaya riset dan inovasi;
5. Keterpaduan Riset dan Inovasi di daerah;
6. Penyelarasan dengan perkembangan global.

Salah satu produk unggulan Daerah (PUD) yang prospektif dapat dikembangkan, menurut hasil kajian dalam proses penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek di Daerah, adalah ekonomi kreatif, khususnya sektor: kuliner, seni pertunjukan, film, animasi, dan video, fesyen, aplikasi, desain interior, arsitektur, periklanan, fotografi, dan kriya. Di samping prospek pengembangan ekonomi kreatif, Kabupaten Sleman juga menghadapi permasalahan yang cukup serius terkait sampah. Produksi sampah yang terus meningkat tidak diikuti dengan peningkatan pengelolaan sampah. Persentase sampah yang terkelola masih sangat rendah.

Pengembangan ekonomi kreatif dan penanganan sampah merupakan permasalahan yang kompleks, yang ditetapkan sebagai program super prioritas yang diselesaikan menggunakan pendekatan ekosistem riset dan inovasi. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, dan media, untuk menciptakan ekosistem yang kondusif. Tanpa kolaborasi, pendekatan yang diambil akan bersifat sektoral, parsial, dan pada akhirnya tidak mampu menjawab akar persoalan secara komprehensif.

1.3.7 RPJMD Kabupaten Sleman dengan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P)

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan, penyusunan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P) merupakan bagian dari RPJMD. Penyelenggaraan pengelolaan perkotaan terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang memenuhi prinsip inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, keterpaduan, sinergi, keterbukaan, berketahanan, efisien dan akuntabel. RP2P dalam RPJMD terdiri atas:
a. Rencana sistem pelayanan perkotaan merupakan bagian dari program pembangunan daerah; dan
b. Rencana pendanaan indikatif merupakan bagian dari kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah.

RP2P Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 diintegrasikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2021, wilayah perkotaan Kabupaten Sleman sesuai arahan struktur ruang yang memiliki hubungan fungsional secara hierarkis berupa Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif.

1.3.8 RPJMD Kabupaten Sleman dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya

Selain selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, penyusunan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 juga harus memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral baik tingkat

nasional, provinsi maupun daerah. Beberapa dokumen rencana tersebut antara lain: 1) Grand Desain Kependudukan; 2) Master Plan Pengembangan Smart City; 3) Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah; 4) Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi; 5) Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan; 6) Rencana Penanggulangan Bencana; 7) Grand Desain Keistimewaan; dan sebagainya.

1.3.9 RPJMD Kabupaten Sleman dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)

RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap perangkat daerah.

Renstra PD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun. Renstra PD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Anggaran PD (RKA-PD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

1.4 Maksud dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Sleman sesuai dengan Visi, Misi, dan Program Strategis dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa jabatan 2025-2029, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Adapun tujuan penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan dan sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menyusun Renstra PD Tahun 2025-2029;
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
3. Menerjemahkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sleman ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing perangkat daerah, dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045;
4. Menetapkan berbagai program prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja; dan
5. Menetapkan indikator kinerja perangkat daerah dan indikator kinerja Bupati dan Wakil Bupati Sleman sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sleman Periode 2025-2029.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana

Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang terdiri dari 5 (lima) bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Sleman serta sistematika.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Sleman secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya gambaran umum kondisi daerah yang terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing serta aspek pelayanan umum, kemudian gambaran keuangan daerah hingga identifikasi permasalahan dan perumusan isu strategis.

BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Periode 2025-2029, tujuan dan sasaran yang dirumuskan untuk masing-masing misi serta indikator dan target yang akan dicapai selama periode tersebut. Bab ini juga menyajikan strategi dan arah kebijakan serta program prioritas pembangunan daerah.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menyajikan program yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang dibagi dalam setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan, indikator kinerja program dan target per tahun serta pagu indikatif anggaran yang diperlukan pada masing-masing program. Bab ini juga menyajikan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan visi dan misi, dituangkan dalam indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah beserta target capaian tahunan.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari dua subbab, yaitu pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

Penjabaran gambaran umum daerah terdiri dari gambaran umum kondisi daerah, gambaran keuangan daerah serta permasalahan dan isu strategis. Gambaran umum kondisi daerah terdiri dari: (1) aspek geografi dan demografi, (2) aspek kesejahteraan masyarakat, (3) aspek daya saing, dan (4) aspek pelayanan umum yang pada bagian akhir akan ditambahi subbab suplementasi dari aspek kajian lingkungan hidup strategis. Analisis dan pendeskripsian terhadap gambaran umum kondisi Kabupaten Sleman dilakukan berdasarkan sejumlah data yang disajikan dalam bentuk data *time series* dan *cross section*. Ragam jenis data yang disajikan secara utuh maupun hasil pengolahan kembali data yang bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan perangkat daerah (PD) berdasarkan periode data yang tersedia, serta sumber pustaka resmi lain yang terkait dengan kondisi sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kabupaten Sleman.

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis

Kabupaten Sleman secara geografis terletak pada 110°13’00” sampai dengan 110°33’00” Bujur Timur dan 7°34’51” sampai dengan 7°47’03” Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah seluas 574,82 km^2. Kabupaten Sleman memiliki batas wilayah sebagai berikut:

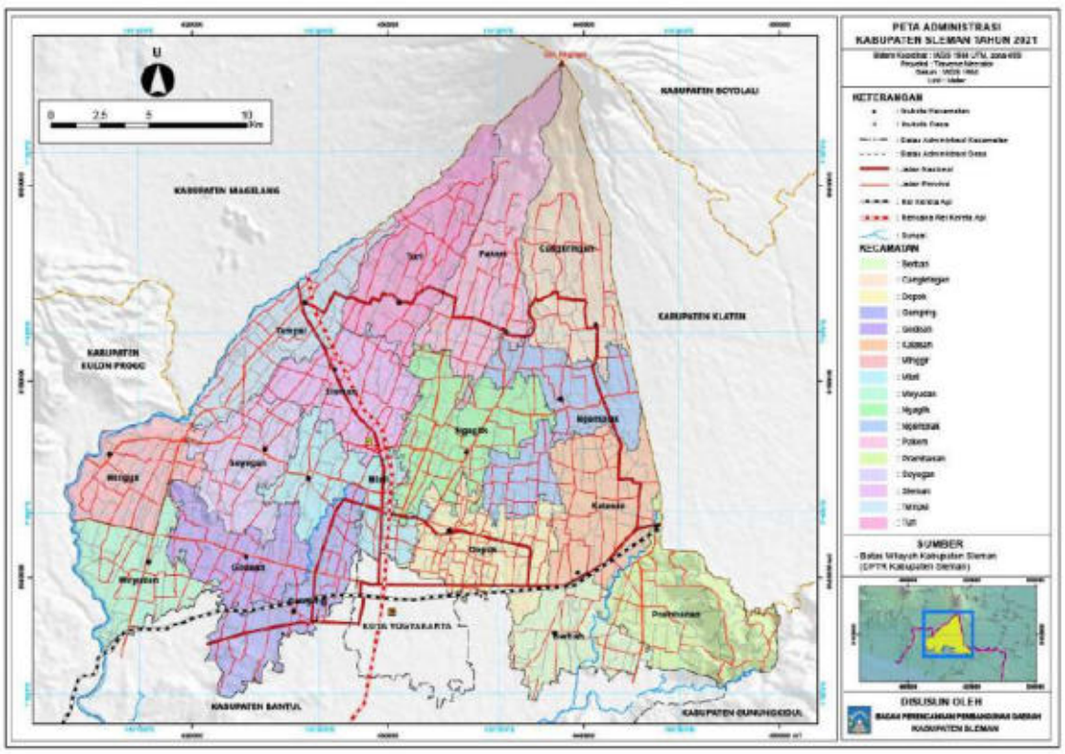
- Batas Sebelah Utara: Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;
- Batas Sebelah Selatan: Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Batas Sebelah Barat: Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah; dan
- Batas Sebelah Timur: Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Sleman merupakan wilayah yang cukup strategis karena berada pada jalur utama yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah, serta merupakan salah satu titik pintu masuk ke wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Bandara Adisutjipto, sehingga menjadi titik penting dalam transportasi dan perdagangan antar wilayah. Meskipun Bandara Adisutjipto sekarang hanya melayani penerbangan domestik terbatas, pesawat presiden, pesawat militer dan *private jet*, serta tidak lagi melayani penerbangan internasional.

Selain itu, adanya pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Jawa Tengah serta Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Yogyakarta Airport Kulon Progo yang melewati wilayah Kabupaten Sleman akan meningkatkan aksesibilitas ke dan dari Yogyakarta, yang memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah bepergian antara kota-kota di sekitarnya, seperti Solo, Semarang, dan Jakarta. Peningkatan aksesibilitas ini membantu mempercepat pergerakan barang dan orang, yang nantinya dapat meningkatkan konektivitas dan mobilitas penduduk. Jalan tol juga akan menjadi pendorong ekonomi regional. Perusahaan akan lebih efisien dalam mendistribusikan barang, mengakses pasar yang lebih besar, dan dalam ekspansi bisnis, yang tentunya apabila Kabupaten Sleman dapat memanfaatkan peluang tersebut akan dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan penduduk setempat, dan memperkuat ekonomi

daerah. Beberapa titik akan dibuka sebagai *exit toll* atau yang dikenal *on ramp* dan *off ramp* sebagai keluar masuk kendaraan. Hal ini tentu akan berdampak pada kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi pada wilayah tersebut.

Secara administratif, Kabupaten Sleman terdiri atas 17 wilayah kapanewon, 86 kalurahan, dan 1.212 padukuhan. Kapanewon dengan wilayah paling luas adalah Cangkringan (4.799 Ha), dan yang paling sempit adalah Berbah (2.299 Ha). Adapun kapanewon dengan padukuhan terbanyak adalah Tempel (98 padukuhan), dan kapanewon dengan padukuhan paling sedikit adalah Turi (54 padukuhan). Adapun kapanewon dengan kalurahan terbanyak adalah Tempel (8 kalurahan), dan kapanewon dengan kalurahan paling sedikit adalah Depok (3 kalurahan).



Sumber: Bappeda Kabupaten Sleman, 2021

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Sleman

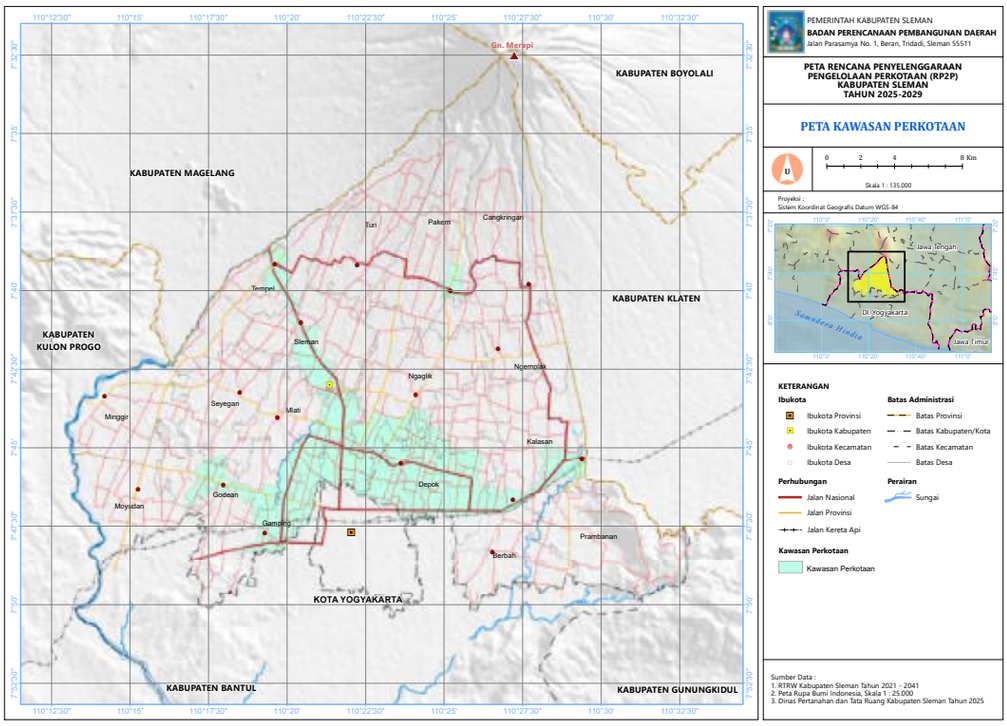
Kondisi geografis Kabupaten Sleman secara umum terbagi menjadi klasifikasi dua wilayah dataran yaitu dataran rendah landai dengan dominasi persawahan di Kabupaten Sleman bagian selatan, dan dataran tinggi tanah kering dengan dominasi perkebunan serta memiliki permukaan miring ke selatan dengan titik tertinggi di Puncak Gunungapi Merapi di wilayah Kabupaten Sleman bagian utara.

Berdasarkan karakteristik sumber daya, Kabupaten Sleman terbagi menjadi empat wilayah yaitu:

a. Wilayah Utara/lereng Gunungapi Merapi, dimulai dari jalan yang menghubungkan Kapanewon Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan sampai dengan puncak Gunungapi Merapi. Wilayah ini merupakan sumber daya air dan ekowisata yang berorientasi pada aktivitas Gunungapi Merapi dan ekosistemnya.
b. Wilayah Timur, meliputi Kapanewon Prambanan, sebagian Kapanewon Kalasan, dan Kapanewon Berbah. Wilayah ini merupakan pusat wisata budaya, berupa daerah lahan kering, dan sumber bahan batu putih.

c. Wilayah Tengah, yaitu Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang meliputi Kapanewon Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok, dan Gamping. Wilayah ini merupakan pusat pendidikan, perdagangan dan jasa.
d. Wilayah Barat, meliputi Kapanewon Godean, Minggir, Seyegan, dan Moyudan, merupakan daerah pertanian lahan basah yang tersedia cukup air dan sumber bahan baku kegiatan industri kerajinan mendong, bambu, gerabah dan genteng.

Berdasarkan struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman berupa Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat serta secara hierarkis memiliki hubungan fungsional, dengan karakteristik sumber daya kawasan perkotaan dengan sebaran sebagaimana peta berikut.



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman, 2025

Gambar 2.2 Peta Kawasan Perkotaan Kabupaten Sleman

Luasan kawasan perkotaan per kalurahan di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel berikut.

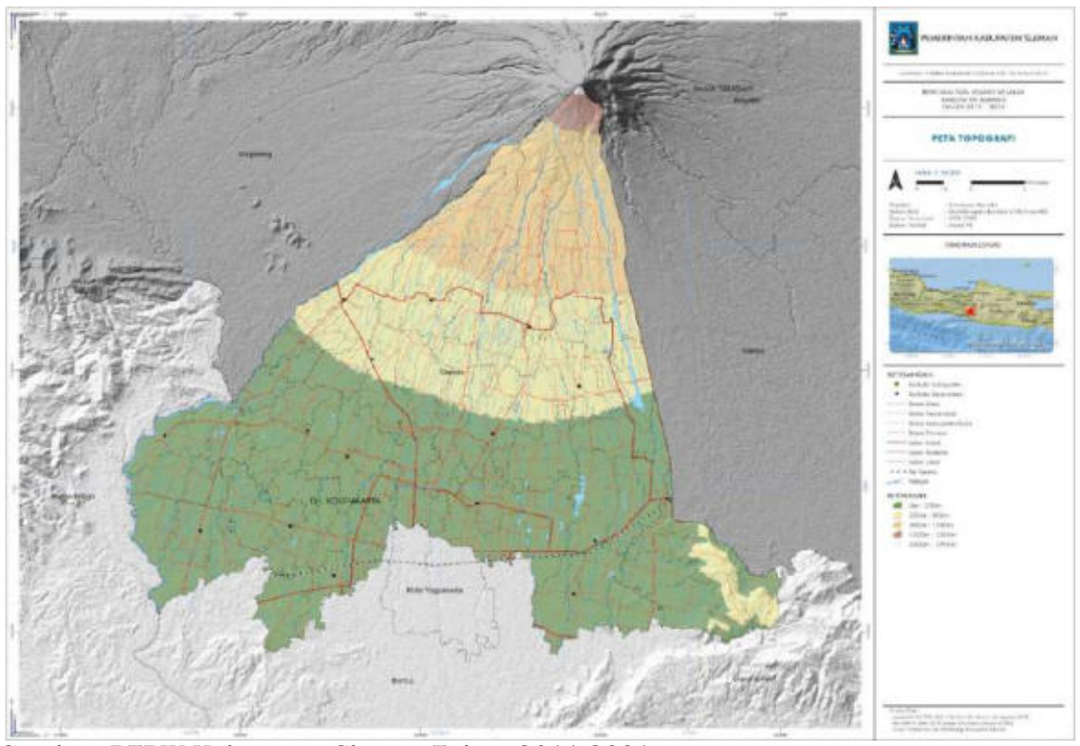
Tabel 2.1. Luas Kawasan Perkotaan Per Kalurahan di Kabupaten Sleman

Kapanewon/ Kalurahan	Luas Kawasan Perkotaan (Ha)	Luas Kalurahan (Ha)	% Luas Kawasan Perkotaan
Moyudan	1,64	545,40	0,30
Sumbersari	1,64	545,40	0,30
Seyegan	39,10	498,74	7,84
Margoluwih	39,10	498,74	7,84
Godean	711,05	1.858,30	38,26
Sidoagung	206,72	305,39	67,69
Sidoarum	216,06	372,25	58,04
Sidokarto	101,10	360,35	28,06
Sidoluhur	176,62	518,76	34,05
Sidomoyo	10,55	301,55	3,50
Gamping	1.636,71	2.356,16	69,47

Kapanewon/ Kalurahan	Luas Kawasan Perkotaan (Ha)	Luas Kalurahan (Ha)	% Luas Kawasan Perkotaan
Ambarketawang	355,61	628,93	56,54
Banyuraden	394,11	986,87	39,94
Nogotirto	343,15	394,17	87,06
Trihanggo	543,84	346,19	157,09
Mlati	1.215,95	1.266,91	95,98
Sendangadi	482,77	533,47	90,50
Sinduadi	733,17	733,44	99,96
Depok	2.749,10	3.213,04	85,56
Caturtunggal	1.035,10	1.035,70	99,94
Condongcatur	858,24	858,24	100,00
Maguwoharjo	855,76	1.319,11	64,87
Berbah	31,04	1.187,60	2,61
Kalitirto	26,16	621,55	4,21
Tegaltirto	4,89	566,04	0,86
Prambanan	68,94	540,88	12,75
Bokoharjo	68,94	540,88	12,75
Kalasan	662,43	2.680,33	24,71
Purwomartani	227,72	1.203,80	18,92
Tamanmartani	182,64	725,32	25,18
Tirtomartani	252,06	751,21	33,55
Ngemplak	121,45	1.901,61	6,39
Umbulmartani	5,44	662,14	0,82
Wedomartani	116,01	1.239,47	9,36
Ngaglik	598,44	1.451,06	41,24
Minomartani	127,20	153,74	82,73
Sariharjo	305,78	687,31	44,49
Sinduharjo	165,46	610,01	27,12
Sleman	736,98	2.543,82	28,97
Caturharjo	67,31	741,78	9,07
Pandowoharjo	21,51	725,07	2,97
Tridadi	384,43	501,92	76,59
Triharjo	263,73	575,05	45,86
Tempel	379,88	1.838,79	20,66
Lumbungrejo	131,44	355,84	36,94
Margorejo	220,67	532,96	41,41
Merdikorejo	5,85	613,90	0,95
Mororejo	21,92	336,09	6,52
Pakem	185,25	979,54	18,91
Harjobinangun	10,87	534,34	2,03
Pakembinangun	174,38	445,20	39,17
Total	**9.136,32**	**22.316,78**	**40,94**

Terkait dengan Prioritas Nasional yang menitikberatkan pada pengembangan infrastruktur, pariwisata, dan ekonomi kreatif, Kabupaten Sleman merupakan lokus dari Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan, yaitu Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, terutama di wilayah timur yang merupakan tempat peninggalan purbakala (candi) sebagai pusat wisata budaya.

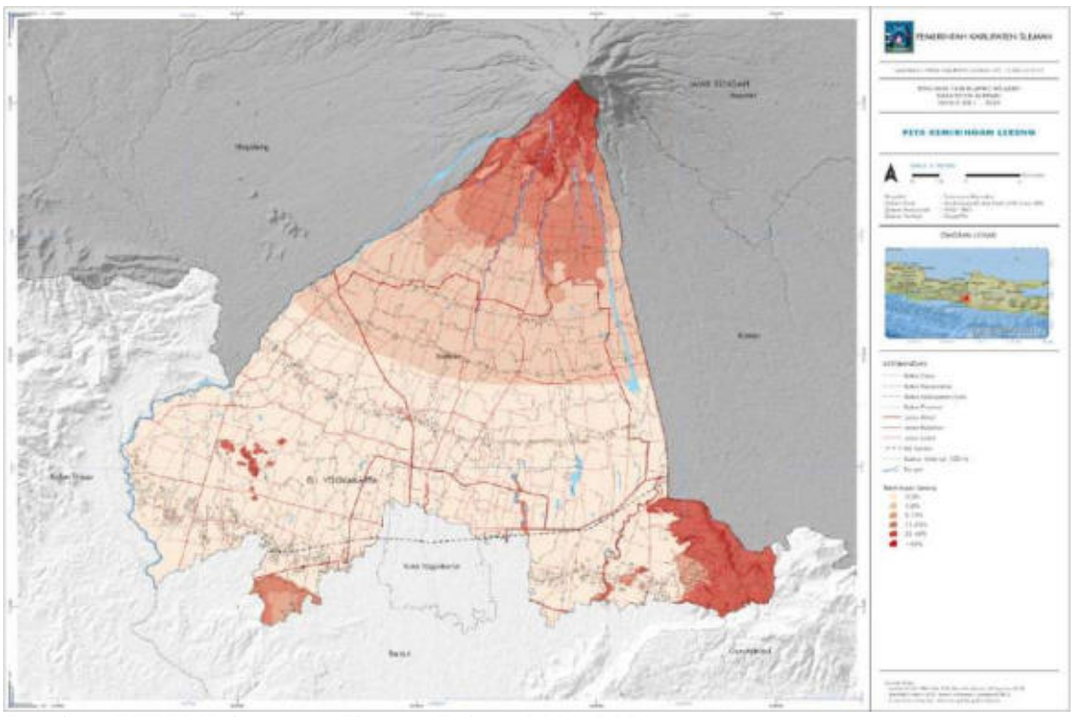
Adapun berdasarkan topografi, wilayah Kabupaten Sleman berada pada ketinggian yang berkisar antara 100 meter sampai dengan lebih dari 2.900 meter di atas permukaan air laut (mdpl). Ketinggian tanahnya dapat dibagi menjadi 5 kelas yaitu ketinggian <250 mdpl, 250-500 mdpl, 500-1.500 mdpl, 1.500-2.500 mdpl dan 2.500-2.900 mdpl. Ketinggian Kabupaten Sleman didominasi pada ketinggian <250 mdpl seluas 35.065,09 Ha atau 61,00% dari luas total wilayah.



Sumber: RTRW Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031

Gambar 2.3 Peta Topografi Kabupaten Sleman

Kemiringan lereng Kabupaten Sleman diklasifikasikan menjadi 6 kelas kemiringan yaitu kemiringan 0-3%; kemiringan 3-8%; kemiringan 8-15%; kemiringan 15-25%, kemiringan 25-45% dan kemiringan > 45%.



Sumber: RTRW Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031

Gambar 2.4 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Sleman

Kemiringan lereng Kabupaten Sleman didominasi kelas kemiringan 0-3% yang terdapat di 15 wilayah kapanewon seluas 34.128 Ha atau 59,32% dari seluruh wilayah Kabupaten Sleman. Sementara kemiringan lereng > 45% seluas 1.616

Ha atau 2,81% dari luas wilayah Kabupaten Sleman yang tersebar di Kapanewon Godean, Gamping, Berbah, Prambanan, Turi, Pakem dan Cangkringan.

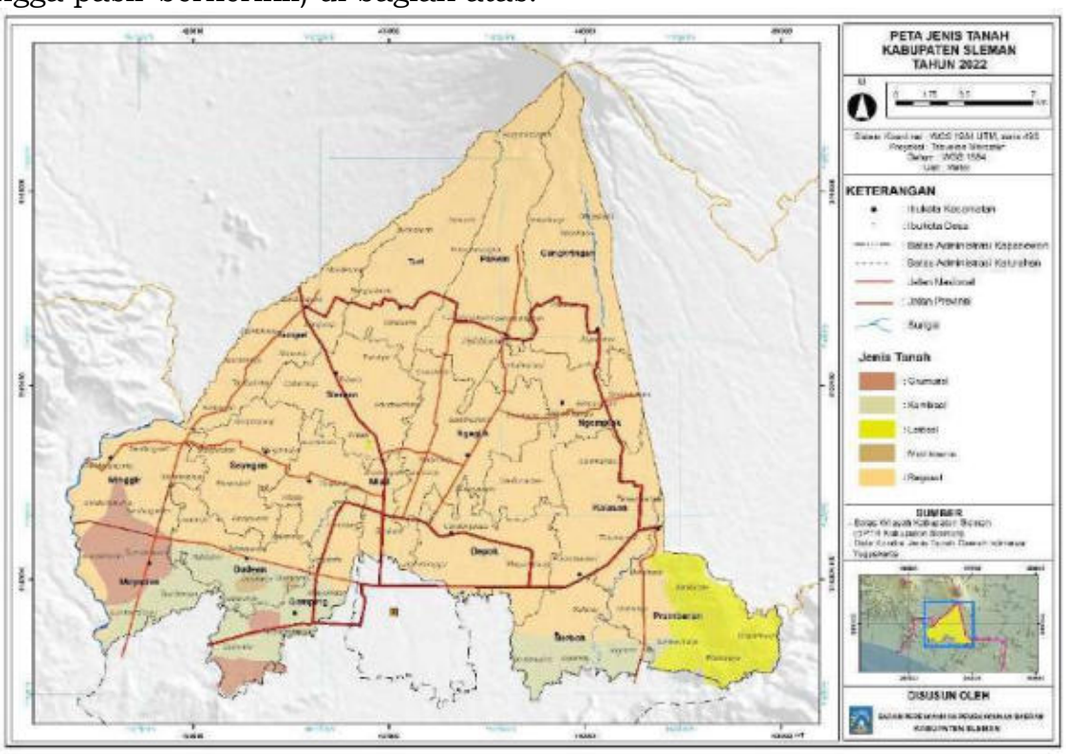
2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Potensi sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti untuk memenuhi kebutuhan pangan, bahan baku industri, dan pariwisata.

2.1.1.2.1 Geologi Wilayah

A. Geologi

Kondisi geologi Kabupaten Sleman didominasi dari keberadaan Gunungapi Merapi. Formasi geologi dapat dibedakan menjadi endapan vulkanik, sedimen, dan batuan terobosan, dengan endapan vulkanik mewakili lebih dari 90% luas wilayah. Material vulkanik Gunungapi Merapi yang berfungsi sebagai lapisan pembawa air tanah (akuifer) yang sudah terurai menjadi material pasir vulkanik, yang sebagian besar merupakan bagian dari endapan vulkanik Merapi muda. Material vulkanik Merapi muda ini dibedakan menjadi 2 unit formasi geologi yaitu formasi Sleman (lebih didominasi oleh endapan piroklastik halus dan tufa) di bagian bawah dan formasi Yogyakarta (lebih didominasi oleh pasir vulkanik berbutir kasar hingga pasir berkerikil) di bagian atas.



Sumber: Bappeda Kabupaten Sleman, 2022

Gambar 2.5 Peta Jenis Tanah Kabupaten Sleman

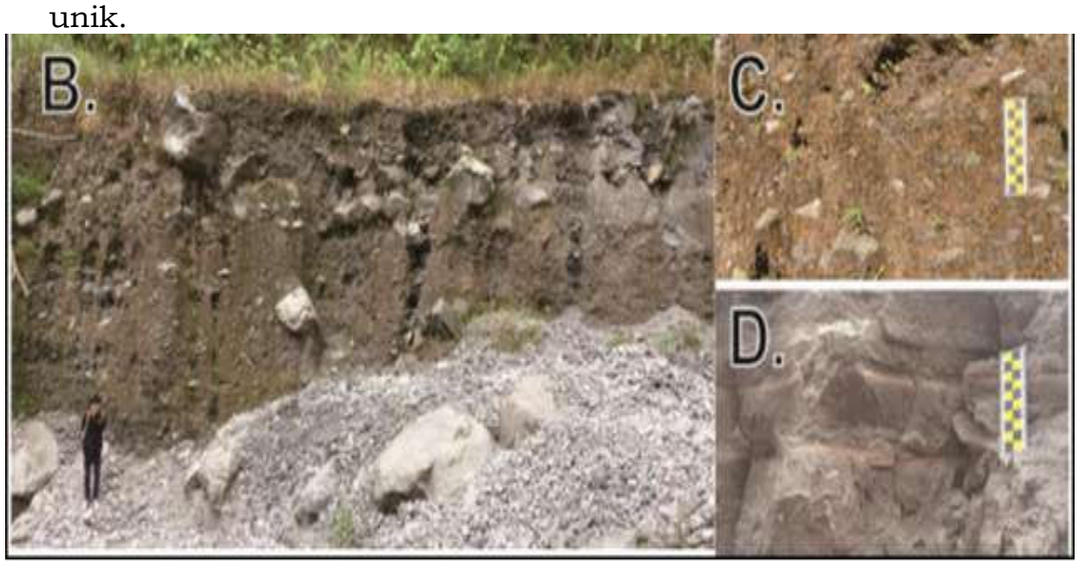
Kabupaten Sleman terdiri dari beberapa jenis tanah yang menjadi pembentuk wilayah yaitu diantaranya jenis tanah latosol, regosol, grumusol, mediteran, dan kombisol. Jenis tanah yang mendominasi adalah jenis tanah regosol yang tersebar pada 47.106 Ha atau 82,10% dari luas wilayah

Kabupaten Sleman dan jenis tanah pembentuk yang paling sedikit adalah Jenis Tanah Mediteran yang hanya seluas 289 Ha atau hanya sekitar 0,50% dari luas wilayah Kabupaten Sleman.

B. Geoheritage

Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 K_HK.01-MEM.G-2021, penetapan warisan geologi (geoheritage) yang kemudian diterjemahkan menjadi kawasan lindung geologi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman sebagai upaya perlindungan terhadap nilai keunikan geologi yang dimiliki. Di Kabupaten Sleman terdapat 7 (tujuh) kawasan geoheritage, dimana 6 (enam) kawasan ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Alam Geologi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, dan 1 (satu) geoheritage yaitu Batugamping Eosen dengan 1 (satu) geoheritage yaitu Batugamping Eosen yang upaya perlindungannya dilakukan melalui penetapan sebagai Cagar Alam. Geoheritage adalah keragaman geologi yang memiliki nilai lebih sebagai suatu warisan karena merupakan rekaman yang pernah atau sedang terjadi di bumi dengan nilai ilmiahnya yang tinggi, langka, unik, dan indah, sehingga dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan pendidikan tentang bumi dan pemberdayaan masyarakat setempat guna peningkatan kesejahteraan. Geoheritage tersebut, meliputi:

1. Kompleks Perbukitan Intrusi Godean di Kabupaten Sleman
   a. Nilai Terkemuka
      Mempunyai nilai terkemuka dimana lokasi ini mengandung rekaman ilmiah, bentang alam yang spesifik sebagai perbukitan sisa intrusi, bermakna sebagai bukti magmatisme di zona depresi Yogyakarta.
   b. Aneka Fungsi
      Mempunyai aneka fungsi sebagai bentang alam khusus yang karena nilai estetikanya menjadikannya sebagai keragaman geologi (++) yang unik.



Keterangan: B : Kenampakan singkapan endapan
C-D: Kenampakan endapan
Sumber: https://geoparkjogja.jogjaprov.go.id/ diakses Mei 2024

Gambar 2.6. Endapan Merapi Tua Turgo-Plawangan

2. Sebagian Kompleks Batuan Merapi Tua Turgo-Plawangan Pakem di Kabupaten Sleman
   a. Nilai Terkemuka
      Mempunyai banyak makna terkait aspek estetika, aspek rekreasi, dan/atau aspek budaya.

b. Aneka Fungsi
Mempunyai aneka fungsi sebagai artefak sejarah bumi, rekaman kunci evolusi proto Merapi, maupun sebagai pendukung ekologi.

3. Aliran Piroklastik Bakalan di Kabupaten Sleman
Situs Aliran Piroklastik Bakalan merupakan bagian dari fase Merapi Muda yang terbentuk pada tahun 2010 berupa endapan breksi piroklastik yang meluap sampai pada tepian dinding Kali Gendol dan berjarak sekitar 12 km dari puncak Merapi, namun belum terkompaksi dengan tebal 1 hingga 2 m disusun oleh material blok lava sebagai *juvenil magma*, butiran lapili, dan abu vulkanik. Endapan ini disebut sebagai endapan *overbank pyroclastic density current*) (PDC).
Selain itu, pada endapan tersebut dijumpai adanya struktur menyerupai kolom vertikal sebagai zona pelepasan gas yang dikenal sebagai *gas pipe*.
Situs Aliran Piroklastik Bakalan merupakan laboratorium alam di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana. Situs ini juga menjadi museum terbuka dengan tema Erupsi Merapi tahun 2010. Mempunyai nilai tinggi dari bukti evolusi temporer aktivitas Gunungapi Merapi.
   a. Nilai Terkemuka
   Mempunyai nilai terkemuka yang mengandung rekaman ilmiah sebagai bukti atas peristiwa geologi penting siklus 100 tahun letusan eksplosif (VEI=4) Gunungapi Merapi pada 2010.
   b. Banyak Makna
   Mempunyai banyak makna, baik dari aspek ilmiah, aspek estetika, aspek rekreasi, dan/atau aspek budaya.
   c. Aneka Fungsi
   Mempunyai aneka fungsi sebagai artefak sejarah bumi, sebagai rekaman kunci peristiwa geologi yang menunjukkan keragaman geologi (*geodiversity*) bersifat langka.



Sumber : https://geoparkjogja.jogjaprov.go.id/ diakses Mei 2024

Gambar 2.7. Aliran *Piroklastik Bakalan* di Kabupaten Sleman

4. Tebing Breksi Piroklastik Purba Sambirejo di Kabupaten Sleman
Tebing Breksi Piroklastik Purba Sambirejo merupakan situs yang menjadi bukti atau rekaman sejarah dahsyatnya erupsi besar Gunungapi Purba Semilir yang disebut sebagai *Super Eruption of Semilir Volcano*. Batuan pada situs Tebing Breksi Piroklastik Purba Sambirejo merupakan batuan

gunungapi berupa endapan piroklastik dengan tebal mencapai lebih dari 200 m. Endapan ini terdiri dari *tuf*, *tuf lapili*, breksi batu apung, dan fragmen arang. Fitur struktur endapan atau sedimen situs ini berupa lapisan kristal dan laminasi dengan butiran yang terseleksi baik.



Sumber : https://geoparkjogja.jogjaprov.go.id/ diakses Mei 2024

Gambar 2.8. Tebing Breksi *Piroklastik* Purba Sambirejo di Kabupaten Sleman

Singkapan batuan endapan gunungapi purba di lokasi ini membentuk morfologi berupa bukit. Penambangan yang dahulu pernah dilakukan penduduk lokal pada bukit ini menghasilkan kupasan tebing setinggi 30 m yang saat ini telah dikonservasi. Dari singkapan ini terlihat dengan segar batuan penyusunnya yang umumnya terdiri dari lapisan abu gunungapi mengandung fragmen-fragmen batu apung (*pumice*).

a. Nilai Terkemuka
   Mempunyai nilai terkemuka karena mengandung rekaman ilmiah tatanan geologi yang bermakna sebagai bukti atas peristiwa-peristiwa geologi penting.
b. Banyak Makna
   Mempunyai banyak makna dari aspek ilmiah sebagai rekaman dan bukti evolusi bumi, dan aspek rekreasi yang berpotensi mendukung rekreasi.

5. Rayapan Tanah Ngelepen di Kabupaten Sleman

   Rayapan Tanah Ngelepen menjadi bukti proses pergerakan Tanah yang dipicu gempa bumi di Yogyakarta pada tahun 2006 dan menyebabkan kerusakan dan/atau berpindahnya bangunan yang ada di atasnya.

   Gempa Yogyakarta 2006 ini disebabkan oleh pergerakan Sesar Opak, Sesar Sinistral yang memanjang dari kawasan Pantai Parangtritis sampai ke sebelah timur Kota Yogyakarta. Pada gempa ini belum banyak diketahui tentang kontribusi pergerakan Sesar Dengkeng yang terletak di ujung timur laut Sesar Opak. Pergerakan sesar-sesar tersebut dipengaruhi oleh subduksi Lempeng Australia ke bawah Lempeng Eurasia di bawah Pulau Jawa.

   Pasca Gempa Yogyakarta 2006 terjadi rayapan tanah yang menyebabkan kerusakan dan/atau berpindahnya bangunan yang ada di atasnya.

Rayapan tanah berbentuk menyerupai tapal kuda (lengkung) sepanjang 300 m yang menghasilkan ceruk selebar 20 m akibat adanya amblesan antara dua blok yang saling bergerak.



Sumber: https://geoparkjogja.jogjaprov.go.id/ diakses Mei 2024

Gambar 2.9. Rayapan Tanah Ngelepen di Kabupaten Sleman

Rayapan tanah berbentuk menyerupai tapal kuda (lengkung) sepanjang 300 m yang menghasilkan ceruk selebar 20 m akibat adanya penurunan tanah (amblasan) antara dua blok batuan yang saling bergerak. Terdapat sumur warga yang berubah bentuk menjadi elips akibat adanya gaya tekan kuat. Rayapan tanah ini mempunyai banyak makna baik dari aspek ilmiah (sebagai rekaman dan bukti evolusi bumi) dan aspek rekreasi minat khusus.

6. Lava Bantal Berbah di Kabupaten Sleman
   Lava Bantal Berbah merupakan artefak sejarah bumi yang dicirikan dengan adanya batuan lava *basalt* berstruktur bantal berumur 56 juta tahun lalu. Berdasarkan pada kajian geologi yang telah dilakukan, di kaki Pegunungan Selatan Jawa Tengah, dalam seri Oligo-Miosen setidaknya terjadi 2 episode aliran lava bantal bersamaan dengan kegiatan gunungapi bawah laut. Episode pertama yaitu pada *Kala Oligosen* berupa *lava basalt andesit* yang mengalir bersamaan dengan pengendapan Formasi Kebo pada lingkungan laut dalam.

   Episode kedua adalah aliran lava basalt andesit (lava bantal di Berbah) yang mengalir pada periode masa Miosen Awal bersamaan dengan pengendapan Formasi Semilir bagian bawah.
   a. Nilai Terkemuka
      Mempunyai nilai terkemuka karena mengandung rekaman ilmiah tatanan geologi yang bermakna sebagai bukti atas peristiwa-peristiwa geologi penting
   b. Banyak Makna
      Mempunyai banyak makna dari aspek ilmiah sebagai rekaman dan bukti evolusi bumi, dan aspek rekreasi yang berpotensi mendukung rekreasi.



Sumber : https://geoparkjogja.jogjaprov.go.id/ diakses Mei 2024

Gambar 2.10. Lava Bantal Berbah di Kabupaten Sleman

7. Batugamping Eosen, di Kapanewon Gamping

   Geosite Batugamping Eosen merupakan situs artefak sejarah Bhumi Jogja pada Masa Gunungapi Purwa yang menunjukkan lingkungan pengendapan laut sebelum Masa Gunungapi Purba terbentuk. Pada situs ini terdapat singkapan langka berbentuk monumen batugamping berumur Eosen (54-36 juta tahun lalu) diantara endapan fluvio vulkanik berumur Kuarter hasil aktivitas Gunung Merapi.

   Ahli geologi Verbeek dan Fennema (1896) menyatakan bahwa di daratan Pulau Jawa hanya terdapat 0,5 % singkapan batuan berumur eosen (54-36 juta tahun lalu). Salah satu singkapan batuan tersebut antara lain terdapat di Kalurahan Ambarketawang yang selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan pada tahun 1989 sebagai cagar alam. Berdasarkan penelitian oleh Gerth (1929) dan Purnamaningsih (1972), pada contoh batuan dari batu gamping tersebut ditemukan fosil-fosil Foraminifera yang berupa: *Pellatispira orbitoidae, Discocyclina dispansa,* dan *Nummulites gerthi*. Dari temuan-temuan ini dapat disimpulkan bahwa endapan gamping di Ambarketawang berumur eosen.



Sumber : https://geoparkjogja.jogjaprov.go.id/ diakses Mei 2024

Gambar 2.11. Batugamping Eosen di Kabupaten Sleman

C. Potensi Pertambangan

Kabupaten Sleman, dengan kondisi geografisnya yang memiliki Gunungapi Merapi, juga menawarkan potensi sumber daya alam bahan galian yang signifikan, terutama pasir dan batu. Sungai-sungai dan dataran rendah di wilayah ini mengandung cadangan pasir yang melimpah, mendukung proyek konstruksi dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, terdapat juga cadangan batu, termasuk batu split dan batu kali yang dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk beton dan konstruksi lainnya. Penting untuk dicatat bahwa pemanfaatan potensi bahan galian ini perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan dampak lingkungan maupun sosial dan menerapkan praktik pertambangan yang ramah lingkungan. Pengelolaan yang bijaksana tidak hanya mendukung kebutuhan lokal untuk pertambangan, namun juga menciptakan peluang industri konstruksi dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman.

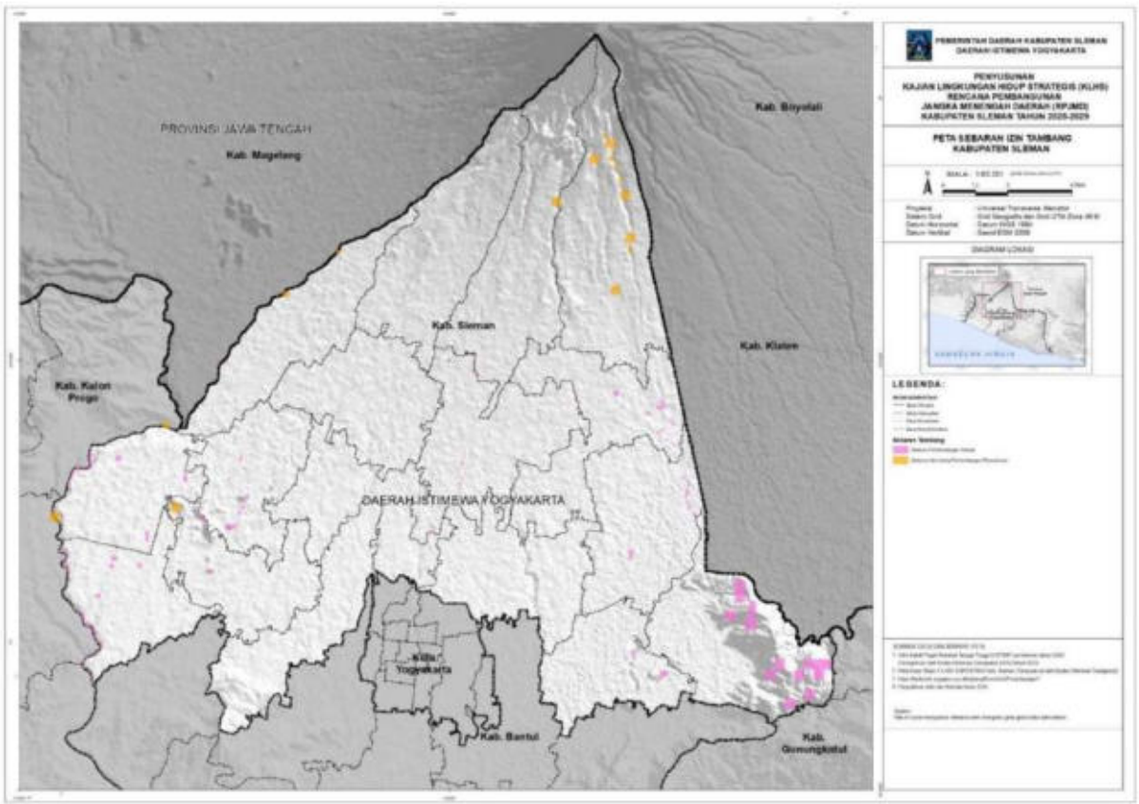
Kondisi neraca sumber daya pertambangan di Kabupaten Sleman diperkirakan masih akan tersedia karena sumber kegiatan pertambangan di Kabupaten Sleman berasal dari hasil aktivitas erupsi Gunungapi Merapi. Meskipun belum ada perhitungan rinci dari instansi terkait, ketersediaan sumber daya mineral non logam di Kabupaten Sleman diperkirakan masih akan memadai untuk mencukupi kebutuhan daerah Kabupaten Sleman dan wilayah di sekitarnya. Untuk memastikan keberlanjutan sumber daya ini telah terjalin komunikasi dan koordinasi antar instansi terkait dalam rangka perhitungan neraca sumber daya tambang yang bersumber dari Gunungapi Merapi.

Tabel 2.2. Sebaran Izin Usaha Perusahaan Pertambangan di Kabupaten Sleman Tahun 2023

No	Keterangan Tambang	Pemilik Izin	Lokasi	Luas	Bahan Galian
1	Gendol Site (IUP OP)	Bumi Mataram	Glagaharjo, Cangkringan	2,25	Sirtu
2	Tambang 1 (IUP OP)	Kaligendol Perkasa PT	Kalurahan Kepuharjo dan Glagaharjo Kapanewon Cangkringan	4,40	Sirtu
3	Tambang 1 (IUP OP)	Koperasi Petruk	Kalurahan Kepuharjo dan Glagaharjo Kapanewon Cangkringan	4,90	Sirtu
4	Tambang 1 (IUP OP)	Muhammad Affan	Kalurahan Kepuharjo dan Glagaharjo Kapanewon Cangkringan	3,31	Sirtu
6	CV. Suryo Ragil Mandiri (IUP OP)	Suryo Ragil Mandiri CV	Sendangsari, Minggir	3,12	Pasir dan Batu
7	Tambang 1 (IUP OP)	Tito Yunanto	Kepuharjo, Cangkringan	1,00	Pasir dan Batu
8	Tambang (IUP OP)	Kali Opak Sejahtera	Kepuharjo, Cangkringan		Pasir dan Batu
9	Tambang 1 (IUP OP)	Barokah Sumber Rezeqi	Kepuharjo, Cangkringan	4,31	Pasir dan Batu
10	Tambang Gendol (IUP OP)	Sarana Jaya Makmur	Sungai Gendol, Dusun Kaliadem, Kepuharjo, dan Dusun Kalitengah Kidul, Glagaharjo	2,25	Sirtu
11	Tambang 1 (IUP OP)	Sari Mulia CV	Sungai Gendol, Dusun Kalitengah Kidul dan Jambu, Kalurahan Glagaharjo dan Kepuharjo	2,25	Sirtu
12	Tambang 2 (IUP OP)	Kaligendol Perkasa PT	Kepuharjo, Cangkringan	2,54	Sirtu
13	IUP OP Ernawan Fauzy (IUP OP)	Ernawan Fauzy	Kali Kuning	5,00	Pasir dan Batu
14	Ichsan Hadi Yuliatno (IUP OP)	Iup Ichsan Hadi Yuliatno	Kepuharjo, Cangkringan	4,95	Pasir dan Batu
15	Tambang (IUP OP)	David Okta Nugraha	Gendol, Kepuharjo, Cangkringan	1,72	Pasir dan Batu
16	Tambang (IUP OP)	PT Multintes	Sendangsari, Minggir	4.69	Pasir dan Batu
17	An. Tri Asih Destari (IUP OP)	Tri Asih Destari	Kali Gendol	2,30	Pasir dan Batu
18	CV. Lestari Karya (IUP OP)	Lestari Karya	Wonokerto, Turi	2.26	Pasir dan Batu
19	CV. Sahabat Sejahtera Group (IUP OP)	Sahabat Sejahtera Group	Kepuharjo dan Glagaharjo	2,25	Pasir dan Batu
20	Tambang (IUP OP)	Tumpu Harapan	Glagaharjo, Cangkringan	2,00	Pasir dan Batu
21	Tambang 1 (IUP OP)	Kencana Jaya	Kepuharjo dan Glagaharjo Kapanewon Cangkringan	1,04	Pasir Dan Batu

No	Keterangan Tambang	Pemilik Izin	Lokasi	Luas	Bahan Galian
22	IUP Asmara Sena (IUP OP)	Asmara Sena	Sungai Gendol, Kalurahan Wukirsari, Kepuharjo, Glagaharjo, Kapanewon Cangkringan	2,16	Pasir dan Batu
23	tambang 1 (IUP OP)	Donny Ardana I	Merdikorejo, Tempel	4.02	Pasir dan Batu
24	Tambang 1 (IUP OP)	Pramudya Afgani	Sendangagung dan Sendangmulyo Kapanewon Minggir	2,50	Pasir dan Batu
25	Pasir dan Batu (IUP OP)	Pramudya Afgani	Sendangmulyo dan Sendangagung Kapanewon Minggir	2,50	pasir dan batu
26	Tambang 1 (IUP OP)	Heru Iswadi	Sendangmulyo	1,83	Pasir dan Batu
27	Tambang 1 (IUP OP)	Jago Jaya Cemerlang Pt	Lumbungrejo-Tempel	1,20	Sirtu
28	Tambang 1 (IUP OP)	Rizky Pratama Pakudewa	Lumbungrejo-Tempel	3,03	Sirtu
29	Tambang (IUP OP)	Donny Ardana Ii	Krasak Merdikorejo, Tempel	2,57	
30	Tambang (IUP OP)	Adia Bimala	Sungai Gendol, Kalurahan Glagaharjo dan Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan	0,71	Pasir dan Batu
31	Tambang I (IUP OP)	Nyonya Tri Asih	Sungai Gendol, Kepuharjo, Cangkringan	1,35	
32	Tambang I (IUP OP)	Koperasi Jasa Petruk	Sungai Gendol, Kalurahan Glagaharjo dan Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan	2,23	Pasir dan Batu
33	Tambang I (IUP OP)	Kali Gendol Perkasa	Glagaharjo dan Kepuharjo Kapanewon Cangkringan	1,67	Pasir dan Batu
34	Tambang 1 (IUP OP)	Sahabat Sejahtersa Group CV	Glagaharjo, Cangkringan	2,25	Sirtu
35	Tambang 1 (IUP OP)	Tirta Reja CV	Sumberrahayu, Moyudan	2,90	Sirtu
36	Tambang 1 (IUP OP)	Ikhsan Yuli	Kepuhharjo, Cangkringan	4,95	Sirtu
37	Tambang 1 (IUP OP)	Cmk PT	Sendangagung, Minggir	4,99	Sirtu
38	Tambang I (IUP P)	Sahid Putra Sehati	Jering VIII, Sidorejo, Godean	4,91	Tanah Urug
39	Tambang I (IUP P)	Citra Taman Asri	Pendekan, Margodadi, Seyegan	1,82	Batuan (Tanah Urug)
40	Tambang I (IUP P)	Mitra Mulia Maju Makmur	Klangkapan, Margoluwih, Seyegan	0,42	Batuan (Tanah Urug) dan Batuan Dasit

Sumber: Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral DIY, 2024

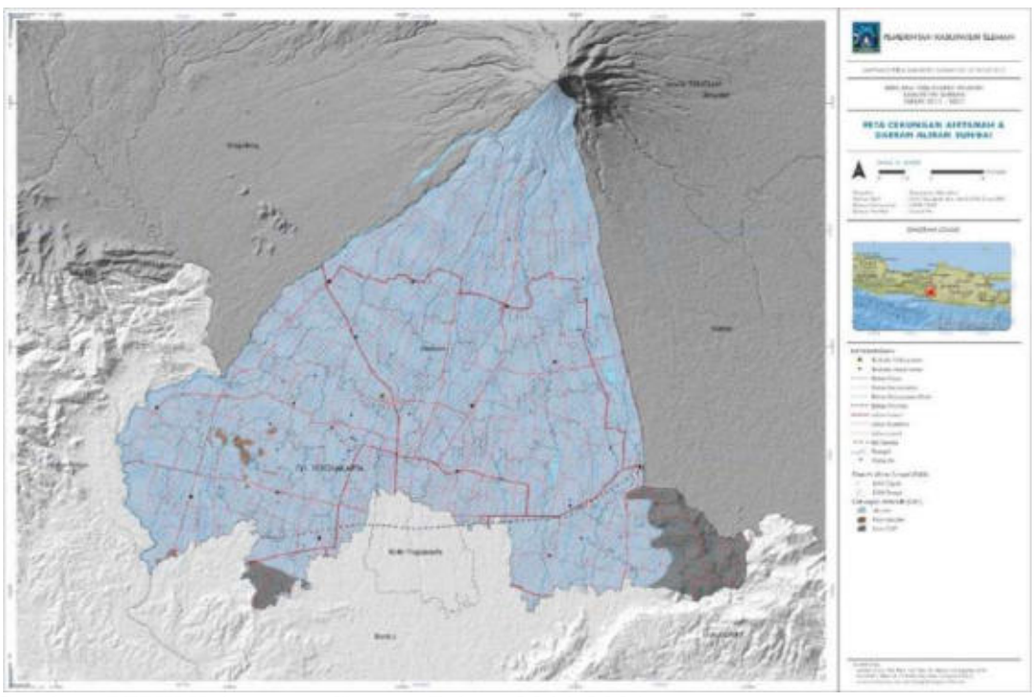


Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029

Gambar 2.12. Peta Sebaran Izin Tambang Kabupaten Sleman

2.1.1.2.2 Hidrologi Wilayah

Wilayah Kabupaten Sleman berada pada wilayah yang dilalui oleh 2 (dua) Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu Opak dan Progo. Selain itu wilayah Kabupaten Sleman juga terdapat cekungan air tanah (CAT) yang terbagi dalam 3 (tiga) klasifikasi yaitu akuifer, non akuifer dan non-cekungan air tanah.



Sumber: RTRW Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031

Gambar 2.13 Peta Cekungan Air Tanah dan Daerah Aliran Sungai Kabupaten Sleman

Wilayah Kabupaten Sleman memiliki empat jalur mata air (*springbelt*) terdiri dari jalur mata air Bebeng, mata air Sleman - Cangkringan, mata air Ngaglik, dan mata air Yogyakarta. Semua mata air tersebut dipengaruhi oleh ekosistem Gunungapi Merapi di bagian hulu yang mengalir ke daerah lebih rendah di bagian hilir di selatan. Sampai saat ini, mata air di Kabupaten Sleman sebanyak 364 titik yang dimanfaatkan masyarakat di sekitarnya sebagai sumber air bersih maupun irigasi kawasan pertanian Sumber mata air ini mengalir ke sejumlah sungai utama yaitu Sungai Boyong, Kuning, Gendol dan Krasak. Terdapat pula anak-anak sungai yang mengalir ke arah selatan dan bermuara di Samudera Indonesia.

2.1.1.2.3 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Sleman pada tahun 2024 didominasi oleh pekarangan seluas 24.855,43 Ha atau 43,24% dari luas wilayah Kabupaten Sleman. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020 yang luasnya 24.472,13 Ha, maka didapat laju perubahan penggunaan lahan sebesar 0,31% per tahun. Penggunaan lahan terbesar kedua adalah sawah seluas 18.421,54 Ha (32,05% dari luas wilayah Kabupaten Sleman), mengalami penurunan dari 18.595,75 Ha pada tahun 2020. Dalam kurun waktu 5 tahun, luas sawah mengalami penurunan sebesar 0,19% per tahun. Penggunaan lahan paling kecil di Kabupaten Sleman adalah hutan seluas 3,03%. Secara lebih jelas, perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Sleman pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Luas Perubahan Lahan di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (Ha)

No	Penggunaan lahan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Hutan	1.742,23	1.742,23	1.742,23	1.742,23	1.742,23
2	Pekarangan	24.472,13	24.527,27	24.649,95	24.798,48	24.855,43
3	Sawah	18.595,75	18.569,97	18.560,11	18.470,99	18.421,54
4	Semak	1.182,53	1.444,47	1.525,80	1.523,58	1.523,58
5	Perkebunan	7.387,03	7.298,51	7.217,18	7.174,05	7.167,60
6	Ladang/lainnya	4.102,33	3.899,56	3.787,13	3.772,67	3.771,62
	Total	57.482,00	57.482,01	57.482,40	57.482,00	57.482,00

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, 2025

2.1.1.2.4 Pertanian

Kabupaten Sleman memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, terutama sektor tanaman pangan. Kondisi geografis mendukung wilayah Sleman menjadi tempat yang subur untuk pertanian. Lahan yang cukup luas, iklim yang mendukung, ketersediaan air menjadi faktor utama yang mendukung potensi SDA tanaman pangan di Kabupaten Sleman.

Pertanian di Kabupaten Sleman didominasi oleh berbagai jenis tanaman pangan, termasuk padi, jagung, kedelai, dan tanaman sayur. Keberagaman jenis tanaman ini menunjukkan fleksibilitas lahan pertanian di wilayah tersebut. Padi sebagai tanaman pangan utama, tumbuh subur di sawah-sawah yang tersebar di berbagai kapanewon. Produktivitas sawah yang digambarkan dengan produktivitas padi (dalam gabah kering giling) di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4. Produktivitas Sawah di Kabupaten Sleman Tahun 2024

No	Kapanewon	Produktivitas Padi		
		Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kw/Ha)
1	Moyudan	2.377	14.072	59,20
2	Minggir	2.347	14.229	60,63
3	Seyegan	2.014	12.386	61,51
4	Godean	2.274	13.990	61,51
5	Gamping	1.352	8.317	61,50
6	Mlati	1.466	9.024	61,54
7	Depok	585	3.490	59,67
8	Berbah	2.546	15.597	61,27
9	Prambanan	2.319	13.784	59,45
10	Kalasan	2.702	16.577	61,35
11	Ngemplak	2.917	17.719	60,75
12	Ngaglik	2.238	13.807	61,70
13	Sleman	2.327	14.494	62,28
14	Tempel	2.069	12.297	59,43
15	Turi	586	3.415	58,29
16	Pakem	2.151	12.736	59,21
17	Cangkringan	1.994	12.092	60,65
	Total	34.264	208.025	60,71

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, 2025

Berdasarkan sistem pengairannya, jenis lahan pertanian di Kabupaten Sleman terdiri dari lahan pertanian yang menggunakan sistem pengairan irigasi dan tadah hujan. Berikut tabel yang menjelaskan luas sawah di berdasarkan sistem pengairannya di Kabupaten Sleman.

Tabel 2.5. Luas Lahan Sawah Berdasarkan Jenis Pengairan di Kabupaten Sleman Tahun 2024

No	Kapanewon	Luas Lahan (Ha)		
		Irigasi	Tadah Hujan	Jumlah
1	Moyudan	1.131,44	-	1.267,27
2	Minggir	1.119,37	-	1.257,00
3	Seyegan	1.055,91	-	1.199,40
4	Godean	952,46	-	1.189,06
5	Gamping	612,23	-	798,49
6	Mlati	699,03	-	844,21
7	Depok	217,30	-	298,06
8	Berbah	999,79	-	1.068,89
9	Prambanan	929,27	166,00	1.167,50
10	Kalasan	1.314,72	-	1.476,86
11	Ngemplak	1.356,01	-	1.624,74
12	Ngaglik	1.167,94	-	1.320,00
13	Sleman	1.221,79	-	1.318,00
14	Tempel	1.050,20	-	1.027,50
15	Turi	286,92	-	272,00
16	Pakem	865,12	-	921,00
17	Cangkringan	749,05	-	839,51

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Sistem irigasi yang baik juga mendukung potensi pertanian di Kabupaten Sleman. Beberapa sungai dan saluran irigasi memberikan pasokan air yang cukup untuk mendukung pertumbuhan tanaman pangan. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas tanaman pangan secara berkelanjutan.

Selain tanaman pangan pokok, Kabupaten Sleman juga memiliki potensi untuk mengembangkan komoditas pertanian lainnya, seperti buah-buahan dan tanaman hortikultura. Kabupaten Sleman juga memiliki potensi hortikultura yang cukup besar. Pada tahun 2024, luas panen tanaman sayuran dan buah-buahan semusim mencapai 1.341,35 Ha dengan produksi mencapai 130.281,63 kuintal. Adapun luas panen tanaman biofarmaka sebesar 26,59 Ha dengan produksi 5.350,5 kuintal. Selain itu, komoditas hortikultura di Kabupaten Sleman juga berupa tanaman hias maupun buah-buahan dan sayuran tahunan. Keberagaman ini memberikan peluang bagi petani setempat untuk diversifikasi usaha pertanian mereka, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi risiko ketidakpastian.

Dengan dukungan dari pemerintah daerah, petani di Kabupaten Sleman dapat terus mengoptimalkan potensi sumber daya tanaman pangan. Melalui program pelatihan, penyediaan infrastruktur pertanian, dan promosi teknologi pertanian terbaru, Kabupaten Sleman memiliki potensi untuk menjadi lumbung pangan yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

2.1.1.2.5 Jasa Lingkungan dan Kecenderungannya

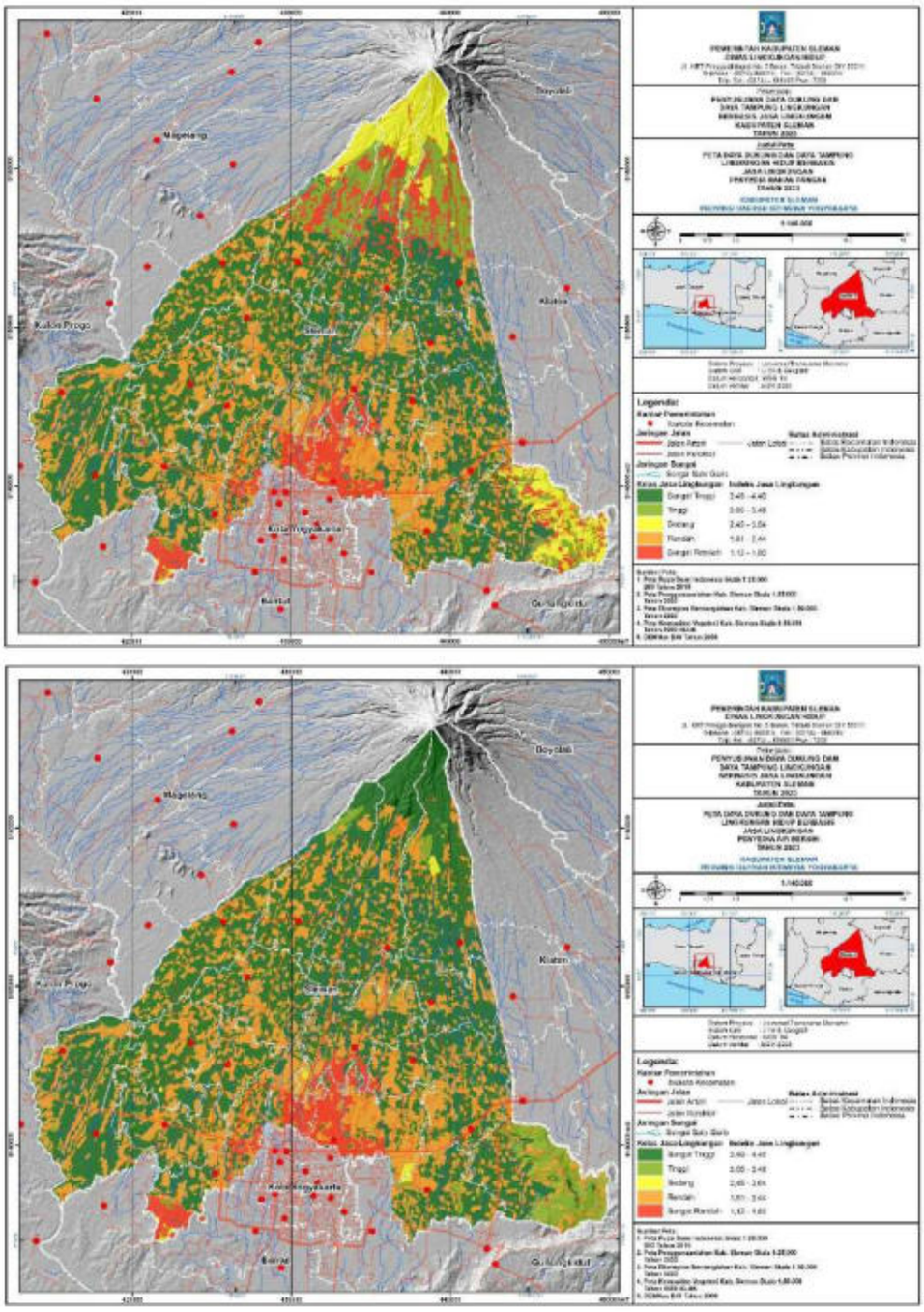
Jasa lingkungan yang ada di Kabupaten Sleman memberikan gambaran bagaimana sebetulnya kondisi penggunaan lahan, bentang alam dan vegetasi alami memiliki peran dalam jasa penyediaan, pengaturan, kebudayaan dan pendukung lingkungan yang kemudian dimanfaatkan dalam proses keseharian manusia hingga proses pembangunan. Hasil kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa lingkungan ini menghasilkan 20 kelas jasa lingkungan yang menggambarkan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Sleman yang terbagi menjadi empat kelompok jasa yaitu kelompok jasa penyedia, kelompok jasa pengaturan, kelompok jasa budaya, dan kelompok jasa pendukung.

A. Jasa Penyedia

Fungsi ekosistem sebagai penyedia atau produser ialah menyediakan materi dan energi yang dibutuhkan oleh kehidupan. Jasa lingkungan penyedia ini, terdiri dari jasa penyediaan bahan pangan; air bersih; serat (fiber); dan sumber daya genetik. Kajian yang paling relevan dan perlu untuk dicermati pada jangka pendek-menengah adalah jasa lingkungan penyedia pangan dan air bersih. Berikut adalah gambaran distribusi spasial dalam jasa penyedia pangan dan air bersih.

Berdasarkan kajian jasa lingkungan, distribusi luasan lahan daya dukung dan daya tampung jasa lingkungan penyedia bahan pangan tahun 2023 di Kabupaten Sleman didominasi kelas jasa sangat tinggi dengan luasan sebesar 25.037,97 Ha. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup jasa lingkungan penyedia bahan pangan Kabupaten Sleman termasuk baik dengan proporsi kelas sangat tinggi terhadap luas wilayah terbesar terdapat di Kapanewon Moyudan dan Seyegan yang sebagian besar merupakan sawah irigasi. Adapun distribusi luasan lahan daya dukung dan daya tampung jasa lingkungan penyedia air bersih tahun 2023, didominasi kelas jasa sangat tinggi dan rendah dengan luasan sebesar 30.812,96 Ha dan 21.146,52 Ha dengan proporsi kelas sangat tinggi terhadap luas wilayah terbesar terdapat

di Kapanewon Pakem dan paling rendah di Kapanewon Depok. Luasan jasa penyedia air bersih kelas rendah berkaitan dengan penggunaan lahan permukiman. Meskipun kedua jasa penyedia ini masih dalam kondisi baik perlu untuk dikaji sehingga dapat dilakukan pengelolaan jasa lingkungan yang lebih memadai.



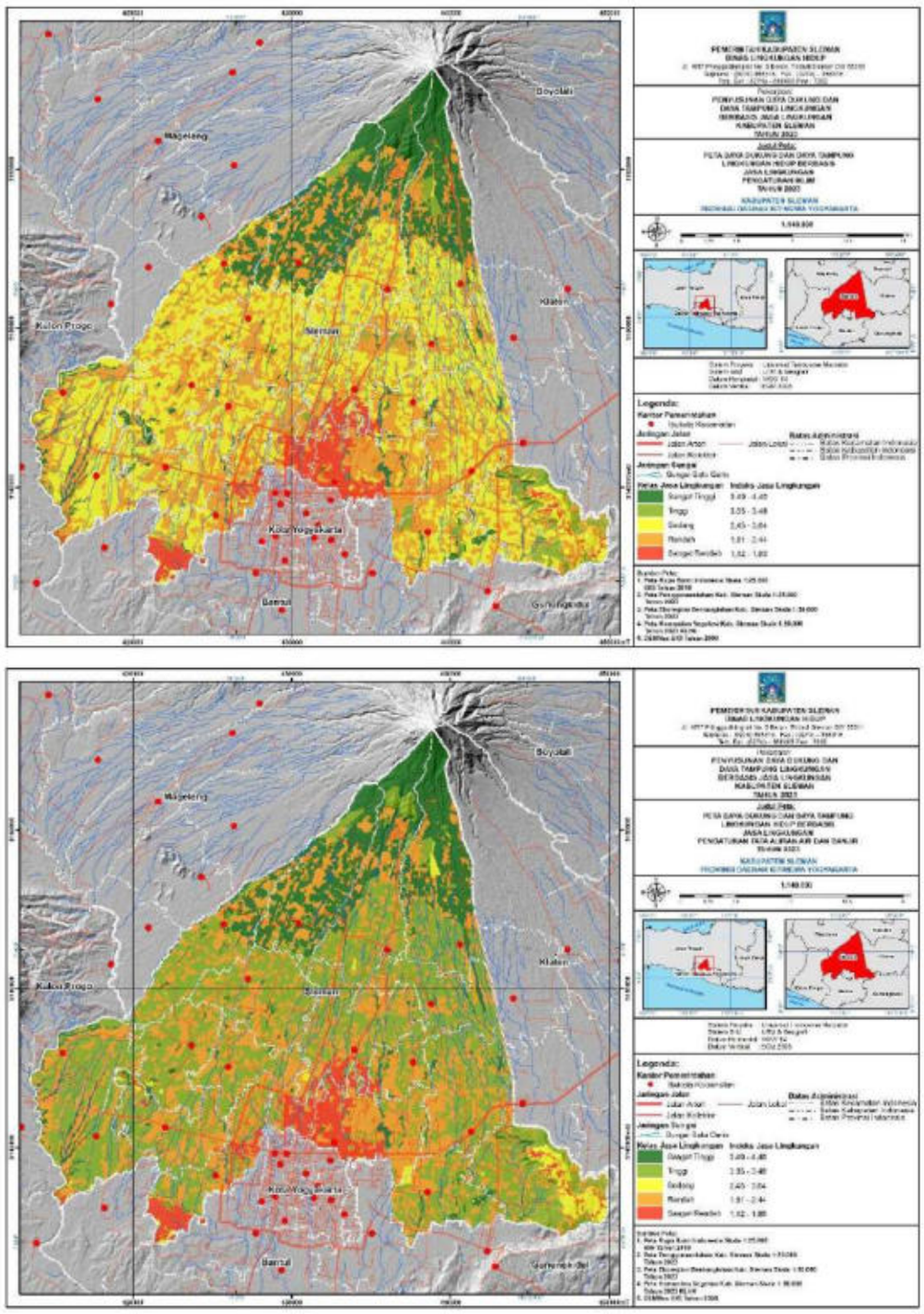
Sumber: Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Kabupaten Sleman Tahun 2023

Gambar 2.14. Peta Jasa Lingkungan Penyedia Pangan (Atas) dan Air Bersih (Bawah) Tahun 2023

B. Jasa Pengaturan

Fungsi ekosistem sebagai jasa pengaturan adalah untuk meregulasi aspek penunjang kehidupan. Jasa lingkungan pengaturan ini, terdiri dari jasa pengaturan iklim, tata air dan banjir, pencegahan bencana alam dan pemelihara kualitas udara. Berikut adalah gambaran distribusi spasial dari unit lingkungan yang berperan dalam jasa pengaturan.

Berdasarkan kajian jasa lingkungan, distribusi luasan lahan daya dukung dan daya tampung jasa lingkungan pengaturan iklim tahun 2023 di Kabupaten Sleman didominasi kelas jasa sedang dengan luasan sebesar 22.807,25 Ha dengan proporsi kelas sangat tinggi terhadap luas wilayah terbesar terdapat di Kapanewon Turi yang mencapai 55% dari total luas wilayahnya. Proporsi kelas sangat rendah terhadap luas wilayah terbesar terdapat di Kapanewon Depok.

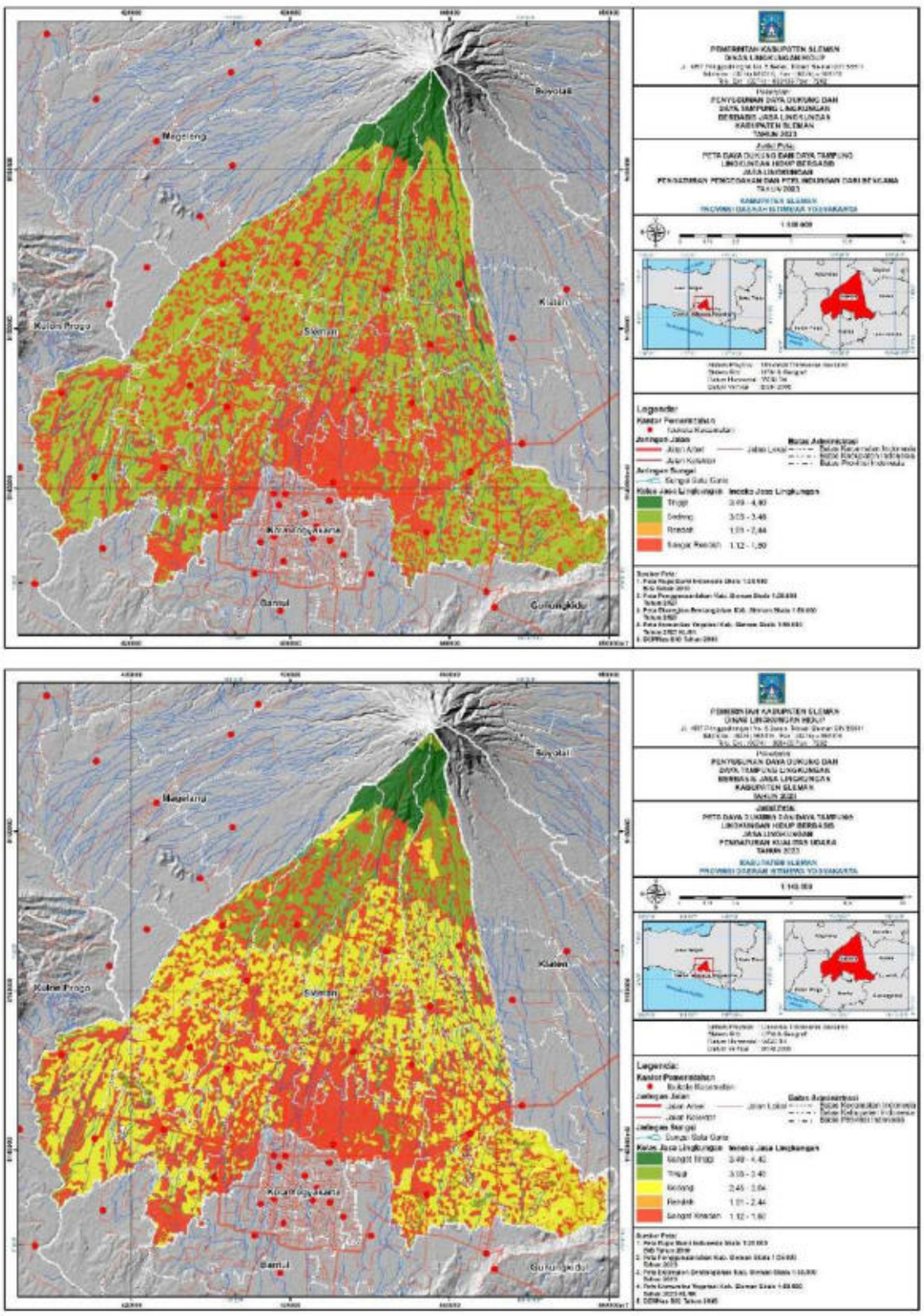


Sumber: Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Kabupaten Sleman Tahun 2023

Gambar 2.15. Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim (Atas) dan Tata Aliran Air dan Banjir (Bawah) Tahun 2023

Untuk distribusi luasan lahan daya dukung dan daya tampung jasa lingkungan pengaturan tata aliran air dan banjir di Kabupaten Sleman didominasi kelas jasa tinggi dengan luasan sebesar 24.316,51 Ha dengan

proporsi kelas sangat tinggi terhadap luas wilayah terbesar terdapat di Kapanewon Turi yang mencapai angka 59% dari luas wilayahnya. Proporsi kelas sangat rendah terhadap luas wilayah terbesar terdapat di Kapanewon Depok.



Sumber: Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Kabupaten Sleman Tahun 2023

Gambar 2.16. Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Dari Bencana Alam (Atas) dan Jasa Lingkungan Pengaturan Kualitas Udara (Bawah) Tahun 2023

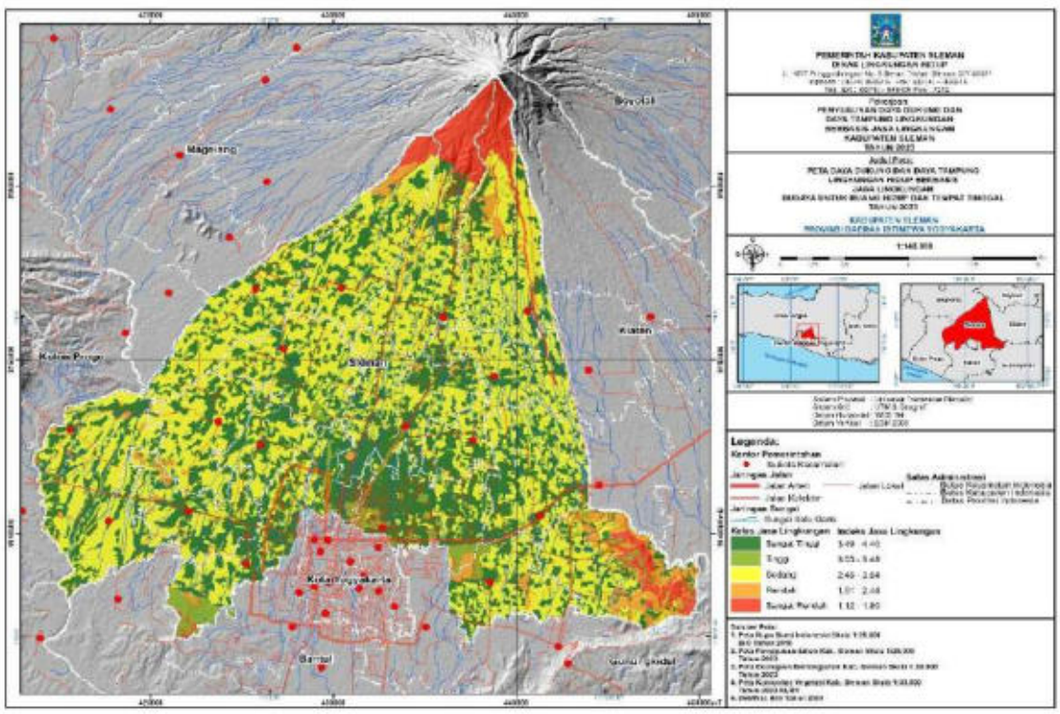
Distribusi luasan lahan daya dukung dan daya tampung jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana tahun 2023 di

Kabupaten Sleman didominasi kelas jasa sedang dengan luasan sebesar 31.122,31 Ha dengan proporsi kelas tinggi terhadap luas wilayah terbesar terdapat di Kapanewon Pakem, yang mencapai 24% dari total luas wilayahnya dan tidak ada kelas sangat tinggi. Proporsi kelas rendah terhadap luas wilayah terbesar terdapat di Kapanewon Depok. Untuk distribusi luasan lahan daya dukung dan daya tampung jasa lingkungan pengaturan kualitas udara di Kabupaten Sleman didominasi kelas jasa sedang dengan luasan sebesar 24.923,46 Ha dengan proporsi kelas sangat tinggi terhadap luas wilayah paling tinggi terdapat di Kapanewon Pakem yang mencapai angka 21% dari luas wilayahnya. Proporsi kelas sangat rendah terhadap luas wilayah paling tinggi terdapat di Kapanewon Depok. Luasan jasa pengaturan pemelihara kualitas udara kelas sangat rendah besar berkaitan dengan penggunaan lahan permukiman.

C. Jasa Budaya

Ekosistem, selain sebagai pendukung lingkungan alami, juga memiliki peran penyedia ruang perkembangan budaya. Jasa lingkungan jasa budaya ini, terdiri dari jasa budaya untuk ruang hidup dan tempat tinggal serta jasa budaya untuk ekowisata. Berikut adalah gambaran distribusi spasial dari unit lingkungan yang berperan dalam jasa budaya.

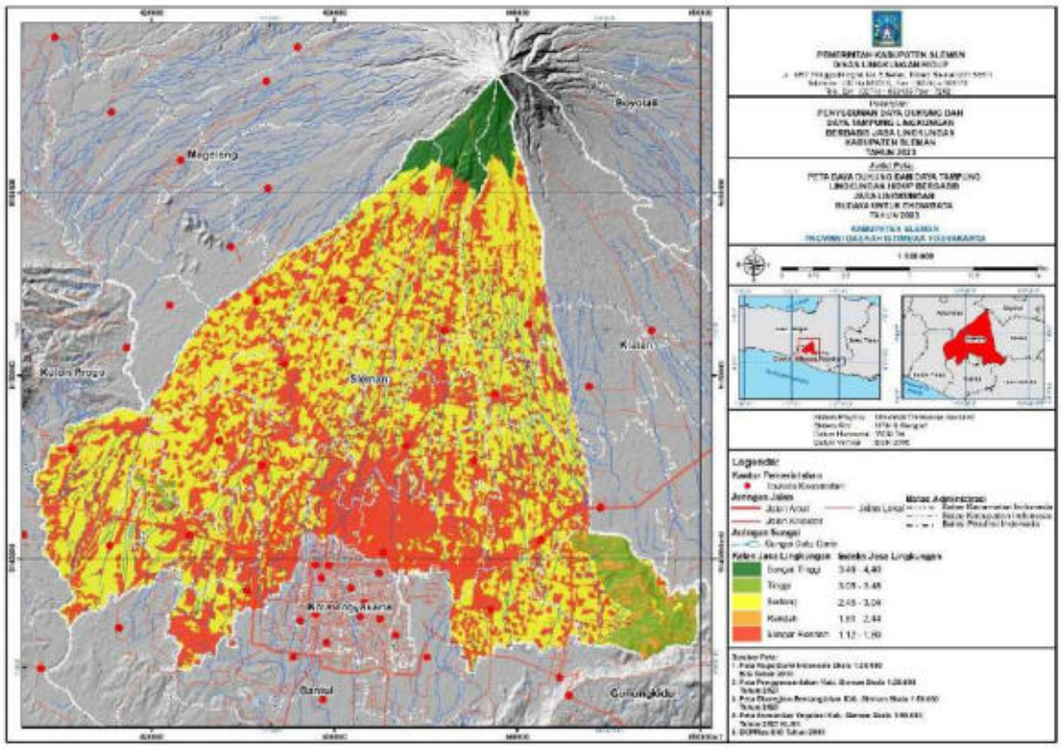
Berdasarkan kajian jasa lingkungan, distribusi luasan lahan daya dukung dan daya tampung jasa lingkungan budaya untuk ekowisata tahun 2023 di Kabupaten Sleman didominasi kelas jasa sedang dengan luasan sebesar 28446,03 Ha dengan proporsi kelas sangat tinggi terhadap luas wilayah terbesar terdapat di Kapanewon Depok, yang mencapai 65% dari total luas wilayahnya. Proporsi kelas tinggi terhadap luas wilayah terbesar terdapat di Kapanewon Gamping. Berbeda dari jasa lingkungan lainnya, jasa budaya untuk ruang hidup dan tempat tinggal banyak terkait dengan ruang yang sesuai untuk hunian, maka jasa lingkungan ini justru searah dengan pergerakan perubahan guna lahan.



Sumber: Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Kabupaten Sleman Tahun 2023

Gambar 2.17. Peta Jasa Lingkungan Jasa Budaya Untuk Ruang Hidup dan Tempat Tinggal Tahun 2023

Untuk distribusi luasan lahan daya dukung dan daya tampung jasa lingkungan budaya untuk ekowisata di Kabupaten Sleman didominasi kelas jasa sedang dengan luasan sebesar 29.518,3 Ha dengan proporsi kelas sangat tinggi terhadap luas wilayah terbesar terdapat di Kapanewon Pakem, yang mencapai 22% dari total luas wilayahnya. Proporsi kelas tinggi terhadap luas wilayah terbesar terdapat di Kapanewon Prambanan.



Sumber: Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Kabupaten Sleman Tahun 2023

Gambar 2.18. Peta Jasa Lingkungan Jasa Budaya Untuk Ekowisata Tahun 2023

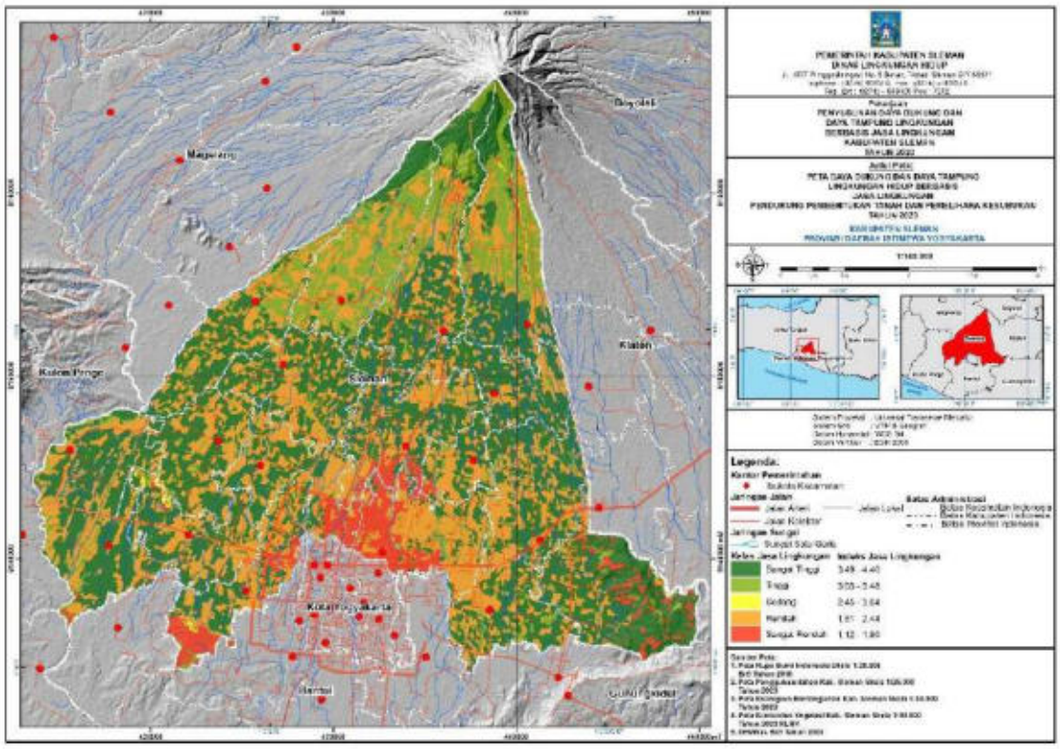
Cara menyikapi kedua jasa budaya ini berbeda dari jasa lingkungan sebelumnya. Jasa budaya untuk ruang tinggal dan tempat tinggal perlu mempertimbangkan ketersediaan minimum untuk bisa mendukung permukiman. Untuk itu, peningkatan jasa budaya ini diarahkan pada preservasi kondisi eksisting mengingat ruang pertumbuhan berbasis kesesuaian pemanfaatan ruang yang belum terwujud masih memiliki ruang untuk diwujudkan. Sementara jasa budaya untuk ekowisata perlu dipertimbangkan perwujudannya, tidak hanya berupa lahan alami tetapi lahan alami yang mempertimbangkan pertemuan peradaban manusia dengan ekosistem alami dengan tetap memperhatikan kelestarian antara keduanya.

D. Jasa Pendukung

Fungsi ekosistem sebagai jasa pendukung adalah terletak pada perannya dalam menjaga keseimbangan alam. Jasa ini mendukung proses-proses alami yang esensial bagi kehidupan, seperti jasa pendukung pembentukan tanah dan pemelihara kesuburan, jasa pendukung produksi primer dan jasa pendukung biodiversitas. Berikut adalah gambaran distribusi spasial dari unit lingkungan yang berperan dalam jasa pendukung.

Berdasarkan kondisi tahun 2023, distribusi luasan lahan daya dukung dan daya tampung jasa lingkungan pendukung pembentukan tanah dan pemelihara kesuburan di Kabupaten Sleman didominasi kelas jasa sangat

tinggi dengan luasan sebesar 26.001,23 Ha dengan proporsi kelas sangat tinggi terhadap luas wilayah terbesar terdapat di Kapanewon Prambanan yang mencapai 69% dari total luas wilayahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup jasa lingkungan pendukung pembentukan lapisan tanah dan pemelihara kesuburan Kabupaten Sleman termasuk sangat bagus.

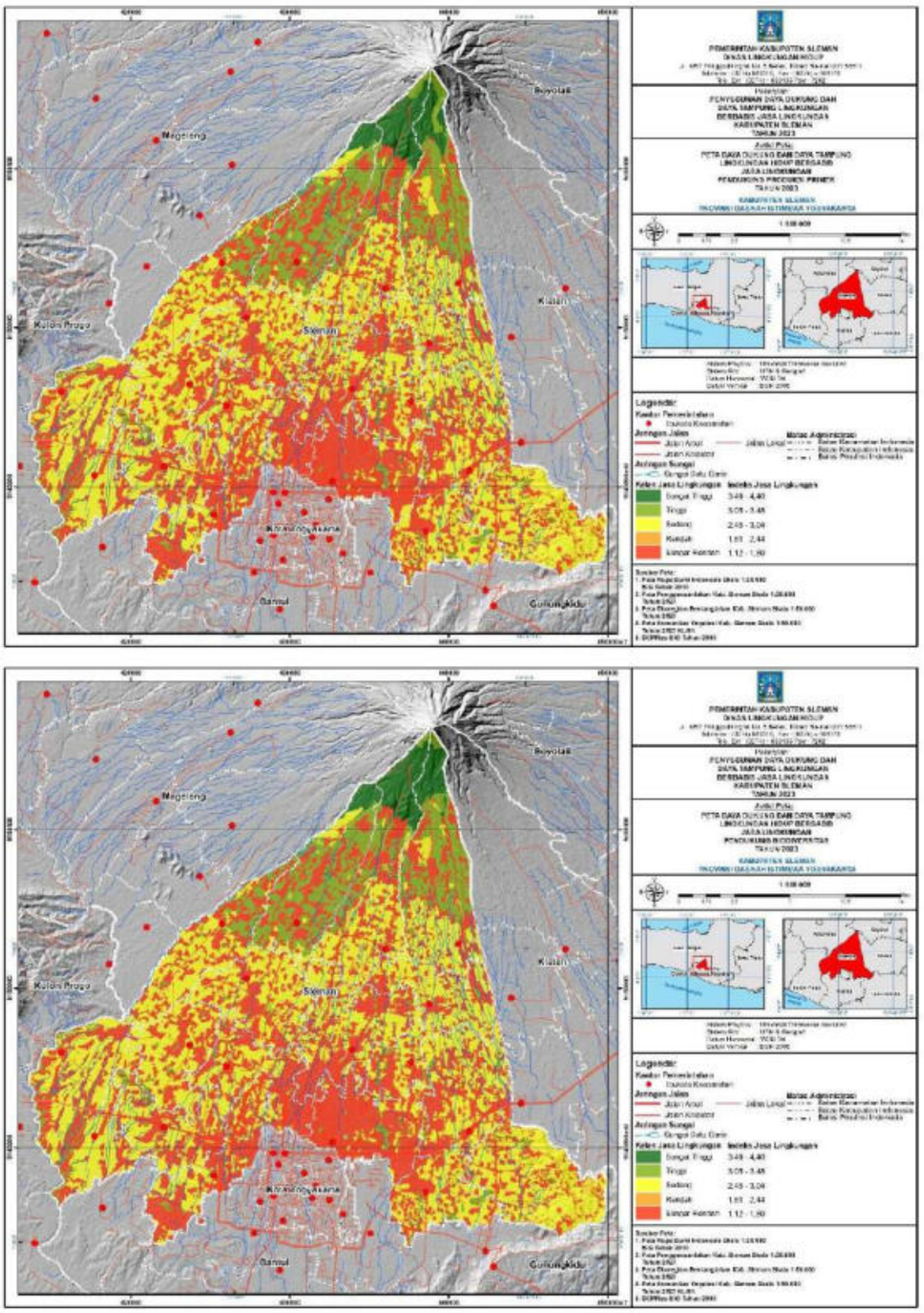


Sumber: Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Kabupaten Sleman Tahun 2023

Gambar 2.19. Peta Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan Tanah Dan Pemelihara Kesuburan Tahun 2023

Untuk distribusi luasan lahan daya dukung dan daya tampung jasa lingkungan pendukung produksi primer di Kabupaten Sleman didominasi kelas jasa sedang dengan luasan sebesar 24.938,01 Ha dengan proporsi kelas sangat tinggi terhadap luas wilayah terbesar terdapat di Kapanewon Pakem yang mencapai 20% dari total luas wilayahnya. Proporsi kelas tinggi terhadap luas wilayah terbesar terdapat di Kapanewon Turi. Adapun distribusi luasan lahan daya dukung dan daya tampung jasa lingkungan pendukung biodiversitas di Kabupaten Sleman didominasi kelas jasa sedang dengan luasan sebesar 24.751,37 Ha. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup jasa lingkungan biodiversitas Kabupaten Sleman termasuk sedang. Proporsi kelas sangat tinggi terhadap luas wilayah terbesar terdapat di Kapanewon Pakem yang mencapai 21% dari total luas wilayahnya. Proporsi kelas tinggi terhadap luas wilayah terbesar terdapat di Kapanewon Turi.

Menurunnya jasa lingkungan pendukung ini berpotensi pada penurunan fungsi-fungsi yang mendukung produksi yang bergantung langsung pada siklus alam, seperti menurunnya kesuburan tanah, berkurangnya polinasi alami, perubahan komposisi flora fauna yang semuanya berakibat pada ketidakseimbangan dukungan alam. Lebih jauh, terkait biodiversitas atau keanekaragaman hayati, penurunan ini bisa berpotensi menghilangkan sumber daya genetik yang bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.



Sumber: Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Kabupaten Sleman Tahun 2023

Gambar 2.20. Jasa Lingkungan Pendukung Produksi Primer (Atas) dan Biodiversitas (Bawah) Tahun 2023

2.1.1.2.6 Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati adalah segala hal yang hidup di dunia ini. Berkaitan dengan lingkungan hidup, keanekaragaman spesies di Kabupaten Sleman berkaitan erat dengan keanekaragaman ekosistemnya. Dari bagian utara ke arah selatan dapat dijumpai tipe alpine, hutan tropis, semak belukar, tegalan, kebun, sungai, dan sebagainya yang menjadi rumah bagi berbagai jenis flora dan fauna.

A. Potensi Flora dan Fauna

Kabupaten Sleman mempunyai jenis flora/tanaman yang mulai berkembang dan dibudidayakan, salah satunya adalah varietas Bambu. Kabupaten Sleman merupakan daerah dengan penghasil bambu yang sangat potensial. Hutan bambu di Kabupaten Sleman seluas 525 Ha ekuivalen 125.000 rumpun, produksi mencapai 800.000-850.000 batang per tahun. Namun, jumlah ini baru memenuhi 20% dari total bambu yang dibutuhkan untuk industri kreatif. Sisanya kebutuhan bambu didatangkan dari luar Sleman. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan bambu di Sleman antara lain kurangnya rumpun bambu dengan kualitas yang bagus dan lestari, kontinuitas produktivitas pasokan bahan baku yang masih kurang, kualitas produk yang kurang berdaya saing hingga lemahnya kelembagaan masyarakat.

Pada tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Sleman berkomitmen untuk menjadikan bambu sebagai komoditas unggulan dengan menetapkan bambu sebagai hasil hutan bukan kayu (HHBK) unggulan di Kabupaten Sleman melalui SK Bupati Sleman Nomor 306/Kep.KDH/A/2013. Intensifikasi penanaman bambu dilakukan di Cangkringan dan memanfaatkan daerah aliran sungai diantaranya Sungai Progo, Sungai Kuning, Sungai Boyong dan Sungai Opak, khususnya di daerah hulu sungai. Kabupaten Sleman sedikitnya memiliki 10 jenis bambu yakni bambu apus, petung, ampel, wulung, legi, ori, gading, grinjing, tutul, dan jepang.



Bambu Petung *Bambu Apus* *Bambu Legi*

Sumber: https://f2cfurniture.id/jenis-bambu-furniture/ diakses Mei 2024

Gambar 2.21. Jenis Bambu

Pohon sengon (*Paraserianthes falcataria* (L.) *Nielsen*) dan jabon (*Anthocephalus cadamba Roxb. Miq.*) juga merupakan tanaman berkayu yang banyak dibudidayakan di wilayah hutan di Kabupaten Sleman. Akan tetapi, kendala yang dialami dalam perkembangannya adalah kerusakan baik yang disebabkan oleh abiotik maupun biotik. Di Kabupaten Sleman terdapat 769 jenis tumbuhan dan 521 jenis fauna. Jenis fauna meliputi 27 jenis mamalia, 236 jenis burung, 49 jenis reptilia, 24 jenis amfibi, 26 jenis ikan, 5 jenis moluska dan 154 jenis serangga. Hasil analisis menunjukkan bahwa di Kabupaten Sleman dijumpai 25 jenis fauna endemik, 38 jenis fauna dilindungi dan 4 jenis tumbuhan dilindungi. Jenis endemik mamalia meliputi 2 jenis hewan mamalia yaitu landak jawa dan lutung jawa (budeng).

Sebagai upaya pelestarian flora dan fauna lokal dan menjaga keberlanjutan ekosistem di Kabupaten Sleman, ada beberapa jenis tanaman yang mendapat sertifikat paten dari pemerintah setempat (sertifikat tanda daftar sumber daya genetik tanaman lokal), yakni alpukat hazmi, duku jumeneng, anggrek sembada kenconowangi serta bambu petung. Keempat varietas tersebut mempunyai kekuatan hukum dan tidak bisa digunakan daerah lain.

Hal ini menjadi peluang bagi Kabupaten Sleman untuk menjadi produsen utama, sehingga menjadi potensi ekonomi baru.



Alpukat Hazmi



Duku Jumeneng



Anggrek Sembada Kenconowangi



Bambu petung atau Sembada Verde

Sumber: https://rejogja.republika.co.id/berita/r4x5ub327/empat-varietas-tanaman-lokal-sleman-dipatenkan, diakses Mei 2024

Gambar 2.22. Varietas Tanaman Lokal di Kabupaten Sleman

B. Potensi Keanekaragaman Hayati

Potensi keanekaragaman hayati di lahan pekarangan Kabupaten Sleman dijabarkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan manfaat tanaman dan hewan ditemukan ada 393 jenis tanaman dari 116 famili yang dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Sleman, dimana ada beberapa tanaman yang mempunyai banyak manfaat. Manfaat keanekaragaman tanaman tersebut antara lain untuk tanaman pangan khususnya karbohidrat (13 jenis), buah-buahan (53 jenis), sayur, pewarna alami dan bumbu-bumbu (49 jenis), tanaman hias (147 jenis), obat (68 jenis), tanaman perkebunan, perdagangan dan industri (15 jenis), untuk upacara adat dan budaya 29 jenis dan untuk bahan bangunan, kayu bakar, kerajinan dan lain-lain (62 jenis). Di samping itu ditemukan 58 jenis hewan dan 8 jenis ikan.
2. Berdasarkan nilai penting diketahui bahwa tanaman yang mempunyai nilai penting tinggi di kawasan dekat hutan adalah cabe dan salak pondoh, sementara di dekat kota, dekat pusat budaya dan kawasan berbasis pertanian dan kerajinan adalah pisang kapok dan rambutan.
3. Berdasarkan keunggulan produk dapat dikembangkan sebagai desa wisata dan wisata kebudayaan: (1) desa wisata berbasis produk tanaman unggulan (salak pondoh), desa wisata berbasis kerajinan berbahan dasar tanaman diusahakan di daerah tersebut (bambu dan mendong), desa wisata karena keindahan alam dan lingkungannya, wisata kebudayaan khususnya candi di Prambanan dan Kalasan; (2) sumber alternatif tanaman pangan; (3) bisnis tanaman berbasis hobi atau kesenangan; dan (4) pengembangan tanaman obat-obatan.

C. Ancaman Terhadap Keanekaragaman Hayati

Konservasi sumber daya alam sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, Pasal 81 meliputi kegiatan perlindungan sumber daya alam, pengawetan sumber daya alam, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, di Kabupaten Sleman terdapat 3 jenis flora dan 37 fauna yang termasuk dalam kategori dilindungi. Jenis fauna yang dilindungi tersebut meliputi mamalia, burung, dan serangga. Nama flora dan fauna yang dilindungi di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6. Daftar Keanekaragaman Hayati Flora dan Fauna yang Dilindungi di Kabupaten Sleman

No	Nama Spesies	
	Nama Flora/ Fauna	**Nama Latin**
I	**Flora**	
1	Damar Putih, Kopal Keruling	*Agathis labillardieri*
2	Sarangan/saninten	*Castanopsis argentea*
3	Kantong semar pinggang seksi	*Nepenthes gymnamphora*
II	**Fauna**	
A	**Mamalia**	
4	Landak jawa	*Hystrix javanica*
5	Berang-berang wregul	*Lutrogale perspicillata*
6	Trenggiling	*Manis javanica*
7	Kijang muncak	*Muntiacus muntjak*
8	Kucing hutan/kuwuk	*Prionailurus bengalensis*
9	Lutung jawa/ lutung budeng	*Trachypithecus auratus*
B	**Burung**	
10	Elangalap p cina	*Accipiter soloensis*
11	Elangalap jambul	*Accipiter trivirgatus*
12	Elangalap besra	*Accipiter virgatus*
13	Jalak putih-sayap hitam	*Acridotheres melanopterus*
14	Burung-madu jawa	*Aethopyga mystacalis*
15	Baza hitam	*Aviceda leuphotes*
16	Cica-daun sayap-biru	*Chloropsis cochinchinensis*
17	Cica daun besar	*Chloropsis sonnerati*
18	Ekek jawa/ekek geling	*Cissa thalassina*
19	Ciung-mungkal jawa	*Cochoa azurea*
20	Tangkar cetrong	*Crypsirina temia*
21	Alap-alap sapi	*Falco moluccensis*
22	Alap-alap kawah	*Falco peregrinus*
23	Alap-alap macan	*Falco severus*
24	Elang hitam	*Ictinaetus malaiensis*
25	Gelatik jawa	*Lonchura oryzivora*
26	Serindit jawa	*Loriculus pusillus*
27	Elang jawa	*Nisaetus bartelsi*
28	Elang brontok	*Nisaetus cirrhatus*
29	Sirkepmadu asia	*Pernis ptilorhynchus*
30	Cerecet jawa	*Psaltria exilis*
31	Takur tohtor	*Psilopogon armillaris*
32	Takur tulung-tumpuk	*Psilopogon javensis*
33	Takur bultok	*Psilopogon lineatus*
34	Betet Biasa	*Psittacula alexandri*
35	Kipasan Belang	*Rhipidura javanica*
36	Kipasan Ekor Merah	*Rhipidura phoenicura*
37	Elangular bido	*Spilornis cheela*
38	Tepus dada-putih	*Stachyris grammiceps*

No	Nama Spesies	
	Nama Flora/ Fauna	Nama Latin
39	Kacamata jawa	*Zosterops flavus*
C	**Serangga**	
40	kupu-kupu raja helena	*Troides helena*

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, 2024, diolah

Mitigasi dalam rangka mencegah dan mengurangi penurunan keanekaragaman hayati yang berada di Kabupaten Sleman dapat dilakukan dengan upaya yang relevan dengan kasus-kasus yang sedang terjadi dan berpotensi berkelanjutan apabila tidak didukung dengan aksi yang memadai. Langkah mitigasi yang dapat dilakukan, antara lain:

1. Perencanaan dan penyusunan dokumen mengenai pengkajian, penilaian dan evaluasi kelayakan biodiversitas secara berkala dan berkesinambungan;
2. Keterlibatan dengan kelompok konservasi, lembaga penelitian, masyarakat lokal, lembaga pemerintah dan pihak berkepentingan lainnya dalam mendukung berbagi pengetahuan dan kolaborasi dalam program, dan inisiatif lainnya untuk perlindungan biodiversitas;
3. Peningkatan kapasitas serta dukungan dalam pengelolaan dan penelitian konservasi hutan, termasuk menjalin kemitraan dengan lembaga terkait untuk pelaksanaan survei dan monitoring keanekaragaman hayati; serta
4. Pengadaan program rehabilitasi progresif yang menargetkan pemulihan habitat.

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung dan daya tampung akan membahas mengenai elemen lingkungan hidup yang secara langsung menjadi penyokong kebutuhan kehidupan manusia. Bahasan dari daya dukung dan daya tampung meliputi daya dukung lahan, daya dukung pangan, daya dukung air dan daya dukung lahan bangunan.

2.1.1.3.1 Daya Dukung Lahan

Perhitungan ketersediaan daya dukung lahan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah. Berdasarkan hal tersebut, data yang diperlukan dalam perhitungan ketersediaan lahan yaitu produksi tiap jenis komoditi dan harga beras di tingkat produsen, harga satuan tiap komoditi ditingkat produsen, dan produktivitas beras di Kabupaten Sleman.

Luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk merupakan kebutuhan hidup layak per penduduk dibagi produktivitas beras. Kebutuhan hidup layak per penduduk diasumsikan sebesar 1 ton beras/kapita/tahun. Berdasarkan hasil perhitungan nilai ketersediaan lahan (SL) seluas 37.136 Ha dan kebutuhan lahan (DL) seluas 185.091 Ha. Dengan demikian, maka diperoleh nilai SL<DL dan daya dukung lahan dinyatakan/terlampaui. Dari hasil perhitungan tersebut, Kabupaten Sleman memiliki tingkat produksi lahan yang tidak mencukupi kebutuhan lahan penduduknya. Makna dari nilai daya dukung lahan yang sudah terlampaui adalah bahwa pelaksanaan pembangunan harus sangat melakukan efisiensi lahan.

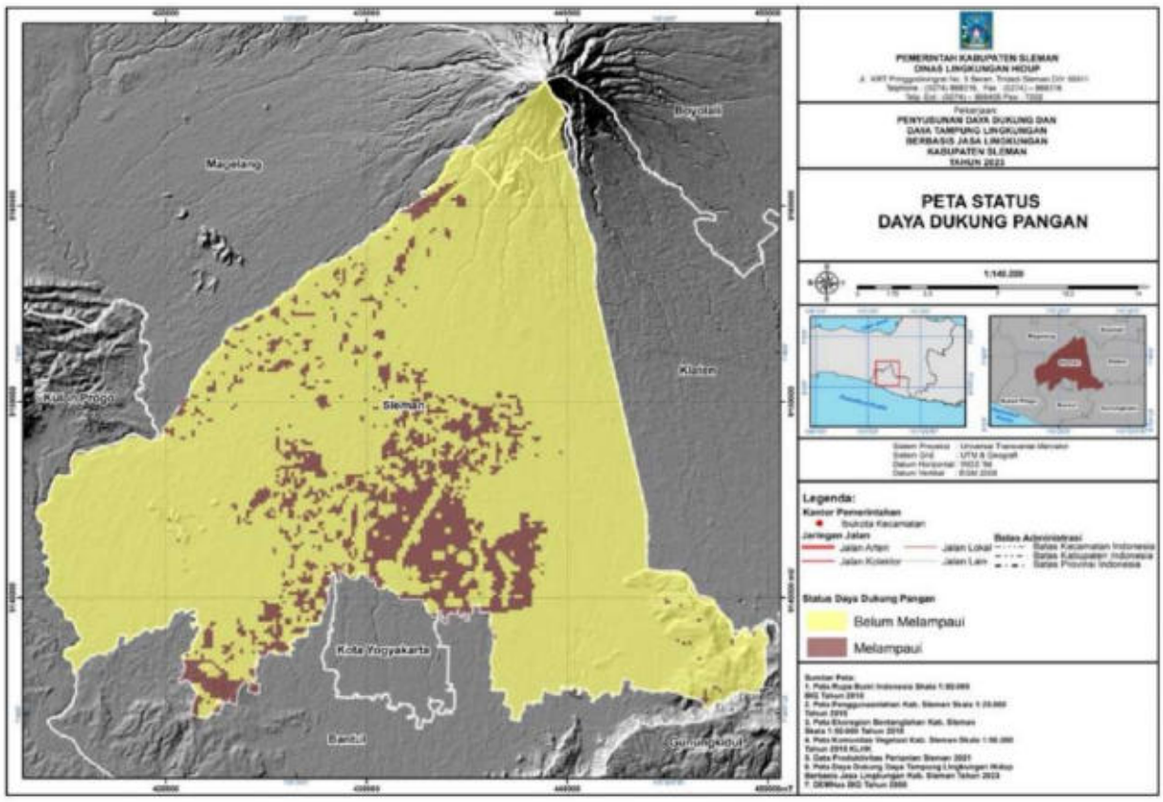
Perlindungan lahan sumber pangan, baik dalam bentuk pertanian maupun dalam bentuk subsektor pertanian lainnya, harus diutamakan. Alternatif dari penanganan permasalahan daya dukung lahan ini adalah dengan menggunakan rekayasa daya dukung melalui kerja sama pemanfaatan daya dukung lahan di

wilayah administratif tetangga atau wilayah administratif yang memang memiliki sektor basis penyediaan pangan.

2.1.1.3.2 Daya Dukung Pangan

Perhitungan kebutuhan bahan pangan (gram/per kapita/hari atau kg/tahun) dihasilkan dari hasil kali antara konsumsi beras yakni 300 gram dengan jumlah penduduk selama satu tahun pada tiap grid analisis daya dukung pangan. Persebaran ketersediaan bahan pangan dalam sistem grid terbesar terdapat di wilayah bagian timur Kabupaten Sleman. Wilayah tersebut didominasi oleh ekoregion dataran fluvio vulkan material piroklastik yang berpotensi untuk pengembangan lahan pertanian. Hal ini menyebabkan kelas lahan persawahan sering ditemui di ekoregion tersebut sehingga memiliki ketersediaan pangan yang cukup besar.

Setiap kapanewon di Kabupaten Sleman memiliki catatan khusus yang mencakup jumlah kebutuhan bahan pangan per tahun, diukur dalam kilogram, serta ketersediaan beras yang diharapkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu, ketersediaan beras juga dicatat untuk setiap kapanewon, memungkinkan evaluasi sejauh mana kebutuhan dapat terpenuhi melalui produksi lokal. Total keseluruhan untuk Kabupaten Sleman, yang mencakup jumlah agregat kebutuhan dan ketersediaan beras, memberikan gambaran komprehensif tentang status daya dukung pangan di tingkat kabupaten hingga akhir tahun perencanaan. Secara spasial, status daya dukung pangan Kabupaten Sleman dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Kabupaten Sleman, 2023

Gambar 2.23. Peta Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Sleman Tahun 2023

Dengan bertambahnya penduduk setiap tahun, maka jumlah kebutuhan bahan pangan juga akan ikut meningkat. Untuk mengetahui kebutuhan pangan selama tahun perencanaan, maka dilakukan proyeksi kebutuhan bahan pangan Berdasarkan perhitungan ketersediaan pangan yang telah dilakukan,

ketersediaan bahan pangan dalam hal ini adalah ketersediaan beras di Kabupaten Sleman sebesar 199.899.160 kilogram per tahunnya.

Tabel 2.7. Proyeksi Daya Dukung Pangan Kabupaten Sleman Tahun 2025-2030

Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk	Kebutuhan Pangan (kg/tahun)	Status Daya Dukung Pangan
2025	1.179.382	93.732.848	Belum Terlampaui
2026	1.190.034	96.313.074	Belum Terlampaui
2027	1.200.474	99.813.038	Belum Terlampaui
2028	1.210.694	104.304.897	Belum Terlampaui
2029	1.220.670	109.886.873	Belum Terlampaui
2030	1.230.418	111.656.002	Belum Terlampaui

Sumber: Analisis, 2025

Seperti yang dapat dilihat pada tabel di atas, hingga tahun akhir perencanaan yakni 2030, kebutuhan bahan pangan belum melampaui ketersediaan beras. Dengan persediaan bahan pangan yang cukup yang didukung dengan perencanaan lahan yang baik sehingga alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian dapat ditekan seminimal mungkin, maka kebutuhan bahan pangan akan tercukupi meskipun pertambahan penduduk Kabupaten Sleman meningkat setiap tahunnya. Kebutuhan dan ketersediaan bahan pangan per kapanewon yang disajikan tabel di bawah, menunjukkan bahwa kebutuhan bahan pangan Kabupaten Sleman cukup tinggi di bagian selatan seperti di Kapanewon Depok, Gamping, Mlati dan Ngaglik. Tingginya kebutuhan akan pangan ini tentunya dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang tinggi dan faktor kedekatan dengan pusat kota Yogyakarta. Daerah lumbung padi di Kabupaten Sleman adalah kawasan Sleman Barat yang meliputi Kapanewon Seyegan, Moyudan, Godean, dan Minggir.

Tabel 2.8. Proyeksi Daya Dukung Pangan Kabupaten Sleman Per Kapanewon Tahun 2025-2030

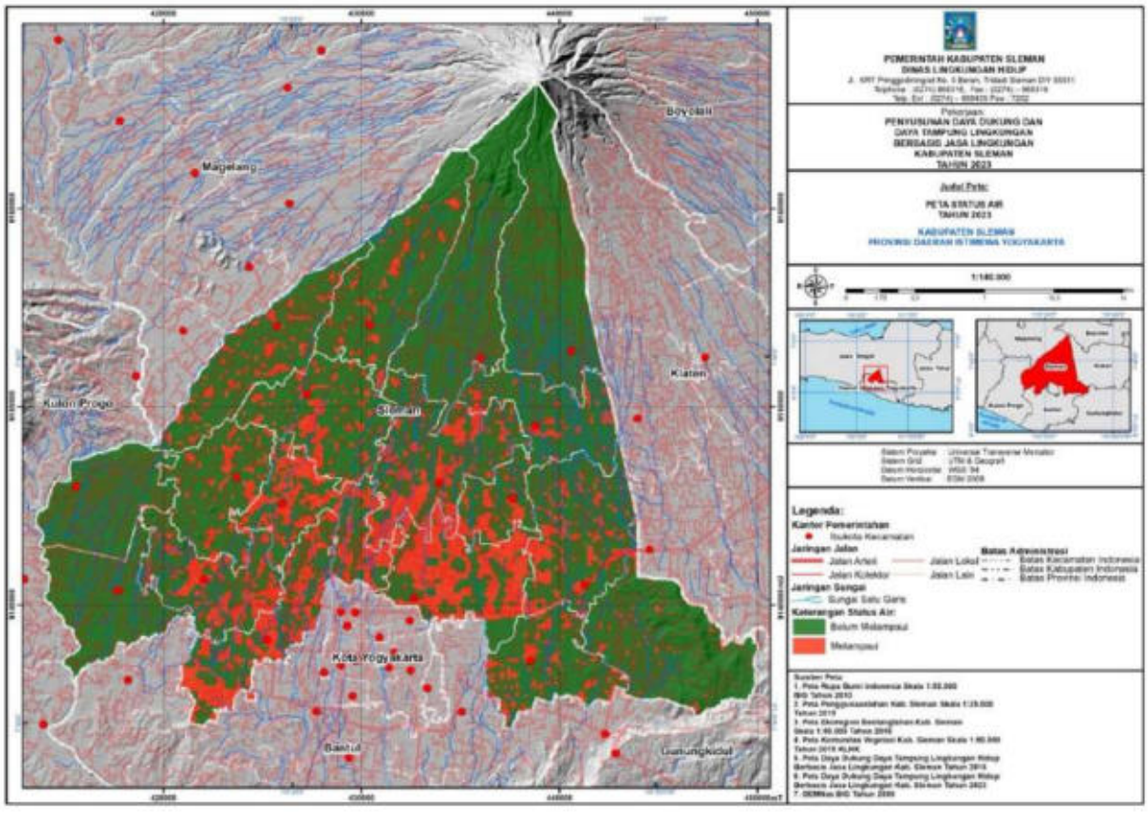
Kapanewon	Ketersediaan Beras (kg/tahun)	Kebutuhan Bahan Pangan Per Tahun (kg/tahun)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Moyudan	13.626.980	2.598.000	2.675.305	2.780.401	2.915.559	3.083.948	3.087.998
Minggir	14.258.760	2.492.580	2.567.607	2.669.614	2.800.982	2.964.723	2.961.803
Seyegan	12.530.820	3.941.791	4.010.584	4.101.826	4.215.897	4.353.390	4.741.860
Godean	13.369.680	5.584.386	5.727.420	5.920.454	6.166.606	6.470.201	6.664.353
Gamping	11.339.800	7.909.348	8.066.948	8.277.182	8.541.767	8.863.157	9.491.567
Mlati	9.065.020	7.786.868	8.076.302	8.474.184	8.992.921	9.649.394	9.189.264
Depok	4.708.280	10.085.209	10.395.268	10.817.451	11.361.489	12.040.497	11.975.507
Berbah	11.815.960	4.564.011	4.658.761	4.785.310	4.944.960	5.139.433	5.472.661
Prambanan	11.802.940	4.147.264	4.283.640	4.469.916	4.710.958	5.013.294	4.914.500
Kalasan	13.713.780	6.734.858	6.964.783	7.279.427	7.687.435	8.200.567	7.971.109
Ngemplak	17.622.260	5.281.370	5.455.859	5.694.294	6.002.895	6.390.084	6.257.390
Ngaglik	14.371.600	14.836.062	15.269.326	15.857.681	16.613.592	17.553.768	17.643.592
Sleman	12.339.240	5.560.004	5.682.505	5.846.800	6.054.664	6.308.495	6.658.514
Tempel	9.319.840	4.096.403	4.155.606	4.233.453	4.329.759	4.444.615	4.942.331
Turi	3.755.960	2.817.317	2.878.973	2.961.622	3.066.107	3.193.753	3.374.334
Pakem	13.758.420	2.902.675	3.001.292	3.136.222	3.311.175	3.531.101	3.436.017
Cangkringan	12.499.820	2.394.702	2.442.894	2.507.201	2.588.130	2.686.451	2.873.202
Kab. Sleman	**199.899.160**	**93.732.848**	**96.313.074**	**99.813.038**	**104.304.897**	**109.886.873**	**111.656.002**

Sumber: Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Kabupaten Sleman Tahun 2023, Analisis, 2025

Meskipun secara keseluruhan daya dukung pangan Kabupaten Sleman masih belum melampaui, namun terdapat dua kapanewon yang mengalami defisit atau kekurangan beras, yaitu Kapanewon Depok dan Ngaglik. Kedua kapanewon ini memang merupakan kapanewon dengan tingkat perkembangan perkotaan yang tinggi. Oleh karena itu, selain penguatan intensifikasi pengelolaan lahan pertanian (termasuk konsep *urban farming*),diperlukan dukungan pangan lintas kapanewon untuk dapat memenuhi daya dukung pangan pada kedua kapanewon ini, tentunya disertai dengan upaya imbal balik atau pemerataan kesejahteraan antara pendukung pangan dengan kawasan yang menjadi perkotaan.

2.1.1.3.3 Daya Dukung Air

Daya dukung air ditinjau dari ketersediaan air (*supply* air) dan kebutuhan air (*demand* air) terdapat dihitung melalui ketersediaan air dengan pendekatan limpasan air dan potensi air tanah yang dibandingkan dengan kebutuhan air dari total kebutuhan air domestik dan non domestik. Ketersediaan air tersebut meliputi cadangan air yang berada di permukaan maupun cadangan air tanah secara umum. Adapun kecepatan peningkatan jumlah penduduk, yang diiringi ketersediaan air yang relatif statis, menjadi faktor utama dalam menggambarkan defisit air ini. Selain itu, perkembangan aktivitas ekonomi dan industri serta perubahan gaya hidup yang mempengaruhi besaran penggunaan air di setiap wilayah tersebut. Secara spasial, persebaran status air Kabupaten Sleman dengan menggunakan metode grid dapat dilihat pada peta berikut.



Sumber: Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Kabupaten Sleman, 2023

Gambar 2.24. Peta Status Air Kabupaten Sleman Tahun 2023

Tabel 2.9. Proyeksi Daya Dukung Air Kabupaten Sleman per Kapanewon Tahun 2025-2030

Kapanewon	Ketersediaan Air (m^3/tahun)	Kebutuhan Air Hidup Layak (m3/tahun)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Moyudan	100.865.201,61	57.630.481,22	58.783.088,96	59.958.743,16	61.157.917,08	62.381.083,94	63.616.228,82
Minggir	204.911.858,25	55.187.083,63	56.290.823,49	57.416.632,71	58.564.964,46	59.736.271,90	60.918.840,01
Seyegan	82.426.307,86	87.271.421,71	89.016.847,28	90.797.172,76	92.613.114,78	94.465.389,98	96.362.333,52
Godean	98.260.163,72	124.141.448,88	126.624.273,78	129.156.742,95	131.739.875,77	134.374.691,63	137.032.666,07
Gamping	103.689.103,28	178.300.620,42	181.866.626,97	185.503.936,09	189.214.011,88	192.998.318,47	196.848.102,18
Mlati	134.798.122,31	175.132.629,05	178.635.275,88	182.207.958,39	185.852.114,68	189.569.182,86	193.389.283,68
Depok	109.989.023,02	227.353.933,53	231.901.004,74	236.538.994,96	241.269.771,13	246.095.200,15	251.027.563,76
Berbah	91.359.232,66	103.094.527,52	105.156.414,69	107.259.529,44	109.404.718,33	111.592.827,94	113.847.528,46
Prambanan	104.149.466,88	92.141.365,89	93.984.190,18	95.863.861,88	97.781.137,60	99.736.773,97	101.735.923,02
Kalasan	135.871.229,20	149.384.273,70	152.371.954,27	155.419.373,73	158.527.758,75	161.698.336,00	164.937.770,86
Ngemplak	124.177.930,39	117.569.551,90	119.920.939,08	122.319.342,41	124.765.727,33	127.261.059,25	129.820.623,43
Ngaglik	179.666.491,71	183.962.562,44	187.641.807,64	191.394.619,62	195.222.509,00	199.126.986,37	203.138.776,15
Sleman	150.153.436,94	125.085.105,89	127.586.803,90	130.138.523,54	132.741.291,96	135.396.136,28	138.120.662,93
Tempel	93.326.140,87	91.922.302,66	93.760.745,69	95.635.948,53	97.548.665,99	99.499.652,89	101.460.840,26
Turi	113.799.984,76	62.938.551,86	64.197.320,83	65.481.258,98	66.790.883,13	68.126.710,09	69.479.278,90
Pakem	126.622.109,50	63.781.102,76	65.056.722,72	66.357.848,79	67.685.004,72	69.038.714,24	70.392.495,81
Cangkringan	134.340.551,99	53.586.236,93	54.657.959,91	55.751.112,06	56.866.133,43	58.003.464,01	59.153.934,13
Kab. Sleman	**2.088.406.354,94**	**1.948.483.200,00**	**1.987.452.800,00**	**2.027.201.600,00**	**2.067.745.600,00**	**2.109.100.800,00**	**2.151.282.852,00**

Sumber: Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Kabupaten Sleman Tahun 2023, Analisis, 2025

Dari hasil perhitungan neraca air di atas, diketahui bahwa status daya dukung air yang mengalami defisit pada awal tahun perencanaan 2025 adalah di Kapanewon Seyegan, Godean, Gamping, Mlati, Depok, Berbah, Kalasan dan Ngaglik, meskipun secara Kabupaten Sleman masih memiliki status daya dukung air yang mencukupi. Berdasarkan hasil analisis daya dukung daya tampung Kabupaten Sleman, ketersediaan air dan kebutuhan air Kabupaten Sleman disajikan dalam tabel di bawah

Tabel 2.10. Proyeksi Daya Dukung Air Kabupaten Sleman Tahun 2025-2030

Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk	Kebutuhan Air Hidup Layak (m3/ tahun)	Status Daya Dukung Air
2025	1.179.382	1.948.483.160	Belum Terlampaui
2026	1.190.034	1.987.452.823	Belum Terlampaui
2027	1.200.474	2.027.201.879	Belum Terlampaui
2028	1.210.694	2.067.745.917	Belum Terlampaui
2029	1.220.670	2.109.100.835	Terlampaui
2030	1.230.418	2.151.282.852	Terlampaui

Sumber: Analisis, 2025

Pada akhir tahun perencanaan, tahun 2030, status daya dukung air bergeser menjadi "terlampaui" yang menandakan bahwa kebutuhan air melebihi kapasitas daya dukung yang ada. Potensi defisit air perlu mendapat perhatian serius. Dalam menghadapi potensi krisis air, perencanaan dan implementasi tindakan yang tepat perlu dilakukan. Upaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air, perlindungan terhadap sumber daya air, dan penyesuaian kebijakan terkait dapat menjadi solusi untuk mengatasi defisit air yang terjadi. Langkah-langkah ini perlu didukung oleh kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai keseimbangan yang berkelanjutan antara kebutuhan air dan daya dukung air. Pemantauan yang cermat terhadap perkembangan penduduk dan kebutuhan air, serta penyesuaian kebijakan secara berkala, akan menjadi kunci dalam mengelola sumber daya air Kabupaten Sleman secara berkelanjutan.

Selain itu, salah satu langkah antisipasinya dengan mengoptimalkan penggunaan air permukaan, diantaranya adalah pemanfaatan SPAM Regional Kartamantul dengan debit 700 liter/detik (alokasi untuk Sleman 150 liter/detik) dan SPAM Berbah dengan debit total 70 liter/detik, sehingga cadangan air relatif lebih terjaga.

2.1.1.3.4 Daya Dukung Lahan Bangunan

Berdasarkan hasil analisis secara spasial menggunakan data penggunaan lahan, Kabupaten Sleman memiliki luas lahan terbangun sebesar 23.530 Ha. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan sesuai dengan asumsi permukiman secara umum, koefisien luas lahan terbangun maksimal Kabupaten Sleman menggunakan asumsi 50%, sehingga daya dukung lahan bangunan sebesar 1,21, yang berarti lahan masih mampu untuk menampung penduduk.

Adapun analisis perhitungan daya dukung lahan bangunan dengan pendekatan besaran lahan terbangun, yang meliputi guna lahan bandara, gedung, dan permukiman juga belum terlampaui. Asumsi yang digunakan adalah jumlah anggota setiap keluarga adalah 4 orang setara dengan 100 m^2 untuk menghitung

jumlah kebutuhan hunian ditambah dengan luasan lahan untuk kebutuhan prasarana sarana umum. Hasil analisis perhitungan daya dukung lahan bangunan dengan pendekatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11. Proyeksi Daya Dukung Lahan Bangunan Kabupaten Sleman Tahun 2025-2030

Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk	Daya Dukung Lahan Bangunan	Status Daya Dukung Lahan Bangunan
2025	1.217.802	0,26	Belum Terlampaui
2026	1.242.158	0,26	Belum Terlampaui
2027	1.267.001	0,27	Belum Terlampaui
2028	1.292.341	0,27	Belum Terlampaui
2029	1.318.188	0,28	Belum Terlampaui
2030	1.344.552	0,28	Belum Terlampaui

Sumber: Analisis, 2025

Berdasarkan hasil analisis perhitungan di tabel di atas, daya dukung lahan bangunan di Kabupaten Sleman hingga di akhir tahun perencanaan memiliki status ”belum terlampaui”. Kapanewon yang lahannya masih cukup sebagian besar berada di kawasan utara seperti Kapanewon Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan ataupun di kawasan barat seperti Kapanewon Minggir, Moyudan, dan Seyegan. Namun perlu diingat bahwa kawasan utara Kabupaten Sleman sebagai kawasan lindung dan reservasi air serta kawasan barat kabupaten digunakan sebagai daerah lumbung pangan. Dengan meningkatnya jumlah penduduk setiap tahunnya, sehingga kebutuhan hunian juga meningkat, maka alih fungsi lahan akan menjadi permasalahan utama dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan.

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

2.1.1.4.1 Indeks Ketahanan Pangan

Berbagai upaya ketahanan pangan difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pola konsumsi pangan yang aman beragam, bergizi dan imbang, serta meningkatkan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung ketahanan pangan.

Pada tahun 2024, ketersediaan pangan tersedia sebesar 132.206,00 ton dimana hal ini menunjukkan penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini terkait dengan kondisi alih fungsi lahan dan beberapa kendala hidrometeorologi serta pemeliharaan jaringan irigasi. Ketersediaan cadangan pangan Kabupaten Sleman juga terus meningkat hingga mencapai 142.832 kg pada tahun 2024.

Tabel 2.12. Indikator Ketahanan Pangan Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Ketahanan Pangan	82,3	83,39	83,16	83,16	84,91
2	Ketersediaan pangan utama (ton)	144.879,15	152.963,54	162.239,46	159.427,00	132.206,00
3	Ketersediaan cadangan pangan (kg)	82.832	97.823	112.832	127.832	142.832

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Sleman dalam lima tahun selalu di atas angka 80 dan berada pada kelompok prioritas 6 (sangat tahan). Dengan demikian, ketersediaan pangan cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan penduduk.

2.1.1.4.2 Prevalensi Ketidakcukupan Pangan

Prevalensi ketidakcukupan pangan merupakan proporsi populasi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi energi di bawah kebutuhan minimum untuk dapat hidup sehat dan aktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan pada tahun tertentu. Hal ini berarti semakin kecil nilai prevalensi ketidakcukupan pangan semakin baik kondisi suatu wilayah. Pada tahun 2024, prevalensi ketidakcukupan pangan Kabupaten Sleman mencapai 8,05, dimana pada tahun-tahun sebelum pandemi *Covid-19* cenderung berada pada angka di bawah 5. Hal ini memberikan gambaran, ketidakcukupan pangan masih terjadi.

Tabel 2.13. Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of undernourishment*)	6,68	6,95	8,08	6,64	8,05

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

2.1.1.4.3 Konsumsi Listrik per Kapita

Energi listrik sudah menjadi kebutuhan setiap orang dewasa ini dan pemenuhan kebutuhan listrik menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sleman. Meskipun energi bukan menjadi kewenangan kabupaten, namun Kabupaten Sleman selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah DIY terkait elektrifikasi. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah DIY disebutkan bahwa distribusi energi listrik akan dilakukan dengan pembangunan gardu distribusi, saluran udara tegangan menengah dan saluran udara tegangan rendah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kapasitas terpasang listrik pada kawasan peruntukan industri.

Konsumsi listrik Indonesia pada tahun 2024 mencapai 1.411 kWh/kapita, sedangkan konsumsi listrik Kabupaten Sleman pada tahun 2023 sebesar 1.337 kWh/kapita. Adapun listrik yang didistribusikan di wilayah DIY pada tahun 2024 sebesar 3.891,18 GWh.

2.1.1.4.4 Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum

Sarana dan prasarana air bersih di Kabupaten Sleman termasuk sudah baik dan dapat memenuhi kebutuhan air bersih hampir di seluruh Kabupaten Sleman. Sumber air baku yang digunakan Kabupaten Sleman adalah mata air, sumur dangkal, sumur dalam dan air permukaan, baik melalui perpipaan maupun non perpipaan.

Jumlah unit produksi air bersih perpipaan sebanyak 17 unit yang menggunakan air baku dari sumur dangkal/*shallowwell* (SW), *deepwell* (DW), sumur bor (SB) dan bak pelepas tekanan (*reservoir*), serta 1 unit PDAM Regional Kartamantul dengan menggunakan air baku dari Sungai Progo. Selain unit produksi, juga

terdapat sarana dua reservoir untuk menampung dan mengalirkan air bersih dari unit produksi yaitu reservoir Sleman dan Guwo.

Tabel 2.14. Kapasitas Air Baku Tahun 2020-2024 (m^3/detik)

	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Sleman	-	-	0,58	0,68	0,56-0,62*)
DIY	0,82	0,88	0,90	0,92	NA
Nasional	86,24	95,24	107,24	122,14	NA

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024
**) Angka sementara*

Jumlah kapasitas produksi air bersih melalui perpipaan di Kabupaten Sleman pada tahun 2023 sebesar 678,32 L/detik, dan pada tahun 2024 sekitar 0,56-0,62 m^3/detik. Nilai kapasitas air baku ini turun dari tahun 2023 karena musim kemarau lebih panjang dan intens, terjadi degradasi lingkungan, serta perubahan iklim. Kondisi tersebut mengakibatkan berkurangnya sumber air baku yang tersedia, sehingga berdampak pada ketersediaan air bersih, meskipun ada penambahan sumber air baku di Kabupaten Sleman. Sumber air baku untuk suplai air bersih tersebut berasal dari air permukaan seperti sungai, dan air non permukaan seperti sumur, mata air, dan lainnya.

Kali Opak masih menjadi andalan sumber air baku PDAM dengan debit maksimal 65,69 m^3/detik dan debit minimal 45,24 m^3/detik. Potensi sungai lainnya yang dapat dijadikan sebagai sumber air baku dengan acuan konsistensi debit air yang memadai atau lebih dari 20 m^3/detik yaitu Sungai Krasak, Sungai Boyong, dan Sungai Kuningan. Adapun pasokan air bersih curah dari PDAM Kartamantul pada tahun 2024 sebesar 150 L/detik, melalui reservoir Sleman sebesar 100 L/detik dan reservoir regional Guwo sebesar 50 L/detik, dengan penyerapan pasokan air sebesar 103 L/detik. Reservoir Sleman melayani sebagian Kapanewon Sleman, Depok dan Ngaglik, sedangkan reservoir regional Guwo melayani Kapanewon Godean dan Minggir.

Tabel 2.15. Jumlah Air PDAM Kabupaten Sleman Disalurkan ke Pelanggan Tahun 2022-2024

Uraian	2022	2023	2024
Jumlah air disalurkan ke pelanggan (m^3/tahun)	7.454.215	8.123.963	8.607.996
Jumlah air disalurkan ke pelanggan (liter/detik)	239,65	261,19	276,75

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan hal tersebut, sumber air baku di Kabupaten Sleman masih mencukupi untuk meningkatkan ketersediaan air minum perpipaan dan mencapai target RPJMN Tahun 2025-2029 untuk akses air minum aman 43%.

Selain melalui perpipaan, sumber air baku yang dipergunakan masyarakat di Kabupaten Sleman berasal dari air sumur dangkal dan mata air. Pada tahun 2024, terdapat 290.393 unit sumur dangkal serta 373 unit mata air dengan 198 unit kondisi baik. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.16. Kondisi Sumber Air Baku Air Sumur dan Mata Air di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

Kondisi Sumber Air Baku	2020	2021	2022	2023	2024
Air sumur (unit)	293.365	286.352	288.552	286.090	290.393
Mata air (unit)	205	373	373	373	373
- Kondisi mata air baik	NA	185	192	197	198
- Kondisi mata air sedang	NA	148	142	144	143
- Kondisi mata air buruk	NA	40	38	32	32

Sumber: DPUPKP Kabupaten Sleman, 2025

Akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum di Kabupaten Sleman telah mencapai 100%, dengan akses layak sebesar 98%. Akses perpipaan baru sebesar 23,63% pada tahun 2024, namun angka ini terus ditingkatkan terlebih dengan dilaksanakannya program yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pengurangan *stunting* oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum.

Tabel 2.17. Akses Terhadap Air Minum di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum (%)	100	100	100	100	100
2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui jaringan perpipaan terhadap jumlah rumah tangga di seluruh kabupaten (%)	21,53	20,60	21,41	23,50	23,63
3	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	NA	NA	NA	NA	19,99

Sumber: DPUPKP Kabupaten Sleman, 2025

Guna menjamin ketersediaan air baku, Kabupaten Sleman perlu melakukan upaya pengendalian dan peningkatan area tangkapan air, antara lain:

a. Melakukan penghijauan pada daerah tangkapan air di daerah hilir sekitar Gunungapi Merapi;
b. Mengupayakan penambahan kapasitas sumber air dari Embung Kembangarum, Embung Argomulyo, Embung Tambakboyo, air permukaan Sungai Bedog dan Sungai Denggung dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak;
c. Pengembangan sistem penyediaan air minum di kawasan regional Kartamantul dengan kapasitas rencana 700 liter/detik. Pengembangan sistem penyediaan air minum ini telah dilaksanakan secara *multi years*. Ada 2 (dua) sistem yang terbangun dalam pengembangan sistem penyediaan air minum Kartamantul, yaitu sistem penyediaan air minum Bantar dengan kapasitas rencana 400 liter/detik dan sistem penyediaan air minum Kebonagung dengan kapasitas 300 liter/detik;

d. Pembangunan konstruksi jaringan air bersih di wilayah Prambanan bagian atas (daerah langka air) dalam rangka meningkatkan cakupan layanan sambungan rumah oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum; dan
e. Mengusulkan pada pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak agar pembangunan *long storage* Karangtalun segera direalisasikan.

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

2.1.1.5.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Pada tahun 2024, perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) di Kabupaten Sleman dengan menggunakan data kualitas air 11 (sebelas) sungai diperoleh angka 41,64. Nilai tersebut masih berada di atas IKA DIY namun jauh lebih rendah dibandingkan IKA Nasional. Nilai ini juga termasuk dalam kategori kurang baik. Parameter yang paling berpengaruh adalah kandungan *fecal coli* maupun total *coli*, yang menjadi indikasi bahwa sumber pencemaran berpotensi dari limbah rumah tangga atau limbah kegiatan peternakan serta pemanfaatan pupuk hasil peternakan pada pertanian.

Sementara itu, Indeks Kualitas Udara (IKU) berada pada angka yang lebih tinggi yakni 91,70 meningkat cukup baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Angka tersebut menunjukkan bahwa kualitas udara di Kabupaten Sleman dalam kategori sangat baik. Adapun, kondisi kualitas udara ini nantinya akan bergantung juga pada jasa lingkungan pengaturan kualitas udara yang banyak dipengaruhi oleh Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Indeks Kualitas Lahan (IKL) tahun 2024 mencapai 43,784, sama dengan tahun 2023. Hal ini menunjukkan tidak ada penambahan luasan tutupan lahan sepanjang tahun 2024. Adapun peningkatan IKL dari tahun 2022 ke tahun 2023 karena penambahan ruang terbuka hijau atau ruang-ruang yang memiliki fungsi lindung seperti sempadan sungai dan sempadan embung. Pada tahun 2023, nilai IKL Kabupaten Sleman lebih rendah dibandingkan dengan nilai DIY dan Nasional dengan nilai IKL berturut-turut sebesar 48,68 dan 61,79. Kabupaten Sleman seharusnya memiliki IKL lebih tinggi karena mempunyai fungsi kawasan hulu, namun yang terjadi sebaliknya. Kabupaten Sleman memiliki skor lebih rendah. Dalam jangka panjang, hal ini akan mengganggu peran Kabupaten Sleman sebagai kawasan lindung untuk kawasan di bawahnya.

Tabel 2.18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	41,33	43,33	43,54	41,31	41,64
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	87,63	83,77	83,99	89,51	91,70
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	34,71	30,52	31,73	43,78	43,784
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	58,2	56,90	57,33	61,37	62,38

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, 2025

Nilai indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) yang merupakan agregat dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas lahan memiliki capaian yang terus membaik. Angka ini meningkat terutama karena kualitas udara dan kualitas lahan meningkat, meskipun terus dibebani kualitas air yang menurun.

Upaya perbaikan kualitas air salah satunya melalui perbaikan kualitas tutupan lahan dan peningkatan fungsi jasa lingkungan pemurnian air dan pengolahan limbah. Adapun upaya peningkatan IKLH dilakukan melalui:

1. Inventarisasi sumber pencemar, melakukan upaya preventif dalam penanganan dengan melibatkan peran serta masyarakat; dan
2. Pengawasan dan perbaikan/pemulihan akibat pencemaran.

2.1.1.5.2 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Akses sanitasi layak diidentifikasi jika sebuah rumah tangga memiliki toilet kedap air yang terhubung dengan tangki septik, sedangkan akses sanitasi aman diidentifikasi jika suatu rumah tangga memiliki toilet sendiri dengan sekat air yang terhubung dengan tangki septik yang dikuras secara teratur. Kondisi tangki septik dan lokasi pembuangan limbah (lumpur tinja) tidak dipertimbangkan dalam identifikasi akses sanitasi aman. Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak dan aman di Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024 sebagai berikut.

Tabel 2.19. Akses Sanitasi Layak dan Aman di Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024

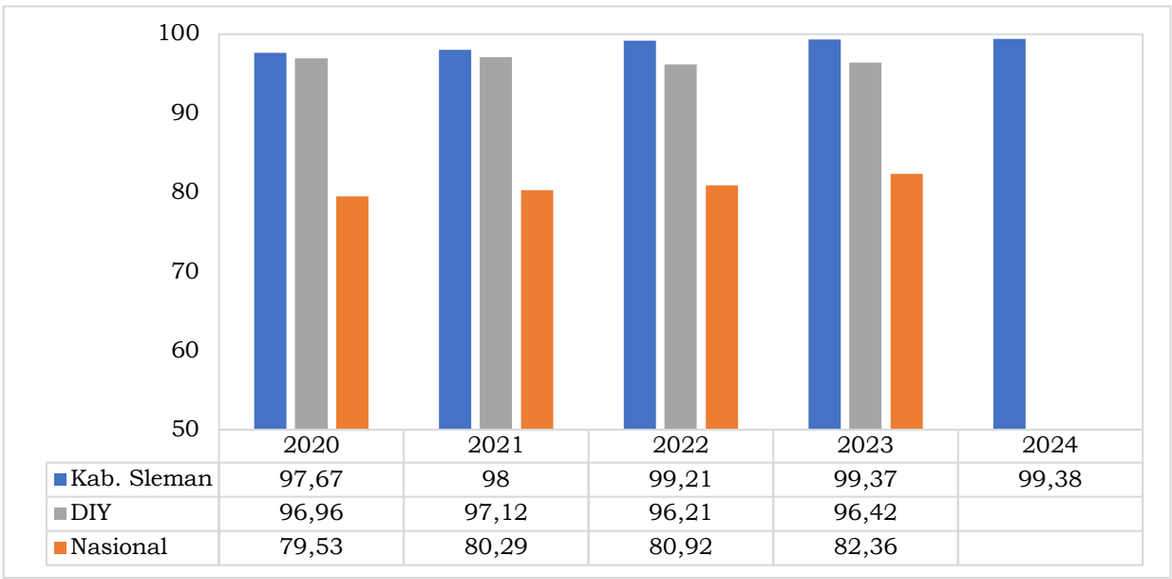
Uraian		2021		2022		2023		2024	
		%	KK	%	KK	%	KK	%	KK
Akses Layak (Termasuk Aman)		98	384.274	99,21	368.371	99,37	375.526	99,38	382.639
Akses Layak Belum Aman		76,23	298.898	74,56	276.829	73,22	276.702	70,04	269.664
A	Individu	71,29	279.509	71,57	265.734	70,31	265.723	67,13	258.479
B	Bersama	4,94	19.389	2,99	11.095	2,91	10.979	2,90	11.184
Akses Aman		21,77	85.376	24,65	91.542	26,15	98.824	29,34	112.975
Akses Belum Layak		2	7.823	0,79	2.921	0,63	2.383	0,62	2.283
Buang Air Besar Sembarangan		-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, 2025

Pada tahun 2024, rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Sleman mencapai 29,34% atau sebanyak 112.975 KK yang memiliki tangki septik aman. Kondisi ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2023 dimana akses aman mencapai 26,15% atau sebanyak 98.824 KK yang memiliki tangki septik aman. Sementara akses layak termasuk aman pada tahun 2024 mencapai 99,38% atau sebanyak 382.639 KK meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 99,37% atau sebanyak 375.526 KK.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029, target Pemerintah Indonesia pada tahun 2030 adalah tidak ada rumah tangga yang mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka serta rumah tangga dengan akses sanitasi aman sebesar 30%. Hal ini membuktikan bahwa sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Sleman sudah memiliki pemahaman dasar tentang hidup bersih dan sehat. Akses sanitasi layak yang tinggi merupakan buah pemahaman dasar rumah tangga yang baik, di samping (kepemilikan toilet) dianggap sebagai norma sosial. Tambahan tangki septik, truk penyedot lumpur tinja, dan instalasi

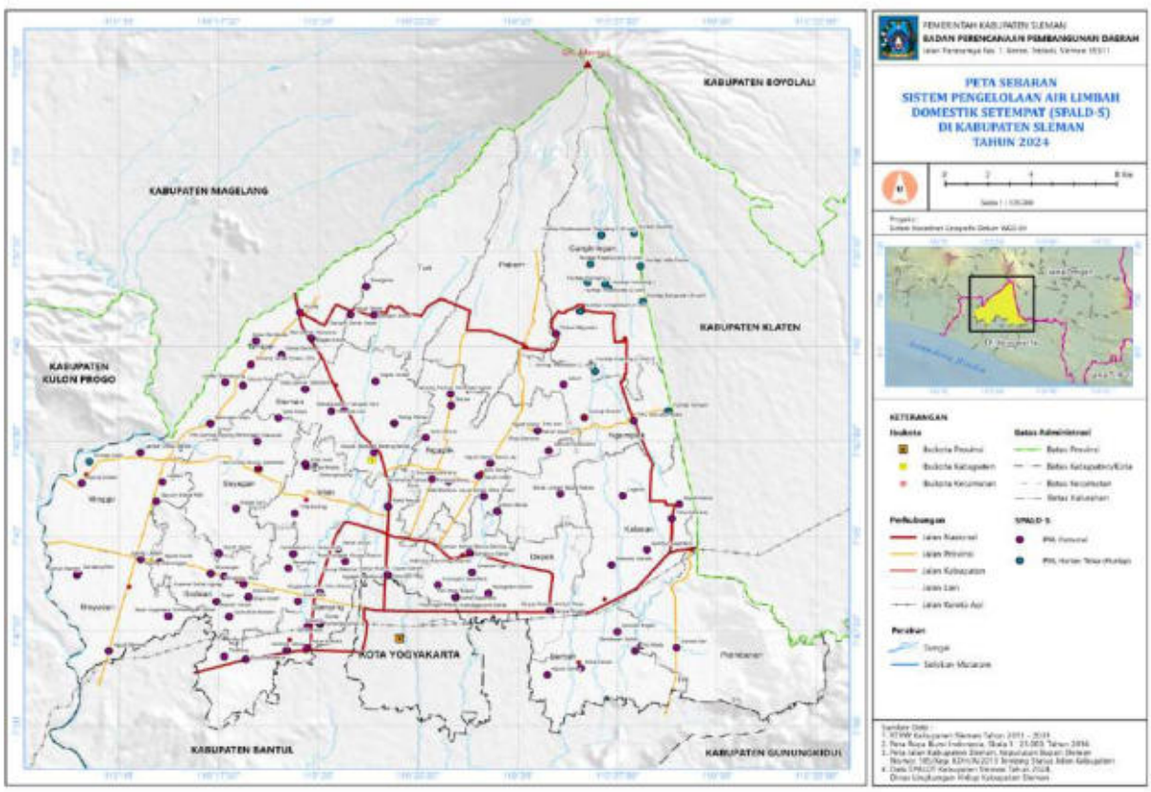
pengolahan lumpur tinja (IPLT) diperlukan untuk memenuhi target sanitasi tahun selanjutnya, baik untuk akses sanitasi layak dan akses sanitasi aman dari populasi.



	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Sleman	97,67	98	99,21	99,37	99,38
DIY	96,96	97,12	96,21	96,42	
Nasional	79,53	80,29	80,92	82,36	

Sumber: DLH Kabupaten Sleman, 2021-2025; Badan Pusat Statistik, 2021-2024

Grafik 2.1. Akses Sanitasi Layak (Termasuk Aman) di Kabupaten Sleman, DIY, dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, 2024

Gambar 2.25. Sebaran Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat di Kabupaten Sleman Tahun 2024

Berdasarkan topografi tanah yang cukup miring dan sebaran penduduk yang berpencar, maka instalasi pengolahan air limbah komunal merupakan sistem pengolahan air limbah yang paling tepat untuk Kabupaten Sleman, terutama

saat terjadi penambahan rumah dengan jumlah yang cukup banyak di suatu kawasan. Berdasarkan laporan *Evaluation Health Risk Analysis* (EHRA) Kabupaten Sleman Tahun 2023, Indeks Risiko Sanitasi dengan kategori tinggi masih ditemukan di 17 kalurahan (19,76%) dari 86 kalurahan. Indeks Risiko Sanitasi ini dihitung dari faktor persentase tangki septik aman, pencemaran karena pembuangan isi tangki septik, dan pencemaran karena sistem pengolahan air limbah tidak aman.

Pada saat ini, Kabupaten Sleman hanya memiliki satu unit instalasi pengelolaan lumpur tinja, yaitu instalasi pengelolaan lumpur tinja Madurejo yang memiliki kapasitas 60-75 m^3/hari. Di wilayah perkotaan, masyarakat Kabupaten Sleman menggunakan 2 instalasi pengolahan air limbah (IPAL) Kawasan yaitu IPAL Berbah dengan sambungan SR sebanyak 664 sambungan rumah (SR) dan IPAL Depok dengan sambungan SR sebanyak 661 SR.

Terkait dengan penyediaan sanitasi aman, maka diperlukan instalasi pengelolaan lumpur tinja. Instalasi pengelolaan lumpur tinja ini merupakan tempat untuk menampung dan mengolah hasil pengurasan lumpur tinja dari tanki septik masyarakat maupun instalasi pengolahan air limbah komunal agar tidak menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menyusun perencanaan, strategi, dan alokasi pendanaan untuk capaian target sanitasi aman pada tahun-tahun mendatang.

2.1.1.5.3 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Jumlah timbulan sampah dari Kabupaten Sleman pada tahun 2024 sebesar 607,60 ton/hari atau mencapai 221.775 ton per tahun. Adapun timbulan sampah terolah di fasilitas pengelolaan sampah yang merupakan jumlah sampah yang tertangani dan jumlah pengurangan sampah, pada tahun 2024 mencapai 314,69 ton/hari atau 51,79%. Dan sampah yang belum terolah sebesar 292,916 ton/hari.

Tabel 2.20. Pengelolaan Sampah Perkotaan Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

Tahun	Timbulan Sampah (ton/hari)	Penanganan		Pengurangan		Pengelolaan	
		ton/hari	%	ton/hari	%	ton/hari	%
2020	701,95	234,34	33,38	75,20	10,71	309,54	44,10
2021	735,57	269,69	36,66	121,69	16,54	391,38	53,21
2022	596,73	331,99	55,63	49,23	8,25	381,22	63,89
2023	601,80	262,18	43,57	50,04	8,32	312,22	51,88
2024	607,60	231,35	38,07	83,34	13,72	314,69	51,79

Sumber: Bappeda Kabupaten Sleman, 2025

Pada tahun 2021, jumlah timbulan sampah mencapai 735,57 ton/hari, lebih besar dari tahun 2022 dan setelahnya. Hal ini karena pada tahun 2021 dan sebelumnya, estimasi timbulan sampah per orang menggunakan 0,65/orang/kg/hari, sedangkan tahun 2022 dan setelahnya menggunakan 0,52/orang/kg/hari, dengan asumsi bahwa sejak tahun 2021 telah dilakukan pembatasan timbulan sampah. Pada tahun sebelumnya masih dihitung sebagai jumlah pengurangan sampah, sedangkan tahun berikutnya menjadi pengurang pada besaran estimasi timbulan sampah per orang.

Terkait kebutuhan jumlah sarana prasarana pengelolaan persampahan di Kabupaten Sleman perlu menimbang kebijakan DIY dalam penyediaan kerja

sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) Piyungan mengingat pengelolaan persampahan perkotaan yang masih dilaksanakan bersama antara Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta. Kabupaten Sleman merencanakan pembangunan minimal 3 (tiga) tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) skala menengah di kawasan Sleman timur, tengah, barat dan utara, yang dimulai pada tahun 2022 dengan pembangunan TPST Tamanmartani dan diikuti dengan TPST Sendangsari.

Ketersediaan fasilitas persampahan lainnya adalah tempat pengolahan sampah *reduce, reuse, recycle* (TPS3R) sebanyak 41 unit, bank sampah sebanyak 303 unit dan transfer depo sebanyak 15 unit. Proses pengembangan TPST berikutnya adalah TPST Donokerto yang akan melayani wilayah utara dan TPST Pringwulung yang akan melayani wilayah tengah. Ke depannya, pada TPS3R dan transfer depo juga akan dilakukan peningkatan untuk pengelolaan menuju TPST. Dilakukan juga pendampingan dan *capacity building* untuk bisa melakukan pengelolaan sampah secara mandiri di level masyarakat setiap Kalurahan. Pengelolaan ini diharapkan mampu meningkatkan persentase sampah perkotaan yang tertangani pada tahun-tahun berikutnya.

2.1.1.5.4 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Apabila dilihat dari proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah, pada tahun 2023 Kabupaten Sleman baru mencapai 85,22%, sedangkan DIY sudah mencapai 87,75% pada tahun 2022. Untuk tahun 2024, proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah menjadi 47,91% dikarenakan cakupan pelayanan yang semula hanya di wilayah perkotaan berubah menjadi seluruh wilayah kabupaten, termasuk wilayah perdesaan.

Berdasarkan analisis *Environmental Health Risk Assesment* (EHRA) terhadap 86 kalurahan di Kabupaten Sleman pada tahun 2023, terdapat 15 kalurahan (17,44%) masuk kategori berisiko tinggi dan 71 kalurahan (82,56%) masuk kategori sedang. Kalurahan dengan risiko tinggi berada pada Kapanewon Seyegan, Godean, Depok, Berbah, Prambanan, Ngaglik, Sleman, Tempel, Pakem dan Cangkringan. Hal ini menunjukkan potensi terjadinya permasalahan persampahan dianggap lebih tinggi pada kalurahan-kalurahan tersebut sehingga perlu terus dilakukan mitigasi.

2.1.1.5.5 Perubahan Penutup/Penggunaan Lahan dan Kesesuaian Tata Ruang

Tekanan demografi yang kuat, didorong oleh kebutuhan mendesak akan perumahan, secara tak sadar mendorong perubahan fungsi lahan, yang menyebabkan berkurangnya tutupan vegetasi di Kabupaten Sleman. Berkurangnya lahan hijau, persawahan, dan hutan dapat berpotensi menurunkan produksi pangan dan merusak kualitas lingkungan. Perubahan bentuk lahan di wilayah utara Kabupaten Sleman, yang pada dasarnya berperan sebagai daerah resapan air, juga dapat mengalami penurunan fungsinya. Pengurangan tutupan vegetasi tidak hanya merusak lahan, tetapi juga mengakibatkan penurunan cadangan air tanah dan kualitas udara. Kerusakan hutan dan lahan akan mengurangi kemampuan tanah dalam melakukan penyerapan air hujan dan menciptakan ketidakseimbangan ekosistem. Lahan terbuka yang sebelumnya berfungsi untuk peresapan air hujan berubah menjadi bangunan fisik seperti hotel, apartemen, perumahan, dan toko tanpa disertai

pembangunan infrastruktur drainase yang memadai. Penurunan infiltrasi air mengakibatkan terjadinya aliran permukaan (*run-off*) yang bermuara di saluran drainase. Kapasitas saluran drainase yang masih belum mencukupi, kondisi topografi yang menurun dan kapasitas aliran permukaan yang cukup besar menciptakan genangan-genangan bahkan banjir di beberapa wilayah Sleman, terutama kawasan perkotaan serta sumur kering pada musim kemarau.

Data capaian persentase kesesuaian pemanfaatan ruang pada tahun 2020 adalah sebesar 70%, sementara data capaian pada tahun 2023 sebesar 82,75%. Data ini menggambarkan bahwa masih terdapat 17,25% dari pemanfaatan ruang yang belum terwujud berupa pemanfaatan ruang yang belum terwujud maupun tidak sesuai. Dan pada tahun 2024, persentase kesesuaian pemanfaatan ruang mencapai 86,33%. Dari data pemanfaatan ruang yang belum terwujud, peruntukan ruang yang belum terwujud adalah sebagai berikut:

Tabel 2.21. Perwujudan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Sleman Tahun 2024

No	Fungsi Kawasan	Luas Rencana	Sesuai		Belum Terwujud		Tidak Sesuai	
			Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
1	Kawasan lindung							
	Badan air	424,08	421,57	99,41	0,00	0,00	2,51	0,59
	Cagar alam	0,06	0,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kawasan cagar alam geologi	23,78	23,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kawasan cagar budaya	40,19	35,37	88,01	0,00	0,00	4,82	11,99
	Kawasan perlindungan setempat	1959,64	1.502,82	76,69	0,00	0,00	456,82	23,31
	Taman nasional	1786,93	1.743,79	97,59	0,00	0,00	43,14	2,41
	Taman wisata alam	0,98	0,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Perwujudan kawasan lindung	4235,66	3.728,37	88,02	0,00	0,00	507,29	11,98
2	Kawasan budidaya							
	Kawasan perkebunan rakyat	1.057,21	1.015,06	96,02	0,00	0,00	42,09	3,98
	Kawasan tanaman pangan	18.846,52	18.105,18	96,21	0,00	0,00	712,26	3,79
	Kawasan peruntukan industri	181,07	91,84	50,72	89,23	49,28	0,00	0,00
	Kawasan permukiman perkotaan	10.755,85	8.784,46	81,68	1.960,13	18,23	10,31	0,10
	Kawasan permukiman perdesaan	21.777,32	16.462,46	75,61	5.309,74	24,39	0,00	0,00
	Kawasan transportasi	24,89	22,10	88,76	2,80	11,24	0,00	0,00
	Kawasan pertahanan dan keamanan	436,97	416,81	95,39	20,16	4,61	0,00	0,00
	Perwujudan kawasan budidaya	53.045,80	44.898,08	84,64	7.382,06	13,92	765,66	1,44

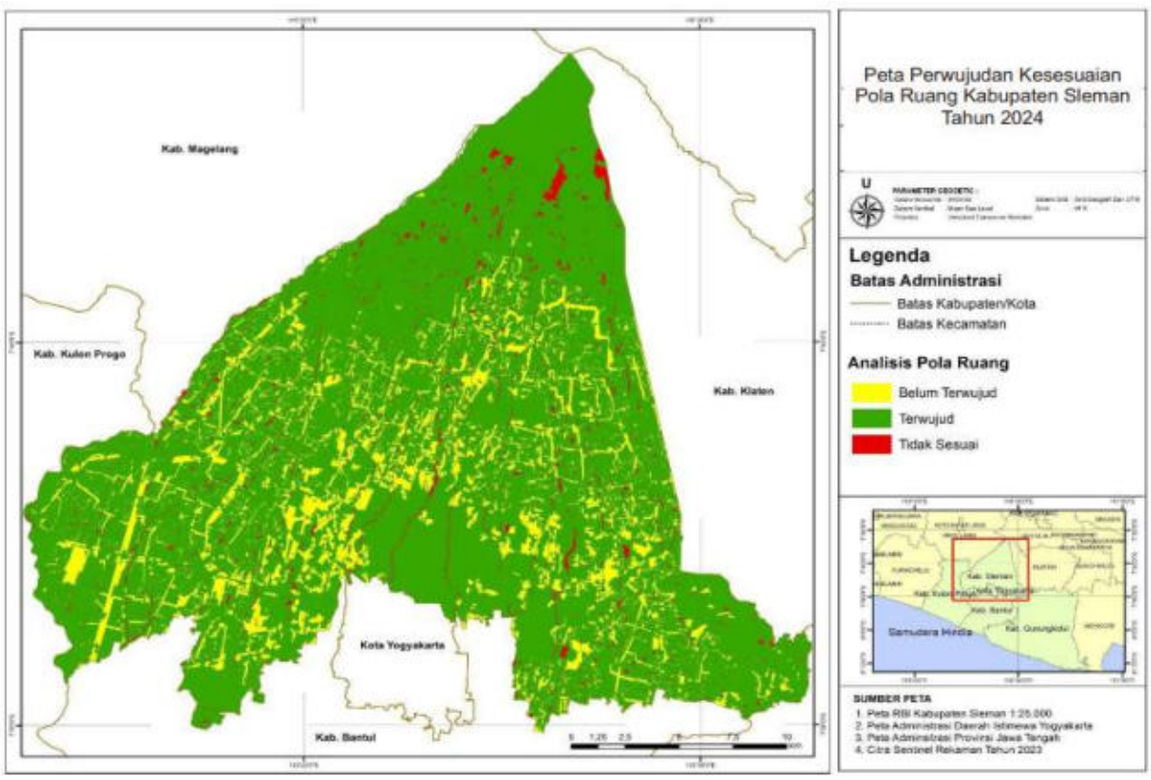
Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, 2025

Penilaian perwujudan pola ruang yang tidak sesuai pada zona lindung terdapat pada kawasan badan air, cagar budaya, dan perlindungan setempat disebabkan karena adanya perbedaan perekaman pada citra satelit resolusi tinggi (CSRT) yang digunakan persandingan antara pola rung dengan peta penutup lahan, sehingga dimungkinkan adanya koreksi atau pergeseran 4-6 meter. Sedangkan pada zona perlindungan setempat yang merupakan fungsi

kawasan lindung dengan ketidaksesuaian yang tinggi umumnya disebabkan karena aktivitas pembangunan yang terdapat di sepanjang sempadan sungai / perlindungan setempat.

Penilaian perwujudan pola ruang yang tidak sesuai pada zona perkebunan rakyat dan zona pertanian tanaman pangan disebabkan adanya kegiatan terbangun di zona tersebut. Adapun dalam aturan yang tertuang pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) masih dimungkinkan ada kegiatan terbangun pada kedua zona tersebut seperti halnya untuk rumah tinggal petani, restoran, rumah makan, toko sayur, toko buah, hingga toko alat pertanian. Adapun pada skala pemetaan yang dilakukan pada penilaian perwujudan pemanfaatan ruang di Kabupaten Sleman dilakukan pada skala 1:50.0000 sehingga penggunaan lahan yang detail seperti rumah tinggal, restoran, hingga toko tidak dapat diidentifikasi, sehingga secara umum dianggap sebagai kegiatan terbangun sebagai kegiatan permukiman ataupun gedung.

Berdasarkan tabel di atas, masih terdapat ruang-ruang peruntukan yang akan bisa digunakan untuk perencanaan pembangunan, baik dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta. Ruang peruntukan industri masih tersedia sebesar sekitar 89,23 Ha, ruang untuk permukiman perkotaan masih tersedia sebesar 1.960,1 Ha, ruang untuk permukiman perdesaan masih tersisa sebesar 5.309,74 Ha dan ruang untuk transportasi masih bisa dikembangkan seluas 2,8 Ha. Ruang yang nantinya dapat dikembangkan untuk fungsi-fungsi komersial berada pada permukiman perkotaan, dengan luasan yang diasumsikan sebesar 30% dari ruang yang tersisa, sekitar 588 Ha.



Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, 2025

Gambar 2.26. Peta Perwujudan Kesesuaian Pola Ruang Kabupaten Sleman Tahun 2024

Adapun ruang pengembangan industri mikro dan kecil (UMK) dapat dikembangkan pada ruang-ruang permukiman perdesaan dengan proporsi

sekitar 20% dari total luasan permukiman perdesaan yakni sekitar 1.000 Ha dengan bercampur pada kawasan yang digunakan untuk hunian di perdesaan (dengan asumsi jenis industri bukan industri yang berdampak pada masyarakat sekitar dan berjenis industri yang menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Tentunya pemanfaatan-pemanfaatan ruang yang tidak sepenuhnya sesuai dengan nama peruntukannya harus mengikuti aturan lebih lanjut yang tercantum dalam ketentuan umum zonasi pada RTRW Kabupaten Sleman.

2.1.1.6 Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Menurut data *United Nations Environment Programme*, suhu rata-rata di Indonesia sudah meningkat pada angka 0,8^{o}C semenjak tahun era 1980-an. Kabupaten Sleman, seperti banyak wilayah di Indonesia, juga mengalami kerentanan yang signifikan terhadap perubahan iklim. Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Yogyakarta, kondisi iklim di sebagian besar wilayah Kabupaten Sleman termasuk tropis basah.

Tabel 2.22. Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Klimatologi Kabupaten Sleman Tahun 2024

No	Bulan	Suhu (°C)			Kelembaban (%)			Kecepatan Angin (knot)			Tekanan Udara (mb)			Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Mata-hari (jam)
		Min	Rata-rata	Max	Min	Rata-rata	Max	Min	Rata-rata	Max	Min	Rata-rata	Max			
1	Januari	23,7	26,5	31	75	86	96	calm	4	14	988,47	991	993,7	658	20	46
2	Februari	24	26,9	31,7	75	83	93	calm	3	17	988,9	992	993,6	332,5	14	53
3	Maret	24	26,9	31,4	67	84	95	calm	3	16	987,9	991	994	273,5	12	45
4	April	24,4	27,1	32	73	86	93	calm	3	12	988,2	990	992	452,7	20	64
5	Mei	23,3	26,8	31,9	74	82	90	calm	3	10	988,91	991	992,7	29	3	72
6	Juni	23,3	26,7	31,9	75	81	96	calm	3	12	990,1	992	993,7	53	4	67
7	Juli	21,5	25,5	30,9	52	77	93	calm	3	15	989,6	993	994,6	25	1	73
8	Agustus	21,5	25,3	31	66	78	84	calm	4	12	991,9	993	995,3	0	1	75
9	September	22,8	26,7	32,2	68	78	85	calm	3	14	990,5	992	994,3	55	7	71
10	Oktober	23,8	27,6	32,5	69	77	90	calm	4	16	991,1	993	994,6	57	7	77
11	November	23,7	26,6	31,9	76	86	96	calm	3	14	987,8	990	992,5	557	23	53
12	Desember	23,7	26,4	30,8	72	86	97	calm	3	18	986,5	989	992,3	566,5	28	36

Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2025

Pada tahun 2024, jumlah hari hujan terbanyak dalam satu bulan adalah 28 hari pada bulan Desember dan curah hujan paling tinggi adalah 658 mm/bulan pada bulan Januari, sedangkan curah hujan paling rendah pada bulan Agustus, yaitu 0 mm/bulan. Kecepatan angin maksimum, yaitu 18 m/detik pada bulan Desember. Kelembapan nisbi udara tertinggi 97% pada bulan Desember dan terendah 52% pada bulan Juli, sedangkan temperatur udara tertinggi 32,5°C pada bulan Oktober dan terendah 21,5 °C pada bulan Juli dan Agustus.

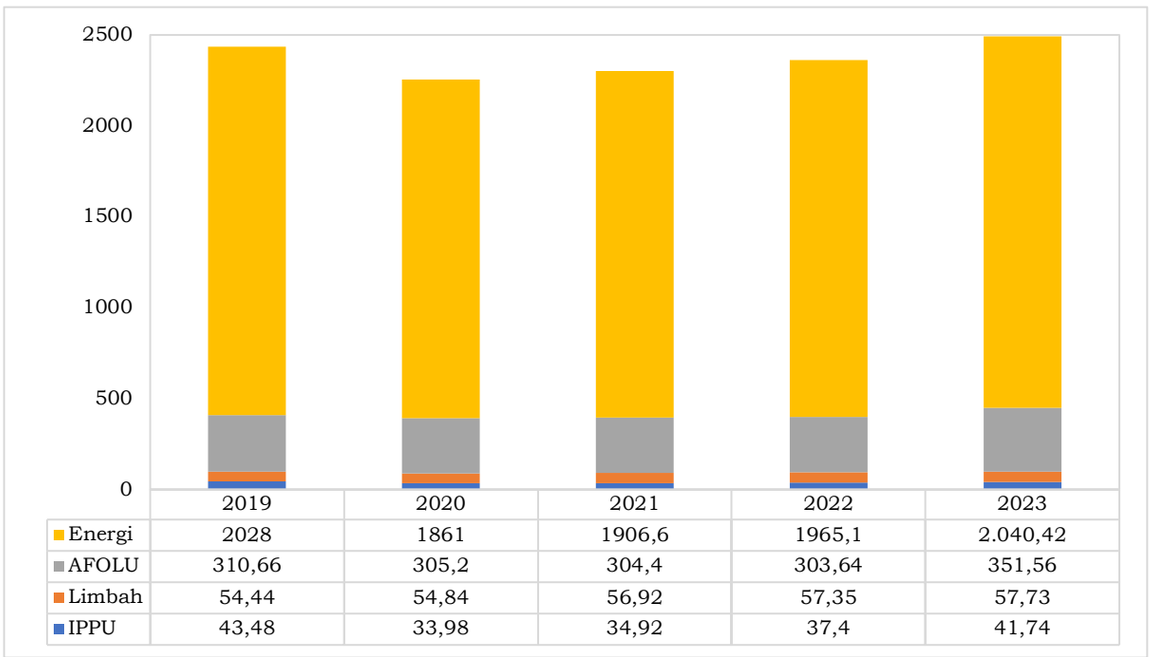
Adanya perubahan suhu ekstrem, pola hujan yang tidak teratur, dan intensifikasi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, semuanya merupakan indikator kerentanan terhadap dampak perubahan iklim. Dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) menjadi alat kunci dalam memahami hubungan antara aktivitas manusia dan perubahan iklim di Kabupaten Sleman. Dengan mengidentifikasi dan mengukur emisi gas rumah kaca yang berasal dari sektor-sektor kritis seperti energi, transportasi, dan industri, dokumen ini menyediakan kerangka kerja untuk mengembangkan kebijakan mitigasi dan adaptasi yang lebih efektif. Peran GRK dalam konteks Kabupaten Sleman bukan hanya sebagai alat pengukur, tetapi juga sebagai pedoman untuk merancang solusi berkelanjutan yang dapat mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim. Dengan memahami kontribusi sektor-sektor tertentu terhadap emisi gas

rumah kaca, pemerintah daerah dapat mengarahkan upaya mitigasi mereka dan membangun ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya menuju lingkungan yang lebih berkelanjutan.

2.1.1.6.1 Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca

Perhitungan emisi gas rumah kaca Kabupaten Sleman mencakup CO_2, CH_4 dan N_2O. Emisi CO_2 atau emisi karbon memiliki kontribusi paling besar dan tumbuh signifikan sepanjang periode inventarisasi. Emisi ini dihasilkan dari pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, dan bahan bakar organik lainnya.

Berdasarkan grafik, perkembangan emisi gas rumah kaca cenderung fluktuatif. Penyumbang emisi terbesar berasal dari sektor energi. Penyumbang emisi sektor energi terbesar berasal dari subsektor transportasi dan listrik. Terkait dengan transportasi, terutama kendaraan bermotor khususnya yang menggunakan bahan bakar fosil, emisi dari mesin dan knalpot yang dilepaskan berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca, terlebih dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman. Terkait dengan penggunaan listrik, konsumsi listrik juga semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini berbanding lurus dengan penambahan jumlah penduduk/rumah tangga serta peningkatan jumlah industri dan bisnis, serta fasilitas publik.



	2019	2020	2021	2022	2023
Energi	2028	1861	1906,6	1965,1	2.040,42
AFOLU	310,66	305,2	304,4	303,64	351,56
Limbah	54,44	54,84	56,92	57,35	57,73
IPPU	43,48	33,98	34,92	37,4	41,74

Sumber: DLH Kabupaten Sleman, 2025
Keterangan: AFOLU: Agriculture, Forestry and Other Land Used (pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya)
IPPU: Industrial Processes and Production Use (proses industri dan penggunaan produk)

Grafik 2.2. Perkembangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Agregat di Kabupaten Sleman Tahun 2019-2023 (Gg CO2e)

Berdasarkan grafik di atas, emisi bersih gas rumah kaca (GRK) mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencapai rata-rata 3,31% per tahun. Pada tahun 2023, emisi GRK di Sleman mencapai 2.491,45 Gg CO2e. Di Kabupaten Sleman, sumber emisi GRK terbesar berasal dari sektor energi, mencapai 2.040,42 Gg CO2e. Secara berurutan dapat diuraikan bahwa kontribusi masing-masing sektor adalah sektor energi (81,90%), sektor AFOLU (14,11%), sektor limbah (2,32%) serta IPPU (1,67%). Berdasarkan kategori,

penyumbang emisi terbesar pada tahun 2023 berasal dari sektor energi subsektor bahan bakar motor transportasi melalui pembakaran bahan bakar fosil. Di posisi selanjutnya adalah subsektor listrik, subsektor pertanian, subsektor lahan, serta sektor energi subsektor kegiatan lainnya.

2.1.1.6.2 Kerawanan Bencana dan Indeks Risiko Bencana

Kabupaten Sleman merupakan wilayah yang rawan bencana. Hal ini yang menyebabkan Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Sleman relatif tinggi. Indeks Risiko Bencana tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, berada pada angka 73,35.

Tabel 2.23. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

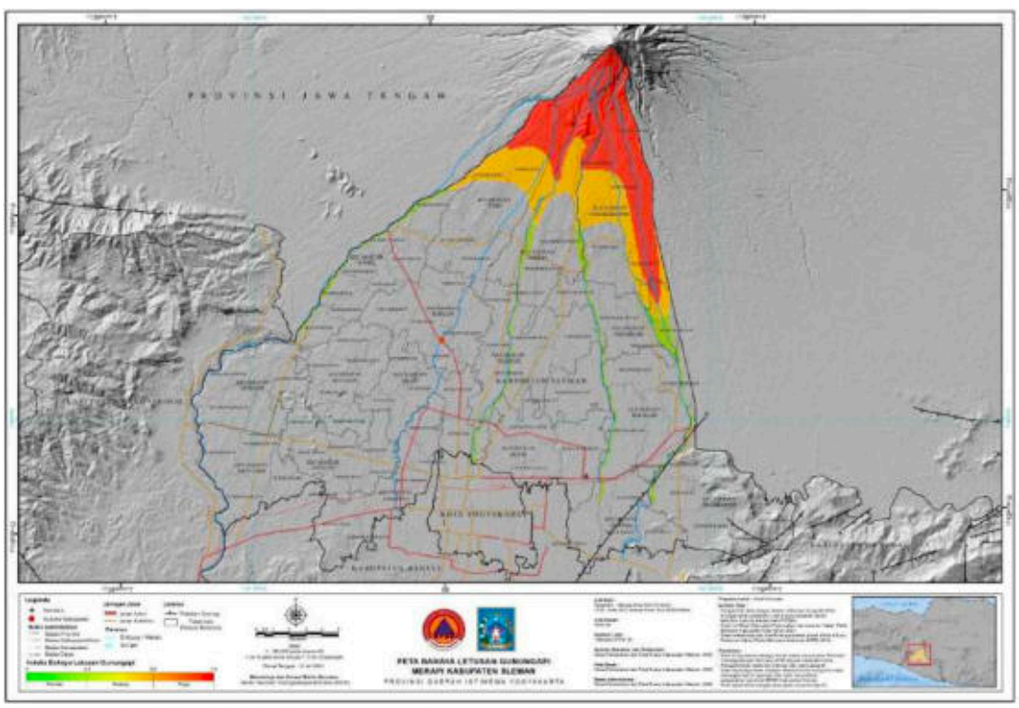
No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Risiko Bencana	83,72	78,96	80,01	75,78	73,35

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024

Terkait dengan bencana alam, terdapat beberapa risiko bencana alam yang teridentifikasi di wilayah administrasi Kabupaten Sleman. Berdasarkan data hasil analisa dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman, risiko bencana yang dapat teridentifikasi, meliputi:

A. Risiko Bencana Letusan Merapi

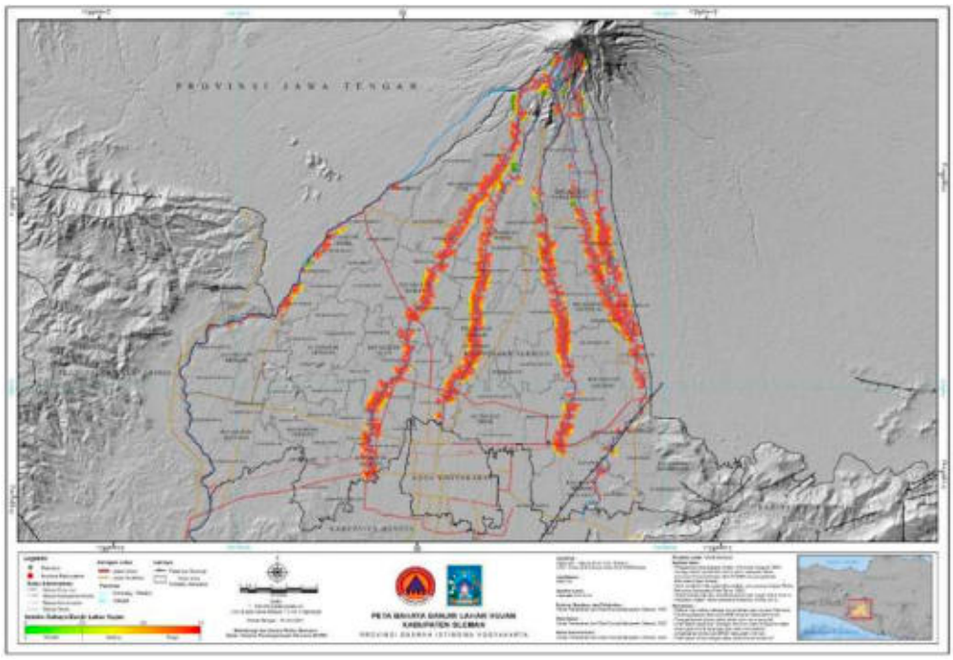
Risiko bencana letusan gunungapi terdapat pada wilayah yang berada pada Kawasan Rawan Bencana Gunungapi seluas 9.148 Ha, yang meliputi 34 kalurahan di 14 kapanewon. Risiko rendah terdapat di 7 kalurahan dan risiko sedang terdapat di 27 kalurahan.



Sumber: BNPB, BPBD Kabupaten Sleman, 2021

Gambar 2.27 Peta Bahaya Letusan Gunungapi Merapi

B. Risiko Bencana Banjir Lahar Hujan

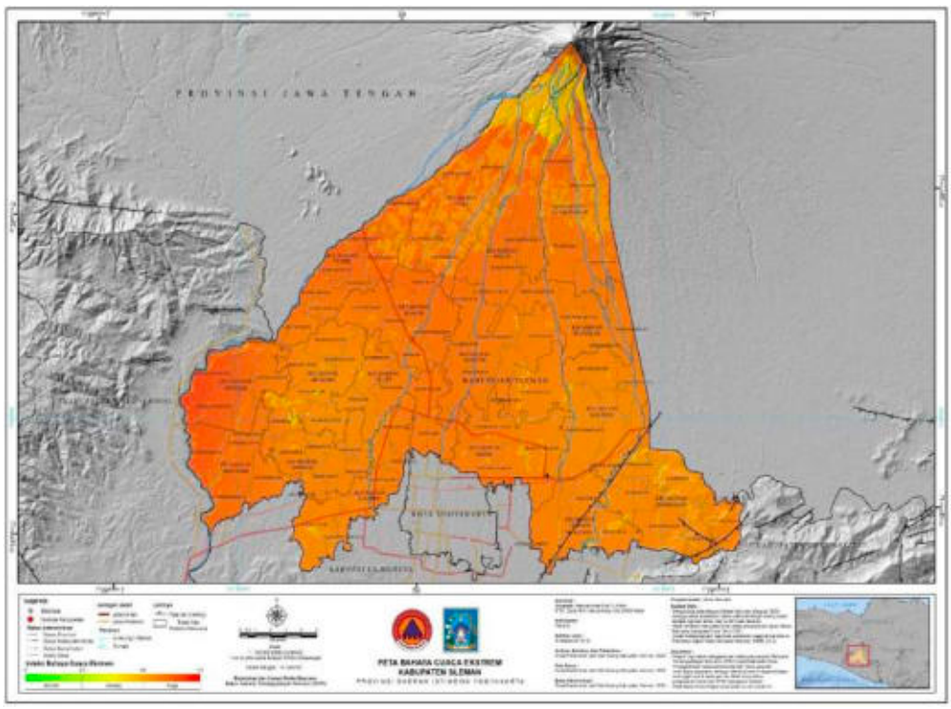


Sumber: BNPB, BPBD Kabupaten Sleman, 2021

Gambar 2.28. Peta Bahaya Banjir Lahan

Risiko bencana banjir lahar hujan terdapat pada wilayah sekitar sungai yang berhulu di Gunungapi Merapi seluas kurang lebih 6.545 Ha. Risiko bencana banjir lahar hujan meliputi 54 kalurahan di 15 kapanewon, dengan 15 kalurahan memiliki risiko tinggi dan 37 kalurahan memiliki risiko sedang. Adapun 6 kalurahan memiliki risiko rendah. Penanganan bencana banjir lahar hujan dilakukan dengan mengedukasi masyarakat dan memaksimalkan fungsi *early warning system*.

C. Risiko Bencana Cuaca Ekstrem



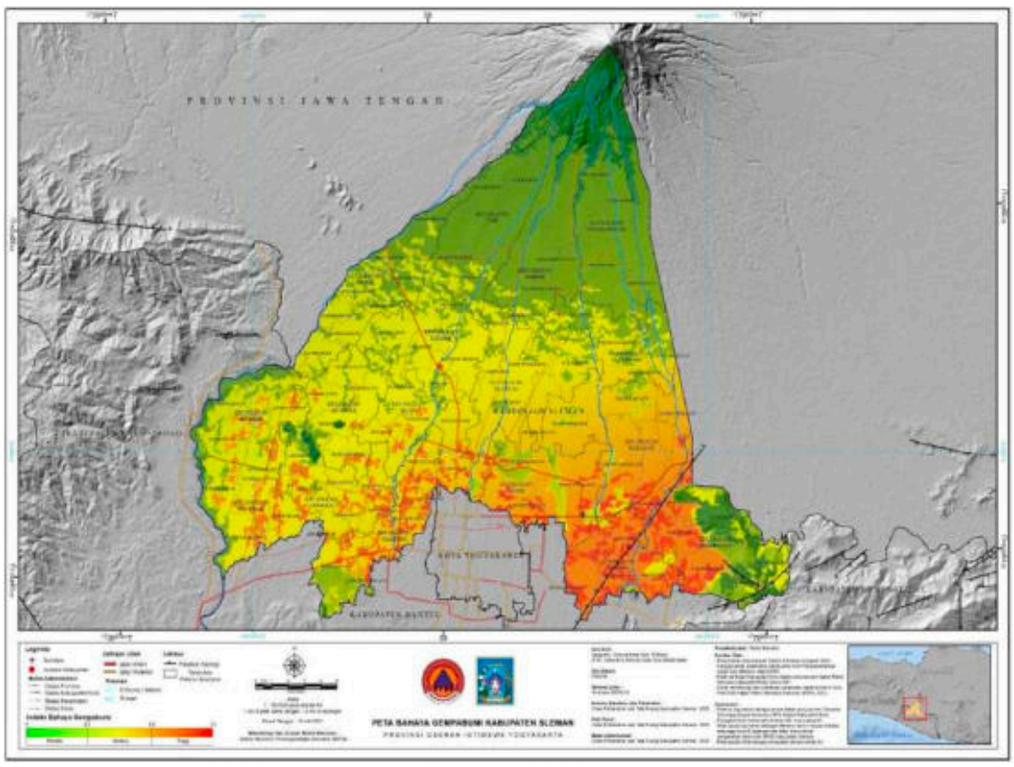
Sumber: BNPB, BPBD Kabupaten Sleman, 2021

Gambar 2.29. Peta Bahaya Cuaca Ekstrem

Risiko bencana cuaca ekstrem terdapat pada wilayah Kabupaten Sleman seluas 56.058 Ha, yang terdapat di 86 kalurahan, dengan 42 kalurahan memiliki risiko sedang dan 44 kalurahan memiliki risiko tinggi. Risiko bencana ini disebabkan oleh kondisi meteorologis. Adapun perbedaan kelas risiko disebabkan oleh faktor kesiapsiagaan dan kerentanan wilayah. Wilayah yang penduduknya padat atau memiliki lahan produktif yang luas memiliki kerentanan yang lebih tinggi. Kesiapsiagaan tiap kalurahan juga berbeda berdasarkan kondisi masyarakat dan respons terhadap bencana.

D. Risiko Bencana Gempa Bumi

Risiko bencana gempa bumi terdapat pada wilayah Kabupaten Sleman seluas 58.180 Ha, yang meliputi 86 kalurahan dengan 4 kalurahan memiliki kelas rendah, 77 kalurahan memiliki risiko kelas sedang dan 5 kalurahan memiliki risiko tinggi. Risiko bencana yang berada di sekitar patahan terdapat di wilayah Kapanewon Prambanan dan Kapanewon Berbah.

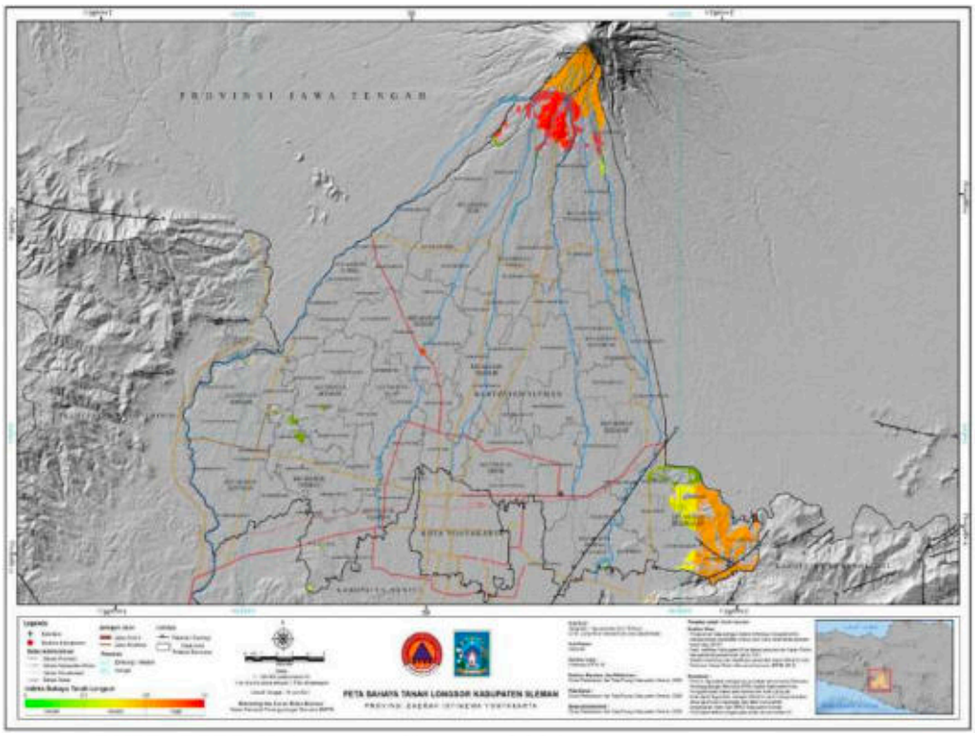


Sumber: BNPB, BPBD Kabupaten Sleman, 2021

Gambar 2.30. Peta Bahaya Gempa Bumi

E. Risiko Bencana Tanah Longsor

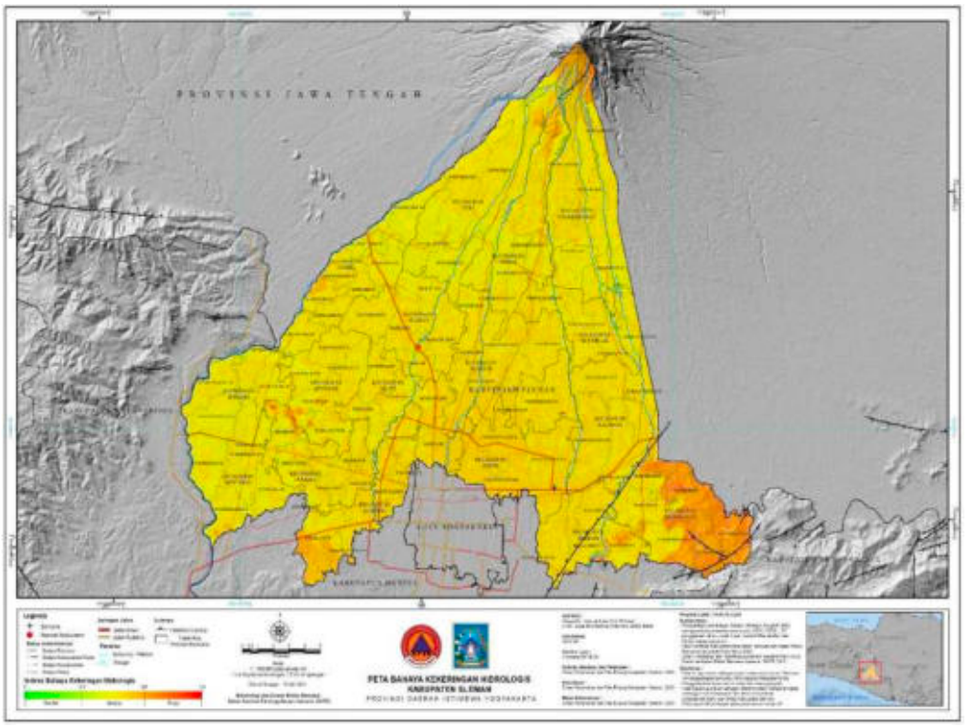
Risiko bencana tanah longsor terdapat pada wilayah Kabupaten Sleman seluas 28.186 Ha, terdapat pada wilayah dengan kemiringan lereng yang tinggi dan topografi berbukit hingga bergunung. Risiko bencana ini didominasi wilayah Kapanewon Turi, Pakem, Cangkringan, dan Prambanan.



Sumber: BNPB, BPBD Kabupaten Sleman, 2021

Gambar 2.31. Peta Bahaya Tanah Longsor

F. Risiko Bencana Kekeringan Hidrologis



Sumber: BNPB, BPBD Kabupaten Sleman, 2021

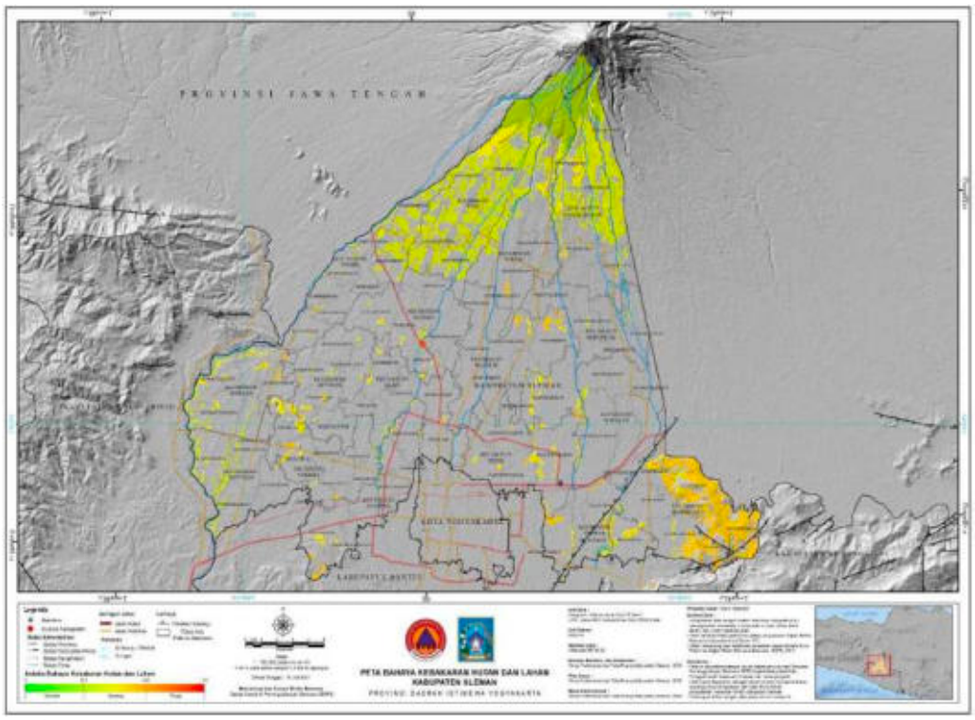
Gambar 2.32. Peta Bahaya Kekeringan Hidrologis

Risiko bencana kekeringan hidrologis terdapat pada wilayah Kabupaten Sleman seluas 57.027 Ha, meliputi 86 kalurahan. Sebagian besar wilayah Kapanewon Prambanan dan sebagian kecil Kapanewon Gamping, Minggir, dan Moyudan memiliki tingkat ancaman yang tinggi, sedangkan kalurahan lainnya memiliki risiko sedang. Oleh karena itu, perlu kegiatan penguatan kapasitas untuk mengurangi risiko bencana kekeringan hidrologis, antara

lain dengan pembangunan waduk atau embung, sumur bor, program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas), penyusunan rencana kontijensi bencana kekeringan, hingga sosialisasi edukasi terkait bencana kekeringan.

G. Risiko Bencana Kebakaran Hutan

Risiko bencana kebakaran hutan dan lahan terdapat pada wilayah Kabupaten Sleman seluas kurang lebih 10.290 Ha, meliputi 77 kalurahan pada 17 kapanewon di Kabupaten Sleman, dengan 31 kalurahan memiliki risiko rendah dan 46 kalurahan memiliki risiko sedang. Risiko bencana ini mendominasi wilayah Kapanewon Tempel, Turi, Pakem, Cangkringan, dan Prambanan dengan dominasi tutupan lahan vegetasi berupa hutan, kebun campuran, hingga tegalan. Adapun semak belukar tersebar di hampir semua wilayah kapanewon di Kabupaten Sleman. Kebakaran hutan dan lahan relatif jarang terjadi, sehingga penguatan kapasitas daerah dan masyarakat terkait bencana kebakaran hutan dan lahan kurang begitu diperhatikan.



Sumber: BNPB, BPBD Kabupaten Sleman, 2021

Gambar 2.33. Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan

H. Risiko Kebakaran Permukiman

Penanganan kebakaran di Kabupaten Sleman masih perlu ditingkatkan. Tingkat waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran lima tahun terakhir (2020-2024) cenderung fluktuatif. Bahkan tingkat waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran pada tahun 2023 (83,44%) lebih rendah dari tahun 2022 (91,8%). Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya lokasi kejadian kebakaran di luar wilayah manajemen kebakaran (WMK), kondisi jalan dan *traffic* yang padat, penutupan ruas jalan utama, serta akses jalan yang sempit dapat menghambat laju dari kecepatan mobil pemadam kebakaran. Apabila lokasi kebakaran berada di WMK, *response time* masih dapat terpenuhi. Namun jika lokasi kejadian kebakaran di luar WMK (minimal radius 7,5 km dari Posko Induk dan Posko Godean tidak akan dapat memenuhi waktu tanggap kurang dari 15 menit. Berikut

capaian indikator penanggulangan bencana kebakaran di Kabupaten Sleman tahun 2020-2024.

Tabel 2.24. Capaian Indikator Penanggulangan Bencana Kebakaran di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

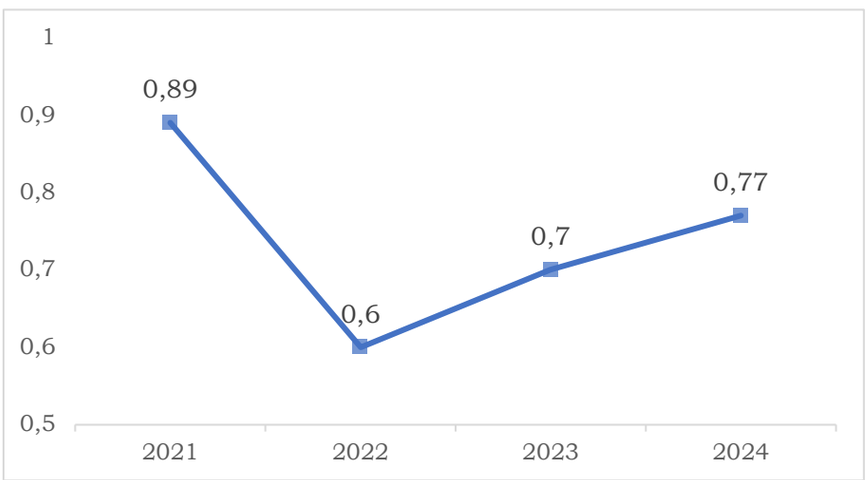
No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) (%)	95	89,66	91,8	83,44	85,71
2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten (%)	36,08	36,08	36,08	36,08	36,08

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman, 2024

Terlebih dengan mobil pemadam kebakaran yang dimiliki oleh Kabupaten Sleman semuanya berukuran atau berkapasitas besar, sehingga apabila jalan sempit tidak dapat mendekat ke lokasi kebakaran. Di sisi lain kemampuan personil pemadam kebakaran masih terbatas karena kurangnya pelatihan atau peningkatan kapasitas personil pemadam kebakaran terkait pelaksanaan tugas di lapangan, khususnya untuk personil yang berstatus sebagai tenaga non PNS.

2.1.1.6.3 Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah merupakan suatu ukuran komposit yang menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam menghadapi potensi risiko dan guncangan, serta kemampuannya untuk pulih secara cepat dan efektif. Indeks ini mencakup berbagai dimensi, termasuk aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan. Semakin tinggi nilai indeks ketahanan daerah, semakin kuat kemampuan wilayah tersebut dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan. Pengukuran indeks ini menjadi penting dalam perencanaan pembangunan daerah untuk mengidentifikasi kerentanan, merumuskan strategi mitigasi risiko, dan meningkatkan kapasitas adaptasi wilayah.



Sumber: Bappeda Kabupaten Sleman, 2025

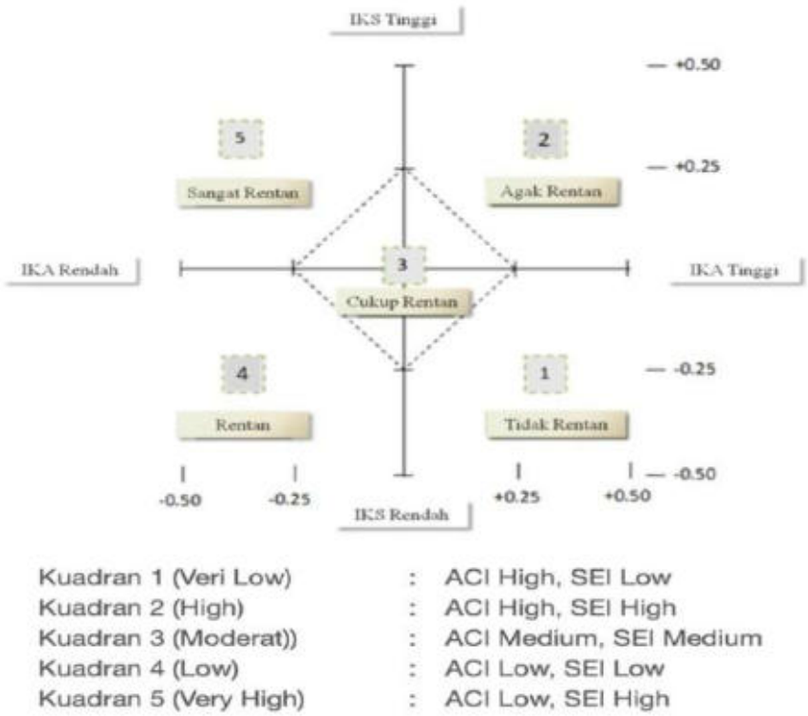
Grafik 2.3. Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024

Pada tahun 2021, Indeks Ketahanan Daerah mencapai 0,89. Namun, pada tahun 2022 mengalami penurunan, meskipun pada tahun berikutnya mengalami peningkatan. Dan pada tahun 2024, Indeks Ketahanan Daerah mencapai 0,77.

Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman perlu segera melakukan evaluasi mendalam terhadap berbagai dimensi ketahanan, seperti stabilitas ekonomi, kohesi sosial, kualitas lingkungan, dan efektivitas tata kelola. Identifikasi faktor-faktor penghambat pencapaian target, termasuk dampak pandemi dan tantangan struktural, menjadi krusial.

2.1.1.6.4 Indeks Kerentanan Perubahan Iklim

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim melalui Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim mengembangkan Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan Perubahan Iklim (SIDIK) yang menyajikan data dan informasi tentang kerentanan perubahan iklim dengan satuan unit desa di seluruh Indonesia. Data yang dimanfaatkan berasal dari sumber seperti sosial-ekonomi, demografi, geografi, dan infrastruktur dari Pendataan Potensi Desa (PODES). Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi tentang kerentanan perubahan iklim yang dapat mendukung pembuatan kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya perencanaan adaptasi serta pengurangan risiko dan dampak perubahan iklim.



Sumber: Panduan Penyusunan Kajian Risiko Iklim Climate Risk Assessment (CRA) oleh Mercy Corps, 2015, diillustrasikan ulang

Gambar 2.34. Ilustrasi Kuadran Kerentanan Perubahan Iklim

Nilai risiko dari dampak iklim tersebut selain dipengaruhi oleh Indeks Kerentanan, juga dipengaruhi oleh peluang kemunculannya. Besarnya dampak dipengaruhi tingkat toleransi sistem terhadap penyimpangan iklim yang terjadi. Dalam hal risiko terhadap bencana banjir dan kekeringan, maka perubahan iklim curah hujan dapat dipergunakan sebagai pemicu kemunculan bencana. Dengan demikian, peluang kemunculan curah hujan di atas batas tertentu (untuk bencana banjir) atau curah hujan di bawah batas tertentu (dalam hal bencana kekeringan) bersama dengan Indeks Kerentanan dapat dipergunakan sebagai kategori terhadap nilai risiko yang akan terjadi.

Untuk mendapatkan posisi kerentanan relatif suatu daerah terhadap daerah lain dalam merespons bencana (*coping range*) ialah dengan melihat posisi nilai

Indeks Kerentanan dan Kapasitas suatu daerah dalam sistem kuadran. Sumbu mendatar mencerminkan kemampuan adaptasi (ACI) dan sumbu vertikal menyatakan tingkat keterpaparan (SEI), yang semuanya dinormalisasi pada internal [-0,5,0,5]. Sistem kuadran kerentanan dikelompokkan menjadi 5 daerah sebagai contoh, apabila nilai Indeks Kerentanan dan Kapasitas berada di kuadran 5, maka dikatakan selang toleransi suatu daerah terhadap kejadian bencana rendah (*coping range* sempit). Risiko terhadap penyimpangan/perubahan merupakan fungsi dari tingkat kerentanan dan peluang terjadinya bencana iklim. Peluang terjadinya bencana iklim diformulasikan berdasar peluang terjadinya curah hujan melebihi batas tertentu (untuk bencana banjir) atau peluang curah hujan di bawah nilai tertentu (untuk bencana kekeringan).

Nilai Indeks Kapasitas Adaptif, Indeks Kerentanan dan Sensitivitas, Nilai Kerentanan, per kalurahan di Kabupaten Sleman tahun 2019 berdasarkan data SIDIK dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.25. Indeks Kapasitas Adaptif (IKA), Indeks Kerentanan dan Sensitivitas (IKS) dan Nilai Kerentanan di Kabupaten Sleman Tahun 2019

No	Kalurahan	Kapanewon	IKA	IKS	Kerentanan
1	Sumberrahayu	Moyudan	0,557	0,424	2
2	Sumbersari	Moyudan	0,656	0,409	2
3	Sumberagung	Moyudan	0,670	0,378	2
4	Sumberarum	Moyudan	0,650	0,388	2
5	Sendangmulyo	Minggir	0,563	0,381	2
6	Sendangarum	Minggir	0,563	0,367	2
7	Sendangrejo	Minggir	0,597	0,416	2
8	Sendangsari	Minggir	0,633	0,395	2
9	Sendangagung	Minggir	0,664	0,381	2
10	Margoluwih	Seyegan	0,608	0,423	2
11	Margodadi	Seyegan	0,611	0,360	2
12	Margomulyo	Seyegan	0,626	0,367	2
13	Margoagung	Seyegan	0,638	0,388	2
14	Margokaton	Seyegan	0,670	0,360	2
15	Sidorejo	Godean	0,671	0,381	2
16	Sidoluhur	Godean	0,618	0,395	2
17	Sidomulyo	Godean	0,576	0,374	2
18	Sidoagung	Godean	0,709	0,367	2
19	Sidokarto	Godean	0,636	0,364	2
20	Sidoarum	Godean	0,602	0,385	2
21	Sidomoyo	Godean	0,491	0,416	2
22	Balecatur	Gamping	0,641	0,445	2
23	Ambarketawang	Gamping	0,706	0,374	2
24	Banyuraden	Gamping	0,657	0,350	2
25	Nogotirto	Gamping	0,617	0,371	2
26	Trihanggo	Gamping	0,635	0,353	2
27	Tirtoadi	Mlati	0,606	0,430	2
28	Sumberadi	Mlati	0,573	0,395	2
29	Tlogoadi	Mlati	0,661	0,395	2

No	Kalurahan	Kapanewon	IKA	IKS	Kerentanan
30	Sendangadi	Mlati	0,586	0,329	2
31	Sinduadi	Mlati	0,651	0,449	2
32	Caturtunggal	Depok	0,677	0,349	2
33	Maguwoharjo	Depok	0,644	0,329	2
34	Condongcatur	Depok	0,649	0,371	2
35	Sendangtirto	Berbah	0,654	0,388	2
36	Tegaltirto	Berbah	0,704	0,360	2
37	Jogotirto	Berbah	0,656	0,388	2
38	Kalitirto	Berbah	0,690	0,423	2
39	Sumberharjo	Prambanan	0,510	0,367	2
40	Wukirharjo	Prambanan	0,580	0,398	2
41	Gayamharjo	Prambanan	0,514	0,398	2
42	Sambirejo	Prambanan	0,495	0,462	2
43	Madurejo	Prambanan	0,598	0,377	2
44	Bokoharjo	Prambanan	0,672	0,378	2
45	Purwomartani	Kalasan	0,635	0,357	2
46	Tirtomartani	Kalasan	0,615	0,381	2
47	Tamanmartani	Kalasan	0,657	0,385	2
48	Selomartani	Kalasan	0,603	0,350	2
49	Wedomartani	Ngemplak	0,671	0,374	2
50	Umbulmartani	Ngemplak	0,723	0,402	2
51	Widodomartani	Ngemplak	0,757	0,357	2
52	Bimomartani	Ngemplak	0,695	0,428	2
53	Sindumartani	Ngemplak	0,655	0,402	2
54	Sariharjo	Ngaglik	0,654	0,421	2
55	Sinduharjo	Ngaglik	0,629	0,377	2
56	Minomartani	Ngaglik	0,647	0,410	2
57	Sukoharjo	Ngaglik	0,658	0,311	2
58	Sardonoharjo	Ngaglik	0,678	0,420	2
59	Donoharjo	Ngaglik	0,589	0,468	2
60	Caturharjo	Sleman	0,672	0,418	2
61	Triharjo	Sleman	0,727	0,364	2
62	Tridadi	Sleman	0,654	0,350	2
63	Pandowoharjo	Sleman	0,705	0,407	2
64	Trimulyo	Sleman	0,601	0,388	2
65	Banyurejo	Tempel	0,658	0,409	2
66	Tambakrejo	Tempel	0,502	0,353	2
67	Sumberrejo	Tempel	0,623	0,360	2
68	Pondokrejo	Tempel	0,606	0,395	2
69	Mororejo	Tempel	0,587	0,409	2
70	Margorejo	Tempel	0,691	0,319	2
71	Lumbungrejo	Tempel	0,674	0,356	2
72	Merdikorejo	Tempel	0,688	0,385	2
73	Bangunkerto	Turi	0,574	0,394	2
74	Donokerto	Turi	0,710	0,411	2
75	Girikerto	Turi	0,712	0,415	2
76	Wonokerto	Turi	0,674	0,430	2

No	Kalurahan	Kapanewon	IKA	IKS	Kerentanan
77	Purwobinangun	Pakem	0,675	0,356	2
78	Candibinangun	Pakem	0,625	0,388	2
79	Harjobinangun	Pakem	0,635	0,416	2
80	Pakembinangun	Pakem	0,714	0,374	2
81	Hargobinangun	Pakem	0,568	0,416	2
82	Wukirsari	Cangkringan	0,644	0,465	2
83	Argomulyo	Cangkringan	0,662	0,427	2
84	Glagaharjo	Cangkringan	0,578	0,326	2
85	Kepuharjo	Cangkringan	0,550	0,323	2
86	Umbulharjo	Cangkringan	0,515	0,340	2

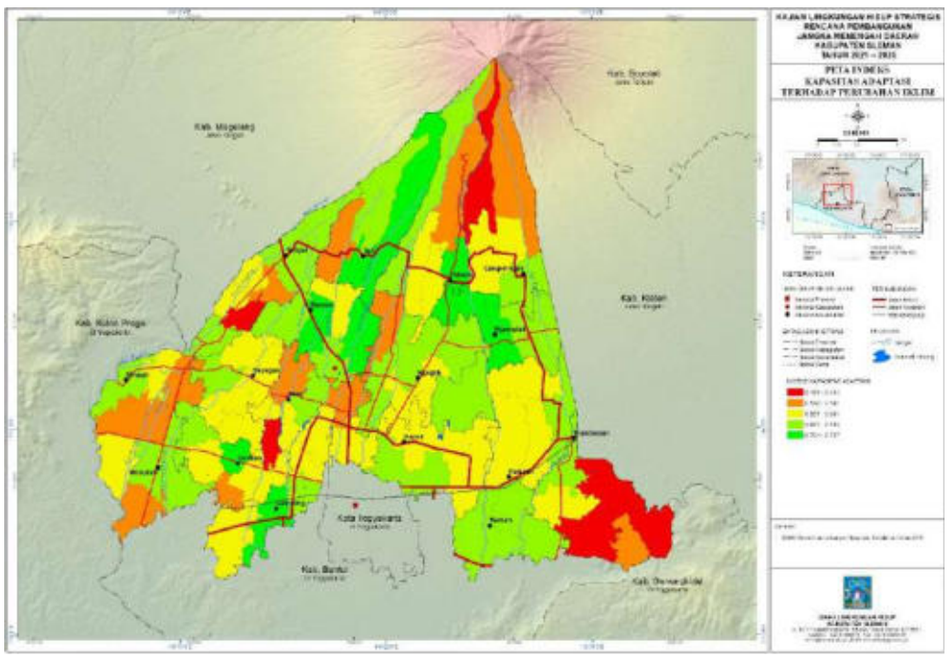
Sumber: KLHK, 2019

Berdasarkan tabel di atas, tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim di seluruh desa/kalurahan di Kabupaten Sleman semuanya dalam kondisi agak rentan dengan nilai kerentanan berada pada kuadran 2 yang menunjukkan bahwa tingkat kerentanan di Kabupaten Sleman berada pada tingkat agak rentan dengan nilai ACI (*Adaptive Capacity Index*) atau Indeks Kemampuan Adaptasi dan nilai SEI (*Sensitivity and Exposure Index*) atau Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas yang tinggi. Tingginya Indeks Kapasitas Adaptif dan Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas di seluruh desa/kalurahan di Kabupaten Sleman dapat berimplikasi cukup kompleks terhadap kondisi sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan.

Meskipun masyarakat memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi, tingginya keterpaparan dan sensitivitas dapat menyebabkan gangguan signifikan pada kehidupan sehari-hari, seperti penurunan produktivitas pertanian atau gangguan pada infrastruktur dasar. Dari segi ekonomi, potensi kerugian ekonomi dari bencana alam atau perubahan iklim mungkin lebih tinggi karena tingginya keterpaparan dan sensitivitas, meskipun ada kemampuan adaptasi yang baik. Dalam hal kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, peningkatan risiko penyakit yang terkait dengan perubahan iklim, seperti penyakit yang ditularkan melalui air atau udara, tetap tinggi karena tingginya keterpaparan. Kualitas hidup masyarakat bisa tetap terancam akibat gangguan pada sumber daya alam dan lingkungan, meskipun ada upaya adaptasi yang baik.

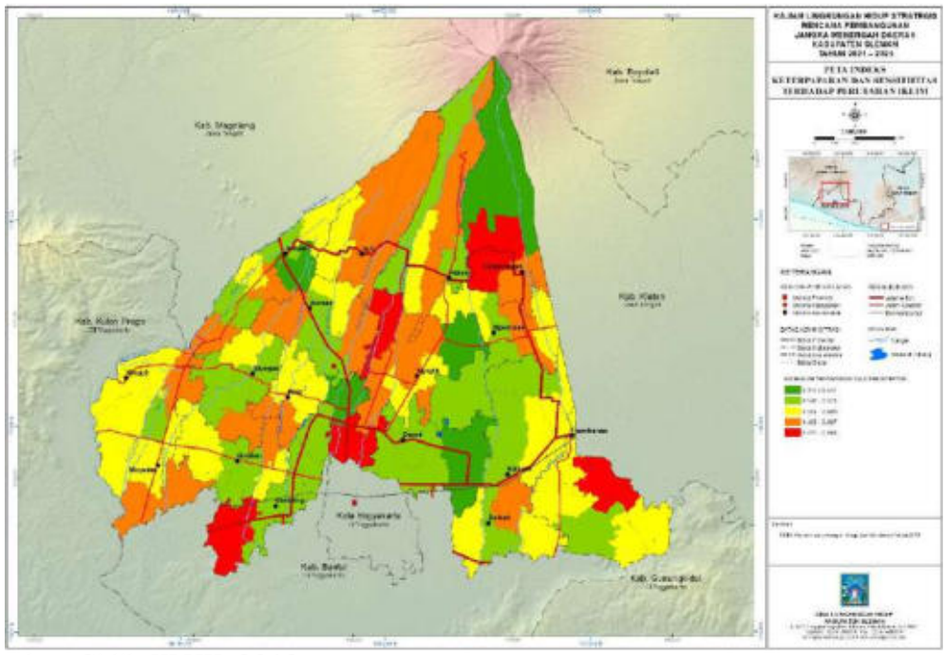
Implikasi pada kondisi lingkungan dapat berupa ekosistem lokal yang lebih rentan terhadap kerusakan akibat perubahan iklim, seperti degradasi lahan atau hilangnya keanekaragaman hayati, karena tingginya sensitivitas. Penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya alam seperti air dan tanah bisa tetap terjadi, meskipun ada upaya adaptasi yang baik. Pemerintah daerah perlu mengembangkan dan mengimplementasikan strategi adaptasi yang lebih kuat dan spesifik untuk mengurangi kerentanan yang tinggi. Selain itu juga diperlukan investasi dalam infrastruktur yang lebih tahan terhadap perubahan iklim untuk mengurangi risiko kerusakan, mengingat tingginya keterpaparan dan sensitivitas.

Sementara itu Nilai Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas di Kabupaten Sleman juga mendekati nilai tinggi karena semua nilai Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas melebihi angka 0,25. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas tersebut tercermin dari kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Tingkat keterpaparan dan sensitivitas yang tinggi mengindikasikan bahwa wilayah tersebut rentan terhadap dampak perubahan iklim.



Sumber: Sidik-KLHK, 2019

Gambar 2.35. Indeks Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim



Sumber: Sidik-KLHK, 2019

Gambar 2.36. Indeks Keterpaparan dan Sensitifitas Terhadap Perubahan Iklim

2.1.1.7 Demografi

Keberhasilan pembangunan daerah tidak lepas dari kebijakan kependudukan yang berdampak terhadap dinamika penduduk suatu daerah. Kebijakan kependudukan pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia secara menyeluruh. Secara umum kebijakan kependudukan didasarkan pada kondisi demografis daerah.

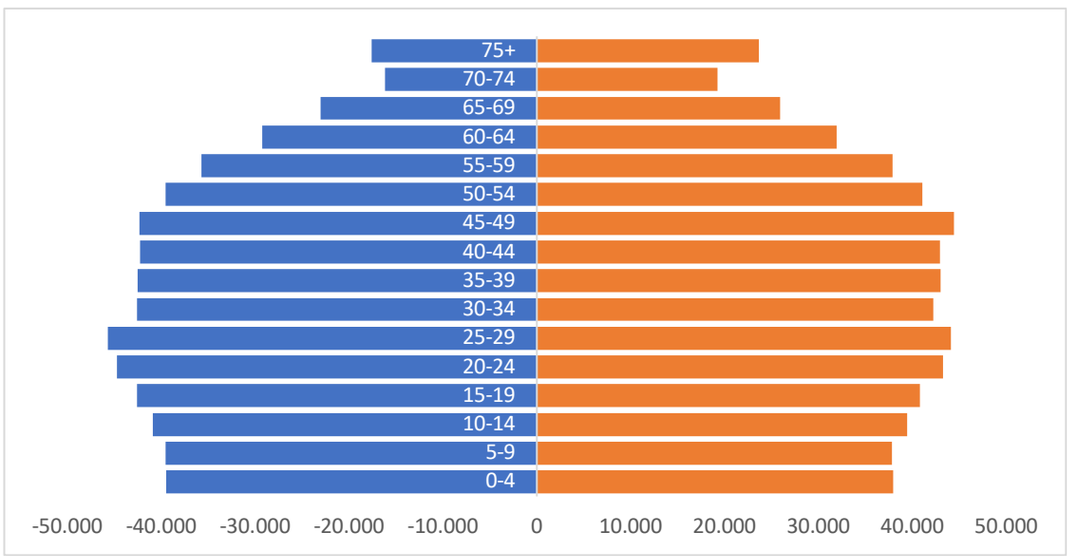
2.1.1.7.1 Gambaran Demografi

Berdasarkan data yang tersedia di Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, jumlah penduduk Kabupaten Sleman pada tahun 2020 sebesar 1.122.187 jiwa

dan terjadi kenaikan jumlah penduduk hingga pada tahun 2024 sebanyak 1.168.471 jiwa dengan laju penduduk rata-rata mencapai 1,02%.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, sex ratio atau rasio jenis kelamin pada tahun 2020 sebesar 98,76 dan semakin menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 sebesar 98,17, penduduk didominasi oleh jenis kelamin perempuan dengan 589.618 jiwa, sementara jumlah penduduk laki-laki sebanyak 578.853 jiwa.

Dalam menyusun kebijakan kependudukan perlu mempertimbangkan komposisi penduduk menurut kelompok usia, dimana ada perbedaan perlakuan terhadap kelompok usia produktif dan non produktif. Di samping itu kelompok usia dapat dibedakan menjadi kelompok prakerja (usia muda atau 1000 hari pertama kehidupan sampai dengan usia sekolah pendidikan dasar), kelompok kerja (usia produktif) dan kelompok pasca kerja (usia lanjut/pensiun). Berikut adalah komposisi penduduk Kabupaten Sleman pada tahun 2024.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2025

Grafik 2.4. Komposisi Penduduk Menurut Umur di Kabupaten Sleman Tahun 2024 (jiwa)

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa proporsi penduduk Kabupaten Sleman pada tahun 2024 didominasi kelompok usia produktif (15-64 tahun) sebesar 69,41%, sementara itu penduduk kelompok usia muda (0-14 tahun) sebesar 19,93%, dan kelompok usia lanjut (di atas 64 tahun) sebesar 10,65%. Penduduk usia muda dan penduduk usia lanjut disebut juga penduduk non produktif. Berdasarkan data tersebut, angka ketergantungan sebesar 44,06, yang proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih dari 50% dari total populasi berpotensi untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, atau disebut dengan bonus demografi. Selama beberapa tahun terakhir, kondisi tersebut telah dikelola secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Sleman melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Sleman yang dimulai dari usia dini melalui berbagai program dan kegiatan terkait secara menyeluruh.

Kepadatan penduduk Kabupaten Sleman pada tahun 2020 sebesar 1.952 jiwa/km^2 dengan kepadatan tertinggi berada di wilayah administrasi Kapanewon Depok yaitu sebesar 3.673 jiwa/km^2. Adapun kepadatan penduduk Kabupaten Sleman tahun 2024 sebesar 2.033 jiwa/km^2 dengan kepadatan tertinggi berada

di wilayah administrasi Kapanewon Depok, sebesar 3.833 jiwa/km^2, seperti tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2.26. Kepadatan Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2024

No	Kapanewon	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (km^2)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km^2)
1	Moyudan	34.446	27,62	1.247,14
2	Minggir	32.975	27,27	1.209,20
3	Seyegan	53.344	26,63	2.003,15
4	Godean	74.183	26,84	2.763,90
5	Gamping	106.735	29,25	3.649,06
6	Mlati	105.129	28,52	3.686,15
7	Depok	136.296	35,55	3.833,92
8	Berbah	61.948	22,99	2.694,56
9	Prambanan	55.233	41,35	1.335,74
10	Kalasan	89.537	35,84	2.498,24
11	Ngemplak	70.550	35,71	1.975,64
12	Ngaglik	110.428	38,52	2.866,77
13	Sleman	75.061	31,32	2.396,58
14	Tempel	54.882	32,49	1.689,20
15	Turi	37.638	43,09	873,47
16	Pakem	38.042	43,84	867,75
17	Cangkringan	32.044	47,99	667,72

Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2025

2.1.1.7.2 Gambaran Proyeksi Penduduk

A. Proyeksi Jumlah Penduduk

Proyeksi penduduk merupakan data dasar sebagai fundamental dalam menyusun rencana atau kebijakan. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk provinsi, dilakukan perhitungan proyeksi penduduk kabupaten/kota dengan tahapan iterasi proyeksi. Skenario penghitungan menggunakan asumsi *total fertility rate* dan *infant mortality rate* atau umur harapan hidup saat lahir sesuai pola data masing-masing wilayah, serta migrasi sesuai pola migrasi hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020 (LF SP2020), yang disepakati bersama. Hasil proyeksi penduduk oleh Badan Pusat Statistik dapat dilihat pada tabel di bawah.

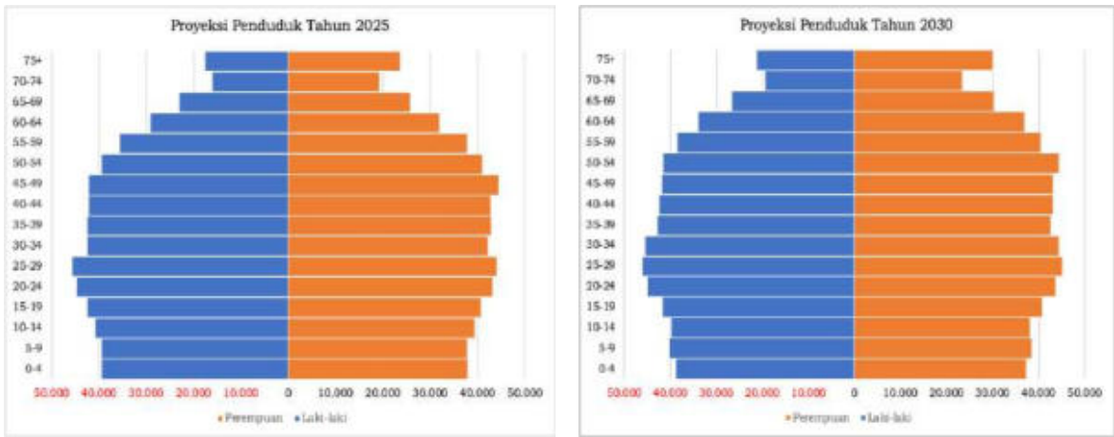
Tabel 2.27 Proyeksi Penduduk Tahun 2025-2030 (Jiwa)

Penduduk	Jumlah Penduduk Tahun 2024	Proyeksi Penduduk	
		2025	2030
Laki-laki	578.853	583.795	606.654
Perempuan	589.618	595.587	623.764
Total	1.168.471	1.179.382	1.230.418
Rasio Jenis Kelamin (%)	98,17	98,02	97,26

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2024

B. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin untuk melihat proporsi penduduk perempuan dan laki-laki serta merupakan salah satu instrumen dalam melakukan perumusan program dan kebijakan secara inklusif dengan memperhatikan kesetaraan gender untuk meminimalisasi ketimpangan gender di Kabupaten Sleman. Berikut ini adalah proyeksi penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Sleman dalam periodik 5 (lima) tahunan.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, diolah, 2024

Grafik 2.5. Piramida Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2025-2030

Pada tahun 2025, kelompok umur 35 tahun ke atas, jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki. Pada tahun 2030, kelompok umur 40 tahun ke atas, jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki.

C. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

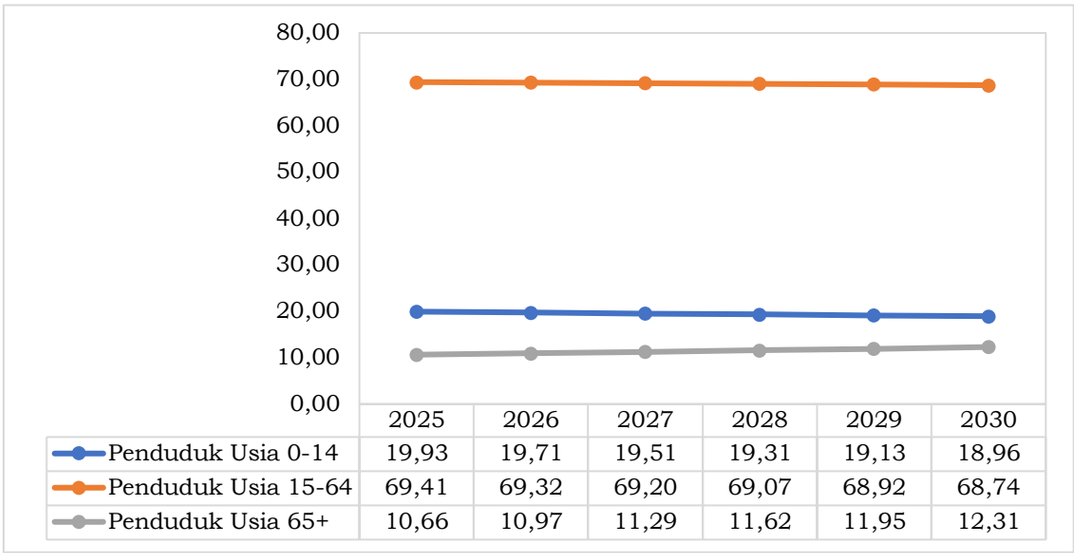
Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi penduduk Kabupaten Sleman, terdapat 3 (tiga) kelompok umur, yaitu usia 0-14 tahun, penduduk usia muda atau belum produktif; usia 15-64, penduduk usia dewasa atau usia produktif/usia kerja; serta usia 65+, penduduk usia tua atau tidak produktif. Semakin tinggi nilai umur harapan hidup, maka jumlah lansia juga akan semakin meningkat. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.28. Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Sleman Menurut Kelompok Umur Tahun 2025-2030 (Jiwa)

Penduduk	Jumlah Penduduk Tahun 2024 (ribu)	Proyeksi Penduduk	
		2025	2030
0 -14	235,55	235.086	233.231
15 – 64	812,01	818.633	845.773
65 +	120,91	125.663	151.414
Total	1.168,47	1.179.382	1.230.418
Jumlah Usia 0-14 + (65+)	356,46	360.749	384.645

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2024

Proporsi jumlah penduduk pada usia muda, rentang usia 0-14 tahun di Kabupaten Sleman semakin kecil, dan pada tahun 2030 mencapai 18,96%. Proporsi penduduk usia produktif juga semakin berkurang, dari 69,41% pada tahun 2025 menjadi 68,74% pada tahun 2030. Adapun, proporsi penduduk usia tua atau usia 65 tahun ke atas semakin bertambah dari 10,66% pada tahun 2025 menjadi 12,31% pada tahun 2030.

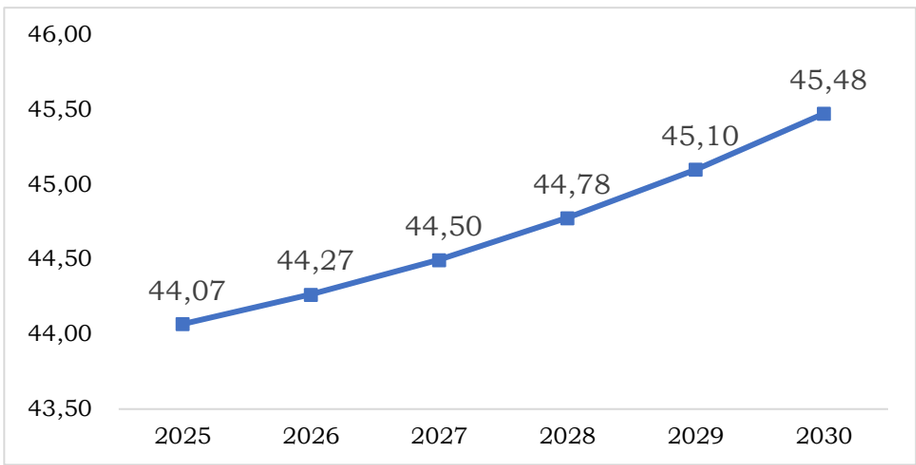


	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Penduduk Usia 0-14	19,93	19,71	19,51	19,31	19,13	18,96
Penduduk Usia 15-64	69,41	69,32	69,20	69,07	68,92	68,74
Penduduk Usia 65+	10,66	10,97	11,29	11,62	11,95	12,31

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, diolah, 2024

Grafik 2.6. Proyeksi Proporsi Penduduk Kabupaten Sleman Menurut Kelompok Umur Tahun 2025-2030 (%)

Dengan berkurangnya penduduk usia produktif dan bertambahnya usia tua, maka angka ketergantungan penduduk semakin besar. Angka ini menunjukkan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia muda dan penduduk usia tua) dengan penduduk usia produktif. Oleh karena itu, jendela kesempatan (*window of opportunity*) untuk mendapatkan bonus demografi yang terbesar adalah saat ini, dan semakin lama semakin berkurang. Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik, potensi pemanfaatan bonus demografi di Kabupaten Sleman masih dapat dioptimalkan sampai dengan tahun 2035.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, diolah, 2024

Grafik 2.7. Proyeksi Angka Ketergantungan Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2025-2030 (%)

Dari hasil penjelasan proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan rentang umur tersebut, beberapa potensi dan dampak kependudukan dapat diprediksikan dengan tetap mempertimbangkan asumsi-asumsi awal yang digunakan. Dari sisi potensi, beberapa peluang potensi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Sleman antara lain:

1. Jumlah penduduk di Kabupaten Sleman secara terus menerus cenderung mengalami kenaikan. Hal ini sangat baik dari sisi ketenagakerjaan karena

jumlah penduduk yang banyak juga berarti angka penduduk usia kerja yang tinggi.

2. Angka harapan hidup yang tinggi berasosiasi dengan baiknya derajat kesehatan masyarakat. Oleh karenanya, terus meningkatnya usia harapan hidup di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Sleman akan semakin bagus. Hidup lebih lama berarti seseorang dapat tinggal bersama keluarganya lebih lama dan menikmati kehidupan selanjutnya yang bahagia. Jadi umur panjang yang akan dimiliki oleh penduduk di Kabupaten Sleman akan membantu untuk mempromosikan hubungan yang harmonis diantara anggota keluarga.
3. Angka ketergantungan yang potensial pada awal periode. Setiap tahun, angka ketergantungan penduduk cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, angka ketergantungan penduduk di Kabupaten Sleman sebesar 43,90, dan pada tahun 2030 diprediksi mencapai 45,48, semakin mendekati angka 50.

Namun di luar sisi positif pertambahan penduduk Kabupaten Sleman terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian oleh seluruh *stakeholder* di Kabupaten Sleman, yaitu:

1. Bertambahnya jumlah penduduk menuntut untuk peningkatan penyediaan ketercukupan pangan, perumahan dan fasilitas keberlangsungan hidup lainnya, seperti fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, listrik, air minum.
2. Bertambahnya penduduk juga akan mengakibatkan bertambahnya beban lingkungan dikarenakan kebutuhan lahan untuk permukiman yang semakin tinggi, volume sampah dan limbah yang meningkat, polusi akibat aktivitas manusia meningkat dan transportasi yang meningkat, kondisi lalu lintas yang semakin padat, serta permasalahan lingkungan sosial semakin kompleks.
3. Naiknya jumlah penduduk dalam usia lanjut di Kabupaten Sleman perlu dipersiapkan sarana prasarana yang ramah terhadap lansia di masa mendatang. Misalnya dengan penyediaan rumah sakit *geriatri* yang berfungsi untuk pelayanan kesehatan kepada lansia, panti perawatan lansia, sumber daya manusia perawat lansia, fasilitas umum ramah lansia serta fasilitas tambahan lainnya yang mendukung pelayanan terhadap lansia.

   Kabupaten Sleman memasuki periode *aging society* dimana proporsi penduduk lansia terus meningkat, tetapi proporsi penduduk muda mengecil. Oleh karena itu, setelah bonus demografi berakhir, penduduk non-produktif akan mengalami peningkatan dan menjadi tanggungan kelompok usia produktif. Apabila kondisi ini tidak diimbangi dengan perencanaan masa depan yang baik, maka hal ini akan menciptakan *sandwich generation*, yaitu kondisi yang mengharuskan seseorang menanggung hidup tiga generasi, orang tua, anak dan dirinya sendiri. Di satu sisi generasi *sandwich* termasuk kelompok usia produktif, tetapi di sisi lain produktivitas mereka terhambat karena beban yang harus ditanggungnya, orang tua, anak dan dirinya sendiri. Beban itulah yang dapat menjadi penghambat optimalisasi peluang bonus demografi. Namun, apabila dikelola dengan baik, peningkatan penduduk usia produktif akibat bonus demografi dapat berdampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan, dan berakhir dengan pendapatan per kapita yang tinggi. Penduduk lansia akan mampu memenuhi kebutuhan

finansial dari tabungannya, sehingga tidak bergantung kepada generasi di bawahnya.

4. Apabila naiknya jumlah usia produktif tidak terserap oleh pasar tenaga kerja, maka pengangguran akan meningkat, yang akan berdampak pada beban ekonomi akan semakin berat karena kelompok usia tidak produktif tidak dapat didukung oleh usia produktif. Hal ini tentu akan berpengaruh kepada taraf kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
5. Terjadinya kondisi dimana mayoritas penduduk perempuan pada kelompok umur di atas usia 50 tahun. Hal ini berarti pula akan semakin banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga dan menjadi tulang punggung keluarga. Oleh karena itu perlu dipikirkan lapangan kerja untuk kelompok perempuan ini.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Salah satu upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat antara lain dengan pembangunan terhadap masyarakat pada aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

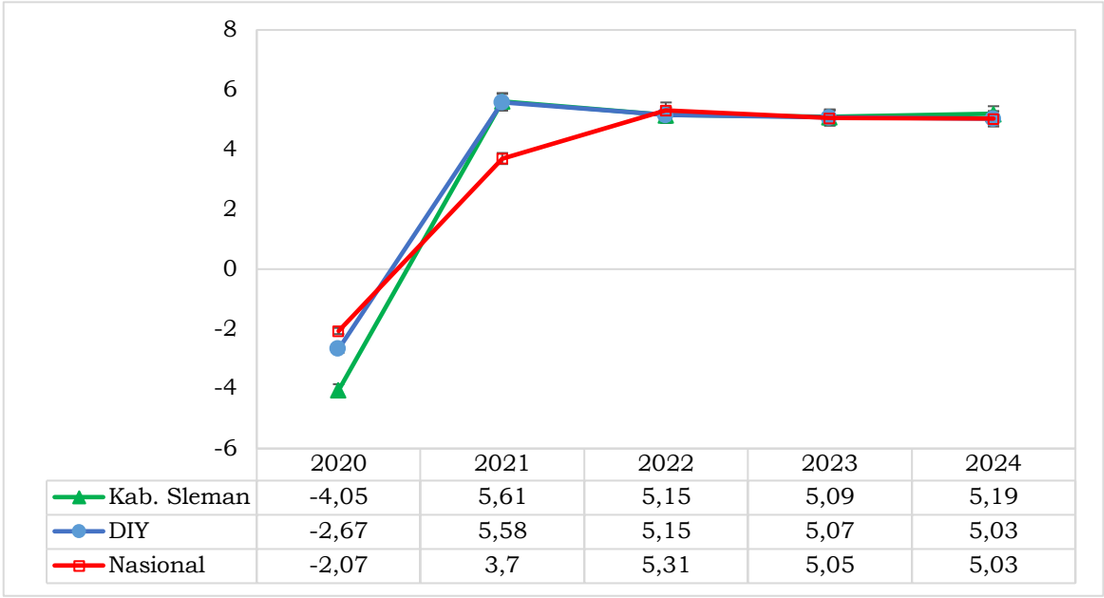
Pada aspek ekonomi, beberapa indikator yang umum digunakan untuk menganalisis keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta ketimpangan pendapatan dan angka kemiskinan. Pada aspek pendidikan dapat melihat dari sudut pandang penilaian terhadap angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM). Yang terakhir pada aspek kesehatan dapat dilihat dari angka harapan hidup (AHH), angka kematian ibu melahirkan (AKI), balita gizi buruk, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), dan sebagainya.

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.1.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja pembangunan ekonomi daerah diukur menggunakan pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pergerakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman selama 2020-2024 disajikan pada Grafik 2.8 berikut. Pada tahun 2020 terkontraksi sebesar 4,05% sebagai dampak pandemi *Covid-19*, lebih dalam dibanding provinsi maupun nasional. Pada saat itu, hampir semua sektor usaha mengalami penurunan, terutama sektor transportasi dan pergudangan dan konstruksi. Meskipun terdapat beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan positif, dengan peningkatan hingga lebih dari 15% yakni sektor informasi dan komunikasi serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Pada tahun 2021-2024, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman lebih tinggi daripada laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sesuai dengan tren pada tahun-tahun sebelum pandemi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman dan DIY hampir selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional.



	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Sleman	-4,05	5,61	5,15	5,09	5,19
DIY	-2,67	5,58	5,15	5,07	5,03
Nasional	-2,07	3,7	5,31	5,05	5,03

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sleman, DIY dan Nasional, 2021-2025, diolah

Grafik 2.8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (%)

Nilai PDRB Kabupaten Sleman Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2024 mencapai Rp63.683.201.390.000,00. Angka ini selalu mengalami kenaikan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Tahun 2021 merupakan masa pemulihan ekonomi pasca pandemi *Covid-19* dimana nilai PDRB berada di atas angka sebelum pandemi yaitu sebesar Rp49.403,24 Milyar. Berdasarkan harga berlaku, angka PDRB terus mengalami peningkatan, pada rentang waktu tahun 2020-2024 dari yang sebesar Rp45.654,72 Milyar menjadi Rp63.683,2 Milyar.

Tabel 2.29. PDRB Kabupaten Sleman Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (Milyar Rp)

Kategori	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.653,61	3.778,59	4.369,16	4.788,57	4.983,06
B	Pertambangan dan Penggalian	167,15	165,25	177,39	198,38	216,64
C	Industri Pengolahan	6.117,43	6.451,00	6.886,43	7.388,84	7.879,75
D	Pengadaan Listrik dan Gas	53,67	54,97	60,62	68,09	76,99
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	22,29	24,03	25,54	26,89	27,09
F	Konstruksi	5.035,66	5.750,04	6.304,25	6.708,27	7.549,02
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.581,91	3.742,56	4.221,44	4.566,59	4.779,91
H	Transportasi dan Pergudangan	2.002,09	1.906,70	2.291,89	2.627,86	2.923,51
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.051,03	4.515,54	5.411,92	6.096,23	6.794,23
J	Informasi dan Komunikasi	4.479,82	5.351,85	5.725,18	6.107,98	6.353,76
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.573,57	1.701,46	1.969,17	2.206,36	2.371,00
L	Real Estate	3.832,68	3.952,04	4.212,19	4.480,74	4.707,61
M,N	Jasa Perusahaan	698,44	771,13	866,91	974,50	1.035,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.201,88	3.301,95	3.532,97	3.679,64	3.967,72

Kategori	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
P	Jasa Pendidikan	4.852,85	5.274,72	5.579,83	6.047,08	6.368,50
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.404,64	1.512,32	1.631,12	1.837,92	1.966,22
R,S, T,U	Jasa lainnya	926,01	1.149,10	1.452,65	1.623,60	1.682,98
	PDRB Total	**45.654,72**	**49.403,24**	**54.718,66**	**59.431,54**	**63.683,20**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2025

Secara struktur, distribusi sektor PDRB Kabupaten Sleman cenderung memiliki posisi yang statis, kecuali pada sektor transportasi dan pergudangan yang cenderung menurun dan sektor informasi dan komunikasi yang cenderung meningkat, akibat pandemi *Covid-19*. Pada tahun 2024, sektor transportasi dan pergudangan belum kembali memiliki kontribusi seperti pada tahun sebelum pandemi *Covid-19*. Sementara sektor informasi dan komunikasi terus memiliki kontribusi yang lebih tinggi pasca pandemi, menggantikan peran sektor transportasi dan pergudangan. Sektor lain seperti akomodasi makan minum, konstruksi, *real estate* dan sektor pertanian juga mengalami pergeseran, namun pada tahun 2023 sudah cenderung kembali pada ritme kontribusi sebelum pandemi *Covid-19*. Distribusi persentase masing-masing sektor terhadap PDRB Kabupaten Sleman Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.30. Struktur PDRB Kabupaten Sleman Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (%)

Kategori	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,00	7,65	7,98	8,04	7,82
B	Pertambangan dan Penggalian	0,37	0,33	0,32	0,33	0,34
C	Industri Pengolahan	13,40	13,06	12,59	12,44	12,37
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,11	0,11	0,11	0,12
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04
F	Konstruksi	11,03	11,64	11,52	11,29	11,85
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,85	7,58	7,71	7,69	7,51
H	Transportasi dan Pergudangan	4,39	3,86	4,19	4,42	4,59
I	Penyediaan Akomodasi dan MakanMinum	8,87	9,14	9,89	10,26	10,67
J	Informasi dan Komunikasi	9,81	10,83	10,46	10,28	9,98
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,45	3,44	3,60	3,71	3,72
L	Real Estate	8,39	8,00	7,70	7,54	7,39
M,N	Jasa Perusahaan	1,53	1,56	1,58	1,64	1,63
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,01	6,68	6,46	6,19	6,23
P	Jasa Pendidikan	10,63	10,68	10,20	10,18	10,00
Q	Jasa Kesehatan dan KegiatanSosial	3,08	3,06	2,98	3,09	3,09
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,03	2,33	2,66	2,73	2,64
PDRB		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2025

Menerjemahkan kondisi dari tabel struktur PDRB Kabupaten Sleman di atas, fenomena beberapa sektor perekonomian seperti pariwisata dan konstruksi sudah mulai kembali menggeliat seperti sebelum pandemi, akan tetapi sektor yang berkaitan dengan pergerakan baik fisik maupun informasi mengalami pergeseran dan akan semakin menjadi sumber peningkatan era disrupsi. Dengan pergerakan informasi yang tidak lagi sepenuhnya berbasis fisik,

selayaknya perlu ada upaya pemanfaatan digitalisasi dan inovasi teknologi berbasis *global knowledge*.

Dengan adanya program pembangunan jalan tol baik ruas Bawen– Yogyakarta–YIA dan ruas Yogyakarta–Solo yang memiliki lokasi *exit toll di* Kabupaten Sleman, pengembangan perekonomian Sleman diharapkan dapat bertumbuh pesat. Untuk pertumbuhan sektor-sektor PDRB selama lima tahun (tahun 2019 hingga tahun 2024) dapat dilihat pada tabel di bawah. Berdasarkan pertumbuhan sektor-sektornya, pada tahun 2020 terlihat hampir seluruh sektor dalam kondisi kontraksi dikarenakan pandemi *Covid-19*. Tahun 2021 sektoral mulai tumbuh positif meskipun masih terdapat beberapa sektor yang tumbuh negatif seperti sektor tambang dan penggalian, transportasi dan pergudangan, dan administrasi pemerintah dengan pertumbuhan terbesar di sektor informasi dan komunikasi. Mulai tahun 2022 seluruh sektor kembali tumbuh positif dengan laju pertumbuhan terbesar berada pada transportasi dan pergudangan serta akomodasi makan-minum. Hal ini mengindikasikan setelah adanya pandemi *Covid-19* sektor transportasi mulai menunjukkan pertumbuhan karena pencabutan masa pembatasan aktivitas. Setelah pandemi *Covid-19* berakhir, sektor pendidikan yang sebelumnya dilakukan secara daring (dalam jaringan) kemudian perlahan dilakukan pembelajaran tatap muka dimana hal ini menyebabkan kontribusi sektor informasi dan komunikasi menurun.

Tabel 2.31. Pertumbuhan Sektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (%)

Kategori	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,18	1,31	6,85	0,24	0,82
B	Pertambangan dan Penggalian	-8,77	-5,32	1,71	3,04	8,02
C	Industri Pengolahan	-3,78	0,95	1,60	3,64	2,88
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-1,26	2,35	6,98	7,74	12,59
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,51	6,52	3,23	2,86	0,33
F	Konstruksi	-16,22	11,11	5,66	7,70	11,53
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-5,12	1,14	5,27	4,01	2,86
H	Transportasi dan Pergudangan	-36,40	-6,81	13,05	7,58	6,05
I	Penyediaan Akomodasi dan MakanMinum	-18,08	8,06	11,76	8,81	8,56
J	Informasi dan Komunikasi	19,99	16,92	3,81	4,83	3,79
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,05	2,77	5,67	10,01	6,43
L	Real Estate	1,36	0,49	3,13	3,52	4,02
M,N	Jasa Perusahaan	-14,12	7,88	7,28	8,08	4,41
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-2,02	-0,38	2,67	2,14	6,58
P	Jasa Pendidikan	5,52	5,23	1,22	3,70	4,03
Q	Jasa Kesehatan dan KegiatanSosial	20,02	4,21	3,39	6,18	4,33
R,S,T,U	Jasa lainnya	-14,74	20,82	19,28	6,72	2,2
PDRB		**-4,05**	**5,61**	**5,15**	**5,09**	**5,19**

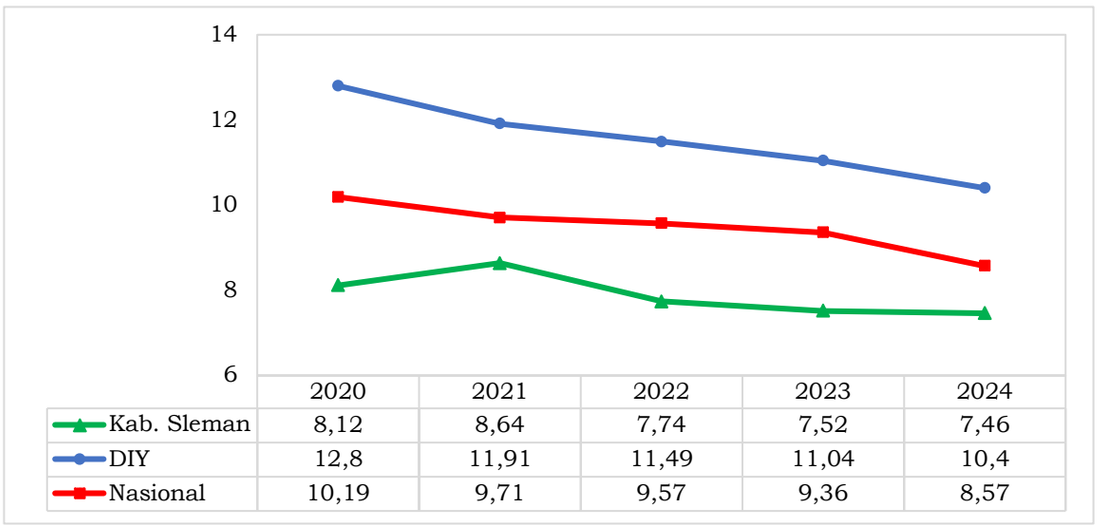
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2021-2025

2.1.2.1.2 Tingkat Kemiskinan

Indikator kesejahteraan ekonomi berikutnya adalah kemiskinan. Indikator kemiskinan diukur dengan persentase penduduk miskin dan jumlah penduduk miskin. Bagian berikut akan menguraikan dua indikator tersebut di Kabupaten Sleman

A. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk merupakan indikator tingkat kemiskinan yang cukup banyak digunakan. Persentase penduduk miskin mencerminkan proporsi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan terhadap jumlah total penduduk yang ada di wilayah tersebut. Persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sleman terus menurun dan berada di bawah angka provinsi maupun nasional.



	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Sleman	8,12	8,64	7,74	7,52	7,46
DIY	12,8	11,91	11,49	11,04	10,4
Nasional	10,19	9,71	9,57	9,36	8,57

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sleman, DIY dan Nasional, 2020-2024

Grafik 2.9. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sleman, DIY, dan Indonesia Tahun 2020-2024

Grafik di atas menunjukkan persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sleman mengalami tren menurun selama periode 2020-2024. Persentase kemiskinan Kabupaten Sleman selalu lebih rendah dibandingkan DIY maupun Nasional. Tahun 2021 persentase mengalami meningkat akibat pandemi *Covid-19*. Namun, tahun 2022 hingga 2024, angka kemiskinan Kabupaten Sleman semakin menurun dan belum kembali seperti angka di tahun 2019 sebelum masa krisis. Meskipun angka penurunannya semakin mengecil, dimana pada tahun 2022-2023 hanya turun 0,22% dan pada tahun 2023-2024 hanya turun 0,06% menjadi 7,46%.

B. Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin memberikan gambaran jumlah jiwa yang masih menjadi penduduk miskin di Kabupaten Sleman. Jika diproporsikan dengan perbandingan jumlah penduduk di tingkat provinsi, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sleman lebih kecil dibandingkan dengan proporsi jumlah penduduk Kabupaten Sleman di DIY. Proporsi jumlah penduduk Kabupaten Sleman dibandingkan jumlah penduduk DIY pada tahun 2024 adalah 32,7% sementara proporsi penduduk miskinnya adalah 21,9%. Kontribusi jumlah penduduk miskin Kabupaten Sleman yang lebih kecil dibanding kontribusi jumlah penduduk, menunjukkan bahwa Sleman bukan merupakan pusat kemiskinan (*centre of poverty*) bagi DIY.

Tabel 2.32. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sleman, DIY dan Nasional Tahun 2020-2024 (Jiwa)

Tahun	Kab. Sleman (ribu)	DIY (ribu)	Nasional (juta)
2020	99,78	475,72	27,55
2021	108,93	506,45	26,50
2022	98,92	454,76	26,36
2023	97,50	448,47	25,90
2024	97,94	445,55	25,22

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sleman, DIY dan Nasional, 2020-2024

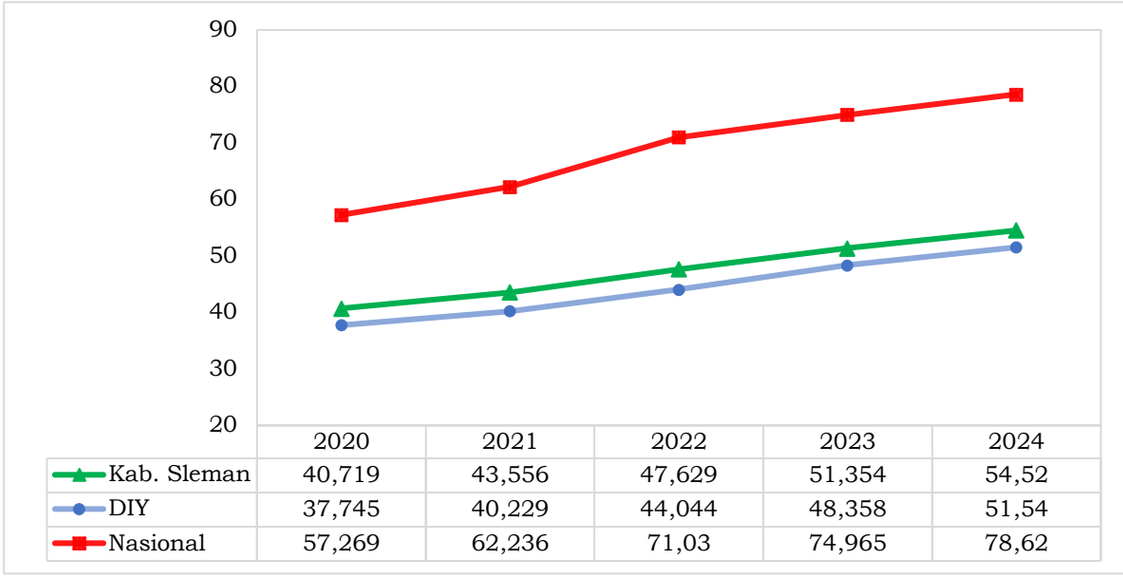
Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, strategi yang dilakukan Kabupaten Sleman adalah pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, antara lain: program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu, untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin; program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; serta program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa.

2.1.2.1.3 PDRB per Kapita

Selain pertumbuhan ekonomi, indikator kesejahteraan masyarakat yang sering digunakan adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah jumlah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. Perkembangan produk domestic regional bruto (PDRB) per kapita per tahun atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Sleman, DIY, dan Nasional pada rentang tahun 2020-2024 ditunjukkan dalam Grafik 2.10 di bawah.

Selama periode lima tahun terakhir, Nilai PDRB per kapita Kabupaten Sleman selalu di atas Provinsi meskipun masih berada di bawah Nasional. Meskipun demikian, dapat ditunjukkan bahwa PDRB per kapita Kabupaten Sleman memiliki tren positif dengan rata-rata laju pertumbuhan 7,57%. Pada jangka menengah, pertumbuhan PDRB per kapita ini diharapkan dapat menjadi wujud pemerataan dan juga peningkatan kesempatan bagi lebih banyak masyarakat untuk mendapatkan pengembangan SDM yang lebih baik.

Mengingat gap dengan rata-rata PDRB per kapita Nasional cukup tinggi, meskipun pendapatan per kapita di Kabupaten Sleman meningkat secara konsisten, untuk mengejar PDRB per kapita Nasional diperlukan upaya yang cukup serius dan kontinu.



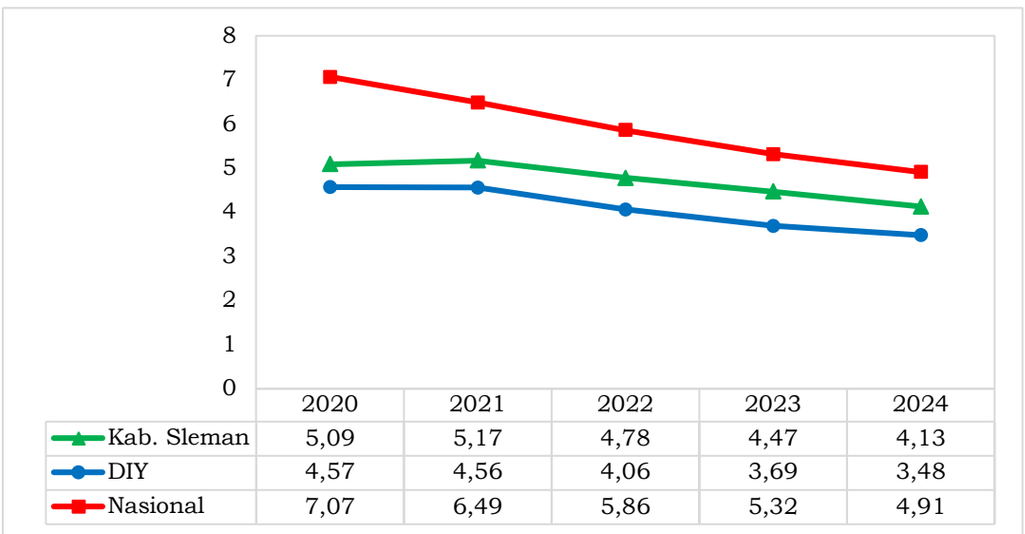
	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Sleman	40,719	43,556	47,629	51,354	54,52
DIY	37,745	40,229	44,044	48,358	51,54
Nasional	57,269	62,236	71,03	74,965	78,62

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sleman, DIY dan Nasional, 2021-2025

Grafik 2.10. PDRB Per Kapita Kabupaten Sleman, DIY dan Nasional Tahun 2020 - 2024

2.1.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia (*human capital*) adalah dua hal yang saling berkait. Kualitas tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja menjadi faktor penting dalam pembangunan ekonomi, dan selanjutnya pembangunan ekonomi akan mampu membuka peluang kerja baru dan menyerap tenaga kerja. Penduduk yang diperhitungkan dalam dunia kerja dan faktor produksi adalah penduduk usia kerja yaitu penduduk usia 15 tahun ke atas. Berdasarkan aktivitasnya, penduduk usia kerja dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri atas penduduk yang masih bersekolah, penduduk yang mengurus rumah tangga dan penduduk penerima pendapatan. Angkatan kerja dibagi menjadi dua kelompok, yaitu angkatan kerja yang bekerja dan angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja yang tidak bekerja ini yang disebut sebagai pengangguran terbuka.



	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Sleman	5,09	5,17	4,78	4,47	4,13
DIY	4,57	4,56	4,06	3,69	3,48
Nasional	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sleman, DIY dan Nasional, 2021-2025

Grafik 2.11. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sleman, DIY, dan Nasional Tahun 2020-2024

Pengangguran terbuka adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

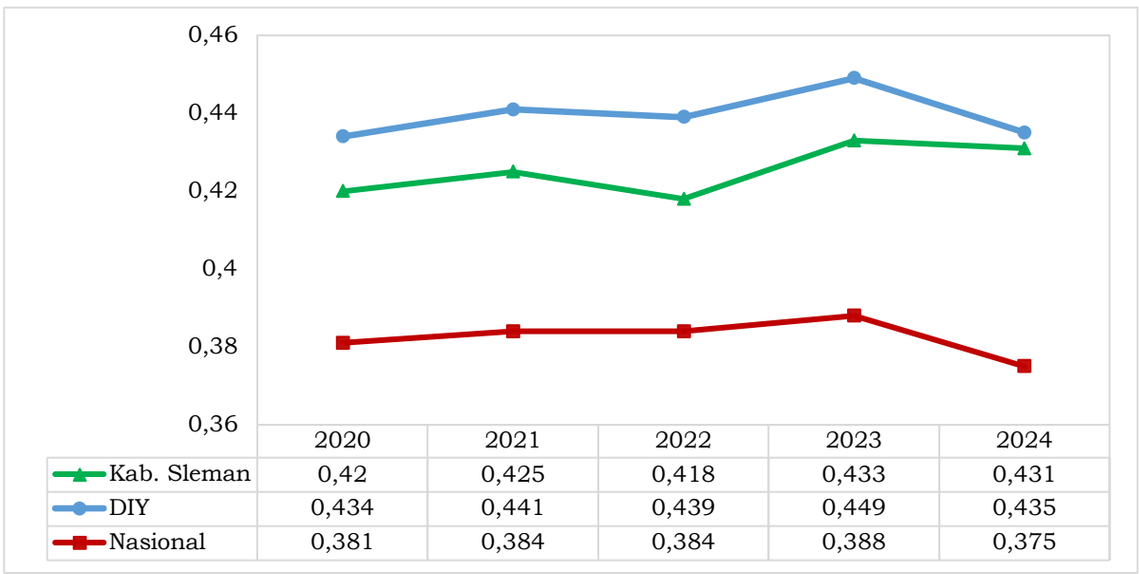
Berdasarkan grafik di atas, TPT yang ada di Kabupaten Sleman, selama lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sleman cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran DIY, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pengangguran nasional. Kondisi ini justru terbalik dengan tingkat kemiskinan, dimana tingkat kemiskinan Kabupaten Sleman justru paling rendah bila dibandingkan nasional maupun DIY. Hal ini dapat menandakan adanya kondisi yang mempengaruhi pendapatan masyarakat meskipun secara status merupakan pengangguran.

2.1.2.1.5 Indeks Gini

Indeks Gini, sering disebut juga sebagai gini ratio atau rasio gini, adalah metrik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam masyarakat. Ini adalah angka antara 0 dan 1, dimana 0 mengindikasikan distribusi yang sempurna merata (setiap orang memiliki pendapatan yang sama), sedangkan 1 mengindikasikan distribusi yang sangat tidak merata (satu orang memiliki seluruh pendapatan atau kekayaan).

Dalam konteks sosio-ekonomi, rasio gini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana pendapatan atau kekayaan terdistribusi diantara individu atau rumah tangga dalam suatu negara atau wilayah. Semakin tinggi rasio gini, semakin besar ketimpangan ekonomi dalam masyarakat. Oleh karena itu, rasio gini sering digunakan sebagai indikator ketimpangan sosial dan menjadi perhatian dalam perencanaan kebijakan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Grafik berikut menunjukkan rasio gini Kabupaten Sleman, DIY, dan Nasional.

Pada tahun 2024, Indeks Gini Kabupaten Sleman mencapai 0,431, menurun dari tahun 2023 yang mencapai 0,433. Angka ini lebih baik dari Indeks Gini DIY yang mencapai 0,449, angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Untuk lebih detail dapat dilihat pada grafik di bawah.



	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Sleman	0,42	0,425	0,418	0,433	0,431
DIY	0,434	0,441	0,439	0,449	0,435
Nasional	0,381	0,384	0,384	0,388	0,375

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sleman, DIY dan Nasional, 2021-2025

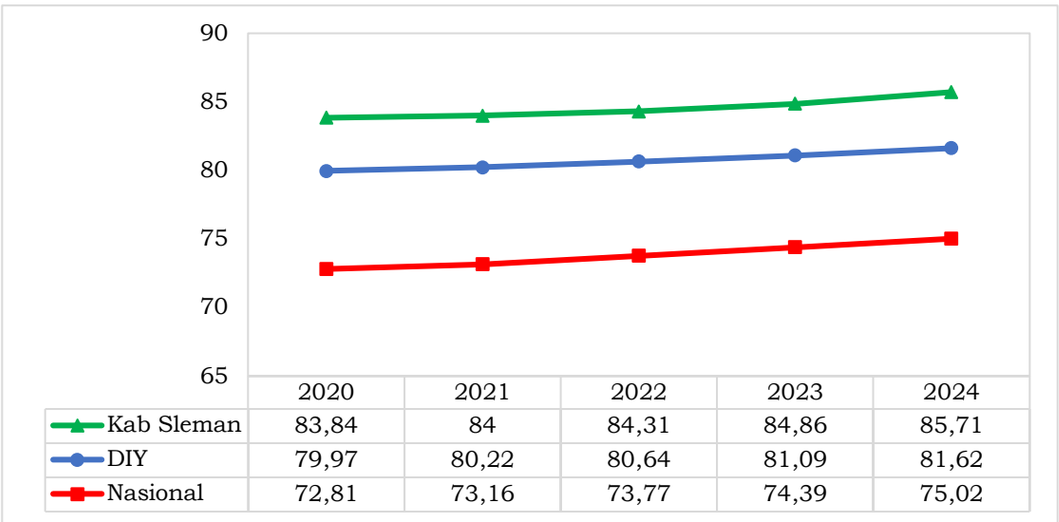
Grafik 2.12. Indeks Gini Kabupaten Sleman, DIY, dan Nasional Tahun 2020 – 2024

Kondisi di atas menunjukkan bahwa pendapatan penduduk di Kabupaten Sleman pada kurun waktu tersebut belum merata antara kelompok masyarakat berpenghasilan menengah atas dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu penyebabnya adalah adanya polarisasi kepemilikan aset produktif dan dualisme ekonomi. Polarisasi kepemilikan aset ini menjadikan penduduk yang kaya memiliki kecepatan untuk meningkatkan kekayaan yang lebih tinggi karena punya aset produktif, sedangkan yang miskin kecepatan untuk meningkatkan perekonomiannya jauh lebih rendah. Aset produktif adalah sektor-sektor yang menghasilkan tingkat upah atau pendapatan yang tinggi, seperti hotel, bisnis otomotif dan properti.

2.1.2.1.6 Indeks Modal Manusia (Indeks Pembangunan Manusia)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu gambaran bagaimana kinerja Pemerintah dalam membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. IPM terdiri atas tiga komponen utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Komponen kesehatan diukur dari angka harapan hidup saat lahir (AHH), sedangkan pendidikan ada dua komponen yaitu harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Sementara komponen pendapatan diukur dari konsumsi riil per kapita (dalam rupiah). Berikut adalah nilai IPM Kabupaten Sleman dengan kabupaten/kota di DIY dan Nasional.

Perbandingan IPM Kabupaten Sleman, DIY dan Nasional dapat dilihat pada grafik di bawah. IPM Kabupaten Sleman pada rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 selalu mengalami peningkatan. IPM Kabupaten Sleman merupakan yang tertinggi kedua setelah Kota Yogyakarta. IPM Kabupaten Sleman juga cenderung lebih tinggi dibandingkan IPM DIY maupun Nasional.



	2020	2021	2022	2023	2024
Kab Sleman	83,84	84	84,31	84,86	85,71
DIY	79,97	80,22	80,64	81,09	81,62
Nasional	72,81	73,16	73,77	74,39	75,02

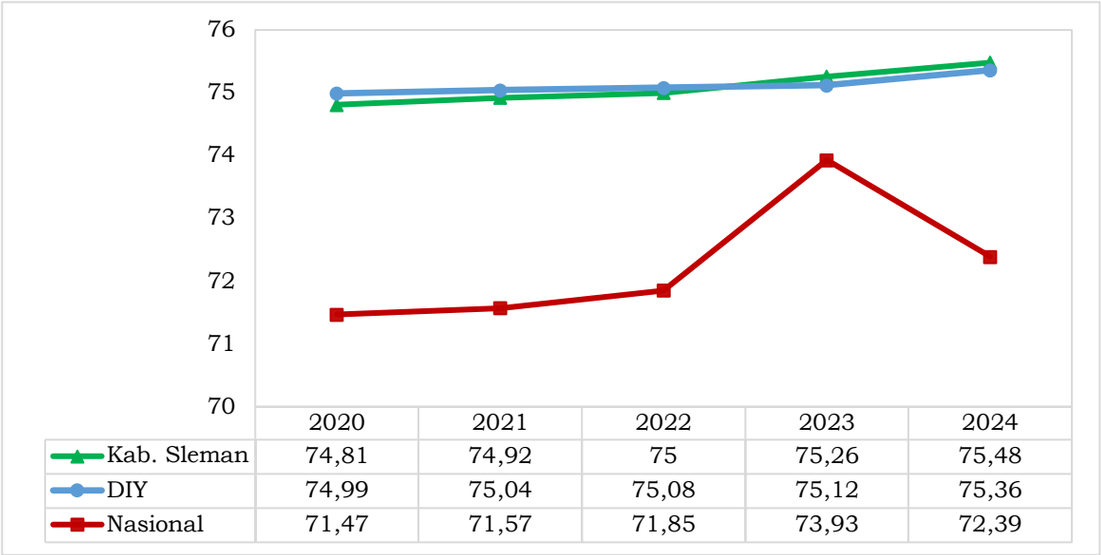
Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sleman, DIY dan Nasional, 2021-2025

Grafik 2.13. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sleman, DIY, dan Nasional Tahun 2020-2024

2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua

2.1.2.2.1 Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah estimasi rata-rata tahun yang diharapkan seseorang dapat hidup pada saat lahir, berdasarkan pada angka harapan hidup pada saat itu dan faktor-faktor demografis yang mempengaruhi tingkat mortalitas di masyarakat. Angka usia harapan hidup dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perawatan kesehatan, gaya hidup, lingkungan, akses terhadap sumber daya, dan faktor-faktor genetik.



	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Sleman	74,81	74,92	75	75,26	75,48
DIY	74,99	75,04	75,08	75,12	75,36
Nasional	71,47	71,57	71,85	73,93	72,39

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sleman, DIY dan Nasional, 2021-2025

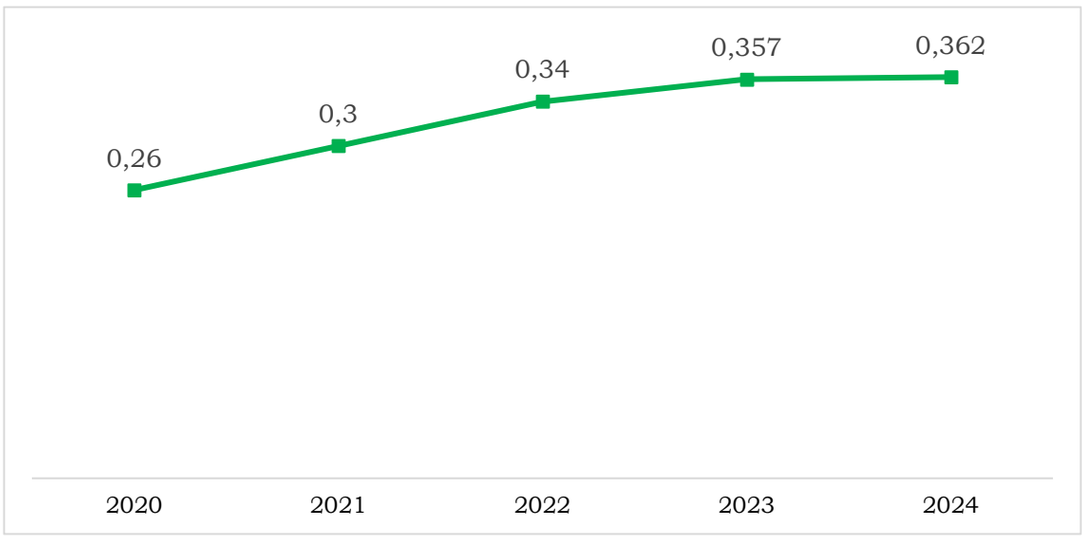
Grafik 2.14. Usia Harapan Hidup Kabupaten Sleman, DIY dan Nasional Tahun 2020-2024

Dari grafik di atas, UHH Kabupaten Sleman hampir sama dengan DIY, dan jauh di atas Nasional. UHH Sleman meningkat secara konsisten, dimana pada tahun 2020 sebesar 74,81 tahun dan pada tahun 2024 menjadi 75,48 tahun. Bertambah panjangnya UHH di Kabupaten Sleman, di satu sisi menunjukkan adanya kualitas kesehatan yang lebih baik, kesejahteraan yang baik, namun di sisi lain tentu menambah usia *unproductive* dan angka ketergantungan. Bertambahnya angka ketergantungan, di sisi lain menimbulkan beban keluarga menjadi bertambah berat.

2.1.2.2.2 Indeks Keluarga Sehat

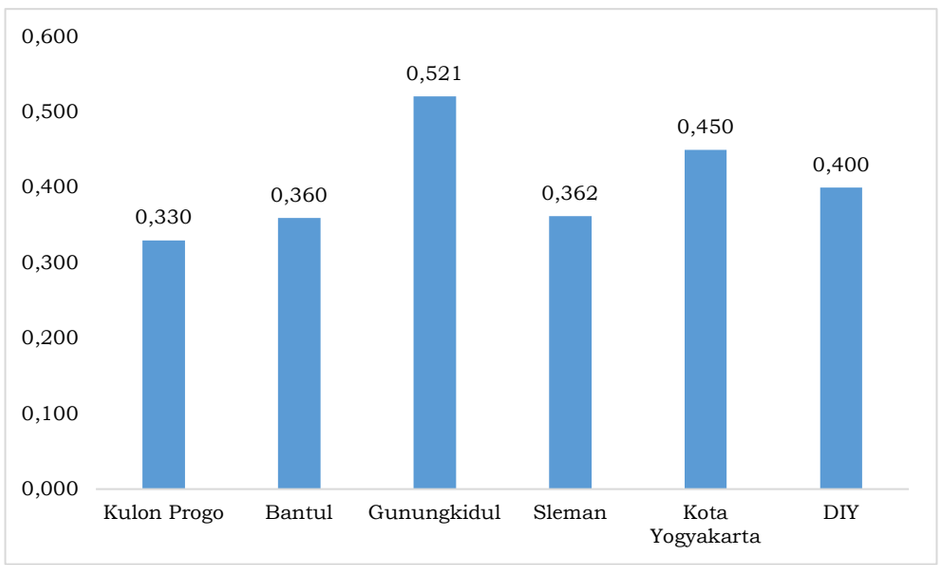
Kesehatan sangat menentukan kualitas SDM masyarakat. Dengan kondisi kesehatan yang baik, maka akan memberikan fondasi fisik bagi masyarakat untuk dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Untuk itulah pembangunan kesehatan menjadi kebutuhan mendasar yang penting untuk dioptimalkan dalam rangka mengatasi masalah kesehatan dan mewujudkan SDM masyarakat yang tangguh. Sebagai kelompok sosial terkecil yang menjadi basis kehidupan masyarakat, kesehatan keluarga yang didefinisikan melalui Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kesehatan masyarakat secara umum. Jika ditinjau secara sistem, IKS ini terdiri atas 12 indikator keluarga sehat yang meliputi kesehatan fisik, mental, sosial dan lingkungan.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, IKS di Kabupaten Sleman tahun 2024 masih di angka 0,362. Angka ini menunjukkan bahwa kondisi kesehatan umum keluarga di wilayah Kabupaten Sleman masih tergolong rendah. Ini dapat mencakup berbagai aspek seperti status gizi, kesehatan ibu dan anak, prevalensi penyakit menular dan tidak menular, serta akses terhadap layanan kesehatan. Jumlah keluarga sehat di Kabupaten Sleman baru sekitar 104.971 keluarga dari 294.294 keluarga, artinya baru sekitar 36% keluarga yang termasuk keluarga sehat.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 2024

Grafik 2.15. Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 2025

Grafik 2.16. Indeks Keluarga Sehat Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2024

Apabila dibandingkan dengan daerah lain, pada tahun 2024, IKS di Kabupaten Sleman masih lebih rendah dari Kabupaten Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta. Meskipun Kabupaten Sleman memiliki sarana prasarana kesehatan yang lebih banyak dan tersebar di seluruh wilayah, seperti kualitas dan akses layanan kesehatan, pendidikan dan kesadaran kesehatan, kondisi sosial ekonomi, serta efektivitas program dan kebijakan kesehatan, namun capaian beberapa aspek penting yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan keluarga masih kurang.

Tabel 2.33. Komponen Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Sleman Tahun 2024

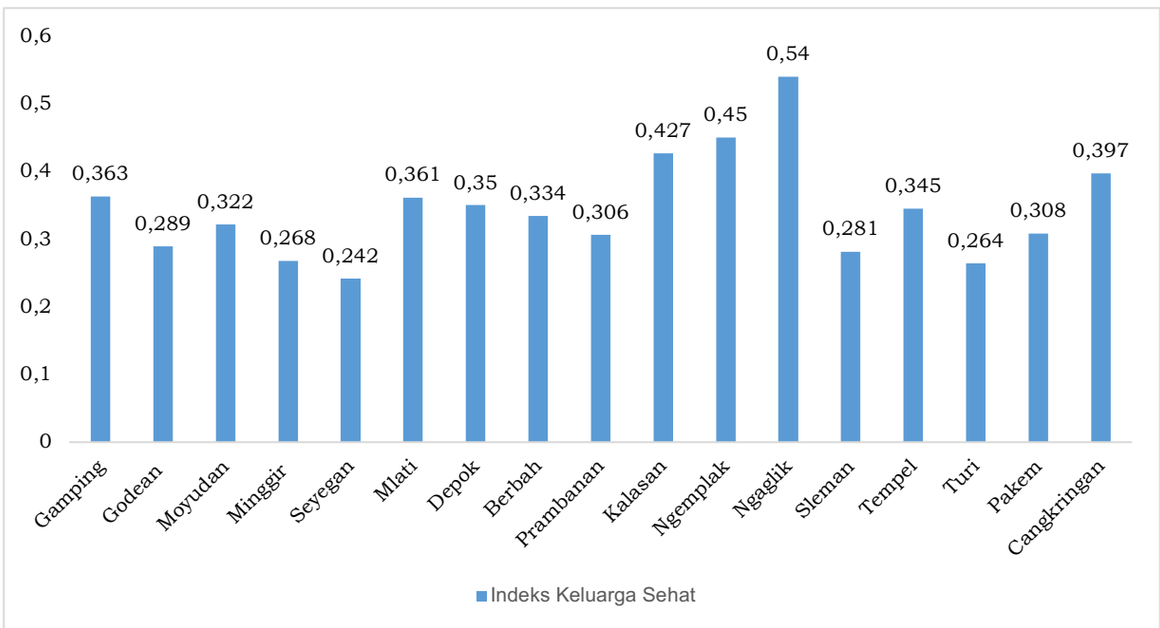
No	Indikator	Capaian 2024
1	Keluarga mengikuti program KB	44,58
2	Persalinan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan	98,23
3	Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap	98,52
4	Bayi mendapatkan ASI Eksklusif	90,16

No	Indikator	Capaian 2024
5	Pertumbuhan balita dipantau	94,39
6	Penderita TB Paru yang beribat sesuai standar	39,42
7	Penderita hipertensi yang berobat teratur	35,18
8	Penderita gangguan jiwa berat, diobati dan tidak ditelantarkan	23,90
9	Anggota keluarga tidak ada yang merokok	59,57
10	Keluarga sudah menjadi anggota JKN	78,47
11	Keluarga memiliki akses/menggunakan sarana air bersih	95,26
12	Keluarga memiliki akses/menggunakan jamban Keluarga	96,93

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 2024

Secara umum variabel indikator dalam IKS ini dapat dikelompokkan dalam 3 indikator besar yaitu kesehatan ibu dan anak dan gizi, penyakit menular/tidak menular dan perilaku kesehatan. Nilai indeks keluarga sehat (IKS) terendah di Kabupaten Sleman tahun 2024 terdapat pada kategori kelompok penyakit menular dan tidak menular yaitu gangguan jiwa, penderita hipertensi dan penderita tuberkulosis (TB) paru. Selain itu, komponen keluarga mengikuti program keluarga berencana (KB) belum mencapai angka 50. Oleh karena itu, perlu intervensi pemerintah daerah Kabupaten Sleman untuk indikator yang masih rendah yaitu penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan, penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur, dan penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar melalui program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga.

Apabila dilihat persebaran keluarga sehat setiap kapanewon, indeks keluarga sehat tertinggi terletak di Kapanewon Ngaglik, sedangkan terendah di Kapanewon Seyegan. Nilai terendah komponen indeks keluarga sehat di kapanewon hampir sama di tingkat daerah yaitu penderita TB paru yang berobat sesuai standar, penderita hipertensi yang berobat teratur, penderita gangguan jiwa berat, diobati dan tidak ditelantarkan dan keluarga mengikuti program KB.

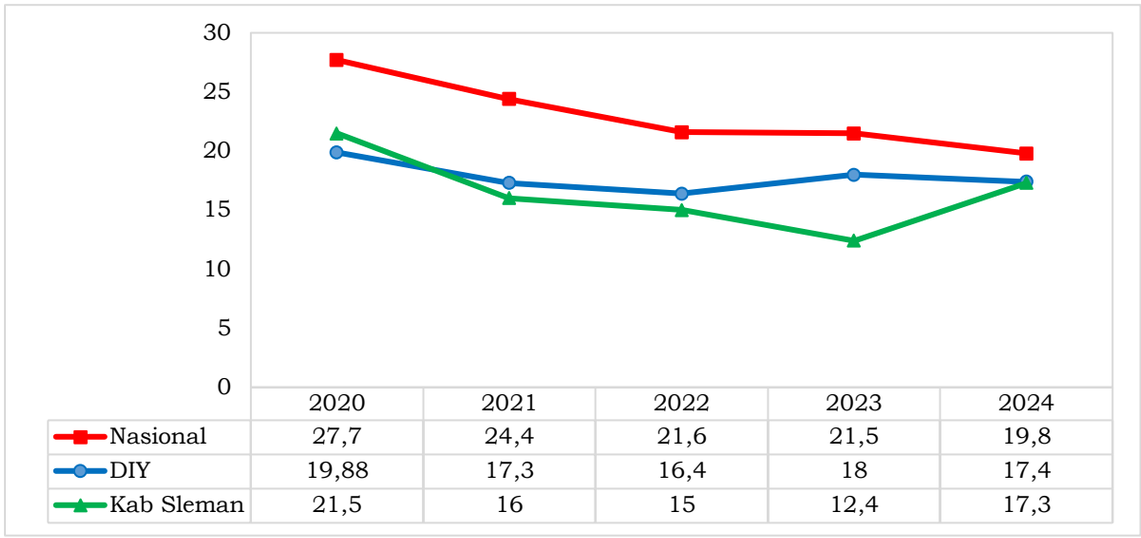


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 2024

Grafik 2.17. Indeks Keluarga Sehat per Kapanewon Tahun 2024 di Kabupaten Sleman

2.1.2.2.3 Prevalensi Stunting

"Stunting" merupakan permasalahan kesehatan yang memiliki dampak buruk pada tumbuh kembang anak, baik secara fisik, mental maupun intelektual. Pengendalian *"stunting"* sangat diperlukan, agar tumbuh generasi yang berkualitas, baik dari segi kesehatan jasmani rohani, memiliki kecerdasan dan kondisi mental yang kuat. Kondisi prevalensi *"stunting"* di Kabupaten Sleman pada lima tahun terakhir secara umum mengalami penurunan, kecuali pada tahun 2024.



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	27,7	24,4	21,6	21,5	19,8
DIY	19,88	17,3	16,4	18	17,4
Kab Sleman	21,5	16	15	12,4	17,3

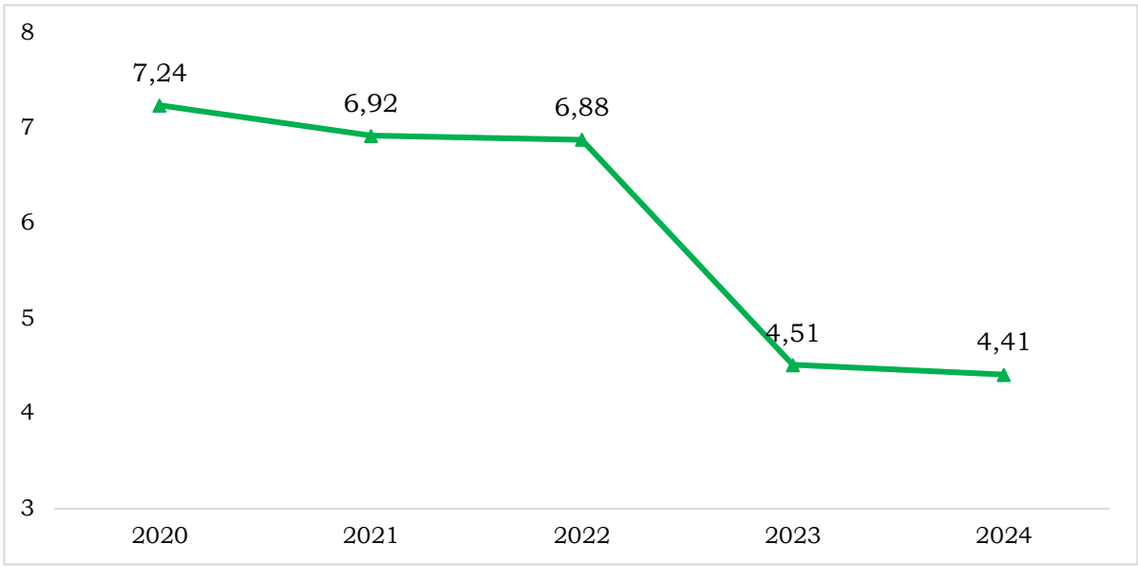
Sumber: Survei Kesehatan Indonesia (SKI), 2021-2024

Grafik 2.18. Prevalensi *Stunting* Kabupaten Sleman Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2020-2024

Berdasarkan survei kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2024 yang dirilis Kementerian Kesehatan, prevalensi *stunting* tahun 2024 di Kabupaten Sleman ini mengalami peningkatan, menjadi 17,3%. Adapun Nasional dan DIY mengalami penurunan. Meskipun jika dibandingkan dengan Sleman, prevalensi *stunting* Kabupaten Sleman masih di bawah Nasional dan DIY

Penyebab meningkatnya angka prevalensi stunting disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: kenaikan kelompok risiko pada usia 6-18 bulan karena pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) tidak berkecukupan gizi dengan maraknya penjualan MPASI kemasan siap saji, yang banyak diakses oleh ibu-ibu muda dan pekerja; masih ada balita yang belum mengikuti penimbangan rutin sebagai pemantauan tumbuh kembang; dan intervensi spesifik belum mencakup balita dengan Berat Badan (BB) tidak naik atau BB tidak naik namun masih di atas garis kuning tumbuh kembang. Berdasarkan beberapa faktor penyebab tersebut untuk penanganan stunting diperlukan edukasi dan pendampingan pola asuh dan pemberian MPASI, optimalisasi peran pendampingan keluarga, dan perluasan intervensi spesifik yang tidak terbatas pada balita dengan BB dan Tinggi Badan (TB) kurang.

Berdasarkan Data Pemantauan Status Gizi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPBGM) oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman prevalensi stunting di Kabupaten dalam lima tahun terakhir terus menurun, dan 4,41% pada tahun 2024.

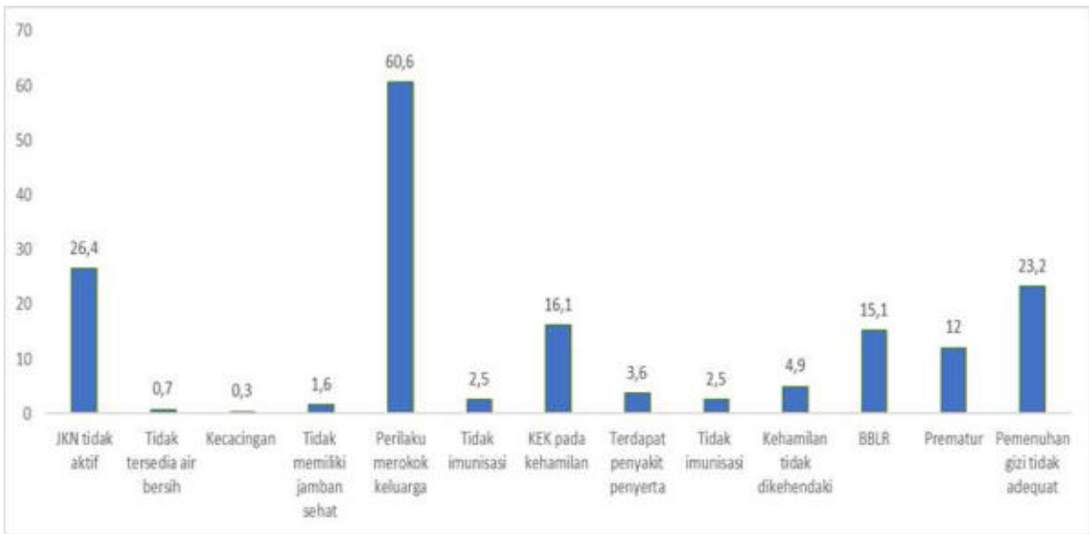


Sumber: Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat, 2021-2024

Grafik 2.19. Prevalensi *Stunting* Kabupaten Sleman Berdasarkan Pemantauan Status Gizi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat Tahun 2020-2024

EPPBGM adalah aplikasi berbasis elektronik yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan data gizi individu, terutama balita dan ibu hamil, di tingkat masyarakat seperti posyandu. Oleh karena itu, data yang dihasilkan merupakan data *by name by addres*.

Dengan target pada *sustanaible development goals* (SDG's) adalah menyelesaikan permasalahan *stunting* pada tahun 2025, maka pelaksanaan penyelesaian permasalahan gizi buruk perlu terus ditekankan. Jika ditinjau dari grafik determinan *stunting*, terlihat bahwa tipologi kelompok masyarakat yang berkecenderungan mengalami *stunting* lebih banyak berada pada pokok masalah pengetahuan tentang gizi dan kesehatan kehamilan. Dengan determinan terkait sarana dan prasarana serta pelayanan (air bersih, jamban, imunisasi, dan lain-lain) yang cenderung rendah, maka dapat diasumsikan bahwa pengetahuan tentang gizi serta kepedulian aktif tentang kesehatan belum baik.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 2023

Grafik 2.20. Kondisi Kesehatan Lingkungan Masyarakat Kabupaten Sleman Tahun 2023

Berdasarkan kondisi kesehatan lingkungan masyarakat Kabupaten Sleman diatas terdapat Enam besar yang penting untuk diperhatikan dalam menekan angka *stunting* antara lain perilaku merokok keluarga, jaminan kesehatan nasional (JKN) yang tidak aktif, pemenuhan gizi tidak adekuat, kecukupan energi kronis (KEK) pada kehamilan, berat badan bayi lahir rendah (BBLR) dan kelahiran prematur. Hal ini menjadi masalah yang membutuhkan solusi secara terintegrasi antara masyarakat dan pemerintah.

Kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok harus ditingkatkan secara signifikan. Kampanye pendidikan yang menyeluruh dan tindakan nyata untuk mengurangi akses dan promosi rokok perlu dilakukan guna menekan perilaku merokok keluarga yang sangat tinggi.

Perilaku merokok keluarga yang sangat tinggi, ini sangat membutuhkan kesadaran masyarakat untuk menghindari perilaku merokok. Pendidikan dan pola asuh dalam keluarga serta kesepakatan serta ketaatan keluarga penting untuk ditumbuhkan dan ditingkatkan. Kesadaran masyarakat untuk mengurus dan mengajukan pengaktifan JKN, serta diimbangi dengan pelayanan administrasi yang responsif dan efisien. Menekan KEK pada kehamilan, BBLR dan prematur.

Hal penting yang kurang mendapat perhatian cukup dalam keluarga adalah pengetahuan tentang gizi. Sosialisasi tentang gizi yang lengkap kurang diberikan dalam pendidikan keluarga, masyarakat maupun pendidikan formal. Hal ini menjadikan penerapan gizi yang memenuhi kesehatan kurang dapat diterapkan di dalam masyarakat.

Pengetahuan gizi yang kurang memadai, menjadikan mudah untuk mengonsumsi makanan cepat saji yang secara umum hanya ada karbohidrat dan protein, tidak dilengkapi sayur-mayur, buah dan susu. Jika hal ini membudaya di kalangan anak-anak, maka akan tumbuh dewasa dengan pola makan yang salah. Jika hal ini berlangsung terus-menerus, maka ketika memasuki kehidupan berumah tangga, akan berisiko melahirkan anak yang *stunting*.

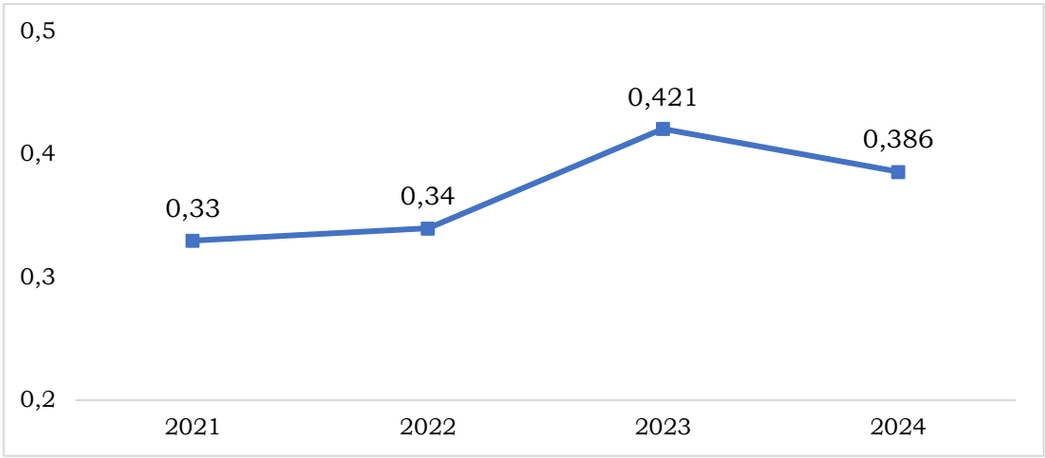
Masalah *stunting* merupakan masalah yang terjadi akibat proses panjang dengan banyak faktor yang terkait. Kondisi kesehatan orang tua dan pemenuhan gizi orang tua jauh sebelumnya perlu dipersiapkan, agar tidak berisiko melahirkan bayi yang *stunting*. Di samping itu pola makan, pola dan gaya hidup dalam rumah tangga juga perlu diperhatikan. Upaya menjauhkan diri dari berbagai faktor atau determinan *stunting* ini perlu dilakukan secara serius.

2.1.2.2.4 Indeks Pembangunan Olahraga

Dalam rangka mewujudkan bangsa yang berdaya saing guna mencapai masyarakat yang lebih makmur, sejahtera, dan berkualitas, keberadaan generasi muda yang tangguh, berbobot, dan sehat menjadi sangat penting. Pepatah terkenal "*mens sana in corpore sano*," yang berarti "di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat," menggambarkan betapa pentingnya kesehatan fisik bagi kesejahteraan mental dan emosional. Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) merupakan indikator kinerja baru yang dihitung mulai tahun 2021. Nilai IPO dalam 5 (lima) tahun terakhir terus menunjukkan tren yang positif, meskipun terjadi penurunan indeks menjadi 0,386 pada tahun 2024.

Namun nilai yang dicapai dalam pembangunan olahraga ini masih tergolong rendah. Untuk itu ke depan peningkatan pembinaan dan upaya motivasi untuk

pemuda terlibat dalam pengembangan olahraga baik untuk kepentingan kesehatan maupun prestasi perlu ditingkatkan. Dalam rangka meningkatkan pengembangan olahraga ini diperlukan dukungan realisasi IPO secara utuh menyeluruh.



Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, 2024

Grafik 2.21. Indeks Pembangunan Olahraga Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024

Komponen perhitungan IPO di Kabupaten Sleman menggunakan 9 dimensi, yaitu sumber daya manusia olahraga, ruang terbuka olahraga, literasi fisik, kebugaran, partisipasi, kesehatan, perkembangan personal, ekonomi dan performa. Komponen terendah dalam pembangunan olahraga di Kabupaten Sleman adalah kebugaran dan performa.

Tabel 2.34. Indeks Pembangunan Olahraga Menurut Dimensi Tahun 2021-2024

No	Dimensi	2021	2022	2023	2024
1	Sumber daya manusia olahraga	0,124	0,187	0,238	0,274
2	Ruang terbuka	0,084	0,382	0,494	0,481
3	Literasi fisik	0,497	0,553	0,722	0,722
4	Kebugaran	0,154	0,134	0,159	0,157
5	Partisipasi	0,253	0,160	0,377	0,342
6	Kesehatan	0,418	0,417	0,542	0,552
7	Perkembangan personal	0,526	0,516	0,531	0,518
8	Ekonomi	0,507	0,395	0,344	0,286
9	Performa	0,413	0,347	0,347	0,181
	Indeks Pembangunan Olahraga	**0,331**	**0,343**	**0,421**	**0,386**

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, 2024

Salah satu dimensi pendukung pembangunan olahraga yang juga sangat penting adalah ruang terbuka olahraga. Ruang terbuka olahraga adalah suatu tempat yang digunakan untuk melakukan aktivitas olahraga baik *indoor* maupun *outdoor*. Penghitungan dimensi ruang terbuka berupa rasio antara ketersediaan ruang terbuka (m^2) dengan jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas di wilayah tersebut.

Pada tahun 2021, IPO hanya dihitung di tingkat kabupaten dan mulai tahun 2022 dihitung sampai ke tingkat kapanewon. Kondisi pembangunan olahraga di

setiap kapanewon rata-rata capaiannya hampir setara dan secara keseluruhan meningkat. Capaian IPO tertinggi pada tahun 2022 diraih oleh Kapanewon Depok dan Sleman, sedangkan capaian IPO terendah diraih oleh Kapanewon Seyegan. Pada tahun 2024 Kapanewon Pakem meraih nilai IPO tertinggi dan Kapanewon Prambanan mendapatkan nilai terendah. Dari sisi pertumbuhan peningkatan nilai IPO, hanya Kapanewon Depok dan Ngemplak yang indeksnya meningkat, sementara Kapanewon lainnya mengalami penurunan.

Tabel 2.35. Indeks Pembangunan Olahraga per Kapanewon Tahun 2022-2024

No	Kapanewon	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Kapanewon Moyudan	0,280	0,373	0,349
2	Kapanewon Minggir	0,279	0,415	0,388
3	Kapanewon Seyegan	0,251	0,404	0,373
4	Kapanewon Godean	0,370	0,484	0,384
5	Kapanewon Gamping	0,312	0,408	0,376
6	Kapanewon Mlati	0,375	0,421	0,375
7	Kapanewon Depok	0,406	0,440	0,442
8	Kapanewon Berbah	0,348	0,375	0,314
9	Kapanewon Prambanan	0,354	0,376	0,332
10	Kapanewon Kalasan	0,345	0,407	0,405
11	Kapanewon Ngemplak	0,310	0,366	0,371
12	Kapanewon Ngaglik	0,351	0,397	0,378
13	Kapanewon Sleman	0,406	0,505	0,416
14	Kapanewon Tempel	0,338	0,457	0,422
15	Kapanewon Turi	0,306	0,363	0,334
16	Kapanewon Pakem	0,403	0,472	0,466
17	Kapanewon Cangkringan	0,404	0,494	0,437
	Kabupaten Sleman	**0,343**	**0,421**	**0,386**

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, 2024

Berdasarkan data dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, ada beberapa cabang olahraga yang belum terdapat fasilitas sarana dan prasarana olahraganya di tahun 2024 yaitu balap sepeda, pencak silat, karate, taekwondo, wushu, voli pasir, judo, gulat, dan gym. Ruang terbuka *indoor* dan *outdoor* diperlukan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan fisik. Oleh karena itu, ruang terbuka seharusnya mudah diakses oleh seluruh kalangan masyarakat sehingga akan mendorong partisipasi masyarakat untuk berolahraga

Tabel 2.36. Data Sarana dan Prasarana Olahraga di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

No	Cabang Olahraga	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Bola voli	459	459	560	568	551
2	Bulu tangkis	258	273	298	334	326
3	Bola basket	115	114	120	145	138
4	Sepak bola	148	144	142	149	153
5	Renang	34	33	39	53	48
6	Sepak takraw	15	15	16	19	21

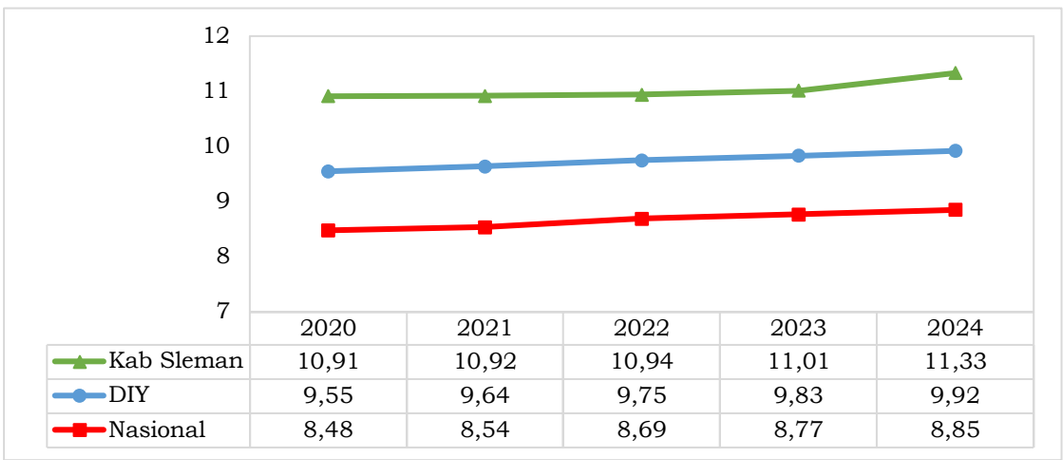
No	Cabang Olahraga	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
7	Tenis meja	129	133	150	142	118
8	Lapangan tenis	48	48	56	73	64
9	Balap sepeda	1	1	1	-	-
10	Atletik	22	22	19	21	20
11	Pencak silat	6	6	5	-	-
12	Karate	2	4	1	-	-
13	Taekwondo	18	14	13	-	-
14	Wushu	-	-	1	-	-
15	Panahan	8	8	12	11	11
16	Futsal	85	83	88	96	93
17	Voli pasir	-	-	-	-	-
18	Judo	-	-	-	-	-
19	Gulat	-	-	-	-	-
20	*Golf*	-	-	-	1	1
21	Tinju	-	-	1	2	2
22	*Gym*	-	-	4	-	-
23	Beladiri	-	-	-	22	23
24	Senam	-	-	-	11	11
25	Panjat tebing	-	-	-	3	3
26	Biliar	-	-	-	2	1
27	Catur	-	-	-	1	1
28	Sirkuit	-	-	-	2	2
29	*Skateboard*	-	-	-	1	1
30	*Woodball*	-	-	-	1	1

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, 2024

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

2.1.2.3.1 Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah statistik yang mengukur jumlah tahun sekolah yang dihabiskan oleh individu dalam masyarakat. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah, semakin tinggi tingkat pendidikan rata-rata dalam populasi, yang biasanya dikaitkan dengan kemajuan sosial, ekonomi, dan pembangunan manusia yang lebih tinggi.

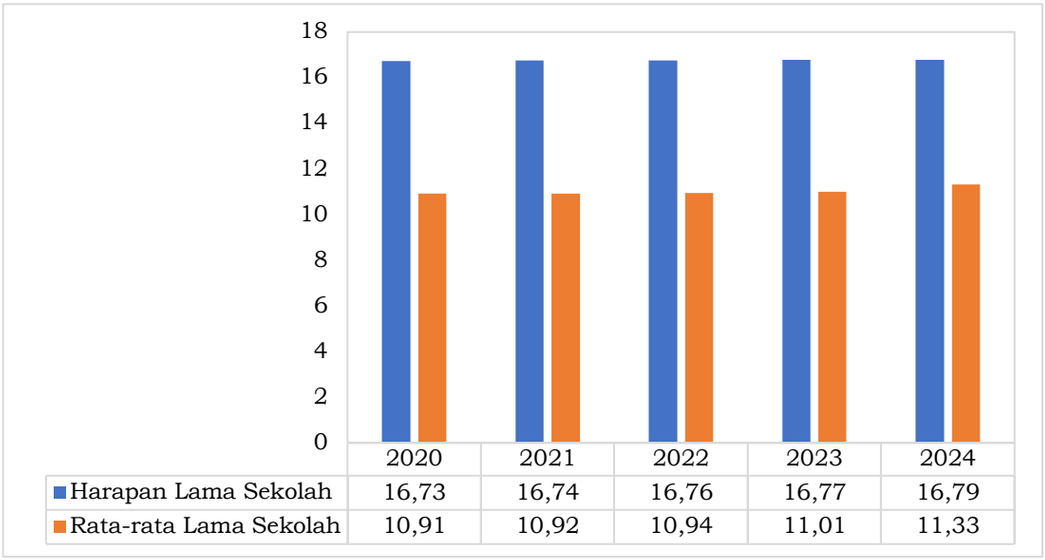


	2020	2021	2022	2023	2024
Kab Sleman	10,91	10,92	10,94	11,01	11,33
DIY	9,55	9,64	9,75	9,83	9,92
Nasional	8,48	8,54	8,69	8,77	8,85

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sleman, DIY dan Nasional, 2021-2025

Grafik 2.22. Rata–Rata Lama Sekolah Kabupaten Sleman, DIY, dan Nasional Tahun 2020-2024

Berdasarkan grafik di atas rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sleman selama lima tahun terakhir (2020-2024) terus meningkat. Pada tahun 2024, harapan lama sekolah di Kabupaten Sleman mencapai 16,79 tahun atau setara dengan diploma 4 atau sarjana. Harapan lama sekolah ini merupakan perkiraan berapa lama seseorang diharapkan akan bersekolah. Meskipun demikian, angka ini perlu terus ditingkatkan melalui peningkatan aksesibilitas pendidikan, kualitas pengajar/guru, pemberian bantuan dana pendidikan, hingga kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan untuk investasi di masa depan. Adapun rata-rata lama sekolah adalah kondisi riil tingkat pendidikan masyarakat.



	2020	2021	2022	2023	2024
Harapan Lama Sekolah	16,73	16,74	16,76	16,77	16,79
Rata-rata Lama Sekolah	10,91	10,92	10,94	11,01	11,33

Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2025

Grafik 2.23. Gap Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

Rata-rata lama sekolah pada tahun 2024 telah mencapai 11,33 tahun menggambarkan bahwa penduduk Kabupaten Sleman umur 25 tahun ke atas memiliki tingkat pendidikan rata-rata setara dengan kelas 11 SMA, meningkat 0,32 dibanding tahun 2023 yang mencapai 11,01 tahun. Apabila dibandingkan dengan RLS di tingkat DIY dan Nasional, RLS Kabupaten Sleman relatif lebih tinggi. Pada tahun 2024, RLS Nasional sebesar 8,85 tahun dan RLS DIY sebesar 9,92 tahun. Kondisi ini mencerminkan bahwa Kabupaten Sleman memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi, terutama jika dibandingkan dengan tingkat RLS DIY dan Nasional. Peningkatan ini mencerminkan adanya komitmen yang tinggi dan investasi dalam bidang pendidikan di Kabupaten Sleman serta potensi sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam jangka panjang.

2.1.2.3.2 Harapan Lama Sekolah

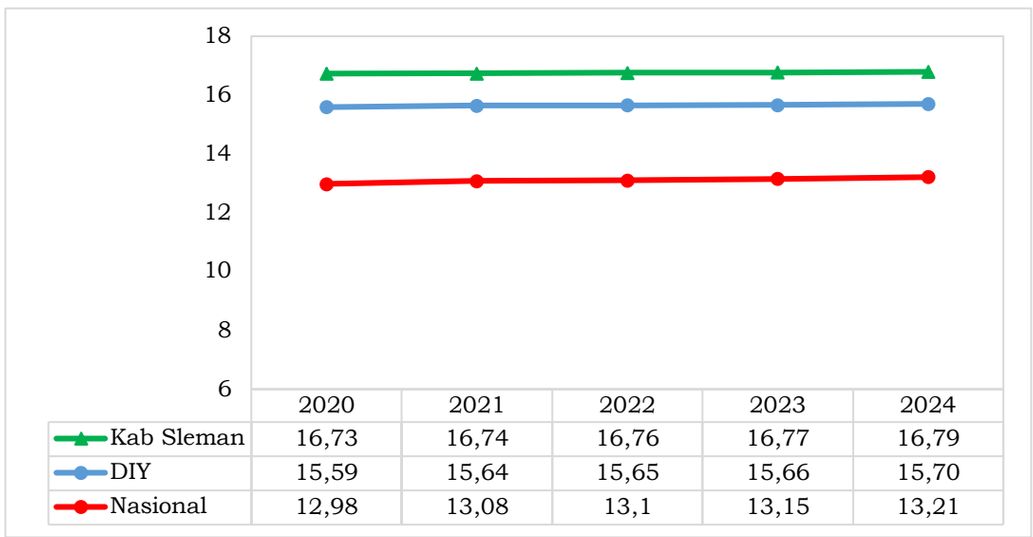
Harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu dimasa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk dalam bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 (tujuh) tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

HLS di Kabupaten Sleman lima tahun terakhir (2020-2024) cenderung menunjukkan tren yang positif. Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari data ini diketahui bahwa kesadaran untuk melanjutkan pada pendidikan di jenjang perguruan tinggi sudah tumbuh di masyarakat.

Selama lima tahun terakhir (2020-2024) HLS Kabupaten Sleman telah mencapai 16 (enam belas) tahun artinya anak usia 7 (tujuh) tahun di Kabupaten Sleman memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 16 (enam belas) tahun atau setara dengan lamanya waktu menamatkan pendidikan hingga setingkat sarjana. HLS Kabupaten Sleman selama lima tahun terakhir lebih tinggi dari rata-rata Nasional maupun DIY. HLS Kabupaten Sleman dari tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan walau tidak cukup signifikan, karena angka yang dicapai juga sudah lumayan tinggi. Data terakhir tahun 2024 HLS Kabupaten Sleman mencapai angka 16,79 tahun. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata nasional yaitu 13,21 tahun maupun rata-rata DIY, yaitu 15,70 tahun.

Peningkatan harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Sleman didorong oleh meningkatnya angka partisipasi sekolah terutama pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Hal ini sangat terkait dengan ketersediaan infrastruktur pendidikan tingkat menengah dan tinggi yang cukup representatif, berkualitas dan mudah diakses. Peningkatan partisipasi sekolah pada tingkat menengah dan tinggi juga dipengaruhi level kesejahteraan penduduk Kabupaten Sleman yang semakin meningkat.



	2020	2021	2022	2023	2024
Kab Sleman	16,73	16,74	16,76	16,77	16,79
DIY	15,59	15,64	15,65	15,66	15,70
Nasional	12,98	13,08	13,1	13,15	13,21

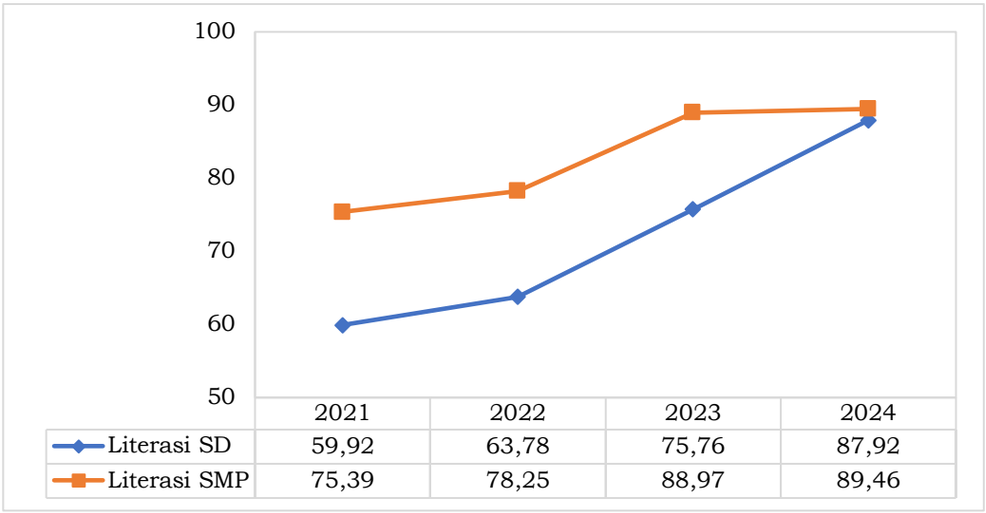
Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sleman, DIY dan Nasional, 2021-2025

Grafik 2.24. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sleman, DIY dan Nasional Tahun 2020-2024

2.1.2.3.3 Angka Literasi/Numerasi

Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi merupakan indikator yang penting dalam menilai kualitas pendidikan suatu daerah. Kemampuan literasi mencakup kemampuan membaca, menulis dan memahami teks. Sementara kemampuan numerasi mencakup kemampuan dalam matematika dan pemahaman angka. Kemampuan literasi dan numerasi yang tinggi menunjukkan bahwa pendidikan di suatu daerah telah memberikan landasan yang kuat bagi kemampuan dasar individu yang berfungsi secara efektif dalam masyarakat modern yang memerlukan kemampuan literasi dan numerasi yang

baik. Rata-rata kemampuan literasi sekolah dasar (SD) di Kabupaten Sleman tahun 2021-2024 terus mengalami peningkatan. Begitu pula rata-rata kemampuan literasi SMP di Kabupaten tahun 2021-2024 juga menunjukkan tren yang positif.

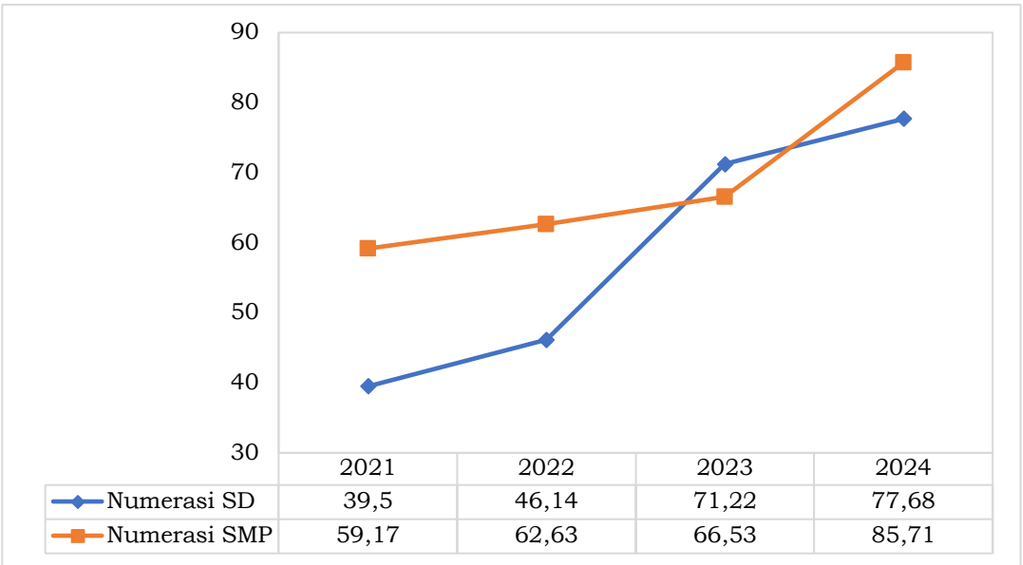


	2021	2022	2023	2024
Literasi SD	59,92	63,78	75,76	87,92
Literasi SMP	75,39	78,25	88,97	89,46

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, 2025

Grafik 2.25. Rata-Rata Kemampuan Literasi Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024

Rata-rata kemampuan literasi SMP Kabupaten Sleman lebih tinggi daripada rata-rata kemampuan literasi SD. Hal yang sama juga terlihat pada rata-rata kemampuan numerasi.



	2021	2022	2023	2024
Numerasi SD	39,5	46,14	71,22	77,68
Numerasi SMP	59,17	62,63	66,53	85,71

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, 2025

Grafik 2.26. Rata-Rata Kemampuan Numerasi Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024

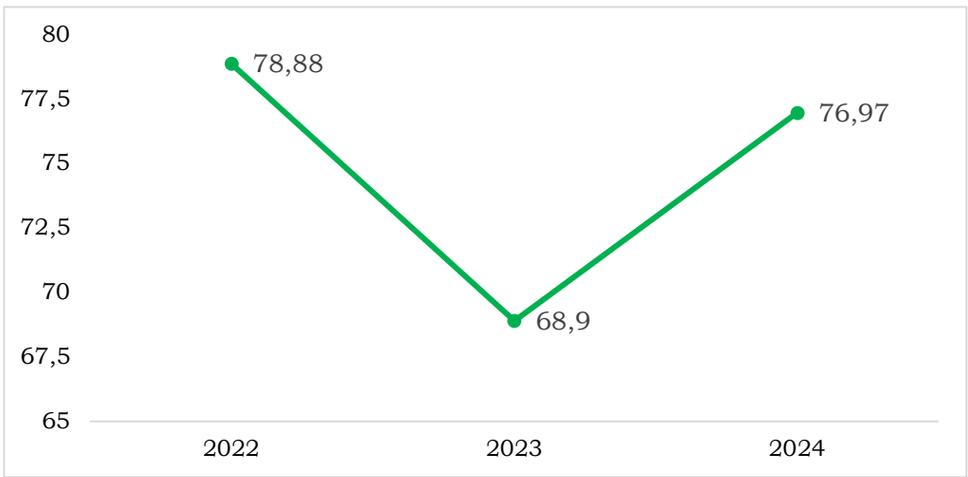
2.1.2.3.4 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Pembangunan literasi masyarakat adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi individu dalam suatu komunitas. Literasi di sini tidak hanya mencakup kemampuan dasar membaca dan menulis, tetapi juga literasi digital, finansial, informasi, lingkungan, dan lain-lain yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Pembangunan literasi bertujuan untuk memberdayakan individu sehingga mereka dapat berpartisipasi

secara aktif dan efektif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Pembangunan literasi masyarakat memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia. Daya saing individu sangat erat kaitannya dengan pembentukan kualitas sumber daya manusia, tingkat pengetahuan, serta keterampilan yang terakumulasi dalam proses pembelajaran. Pendidikan dan literasi adalah bagian dari pembangunan manusia yang dapat membuka jalan untuk memutus mata rantai kemiskinan di masyarakat.

Tingkat pembangunan literasi masyarakat di Kabupaten Sleman dapat dilihat dari capaian indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). IPLM dinilai melalui pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat/hari, jumlah perpustakaan yang dibina sesuai standar nasional perpustakaan (SNP), keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, serta anggota perpustakaan.

Berdasarkan kajian IPLM tahun 2024 mencapai 76,97 dengan capaian komponen terendah terdapat pada ketercukupan koleksi perpustakaan dan tingkat kunjungan masyarakat per hari. Meskipun meningkat dari tahun 2023, namun angka ini tidak begitu baik untuk Kabupaten Sleman yang berada di dekat pusat kota pendidikan. Oleh karena itu diperlukan evaluasi atau peningkatan pada unsur pembangunan literasi masyarakat di Kabupaten Sleman.



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sleman, 2024

Grafik 2.27. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Sleman Tahun 2022-2024

Berdasarkan data pada tabel di bawah, indeks pembangunan literasi masyarakat Kabupaten Sleman tahun 2022-2023 termasuk lebih rendah dibandingkan daerah lain di DIY. Apabila dilihat komponen Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM), terdapat tiga unsur yang menjadi kontribusi terendah dalam IPLM Kabupaten Sleman tahun 2023 yaitu UPLM 1 (pemerataan layanan perpustakaan), UPLM 2 (ketercukupan koleksi perpustakaan), dan UPLM 4 (tingkat kunjungan masyarakat per hari). Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM 1) adalah upaya untuk menyediakan akses yang adil, merata, dan inklusif terhadap layanan perpustakaan bagi seluruh anggota masyarakat yang mencakup aspek: akses fisik, ketersediaan materi, program dan layanan, dan keterlibatan komunitas. Rasio ketersediaan perpustakaan umum masih sangat rendah dibandingkan dengan perpustakaan

sekolah dan perguruan tinggi yaitu dengan perbandingan terdapat 8 perpustakaan per 100.000 penduduk.

Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (UPLM 2) adalah kondisi dimana sebuah perpustakaan memiliki jumlah dan variasi materi yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pengguna perpustakaan. Hal ini mencakup berbagai jenis sumber daya informasi seperti buku cetak, *e-book*, jurnal, majalah. Koleksi perpustakaan Kabupaten Sleman belum mencukupi atau memenuhi kebutuhan penduduk Kabupaten Sleman dengan perbandingan 1 (satu) koleksi diakses 4 (empat) penduduk sehingga perlu adanya tambahan koleksi sebanyak 1.998.957 judul.

Tingkat Kunjungan Masyarakat Per Hari (UPLM 4) adalah Pengunjung Perpustakaan merujuk kepada individu atau kelompok yang menggunakan fasilitas perpustakaan untuk mengakses sumber daya informasi dan layanan yang disediakan. Adapun pengguna Pustaka meliputi; siswa, mahasiswa, akademisi, peneliti, profesional, masyarakat umum, dan kelompok khusus seperti anak-anak, remaja, atau lanjut usia. Jumlah kunjungan hanya 0,01% dari jumlah penduduk Kabupaten Sleman sebanyak 1.147.562 sehingga perlu adanya peningkatan jumlah kunjungan 22.789 per hari, maka perlu adanya inovasi dan kreativitas untuk mendorong masyarakat agar mau berkunjung ke perpustakaan untuk membaca buku atau mengakses dan membaca *e-book* yang disediakan.

2.1.2.3.5 Indeks Literasi Digital

Literasi digital adalah fondasi penting untuk membangun SDM yang unggul, siap bersaing di pasar global, dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi dan dinamika sosial. Literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat dan meng-komunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan kognitif, etika, sosial emosional, dan aspek teknis teknologi.

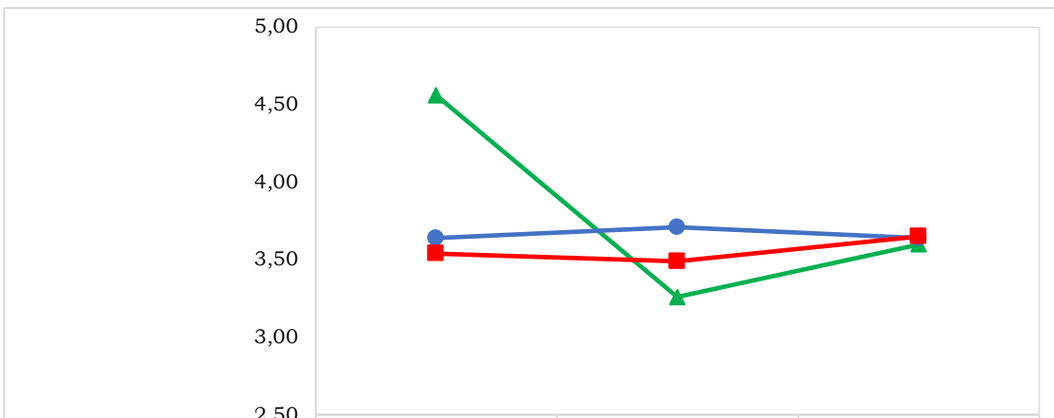
Hal ini termasuk kompetensi-kompetensi yang mengarah pada literasi komputer, literasi *information and communication technology* (ICT), literasi informasi dan literasi media. Selanjutnya kemampuan digital (*digital skills*) diartikan sebagai kombinasi dari perilaku, kecakapan, pengetahuan, kebiasaan kerja, karakter, watak, dan pemahaman kritis atas teknologi digital yang terbagi ke dalam spektrum mulai dari kemampuan dasar sampai tinggi. Kemampuan ini yang kemudian dijabarkan ke dalam pilar-pilar pendukung literasi digital. Ada empat pilar yang menjadi bagian dari kerangka kerja pengembangan kurikulum literasi digital, yaitu:

1. *Digital skills* atau kecakapan digital adalah kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari.
2. *Digital ethics* atau etika digital adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital (*netiquette*) dalam kehidupan sehari-hari.
3. *Digital safety* atau keamanan digital adalah kemampuan *user* (pengguna) dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang dan meningkatkan kesadaran pelindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari.

4. *Digital culture* atau budaya digital adalah kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK.

Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman, terlihat bahwa Indeks Literasi Digital Kabupaten Sleman fluktuatif. Tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan dan tahun 2023 mengalami peningkatan, namun angka yang dicapai tetap lebih rendah daripada tahun 2021. Tingginya keseluruhan Indeks Literasi Digital pada tahun 2021 dikarenakan bergesernya beberapa indikator untuk masing-masing pilar (*digital skills, digital ethics, digital safety, dan digital culture*) untuk tahun 2022. Lebih dari itu, dikarenakan *skala likert* pada tahun 2021 adalah 1-4 maka terdapat standarisasi menggunakan skala 1-5 agar bisa dibandingkan dengan Indeks Literasi Digital tahun 2022 dan 2023 dimana menggunakan skala likert 1-5.

Oleh karena itu, nilai keseluruhan Indeks Literasi Digital pada tahun 2023 terlihat lebih rendah dibandingkan dengan nilai indeks tahun 2021. Sementara itu apabila dibandingkan dengan DIY dan Nasional, Indeks Literasi Digital Kabupaten Sleman tahun 2023 lebih rendah dari DIY dan Nasional, walaupun deviasinya sangat kecil sekali sehingga bisa dikatakan hampir sama. Secara umum Indeks Literasi Digital Kabupaten Sleman tahun 2023 telah masuk kategori cukup baik dengan angka indeks 3,6. Hal ini menunjukkan perlunya pendidikan dan kesadaran yang lebih baik dalam memahami dan mengelola literasi digital di masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Sleman.



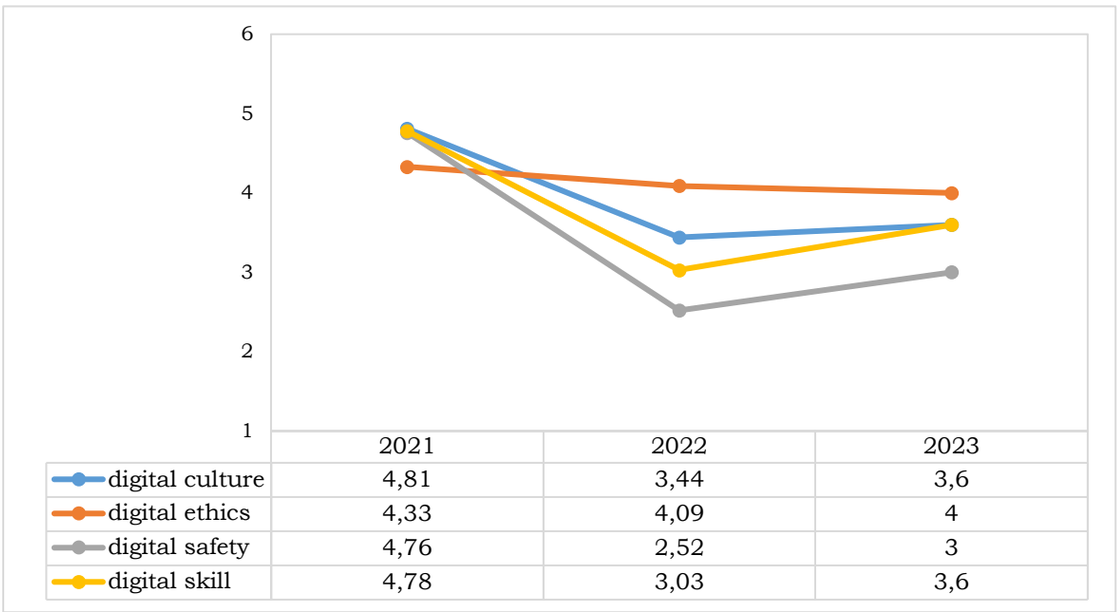
	2021	2022	2023
Kabupaten Sleman	4,56	3,26	3,60
DIY	3,64	3,71	3,64
Nasional	3,54	3,49	3,65

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sleman, 2024

Grafik 2.28. Indeks Literasi Digital Kabupaten Sleman, DIY dan Nasional Tahun 2021-2023

Apabila dilihat dari capaian komponen pilar literasi digital, pilar *digital safety* terletak pada nilai yang terendah. Artinya secara umum kesadaran masyarakat Kabupaten Sleman akan perlindungan data pribadi masih tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan dengan perilaku masyarakat yang masih mencantumkan nomor *handphone* pribadi dan tanggal lahir. Keamanan teknis seperti mengenali virus belum banyak dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Sleman seperti menggunakan aplikasi maupun *software* untuk menemukan dan menghapus virus dan membedakan email berisi *spam* atau virus. Rendahnya *digital safety*

lebih banyak dialami oleh ibu rumah tangga. Pemerintah daerah perlu memberikan pembinaan bagi kelompok ini khususnya terkait keamanan digital (*digital safety*).



	2021	2022	2023
digital culture	4,81	3,44	3,6
digital ethics	4,33	4,09	4
digital safety	4,76	2,52	3
digital skill	4,78	3,03	3,6

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman, 2024

Grafik 2.29. Indeks Pilar Literasi Digital di Kabupaten Sleman Tahun 2021-2023

Sebaliknya pilar *digital ethics* menduduki nilai tertinggi di Kabupaten Sleman. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Sleman memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya etika dalam penggunaan teknologi digital. Ini mencakup pemahaman tentang privasi, keamanan data, dan perilaku yang bertanggung jawab di dunia digital. Masyarakat Sleman cenderung menggunakan teknologi digital dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Mereka lebih berhati-hati dalam berbagi informasi pribadi dan lebih sadar akan dampak perilaku mereka terhadap orang lain di dunia maya. Di samping itu masyarakat Sleman juga menyadari bahwa mengajak orang-orang untuk berkomentar negatif adalah kegiatan yang kurang baik secara etika digital.

Sementara itu terkait *digital skills* dan *culture* sudah cukup baik di angka 3,6. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat Kabupaten Sleman telah terbiasa mencari informasi melalui digital baik di *situs web* maupun media *online* lainnya. Bahkan telah menyadari apakah informasi yang ditemukan tersebut benar atau salah termasuk berita hoaks.

Hasil analisis indeks kualitas digital per wilayah kapanewon, menunjukkan bahwa masing-masing kapanewon sangat variatif untuk kemampuan digitalnya baik kecakapan digital, etika digital, keamanan digital maupun budaya digital. Kapanewon dengan indeks *digital skills* terendah berada pada Kapanewon Prambanan, Godean dan Minggir. Kapanewon dengan indeks *digital safety* terendah berada pada Kapanewon Seyegan, Minggir dan Godean. Kapanewon dengan indeks *digital ethics* terendah berada pada Kapanewon Prambanan, Pakem dan Berbah. Adapun kapanewon dengan indeks *digital culture* terendah berada pada Kapanewon Sleman, Pakem dan Cangkringan. Untuk masing-masing kapanewon dengan nilai terendah tersebut perlu dilakukan perhatian secara intens agar nilai indeks meningkat.

Tabel 2.37. Indeks Literasi Digital Berdasar Pilar Literasi Digital per Kapanewon Tahun 2023

Kapanewon	*Digital Skill*	*Digital Safety*	*Digital Ethics*	*Digital Culture*
Berbah	3,5156	3,1797	3,4554	3,6964
Cangkringan	3,6	2,8469	3,9536	3,3321
Depok	4,183	3,2946	4,6582	3,8367
Gamping	3,7906	2,9406	4,325	3,5286
Godean	3,2462	2,7159	4,1342	3,9264
Kalasan	3,843	3,1337	4,0233	3,9502
Minggir	3,2647	2,6912	3,9412	3,8655
Mlati	3,375	2,8798	3,9918	3,6648
Moyudan	3,335	3,055	3,8743	3,8971
Ngaglik	3,3646	2,9813	4,1238	3,8024
Ngemplak	3,6528	2,9917	4,054	3,9079
Pakem	3,75	3,3796	3,3757	3,2434
Prambanan	3,1319	2,8299	3,254	3,4722
Seyegan	3,3008	2,5195	3,9286	3,5312
Sleman	3,5978	2,9728	4,028	2,4565
Tempel	3,6926	3,3851	3,9614	3,9807
Turi	3,4866	3,3125	3,8418	3,8214

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sleman, 2023

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial adaptif diartikan sebagai sistem perlindungan sosial yang responsif dan fleksibel dalam merespons perubahan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Jenis perlindungan sosial adaptif ini mencakup program bantuan sosial yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat; program asuransi sosial yang memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap risiko sosial dan ekonomi; serta program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kesempatan kerja. Data perlindungan sosial adaptif dimaksud telah dibahas dalam subbab kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT).

Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja, tren positif terlihat dalam hal perlindungan sosial (peserta program jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek). Persentase pekerja yang mengikuti jamsostek mengalami peningkatan positif selama lima tahun terakhir dimulai pada angka 54,94% pada tahun 2020 sampai mencapai 90,30% pada tahun 2023 namun angka turun menjadi 86,60% pada tahun 2024.

Tabel 2.38. Cakupan Kepesertaan Jamsostek di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (%)

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	54,94	80,13	86,60	90,30	86,60

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Sleman, 2025

Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan perlindungan bagi pekerja. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merupakan salah satu fasilitas bagi tenaga kerja untuk melindunginya dari beberapa risiko yang mungkin terjadi selama bekerja di sebuah perusahaan. Dengan diikutkan dalam BPJS Ketenagakerjaan tenaga kerja akan mendapatkan jaminan kecelakaan kerja (JKK) yang menanggung biaya perawatan dan santunan, jaminan kematian (JKM) yang memberikan santunan uang tunai dan biaya pemakaman, serta beasiswa pendidikan bagi anak peserta. Selain itu, ada juga jaminan hari tua (JHT) untuk persiapan masa pensiun dan jaminan pensiun (JP) serta jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang memberikan bantuan uang tunai, informasi pasar kerja, dan pelatihan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan. Begitu besarnya manfaat bagi pekerja menjadikan hal ini merupakan salah satu hal penting yang perlu mendapat perhatian dalam pemenuhannya. Dengan perlindungan sosial yang lebih baik, peserta dapat meningkatkan kesejahteraannya dan merasa lebih aman dalam bekerja.

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

2.1.2.5.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks kerukunan umat beragama merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat harmoni dan kualitas hubungan antar umat beragama dalam suatu wilayah. Berdasarkan data yang tertera, Indeks kerukunan umat beragama di Kabupaten Sleman menunjukkan tren peningkatan yang positif dan konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, nilai indeks tercatat sebesar 75,2, yang termasuk dalam kategori "tinggi". Selanjutnya, indeks terus mengalami kenaikan, mencapai 80,3 dengan kategori “sangat tinggi” pada tahun 2024. Peningkatan indeks ini mengindikasikan adanya pemeliharaan dan penguatan nilai-nilai toleransi, saling pengertian, dan kerja sama antar umat beragama di Kabupaten Sleman. Hal ini mencerminkan suasana kehidupan sosial yang kondusif dan harmonis, dimana berbagai kelompok agama dapat hidup berdampingan secara damai.

Tabel 2.39. Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

Tahun	Indeks KUB	Kategori
2020	75,2	Tinggi
2021	76,8	Tinggi
2022	78,1	Tinggi
2023	79,5	Tinggi
2024	80,3	Sangat Tinggi

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Sleman juga memberikan 6 (enam) rekomendasi mendirikan tempat ibadat dan rumah ibadat yaitu GBI Keluarga Allah di Jalan Kabupaten (Nogotirto), Gereja Katolik Paroki Santo Yoseph Medari, GBI Miracle Service Kalasan, GBI Keluarga Allah jalan Solo Kalasan, Masjid Mamba’ul Ulum Gancahan, dan Masjid Al Fath Sidomoyo Godean. Sampai dengan tahun 2024 sudah ada 4.237 tempat ibadah yang telah berizin, dengan bertambahnya 4 (empat) tempat ibadah, yaitu Masjid Al-Anshar, Masjid Ummu Dani Salamah, dan Gereja St. Yohanes Berchmans. Ragam kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya kerukunan umat beragama yaitu *focus group discussion* (FGD) ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan aliran kepercayaan, seminar forum kerukunan umat beragama, sosialisasi forum kerukunan umat beragama (FKUB), monitoring dan evaluasi wali kerukunan,

pemantauan tempat ibadah, verifikasi rumah ibadah dan kemah forum pemuda lintas agama.

2.1.2.5.2 Pelestarian Warisan Budaya (Pendekatan Indeks Pembangunan Kebudayaan)

Indeks pembangunan kebudayaan menjadi salah satu instrumen dalam menggambarkan kemajuan pembangunan kebudayaan. Namun, sementara ini baru diukur pada level provinsi, sehingga data kabupaten belum tersedia. Adapun Kabupaten Sleman menggunakan pendekatan data pelestarian warisan budaya untuk memberikan gambaran pembangunan kebudayaan ini.

Pembangunan bidang kebudayaan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini berhubungan erat dengan upaya untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Sleman yang memiliki akhlak mulia, moral yang baik, etika, budaya, berbudi luhur dan peradaban yang tinggi. Kabupaten Sleman, dengan 17 kapanewon dan 86 kalurahan, memiliki kekayaan budaya dan kesenian yang mencerminkan dinamika kehidupan masyarakatnya. Keanekaragaman ini bukan hanya sekadar warisan budaya, tetapi juga merupakan potensi besar yang dapat diberdayakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Sleman.

Warisan budaya adalah benda atau atribut tak berbenda yang merupakan identitas diri dari masyarakat atau kaum, yang diwariskan dari generasi sebelumnya dan dilestarikan oleh generasi yang akan datang. Warisan budaya terdiri dari *merti* desa atau dusun, upacara adat, kelembagaan seni budaya, museum, situs, bangunan, struktur serta monumen. Pelestarian kebudayaan adalah aktivitas melestarikan produk budaya yang diwariskan dari generasi sebelumnya yang dilestarikan oleh generasi yang akan datang. Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

Pemajuan kebudayaan juga terkait dengan upaya pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan budaya, pengelolaan keragaman budaya, pelestarian dan pengembangan peninggalan budaya. Warisan budaya tak benda berupa nilai-nilai, adat istiadat, tradisi budaya dan kesenian yang diwariskan secara turun temurun antar generasi. Nilai-nilai budaya luhur warisan leluhur yang melekat pada aktivitas kehidupan manusia atau obyek pemajuan kebudayaan pada umumnya mengandung nilai-nilai keseimbangan dalam kehidupan, baik itu dalam hubungan manusia dan hubungan manusia dengan alam semester. Nilai-nilai yang membentuk tata nilai budaya Sleman membutuhkan perhatian dalam pelindungan dan pengembangannya karena mempunyai arti penting sebagai kekuatan modal sosial dalam pembangunan daerah. Ada 4 (empat) tata nilai budaya Sleman sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengembangan Tata Nilai Budaya di Kabupaten Sleman, yaitu:

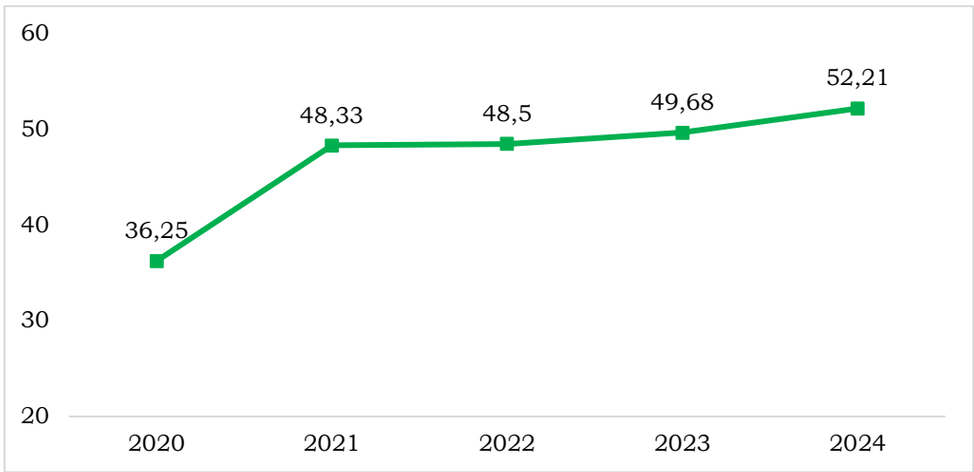
1. Tata nilai ketuhanan adalah keyakinan terhadap kekuasaan Tuhan sehingga manusia melaksanakan perintah dan menjauhi larangan sesuai dengan norma agama yang dianutnya dan diimplementasikan. Tata nilai ketuhanan tersebut antara lain "*narima ing pandum, ngundhuh wohing pakarti, sabar, sumarah lan sumeleh*";
2. Tata nilai kepemimpinan adalah prinsip-prinsip yang dipegang teguh seorang pemimpin dalam rangka visi dan misinya. Tata nilai kepemimpinan

meliputi "*adil, manjing ajur ajer, mrantasi, mumpuni, ngayomi, panutan, prasaja, sembada, setya, tinarbuka, waskitha, welas asih dan wicaksana";*

3. Tata nilai kemasyarakatan adalah pedoman hidup yang diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga terjadi keharmonisan; dan
4. Tata nilai kealaman adalah kualitas yang dimiliki oleh alam yang secara kultural perlu dilestarikan dan dikelola agar memberikan kemanfaatan bagi kehidupan manusia. Tata nilai kealaman yang dimiliki oleh masyarakat Sleman yaitu nilai *merti*. *Merti* atau bersih adalah "*memayu hayuning bawana"* yang artinya menjaga keselamatan atau keindahan alam.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, objek pemajuan kebudayaan meliputi 10 obyek, yang terdiri dari tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Kabupaten Sleman memiliki komitmen yang tinggi dalam pemajuan kebudayaan melalui pelestarian warisan budaya. Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Sleman, selama 5 (lima) tahun terakhir persentase pelestarian warisan budaya di Kabupaten Sleman terus mengalami peningkatan.

Persentase pelestarian warisan budaya Kabupaten Sleman tahun 2024 sebesar 52,21% meningkat 2,53% dari tahun sebelumnya. Angka ini masih tergolong rendah menunjukkan bahwa pelestarian warisan budaya di Kabupaten Sleman belum optimal. Hal ini disebabkan oleh: (1) kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya; (2) belum optimalnya pemanfaatan dan pengembangan warisan budaya dan cagar budaya untuk meningkatkan potensi masyarakat dan kalurahan, (3) belum optimalnya peran lembaga adat, seni, dan budaya di masyarakat sebagai agen pelestari budaya daerah; dan (4) belum meratanya fasilitas dan sarana prasarana dalam pendukung pengembangan seni budaya.



Sumber: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Sleman, 2025

Grafik 2.30. Persentase Pelestarian Warisan Budaya Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (%)

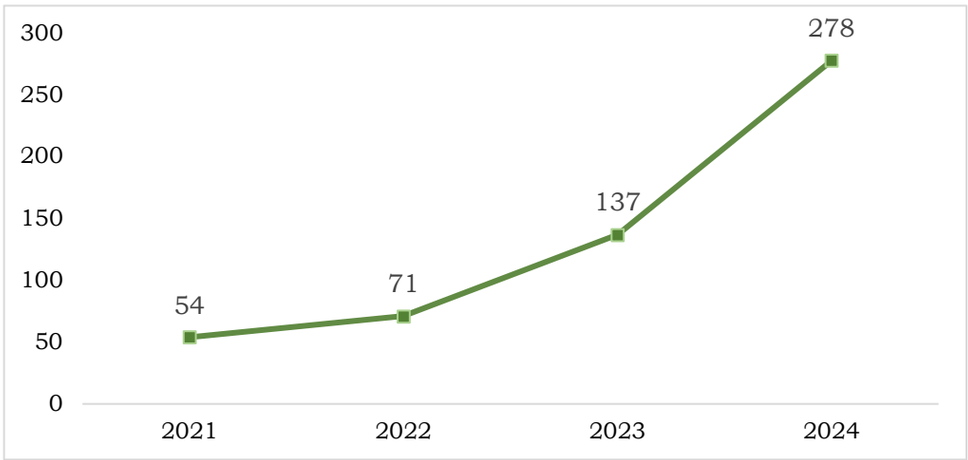
Kinerja pelestarian warisan budaya Kabupaten Sleman memiliki tiga indikator, dimana pada tahun 2024 dua dari indikator memiliki nilai yang sama dengan tahun sebelumnya. Salah satu komponen indikator yang memberikan kontribusi capaian terendah pada pelestarian warisan budaya di Kabupaten Sleman adalah persentase kinerja pelestarian objek pemajuan kebudayaan yang di dalamnya termasuk warisan budaya tak benda berupa nilai-nilai budaya lokal yaitu sebesar 14,95%. Meskipun demikian, indikator ini meningkat dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.40. Kinerja Pelestarian Warisan Budaya Kabupaten Sleman Tahun 2023-2024

No	Indikator	2023	2024
1	Persentase kinerja pelestarian objek pemajuan kebudayaan (%)	7,37	14,95
2	Persentase kinerja pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya (%)	41,67	41,67
3	Persentase kinerja pengelolaan museum (%)	100	100

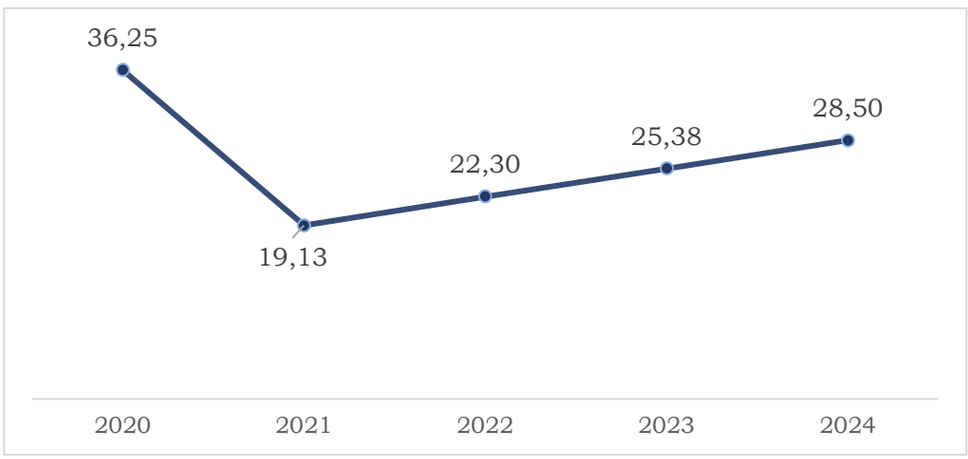
Sumber: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), 2025

Obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilestarikan selama tahun 2021-2024 cenderung terus mengalami peningkatan, bahkan tahun 2024 kenaikannya cukup signifikan yaitu 278 obyek. Namun dari persentase pelestarian persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan masih cukup rendah yaitu 28,5%.



Sumber: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Sleman*, 2025*

Grafik 2.31. Jumlah Pelestarian Rincian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024 (objek)



Sumber: Dinas Kebudayaan (Kundho Kabudayan) Kabupaten Sleman, 2025

Grafik 2.32. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (%)

Pelestarian warisan tak benda dilakukan melalui upacara adat dan tradisi merti dusun atau desa. Upacara adat yang diselenggarakan di wilayah Kabupaten Sleman antara lain bersih desa, nyadran, wiwit, merti kali, pawiyatan jawi (*moco dan nulis jawa, pranoto coro*), dan bergodo. Merti desa, sering disebut juga bersih desa, yang hakikatnya adalah simbol rasa syukur masyarakat kepada Yang Maha Kuasa atas limpahan karunia yang diberikan. Tujuan dilaksanakannya

upacara adat dan tradisi merti dusun atau desa adalah untuk mewariskan nilai-nilai kearifan lokal sebagai karakter jati diri yang mengedepankan toleransi, kegotongroyongan, dan memupuk rasa kebersamaan masyarakat di lingkungan Kabupaten Sleman. Selain merti dusun, upaya mempertahankan nilai-nilai budaya tradisional dan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat adalah dengan membiasakan penggunaan bahasa Jawa dan pakaian adat Jawa dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Dalam lingkungan pemerintah daerah, bahasa Jawa digunakan setiap hari Kamis Pon (Surat Edaran Pemerintah Daerah DIY Nomor 400.5.9.1/40 tentang Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta Tahun 2024). Penggunaan pakaian Jawa tersebut dimaksudkan untuk memperingati peristiwa *Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat* atau Hari Jadi DIY. Hari Jadi DIY ditetapkan dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2024.

Nilai-nilai budaya lokal ini diharapkan dapat masuk dalam kurikulum muatan lokal sekolah sehingga dapat terinternalisasi pada generasi muda sejak dini. Saat ini muatan lokal yang wajib dalam kurikulum sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 64 Tahun 2013 adalah bahasa Jawa. Namun pada implementasinya di sekolah belum semua nilai-nilai budaya lokal Sleman dapat tersampaikan dalam kurikulum muatan lokal tersebut. Pengenalan dan implementasi tata nilai budaya Sleman dalam kehidupan sehari-hari masih harus digalakkan karena penerapan tata nilai budaya Sleman akan membantu membentuk karakter budi luhur pada masyarakat Kabupaten Sleman yang sangat heterogen.

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

2.1.2.6.1 Indeks Perlindungan Anak

Indeks perlindungan anak (IPA) digunakan untuk mengukur jaminan dan perlindungan terhadap anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Indeks perlindungan anak merupakan komposit dari indeks pemenuhan hak anak (IPHA) dan indeks perlindungan khusus anak (IPKA). Pada tahun 2023, indeks perlindungan anak Kabupaten Sleman mencapai 72,97. Data tahun 2024 belum terbit.

Tabel 2.41. Indeks Perlindungan Anak dan Komponen Pembentuknya di Kabupaten Sleman, DIY dan Nasional Tahun 2021-2023

No	Uraian	2021	2022	2023
1	Indeks Perlindungan Anak (IPA)			
	- Kab. Sleman	72,92	73,9	72,97
	- DIY	68,35	71,08	71,48
	- Nasional	61,38	63,3	63,83
2	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)			
	- Kab. Sleman	69,31	70,32	68,96
	- DIY	65,42	67,8	67,72
	- Nasional	58,34	60,33	60,75
3	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)			
	- Kab. Sleman	84,71	85,95	86,66
	- DIY	77,79	82	82,78
	- Nasional	73,59	75,21	75,72

Sumber: Kementerian PPPA, 2022-2024

Tabel berikut menyajikan data persentase anak korban kekerasan yang tertangani serta jumlah kasus anak korban kekerasan yang melapor dalam kurun waktu 2021 hingga 2024.

Tabel 2.42. Kinerja Perlindungan Anak di Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024

No	Uraian	2021	2022	2023	2024
1	Persentase anak korban kekerasan tertangani (%)	100	100	100	100
2	Jumlah kasus anak korban kekerasan yang melapor (kasus)	66	107	146	134

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Sleman, 2025

Persentase anak korban kekerasan yang tertangani oleh pihak berwenang atau lembaga terkait menunjukkan tingkat respons dan penanganan terhadap kasus-kasus kekerasan yang teridentifikasi. Selama periode 2021 hingga 2024, tercatat bahwa 100% kasus anak korban kekerasan yang teridentifikasi telah tertangani. Jumlah kasus anak korban kekerasan yang secara aktif melapor kepada pihak berwenang merefleksikan tingkat kesadaran dan keberanian anak serta keluarga untuk melaporkan kejadian kekerasan yang dialami. Data ini merupakan indikator penting dalam evaluasi dan perencanaan program perlindungan anak di daerah. Informasi yang akurat dan komprehensif terkait tren kasus kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun menjadi landasan krusial dalam merumuskan kebijakan dan intervensi yang efektif.

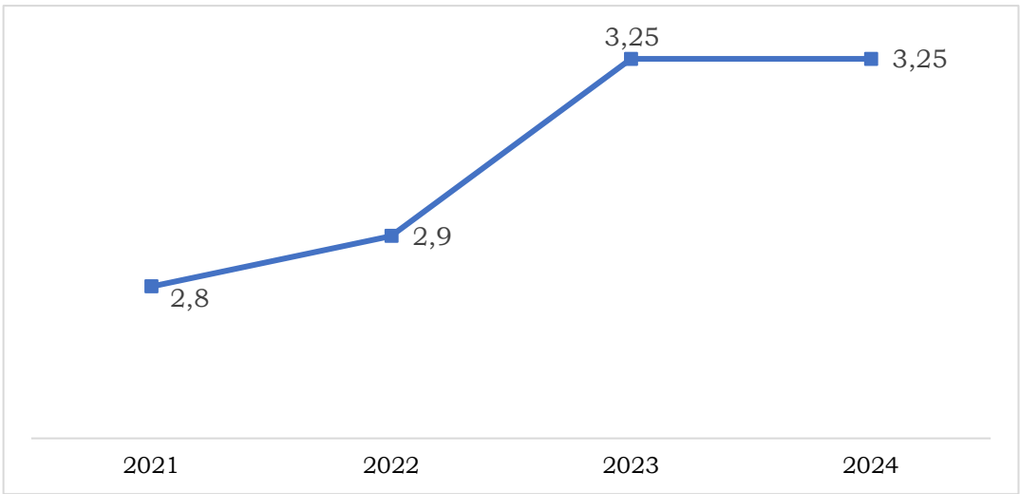
Berdasarkan data yang tersaji, dapat disimpulkan bahwa tingkat penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang teridentifikasi di daerah ini telah mencapai angka yang optimal, yaitu 100%. Namun demikian, tren jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang melapor menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan antara tahun 2021-2023. Hal ini mengindikasikan perlunya analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pelaporan, termasuk potensi peningkatan kesadaran masyarakat dan efektivitas mekanisme pelaporan, serta kemungkinan adanya faktor lain yang menyebabkan penurunan laporan pada tahun 2024. Upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat mekanisme pelaporan yang aman dan mudah diakses, serta memastikan penanganan yang komprehensif terhadap setiap kasus yang dilaporkan menjadi krusial dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak di daerah ini.

2.1.2.6.2 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Ketahanan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan dan kemampuan fisik, materiil, serta psikis untuk hidup mandiri dan harmonis. Ketahanan keluarga merupakan aspek penting dalam pembentukan masyarakat yang kuat dan sejahtera. Keluarga yang tangguh mampu menghadapi berbagai tantangan dan tekanan hidup dengan lebih baik, memberikan dukungan yang diperlukan bagi anggotanya, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan pribadi dan sosial. Keluarga yang tangguh memainkan peran kunci dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Kualitas ketahanan keluarga dapat mencerminkan kualitas keluarga secara keseluruhan. Ketahanan keluarga yang tinggi menunjukkan bahwa keluarga tersebut memiliki kemampuan untuk menghadapi, mengatasi, dan bangkit kembali dari berbagai tantangan hidup. Tingkat kualitas ketahanan keluarga di

Kabupaten Sleman dapat dilihat dari pencapaian Indeks Ketahanan Keluarga yang terdiri dari indikator ketahanan fisik ekonomi dan indikator sosial psikologis. Di Kabupaten Sleman, Indeks Ketahanan Keluarga dihitung dari rerata lima indikator penyusun, yaitu indikator keluarga dengan kepemilikan rumah sendiri (data Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman), indikator keluarga miskin dan rentan miskin (data Dinas Sosial), indikator perceraian (data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pengadilan Agama), indikator Anak terlantar (data Dinas Sosial), dan indikator lansia terlantar (data Dinas Sosial).



Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Sleman, 2025

Grafik 2.33. Indeks Ketahanan Keluarga Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024

Kategori Indeks Ketahanan Keluarga adalah angka 1 berada pada kategori kurang, angka 2 berada pada kategori sedang, angka 3 berada pada kategori baik dan angka 4 berada pada kategori sangat baik.

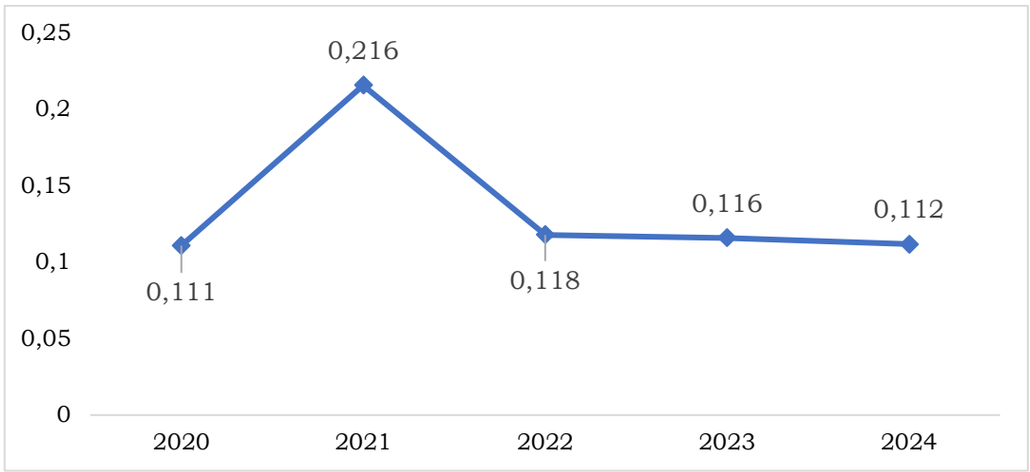
Jika melihat kategori Indeks Ketahanan Keluarga di atas, maka Indeks Ketahanan Keluarga Kabupaten Sleman tahun 2024 telah berada dalam kategori baik. Salah satu faktor yang mendukung pencapaian nilai Indeks Ketahanan Keluarga di Kabupaten Sleman yaitu pembinaan ketahanan keluarga bagi masyarakat kelompok kegiatan (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)) bekerja sama dengan Tim Pendamping Keluarga (TPK).

2.1.2.6.3 Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan pengukuran terhadap perbedaan antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan tiga dimensi, antara lain dimensi kesehatan reproduksi, dimensi pemberdayaan serta dimensi pasar tenaga kerja.

IKG di Kabupaten Sleman pada tahun 2020 merupakan angka yang terbaik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sesudahnya. Adapun IKG pada tahun 2021 sebesar 0,216, selanjutnya kembali mengukir prestasi pada tahun 2022 kembali turun cukup besar menjadi 0,118, tahun 2023 turun lagi menjadi 0,116, dan tahun 2024 kembali turun menjadi 0,112. Penurunan ketimpangan ini terjadi karena tidak adanya perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan, meningkatnya persentase perempuan usia 25 tahun ke

atas dengan pendidikan SMA ke atas serta tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sleman, 2025

Grafik 2.34. Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

Hal ini merupakan capaian yang sangat berharga dalam memberikan kesetaraan gender dalam dimensi kesehatan reproduksi, dimensi pemberdayaan dan dimensi pasar tenaga kerja. IKG Kabupaten Sleman yang relatif rendah ini menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan antara laki-laki dan wanita relatif sempit, atau dekat, artinya tidak ada perbedaan yang mencolok terkait pemenuhan kesehatan reproduksi, akses terhadap pemberdayaan maupun dalam memperoleh peluang kerja.

2.1.2.6.4 Indeks Pembangunan Gender

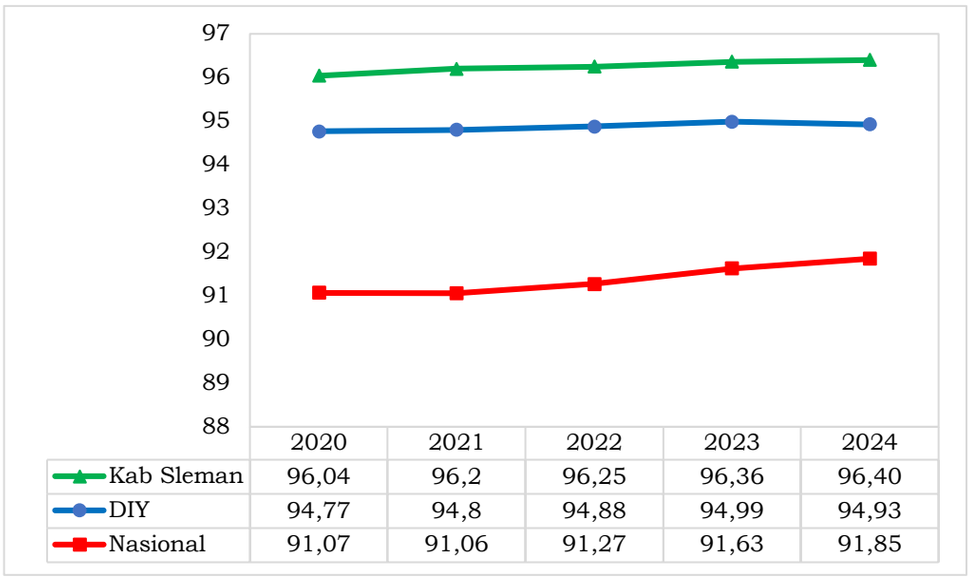
Gender merujuk pada sistem yang membagi individu ke dalam dua kategori yang jelas: laki-laki dan perempuan. Ini menciptakan harapan tertentu terkait peran, perilaku, dan identitas yang dianggap sesuai dengan jenis kelamin yang diberikan, serta norma sosial yang mengatur interaksi diantara keduanya. Pembangunan gender dalam paradigma ini bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan yang mungkin ada antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Hal ini melibatkan usaha untuk memberikan akses yang setara terhadap sumber daya, kesempatan, dan kekuasaan bagi kedua jenis kelamin, dengan memperhatikan perbedaan-perbedaan yang muncul dalam konteks biner gender.

Pembangunan yang berwawasan gender adalah pendekatan pembangunan yang memperhitungkan perbedaan gender dan bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender serta mengurangi ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pendekatan ini mengakui bahwa gender merupakan faktor penting dalam menentukan akses terhadap sumber daya, kesempatan, dan kekuasaan dalam masyarakat. Pembangunan yang berwawasan gender memperhatikan peran, kebutuhan, dan kontribusi laki-laki dan perempuan dalam setiap tahap proses pembangunan, dari perencanaan hingga implementasi dan evaluasi. Dengan memperhitungkan perspektif gender dalam pembangunan, tujuan kesetaraan gender dapat diintegrasikan ke dalam semua aspek kebijakan dan praktik pembangunan, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pencapaian pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi semua anggota masyarakat.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kesetaraan gender dalam suatu negara atau wilayah. Semakin

tinggi nilai indeks, semakin kecil kesenjangan gender dalam hal tersebut. Ini memberikan pandangan yang lebih jelas tentang area dimana kesenjangan gender masih ada dan membantu dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih besar.

IPG Kabupaten Sleman selama lima tahun terakhir (2020-2024) menunjukkan tren yang positif, walaupun peningkatannya tidak signifikan. Pada tahun 2024, IPG Kabupaten Sleman berada di atas DIY sebesar 94,93 dan Nasional sebesar 91,85. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, IPG Kabupaten Sleman mengalami peningkatan sebesar 0,16 poin dari 96,36 menjadi 96,40. Kenaikan ini menjadi salah satu aspek yang menunjukkan semakin baiknya kesetaraan gender di Kabupaten Sleman.



	2020	2021	2022	2023	2024
Kab Sleman	96,04	96,2	96,25	96,36	96,40
DIY	94,77	94,8	94,88	94,99	94,93
Nasional	91,07	91,06	91,27	91,63	91,85

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sleman, DIY dan Nasional, 2021-2025

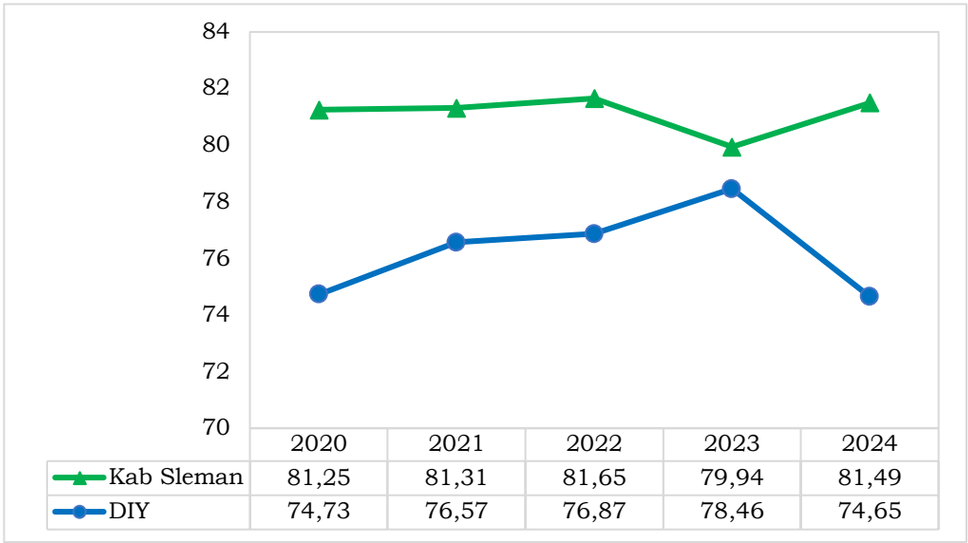
Grafik 2.35. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sleman, DIY, dan Nasional Tahun 2020-2024

IPG di Kabupaten Sleman sudah ada pada kondisi yang baik. Nilai IPG mengindikasikan bahwa telah terjadi kesetaraan gender dalam konteks sosial, budaya, ekonomi dan politik, meski belum sepenuhnya optimal. Optimalisasi lebih lanjut memerlukan pendekatan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya antara lain adalah bahwa kapasitas pengembangan diri perempuan belum optimal dan tingkat partisipasinya juga masih terbatas, oleh karena itu diperlukan penyediaan program dan peningkatan partisipasi dalam pengembangan ini. Di sisi lain, faktor eksternal dari kondisi ini adalah perlunya pengarusutamaan kesadaran gender sehingga dalam kehidupan sehari-hari, ada perhatian terhadap hak-hak dan kesetaraan peran dalam pembangunan. Dalam upaya pelaksanaan konsep ini juga diperlukan inovasi-inovasi kebijakan dan peningkatan profesionalisme dan tidak kalah pentingnya kepedulian terhadap urgensi pembangunan gender ini untuk menciptakan SDM yang jauh lebih kuat dan berdaya.

2.1.2.6.5 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian keadilan dan kesetaraan gender, didasarkan pada partisipasi dalam bidang sosial, budaya, ekonomi dan politik. Indikator komposit yang diukur mencakup keterlibatan perempuan dalam parlemen, posisi peran sebagai tenaga profesional serta distribusi pendapatan perempuan.

Pembentukan keberdayaan perempuan ditujukan untuk memperoleh posisi relatif yang setara dengan laki-laki. IDG memberikan gambaran tentang bagaimana posisi perempuan dalam upaya mengusahakan kesetaraan dengan laki-laki. Dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender, diperlukan peningkatan IDG ini. Kabupaten Sleman telah melaksanakan banyak pengupayaan terkait dengan pemberdayaan gender. Capaian IDG di Kabupaten Sleman dibandingkan dengan capaian DIY dapat dilihat pada grafik berikut.



	2020	2021	2022	2023	2024
Kab Sleman	81,25	81,31	81,65	79,94	81,49
DIY	74,73	76,57	76,87	78,46	74,65

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sleman dan DIY, 2021-2025

Grafik 2.36. Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Sleman dan DIY Tahun 2020-2024

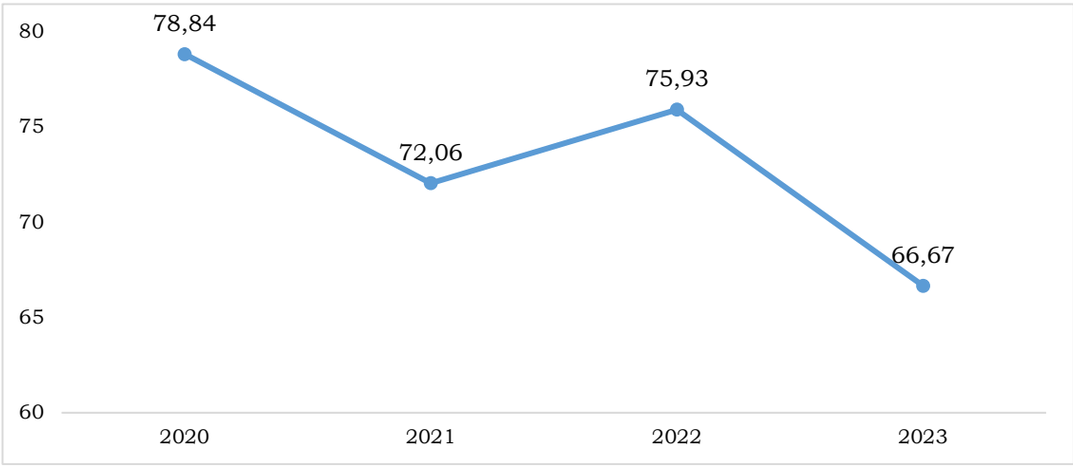
IDG Kabupaten Sleman berada pada posisi yang cukup baik di tingkat provinsi. IDG di Kabupaten Sleman terus bertumbuh secara konsisten menunjukkan bahwa adanya independensi dan peningkatan kontrol atas diri sendiri yang terus meningkat.

Secara umum kinerja pemberdayaan gender telah meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun tahun 2023 sempat menurun menjadi 79,94, tahun 2024 meningkat kembali di angka 81,49. Beberapa poin yang perlu ditingkatkan adalah terkait peran perempuan dalam parlemen, kekerasan terhadap perempuan serta ketersediaan data proporsi penghasilan perempuan dibandingkan laki-laki. Keterwakilan perempuan dalam parlemen sebesar 26%, masih perlu ditingkatkan untuk mencapai angka 30%. Selain itu perlu juga dilakukan pemerataan anggota parlemen perempuan pada setiap komisi sehingga terdapat pertimbangan gender yang seimbang dalam proses perumusan kebijakan daerah.

2.1.2.6.6 Indeks Pembangunan Pemuda

Pemuda merupakan tulang punggung bangsa, sehingga pembangunan pemuda merupakan hal strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Prioritas pembangunan pemuda dilakukan seiring dengan upaya berkontribusi dalam pencapaian sumber daya manusia unggul Indonesia maju yang menjadi prioritas dalam RPJMN 2025-2029. Pembangunan pemuda sangat strategis dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia ke depan. Pemuda yang tangguh dengan memiliki pendidikan yang tinggi, kecakapan tinggi, keuletan dan motivasi yang kuat, akan dapat menjadi sumber daya manusia yang siap membangun.

Kabupaten Sleman telah melakukan upaya pembangunan kepemudaan yang dapat mendorong pencapaian generasi muda yang memiliki kapasitas dan berkarakter baik. Pada umumnya keberhasilan pembangunan kepemudaan diukur dengan menggunakan indeks pembangunan pemuda (IPP). Pengukuran tersebut mencakup 5 (lima) domain yaitu pendidikan, kesehatan atau kesejahteraan, peluang ekonomi, partisipasi dan kepemimpinan, gender dan diskriminasi.



Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, 2024

Grafik 2.37. Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Sleman Tahun 2020-2023

Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Sleman dari tahun 2020-2023 fluktuatif dan cenderung menurun, walaupun pada tahun 2022 sempat naik, namun tahun 2023 kembali menurun cukup signifikan. Pada tahun 2024 tidak dilakukan pengukuran IPP.

Tabel 2.43. Domain Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Sleman Tahun 2023

No Domain	Domain	No	Indikator	Nilai Indikator	Indeks Domain	IPP
1	Pendidikan	X1	Rata-rata lama sekolah	12,1	83,33	66,67
		X2	APK Sekolah Menengah	92,375		
		X3	APK Perguruan Tinggi	68,5		
2	Kesehatan dan Kesejahteraan	X4	Angka kesakitan pemuda	8,02	60,00	
		X5	Persentase korban kejahatan	0,51		
		X6	Persentase pemuda yang merokok	23,21		
		X7	Persentase remaja perempuan yang sedang hamil	27,6		
3	Lapangan dan Kesempatan Kerja	X8	Persentase pemuda wirausaha kerah putih	1,02	70,00	
		X9	Tingkat pengangguran terbuka	7,49		
4	Partisipasi dan Kepemimpinan	X10	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	72,89	50,00	
		X11	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi	11,32		
		X12	Persentase pemuda yang memberikan saran / pendapat dalam rapat	9,8		
5	Gender dan Diskriminasi	X13	Angka perkawinan usia anak	9,2	70,00	
		X14	Persentase pemuda perempuan berusia 16–24 tahun yang sedang	68,31		

No Domain	Domain	No	Indikator	Nilai Indikator	Indeks Domain	IPP
			menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas			
		X15	Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal	38,15		

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, 2023

Komponen penopang tertinggi dalam pembangunan pemuda di Kabupaten Sleman adalah pendidikan. Aspek pendidikan yang memberikan kontribusi tertinggi adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) sekolah menengah dengan nilai 92,375. APK sekolah menengah memang tidak termasuk dalam ranah kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, akan tetapi merupakan kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY. Namun demikian, penduduk yang dapat mencapai jenjang sekolah menengah tentunya telah dapat menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun yaitu SD dan SMP. Dalam rangka mendukung pembangunan kepemudaan, maka diperlukan pelayanan pendidikan yang berkelanjutan dari jenjang pendidikan terendah hingga tertinggi. Dari data tersebut menunjukkan bahwa pemuda di Kabupaten Sleman relatif telah melanjutkan pendidikan hingga sekolah menengah maupun perguruan tinggi.

Sedangkan komponen terendah terletak pada domain partisipasi kepemimpinan. Ada tiga komponen yang menjadi pertimbangan dalam domain partisipasi kepemimpinan yaitu persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial, persentase pemuda yang aktif dalam organisasi dan persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat. Komponen yang sangat rendah dalam domain ini adalah persentase pemuda yang menyampaikan saran atau pendata dalam rapat yaitu 9,8%. Sedangkan kontribusi tertinggi terdapat pada persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan pada tahun 2023 mencapai 72,89%. Kegiatan sosial kemasyarakatan diantaranya adalah kegiatan sosial di wilayah tempat tinggal seperti gotong royong perbaikan lingkungan, pengajian, membantu kegiatan pada perayaan hari-hari nasional, kegiatan budaya, kematian, pesta rakyat, kegiatan posyandu, dan kegiatan lainnya.

Sementara itu domain kesehatan dan kesejahteraan memiliki nilai 60. Dalam domain ini yang masih perlu menjadi perhatian adalah aspek persentase remaja perempuan yang sedang hamil (15-18 tahun) di Kabupaten Sleman yang mencapai angka 27,6% pada tahun 2023. Angka ini lebih tinggi daripada DIY dan lebih rendah daripada nasional. Persentase pemuda perempuan hamil tersebut salah satunya dipicu oleh naiknya angka kehamilan yang tidak diinginkan (*unintended birth*), dengan prevalensi di kalangan pemuda lebih tinggi dibandingkan di kalangan perempuan secara keseluruhan. Hal ini tidak dapat diabaikan karena kehamilan tidak diinginkan erat terkait dengan masalah kesehatan mental sehingga dapat mempengaruhi kondisi anak yang dilahirkan.

Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pembangunan pemuda di Kabupaten Sleman adalah domain lapangan dan kesempatan kerja yang meliputi persentase wirausaha kerah putih dan tingkat pengangguran terbuka. Angka tingkat pengangguran terbuka pemuda di Kabupaten Sleman tahun 2023 adalah 7,49. Angka ini lebih rendah dibandingkan DIY dan nasional. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya Kabupaten Sleman memiliki banyak peluang dan lapangan kerja.

Pemuda wirausaha kerah putih menunjukkan persentase penduduk usia 16-30 tahun yang berusaha (baik berusaha sendiri atau berusaha dibantu buruh tidak tetap atau pekerja keluarga/tidak dibayar atau berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar) dengan jenis jabatan kerah putih (*white collar*) yaitu: 1) tenaga profesional, teknisi dan tenaga lain; 2) tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan; 3) pejabat pelaksana, tenaga tata usaha dan tenaga lain dibanding jumlah penduduk usia 16-30 tahun. Persentase pemuda wirausaha kerah putih di Kabupaten Sleman sebesar 1,02%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan angka nasional namun lebih rendah dibandingkan angka DIY.

Persentase pemuda wirausaha kerah putih adalah proporsi dari keseluruhan pemuda yang menjalankan usaha atau bisnis di sektor pekerjaan kerah putih. Ini berarti mereka memiliki dan mengoperasikan bisnis yang bergerak di bidang jasa profesional, administratif, atau manajerial. Pemuda wirausaha, terutama di sektor kerah putih, sering kali membawa inovasi dan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Mereka dapat menciptakan lapangan kerja baru dan memperkenalkan teknologi atau layanan baru yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Pemuda yang terlibat dalam kewirausahaan kerah putih cenderung membangun usaha yang berkelanjutan dan profesional, yang dapat memberikan kontribusi jangka panjang bagi ekonomi lokal dan nasional.

Seiring dengan perkembangan zaman dan tantangan pemuda yang semakin kompleks diperlukan penyesuaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) agar lebih relevan dan strategis dengan kebutuhan dan tuntutan kualitas pembangunan pemuda. Berdasarkan laporan peninjauan ulang IPP tahun 2024 terdapat beberapa perubahan nama domain dan indikator pembentuknya, meliputi:

1. Domain pendidikan dan pelatihan, meliputi indikator: a) persentase pemuda mendapatkan pelatihan bersertifikat, b) persentase pemuda yang memiliki ijazah SMA/sederajat atau lebih tinggi, dan c) persentase pemuda dengan keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
2. Domain kesehatan, meliputi indikator: a) angka kesakitan pemuda, b) persentase pemuda yang merokok, c) persentase pemuda yang berolahraga, dan (d) persentase remaja perempuan yang sedang hamil;
3. Domain ketenagakerjaan layak meliputi indikator: a) persentase pemuda *Not in Education, Employment and Training* (NEET), b) persentase pemuda pekerja tidak penuh, dan c) rasio kewirausahaan pemuda;
4. Domain partisipasi dan kepemimpinan, meliputi indikator: a) persentase pemuda mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, b) persentase pemuda aktif mengikuti organisasi, dan c) persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial; dan
5. Domain inklusivitas dan kesetaraan gender meliputi indikator: (a) rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pemuda perempuan terhadap laki-laki, (b) persentase pemuda penyandang disabilitas yang bekerja, dan (c) angka perkawinan anak.

Pembangunan pemuda ini dapat mendorong inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial yang lebih baik. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan kepada pemuda mencakup kepemimpinan melalui organisasi, peluang ekonomi melalui kewirausahaan, profesionalisme melalui sertifikasi, pendidikan dan kesehatan secara komprehensif.

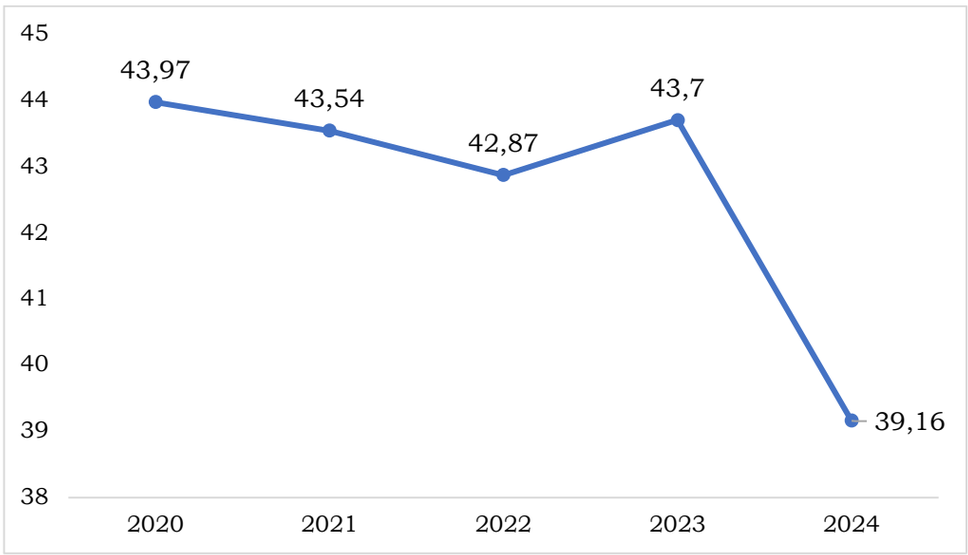
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

Daya saing sumber daya manusia daerah mengacu pada kemampuan suatu daerah untuk menghasilkan, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki agar mampu bersaing dalam pasar kerja global atau regional. Peningkatan daya saing SDM daerah memerlukan upaya bersama dan menyeluruh untuk mengembangkan dan memperbaiki berbagai aspek terkait kompetensi sumber daya manusia, yang akan dapat mempengaruhi kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

Daya saing sumber daya manusia dalam konteks Indeks Modal Manusia telah disampaikan pada bagian sebelumnya. Bagian ini akan menyampaikan daya saing SDM dari angka ketergantungan yang akan menggambarkan bentuk angkatan kerja yang berkembang pada tahun-tahun mendatang.

Angka ketergantungan penduduk (*dependency ratio*) adalah jumlah penduduk tidak produktif (umur 0-14 tahun ditambah umur >65 tahun) dibagi jumlah penduduk usia produktif (umur 15-64 tahun). Angka ketergantungan penduduk pada subbab ini berdasarkan register penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sleman.



Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman, 2025

Grafik 2.38. Angka *Dependency Ratio* Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

Berdasarkan grafik di atas, *dependency ratio* Kabupaten Sleman tahun 2020-2024 cenderung menurun. Tahun 2020 hingga 2022 turun bertahap yang menunjukkan beban ketergantungan perlahan menurun, 2023 mengalami sedikit kenaikan menjadi 43,70 yang menunjukkan adanya kenaikan jumlah penduduk non-produktif. Tahun 2024 kembali menurun cukup besar menjadi 39,16 yang menunjukkan beban tanggungan menjadi semakin ringan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman menuju kondisi bonus demografi dimana penduduk produktif mendominasi.

2.1.3.2 IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Secara umum, peran ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) atau riset dan inovasi sangat strategis dalam penyelesaian permasalahan daerah, mulai dari penyiapan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence based-policy*), dan mengembangkan ekosistem riset dan inovasi yang kontekstual terhadap produk

unggulan daerah (PUD) dan/permasalahan utama daerah, yaitu bagaimana memanfaatkan riset dan inovasi dalam pengembangan PUD dan/penyelesaian permasalahan utama daerah.

Ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki keterkaitan yang erat dengan inovasi dan produktivitas ekonomi, sebagai fondasi utama untuk menciptakan inovasi, sehingga meningkatkan produktivitas ekonomi yang pada gilirannya akan menumbuhkan daya saing daerah. Sinergi antara aktor-aktor Iptek di daerah, termasuk pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan komunitas inovator menjadi kunci dalam mendorong terjadinya transformasi ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*). Inovasi yang lahir dari IPTEK berkontribusi pada peningkatan produktivitas ekonomi melalui:

1. Peningkatan efisiensi
   Teknologi baru dapat mengoptimalkan proses produksi, mengurangi biaya operasional, dan mempercepat distribusi barang dan jasa.
2. Pengembangan produk berkualitas
   Inovasi memungkinkan penciptaan produk dan layanan baru dengan nilai tambah yang lebih tinggi, serta peningkatan kualitas produk yang sudah ada.
3. Penciptaan lapangan kerja baru
   Perkembangan teknologi dan industri baru yang muncul menciptakan peluang kerja baru, meskipun juga dapat mengubah kebutuhan keterampilan tenaga kerja.
4. Perluasan pasar
   Teknologi memfasilitasi akses ke pasar yang lebih luas, baik domestik maupun global, memungkinkan perusahaan untuk menjual produk dan layanan mereka secara lebih efektif.

Investasi dalam penelitian dan pengembangan (*research and development*) memungkinkan penciptaan produk dan teknologi baru. Salah satu hasil penelitian dan pengembangan di Kabupaten Sleman adalah penelitian tentang lurik di Kapanewon Moyudan terkait penciptaan diferensiasi produk lurik. Tidak hanya untuk baju/fesyen tetapi juga menjadi tas, suvenir, ikat pinggang, dan sebagainya. Selain diferensiasi produk, dilakukan juga bagaimana tahapan memperkenalkan lurik agar dikenal luas untuk memperluas akses pasar, baik di dalam negeri maupun luar negeri, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru untuk penjualan online maupun deferensiasi produk lurik Sleman. Inovasi Satu Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga mempermudah dalam pelayanan agar UMKM di Sleman naik kelas dan menjadi *database* UMKM.

Salah satu inovasi di bidang pertanian yaitu SIBUDI DIKUCIR (Sistem Budi daya Ikan Nila Dengan Sentuhan Kincir Air). Gemercik dari motor kincir dapat menambah pasokan oksigen dalam kolam, yang dapat meminimalisasi kematian ikan, khususnya pada jenis nila, sehingga produktivitas hasil panen optimal dan kerugian pembudidaya bisa diminimalisasi. Panen di musim kemarau maupun penghujan bisa stabil. Dengan penambahan padat tebar benih nila pada hitungan 40 ekor/m^2, SIBUDI DIKUCIR mampu meningkatkan produktivitas kolam menjadi 8 sampai 10 kg/m^2/panen. Peningkatan produktivitas didukung oleh kualitas media air kolam yang sesuai untuk pertumbuhan, meskipun dengan kepadatan tinggi.

Penelitian yang berkaitan dengan adanya lahan bera di Kabupaten Sleman juga pernah dilakukan. Lahan pertanian bera ini banyak terdapat di wilayah Sleman barat. Penyebabnya antara lain kekurangan air pada saat diperlukan, gangguan

serangan hama tikus, keterbatasan modal, tenaga, lahan yang sempit, pemasaran, serta para petani umumnya sudah tua, dan padi *minded*. Salah satu pendekatan solusi masalah lahan bera dari kajian penelitian ilmiah salah satunya adalah dengan budidaya talas pratama yang tumbuh baik pada tanah lempung berat dengan keterbatasan air dan aman dari gangguan serangan tikus. Budidaya talas ini berpotensi meningkatkan pendapatan karena talas mudah ditanam, serapan pasar tinggi dan masih memberikan keuntungan yang menjanjikan.

2.1.3.2.1 Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Industri Pengolahan

Industri pengolahan menjadi garda terdepan produktivitas ekonomi yang diharapkan mampu mengangkat dan menjadi jembatan kenaikan kelas sehingga ekonomi kerakyatan bertumpu pada sektor sekunder yang memiliki nilai tambah lebih besar dibandingkan sektor sekunder. Rasio produk domestik regional bruto (PDRB) industri pengolahan merupakan proporsi kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB.

Tabel 2.44. Rasio PDRB Industri Pengolahan di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

Sektor PDRB	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio produk domestik regional bruto industri pengolahan	13,40	13,06	12,59	12,44	12,37

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sleman, 2025, diolah

Postur PDRB Kabupaten Sleman memiliki penyumbang tertinggi dan konsisten selama lima tahun terakhir yaitu sektor industri pengolahan, dengan kontribusi pada kisaran 12,37% sampai dengan 13,40%. Kontribusi ini diharapkan dapat menjadi sektor yang paling terpengaruh ketika inovasi yang bersumber dari IPTEK berkembang.

2.1.3.2.2 Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Akomodasi dan Makan Minum

Rasio produk domestik regional bruto (PDRB) akomodasi makan dan minum merupakan saat PDRB sektor industri manufaktur menjadi sektor yang paling mudah mencerminkan perkembangan sektor tersier di sebagian besar wilayah Indonesia. Dari sektor-sektor yang memiliki kontribusi tinggi, hanya sektor akomodasi dan makan minum yang mempunyai pertumbuhan tinggi, yaitu pada kisaran 8-11% pada masa setelah pandemi. Namun sektor ini yang paling merosot pada saat pandemi. Untuk itu, sektor ini perlu menjadi perhatian khusus dalam pengembangannya, terutama karena konsep pengembangan pariwisata di tingkat internasional telah mencoba mengembangkan sektor yang lebih ramah lingkungan.

Tabel 2.45. Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

Sektor PDRB	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio produk domestik regional bruto akomodasi dan makan minum	8,87	9,14	9,89	10,26	10,67

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sleman, 2025, diolah

2.1.3.2.3 Proporsi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Ekonomi Kreatif

Data rinci dari kinerja ekonomi kreatif di Kabupaten Sleman belum sepenuhnya dipetakan, tetapi secara kualitatif, Kabupaten Sleman memiliki modal dasar yang besar serta potensi pengembangan ekonomi kreatif. Besarnya sektor jasa pendidikan sebagai sumber dasar dari pengembangan industri kreatif menjadi sebuah modal besar yang tidak boleh dilewatkan. Besarnya sektor akomodasi makan dan minum sebagai representasi sektor pariwisata juga memberikan kesempatan besar bagi potensi ekonomi kreatif. Pada tahun 2020, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman telah melakukan pendataan dan menghasilkan data usaha kreatif di Kabupaten Sleman seperti rekapitulasi pada tabel berikut.

Tabel 2.46. Data Pelaku Usaha Kreatif di Kabupaten Sleman Tahun 2020

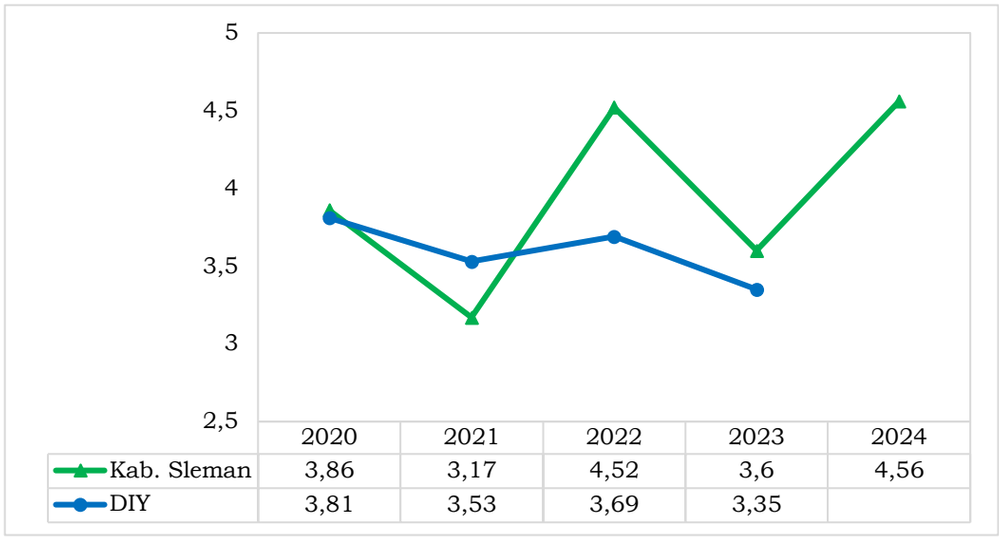
No	Sub Sektor	Jumlah Pelaku
1	Kriya	29
2	Kuliner	41
3	Fashion	21
4	Desain Komunikasi Visual	2
5	Desain Interior	3
6	Aplikasi	1
7	Pengembang Permainan	1
8	Musik	5
9	Seni Pertunjukan	12
10	Seni Rupa	3
11	Desain Produk	13
12	Periklanan	2
13	Film, Animasi, dan Video	2
Jumlah		**135**

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, 2020

Berdasarkan data yang dihimpun, subsektor kuliner merupakan sektor yang paling dominan dalam sebaran ekonomi kreatif di Kabupaten Sleman. Adapun subsektor arsitektur, penerbitan, televisi radio, dan fotografi pada tahun 2020 belum didata. Kabupaten Sleman memiliki potensi pengembangan hampir di semua subsektor ekonomi kreatif. Bahkan pada beberapa subsektor terbukti telah menghasilkan tidak hanya pelaku namun juga pengakuan baik nasional maupun internasional seperti pada subsektor kriya, seni pertunjukan, dan film animasi video. Potensi seluruh subsektor akan lebih berkembang optimal, jika seluruh stakeholder mampu secara aktif menggerakkan para pelaku ekonomi kreatif melalui program dan kegiatannya, seperti kolaborasi seni pertunjukan dengan pariwisata berkualitas.

2.1.3.2.4 Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kewirausahaan dalam suatu wilayah atau populasi. Ini mengacu pada proporsi individu atau unit bisnis yang terlibat dalam kegiatan kewirausahaan dibandingkan dengan total populasi atau total unit bisnis dalam wilayah tersebut.



	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Sleman	3,86	3,17	4,52	3,6	4,56
DIY	3,81	3,53	3,69	3,35	

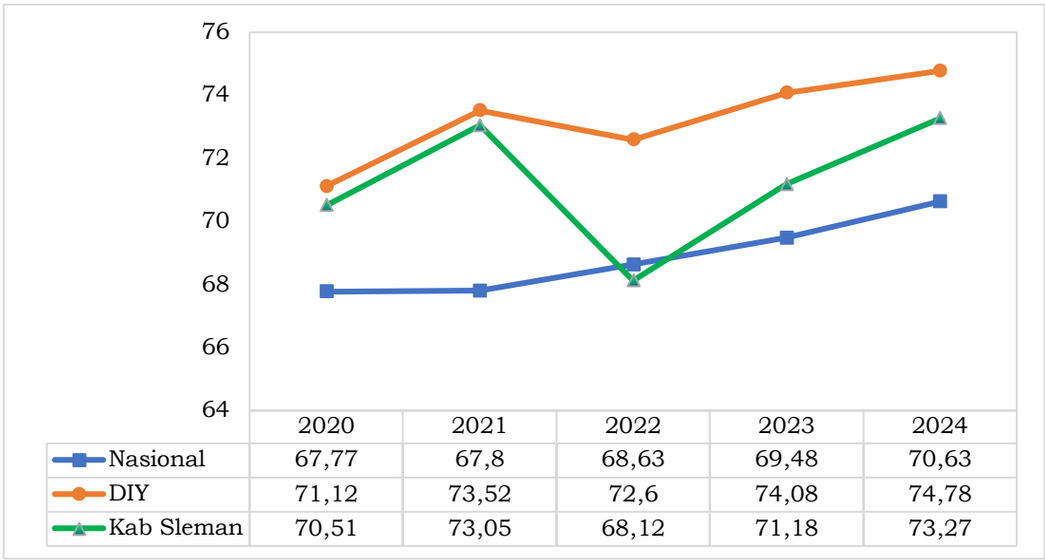
Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sleman dan DIY, 2021-2025

Grafik 2.39. Rasio Kewirausahaan Kabupaten Sleman dan DIY Tahun 2020-2024 (%)

Rasio kewirausahaan di Kabupaten Sleman pada tahun 2023 sebesar 3, 6%, dan naik pada tahun 2024 sebesar 4,56%. Pada tahun, 2023 rasio kewirausahaan Kabupaten Sleman sedikit lebih tinggi dari rasio kewirausahaan DIY (3,35%). Angka ini masih jauh dari target negara maju pada tahun 2045 yang sebesar 8%.

2.1.3.2.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah ukuran statistik yang menggambarkan proporsi angkatan kerja dalam masyarakat. Tingkat partisipasi angkatan kerja memberikan gambaran tentang tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan pasar tenaga kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Sleman rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 dijabarkan melalui grafik berikut ini.



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	67,77	67,8	68,63	69,48	70,63
DIY	71,12	73,52	72,6	74,08	74,78
Kab Sleman	70,51	73,05	68,12	71,18	73,27

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sleman, DIY dan Nasional, 2025

Grafik 2.40. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sleman, DIY, dan Nasional Tahun 2020–2024

Tingkat partisipasi Angkatan kerja Kabupaten Sleman berada pada angka yang lebih rendah dibandingkan dengan DIY dan Nasional. Hal ini menandakan

bahwa partisipasi masyarakat untuk bekerja di tingkat kabupaten cenderung lebih rendah dibandingkan dengan tingkat provinsi.

2.1.3.2.6 Indeks Inovasi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan fungsi penelitian dan pengembangan (litbang) sebagai salah satu fungsi penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Fungsi kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) ini diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Inovasi, kemajuan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, dan terobosan yang dihasilkan oleh kegiatan litbang dapat mendukung percepatan pembangunan daerah secara tepat sasaran dan berdaya saing tinggi. Hal ini menjadi dasar pentingnya peran litbang untuk mendukung kemajuan pembangunan dan kinerja penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Sebagai langkah kunci dalam meningkatkan kapasitas riset dan pengembangan nasional, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek). Undang-Undang Sisnas Iptek mengisyaratkan keinginan Indonesia untuk menjadi negara dengan ekonomi berbasis pengetahuan, sebuah konsep pembangunan ekonomi dimana inovasi dan akses untuk memperoleh informasi akan memicu pertumbuhan produktivitas dan visi menyeluruh dari tujuan kebijakan Indonesia, yaitu menjadi salah satu negara maju di dunia pada tahun 2045. Kebutuhan penelitian dan pengembangan jangka panjang perlu diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Pembangunan daerah membutuhkan perencanaan sektoral untuk mengintegrasikan langkah-langkah yang terpadu dan terintegrasi, antar perangkat daerah, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaannya.

Dalam rangka percepatan pencapaian tujuan pembangunan, inovasi kerap diperlukan oleh suatu daerah termasuk Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya penelitian dan pengembangan terhadap berbagai isu persoalan sebagai upaya pemecahan persoalan-persoalan serta tantangan yang terjadi. Pemerintah Kabupaten Sleman mendorong berbagai inovasi untuk meningkatkan daya saing daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat. Perkembangan inovasi suatu daerah dapat dilihat dari nilai indeks inovasi daerah (IID).

Indeks inovasi daerah adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tantang Inovasi Daerah pada pasal 4 menyebutkan bahwa bentuk inovasi yang dinilai dalam indeks inovasi daerah (IID) yaitu inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Skor Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Sleman tahun 2024 adalah 62,82 dengan predikat “Sangat Inovatif” dan menempati peringkat 58 untuk kluster Kabupaten dari 415 Kabupaten yang ada di Indonesia. Hasil ini meningkat secara nominal apabila dibandingkan tahun 2022 yang mencapai angka 58,31 namun menurun secara peringkat bila dibandingkan dengan peringkat 37 pada tahun 2022. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Sleman dalam menciptakan ekosistem inovasi, diantaranya pembinaan inovasi untuk mewujudkan budaya inovasi dan pemberian penghargaan inisiatif inovasi daerah.

Tabel 2.47. Nilai Indeks Inovasi Daerah

Parameter	2021	2022	2023	2024
Peringkat Nasional	65	37	54	58
Skor IID	53,42	58,31	57,23	62,82
Kategori	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif

Sumber : Bappeda Kabupaten Sleman, 2025

Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Sleman atas kreativitas dan inovasinya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Penghargaan ini juga merupakan bentuk pengakuan dan penghargaan kepada inventor atas inovasi yang telah dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan motivasi dan dorongan semangat kepada perangkat daerah agar terus berinovasi serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik di masa yang akan datang.

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan ekonomi hijau dan biru di Kabupaten Sleman belum sepenuhnya tercatat dan terolah. Muatan indikator terkait ekonomi hijau dan ekonomi biru seperti Porsi Energi Baru dan Terbarukan dan Bauran Energi Primer masih menjadi indikator kewenangan tingkat provinsi.

2.1.3.4 Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital diukur dengan menggunakan indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi. Indeks ini belum dapat diturunkan pada tingkat kabupaten. DIY termasuk provinsi yang memiliki Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang baik dengan peringkat nomor 2 se-Indonesia. Dengan hanya ditopang 5 kabupaten/kota, harapannya kontribusi Kabupaten Sleman dalam indeks tersebut juga tinggi, sesuai dengan sebaran perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Sleman.

Tabel 2.48. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2022-2023

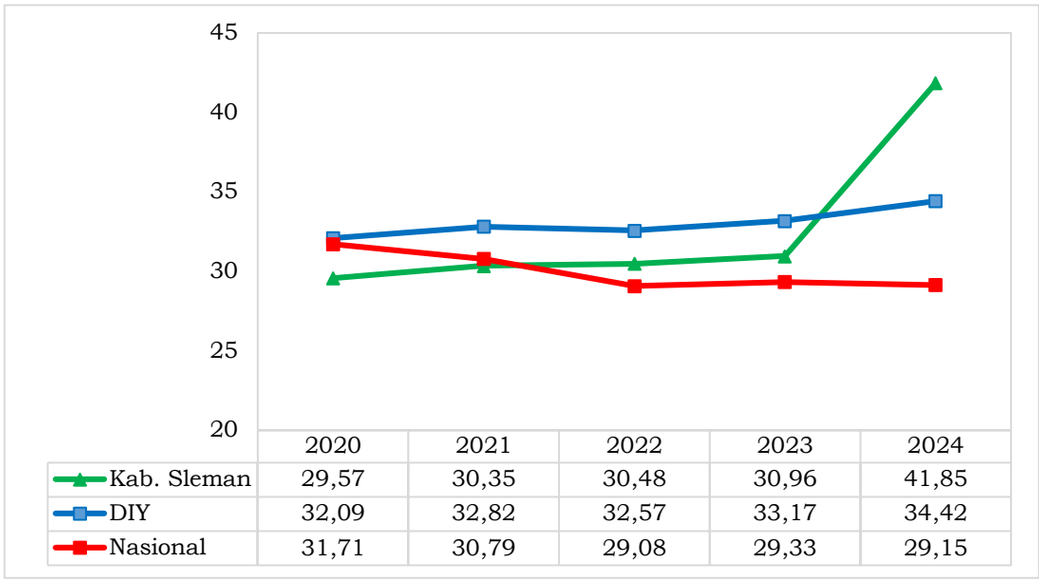
No	Provinsi	Subindeks Akses dan Infrastruktur TIK		Subindeks Penggunaan TIK		Subindeks Keahlian TIK		Indeks Pembangunan TIK	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	DIY	8,01	7,99	6,23	6,29	7,77	7,73	7,25	7,26

Sumber: Badan Pusat Statistik DIY, 2024

2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

2.1.3.5.1 Penanaman Modal Tetap Bruto

Pembentukan modal tetap bruto merupakan pengeluaran masyarakat untuk investasi, baik formal maupun informal. Pembentukan modal tetap bruto merupakan pembentuk produk domestik regional bruto dari sisi pengeluaran. Pembentukan modal tetap bruto merupakan cerminan kesediaan masyarakat untuk melakukan investasi.



	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Sleman	29,57	30,35	30,48	30,96	41,85
DIY	32,09	32,82	32,57	33,17	34,42
Nasional	31,71	30,79	29,08	29,33	29,15

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sleman, DIY dan Nasional, 2021-2025

Grafik 2.41. Penanaman Modal Tetap Bruto Kabupaten Sleman, DIY, dan Nasional Tahun 2020-2024 (%)

Dari grafik di atas, bahwa proporsi pembentukan modal tetap bruto di Kabupaten Sleman pada tahun 2020 mencapai 29,57%. Kondisi ini lebih rendah dari pada tahun 2019. Hal ini karena adanya *refocusing* anggaran dari pemerintah akibat pandemi *Covid-19*, sehingga banyak proyek konstruksi bangunan yang terhenti. Dan pada tahun selanjutnya mulai meningkat yang menunjukkan perekonomian mulai membaik.

Investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) merupakan investasi formal, atau investasi yang berizin. Dua jenis investasi ini sangat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah, baik dalam hal menghasilkan nilai tambah, maupun penyerapan tenaga kerja, dan menghasilkan *multiplier effect* yang luas. PMA dan PMDN selalu mencari wilayah yang memiliki daya saing tinggi, sehingga besarnya PMA dan PMDN merupakan salah satu indikator daya saing wilayah.

Tabel 2.49. Nilai PMA dan PMDN di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

Tahun	PMA (Ribu USD)	PMDN (Milyar Rp)
2020	5.083,20	559.546,00
2021	10.473,40	1.768.169,00
2022	17.695,00	1.092.766,00
2023	15.900,80	3.412.655,46
2024	17.415,91	2.291.437,56

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Sleman, 2025

PMDN di Kabupaten Sleman tahun 2024 menurun sebesar 32,85% dari tahun 2023, sementara PMA meningkat sebesar 9,52%. Hal ini menjelaskan bahwa masih ada dan makin banyak ketertarikan investasi yang berada di Kabupaten Sleman.

2.1.3.5.2 Ekspor Barang dan Jasa

Geliat integrasi perdagangan domestik dan global dapat dilihat dari kinerja ekspor yang meningkat dari tahun ke tahun. Nilai ekspor pada tahun 2024 sebesar US$96.160.330,99, meningkat sebesar US$55.796,578,44 atau 72,34%

dari tahun 2020. Kenaikan nilai ekspor didukung oleh adanya peningkatan permintaan untuk produk tekstil lainnya ke Jepang dalam jumlah yang cukup signifikan serta munculnya beberapa eksportir baru di Sleman.

Kendati demikian, walaupun secara nominal realisasi ekspor selalu meningkat, namun persentase peningkatan nilai realisasi ekspor mengalami penurunan. Hal ini terjadi salah satunya karena produk yang diekspor masih bertumpu pada 5 (lima) komoditas unggulan, yaitu sarung tangan kulit dan sarung tangan kulit sintetis, pakaian jadi tekstil, produk tekstil lainnya dan perabotan medis. Negara tujuan ekspor terbesar, sebesar 35% dari total nilai ekspor adalah Jepang dan Amerika. Di tahun 2024 total nilai ekspor dari Kabupaten Sleman ke Jepang mencapai 35% dari total nilai ekspor, dan sebesar 29% tertuju ke Amerika. Dengan adanya gejolak geopolitik dan kenaikan tarif pajak produk ekspor dari Indonesia ke Amerika yang berlaku efektif di tahun 2025, kemungkinan besar realisasi nilai ekspor produk Indonesia pada umumnya dan dari Kabupaten Sleman khususnya akan terkoreksi.

2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

2.1.3.6.1 Indeks Infrastruktur

Indeks infrastruktur di Kabupaten Sleman dihitung dengan pendekatan persentase layanan infrastruktur, yang merupakan nilai komposit untuk mengukur capaian pembangunan infrastruktur. Angka ini dihitung dari rata-rata capaian irigasi, air minum, drainase, jalan, bangunan gedung, perizinan dan jasa konstruksi. Pada tahun 2024, persentase layanan infrastruktur mencapai 83,24%.

A. Aksesibilitas Wilayah

Perkembangan wilayah sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur dan sistem jaringan. Aksesibilitas menjadi salah satu ukuran kemudahan lokasi untuk dijangkau dari lokasi lainnya, meliputi kemudahan waktu, biaya, dan usaha. Dalam hal ini, yang paling penting adalah infrastruktur jaringan jalan serta fasilitas pendukungnya. Tersedianya prasarana jalan baik kualitas maupun kuantitas sangat menentukan mudah dan tidaknya suatu daerah dijangkau. Apabila aksesibilitas di suatu daerah tinggi maka nilai strategisnya akan tinggi sehingga upaya pembiayaan pembangunan kawasan tersebut akan banyak dibantu oleh pihak swasta sehingga daerah tersebut akan cepat berkembang. Semakin baiknya sistem jaringan jalan dalam suatu wilayah, semakin lancar pula distribusi baik barang, jasa maupun informasi lainnya yang dapat memacu perkembangan wilayah tersebut.

Tabel 2.50. Data Kondisi Jalan di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

Kondisi Jalan		2020	2021	2022	2023	2024
Panjang jalan kabupaten (km)		699,50	699,50	699,50	699,50	699,50
Kondisi (km)	Baik	460.30	436,05	274,00	184,30	199,90
	Sedang	155,85	195,80	327,80	390,70	337,75
	Rusak Ringan	39,20	49,70	92,45	118,65	150,50
	Rusak Berat	45,15	17,95	5,25	5,85	11,35

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Kondisi jalan baik adalah jalan dengan permukaan jalan yang ditambal kurang dari 10% dan dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan minimal 40 km/jam. Kondisi jalan baik terus menurun dari tahun 2020 hingga tahun 2023, adapun jalan kondisi sedang dan rusak ringan terus bertambah, bahkan tahun antara tahun 2021 ke tahun 2022 panjang jalan dalam kondisi rusak ringan bertambah signifikan.

Tabel 2.51. Kondisi Jalan Mantap di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

Kondisi Jalan Mantap	2020	2021	2022	2023	2024
- kondisi baik (%)	65,80	62,37	39,17	26,35	28,58
- kondisi sedang (%)	22,28	27,99	46,86	55,85	48,28
- kondisi mantap (%)	88,08	90,33	86,03	82,20	76,86

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Hal disebabkan adanya *refocusing* anggaran akibat pandemi *Covid-19*, yang seharusnya digunakan untuk pembangunan jalan, dialihkan untuk penanganan *Covid-19*. Kondisi ini diperparah dengan dimulainya tahap konstruksi pembangunan jalan tol. Kondisi jalan baik tahun 2024 sedikit meningkat menjadi 199,90 km karena adanya alokasi dana APBN melalui Inpres. kondisi jalan rusak berat. Kondisi ini lebih buruk dari tahun sebelumnya.

Persentase jalan mantap adalah jumlah dari persentase kondisi jalan baik dan sedang. Persentase jembatan dalam kondisi baik yang dimaksud adalah jembatan dalam kondisi baik, rusak ringan dan rusak sedang (kondisi kriteria level 0-2). Sedangkan jembatan dalam kondisi rusak yang dimaksud adalah jembatan dalam kondisi rusak berat, kritis dan runtuh (kondisi kriteria level 3-6). Namun tahun 2024 di Kabupaten Sleman tidak ada jembatan dalam kondisi runtuh.

Tabel 2.52. Kondisi Jembatan di Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024

Kondisi Jembatan	2021	2022	2023	2024
Kondisi baru/baik (buah)	91	7	5	4
Kondisi rusak ringan (buah)	94	51	34	18
Kondisi rusak sedang (buah)	162	175	217	215
Kondisi rusak berat (buah)	11	108	93	126
Kondisi kritis (buah)	0	13	6	5
Jumlah (buah)	358	354	355	368

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Terkait dengan angka keselamatan, Pemerintah Kabupaten berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013, menyelenggarakan pemenuhan fasilitas pendukung jalan berupa perlengkapan jalan dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, diantaranya adalah rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, lampu penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, serta alat pengawasan dan pengamanan jalan, yang menjadi kewenangan kabupaten. Sampai dengan

tahun 2019, LPJU yang telah terpasang di sepanjang jalan kabupaten sebanyak 26.828 buah. Rambu lalu lintas berjumlah 1.873 unit dan APILL sebanyak 8 unit. Marka jalan kondisi baik seluas 10.694 m^2 atau 68,28% dan pagar pengaman jalan seluas 1.930 m^2.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041, pergerakan regional direncanakan melalui Jalan Arteri Primer yang sudah ada, pengembangan Jogja *Outer Ring Road* (JORR), pengembangan jalan bebas hambatan berupa jalan tol Yogyakarta-Bawen, Yogyakarta-Surakarta, Yogyakarta-Cilacap serta pengembangan jalur kereta api Parangtritis-Yogyakarta-Borobudur. Untuk pergerakan intra regional, beberapa upaya integrasi angkutan umum seperti *park and ride*, pengembangan stasiun penumpang hingga pengembangan berbasis *transit oriented development* (TOD) menjadi amanat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.

Berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY Tahun 2023-2043, rencana pengembangan transportasi di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan sistem dan jaringan transportasi
    a. Pengembangan sistem dan jaringan transportasi darat
        1) Pengembangan jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) untuk angkutan massal berbasiskan jalan berupa jaringan utama bis berjalur khusus, jaringan angkutan bis besar dan jaringan angkutan pengumpan/*feeder* (direncanakan di Stasiun Jombor);
        2) Sistem dan prasarana jalan, yang terdiri dari pengembangan jaringan jalan nasional (jalan arteri primer jalan strategis nasional) dan pengembangan jaringan jalan provinsi (jalan kolektor primer);
        3) Pengembangan sistem fasilitas parkir perpindahan moda (*park and ride*) di pusat kegiatan, stasiun angkutan jalan rel, *shelter* angkutan massal dan terminal angkutan umum; dan
    b. Pengembangan sistem prasarana angkutan barang berupa penyediaan terminal angkutan barang beserta fasilitas untuk mendukung kawasan industri dan kegiatan ekspor impor.
2. Pengembangan sistem dan jaringan transportasi perkeretaapian
    a. Pengembangan jaringan dan layanan perkeretaapian perkotaan yang melayani jalur timur-barat dan utara-selatan; dan
    b. Stasiun kereta api kecil, meliputi Stasiun Maguwo sebagai pendukung terminal angkutan udara di Bandar Udara Adisutjipto, Stasiun Patukan sebagai stasiun penumpang dan stasiun Kalasan sebagai stasiun barang.
3. Pengembangan *outer ringroad* khusus angkutan barang
   Pengembangan *outer ringroad* khusus angkutan barang sebagai upaya memecah tumpukan kendaraan pada kawasan perkotaan Yogyakarta agar kendaraan angkutan bertonase besar tidak masuk perkotaan Yogyakarta sehingga dapat memperlancar jalur distribusi dan transportasi, dengan rute Sentolo-Minggir, Minggir-Tempel, Tempel-Prambanan dan Prambanan-Piyungan.
4. Pembangunan jalan bebas hambatan Yogyakarta-Bawen dan Yogyakarta-Solo

Sejak tahun 2020 telah direncanakan pembangunan Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan Jogja-Solo, Jogja-Bawen dan Jogja-Kulon Progo, telah berada pada tahap pengadaan tanah dan konstruksi. Jalan tol ini membentuk segitiga emas yang harapannya dapat meningkatkan perekonomian dan konektivitas wilayah khususnya Yogyakarta, Solo dan Semarang.

B. Sarana Perekonomian

Gambaran kegiatan perekonomian penduduk dapat dilihat dari perkembangan sarana perdagangan, sebagai aktivitas ekonomi masyarakat lokal sehari-hari. Pada tahun 2024, sarana perdagangan yang terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman tercatat sebanyak 544 jenis, yang terdiri dari 32 pasar kabupaten, 36 pasar desa, 2 pasar hewan, 5 sarana usaha perdagangan milik pemerintah kabupaten, 320 minimarket berstatus cabang/waralaba nasional, 241 toko modern lokal, 5 pusat perbelanjaan, 2 pusat grosir, 5 *hypermar*t, 19 supermarket dan 11 *department store*. Jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020, dapat dilihat bahwa sarana usaha perdagangan dan pasar baik yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten maupun pasar desa mengalami penurunan jumlah, disisi lain, sarana dan usaha perdagangan yang dikelola swasta maupun masyarakat menunjukkan peningkatan jumlah. Meskipun demikian, secara umum menunjukkan bahwa sektor perdagangan berkembang dengan pesat, mendorong penumbuhan ekonomi lokal yang semakin kuat dan mandiri.

Koperasi merupakan sarana perekonomian masyarakat, selain sektor pemerintah, seperti badan usaha milik negara (BUMN) dan sektor swasta, yang berprinsip ekonomi kerakyatan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Namun hingga saat ini, kontribusi koperasi terhadap pendapatan nasional dan atau daerah masih jauh tertinggal. Jumlah koperasi berdasarkan jenisnya di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.53. Jumlah Koperasi di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

No	Jenis Koperasi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	KUD	17	17	16	17	17
2	Koperasi pondok pesantren	4	4	4	3	3
3	Koperasi kerajinan industri	1	1	1	1	1
4	Koperasi serba usaha (KSU)	90	87	81	80	79
5	BMT	36	0	0	0	0
6	Koperasi pasar	4	4	3	3	3
7	Koperasi simpan pinjam	67	66	67	66	65
8	Koperasi mahasiswa	8	8	6	5	5
9	Koperasi PKL	0	0	0	0	0
9	Koperasi angkutan darat	2	4	3	3	3
10	Koperasi pegawai karyawan, angkatan darat atau udara, kepolisian	111	36	36	34	32
11	Koperasi wanita	9	10	10	10	10
12	Koperasi veteran, wredatama, pepabri	18	1	1	1	1
13	Koperasi wisata	1	1	1	1	1

No	Jenis Koperasi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
14	Koperasi perikanan/peternakan	4	5	4	3	3
15	Koperasi lainnya	22	36	41	52	58
	Jumlah	**394**	**280**	**274**	**279**	**281**

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, 2024

Pada tahun 2020 jumlah koperasi di Kabupaten Sleman sebanyak 394 unit namun jumlahnya semakin tergerus hingga tahun 2024 jumlah koperasi menjadi 281 unit.

Selain perdagangan, perekonomian Kabupaten Sleman juga diwarnai oleh kegiatan pariwisata serta pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan untuk menginap. Keberadaan hotel atau fasilitas penginapan lainnya menjadi kebutuhan yang perlu dipenuhi. Sampai dengan tahun 2024, hotel/penginapan yang beroperasi sebanyak 688 unit. Jumlah hotel ini selalu meningkat, meskipun terjadi pandemi *Covid-19*. Perkembangan hotel/penginapan lainnya, kamar, dan tempat tidur secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

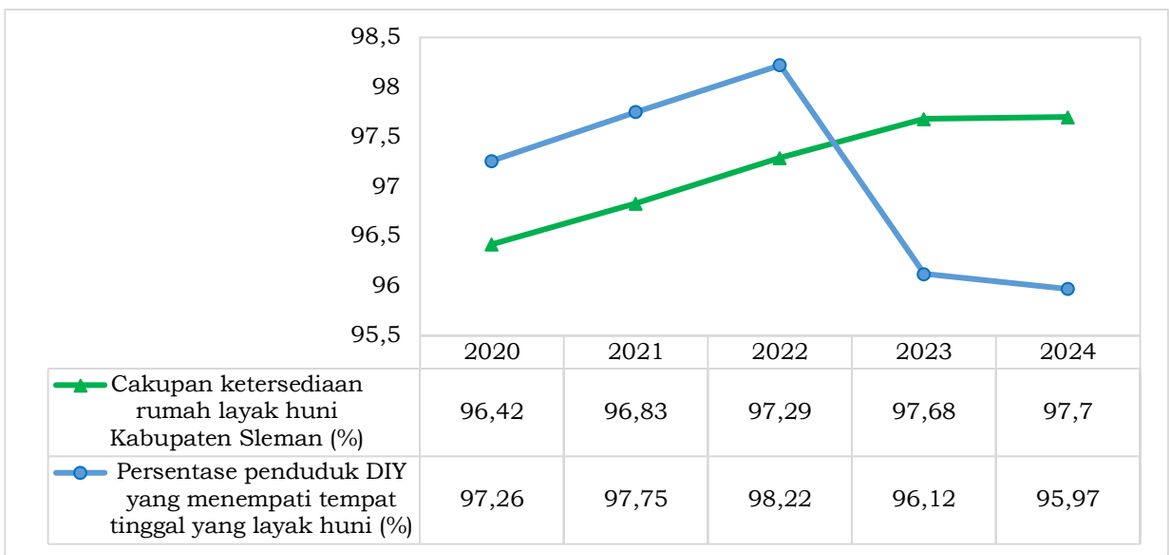
Tabel 2.54. Hotel atau Penginapan Lainnya, Kamar, dan Tempat Tidur di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

No	Fasilitas	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Hotel/penginapan lainnya	575	613	642	660	688
2	Kamar	12.096	12.613	12.922	13.851	14.443
3	Tempat Tidur	20.012	19.579	22.264	26.992	27.489

Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2025

2.1.3.6.2 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan nasional adalah tersedianya rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan pada setiap daerah. Indikator yang mendekati tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut adalah rumah layak huni.

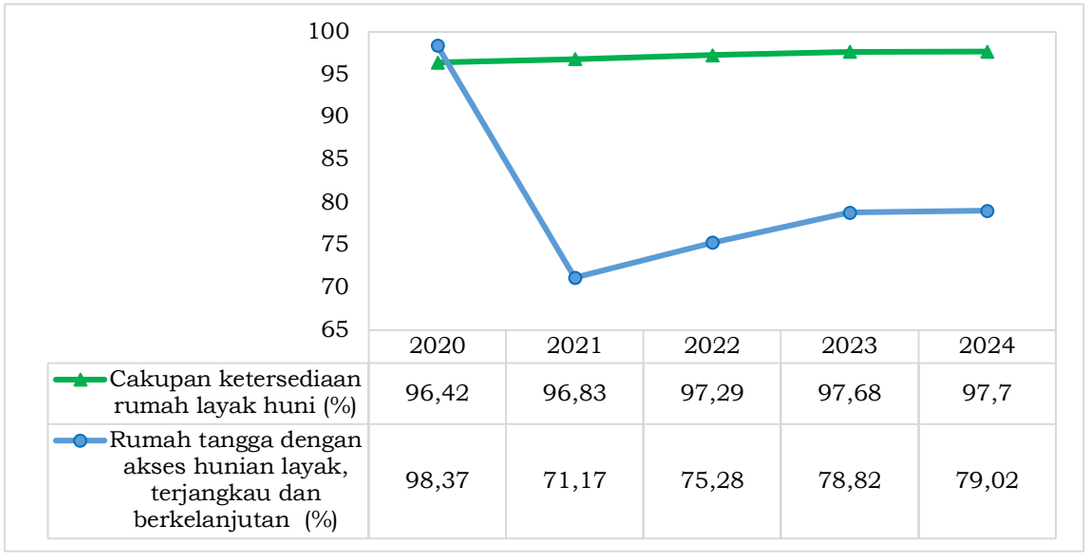


	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan ketersediaan rumah layak huni Kabupaten Sleman (%)	96,42	96,83	97,29	97,68	97,7
Persentase penduduk DIY yang menempati tempat tinggal yang layak huni (%)	97,26	97,75	98,22	96,12	95,97

Sumber: DPUPKP Kabupaten Sleman, 2021-2025; Bappeda DIY, 2025

Grafik 2.42. Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Sleman dan DIY Tahun 2020-2024

Pada tahun 2020, cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Sleman mencapai 96,42%. Angka ini mengalami penurunan dari tahun 2019 dikarenakan terjadi perubahan kriteria. Pada tahun-tahun berikutnya, berdasarkan kriteria baru tersebut, angka ini kembali meningkat secara bertahap, hingga pada tahun 2024 mencapai angka 97,70%. Apabila dibandingkan dengan indikator rumah layak huni di DIY, angka cakupan di Kabupaten Sleman pada tahun 2024 lebih tinggi dengan selisih 1,73%.



	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	96,42	96,83	97,29	97,68	97,7
Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	98,37	71,17	75,28	78,82	79,02

Sumber: DPUPKP Kabupaten Sleman, 2025

Grafik 2.43. Ketersediaan Rumah Layak Huni dan Layak Huni Terjangkau Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

Cakupan layanan rumah layak huni dan terjangkau di Kabupaten Sleman cenderung masih cukup rendah dibandingkan ketersediaan rumah layak huni. Pada tahun 2019 dan tahun 2020, angka cakupan ini cukup tinggi, mencapai lebih dari 98%, tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan karena terjadi perubahan kriteria, seperti halnya pada indikator rumah layak huni. Dengan angka rumah layak huni dan terjangkau yang selisih hingga sekitar 20%. Angka ini mencerminkan adanya pembangunan perumahan yang relatif tidak sesuai dengan cerminan permintaan pasar secara dominan. Oleh karena itu, seharusnya terjadi pembinaan dan pengarahan dari sisi suplai rumah layak huni supaya penyediaan rumah layak huni tepat sasaran dan terjangkau oleh masyarakat.

Tabel 2.55. Data Akses Hunian Layak Kabupaten Sleman 2020-2024

Uraian		Tahun			
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah bangunan fungsi hunian (unit)	306.348	307.347	308.129	309.071	309.994
Jumlah rumah tidak layak Huni (unit)	10.656	9.738	8.351	7.157	7.141
Jumlah hunian layak (unit)	295.692	297.609	299.778	301.914	302.853
Persentase hunian layak (%)	96,52	96,83	97,29	97,68	97,70

Sumber: DPUPKP Kabupaten Sleman, 2025

Jumlah unit hunian layak didapatkan dari jumlah bangunan dengan fungsi hunian dikurangi jumlah rumah tidak layak huni yang belum tertangani. Adapun persentasenya dihitung dari jumlah hunian layak dibagi dengan jumlah bangunan fungsi hunian pada tahun berkenaan. Tahun 2024 terdapat sisa

rumah tidak layak huni berjumlah 6.148 unit, akan tetapi pada tahun 2025 dilakukan identifikasi kembali terdapat tambahan rumah tidak layak huni sebanyak 993 unit sehingga menjadi 7.141 unit.

2.1.3.6.3 Persentase Desa Mandiri

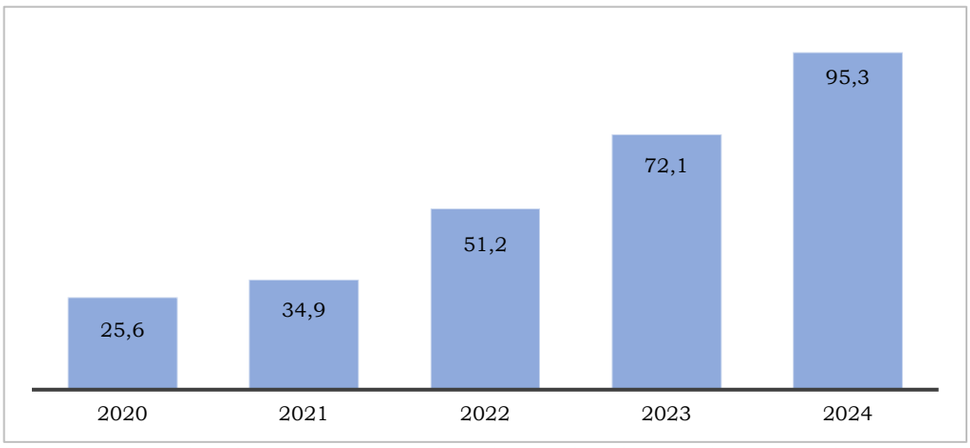
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM), ada lima status indeks desa mandiri (IDM) yaitu Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal. Kategori Desa Mandiri merupakan kategori tertinggi dalam IDM. Desa mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya bagi kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Status IDM di Kabupaten Sleman disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.56. Status Indeks Desa Membangun di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

No	Kategori Desa IDM	2020	2021	2022	2023	2024
1	Mandiri	22	30	44	62	82
2	Maju	50	48	40	24	4
3	Berkembang	14	8	2	0	0
4	Tertinggal	0	0	0	0	0
5	Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0
Jumlah		**86**	**86**	**86**	**86**	**86**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman, 2024

Perkembangan status desa dari tahun 2020-2024 cenderung ke arah yang lebih baik dan sudah tidak mempunyai desa tertinggal dan sangat tertinggal.



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman, 2024

Grafik 2.44. Persentase Desa Mandiri Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

Pada tahun 2024, desa atau kalurahan dengan status IDM Desa Mandiri di Kabupaten Sleman berjumlah 82 desa atau persentase desa mandiri sebesar 95,3%. Salah satu faktor yang mendorong peningkatan desa mandiri adalah penerapan sistem informasi desa berbasis web yang terstandar di semua kalurahan di Kabupaten Sleman. Sistem informasi desa telah dilengkapi fitur yang lengkap meliputi profil Kalurahan, Pemerintahan Kalurahan, Lembaga Masyarakat Desa, data desa dan fitur informasi pelayanan publik. Fitur informasi pelayanan publik terdiri dari beranda, berita, agenda, produk hukum,

perencanaan dan penganggaran, laporan, panduan layanan publik, potensi dan produk usaha. Sistem informasi desa ini juga dilengkapi fitur statistik pengunjung. Sebagian besar kalurahan juga telah memiliki media sosial seperti facebook, twitter, youtube dan instagram. Sistem Informasi Desa di Kabupaten Sleman tergolong lengkap dan mudah diakses oleh masyarakat, namun perlu ditingkatkan dalam hal pemutakhiran informasi dan kecepatan dalam menanggapi permohonan layanan maupun pengaduan masyarakat.

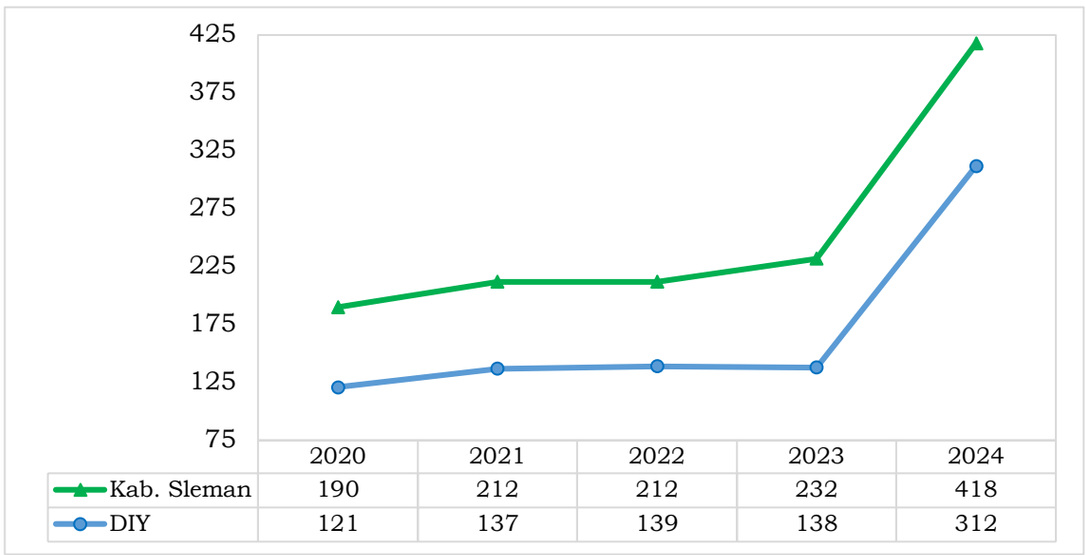
Adapun berdasarkan surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor T-04777/Dt.2.2/PP.02.01/03/202, terdapat perhitungan yang berbeda dengan IDM versi Kementerian Desa PDTT. Dan pada tahun 2024, Indeks Desa Kategori Mandiri di Kabupaten Sleman mencapai 82,558.

2.1.3.6.4 Keamanan dan Ketertiban

Kondisi ketenteraman dan ketertiban suatu daerah merupakan variabel penting yang dipertimbangkan oleh investor untuk menempatkan modalnya. Oleh karena itu, derajat keamanan suatu wilayah menjadi indikator penting dalam menarik investor untuk mau menempatkan modal di suatu wilayah. Selain itu, kondisi aman dan stabil menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pertumbuhan ekonomi, investasi, dan perkembangan sosial.

Suatu daerah yang kondusif dan aman menjadi modal utama dalam meningkatkan daya saing daerah. Tingkat kondusivitas daerah dapat dilihat dari angka kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*) suatu daerah. Semakin besar angka kejahatan menunjukkan semakin banyaknya kejahatan yang terjadi dibandingkan dengan jumlah penduduk, sekaligus merupakan salah satu indikasi semakin tidak amannya suatu wilayah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, *crime rate* di Kabupaten Sleman selama lima tahun terakhir (2020-2024) cenderung terus mengalami peningkatan. Angka kejahatan per 100.000 penduduk di Kabupaten Sleman setiap tahunnya selalu lebih besar dari DIY, bahkan tertinggi di wilayah DIY.



	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Sleman	190	212	212	232	418
DIY	121	137	139	138	312

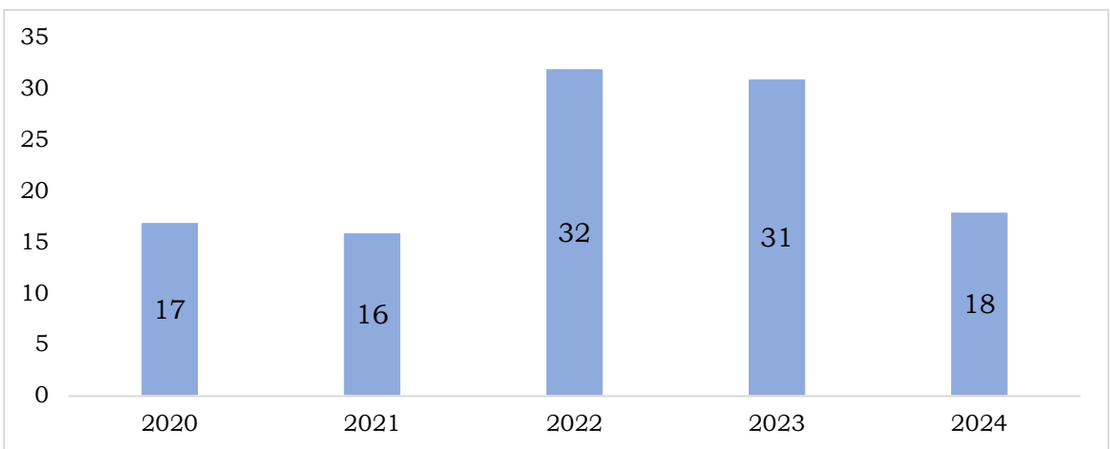
Sumber : Badan Pusat Statistik DIY, 2025

Grafik 2.45. Angka Kejahatan per 100.000 penduduk (*Crime Rate*) Kabupaten Sleman 2020-2024

Pada tahun 2024, angka kejahatan per 100.000 penduduk di Kabupaten Sleman mencapai angka 418 dan tindak kejahatan dilaporkan sebanyak 4.832 kasus

dengan jenis kejahatan terbesar pada penipuan, pencurian biasa, penganiayaan, penggelapan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian dengan pemberatan. Hampir meningkat dua kali lipat dari tahun 2023. Salah satu penyebab peningkatan angka kriminalitas karena Kabupaten Sleman merupakan wilayah urban yang memiliki masyarakat multikultur, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan banyak perguruan tinggi. Secara teori, jumlah kepadatan penduduk akan menjadi salah satu faktor pemicu tindak kriminalitas karena daerah yang berpenduduk tinggi akan memiliki permasalahan ekonomi, pangan yang kurang, serta keamanan yang rendah sehingga berdampak pada kriminalitas.

Oleh karena itu, Kabupaten Sleman rawan terjadi gesekan kepentingan, tindak pidana kriminalitas dan potensi konflik. Konflik berbau SARA, aksi terorisme dan separatisme berpotensi menjadi komoditas politik, sehingga deteksi dini atas potensi kerawanan harus dilakukan. Kasus kejahatan jalanan di Kabupaten Sleman tahun 2024 mengalami penurunan, menjadi 18. Salah satu bentuk kejahatan jalanan ini adalah fenomena kenakalan remaja berupa aksi kekerasan di jalanan. Kenakalan remaja sering kali berhubungan erat dengan faktor dinamika kondisi keluarga. Ketidakharmonisan keluarga dan kurangnya pendidikan sering kali menjadi pendorong timbulnya kenakalan remaja. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sleman berupaya menekan angka kriminalitas melalui program yang dapat meningkatkan keharmonisan mulai dari lingkungan keluarga, serta membangun kesadaran masyarakat untuk memperhatikan hak dan kebutuhan anak. Pendidikan juga berkontribusi dalam mengurangi kejahatan jalanan, baik pendidikan akademis dan non akademis melalui lembaga-lembaga pendidikan. Pendidikan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi hukum dari tindakan kriminal, serta memberikan peluang ekonomi yang lebih baik sehingga mengurangi dorongan untuk melakukan kejahatan.



Sumber: Kepolisian Resor Sleman, 2021-2025

Grafik 2.46. Data Kasus Kejahatan Jalanan di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (Kasus)

Berbagai upaya juga telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk mengurangi angka kriminalitas dan tindakan kejahatan jalanan yaitu:

a. Mengefektifkan patroli wilayah (Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat) sehari 3 (tiga) sif selama 12 bulan atau 1.095 kali, terutama untuk jam-jam rawan terjadinya aksi kejahatan jalanan dan di wilayah- wilayah yang rawan sering terjadinya aksi kejahatan jalanan;
b. Melakukan operasi penanganan kerawanan khususnya di daerah-daerah yang rawan terjadinya kejahatan jalanan dan mengantisipasi adanya upaya-upaya terjadinya kejahatan jalanan;

c. Melakukan operasi vandalisme/antisipasi tawuran pelajar terutama pada jam-jam sekolah atau di tempat-tempat yang dijadikan tempat berkumpul pelajar baik secara mandiri atau bekerja sama dengan instansi terkait; dan
d. Peningkatan fungsi perlindungan masyarakat di tingkat desa tidak hanya untuk kegiatan sosial namun juga untuk menjaga keamanan dan ketertiban dengan membangun pos keamanan lingkungan (poskamling) dan membentuk regu keamanan lingkungan.

Pendekatan komprehensif yang melibatkan semua stakeholder, termasuk partisipasi aktif masyarakat, sangat penting dalam menciptakan kondisi yang aman dan tertib. Kondisi yang tenteram, aman dan tertib tentunya akan menciptakan iklim investasi di Kabupaten Sleman dan mendorong daya saing daerah. Di samping itu, kondusivitas yang tercipta dari keamanan dan ketertiban, menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Sleman, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

2.1.3.7.1 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, analisis terhadap kinerja fiskal memegang peranan krusial dalam mengukur potensi pendapatan daerah dan kapasitas pembiayaan pembangunan. Salah satu indikator penting dalam analisis ini adalah Rasio Penerimaan Pajak terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Rasio ini didefinisikan sebagai perbandingan antara total penerimaan pajak daerah yang berhasil dihimpun dalam suatu periode waktu tertentu dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada periode yang sama.

Rasio pajak daerah terhadap PDRB merupakan metrik strategis yang mencerminkan efektivitas sistem perpajakan daerah dalam memobilisasi sumber daya ekonomi untuk membiayai pembangunan. Rasio yang optimal mengindikasikan bahwa sebagian proporsi nilai tambah ekonomi yang dihasilkan di daerah tersebut berhasil dikontribusikan kembali ke kas daerah melalui mekanisme perpajakan.

Tabel 2.57. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio pajak daerah terhadap PDRB	1,1	1,04	1,4	1,4	1,34

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sleman, 2025

Berdasarkan tabel di atas, tren rasio menunjukkan fluktuasi selama periode pengamatan. Pada tahun 2020, rasio penerimaan pajak sebesar 1,1. Angka ini lebih rendah dari tahun 2019. Kemudian diikuti dengan penurunan lebih lanjut pada tahun 2021 menjadi 1,04. Setelah tahun 2021, rasio kembali mengalami peningkatan, mencapai 1,40 pada tahun 2022 dan bertahan pada angka yang sama pada tahun 2023. Tahun 2024 kembali turun menjadi 1,34. Hal ini karena ada kenaikan yang signifikan pada sektor konstruksi sebagai rentetan pembangunan jalan tol.

Penurunan rasio pajak terhadap PDRB pada tahun 2020 dan 2021 tidak dapat dilepaskan dari dampak signifikan pandemi *Covid-19* terhadap aktivitas ekonomi di tingkat regional. Pembatasan sosial berskala besar, penurunan aktivitas usaha, dan kontraksi ekonomi secara umum telah menyebabkan

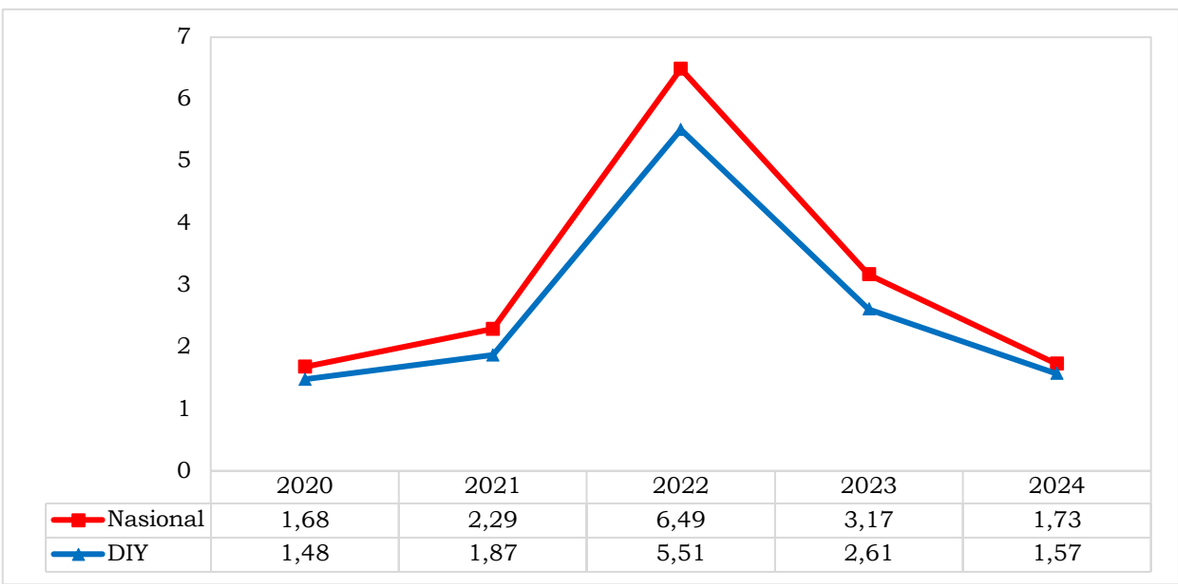
penurunan nilai PDRB. Di sisi lain, meskipun terdapat upaya relaksasi dan insentif pajak tertentu, penerimaan pajak daerah juga mengalami tekanan akibat penurunan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, penurunan rasio pada periode ini sebagian besar disebabkan oleh kontraksi pada pembilang (PDRB) dan penyebut (penerimaan pajak) akibat kondisi luar biasa yang bersifat eksternal.

Apabila fluktuasi ekonomi akibat pandemi *Covid-19* pada tahun 2020 dan 2021 tidak dipertimbangkan sebagai anomali, dan tren sebelum serta sesudah periode tersebut menjadi acuan, maka arah perkembangan Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDRB menunjukkan potensi peningkatan. Data tahun 2019 dan pemulihan pada tahun 2022-2023 mengindikasikan adanya kemampuan daerah untuk meningkatkan mobilisasi pendapatan pajak seiring dengan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan asumsi tidak terjadi guncangan ekonomi eksternal yang signifikan, dan dengan terus dilakukannya upaya peningkatan efisiensi administrasi perpajakan, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak, arah perkembangan Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDRB di masa mendatang diharapkan dapat menunjukkan tren peningkatan yang berkelanjutan. Peningkatan rasio ini akan berkontribusi positif terhadap penguatan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan untuk membiayai program-program pembangunan yang lebih ambisius dan berkelanjutan. Namun demikian, pemantauan dan evaluasi berkala terhadap faktor-faktor ekonomi dan kebijakan perpajakan tetap diperlukan untuk memastikan tren positif ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

2.1.3.7.2 Laju Inflasi

Inflasi secara sederhana didefinisikan sebagai kenaikan harga barang atau juga dapat dikatakan sebagai penurunan nilai mata uang. Tinggi rendahnya inflasi dipengaruhi antara lain seperti keseimbangan antara permintaan (*demand*) dan ketersediaan (*supply*), biaya produksi suatu barang, nilai tukar, dan jumlah uang yang beredar. Tingkat inflasi Kabupaten Sleman mengacu pada tingkat inflasi DIY di Kota Yogyakarta.



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	1,68	2,29	6,49	3,17	1,73
DIY	1,48	1,87	5,51	2,61	1,57

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2020-2024

Grafik 2.47. Tingkat Inflasi DIY dan Indonesia Tahun 2020-2024 (%)

Gambar di atas menunjukkan tingkat inflasi DIY dan Nasional lima tahun terakhir. Dari gambar di atas terlihat bahwa puncak inflasi tertinggi selama lima terakhir adalah tahun 2022. Tingginya inflasi berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat karena berpengaruh pada daya beli masyarakat atas barang dan jasa terutama barang kebutuhan pokok. Seperti diketahui pada periode tersebut, merupakan masa pemulihan pasca-pandemi *Covid-19*, dimana ekonomi Indonesia sudah mulai membaik dengan adanya pelonggaran aktivitas sehingga membuat aktivitas ekonomi jual beli meningkat dan produktivitas dan kebutuhan akan suatu barang meningkat yang linier dengan meningkatnya angka inflasi. Inflasi yang tinggi di sebuah negara berkembang seperti Indonesia menggambarkan dimana permintaan akan suatu barang terus tumbuh sementara produksi dalam negeri belum bisa memenuhinya. Dorongan inflasi berasal dari tingginya permintaan (*demand pull inflation*). Inflasi menurun tahun 2023 menjadi 2,61, pada tahun 2024 menjadi 1,57 dan berada di bawah tingkat inflasi Nasional.

Inflasi dapat terjadi karena permintaan, bertambahnya uang yang beredar, kenaikan biaya produksi serta ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Oleh karena itu, pemerintah daerah membutuhkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam rangka menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Mereka melaksanakan koordinasi secara periodik guna mengidentifikasi permasalahan dan menentukan solusi dalam pengendalian inflasi.

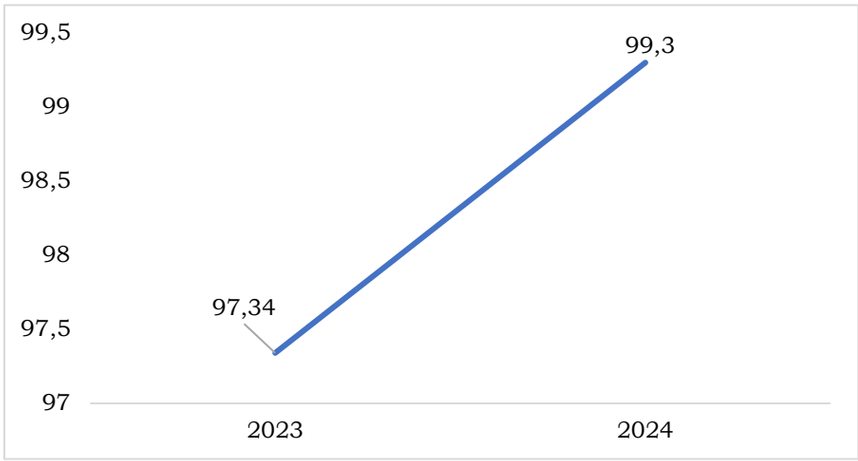
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

2.1.4.1.1 Indeks Reformasi Hukum

Reformasi hukum merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, berintegritas dan adaptif. Dengan kebijakan hukum yang tertata dan harmonis pemerintah daerah mampu meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintahan daerah, memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat serta menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih baik. Penataan regulasi yang baik secara langsung mendorong terciptanya kepastian hukum dan meningkatkan efektivitas kebijakan publik. Dengan prosedur hukum yang jelas dan terintegrasi, masyarakat mendapatkan kepastian hak dan kewajiban secara lebih konsisten. Selain itu, tertib administrasi dan koordinasi regulasi antar-lembaga juga menjadi fondasi peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, transparan dan optimal.

Berdasarkan hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), capaian indeks reformasi hukum Kabupaten Sleman menunjukkan tren yang sangat positif dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2024, indeks reformasi hukum Kabupaten Sleman meningkat signifikan menjadi 99,3 dengan predikat istimewa (AA), naik dari 97,34 pada tahun 2023. Capaian ini mencerminkan bahwa kualitas regulasi daerah yang semakin baik, responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kebijakan nasional. Keberhasilan tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mendorong pembangunan hukum yang berkeadilan.



Sumber: KemenPAN-RB, 2024

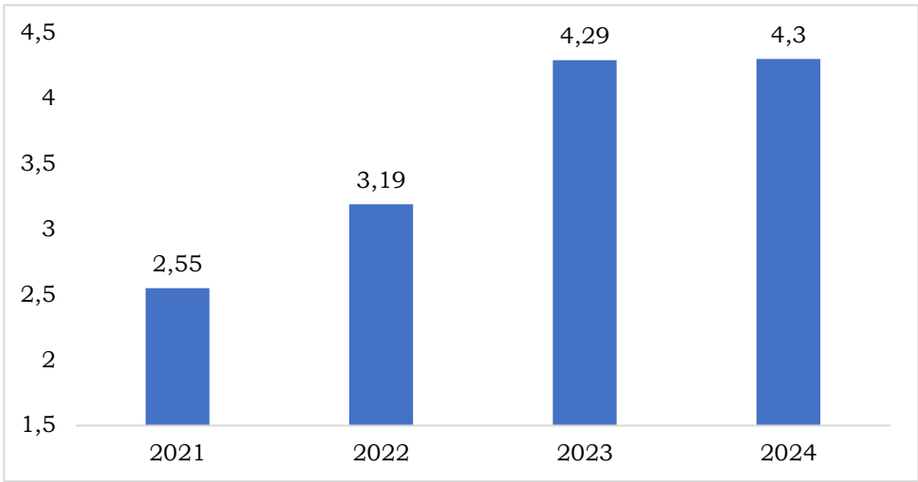
Grafik 2.48. Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Sleman Tahun 2023-2024

Berbagai langkah strategis telah dilakukan Kabupaten Sleman untuk menjaga dan meningkatkan kualitas reformasi hukum. Diantaranya adalah penguatan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Sleman, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) DIY dalam proses penyusunan peraturan daerah. Sinergi yang kuat antara legislatif, eksekutif dan Kemenkumham menunjukkan komitmen Sleman membangun regulasi yang pro-rakyat dan berkeadilan, sehingga pembangunan daerah memiliki pijakan hukum yang kokoh. Berdasarkan informasi dari Kanwil Kemenkumham DIY, saat ini terdapat enam rancangan peraturan daerah prioritas yang sedang memasuki tahap pembahasan intensif dengan pendampingan hukum dari Kemenkumham DIY untuk menjamin kualitas dan kebermanfaatan regulasi bagi masyarakat. Harmonisasi peraturan terus dilakukan agar seluruh kebijakan daerah selaras dengan perundang-undangan di tingkat pusat maupun provinsi. Harmonisasi regulasi ini menjadi kunci penting untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah tumpang tindih kebijakan, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan berpihak pada kepentingan publik.

2.1.4.1.2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau *e-government*, seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. KemenPAN-RB melakukan evaluasi pelaksanaan SPBE. Hasil evaluasi penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Sleman sempat menyentuh terendah pada tahun 2021 sebesar 2,55 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 4,3 dengan predikat baik.

Nilai SPBE yang masih kurang terdapat pada aspek kebijakan tata kelola SPBE, karena belum adanya inovasi proses bisnis terintegrasi dan rencana induk SPBE instansi pemerintah. Pusat data masih dalam proses pembangunan, sedangkan integrasi sistem aplikasi sudah mulai dilaksanakan. Selain itu, manajemen kepegawaian, manajemen perencanaan dan penganggaran, manajemen keuangan, manajemen kinerja, *whistle blowing system* serta layanan publik instansi pemerintah masih perlu terus ditingkatkan.



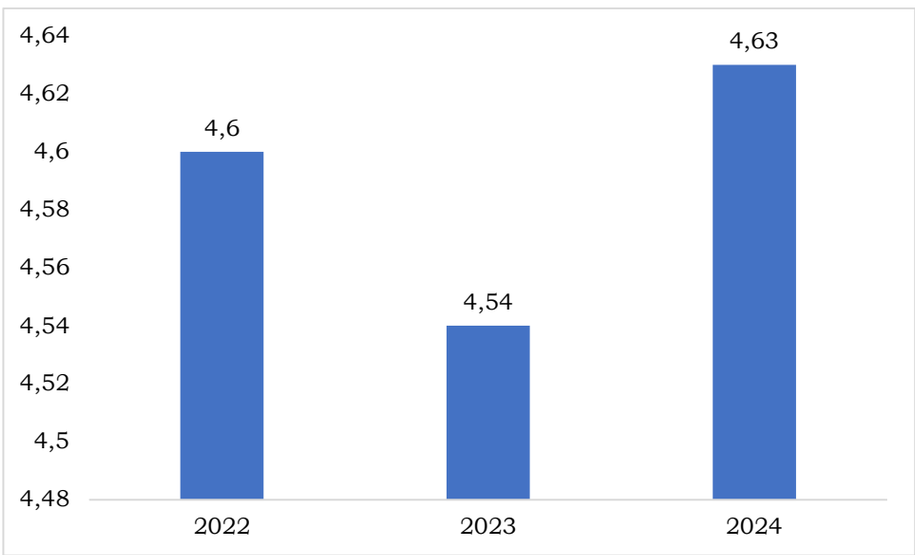
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman, 2025

Grafik 2.49. Indeks SPBE Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024

2.1.4.1.3 Indeks Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik berbentuk barang publik maupun jasa publik, yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu faktor yang mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari capaian indeks pelayanan publik. Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi oleh KemenPAN-RB menunjukkan bahwa indeks pelayanan publik di Kabupaten Sleman menurun, dari 4,6 pada tahun 2022 menjadi 4,54 pada tahun 2023. Pada tahun 2023, Kabupaten Sleman menghitung kembali indeks pelayanan publik dengan ruang lingkup unit kerja yang lebih luas, hasilnya menunjukkan lebih rendah, berada pada angka 2,44 dengan predikat cukup, dan pada tahun 2024 mencapai 2,77. Kondisi ini mencerminkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sleman masih belum optimal.



Sumber: KemenPAN-RB, 2025

Grafik 2.50. Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Sleman Tahun 2022-2024

Hal ini disebabkan karena profesionalitas sumber daya manusia masih belum optimal dikarenakan budaya pelayanan instansi, *core value* aparatur sipil negara berAKHLAK (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal,

adaptif, dan kolaboratif), kode etik, dan kode perilaku pelaksana belum terinternalisasi pada unit pelayanan publik, belum semua unit pelayanan publik menerapkan sistem informasi pelayanan publik, inovasi pelayanan publik belum seluruhnya terdokumentasi dalam keputusan bupati dan kurangnya inklusivitas sarana prasarana pelayanan publik, khususnya bagi masyarakat kelompok rentan.

2.1.4.1.4 Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional merupakan indikator yang belum diproses pada Kabupaten Sleman sehingga belum dapat disampaikan progres dari indeks ini.

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial

Keamanan, ketertiban, dan stabilitas sosial politik suatu daerah adalah prasyarat penting untuk menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menarik tenaga kerja berkualitas, dan mencegah konflik serta kerusuhan. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga dan meningkatkan ketiga aspek ini sangat penting bagi perkembangan dan kesejahteraan suatu daerah. Pemerintah dan berbagai instansi terkait harus bekerja sama secara efektif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan stabil, yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dan kemakmuran bagi semua pihak.

2.1.4.2.1 Persentase Penegakan Perda

Penegakan peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada) secara konsisten dan konsekuen memiliki implikasi yang signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Kepatuhan terhadap regulasi daerah memastikan terciptanya ketertiban sosial, kepastian hukum, dan iklim investasi yang kondusif. Capaian penegakan perda tercakup dalam indikator ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai berikut.

Tabel 2.58. Capaian Indikator Penegakan Perda di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan pengendalian gangguan ketenteraman, ketertiban, penegakan perda, dan peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat (%)	111,5	67	59,70	68,1	79,27
2	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan (%)	100	70	37	52,60	68,42

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sleman, 2024; Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sleman, 2024

Persentase penegakan perda mengalami penurunan dan belum kembali lagi dalam kondisi prima. Hal ini menjadi sebuah masalah kepastian hukum dimana tidak semua pelanggaran perda atau perkada ditindaklanjuti. Meskipun demikian, terus terjadi perkembangan capaian penegakan perda dan perkada dari tahun 2023 hingga 2024.

2.1.4.2.2 Persentase Capaian Aksi HAM dan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Persentase capaian aksi HAM di Kabupaten Sleman belum ada data secara konsisten sehingga belum dapat disampaikan dalam dokumen ini. Sementara

untuk data indeks demokrasi Indonesia (IDI), tidak tersedia data disagregasi pada level kabupaten, sehingga yang akan disampaikan adalah data pada level DIY sebagai berikut.

Tabel 2.59. Indeks Demokrasi Indonesia di DIY Tahun 2020-2024

Tahun	Skor IDI DIY	Kategori
2019	81	Tinggi
2020	79,43	Tinggi
2021	77,85	Tinggi
2022	78,78	Tinggi
2023	79,32	Tinggi
2024	83,88	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

IDI DIY berada pada kategori tinggi, dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Angka ini diharapkan dapat mencerminkan kondisi Kabupaten Sleman, dengan banyaknya aspirasi dan ekspresi yang disampaikan oleh masyarakat Kabupaten Sleman, baik melalui media elektronik maupun langsung.

2.1.4.2.3 Indeks Rasa Aman

Indeks rasa aman secara terpisah belum tersedia di Kabupaten Sleman. Adapun Badan Pusat Statistik mengeluarkan data proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya level provinsi. Dan DIY mencapai 74,87%, di atas nasional yang baru mencapai 62,62%.

2.1.4.2.4 Indeks Ketenteraman dan Ketertiban

Ketenteraman dan ketertiban di Kabupaten Sleman diukur dengan pendekatan persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan. Penyelesaian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum selama lima tahun terakhir (tahun 2020-2024) mencapai 100%.

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

2.1.4.3.1 Indeks Daya Saing Daerah

Dalam menyusun perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan, pemahaman mendalam mengenai posisi daya saing daerah menjadi esensial. Indeks daya saing daerah (IDSD) merupakan alat ukur yang komposit, menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai faktor seperti infrastruktur, sumber daya manusia, inovasi, kelembagaan, dan kondisi bisnis.

Tabel 2.60. Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

Tahun	Indeks Daya Saing Daerah
2020	3,166
2021	4,172
2022	3,910
2023	4,000
2024	4,110

Sumber: Bappeda Kab. Sleman, 2025

Berdasarkan data tersebut, terlihat adanya fluktuasi nilai IDSD dalam kurun waktu ini. Pada tahun 2020, nilai IDSD tercatat sebesar 3,166 dan pada tahun

2024 mencapai 4,110. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya dinamika dalam berbagai faktor yang memengaruhi daya saing Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun.

Tabel 2.61. Indeks Daya Saing Per Pilar Kabupaten Sleman, DIY dan Nasional Tahun 2024

Tingkat	Lingkungan pendukung				SDM		Pasar				Ekosistem Inovasi		Skor IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
Nasional	4,18	2,97	3,47	3,99	3,76	3,91	2,57	3,03	2,76	4,35	3,06	3,13	3,43
DIY	4,53	3,17	4,36	4,14	4,18	4,43	3,10	4,58	2,78	4,28	3,37	4,72	3,97
Kab. Sleman	4,72	3,60	4,91	4,24	4,18	4,29	3,56	4,22	2,81	4,72	3,47	4,63	4,11

Keterangan :
Pilar 1 : Institusi
Pilar 2 : Infrastruktur
Pilar 3 : Adopsi TIK
Pilar 4 : Stabilitas Ekonomi Makro
Pilar 5 : Kesehatan
Pilar 6 : Keterampilan
Pilar 7 : Pasar Produk
Pilar 8 : Pasar Tenaga Kerja
Pilar 9 : Sistem Keuangan
Pilar 10 : Ukuran Pasar
Pilar 11 : Dinamisme Bisnis
Pilar 12 : Kapabilitas Inovasi

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

Berdasarkan tabel di atas, IDSD Kabupaten Sleman lebih tinggi dibanding IDSD DIY dan Nasional. Dilihat dari komposit penilaian, Kabupaten Sleman tertinggal dari DIY pada pilar 6, 8 dan 12, terkait keterampilan, pasar tenaga kerja dan kapabilitas inovasi. Ketrampilan sebagai fondasi inovasi adalah keterampilan yang relevan dan mutakhir, terutama keterampilan digital dan pemikiran kritis.

2.1.4.4 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar pelayanan minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Standar Pelayanan Minimal diterapkan pada urusan wajib pemerintah daerah, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial. Penerapan Standar Pelayanan Minimal didasarkan pada prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Capaian SPM menjadi tolok ukur yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan dalam penilaian kualitas pelayanan sekaligus sebagai kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah dalam melayani masyarakat, dan diukur menggunakan indeks pencapaian standar pelayanan minimal (IPSPM). Indeks ini dihitung berdasarkan persentase pencapaian mutu dan penerima layanan dasar, dikalikan dengan bobot masing-masing.

Pada tahun 2024, Kabupaten Sleman berhasil meraih IPSPM sebesar 98,28 dengan kategori “Tuntas Utama”. Untuk lebih detail per bidang urusan, dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.62. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (IPSPM) Kabupaten Sleman Tahun 2024

No	Indikator		Capaian (%)
1	Pendidikan		
	a. Pendidikan anak usia dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan usia dini	98,33
	b. Pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	98,29
	c. Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan	90,35

No	Indikator		Capaian (%)
		dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	
2	Kesehatan		
	a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	98,50
	b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	98,52
	c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	99,22
	d. Pelayanan kesehatan balita;	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	97,48
	e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	97,89
	f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	99,26
	g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	95,13
	h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	95,43
	i, Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	96,84
	j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100
	k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	98,59
	l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*.	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*) yang mendapatkan layanan kesehatan	98,44
3	Pekerjaan Umum		
	a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100
	b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100
4	Perumahan Rakyat		
	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100

No	Indikator		Capaian (%)
	b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/ kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100
5	Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
	a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100
	b. Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100
	c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100
	d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100
	e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100
6	Sosial		
	a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	92,08
	b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	94,89
	c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	94,32
	d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100
	e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sleman, 2025

Beberapa kendala dalam pencapaian SPM ini antara lain, terkait pendidikan, belum optimalnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, baik orang tua maupun peserta didik. Selain itu, sarana prasarana serta tenaga

pendidik dan kependidikan belum merata. Untuk bidang kesehatan, kekurangan tenaga Kesehatan, terutama perawat, kefarmasian, tenaga gizi dan petugas laboratorium menjadi kendala utama dalam pencapaian SPM bidang kesehatan yang berimplikasi pada pelayanan kesehatan yang efisien dan efektif.

Dalam SPM bidang pekerjaan umum, Kabupaten Sleman memprioritaskan pemenuhan kebutuhan air minum jaringan perpipaan, sedangkan bukan jaringan perpipaan tidak ditargetkan. Kebutuhan air minum minimal sejumlah 60 liter/orang/hari. Pada tahun 2024, dari hasil verifikasi terdapat 1.471 rumah tangga yang dipasangkan titik sambungan air atau sambungan rumah (SR), dengan asumsi 1 SR untuk 4 jiwa. Adapun terkait air limbah, untuk meningkatkan kesehatan lingkungan, kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan akses sanitasi layak dan aman menjadi prioritas dalam pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Pada tahun 2024, terdapat penambahan 227 rumah tangga yang mendapatkan pelayanan pengolahan air limbah domestik, yang terdiri dari 52 rumah tangga yang terkoneksi ke instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) maupun sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) serta 175 rumah tangga yang menggunakan kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septik sesuai standar. Sampai dengan saat ini, tangki septik yang belum berstandar standar nasional Indonesia (SNI) atau belum kedap maupun tangki septik yang belum pernah melakukan penyedotan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera terselesaikan.

Terkait bidang perumahan rakyat, pada tahun 2024 tidak terjadi bencana yang ditetapkan dengan status bencana oleh kepala daerah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 bahwa apabila memang tidak terjadi bencana daerah, maka capaian Standar Pelayanan Minimal untuk jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dinyatakan dengan hasil 100%.

Terkait dengan urusan sosial, Kabupaten Sleman menghadapi tantangan sosial yang semakin kompleks, termasuk intoleransi, kekerasan terhadap perempuan dan anak, konflik antar kelompok, peningkatan jumlah penderita *human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome* (HIV/AIDS), serta isu sosial terkait hiburan malam dan prostitusi. Selain itu, ketimpangan digital, keberadaan kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), dan kelompok terpinggirkan lainnya juga menjadi bagian dari permasalahan sosial yang memerlukan perhatian khusus. Selama lima tahun terakhir, terjadi tren peningkatan signifikan dalam jumlah kasus yang berkaitan dengan kelompok rentan tersebut. Permasalahan ini menuntut pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis data dalam penyusunan kebijakan sosial, agar dapat memberikan solusi yang tepat dan berkelanjutan bagi kelompok terdampak

2.1.4.5 Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan

Aspek pelayanan umum penyelenggaraan pengelolaan perkotaan meliputi prasarana, sarana, utilitas dan fasilitas sosial di wilayah perkotaan, yang berupa pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Rincian fasilitas tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.63. Rincian Fasilitas Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan

Kelompok Fasilitas	Rincian Fasilitas	Keterangan
Prasarana	- Jaringan jalan - Sistem penyediaan air minum - Sistem pengelolaan air limbah - Sistem pengelolaan persampahan - Proteksi kebakaran - Terminal dan angkutan - Stasiun - Jalur evakuasi	Sebaran, kondisi dan rencana kebutuhan dalam dokumen RP2P
Sarana	- Sarana pemerintah (gedung kantor) - Sarana pendidikan - Sarana kesehatan - Sarana transportasi - Sarana perdagangan - Sarana olahraga - Sarana ruang terbuka hijau (RTH) - Sarana peribadatan - Sarana kebudayaan - Sarana rekreasi - Museum - Perpustakaan - Sarana keuangan - Tempat pertemuan, konvensi/pameran	Sebaran, kondisi dan rencana kebutuhan dalam dokumen Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P)
Utilitas	- Jaringan listrik - Jaringan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) - Stasiun pancar terima pangkalan (SPTP) - Jaringan gas rumah tangga - Stasiun pengisian bahan bakar minyak (BBM) - Stasiun pengisian gas - Stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU)	Sebaran, kondisi dan rencana kebutuhan dalam dokumen RP2P
Fasilitas Sosial	- Fasilitas pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial - Fasilitas konsultasi kesejahteraan keluarga - Fasilitas penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga - Fasilitas rehabilitasi bekas korban penyalahgunaan narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) - Fasilitas siap tanggap darurat bencana - Fasilitas pelayanan masyarakat tidak mampu	Sebaran, kondisi dan rencana kebutuhan dalam dokumen RP2P

Kelompok Fasilitas	Rincian Fasilitas	Keterangan
	- Fasilitas pencatatan informasi cuaca dan mitigasi bencana - Fasilitas informasi dan data - Fasilitas pemadam kebakaran - Fasilitas layanan tenaga kerja - Fasilitas pemakaman - Fasilitas pembinaan usaha kecil dan menengah - Fasilitas pengembangan potensi lokal - Fasilitas sanggar seni - Fasilitas pendukung ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	

2.1.4.6 Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah

2.1.4.6.1 Urusan Pemerintah Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

Urusan wajib pendidikan yang menjadi kewenangan Kabupaten adalah pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar, sementara pendidikan menengah (SMA/SMK/MA) menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pendidikan tinggi menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dalam pemenuhan pelayanan di bidang pendidikan, pemerintah Kabupaten Sleman didukung dan dikuatkan oleh masyarakat dan swasta secara signifikan. Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah sudah dibahas pada subbab sebelumnya. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sleman pada tahun 2024 telah mencapai 11,33 tahun, sedang harapan lama sekolah mencapai 16,79 tahun.

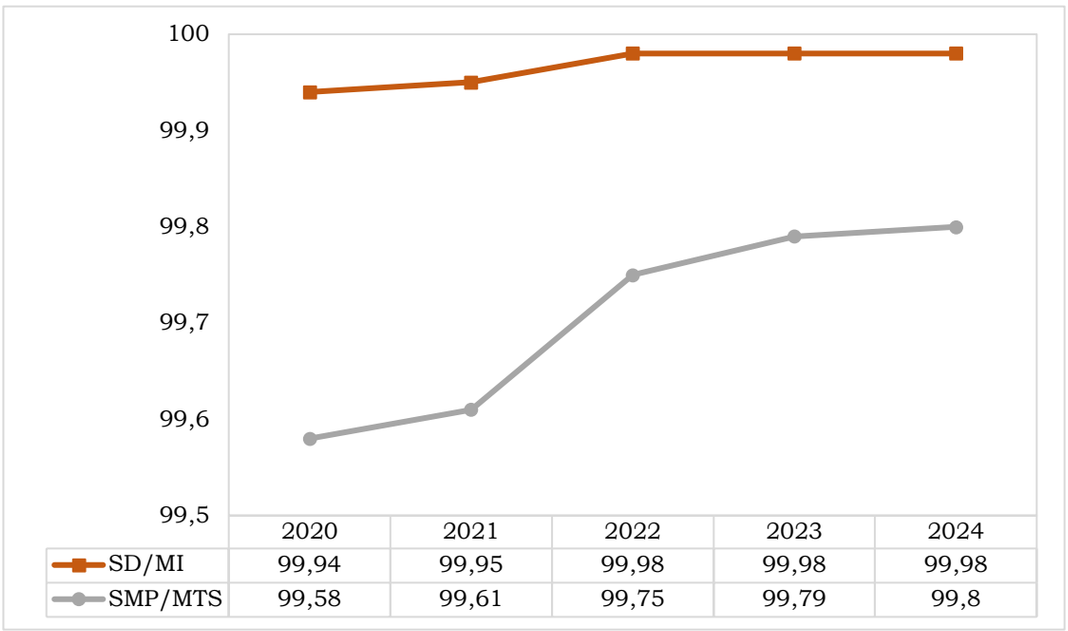
1. Angka Partisipasi Sekolah

   Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk usia sekolah pada sumber daya pendidikan. Semakin tinggi angka partisipasi sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan, namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. APS yang berada di bawah angka 100 menunjukkan bahwa ada penduduk usia sekolah yang belum tertampung di sekolah.

   Salah satu faktor yang mempengaruhi APS adalah tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. APS SD dan APS SMP lima tahun terakhir (2020-2024) cenderung meningkat. Pada tiga tahun terakhir (2022-2024) APS SD cenderung tetap, sementara APS SMP terus mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir. Capaian APS SD tahun 2024 sebesar 99,98% dan capaian APS SMP tahun 2024 sebesar 99,80%. Kenaikan APS ini semakin menegaskan adanya peningkatan kesadaran

masyarakat Kabupaten Sleman untuk terus mendukung putra-putrinya mengenyam pendidikan terutama pendidikan dasar.

Angka capaian APS SD dan SMP di Kabupaten Sleman yang belum mencapai 100% menunjukkan bahwa masih adanya anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Hal ini disebabkan 1) anak putus sekolah, 2) anak yang lulus sekolah namun tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya dan 3) anak yang tidak pernah memasuki bangku sekolah sama sekali dikarenakan keterbatasan fisik (difabel). Faktor yang menyebabkan masih adanya anak putus sekolah jenjang SD/sederajat atau SMP/sederajat (drop out/DO), masih adanya anak lulusan SD yang tidak melanjutkan/LTM) dan masih adanya anak yang belum pernah bersekolah (BPB) adalah adanya permasalahan dalam internal keluarga (bapak/ibu berselisih/bercerai), kurangnya perhatian dari orang tua/wali, permasalahan akademik, permasalahan pertemanan, permasalahan ekonomi orang tua/wali, pergaulan bebas, permasalahan Kesehatan, dan penyandang disabilitas.



	2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI	99,94	99,95	99,98	99,98	99,98
SMP/MTS	99,58	99,61	99,75	99,79	99,8

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, 2024

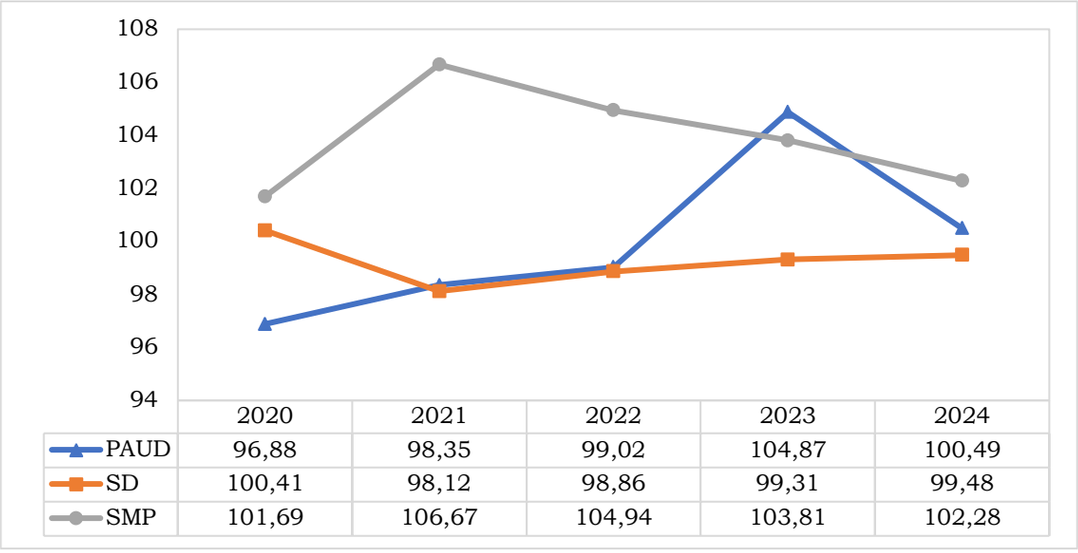
Grafik 2.51. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD dan SMP di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (%)

2. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah angka perbandingan antara banyaknya murid dari jenjang pendidikan tertentu dengan banyaknya penduduk usia sekolah pada jenjang yang sama dinyatakan dalam persen. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

APK PAUD/TK, SD dan SMP Kabupaten Sleman selama lima tahun terakhir (2020-2024) cenderung fluktuatif. Secara keseluruhan APK di Kabupaten Sleman tahun 2024 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2023 dan mencapai lebih dari 100%, kecuali APK SD/MI/sederajat. APK bisa mencapai lebih dari 100% menunjukkan bahwa daya tampung sekolah pada jenjang TK/PAUD dan SMP/MTs lebih besar daripada jumlah penduduk usia TK/PAUD dan SMP/MTs di

Kabupaten Sleman. Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena adanya peserta didik dari luar Kabupaten Sleman yang bersekolah di wilayah Kabupaten Sleman. Sebaliknya APK SD/MI yang kurang dari 100% menunjukkan ada sejumlah anak dalam kelompok usia tersebut yang tidak bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai di Kabupaten Sleman.



	2020	2021	2022	2023	2024
PAUD	96,88	98,35	99,02	104,87	100,49
SD	100,41	98,12	98,86	99,31	99,48
SMP	101,69	106,67	104,94	103,81	102,28

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2024

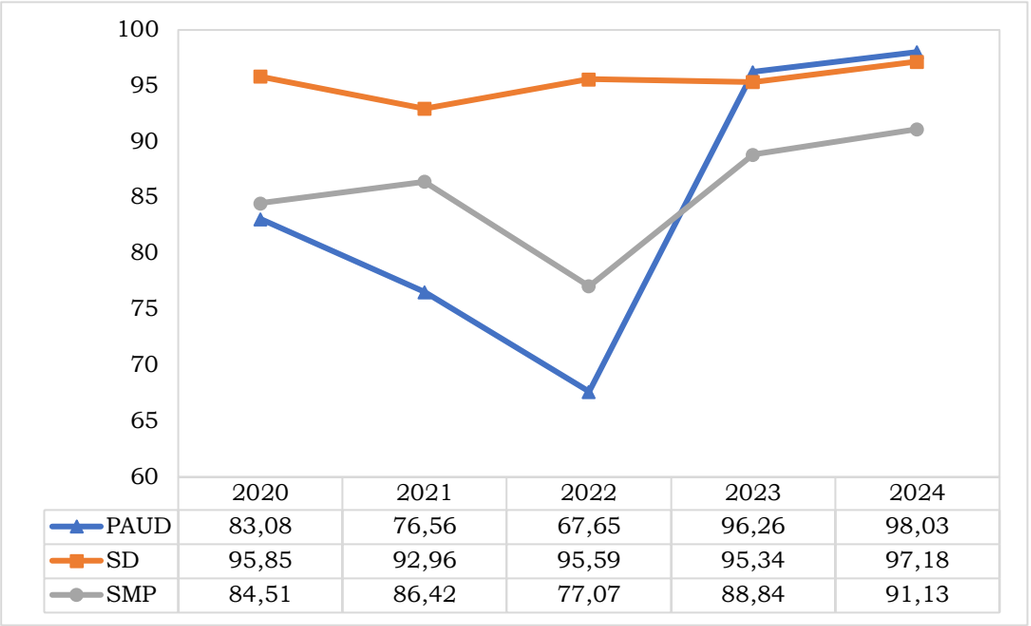
Grafik 2.52. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, SD dan SMP di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (%)

3. Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni (APM) adalah angka perbandingan penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut, dinyatakan dalam persen. APM menunjukkan tingkat kesesuaian atau ketepatan penduduk dalam berpartisipasi di sekolah berdasarkan usia pada tingkat pendidikan tertentu.

APM PAUD, SD dan SMP Kabupaten Sleman selama lima tahun terakhir (2020-2024) cenderung fluktuatif. Secara keseluruhan APM di Kabupaten Sleman tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 namun belum mencapai 100%. APM di atas angka 100% menunjukkan banyaknya peserta didik yang memulai sekolah tepat waktu sesuai usia dengan tingkat pendidikannya. Angka tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah peserta didik yang bersekolah sesuai usia pada jenjang pendidikan tertentu lebih banyak daripada jumlah penduduk usia sekolah. APM di bawah 100% menunjukkan bahwa tidak semua peserta didik bersekolah tepat sesuai usia pada jenjang pendidikan tertentu.

Namun hal ini tidak berarti hal yang negatif karena pada beberapa tahun terakhir ini tampak adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk lebih awal menyekolahkan putra-putrinya. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Penerimaan Peserta Didik Baru SD yang memperbolehkan anak usia 6 tahun masuk ke jenjang SD sehingga ketika berusia 12 tahun sudah berada di jenjang SMP. Anak-anak yang lebih awal ini tentu tidak masuk dalam kategori bersekolah tepat waktu sesuai usia dan jenjang pendidikan seharusnya. Hal ini berdampak pada APM yang tidak mencapai 100,00%



	2020	2021	2022	2023	2024
PAUD	83,08	76,56	67,65	96,26	98,03
SD	95,85	92,96	95,59	95,34	97,18
SMP	84,51	86,42	77,07	88,84	91,13

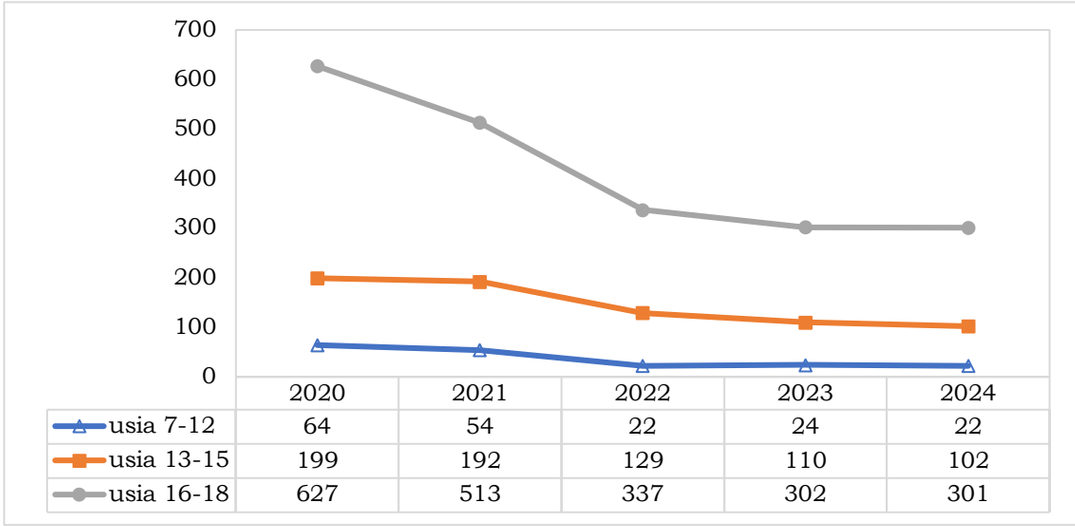
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2024

Grafik 2.53. Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD, SD dan SMP di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (%)

4. Anak Tidak Sekolah

Anak Tidak Sekolah (ATS) dikategorikan sebagai anak usia 7 tahun sampai dengan 18 tahun yang tidak bersekolah karena 1) putus sekolah, 2) lulus sekolah namun tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya, atau 3) belum pernah bersekolah sama sekali. Banyak hal yang melatarbelakangi seorang anak untuk tidak berada pada sistem pendidikan baik formal maupun nonformal. Salah satunya yaitu kurangnya motivasi melanjutkan Pendidikan. Hal ini disebabkan oleh permasalahan internal keluarga (orang tua berselisih/bercerai), kurangnya perhatian orang tua/wali, permasalahan akademik, permasalahan pertemanan, permasalahan ekonomi orang tua/wali, pergaulan bebas, permasalahan kesehatan, penyandang disabilitas dan sebagainya.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman dengan mengoptimalkan koordinasi dan kerja sama Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Anak Putus/Tidak Sekolah untuk mendata alasan putus/tidak sekolah, memotivasi anak untuk kembali bersekolah melalui jalur pendidikan formal (SD/MI, SMP/MTs, atau SMA/SMK/MA) atau nonformal (program kesetaraan Paket A, B, atau C), serta mensosialisasikan melalui kegiatan kemasyarakatan seperti taman bacaan masyarakat. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sleman juga telah menyediakan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bidang Pendidikan kepada anak tidak sekolah/ anak putus sekolah yang akan melanjutkan ke pendidikan formal atau nonformal sebesar Rp8.500.000,00 untuk ke jenjang SD/sederajat, Rp9.500.000,00 untuk jenjang SMP/sederajat, Rp12.000.000,00 untuk ke jenjang SMA/sederajat yang dapat diakses melalui Dinas Sosial.



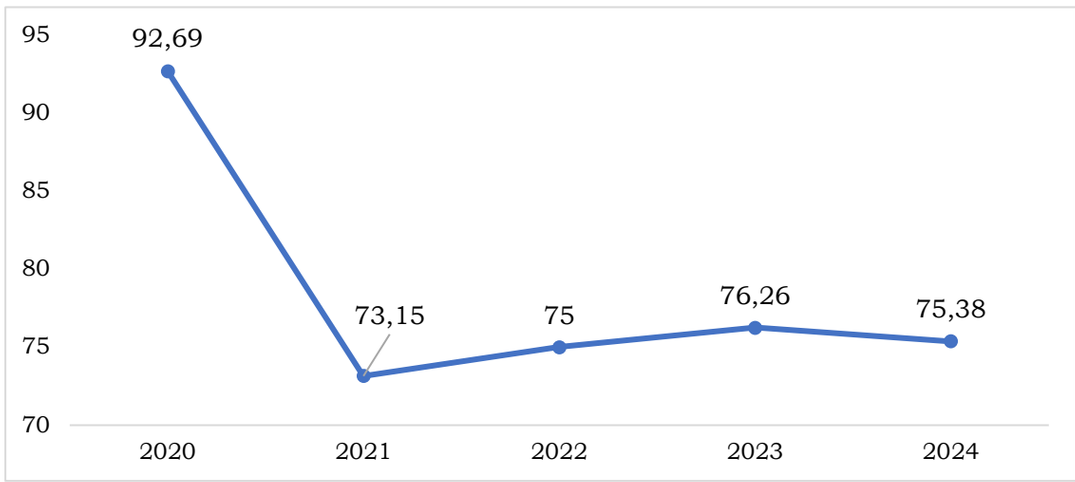
	2020	2021	2022	2023	2024
usia 7-12	64	54	22	24	22
usia 13-15	199	192	129	110	102
usia 16-18	627	513	337	302	301

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2024

Grafik 2.54. Anak Tidak Sekolah (ATS) Berdasarkan Jenjang Usia di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (Anak)

5. Sumber Daya Pendidikan

Pendidikan merupakan variabel penting dalam memajukan masyarakat. Tingkat pendidikan yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan akademik yang baik, sehingga memiliki wawasan yang luas. Pencapaian keberhasilan di bidang pendidikan membutuhkan dukungan fasilitas pendidikan antara lain tenaga pengajar/guru dan sarana prasarana. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang cukup akan memberikan peluang terhadap masyarakat untuk menempuh pendidikan yang sebaik-baiknya. Angka partisipasi sekolah menjadi lebih baik jika tersedia sarana prasarana pendidikan yang merata dan dapat terakses dengan baik serta mudah. Di samping sarana prasarana, guru yang memiliki sertifikat juga dibutuhkan untuk mendorong kualitas pendidikan.

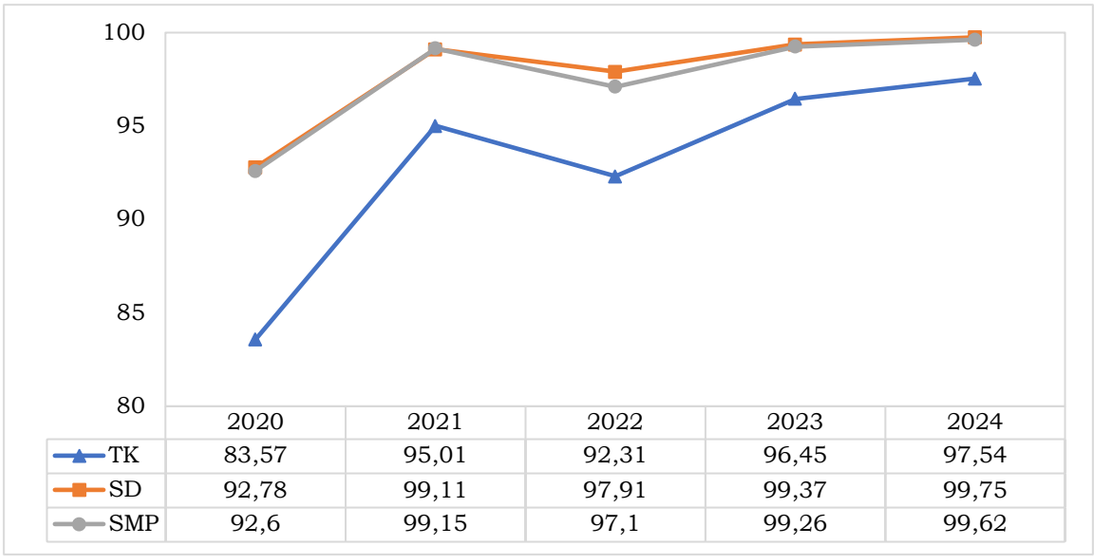


Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, 2024

Grafik 2.55. Persentase Guru ASN yang Memenuhi Kualifikasi Pendidikan Terakhir S1/D4 yang Bersertifikat Pendidik di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (%)

Guru yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang diakui secara resmi, menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi standar profesional dan

kompetensi yang ditetapkan. Guru yang bersertifikat merupakan bagian penting dari sumber daya pendidikan karena mereka memainkan peran krusial dalam proses pembelajaran. Sertifikasi guru menunjukkan bahwa mereka telah melalui pelatihan dan evaluasi yang memastikan mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk mengajar secara efektif. Tanpa guru yang berkualitas dan bersertifikat, sumber daya pendidikan lainnya tidak akan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan.

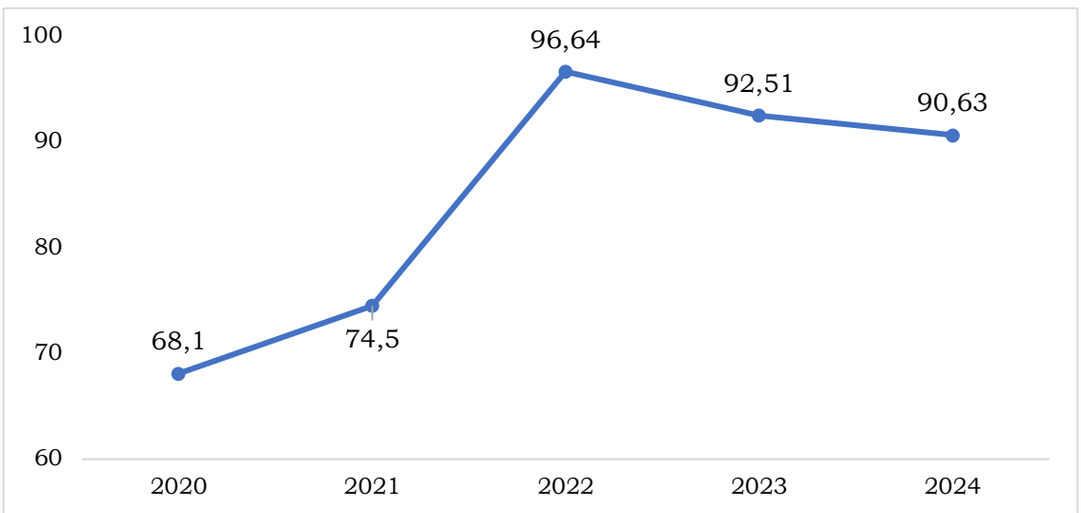


	2020	2021	2022	2023	2024
TK	83,57	95,01	92,31	96,45	97,54
SD	92,78	99,11	97,91	99,37	99,75
SMP	92,6	99,15	97,1	99,26	99,62

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, 2024

Grafik 2.56. Persentase Guru yang Layak Mengajar di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (%)

Persentase guru ASN yang memenuhi kualifikasi pendidikan terakhir S1/D4 yang bersertifikat pendidikan di Kabupaten Sleman baru mencapai 75,38% pada tahun 2024. Pemenuhan guru bersertifikasi juga belum optimal karena sangat bergantung pada kuota yang disediakan oleh pemerintah. Sementara itu guru yang layak mengajar baik di tingkat PAUD, SD dan SMP belum mencapai 100%, namun telah mengalami peningkatan pada tahun 2024.

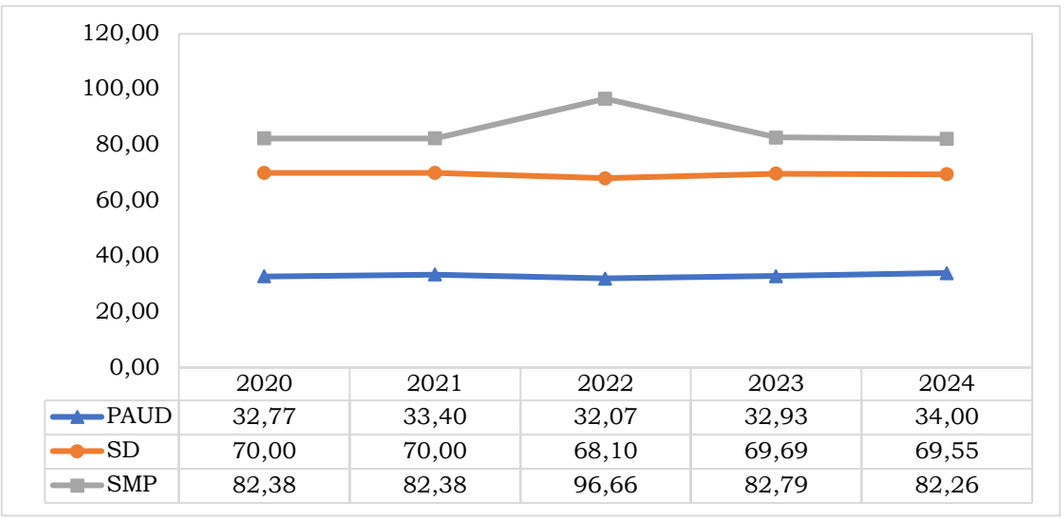


Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, 2025

Grafik 2.57. Persentase Sarana Prasarana PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Sleman dalam Kondisi Baik Tahun 2020-2024 (%)

Sementara itu, kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Sleman belum semua dalam kondisi baik, masih ada sekitar 9,37% yang masih perlu perbaikan. Sarana dan prasarana dalam kondisi baik tahun 2024 mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir.

Dari sisi akreditasi, satuan pendidikan yang memiliki akreditasi A pada tingkat PAUD masih sangat rendah, meskipun meningkat setiap tahunnya. Sedangkan tingkat SD mulai tahun 2022 mengalami penurunan, namun tahun 2024 kembali menurun di angka 69,55%. Sedangkan satuan pendidikan tingkat SMP yang memiliki akreditasi selama tahun terakhir (2020-2024) juga fluktuatif dan tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 82,26%.



	2020	2021	2022	2023	2024
PAUD	32,77	33,40	32,07	32,93	34,00
SD	70,00	70,00	68,10	69,69	69,55
SMP	82,38	82,38	96,66	82,79	82,26

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, 2024

Grafik 2.58. Persentase Satuan Pendidikan PAUD, SD dan SMP Terakreditasi A Tahun 2020-2024 (%)

Dari segi kuantitas, jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Sleman secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas dari pendidikan di Kabupaten Sleman. Selain jumlah sekolah, jumlah siswa juga menunjukkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sleman dimana semakin tinggi angka partisipasi sekolah menunjukkan kualitas dari sumber daya manusia di Kabupaten Sleman. Secara kuantitas gambaran umum sekolah di Kabupaten Sleman pada tahun 2023 disajikan pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel 2.64. Sebaran Sumber Daya Pendidikan Negeri Per Kapanewon Berdasarkan Tingkatannya di Kabupaten Sleman Tahun 2024

No	Kapanewon	Jenis Lembaga Pendidikan Negeri								
		TK	RA	SD	MI	SMP	MTs	SMA	SMK	MA
1	Moyudan	-	-	12	-	2	-	-	-	-
2	Minggir	-	-	12	-	1	-	1	-	-
3	Sayegan	-	-	21	-	1	1	1	1	-
4	Godean	-	-	20	-	3	1	1	2	1
5	Gamping	-	-	24	-	4	-	1	-	-
6	Mlati	-	-	31	1	3	1	1	-	1
7	Depok	1	-	37	-	5	1	1	2	1
8	Berbah	-	-	15	-	3	-	-	-	-
9	Prambanan	-	-	22	-	4	1	1	-	-

No	Kapanewon	Jenis Lembaga Pendidikan Negeri								
		TK	RA	SD	MI	SMP	MTs	SMA	SMK	MA
10	Kalasan	-	-	26	-	4	-	1	1	-
11	Ngemplak	1	-	22	-	2	1	1	-	-
12	Ngaglik	-	-	30	1	4	1	2	-	-
13	Sleman	1	-	29	-	5	1	2	-	-
14	Tempel	-	-	20	-	4	1	1	1	1
15	Turi	-	-	17	-	3	-	1	-	-
16	Pakem	2	-	19	-	4	1	1	-	1
17	Cangkringan	-	-	17	-	2	-	1	1	-
Kabupaten Sleman		**5**	**0**	**374**	**2**	**54**	**10**	**17**	**8**	**5**

Keterangan :
TK : Taman Kanak-Kanak
RA : Roudlatul Athfal
SD : Sekolah Dasar
MI : Madrasah Ibtidaiyah
SMP : Sekolah Menengah Pertama
MTs : Madrasah Tsanawiyah
SMA : Sekolah Menengah Atas
SMK : Sekolah Menengah Kejuruan
MA : Madrasah Aliyah
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2025

Data menunjukkan adanya pemerataan sumber daya pendidikan dengan status negeri, yang berupa sarana dan prasarana per jenis lembaga pendidikan. Secara umum untuk kepentingan pelayanan pendidikan pada tingkat diniyah, dengan menggunakan lembaga pendidikan taman kanak-kanak (TK) dan roudlatul athfal (RA) dengan fasilitas berupa lembaga sekolah ada 5 (lima) lembaga. Penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar tersedia sebanyak 376 lembaga yang terdiri atas 374 SD dan 2 MI. Untuk penyelenggaraan pendidikan menengah pertama ada 69 lembaga, yang terdiri atas 54 SMP dan 10 MTs. Untuk penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah atas terdapat 30 lembaga, yang terdiri atas 17 SMA, 8 SMK dan 5 MA.

Peran penting lembaga pendidikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui adanya fasilitas sarana dan prasarana yang dapat secara mudah dan merata dijangkau oleh masyarakat. Dengan adanya pemerataan sebaran sarana dan prasarana pendidikan ini maka daerah yang di pelosok dapat memperoleh kemudahan untuk memperoleh peluang. Dengan demikian semua wilayah terjangkau layanan dengan baik.

Selain lembaga sekolah dengan status negeri, guna pemerataan pelayanan pendidikan ini juga ada kontribusi dari lembaga sekolah dengan status swasta. Lembaga sekolah swasta tidak kalah penting dalam memberikan sumbangan yang besar untuk memajukan masyarakat. Data berikut ini merupakan jumlah dan sebaran lembaga sekolah swasta di Kabupaten Sleman.

Seperti halnya lembaga sekolah negeri, peran lembaga swasta juga memiliki kontribusi yang sebanding. Lembaga sekolah yang dimaksud mencakup TK, SD, SMP, MTs. SMA dan MA. Jumlah TK swasta sebanyak 509 buah, jauh lebih banyak kontribusinya dibanding TK negeri. Jumlah

SD swasta sebanyak 141 lembaga, lebih sedikit dibanding dengan SD negeri yang berjumlah 374 lembaga.

Tabel 2.65. Sebaran Sumber Daya Pendidikan Swasta Per Kapanewon Berdasarkan Tingkatannya di Kabupaten Sleman Tahun 2024

No	Kapanewon	Jenis Lembaga Pendidikan Swasta							
		TK	SD	MI	SMP	MTs	SMA	SMK	MA
1	Berbah	22	8	1	3	3	2	3	-
2	Cangkringan	18	3	1	3	1	1	1	-
3	Depok	64	14	4	11	4	8	8	-
4	Gamping	47	13	3	5	5	2	4	1
5	Godean	29	11	3	5	0			3
6	Kalasan	46	9	2	4	3	4	2	2
7	Minggir	19	12	0	2	0		1	4
8	Mlati	47	9	2	10	3	6	3	3
9	Moyudan	17	9	1	3	0	1	3	1
10	Ngaglik	48	11	3	5	4	1	3	1
11	Ngemplak	21	4	3	3	2	2	2	1
12	Pakem	16	6	4	4	3	4	4	5
13	Prambanan	26	7	1	4	0	4	2	1
14	Seyegan	18	5	3	2	1		3	-
15	Sleman	30	5	6	4	3	2	4	-
16	Tempel	25	10	4	1	0	1	4	-
17	Turi	16	5	1	3	0		3	1
Kabupaten Sleman		**509**	**141**	**42**	**72**	**32**	**38**	**50**	**23**

Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2025

Untuk pendidikan SMP swasta dengan jumlah 104 lembaga, lebih besar dibanding dengan SMP negeri yang berjumlah 64 lembaga. Adapun pendidikan SMA sederajat yang berstatus swasta sebanyak 111 lembaga, lebih sedikit dibanding lembaga negeri yang berjumlah 30 lembaga.

Berdasarkan data sebaran sumber daya pendidikan di atas, didapatkan bahwa lembaga pendidikan di Kabupaten Sleman sudah cukup lengkap mulai dari sumber daya pendidikan TK hingga fasilitas pendidikan perguruan tinggi. Data BPS tahun 2024 menggambarkan bahwa sumber daya pendidikan di Kabupaten Sleman pada jenjang TK didominasi oleh lembaga pendidikan swasta dengan jumlah terbanyak terdapat di Kapanewon Depok dengan jumlah TK sebanyak 63 lembaga, sedangkan Kapanewon Turi merupakan kapanewon dengan jumlah TK paling sedikit. Pada jenis lembaga pendidikan RA, kapanewon dengan jumlah lembaga pendidikan tersebut terbanyak berada di Kapanewon Ngaglik dan Kapanewon yang tidak terdapat lembaga pendidikan RA adalah Kapanewon Prambanan dan Kapanewon Cangkringan.

Pada jenjang pendidikan SD dan MI, kapanewon dengan jumlah terbanyak terdapat di Kapanewon Depok dan SD swasta terbanyak dengan jumlah 138 lembaga terdapat di Kapanewon Gamping. Sedangkan lembaga pendidikan MI di Kabupaten Sleman berjumlah 39 unit, terbanyak di Kapanewon Sleman sebanyak 6 unit. Untuk kapanewon yang tidak terdapat lembaga pendidikan MI adalah Kapanewon Minggir, Berbah, dan Prambanan namun ketiadaan lembaga pendidikan ini dapat terpenuhi oleh adanya lembaga pendidikan SD.

Jenjang pendidikan SMP di Kabupaten Sleman dengan didominasi SMP negeri, terbanyak di Kapanewon Sleman dan Kapanewon Depok dengan jumlah unit yang sama yaitu 5 unit. Sedangkan untuk lembaga pendidikan SMP swasta, terbanyak berada di Kapanewon Mlati. Sementara lembaga pendidikan SMK terbanyak berada di Kapanewon Depok dengan jumlah 9 lembaga. Kapanewon dengan SMK paling sedikit adalah Kapanewon Minggir dengan hanya 1 unit SMK yang tersedia.

Namun untuk melihat kondisi dan kualitas pendidikan di suatu wilayah bukan hanya melihat dari segi jumlah sumber daya pendidikan saja, namun faktor jumlah siswa dan jumlah guru juga mempengaruhi ketercukupan dan kesiapan dari suatu sumber daya pendidikan. Semakin rendah rasio antara jumlah sumber daya pendidikan dengan jumlah siswa, maka hal ini menjadi perhatian bagi pemangku kepentingan di Kabupaten Sleman untuk dapat memenuhi sumber daya pendidikan. Begitu juga semakin rendah rasio antara jumlah siswa dengan jumlah ketersediaan guru, dimana guru menjadi *vocal point* dari proses pembelajaran. Apabila jumlah guru cukup dalam proses pembelajaran, maka diharapkan proses pembelajaran berjalan lancar.

Dilihat dari perbandingan antara jumlah sekolah dengan jumlah siswa dibedakan antara negeri dan swasta, pada sekolah negeri untuk pendidikan TK adalah 0,01, sedangkan swasta sebesar 0,02. Untuk jenjang pendidikan SD perbandingan antara jumlah sekolah negeri dengan siswa sebesar 0,007, sedangkan pada sekolah swasta sebesar 0,004. Untuk jenjang pendidikan SMP perbandingan antara jumlah sekolah negeri dengan siswa sebesar 0,002, sedangkan pada sekolah swasta sebesar 0,004. Pada jenjang MTs berstatus negeri memiliki perbandingan antara jumlah sekolah dengan siswa adalah 0,002 dan swasta sebesar 0,005. Untuk jenjang SMA berstatus negeri memiliki perbandingan jumlah sekolah dengan siswa sebesar 0,006 sedangkan sekolah swasta sebesar 0,061. Sekolah MA memiliki perbandingan antara jumlah sekolah dengan siswa sebesar 0,002, sedangkan MA swasta sebesar 0,006.

Berikut ini adalah tabel yang berisi hasil analisis dari penjabaran tersebut.

Tabel 2.66. Perbandingan Jumlah Lembaga Pendidikan, Siswa dan Guru di Kabupaten Sleman Tahun 2024

No	Jenis Lembaga	Jumlah Lembaga		Jumlah Siswa		Jumlah Guru		Perbandingan Jumlah Sekolah dengan Jumlah Siswa		Perbandingan Siswa dengan Jumlah Guru	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	5	507	552	25674	37	1575	0,01	0,02	0,07	0,06
2	Raudatul Athfal (RA)	0	72	0	3143	0	168	0,00	0,02	0,00	0,05
3	Sekolah Dasar (SD)	374	137	54492	30526	3398	1655	0,01	0,00	0,06	0,05
4	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	42	2	864	7657	41	613	0,05	0,00	0,05	0,08
5	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	54	72	24140	16081	1344	996	0,00	0,00	0,06	0,06
6	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	10	32	4730	6248	996	724	0,00	0,01	0,21	0,12
7	Sekolah Menengah Atas (SMA)	17	36	9834	6426	549	466	0,00	0,01	0,06	0,07
8	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	8	50	10290	12083	584	913	0,00	0,00	0,06	0,08
9	Madrasah Aliyah (MA)	8	50	10290	12083	584	913	0,00	0,00	0,06	0,08

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2025

Perbandingan antara jumlah guru dengan siswa menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan. Guru merupakan tenaga pendidikan yang akan menjadi pelaku utama Pendidikan. Guru memiliki peranan sangat strategis dalam memberikan pembelajaran kepada siswa. TK negeri memiliki perbandingan guru dan siswa sebesar 0,07, sedangkan di swasta mencapai 0,06. Begitu juga dengan tingkatan SD, SMP dan SMA, perbandingan guru dan siswa tidak begitu berbeda dengan TK.

Hasil dari kesimpulan analisis pada tabel di atas, rata–rata jumlah sumber daya pendidikan terhadap jumlah siswa yang bersekolah cenderung masih rendah. TK swasta mempunyai nilai perbandingan jumlah sumber daya Pendidikan tertinggi di Kabupaten Sleman, disbanding sumber daya Pendidikan lainnya. Sementara untuk nilai perbandingan ketersediaan jumlah guru terhadap jumlah murid di Kabupaten Sleman cenderung masih rendah juga, hanya guru pada jenjang pendidikan TK dan MA swasta dengan nilai tinggi dimana hal ini ditunjukkan dengan proporsi jumlah guru yang cenderung lebih cukup untuk melayani pembelajaran pada jenjang pendidikan tersebut.

B. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya penyediaan pelayanan kesehatan yang merata, mudah dan murah. Oleh karena itu, beberapa indikator digunakan dalam analisis guna melihat perkembangan kondisi kesehatan disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.67. Capaian Indikator Urusan Kesehatan di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup)	4,43	3,71	4,91	5,67	6,44
2	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	995,6	996,3	995,1	994,33	993,56
3	Angka kematian balita (per 1.000 kelahiran hidup)	4,89	4,28	5,75	6,67	6,86
4	Angka Kematian Neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	3,42	3,15	4,25	4,17	4,58
5	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	62,17	363,4	91,61	58,39	67,79
6	Rasio posyandu per satuan balita	27,61	30,83	25,78	23,54	29,19
7	Rasio puskesmas, poliklinik, puskesmas pembantu (pustu) per satuan penduduk	0,2	0,21	0,24	0,25	0,25
8	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02
9	Rasio dokter per satuan per satuan penduduk	1,49	2,2	1,94	1,38	1
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1,79	3,18	3,17	2,60	2.43
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	100	100	100	100	100
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	99,99	99,99	91,96	99,97	99,97
13	Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)* (%)	100	100	100	100	100
14	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100
15	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (%)	79,35	97,99	97,69	104,88	97,71

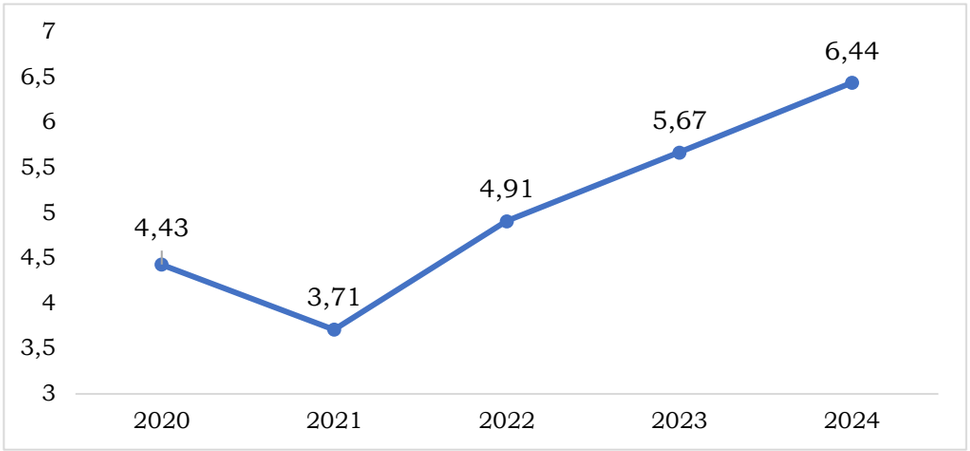
No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
16	Non polio AFP *rate* (per 100.000 penduduk)	0	2,17	3,9	3,65	9,24
17	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	33,73	11,72	31,8	90,13	80,05
18	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit tuberkulosis basil tahan asam (TBC BTA) (%)	37,91	35,94	61,01	91,04	96,33
19	Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	71,86	84,15	161,29	211,84	221,58
20	Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	3.611	1,288	0,734	8,538	11,461
21	Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program *directly observed treatment shortcourse* (DOTS)	37,91	35,94	61,01	91,04	96,33
22	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam Program DOTS (%)	87,21	56,4	58,7	42,81	43,22
23	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit demam berdarah dengue (DBD) (%)	100	100	100	100	100
24	Penderita diare yang ditangani (%)	69,13	11,92	24,15	31,65	37,15
25	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi (%)	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
26	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	100	100	100	100	100
27	Cakupan kunjungan bayi (%)	74,76	71,77	86,18	89,56	89,99
28	Cakupan puskesmas (%)	147,06	147,06	147,06	147,06	147,06
29	Cakupan puskesmas pembantu (%)	81,4	80,23	80,23	81,40	81,40
30	Cakupan kunjungan ibu hamil kunjungan antenatal ke-4 (K4) (%)	97,91	99,06	87,27	98,53	99,64
31	Cakupan pelayanan nifas (%)	95,55	96,47	97,49	95,41	99,98
32	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	100	100	100	100	100
33	Cakupan pelayanan anak balita (%)	72,2	71,47	83,41	76,42	97,14
34	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin (%)	98,85	99,44	99,4	100	96,32
35	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	42,2	55,69	90,02	98,91	99,69
36	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	100	100	100	100	100
37	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)	100	100	100	100	100
38	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)	100	100	100	100	100
39	Angka Harapan Hidup	74,81	74,92	75	75,26	75,48
40	Persentase balita gizi buruk (%)	0,54	0,65	0,95	0,90	0,88
41	Persentase balita gizi kurang (%)	5,98	6,37	7,78	7,80	8,34
42	Cakupan desa siaga aktif (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Bappeda Kabupaten Sleman, 2025

1. Angka Kematian Bayi

   Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1.000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Angka ini merupakan indikator yang penting yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua dari bayi tersebut tinggal dan

sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua dari bayi tersebut. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Pada tahun 2024, terdapat 76 kasus kematian bayi. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Sleman selama 5 (lima) tahun dari tahun 2020-2024 di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 2025

Grafik 2.59. Angka Kematian Bayi Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

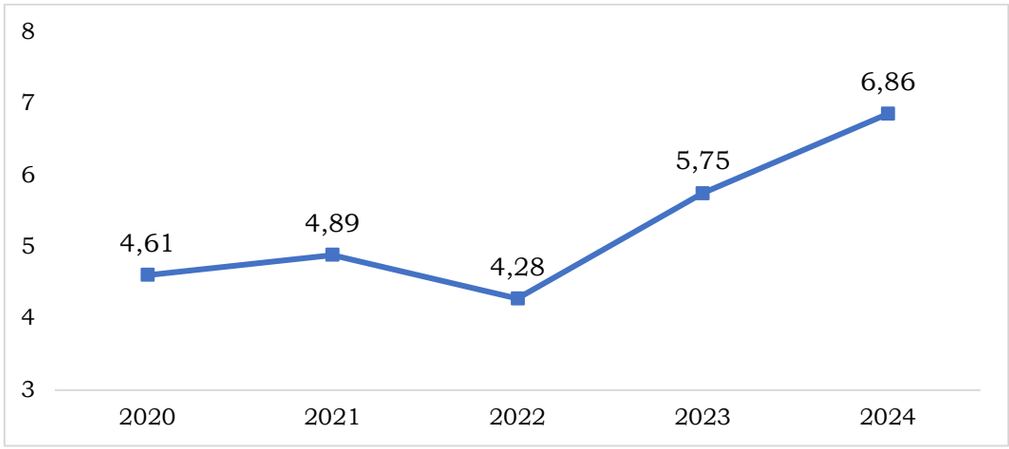
Berdasarkan grafik di atas mulai tahun 2022-2024, AKB terus mengalami peningkatan. Kenaikan angka kematian bayi tahun 2024 disebabkan prematur dan bayi berat lahir rendah (BBLR), kelainan kongenital, asfiksia, infeksi, kelainan cardiovaskular dan respiratori, pneumonia, diare, meningitis dan penyakit lainnya. Selain karena kondisi bayi itu sendiri, kondisi obstetri jelek (memiliki riwayat abortus), *screening* faktor risiko kehamilan yang tidak optimal, serta usia ibu di atas 45 tahun meningkat juga berpengaruh terhadap kondisi bayi. Terhadap ketiga faktor tersebut diambil kebijakan mengoptimalkan KIE pada sasaran usia remaja selain untuk mencegah pernikahan dini juga untuk mengedukasi dampak aborsi, mengoptimalkan *screening* faktor risiko kehamilan dan jemput bola pemeriksaan rutin kepada ibu hamil, dan memberikan edukasi terkait usia produktif dan risiko kehamilan di atas 45 tahun.

2. Angka Kematian Balita

Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal, termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka kematian balita kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk. Jumlah kematian balita pada tahun 2023 sebanyak 80 balita dari 11.988 kelahiran hidup jadi angka kematian balita sebesar 5,75 per 1.000 kelahiran hidup. Sementara pada tahun 2024 angka kematian balita sebesar 6,86 dengan 81 kasus kematian balita. Angka kematian balita di Kabupaten Sleman tahun 2020 sampai dengan 2024 dijelaskan pada grafik di bawah.

Yang dilakukan oleh Kabupaten Sleman untuk menurunkan Angka Kematian Balita antara lain menjalankan upaya promotif kesehatan reproduksi pada remaja, untuk menurunkan resiko kehamilan tidak diinginkan yang menjadi salah satu determinan angka kematian bayi;

menjalankan program preventif melalui USG gratis 2 kali selama masa kehamilan untuk deteksi dini kelainan kongenital pada janin yang menjadi salah satu penyebab kematian bayi di Kabupaten Sleman; pembangunan jejaring rujukan horisontal (dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) swasta ke puskesmas) dan vertikal (FKTP ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL)) utk menangani kasus-kasus kehamilan resiko tinggi; serta melakukan pembinaan berupa supervisi ke fasyankes dengan beban persalinan tinggi bersama ahli untuk audit *standard operating procedure* (SOP) dan alur rujukan.

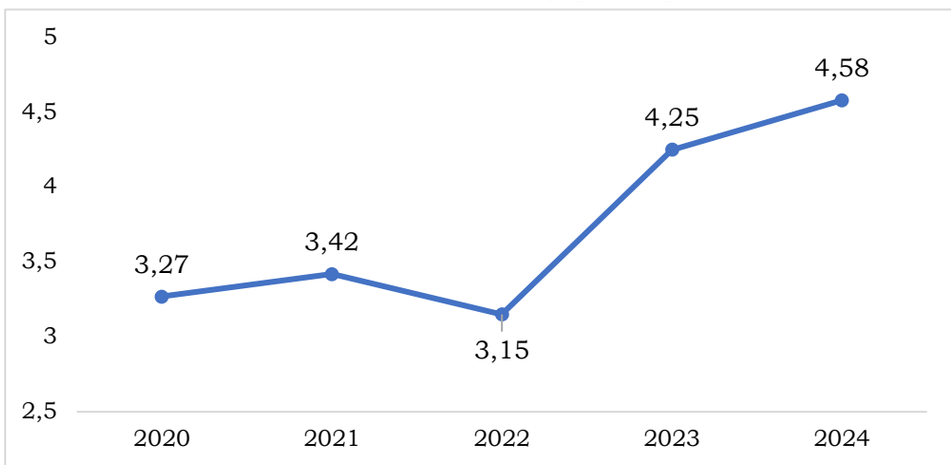


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 2025

Grafik 2.60. Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

3. Angka Kematian Neonatal

Kematian neonatal adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan pengaruh lingkungan luar (dinyatakan dengan per 1.000 kelahiran hidup). Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup selama enam tahun terakhir (2020-2024) cukup fluktuatif. Pada tahun 2022 turun, kemudian mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perkembangan Angka Kematian Neonatal di Kabupaten Sleman selama lima tahun terakhir tersaji pada grafik berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 2024

Grafik 2.61. Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup Tahun 2020-2024

Angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup selama enam tahun terakhir (2020-2024) cukup fluktuatif. Pada tahun 2022 turun, kemudian mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2023 jumlah kematian neonatal mengalami penurunan sebanyak 1 (satu) kasus dibandingkan tahun 2022 sebanyak 51 kasus. Meskipun terjadi penurunan angka kematian neonatal pada tahun 2023, tetapi angka kematian neonatal masih cukup tinggi yang merupakan dampak dari kenaikan ibu hamil dengan riwayat pre-eklamsia dan hipertensi yang naik di tahun 2023 dan Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD). Dan pada tahun 2024 angka kematian neonatal di Kabupaten Sleman mencapai 4,58 per 1.000 kelahiran hidup dengan 54 kasus kematian neonatus.

4. Angka Kematian Ibu
   Kematian ibu adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan pengaruh lingkungan luar (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

   Angka Kematian Ibu meningkat menjadi 67,69 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024 atau 8 kasus kematian hidup dari 11.801 kelahiran hidup. Kematian bayi dan ibu ini lebih disebabkan adanya peningkatan ibu hamil dengan riwayat pre-eklamsia dan hipertensi serta kehamilan tidak diinginkan (KTD). Permasalahan kesehatan ibu dan bayi yang terlambat tertangani menimbulkan kematian sehingga menyebabkan derajat kesehatan di Kabupaten Sleman belum baik.

5. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

   a. Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani

      Tatalaksana pneumonia balita merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap balita sakit. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan cakupan program infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) dan menurunkan angka kematian karena pneumonia. Capaian Program Pencegahan dan Pengendalian (P2) ISPA dari tahun 2023 sebesar 90,13% (1.981 kasus dari target 2.198 kasus) naik dari capaian tahun 2022 yaitu 31,80%. Namun pada tahun 2024, turun kembali menjadi 80,05%

      Beberapa hal yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan pengendalian ini yaitu kolaborasi pelayanan di puskesmas, baik upaya Kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM), serta peningkatan peran jejaring wilayah puskesmas baik rumah sakit, dokter praktik mandiri (DPM), klinik serta balai pengobatan yang lain. Namun dibalik tingginya capaian program, ada kendala dalam program ISPA yaitu rendahnya kapasitas petugas dalam deteksi dini kasus, sistem pelaporan yang belum optimal, keterbatasan dana serta tingginya rotasi petugas.

   b. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

      Tuberkulosis (TB) masih merupakan masalah utama kesehatan No. sebagai urutan No. 2 dunia setelah India. Capaian temuan semua kasus (*case detection rate* (CDR), %) tahun 2023 sebesar 2.357 kasus dari target sebesar 2.589 kasus (91,04%). Cakupan ini dihitung dari semua kasus TB (bukan hanya kasus BTA positif) dibagi target estimasi kasus pada tahun 2023 adalah 2.589. Walau demikian angka

ini masih jauh dari angka sesuai target estimasi Nasional (2.877) untuk Kabupaten Sleman. Pada tahun 2024, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit tuberkulosis basil tahan asam meningkat menjadi 96,33%.

Walaupun capaian bila berdasar target kinerja naik, upaya dengan pendekatan *screening* secara virtual menggunakan ceklis "AKSI PERJAKA 2M" tetap ditingkatkan sebagai upaya penjaringan dan *screening* batuk di tempat-tempat berisiko, untuk menjaring suspek TB di tempat-tempat berisiko, seperti perusahaan, perguruan tinggi, sekolah, pondok pesantren, lembaga pemasyarakatan (lapas) dan masyarakat. Selain itu juga kerja sama dengan Zero TB di Kabupaten Sleman meningkatkan penemuan terduga maupun kasus TB di Kabupaten Sleman serta adanya program SIKAT TB yang sedang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Sleman dengan dukungan dari APBD.

c. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis

Tingkat prevalensi tuberkulosis adalah jumlah kasus TBC (baru dan lama) dibagi jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama dikali 100.000 penduduk. Pada tahun 2024 prevalensi kasus TB di Kabupaten Sleman sebesar 221,58%, meningkat dari capaian tahun 2023 yang sebesar 211,84%.

Hal ini disebabkan karena penemuan kasus secara aktif masif dan pasif intensif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes). Aktif masif melalui program SIKAT TB yang berkolaborasi dengan berbagai lintas sektor, serta pasien intensif dengan melaksanakan skrining bagi masyarakat yang datang berkunjung ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes).

d. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis

Tingkat kematian tuberkulosis yaitu jumlah pasien tbc yang meninggal dibagi jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama dikali 100.0000. Tahun 2023 jumlah pasien TBC yang meninggal sebanyak 95 pasien (8,538%). Ini meningkat dari tahun 2022 yaitu sebesar 0,734% dikarenakan banyak pasien TBC mempunyai penyakit penyerta, seperti diabetes melitus (DM), HIV, jantung, dan penyakit kronis yang lain. Tahun 2022 data kematian akibat TB pada pasien yang pengobatan di fasilitas kesehatan di luar puskesmas (rumah sakit, klinik, DPM) sebanyak 41 orang. Dan tahun 2024, meningkat kembali menjadi 11,461 per 100.000 penduduk.

e. Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi dalam Program DOTS

DOTS (*Directly Observed Treatment, Short-course*) adalah pengawasan langsung pengobatan jangka pendek pasien TB. Proporsi jumlah kasus TBC yang terdeteksi dalam program DOTS yaitu jumlah pasien TB yang mendapatkan pengobatan DOTS dibagi jumlah pasien TBC yang diperkirakan ada di wilayah tertentu dalam kurun waktu yang sama. Tahun 2024 ini proporsi jumlah kasus TBC yang terdeteksi sebanyak 96,33%, lebih banyak dari pada kasus tahun 2023 sebanyak 91,04%. Hal ini disebabkan karena penemuan kasus secara aktif masif dan pasif intensif di fasyankes. Aktif masif melalui program

SIKAT TB yang berkolaborasi dengan berbagai lintas sektor, serta pasien intensif dengan melaksanakan skrining bagi masyarakat yang datang berkunjung ke fasyankes.

f. Proporsi kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS

Hasil capaian kesembuhan (*cure rate*) tahun 2024 adalah 43,22%. Capaian ini di bawah target nasional 90,00%. Hal ini dikarenakan beberapa pasien TB bakteriologis tidak melakukan pemeriksaan *follow up* di bulan ke-2, satu bulan sebelum akhir pengobatan dan akhir pengobatan. Serta beberapa faskes, seperti DPM, klinik dan rumah sakit belum bisa melakukan pemeriksan mikroskopis TB karena keterbatasan sumber daya manusia dan tempat.

Namun meskipun demikian, keberhasilan pengobatan tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang ikut menjadi petugas PMO (Pengawas Menelan Obat) seperti Kader Sinergi, Kader Puskesmas yang dilakukan bimbingan teknis oleh masing-masing puskesmas wilayah, dan selalu mensosialisasi kan tentang penyakit tuberkulosis dan penanganannya. Pada tahun 2023, Kabupaten Sleman juga menganggarkan hadiah bagi pasien yang sembuh sebanyak 125 reward yang diberikan berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 potong pajak bagi setiap pasien sembuh, harapannya akan semakin meningkatkan angka kesembuhan TBC.

g. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Keberhasilan Pengendalian dan penanggulangan demam berdarah dengue (DBD) dilihat dari keberhasilan tercapainya indikator DBD yaitu *inciden rate* (IR), yaitu 10 per 100.000 penduduk; *case fatality rate* (CFR), yaitu ≤ 1,00%; serta penanganan kasus 100,00%. Cakupan kasus DBD yang ditemukan tahun 2023 sejumlah 146 kasus dengan 1 kematian serta CFR 0,7 % dan IR ≤10/100.000 (1,46/ 100.000) penduduk, terjadi penurunan kasus dari 330 kasus dibandingkan tahun 2022 menjadi 146 kasus pada tahun 2023 (44,24%), dengan kematian 1 kasus sebagai kasus impor dan komorbit. Penanganan kasus DBD 100,00% tertangani. Namun pada tahun 2024 meningkat drastis menjadi 675 kasus DBD dengan 2 kasus kematian. Dilihat dari kasus per kapanewon pada tahun 2024, kapanewon tertinggi dengan kasus DBD adalah Kapanewon Depok dengan 67 kasus dan Kapanewon Prambanan 64 kasus.

Peningkatan kasus DBD pada tahun 2024 ini sebagai dampak dari perubahan iklim adanya dampak dari El Nino dimana dengan adanya peningakatan suhu dan siklus mengisap nyamuk (siklus gonotropik) kemampuan penularan (*vectorial capacity*), Disamping itu juga mobilitas dari penduduk yang datang dari daerah kasus BDB yang tinggi. Keberadaan tehnologi wolbachia di Kabupaten Sleman mampu mengendalikan kasus DBD dengan tidak adanya penularan di daerah fokus (100-200 dari kasus) selama 2 kali masa inkubasi (2 minggu).

h. Penderita diare yang ditangani

Penderita diare yang ditangani sesuai standar di Kabupaten Sleman pada tahun 2024 sebesar 37,15%, masih terbilang rendah, meskipun meningkat dari tahun 2023 yang mencapai 31,65%.

Faktor utama penyebab rendahnya cakupan program diare adalah belum optimalnya pencatatan pelaporan (*underreporting*) yang dipengaruhi oleh sistem pelaporan yang belum optimal. Belum ada mekanisme laporan dari RS dan fasilitas kesehatan jejaring untuk melaporkan kasus diare yang ditemukan.

i. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi

Prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Sleman tahun 2023 masih 0,02%, dengan jumlah kasus ditemukan sebanyak 237 kasus HIV baru (meningkat 81 kasus dibandingkan tahun 2022). Pada tahun 2024 ditemukan 214 kasus HIV dan 25 AIDS. Upaya *fast track* pada program HIV dengan segera memberikan akses pengobatan setelah ditemukan dalam upaya mendukung 3 zero (*zero new infection, zero AIDS- related deaths, zero stigma*). Upaya ini didukung dengan 16 layanan yang mampu melakukan perawatan dukungan dan pengobatan HIV yang terdapat di 12 puskemas dan 4 rumah sakit, yaitu Puskemas Berbah, Puskemas Depok 3, Puskemas Ngemplak 1, Puskemas Cangkringan, Puskemas Pakem, Puskemas Ngaglik 2, Puskemas Mlati 1, Puskemas Mlati 2, Puskesmas Sleman, Puskemas Tempel 1, Puskemas Gamping 2, Puskemas Godean 1, RSUD Sleman, RSUD Prambanan, RSA UGM, dan RSUP dr. Sardjito.

6. Imunisasi

a. Cakupan Desa / Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan imunisasi suatu desa dalam upaya menilai kualitas imunisasi. Penilaian yang dilakukan pada tingkat desa diharapkan mendapat hasil imunisasi lengkap mencapai hasil yang tinggi dan merata. Suatu desa dikatakan UCI jika hasil Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) mencapai 80,00% untuk target nasional dan 95,00% untuk target DIY.

Secara Nasional capaian UCI di Sleman sudah mencapai 100,00%, dari 86 kalurahan secara keseluruhan sudah mencapai IDL di atas 80,00%. Upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Sleman untuk mencapai target desa UCI adalah dengan meningkatkan kemampuan bagi petugas melalui bimtek, melakukan sosialisasi kepada puskesmas dan faskes, melakukan koordinasi lintas sector, melakukan monev secara berkala, serta evaluasi laporan tiap bulan.

b. Persentase Anak Usia 1 Tahun yang diimunisasi Campak

Imunisasi terakhir pada masa bayi adalah pemberian imunisasi campak. Imunisasi ini diberikan pada usia 9 bulan. Jika anak sudah mendapatkan imunisasi campak secara tidak langsung sudah mendapatkan imunisasi lengkap yang diperoleh anak baru lahir sampai usia 9 bulan. Imunisai yang diperoleh bayi baru lahir sampai 9 bulan meliputi HB0, BCG, DPT, IPV, dan MR atau Campak Rubela. Hasil imunisasi campak di Kabupaten Sleman sejak tahun 2021 sudah di atas target nasional yaitu 95%. Faktor yang mendukung keberhasilan ini adalah kecukupan anggaran kegiatan, sumber daya manusia di faskes baik pemerintah dan swasta tidak ada kekurangan, ketersediaan vaksin dan logistik yang memadai, serta antusiasme masyarakat dan kader dalam mendukung kegiatan imunisasi.

c. Non Polio AFP rate

Acute Flaccid Paralysis (AFP) atau biasa dikenal dengan Lumpuh Layuh merupakan merupakan kelumpuhan yang sifatnya lemas, terjadi mendadak dalam 1-14 hari dan bukan disebabkan trauma yang dialami oleh anak usia <15 tahun. Penemuan kasus AFP merupakan indikator keberhasilan *surveilans* AFP. Indikator kinerja *surveilans* AFP nasional adalah 2 per 100.000 penduduk usia.

Surveilans AFP merupakan pengamatan yang dilakukan terhadap semua kasus lumpuh layu akut atau AFP pada anak usia <15 tahun yang merupakan kelompok rentan atau suspek terhadap penyakit polio. Hasil kinerja *surveilans* AFP tahun 2024 menunjukkan AFP rate 9,24, sudah di atas target Nasional maupun target DIY. Meskipun demikian, masih terdapat puskesmas yang belum menemukan kasus dan ada puskesmas yang menemukan kasus AFP lebih dari 1. Sebagian besar penemuan kasus AFP (sekitar 60%) masih ditemukan di rumah sakit. Penemuan kasus AFP merupakan salah satu indikator keberhasilan *surveilans* polio.

7. Ketersediaan Tenaga Medis

a. Rasio Tenaga Medis Dokter per Penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk merupakan perbandingan ideal antara jumlah ketersediaan dokter dibanding jumlah penduduk. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia mengatur bahwa target dokter per satuan penduduk adalah 1 : 2.200. Data profil SDMK tahun 2024 di Kabupaten Sleman terdapat jumlah dokter umum sebanyak 1.539 orang dengan jumlah penduduk sebanyak 1.112.616 jiwa, sehingga hasil perhitungan rasio dokter per 1000 penduduk diperoleh 1,38.

b. Rasio Tenaga Medis per Penduduk

Tenaga medis terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik No. Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, tidak terdapat target untuk tenaga medis. Target yang ada adalah dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, bidan, dan perawat.

Pada tahun 2024, terdapat 1.239 orang dokter umum, 571 orang dokter gigi, 1.120 orang dokter spesialis, 221 orang dokter spesialis gigi, 947 orang bidan dan 4.551 orang perawat.

8. Rasio Pelayanan Fasilitas Kesehatan

a. Cakupan Puskesmas

Cakupan puskesmas adalah jumlah puskesmas dibandingkan dengan jumlah kapanewon yang ada. Kabupaten Sleman memiliki 25 puskesmas dengan jumlah 17 kapanewon. Beberapa kapanewon memiliki lebih dari satu puskesmas, seperti Kapanewon Depok (3 Puskesmas), Kapanewon Gamping, Godean, Tempel, Ngaglik, Ngemplak, dan Mlati masing-masing memiliki 2 puskesmas, sehingga capaian cakupan puskesmas lebih dari 147,06%. Capaian tersebut diharapkan pelayanan kesehatan khususnya puskesmas bisa dirasakan secara merata.

b. Cakupan Pembantu Puskesmas

Kabupaten Sleman memiliki 25 Puskesmas di 17 Kecamatan dan 70 Pembantu Puskesmas yang tersebar di 86 Desa. Cakupan pembantu puskesmas adalah jumlah pembantu puskesmas dibagi dengan jumlah desa yang ada di Kabupaten Sleman tercapai 81,40%, dimana ada 16 Desa yang tidak memiliki Pembantu Puskesmas tetapi terdapat Puskesmas. Dengan demikian di setiap desa sudah memiliki fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat memfasilitasi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

c. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Cakupan balita mendapat pelayanan sesuai standar (SPM Balita) di kabupaten Sleman pada tahun 2024 mencapai 97,14%, lebih tinggi dari cakupan balita tahun 2023 mencapai 76,42%. Angka ini didapatkan dari jumlah balita yang mendapat pelayanan sesuai standar dibagi jumlah balita sasaran estimasi. Faktor yang mendukung peningkatan cakupan antara lain adanya kebijakan tertulis berupa Surat Edaran Kementerian Kesehatan tentang Kegiatan Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Balita, serta meningkatnya peran lintas sektor dalam program inovasi Gerakan Ajak Menimbang Cegah dan Atasi *"Stunting"* (Gambang *"Stunting"*).

d. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita

Jumlah posyandu pada tahun 2024 sebanyak 1.534 unit yang terdiri dari posyandu mandiri, posyandu purnama, dan posyandu madya. balita di Kabupaten Sleman tahun 2043 mencapai 52.546 balita yang yang dihitung dari jumlah sasaran balita yang mendapat pelayanan sesuai standar (12-59 bulan) ditambah dengan sasaran bayi lahir hidup. Berdasarkan hal tersebut, rasio posyandu per satuan balita tahun 2024 adalah 34,25.

Adanya peningkatan rasio posyandu per satuan balita dari tahun ke tahun menjadi tantangan tersendiri, sehingga dibutuhkan upaya dari berbagai lintas program. Adanya Peraturan Bupati Nomor 44.2 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dimana posyandu menjadi salah satu bagiannya, menguatkan kembali kelembagaan posyandu ditingkat desa/kalurahan.

e. Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per Satuan Penduduk

Puskesmas di Kabupaten Sleman berjumlah 25 (dua puluh lima), yang terdiri dari 10 puskesmas dengan tempat perawatan dan 15 puskesmas perawatan. Jumlah penduduk di Kabupaten Sleman sebanyak 1.168.471 jiwa pada tahun 2024 (sesuai dengan proyeksi BPS). Rasio jumlah penduduk dengan jumlah puskesmas 1:30.000 berdasarkan Profil Kesehatan dari Kementerian Kesehatan. Rasio jumlah penduduk dengan jumlah puskesmas di Kabupaten Sleman sebesar 38,95, dibutuhkan 39 puskesmas. Masih ada perbedaan jumlah puskesmas dengan hasil perbandingan rasio jumlah penduduk dengan jumlah puskesmas berdasarkan referensi dari Profil Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Dari aplikasi ASPAK, bahwa pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan tahun 2024 mencapai rata-rata 78,98%, dari target minimal 60%. Untuk pemenuhan ASPAK klinik belum bisa dilaporkan karena penerapan belum bisa maksimal. Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama (FKTP), yang memberikan pelayanan kepada masyarakat selain puskesmas ada juga klinik pratama. Di Kabupaten Sleman sudah ada 37 klinik pratama yang bekerja sama dengan BPJS. Sehingga dengan adanya jumlah puskesmas yang belum memenuhi rasio dengan jumlah penduduk akses pelayanan bisa dari FKTP selain puskesmas.

f. Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Persebaran rumah sakit di setiap kecamatan dan ketersediaan tempat tidur (TT) di 11 kapanewon yang tersedia rumah sakit telah memenuhi rasio tempat tidur dengan jumlah penduduk. Kapanewon Ngaglik belum terpenuhi rasio jumlah tempat tidur yang tersedia di rumah sakit dengan jumlah penduduk sehingga memungkinkan untuk penambahan fasilitas rumah sakit. Sedangkan di Kapanewon Turi, Kapanewon Tempel, Kapanewon Cangkringan, Kapanewon Moyudan dan Kapanewon Godean belum tersedia rumah sakit. Pedoman Penyusunan Rencana Induk (masterplan) Rumah Sakit Kementerian Kesehatan tahun 2012 menyebutkan bahwa rasio kebutuhan tempat tidur untuk 1.000 penduduk yaitu minimal 1 TT : 1.000 penduduk. Adapun jumlah tempat tidur rumah sakit pada tahun 2024 sebanyak 3.477 TT.

g. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin mencapai 100%. Upaya yang sudah dilakukan selain dengan meningkatkan cakupan jaminan kesehatan masyarakat dan melaksanakan sosialisasi jaminan kesehatan kepada masyarakat, juga melalui koordinasi lintas program dan lintas sektor

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Pekerjaan Umum

Bidang pekerjaan umum adalah bidang yang penting untuk bisa menjadi pendukung bagi seluruh kegiatan lain. Indikator bidang pekerjaan umum di Kabupaten Sleman dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya jalan, drainase, saluran irigasi dan penyediaan air minum. Berikut adalah analisis terhadap capaian indikator urusan pekerjaan umum dengan tahun data 2020 hingga 2024.

Tabel 2.68. Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang Jalan (km)					
	a. Jalan Nasional	61,66	61,66	61,66	82,76	82,76
	b. Jalan Propinsi	138,43	138,43	138,43	122,55	122,55

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	c. Jalan Kabupaten	699,50	699,50	699,50	699,50	699,50
	d. Panjang jalan lingkungan/Poros desa	2.046,50	2.046,50	2.046,50	2.046,50	2046,50
2	Kondisi Jalan Kabupaten (km)	699,50	699,50	699,50	699,50	699,50
	a. Baik	460,30	436,05	274,00	184,30	199,90
	b. Sedang	155,85	195,80	327,80	390,70	337,75
	c. Rusak	83,35	67,65	97,70	124,50	161,85
3	Proporsi Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik	0,5706	0,5811	0,5524	0,5202	0,4808
4	Rasio Panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,000648	0,000643	0,000642	0,000633	0,000625
5	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)	88,08	90,33	86,03	82,20	76,86
6	Panjang Drainase (km)	212,92	214,62	222,24	226,50	230,77
	a. Baik (m)	137.402,00	145.887,89	161.675,89	159.192,56	165.420,76
	b. Sedang (m)	58.712,00	51.046,24	42.110,89	48.230,21	45.545,87
	c. Rusak (m)	16.802,83	17.682,70	18.448,37	19.080,04	19.803,49
7	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	64,53	67,98	72,75	70,28	71,68
8	Panjang Saluran Irigasi (m)	655.590,21	655.590,21	655.590,21	655.590,21	655.590,21
9	Kondisi Saluran Irigasi (m)					
	a. Baik	325.417	467.816,26	504.708,26	532.955,26	541.884,06
	b. Sedang	94.489	130.656,95	106.359,95	86.665,95	84.659,15
	c. Rusak	16.293	58.97,00	44.522,00	35.969,00	29.047,00
10	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	69,89	71,36	76,99	81,29	82,66
11	Rasio jaringan irigasi	n/a	0,418	0,329	0,331	0,335
12	Persentase penduduk berakses air minum (%)	100	100	100	100	100
13	Persentase jumlah rumah tangga yg mendapatkan akses terhadap air minum melalui jaringan perpipaan terhadap jumlah rumah tangga di seluruh kabupaten (%)	21,53	20,60	21,41	23,50	23,63
14	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	20,36	20,67	24,66	26,15	29,34

Sumber: DPUPKP Kabupaten Sleman, 2025

Data jaringan jalan di tingkat nasional dan provinsi yang berada di Kabupaten Sleman mengalami perubahan bukan karena penambahan ataupun pengurangan jalan, tapi lebih kepada adanya *update* pemetaan dan perhitungan jaringan jalan serta pengalihan kewenangan sesuai

Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 367 Tahun 2023 tentang Ruas Jalan Nasional dan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi. Adapun perubahan SK untuk status jalan kabupaten masih dalam proses. Jalan yang berstatus jalan kabupaten di wilayah Kabupaten Sleman sepanjang 699,5 km. Pada tahun 2024, jalan kabupaten dengan kondisi mantap adalah 76,86% dari total panjang jalan kabupaten. Jalan dengan kondisi rusak ringan banyak di kawasan perkotaan. Jalan dengan kondisi rusak berat diindikasikan dipengaruhi oleh banyaknya kendaraan yang *Over Dimensi Over Load* (ODOL) selain juga memang usia jaringan jalan mendekati masa perbaikan. Beban pelayanan jalan juga meningkat karena banyaknya peningkatan kendaraan pribadi.

Panjang drainase di Kabupaten Sleman hanya sepanjang sekitar 226,5 km sehingga belum mencakup seluruh jaringan jalan. Drainase dengan kondisi baik tercatat sebesar 71,68%, dengan tren tahun 2020-2024 yang terus meningkat meski sempat menurun pada tahun 2023. Drainase dan irigasi masih tercampur pada beberapa lokasi. Kondisi drainase di lapangan pada beberapa lokasi masih menyisakan genangan dan aliran permukaan yang belum tertampung ketika terjadi cuaca ekstrem. Kondisi ini dipengaruhi belum komprehensifnya penataan jaringan drainase sehingga penanganan drainase sering tidak dipertimbangkan secara kontinu. Permasalahan drainase lainnya adalah masih menurunnya kinerja drainase, baik karena sedimentasi, kurangnya pengawasan sehingga drainase ditutup, hingga terhambatnya jaringan drainase karena persampahan.

Di sektor irigasi, panjang jaringan irigasi dengan kondisi baik terus meningkat dari 325 km atau 69,89% pada tahun 2020 menjadi 542 km pada tahun 2024 atau mencapai 82,66,% dari total panjang jaringan irigasi. Rekapitulasi panjang total jaringan irigasi tidak meningkat sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 menandakan tidak adanya penambahan jaringan baru. Adapun rasio jaringan irigasi menurun dari 0,418 pada tahun 2021 menjadi 0,335 pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa setiap hektar lahan pertanian didukung oleh 335 meter jaringan irigasi. Kinerja yang baik ini masih perlu dilengkapi dengan penanganan kinerja yang masih terbatas pada air yang mengalir pada irigasi. Kondisi irigasi di Kabupaten Sleman masih terbatas karena adanya kendala pada kondisi bendungan dan kualitas konstruksi irigasi yang semakin menurun sehingga debit irigasi cenderung berkurang.

Untuk memastikan operasi dan pemeliharaan dapat terus berjalan dan menekan angka kerusakan irigasi, strategi yang dapat ditempuh adalah meningkatkan pengaturan tata kelola air dengan mengatur pasokan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) pada musim kemarau (musim tanam April-September) maupun penghujan (musim tanam Oktober-November) sehingga kapasitas debit air optimal, dengan mengoptimalkan pemanfaatan pintu air dan bangunan pelengkap lainnya. Untuk mengembalikan fungsi saluran dilakukan rehabilitasi saluran irigasi yang rusak.

Kemudian di sektor air minum, persentase penduduk berakses air minum di Sleman saat ini sebesar 100%, dengan akses layak sebesar 98%. Akses perpipaan baru sebesar 23,63% pada tahun 2024. Akses perpipaan ini

juga masih terus dikembangkan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) sebagai salah satu layanan infrastruktur perkotaan, dan system penyediaan air minum (SPAM) perpipaan Non-PDAM (SPAM berbasis masyarakat) sebagai upaya menuju air minum layak di pedesaan.

Pada RPJMD periode ini terdapat indicator kinerja kunci urusan pekerjaan umum, yaitu persentase layanan infrastruktur yang merupakan komposit dari capaian program di urusan pekerjaan umum. Pada tahun 2024, persentase layanan infrastruktur mencapai 83,24%.

2. Penataan Ruang

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan urusan tata ruang memiliki dinamika yang cukup unik karena memang dalam perjalanannya, karena terjadi banyak perubahan aturan, baik bersifat nasional maupun provinsi. Proses pertanahan mengalami dinamika karena terjadinya kendala proses implementasi. Berdasarkan perubahan dasar hukum penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 16 Tahun 2018 menjadi Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021, sebagai turunan Undang-Undang Cipta Kerja, penyusunan rencana tata ruang rinci atau Rencana Detail Tata Ruang yang telah selesai disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2017, saat ini dilaksanakan pengelompokan per tipologi kawasan di Kabupaten Sleman.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, rencana tata ruang terdiri dari rencana umum dan rencana rinci. Kabupaten Sleman telah menetapkan rencana umum, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041.

Berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 32.7/Kep.KDH/A/2019 tentang Pembagian Wilayah Kabupaten Sleman, maka telah dilakukan pembagian Kabupaten Sleman ke dalam empat (4) kawasan yang terbagi sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Pembagian ini dilakukan dalam rangka efisiensi dan efektifitas serta agar penetapan rencana rinci tata ruang dapat terlaksana dengan optimal. Empat (4) kawasan RDTR tersebut, yaitu:

a. Rencana Detail Tata Ruang Sleman Timur (Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2021) yang meliputi Kapanewon:
   1) Prambanan
   2) Kalasan
   3) Berbah
   4) Ngemplak
b. Rencana Detail Tata Ruang Sleman Barat (Peraturan Bupati Sleman Nomor 57 tahun 2021) yang meliputi Kapanewon:
   1) Minggir
   2) Moyudan
   3) Seyegan
   4) Godean
c. Rencana Detail Tata Ruang Sleman Tengah (Peraturan Bupati Sleman Nomor 80 tahun 2023) yang meliputi Kapanewon:
   1) Depok

2) Mlati
3) Ngaglik
4) Sleman
5) Gamping

d. Rencana Detail Tata Ruang Sleman Utara masih dalam proses persiapan pembahasan lintas sektor untuk memperoleh persetujuan substansi dari Kementerian ATR/BPN. Wilayah dalam RDTR ini meliputi Kapanewon:
1) Pakem
2) Cangkringan
3) Turi
4) Tempel

Kinerja urusan penataan ruang dinilai melalui indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang. Indikator ini memberikan gambaran, seberapa banyak pemanfaatan ruang yang sudah terwujud sesuai dengan rencana tata ruang. Dan pada tahun 2024, persentase kesesuaian pemanfaatan ruang mencapai 86,33%.

Kendala yang ditemukan dalam penyelenggaraan penataan ruang adalah masih banyaknya pelanggaran pemanfaatan ruang, atau pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana. Berdasarkan data perwujudan pola ruang, masih terdapat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai seluas 2.544,9 Ha yang terbagi menjadi 1.014,58 hektar pada kawasan lindung dan 1.530,32 Ha pada kawasan budidaya. Adapun hasil identifikasi pelanggaran pemanfaatan ruang yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya, tahun 2023, teridentifikasi 27 titik pelanggaran pemanfaatan ruang, yang terdapat di Satuan Ruang Strategis (SRS) Candi Prambanan dan SRS Gunung Merapi. Adapun sebanyak 14 lokasi sudah ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Sleman dengan hasil berupa Berita Acara Tinjau lokasi yang sebagian besar kegiatannya merupakan rumah tinggal, dan sudah dilakukan pembinaan untuk segera memohonkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Adapun sebanyak 8 lokasi sudah ditindaklanjuti oleh Pemda DIY melalui DPTR DIY sesuai dengan kewenangannya, dan 6 titik lokasi tidak ditindaklanjuti karena sudah memiliki perizinan tata ruang.

Adanya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sedikit banyak diakibatkan belum memadainya pemahaman masyarakat terhadap dokumen rencana tata ruang, atau penataan ruang secara umum. Terhadap pelanggaran tersebut, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dilaksanakan komunikasi dan sosialisasi dalam rangka pembinaan terhadap masyarakat yang melakukan pemanfaatan ruang. Upaya komunikasi dengan masyarakat dan pengawasan lapangan ini perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk terus menangkap dan merespon dinamika yang ada agar tercipta penyelenggaraan penataan ruang yang baik.

D. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam RPJMD ini, terdapat indikator kinerja kunci baru, yaitu persentase rumah tidak layak huni (RTLH) dan kawasan kumuh yang tertangani, yang rumusnya rata-rata dari kedua komponen tersebut. Pada tahun 2024, indikator tersebut mencapai 41,76%. Indikator bidang pekerjaan umum

terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Sleman dapat dilihat melalui analisa dari beberapa capaian dari sejumlah indikator berikut di bawah ini.

Tabel 2.69. Capaian Indikator Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	96,42	96,83	97,29	97,68	97,70
2	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)	98,37	71,17	75,28	78,82	79,02
3	Persentase kawasan kumuh yang tertangani (%)	82,52	8,85	8,85	32,90	41,22
4	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	0,23	0,70	0,70	0,60	0,47
5	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana sarana umum (PSU) (%)	99,93	99,61	99,61	99,80	99,84

Sumber: DPUPKP Kabupaten Sleman, 2025

Tren cakupan ketersediaan rumah layak huni cenderung naik meskipun tidak signifikan dan pada tahun 2024 mencapai 97,70%. Sementara cakupan rumah layak huni yang terjangkau cenderung menurun drastis sebesar 20%, namun dengan tren yang meningkat. Hal ini karena adanya perubahan kriteria dari rumah layak huni dan terjangkau.

Permasalahan terkait dengan RTLH adalah bahwa penanganan RTLH dengan partisipasi/swadaya masyarakat hanya dapat menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang masih mampu berswadaya, sedangkan masyarakat miskin yang rumahnya tidak layak huni tetapi tidak memiliki kemampuan swadaya justru tidak tertangani. Data RTLH bersifat dinamis karena bergantung kepada kondisi ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat (DTKS). Selain itu juga dipengaruhi oleh tuntutan kemampuan berswadaya, yang mempengaruhi database by name by addres (BNBA) yang ditetapkan, dan perkembangan di lapangan.

Tabel 2.70. Data Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024

Tahun	Jumlah RTLH (Unit)	RTLH Tertangani Tahun n (Unit)	RTLH Tertangani s.d Tahun n (Unit)	RTLH Belum Tertangani (Unit	Persentase Penanganan RTLH (%)	Persentase RTLH Belum Tertangani (%)
2021	10.656	918	918	9.738	8,61	91,39
2022	9.738	1.387	2.305	8.351	21,63	78,37
2023	8.351	1.194	3.499	7.157	32,84	67,16
2024	7.157	1.009	4.508	6.148	42,30	57,70

Sumber: DPUPKP Kabupaten Sleman, 2025

Di sektor penanganan kumuh, persentase kawasan kumuh tertangani menurun namun masih belum tuntas. Masih terdapat kawasan batas dan *buffer* dari deliniasi kawasan kumuh yang berpotensi menjadi kumuh. Di samping itu, masih terdapat kawasan kumuh yang belum teridentifikasi dan belum mendapat penanganan. Kawasan kumuh ini umumnya berlokasi di lahan-lahan pinggir sungai dan beberapa telah direlokasi ke rumah susun di beberapa titik lokasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 93.3/Kep.KDH/A/2020, jumlah luasan kawasan kumuh adalah 96,61 Ha. Pada tahun 2021, sebagian kawasan kumuh telah ditangani APBN melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) seluas 8,55 Ha sehingga tersisa 88,06 Ha. Pada tahun 2022 dilakukan pendataan ulang luasan kawasan kumuh yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 83.2/Kep.KDH/A/2022 seluas 86,2 Ha. Adapun luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan pada tahun 2023 mencapai 0,70% sama seperti tahun sebelumnya 2022 mencapai 0,70%.

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU di Kabupaten Sleman tahun 2020 sebesar 99,93%. Pada tahun 2024 angka ini turun menjadi 99,84%. Masih terdapat 7 kalurahan dengan prasarana dan sarana dasar permukiman kurang dari 80%. Kondisi ini akan terus bergerak mengingat perkembangan kawasan perkotaan di Sleman yang cukup pesat sehingga meningkat pula kawasan permukiman.

E. Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Keamanan, ketertiban, dan stabilitas sosial politik suatu daerah adalah prasyarat penting untuk menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menarik tenaga kerja berkualitas, dan mencegah konflik serta kerusuhan. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga dan meningkatkan ketiga aspek ini sangat penting bagi perkembangan dan kesejahteraan suatu daerah. Pemerintah dan berbagai instansi terkait harus bekerja sama secara efektif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan stabil, yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dan kemakmuran bagi semua pihak.

Berdasarkan analisis data di Subbab Daya Saing Investasi terlihat bahwa keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sleman belum kondusif, bahkan pada tahun 2024 angka kejahatan mencapai 418 per 100.000 penduduk (*crime rate*) meningkat. Namun, kejahatan jalanan di Kabupaten Sleman pada tahun 2024 mengalami penurunan dari 31 menjadi 18 kasus. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk menciptakan kondisi yang tenteram, aman dan tertib.

Iklim daerah yang kondusif diciptakan salah satunya melalui pembinaan politik daerah dan pembinaan terhadap lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan organisasi kepemudaan. Fungsi deteksi dini, cegah dini dan lapor cepat perlu dibangun tidak hanya di komunitas intelijen tetapi juga tiap individu masyarakat. Sehingga kepercayaan publik terhadap jaminan keamanan pemerintah meningkat. Cakupan pengendalian gangguan ketenteraman, ketertiban, penegakan perda dan peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat selama lima tahun terakhir (2020-2024) cenderung fluktuatif. Tahun 2020-2022 capaian indikator tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan, namun tahun 2023 kembali mengalami peningkatan dan mencapai 79,27% pada tahun 2024. Hal ini disebabkan karena masih adanya kasus kejahatan di Kabupaten Sleman, masih adanya pelanggaran peraturan daerah (perda) dan peraturan bupati (perbup), serta keterbatasan kapasitas petugas perlindungan masyarakat linmas. Kasus aduan pelanggaran keamanan dan ketertiban yang dilaporkan sebanyak 30 kasus dan telah dapat tertangani semuanya oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman.

Pelanggaran perda dan perbup masih sering terjadi di Kabupaten Sleman. Pelanggaran ini didominasi oleh pelanggaran perizinan tempat usaha, pertambangan pasir ilegal, prostitusi berkedok salon spa, reklame ilegal, pemondokan (kos) tidak berizin serta penjualan minuman keras tidak berizin. Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten Sleman yang harus ditegakkan atau memuat sanksi sebanyak 19 perda/perkada dan baru 10 perda/perkada yang dapat ditegakkan.

Di satu sisi kapasitas petugas perlindungan masyarakat Kabupaten Sleman baik dari kuantitas maupun kualitas masih terbatas. Cakupan petugas linmas dalam tiga tahun terakhir ini masih stabil di angka 0,98. Artinya belum setiap rukun tetangga (RT) memiliki anggota Linmas. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 dimandatkan setiap 1 RT memiliki 1 anggota linmas. Secara ideal sesuai peraturan tersebut Kabupaten Sleman membutuhkan linmas sebanyak 7.414 personil, sedangkan saat ini baru berjumlah 7.117 personil.

Dari sisi kualitas, anggota linmas yang telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas tahun 2024 baru mencapai 69,39%, artinya belum semua anggota linmas mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas. Jumah anggota polisi pamong praja di Kabupaten Sleman pada saat ini berjumlah 177 orang, secara ideal sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan, jumlah polisi pamong praja sebanyak 251 orang. Artinya personil polisi pamong praja juga masih terbatas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

Sementara itu terkait penanganan kebakaran di Kabupaten Sleman masih perlu ditingkatkan. Tingkat waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran lima tahun terakhir) cenderung fluktuatif. Tingkat waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran pada tahun 2024 (85,71%) lebih tinggi dari tahun 2023 (83,44%), belum mencapai 100%. Apabila lokasi kebakaran berada di WMK, *response time* masih dapat terpenuhi. Namun jika lokasi kejadian kebakaran di luar WMK (minimal radius 7,5 km dari Posko Induk dan Posko Godean tidak akan dapat memenuhi waktu tanggap kurang dari 15 menit. Kondisi jalan dan *traffic* yang padat, penutupan ruas jalan utama, dan akses jalan yang sempit dapat menghambat laju dari kecepatan mobil pemadam kebakaran (damkar). Sementara mobil pemadam kebakaran yang dimiliki oleh Kabupaten Sleman semuanya berukuran atau berkapasitas besar, sehingga apabila jalan sempit tidak dapat mendekat ke lokasi kebakaran. Di sisi lain kemampuan personil damkar masih terbatas karena kurangnya pelatihan atau peningkatan kapasitas personil damkar terkait pelaksanaan tugas di lapangan, khususnya untuk personil yang berstatus sebagai tenaga non aparatur sipil negara (non ASN). Berikut capaian kinerja indikator ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten Sleman dari tahun 2020-2024.

Tabel 2.71. Capaian Indikator Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan (%)	100	100	100	100	100

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	Persentase anggota perlindungan masyarakat (linmas) yang telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas (%)	N/A	26	42	52	69,39
3	Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) (%)	95	89,66	91,8	83,44	85,71
4	Cakupan petugas linmas (%)	1,12	1,12	0,98	0,98	0,98
5	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)	36,08	36,08	36,08	36,08	36,08

Sumber: Satpol PP Kabupaten Sleman, BPPD Kabupaten Sleman, 2024

Ketenteraman masyarakat juga dapat tercipta dengan memastikan berbagai kejadian bencana dan kebakaran di Sleman dapat tertangani dengan baik. Berdasarkan analisis di Subbab Kerawanan Bencana dan Indeks Risiko Bencana, terlihat bahwa Kabupaten Sleman merupakan wilayah yang rawan bencana. Hal ini yang menyebabkan Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Sleman relatif tinggi. Walaupun tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih pada angka 73,35. Perkembangan data kebencanaan di Kabupaten Sleman tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.72. Perkembangan Data Kebencanaan di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah desa rawan bencana	86	86	86	86	86
2	Jumlah penanggulangan bencana (kejadian)	149	133	208	91	118
	a. Gempa Bumi	1			4	1
	b. Banjir	18	11	22	3	15
	c. Banjir lahan hujan	2	4	6	0	1
	d. Tanah longsor	56	38	94	50	38
	e. Angin kencang	70	78	73	33	59
	f. Petir	2	2	10	1	3
	g. Kekeringan			1	1	1
3	Jumlah korban jiwa akibat bencana	12				9
	a. Banjir	10				
	b. Tanah longsor			5		1
	c. Angin kencang	2		6		8
	d. Petir		1	1		
4	Jumah gladi lapang penanggulangan bencana	174	182	198	210	217
5	Desa tangguh bencana (desa)	62	69	71	81	86
6	Satuan pendidikan aman bencana (unit)	72	73	87	81	91
7	Barak pengungsian	12	12	12	12	12
8	Jumlah komunitas relawan	58	62	70	70	73
9	Jumlah relawan teregistrasi	2.362	2.512	2.889	2.972	3.110
10	Jumlah relawan tercover BPJS	0	732	732	1.732	1981
11	*Early warning system* (EWS) tanah longsor	3	3	3	3	3
12	EWS lahar hujan	15	15	15	15	15

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
13	EWS erupsi Merapi	19	19	19	19	19

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman, 2024

Berbagai kegiatan penguatan kapasitas risiko kebencanaan dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman melalui penguatan desa tangguh bencana, gladi lapang penanggulangan bencana dan penguatan komunitas relawan. Selama beberapa tahun terakhir (2020-2024), seluruh sumber daya pendukung untuk pengelolaan risiko kebencanaan di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan meliputi desa tangguh bencana, satuan pendidikan aman bencana, komunitas relawan, relawan teregistrasi serta adanya *early warning system* (EWS) tanah longsor, lahar hujan dan erupsi merapi.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk meningkatkan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Upaya tersebut melibatkan berbagai stakeholder termasuk partisipasi masyarakat untuk menjaga lingkungan masing-masing agar tercipta kondisi yang tenteram, aman dan tertib, antara lain:

1. Mengefektifkan patroli wilayah (Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat);
2. Melakukan operasi penanganan kerawanan khususnya di daerah yang rawan terjadinya kejahatan jalanan dan mengantisipasi kejahatan jalanan;
3. Melakukan operasi vandalisme atau antisipasi tawuran pelajar terutama pada jam-jam sekolah atau di tempat-tempat yang dijadikan tempat berkumpul pelajar;
4. Memberikan edukasi tentang kantrantibum dan penggeledahan tas untuk antisipasi tawuran antar siswa dan kejahatan jalanan;
5. Peningkatan Kapasitas anggota linmas dan peremajaan anggota linmas untuk memenuhi rasio 1 RT 1 anggota linmas;
6. Penambahan 2 WMK di wilayah Kapanewon Depok dan Prambanan;
7. Peningkatan kapasitas petugas pemadam kebakaran; serta
8. Pembentukan dan penguatan peran relawan damkar.

F. Sosial

Pelayanan urusan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, Pemerlu Penyandang Kesejahtaeraan Sosial (PPKS), perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, Karang Taruna, Lansia dan Anak sekolah. PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung. Menurut Kementerian Sosial, PPKS terdiri dari 26 jenis. Jenis PPKS komunitas adat terpencil tidak ada di Kabupaten Sleman, namun menambahkan jenis PPKS anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan (KTK) atau diperlakukan salah dan keluarga bermasalah sosial psikologis.

Perkembangan PPKS Kabupaten Sleman selama lima tahun terakhir ini (2020-2024) cukup fluktuatif, ada yang menurun namun ada juga yang meningkat. Berdasarkan data PPKS Kabupaten Sleman, terdapat 5 jenis PPKS yang mengalami kenaikan pada tahun 2024 yaitu anak balita terlantar, Bekas Warga Binaan lembaga Permasyarakatan (BWBLP), dan pemulung. Sementara itu dari segi jumlah, PPKS tertinggi di Kabupaten Sleman adalah lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas.

Tabel 2.73. Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Sleman 2020-2024 (Orang)

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Anak dengan bantuan hukum	NA	64	NA	NA	NA
2	Anak balita terlantar	141	116	279	33	51
3	Anak terlantar	2.377	2.294	1.984	1.648	1.391
4	Anak jalanan	12	11	112	9	4
5	Anak dengan kedisabilitasan	592	583	695	984	718
6	Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan / diperlakukan salah	4	0	48	5	4
7	Anak memerlukan perlindungan khusus	NA	NA	NA	NA	NA
8	Lanjut usia terlantar	7.466	6.969	6.691	7.345	7.092
9	Penyandang disabilitas	6.891	6.579	6.855	6.826	6.353
10	Tuna Susila	66	130	50	25	14
11	Gelandangan	26	19	22	14	9
12	Pengemis	23	18	17	11	8
13	Pemulung	90	86	97	82	83
14	Kelompok minoritas	NA	NA	NA	NA	NA
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	12	8	36	45	52
16	Korban penyalahgunaan napza/KPN	171	131	103	92	1
17	Korban tindak kekerasan	169	153	108	97	84
18	Pekerja migran bermasalah sosial	103	95	76	49	48
19	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	NA	1446	NA	NA	NA
20	Korban bencana alam	210	NA	NA	NA	NA
21	Korban bencana sosial	3301	NA	NA	NA	NA
22	Keluarga bermasalah sosial psikologis	1387	1282	1095	996	793
23	Fakir miskin	134815	176026	NA	186063	NA
24	Korban *trafficking*	NA	NA	NA	NA	1819
25	PRSE	2652	2647	2920	3034	n/a

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sleman, 2024

Pemerintah Kabupaten Sleman telah berupaya mengurangi PPKS melalui berbagai inisiatif seperti pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, dan pendampingan terhadap kelompok rentan seperti anak panti asuhan, penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan, dan lansia rawan sosial.

Gelandangan dan pengemis di Sleman merupakan salah satu penyakit sosial yang berkembang di Sleman dikarenakan adanya potensi Sleman merupakan wilayah tujuan wisata dan pendidikan, Sleman mempunyai wilayah yang berbatasan dengan provinsi Jawa Tengah. Dalam menyikapi gelandangan pengemis Kabupaten Sleman melaksanakan upaya preventif, koersif, rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Upaya preventif meliputi penyuluhan atau kampanye ketahanan keluarga kepada masyarakat. Upaya koersif meliputi penjangkauan atau evakuasi gelandangan, pengemis ke pelayanan sosial/RPS. Upaya rehabilitatif meliputi upaya identifikasi diri gelandangan

dan pengemis. Adapun upaya reintegrasi sosial meliputi pengembalian kepada keluarga dan atau masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi sebagai masyarakat pada umumnya. Untuk mengantisipasi gelandangan, pengemis dari luar Sleman, selalu berupaya melakukan koordinasi yang aktif antar jejaring penjangkauan dan penanganan terutama di wilayah yang berbatasan dengan luar Sleman, sehingga kontrol masuknya gelandangan dan pengemis dapat diminimalisir. Capaian kinerja pemerintah Kabupaten Sleman dalam penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintah bidang sosial selama 3 tahun ini tergambar dari capaian kinerja indikator di bawah ini.

Tabel 2.74. Capaian Indikator Urusan Sosial Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024

No	Indikator	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Persentase PSKS yang aktif (%)	85,23	85,40	89,98	90,57
2	Persentase fasilitasi pemulangan warga negara migran Indonesia korban tindak kekerasan (%)	NA	NA	100	100
4	Persentase pelayanan rujukan terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	100	100	100	100
5	Persentase keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan sosial (%)	93,90	98,10	95,6	99,98
6	Persentase pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	100	100	100	100
7	Jumlah kampung siaga yang terbentuk (kampung)	100	100	20	29
8	Cakupan pengelolaan Tetenger/Monumen/Tempat Sejarah (%)	100	100	100	100
9	Cakupan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat) yang mendapatkan perlindungan sosial dan jaminan sosial (%)	NA	85,40	84,19	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sleman, 2024

Tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan sosial ini adalah masih adanya persoalan terkait intoleransi, kekerasan terhadap perempuan dan anak, konflik antar kelompok, penderita HIV AIDS, hiburan malam, prostitusi, ketimpangan digital, LGBT dan kelompok marjinal lainnya. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, terjadi tren peningkatan jumlah kelompok ini. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas upaya pemerintah dalam mengurangi PPKS.

2.1.4.6.2 Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu elemen terpenting dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara atau daerah. Mereka memainkan peran sentral dalam produksi, inovasi, dan konsumsi, yang semuanya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Perkembangan pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Produktivitas yang tinggi berimplikasi pada peningkatan *output* ekonomi dan pengurangan angka pengangguran. Penduduk yang diperhitungkan dalam dunia kerja dan faktor produksi adalah penduduk usia kerja yaitu penduduk usia 15 tahun ke atas.

Berdasarkan aktivitasnya, penduduk usia kerja dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja.

Kelompok bukan angkatan kerja terdiri atas penduduk yang masih bersekolah, penduduk yang mengurus rumah tangga dan penduduk penerima pendapatan. Angkatan kerja dibagi menjadi dua kelompok, yaitu angkatan kerja yang bekerja dan angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja yang tidak bekerja ini yang disebut sebagai pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dan partisipasi angkatan kerja merupakan sebagian indikator ketenagakerjaan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK dapat digunakan untuk melihat potensi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari persediaan tenaga kerja untuk memproduksi *labour supply* barang dan jasa. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. Capaian kedua indikator ini telah dijelaskan di subbab sebelumnya.

Pelaksanaan pelayanan urusan ketenagakerjaan diarahkan sebagai upaya untuk pengurangan pengangguran dan penyediaan kesempatan kerja yang luas bagi pencari kerja. Pemerintah daerah menyediakan Sumber Daya Pendidikan dan pelatihan kerja secara gratis siap kerja serta membuka akses terhadap dunia kerja secara lebih luas. Selain itu, penyediaan sarana prasarana pendukung berkembangnya usaha-usaha baru kreatif untuk mendorong semakin terbukanya lapangan kerja baru. Pelaksanaan urusan ketenagakerjaan juga diarahkan untuk melindungi tenaga kerja maupun perusahaan sehingga tercipta suasana kondusif di lingkungan kerja.

Berdasarkan data dari dinas tenaga kerja, capaian kinerja pelayanan urusan bidang tenaga kerja selama lima tahun terakhir (2020-2024) menunjukkan fluktuasi. Tren positif terlihat dalam hal perlindungan sosial (peserta program Jamsostek) dan peningkatan penempatan pekerja, sementara indikator lain seperti penyelesaian sengketa atau pelatihan cukup variatif mempertimbangkan terjadinya pandemi dan berbagai faktor eksternal.

Tabel 2.75. Capaian Indikator Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (kasus)	39	28	18	34	38
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama/PB (%)	53,85	12,00	44,44	50,00	44,73
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	67,94	63,31	71,61	81,74	82,5
4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	54,94	80,13	86,60	90,30	86,60
5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	66,13	29,63	66,13	35,92	216,67
6	Persentase peserta yang mendapatkan pekerjaan pasca pelatihan (%)	NA	27,94	61,94	62,36	63,01
7	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (di dalam dan	NA	63,31	71,00	81,74	82,5

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten (%)					
8	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (%)	NA	23,8	21,11	18,26	24,6
9	Persentase ketersediaan bahan pengambil kebijakan urusan ketenagakerjaan (%)	NA	100	100	100	100

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Sleman, 2024

Angka sengketa pengusaha-pekerja dengan fluktuasi jumlah kasus sengketa antara pengusaha dan pekerja dari tahun ke tahun. Jumlah kasus sengketa selama lima tahun terakhir memiliki rata-rata 28 kasus dengan jumlah kasus paling sedikit adalah pada tahun 2022 yaitu sebanyak 18 kasus, sedangkan jumlah kasus tertinggi terdapat pada tahun 2020 sebanyak 39 kasus. Persentase kasus yang diselesaikan melalui perjanjian bersama jumlahnya cukup variatif setiap tahun. Penyelesaian kasus melalui perjanjian bersama menurun drastis menyentuh angka 12%, dan meningkat lagi pada tahun 2022-2024. Hal tersebut mengindikasikan pilihan penyelesaian dilaksanakan di luar perjanjian bersama.

Sementara itu, pencari kerja terdaftar yang ditempatkan tiap tahunnya bersifat dinamis dengan rata-rata 68% selama lima tahun terakhir. Persentase penempatan tertinggi selama lima tahun terakhir 82,5% pada tahun 2024. Seiring dengan peningkatan penempatan pekerja, besaran pekerja yang mengikuti Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) juga terus mengalami peningkatan. Persentase pekerja yang mengikuti Jamsostek mengalami peningkatan positif selama lima tahun terakhir dimulai pada angka 54,94% pada tahun 2020 sampai mencapai 90,30% pada tahun 2023, namun angka turun menjadi 86,60% pada tahun 2024.

Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan perlindungan sosial bagi pekerja. Jamsostek merupakan fasilitas untuk tenaga kerja dalam rangka memberikan jaminan kesehatan. Hal ini sangat penting, sebab risiko dan paparan ketika kerja memungkinkan kualitas kesehatan seorang tenaga kerja menurun. Yang menjadi hak tenaga kerja adalah untuk dapat diberikan pemeriksaan secara berkala, dan pengobatan yang diperlukan. Jika banyak tenaga kerja yang belum memiliki Jamsostek maka akan timbul masalah atas beban kesehatan. Untuk itu merupakan permasalahan yang penting untuk diusahakan dapat segera terpenuhi.

Hubungan yang baik antara pengusaha dan pekerja di internal perusahaan akan menimbulkan ketenangan yang akan berimbas pada peningkatan produktivitas perusahaan. Hubungan baik tersebut dapat ditingkatkan dengan cara:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembinaan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan terhadap perusahaan-perusahaan; dan
2. Melakukan pembinaan secara berkesinambungan kepada perusahaan dengan melibatkan seluruh pegawai fungsional di Bidang Tenaga Kerja, yaitu pengawas ketenagakerjaan dan mediator hubungan industrial dan

berkolaborasi dengan semua unsur *stakeholders* hubungan industrial guna mewujudkan hubungan industrial harmonis dan berkeadilan.

Oleh karena itu, perlu upaya untuk mempertahankan dan memastikan perusahaan-perusahaan menerapkan praktik-praktik kerja yang sesuai dengan standar tata kelola yang diharapkan. Gambaran kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Sleman selama kurun waktu 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.76. Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk (jiwa)	1.079.916	1.087.339	1.089.365	1.105.415	1.125.571
2	Penduduk usia kerja 15 tahun ke atas	871.640	903.345	860.512	887.183	934.646
	Angkatan kerja (jiwa)	630.583	630.847	626.348	638.346	684.783
	- Bekerja (jiwa)	589.028	587.935	592.259	607.520	656.481
	- Penganggur (jiwa)	41.555	42.912	34.089	30.826	28.302
	Bukan Angkatan Kerja	241.057	272.498	234.164	248.837	249.863
	a. Sekolah (jiwa)	138.431	150.531	131.908	137.448	83.507
	b. Mengurus rumah tangga	50.589	73.143	57.623	63.006	133.012
	c. Menerima pendapatan lainnya	52.037	48.824	44.633	48.383	33.344
	d. Anak	208.276	183.994	228.853	218.232	190.925
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	72,34	69,83	72,79	71,95	73,27
4	Rasio penduduk yang bekerja	93,41	93,20	94,56	95,17	95,86
5	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	0,1	0,1	NA	NA	NA

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman, 2024

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2020, jumlah individu yang bekerja mencapai 589.028 orang, dan pada tahun 2024 bertambah menjadi 656.481 orang. Penduduk yang tidak bekerja juga cukup fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Jumlah individu yang tidak bekerja pada tahun 2020 adalah 41.555 orang, yang mengalami peningkatan saat pandemi, kemudian terus menurun hingga 28.302 orang pada tahun 2024. Tingginya angkatan kerja yang berstatus tidak bekerja menjadi masalah krusial yang penting untuk diatasi. Realitas pencari kerja yang meningkat setiap tahun seiring dengan bertambahnya angkatan kerja membutuhkan ruang usaha yang lebih akomodatif. Kreativitas untuk menciptakan lapangan kerja baru sangat penting. Aspek pekerjaan yang distimulasi dari meluasnya pengaruh teknologi informasi menjadi bagian penting untuk menginspirasi program-program baru dalam pengembangan kesempatan kerja.

Di samping itu, penyerapan tenaga kerja pada sektor formal maupun informal perlu diperluas, sehingga memberikan peluang yang besar. Dari sisi kualitas tenaga kerja juga perlu ditingkatkan agar memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pendidikan, keterampilan menjadi bekal yang mampu memberikan kapasitas tenaga kerja sehingga memiliki peluang yang potensial dalam mengisi formasi kerja pada semua sektor. Kapasitas pemerintah dalam memberikan diklat melalui Balai Pelatihan Kerja dan pemanfaatan teknologi dalam dunia kerja perlu ditingkatkan.

Data bukan angkatan kerja cenderung secara umum menunjukkan peningkatan ketika pandemi pada tahun 2020 dan 2021, tetapi kemudian berhasil mengalami penurunan pada tahun 2022 dan kembali meningkat

seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, dan pada tahun 2024 sebanyak 249.863 jiwa.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah Kabupaten Sleman terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak melalui pembangunan yang menjadikan kesetaraan gender menjadi arus utama. Namun demikian, kesenjangan gender masih terjadi di berbagai sektor pembangunan. Salah satu penyebabnya adalah aspek psikososio-kultural di masyarakat yang masih menganggap derajat laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, saat ini Pemerintah Kabupaten Sleman terus mengoptimalkan kinerja UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Perempuan dan anak merupakan bagian masyarakat yang penting untuk dilindungi dan diberdayakan. Melalui program pemberdayaan, kerentanan sosial yang sering menjadi risiko dalam keluarga dapat diatasi, sehingga perempuan dan anak dapat menjadi eksis di dalam keluarga maupun masyarakat.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. IPG merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana pencapaian pembangunan suatu negara atau daerah dalam mengatasi kesenjangan gender. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Berdasarkan analisis IPG pada sub bab sebelumnya, IPG Kabupaten Sleman lebih tinggi dari IPG DIY dan IPG Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender lebih baik daripada DIY dan Nasional.

Perempuan perlu memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi serta berperan dalam pengambilan keputusan di keluarga maupun masyarakat guna mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat hak asasi manusia. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur dan memahami sejauh mana perempuan memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya serta peran dalam pengambilan keputusan yang dilihat dari tiga dimensi utama yaitu keterlibatan politik, partisipasi ekonomi, dan pengambilan keputusan. Indikator ini membantu menilai apakah perempuan memiliki akses dan kontrol yang sama terhadap sumber daya dan kekuasaan.

Berdasarkan analisis data Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di subbab sebelumnya menunjukkan bahwa IDG Kabupaten Sleman lebih baik dari DIY. Kondisi ini menggambarkan bahwa Sleman lebih berhasil dalam menyediakan akses dan kesempatan yang setara bagi perempuan dalam bidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan. Hal ini mencerminkan upaya yang lebih kuat atau lebih efektif dalam memberdayakan perempuan dan mencapai kesetaraan gender di Kabupaten Sleman. Kinerja pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga tergambar

pada capaian indikator prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan persentase anak korban tertangani yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.77. Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tertangani (%)	NA	100	100	100	100
2	Jumlah kasus perempuan korban kekerasan yang melapor (kasus)	NA	287	253	220	244
3	Persentase anak korban kekerasan tertangani(%)	NA	100	100	100	100
4	Jumlah kasus anak korban kekerasan yang melapor (anak)	NA	66	107	146	134
5	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tertangani (%)	NA	100	100	100	100
6	Jumlah kursi diduduki perempuan di DPR (orang)	13	14	14	14	13
7	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	26	28	28	28	26
8	Rasio KDRT	0,07	0,05	0,06	0,03	0,03
9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100	100	100	100	100
10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS (%)	100	100	100	100	100
11	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100	100	100	100	100
12	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	100	100	100	100	100
13	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	100	100	100	100	100
14	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	100	100	100	100	100
15	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	100	100	100	100	100

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Sleman, 2024

Kinerja prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tertangani di Kabupaten Sleman sudah baik. Capaian ini diperoleh dari kasus perempuan korban kekerasan yang melapor setiap tahunnya, dapat tertangani seluruhnya. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah kasus perempuan korban kekerasan yang dilaporkan pada tahun 2024 cenderung meningkat, sebanyak 244 kasus pada tahun 2024. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait juga mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan data tahun sebelumnya, jumlah anak yang mengalami kasus kekerasan naik lebih dari 2 kali lipat, dari angka 66 anak tahun 2021 menjadi 146 anak pada tahun 2023 dan mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 134 anak.

Hal ini terjadi antara lain karena terungkapnya beberapa kasus kekerasan terhadap anak yang jumlah korbannya cukup massal, seperti kasus yang terjadi di Kapanewon Gamping dan Kalasan pada pertengahan tahun 2023. Sosialisasi "Gerakan Berani *Speak Up*" kepada para korban kekerasan terus digalakkan supaya kasus kekerasan yang terjadi bisa tertangani dengan baik guna meminimalkan dampak buruk bagi para korban kekerasan dengan pendampingan hukum dan psikologis yang intensif.

Indikator lain dalam urusan ini adalah jumlah kursi diduduki perempuan di DPRD tercapai 13 kursi dari 50 jumlah kursi DPRD, sehingga proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD mencapai 26%. Rasio KDRT pada tahun 2024 sebesar 0,03 turun dibandingkan tahun 2020 sebesar 0,0,07. Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dibagi 1.000 rumah tangga. Dalam bingkai gender, KDRT merupakan kekerasan yang dilakukan di dalam lingkup rumah tangga dengan target utama adalah perempuan dan anak-anak. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan KDRT dan telah adanya jejaring dalam penanganan KDRT mendorong masyarakat untuk melakukan aduan. Karena disinyalir, jumlah kasus yang tercatat hanya sebagian dari kejadian riil di lapangan.

C. Pangan

Berbagai upaya dalam urusan ketahanan pangan difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pola konsumsi pangan yang aman beragam, bergizi dan imbang, serta meningkatkan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung ketahanan pangan.

Pada tahun 2024, ketersediaan pangan tersedia sebesar 132.206 ton. Hal ini menunjukkan penurunan dibanding tahun 2022 sebesar 162.239 ton. Penurunan ini terkait dengan kondisi alih fungsi lahan dan beberapa kendala hidrometeorologi serta pemeliharaan jaringan irigasi. Adapun penguatan cadangan pangan Kabupaten Sleman tahun 2022 tercatat terus meningkat hingga 142.832 kg pada tahun 2024.

Selain ketersediaan pangan, indikator lainnya adalah ketersediaan energi per kapita. Pada tahun 2024 tercatat sebesar 2.826 kg/kapita per tahun naik dari tahun sebelumnya yaitu 2.608 kg/kapita per tahun. Meskipun angka tersebut menunjukkan surplus energi per kapita, namun penyediaan sumber-sumber energi perlu tetap dijaga dan ditingkatkan kualitasnya. Ketersediaan protein per kapita cenderung meningkat, pada tahun 2024 tercatat sebesar 85,87 gram/kapita/tahun meningkat dibandingkan tahun 2020 tercatat sebesar 63,00 gram/kapita/tahun. Perkembangan kondisi

pangan Kabupaten Sleman secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.78. Indikator Urusan Pangan Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pola pangan Harapan (PPH)	86,54	90,93	96,6	96,20	95,20
2	Ketersediaan energi per kapita (kalori/kapita/tahun)	2.800	2.828	2.608	2.608	2.826
3	Ketersediaan protein per kapita (gram/kapita /tahun)	63,00	65,10	76,36	81,96	85,87

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman, 2024

D. Pertanahan

Data kinerja pertanahan akan banyak terkait dengan substansi pertanahan yang memang secara aturan keistimewaan yang diselenggarakan di wilayah DIY. Beberapa kinerja ini antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 2.79. Indikator Urusan Pertanahan Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas lahan bersertifikat (m^2)	444.615.088	452,197,303	456.536.843	456.917.107	NA
2	Jumlah sertifikat tanah (buah)	670.331	683.476	694.816	698.721	NA
3	Jumlah kasus terdaftar (kasus)	86	58	82	95	107
4	Jumlah kasus yang terfasilitasi	86	58	82	95	107
	Persentase kasus yang terfasilitasi (%)	100	100	100	100	100
5	Penyelesaian izin lokasi (buah)	11	11	0	0	0

Sumber: DPTR Kabupaten Sleman, 2024

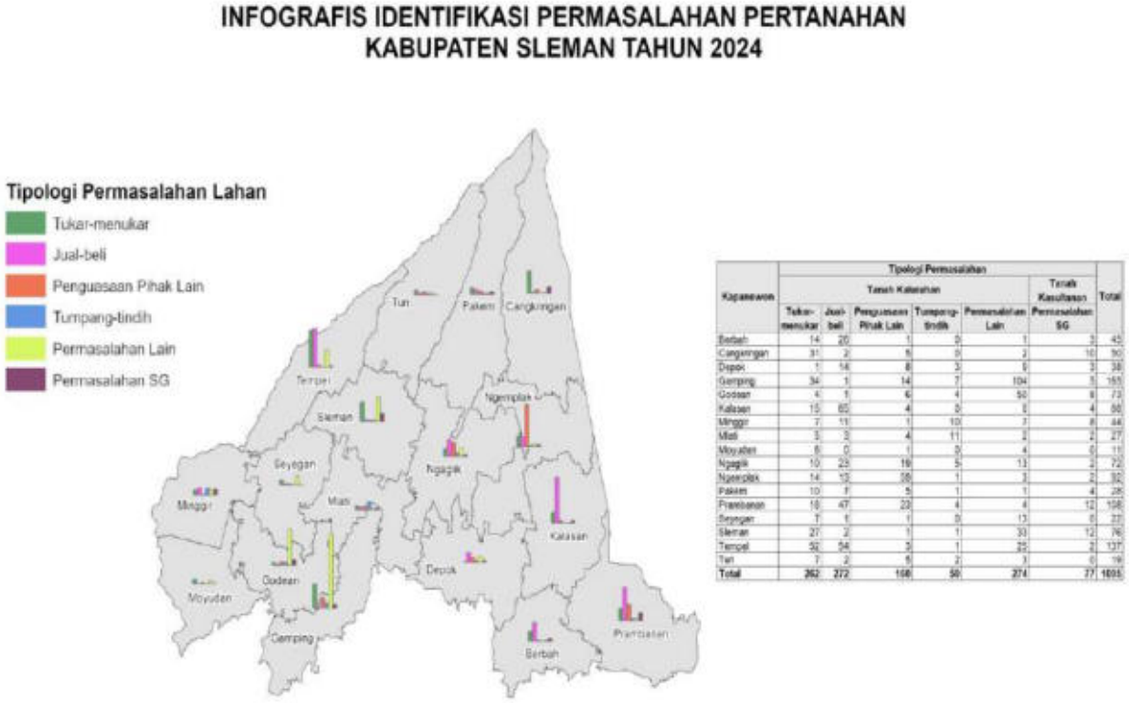
Beberapa indikator di atas beriringan dengan ketugasan dari Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Semakin banyaknya lahan yang bersertifikat akan semakin membantu proses pertanahan dan penataan ruang, termasuk juga dalam proses perizinan. Proses sertifikasi tanah yang sudah mencapai sekitar 80% dari total luasan Kabupaten Sleman diharapkan bisa menjadi dasar proses-proses pemanfaatan tanah. Dari sisi jumlah kasus pertanahan yang terdaftar, jumlah kasus terdaftar semakin meningkat dan pada tahun 2024 sebanyak 107 kasus terdaftar. Berikut adalah tabel dan infografis terkait permasalahaan pertanahan yang terjadi sepanjang tahun 2024 .

Tabel 2.80. Permasalahan Pertanahan di Kabupaten Sleman Tahun 2024

No	Jenis Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Permasalahan Selesai	Permasalahan dalam Proses	Permasalahan Belum Selesai Ditangani
Tanah Desa/ Kalurahan					
1	Tukar Menukar	268	24	70	174
2	Jual Beli	271	0	2	269

No	Jenis Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Permasalahan Selesai	Permasalahan dalam Proses	Permasalahan Belum Selesai Ditangani
3	Penguasaan Oleh Pihak Lain	168	1	5	162
4	Overlap	50	3	7	40
5	Double Sertipikat	8	0	0	8
6	Batas Wilayah	4	3	0	1
7	Lokasi Tidak Diketahui	1	0	0	1
8	Pemanfaatan Belum Berizin	117	0	1	116
9	Pemanfaatan Tidak Sesuai Izin	9	0	1	8
10	Sertipikat Tidak Sesuai	46	44	2	0
11	Tanah Hilang/Timbul	7	0	0	7
12	Tanah Pengganti	76	0	3	73
13	Permasalahan Lain	2	0	2	0
14	Tanah Wakaf	1	0	0	1
Tanah Kasultanan					
1	Batas Wilayah	1	0	0	1
2	Lokasi Tidak Diketahui	1	0	0	1
3	Overlap	10	2	0	8
4	Penguasaan Oleh Pihak Lain	51	5	3	43
5	Tanah Hilang/Timbul	5	0	1	4
6	Permasalahan Lain	2	2	0	0
7	Pemanfaatan Belum Berizin	1	1	0	0
8	Tukar Menukar	2	0	1	1
	Jumlah	**1.101**	**85**	**98**	**918**

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, 2024



Kapanewon	Tipologi Permasalahan						Total
	Tanah Kasultanan					Tanah Kasultanan Permasalahan SG	
	Tukar-menukar	Jual-beli	Penguasaan Pihak Lain	Tumpang-tindih	Permasalahan Lain		
Berbah	14	20	1	0	1	3	43
Cangkringan	31	2	5	0	2	10	90
Depok	1	14	8	3	0	3	38
Gamping	34	1	14	7	104	1	161
Godean	4	1	6	4	50	8	73
Kalasan	15	65	4	0	0	4	88
Minggir	7	11	1	10	7	8	44
Mlati	3	3	4	11	2	2	27
Moyudan	6	0	1	0	4	0	11
Ngaglik	10	23	19	5	13	2	72
Ngemplak	14	13	35	1	3	2	32
Pakem	10	1	5	1	1	4	25
Prambanan	18	47	23	4	4	12	108
Seyegan	7	1	1	0	13	0	22
Sleman	27	2	1	1	33	12	76
Tempel	32	54	3	1	35	3	127
Turi	7	2	6	2	1	0	18
Total	262	272	166	50	274	77	1101

Sumber: DPTR Kabupaten Sleman, 2025, diolah

Gambar 2.37 Infografis Permasalahan Pertanahan di Kabupaten Sleman Tahun 2024

Sampai dengan tahun 2024, seluruh kalurahan di Kabupaten Sleman telah menetapkan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Data capaian pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kas desa dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.81. Data Tanah Kasultanan dan Tanah Kas Desa di Kabupaten Sleman Tahun 2024

No	Kapanewon	Tanah Kasultanan			Tanah Desa/ Kalurahan				
		Jumlah Bidang	Luas (m²)	Telah Ber-sertifikat	Jumlah Bidang	Telah Ber-sertifikat	Luas (m²)	Belum Ber-sertifikat	Luas (m²)
1	Moyudan	15	13.943	15	538	481	1.835.462	57	180.511
2	Minggir	120	119.989	120	712	620	2.144.954	92	875.7
3	Seyegan	149	116.585	149	975	932	3.225.329	43	179.18
4	Godean	236	320.261	236	859	821	2.485.405	38	98.829
5	Gamping	122	230.921	122	1223	974	2.122.532	249	641.129
6	Mlati	143	173.402	143	1424	1.045	2.563.122	379	1.155.970
7	Depok	50	128.931	50	1.186	470	909.647	716	3.509.016
8	Berbah	73	94.444	73	815	119	242.391	696	3.605.014
9	Prambanan	209	294.089	209	600	30	58.078	570	4.887.091
10	Kalasan	132	168.713	132	1057	119	185.736	938	4.306.244
11	Ngemplak	123	120.358	123	1344	246	968.635	1.098	4.829.709
12	Ngaglik	126	90.701	126	1764	611	1.282.403	1.153	3.867.034
13	Sleman	186	190.618	186	1283	355	631.014	928	3.929.778
14	Tempel	193	151.506	193	976	159	702.734	817	3.706.694
15	Turi	210	169.241	210	788	187	1.065.042	601	3.312.216
16	Pakem	125	372.131	125	828	89	262.306	739	3.482.770
17	Cangkringan	118	223.442	118	964	115	551.295	849	6.455.089
	Total	2.339	2.979.275	2.329	17.336	7.373	21.236.085	9.963	49.021.974

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, 2024

E. Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan manusia. Sumber daya alam yang diperlukan untuk mendukung

kelangsungan hidup manusia mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas, kualitas, ruang dan waktu. Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang baik dan bijaksana. Pengelolaan tersebut yang berupa pencegahan penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan adalah menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan peran pemerintahan.

Tabel 2.82. Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah (%)	88,57	92,50	20,88	21,25	22,50
2	Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina	0	0	0	0	0
3	Penanganan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, 2024

Capaian pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi tahun 2022-2024 berbeda dengan tahun sebelumnya, sehingga tidak bisa diperbandingkan. Yang dihitung pada tahun 2020-2021 adalah usaha/kegiatan yang taat, sedangkan pada tahun setelahnya yang dihitung yang tidak taat. Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten stabil dari tahun lalu yaitu sebesar 100%.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH) seperti yang dibahas di subbab sebelumnya, dalam 5 (lima) tahun ke belakang, mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun untuk Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) masih kategori kurang, sedangkan untuk Indek Kualitas Udara (IKU) masuk kategori sangat baik.

1. Pengelolaan Sampah

   Permasalahan sampah di Kabupaten Sleman masih menjadi tantangan besar yang belum terselesaikan, meskipun pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman semakin meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini diperkuat dengan adanya aduan terkait sampah yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2024, sebanyak 59 aduan terkait sampah dari 116 aduan yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Beberapa isu utama meliputi volume sampah yang besar, kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, infrastruktur yang belum memadai, dan dampak buruk sampah terhadap lingkungan serta kesehatan. Masih ditemukan sampah yang dibuang sembarangan, baik di sungai, jalan, maupun tempat umum lainnya. Dan yang memperburuk kondisi tersebut salah satunya adalah kurangnya penegakan hukum terhadap pembuangan sampah liar.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman semakin meningkat setiap tahunnya. Jumlah timbulan sampah dari Kabupaten Sleman pada tahun 2024 sebesar 607,60 ton/hari atau mencapai 221.775 ton per tahun. Sampah yang terkelola sebesar 114.863,63 ton per tahun dan sampah belum terkelola sebesar 106.912,36 ton per tahun. Pada tahun 2021, jumlah timbulan sampah mencapai 735,57 ton/hari, lebih besar dari tahun 2022 dan 2023. Hal ini karena pada tahun 2021, estimasi timbulan sampah per orang menggunakan 0,65/orang/kg/hari, sedangkan tahun 2022 dan 2023 menggunakan 0,52/orang/kg/hari, dengan asumsi bahwa sejak tahun 2021 telah dilakukan pembatasan timbulan sampah. Pada tahun sebelumnya masih dihitung sebagai jumlah pengurangan sampah, sedangkan tahun berikutnya menjadi pengurang pada besaran estimasi timbulan sampah per orang.

2. Pengelolaan Air Limbah

   Pengelolaan air limbah di Kabupaten Sleman secara umum dengan sistem terpusat dan setempat. Pengelolaan sistem terpusat ini menggunakan jaringan perpipaan yang kemudian diolah secara terpusat. Sistem setempat dilakukan pada kawasan pemukiman yang tidak memungkinkan dan tidak terjangkau jaringan sistem terpusat. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat terdiri dari sistem setempat komunal dan sistem setempat individual.

   Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) di Kabupaten Sleman berupa sistem pembuangan air limbah rumah tangga (*sewerage*). Sistem pembuangan air limbah rumah tangga terdiri dari sistem pengelolaan individual dan sistem pengelolaan komunal. Sistem pengelolaan individual berupa sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S) pengembangan prasarana pembuangan lumpur tinja yang berasal dari tangki septik melalui penyediaan sarana angkut lumpur tinja menuju instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) Prambanan. Pengangkutan lumpur tinja ke IPLT dilakukan dengan sarana unit truk tinja. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman memiliki enam unit truk tinja dengan kapasitas 25 m^3.

   Selain itu, sampai dengan tahun 2024 Kabupaten Sleman memiliki sarana prasarana limbah berupa instalasi pengolahan air limbah (IPAL) kawasan sebanyak 2 unit (IPAL Berbah dan IPAL Depok), IPAL komunal sebanyak 149, IPAL hunian tetap (huntap) sebanyak 29, sistem pengolahan air limbah domestik-setempat (SPALD-S) individu sebanyak 5.713 unit, truk penggelontor sebanyak 1 unit. Selain itu, sambungan rumah SR) yang terlayani ke IPAL Sewon adalah sebanyak 3.882 SR. Sampai tahun 2024, persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik mencapai 100%.

3. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

   Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik adalah penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kabupaten paling sedikit 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan sampai akhir tahun rencana. Pada tahun 2024, luasan RTH publik di Kabupaten Sleman sebesar 843,56 km^2, salah satunya adalah RTH di bandara atau sebesar 6,70% dari total luas

wilayah perkotaan Sleman sebesar 12.590 Ha yang merupakan luas perkotaan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman.

Mulai tahun 2025, luas perkotaan wilayah sleman berpedoman pada Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P) sebesar 9.136,32 Ha, meliputi pusat kegiatan nasional (PKN), pusat kegiatan wilayah (PKW), dan pusat kegiatan lokal (PKL). Dan dasar perhitungan luas RTH publik berubah, RTH bandara dikeluarkan dari hitungan RTH karena merupakan RTH privat, serta lapangan dan taman keanekaragaman hayati (KEHATI) dimasukkan dalam hitungan RTH. Berdasarkan hitungan terbaru pada tahun 2025 luas RTH publik sebesar 817,37 Ha atau 8,95% total luas wilayah perkotaan. Rincian RTH publik di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

Tabel 2.83. Luas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2025

No	Jenis RTH	Luas (Ha)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Hutan/kebun Fakultas Biologi, Fakultas Kehutanan, dan Lembah UGM	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59
2	Bandara	39,36	39,36	39,36	39,36	39,36	0
3	RTH Lapangan	-	0,00	0,00	0,00	0,00	11,36
4	Sempadan sungai	786,72	786,72	786,72	786,72	786,72	786,72
5	Taman	4,35	4,38	4,51	4,51	4,51	4,51
6	Taman Kehati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
7	Jalur hijau	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39
Jumlah		843,41	843,44	843,57	843,57	843,57	817,37

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Keberadaan RTH dapat meningkatkan kualitas lingkungan terutama di wilayah perkotaan yang memiliki tingkat pencemaran yang cukup tinggi. Karena itu, keberadaan RTH perlu terus ditingkatkan. Namun, pengelolaan yang baik mutlak dibutuhkan sehingga ketersediaan serta aksesibilitas bagi warga dapat terjamin.

4. Lahan Kritis

Pada tahun 2024, luas lahan kritis di Kabupaten Sleman sebesar 1.276,37 Ha. Pada tahun tersebut dilakukan penanaman pohon oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman sebanyak 2.250 batang serta *corporate social responsibility* (CSR) Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY sebanyak 2.120 batang dengan luas tajuk per pohon 5 m^2, sehingga mendapatkan total luas tajuk sebesar 2,185 Ha. Dari luas tajuk ini didapatkan persentase lahan kritis tertanami sebesar 0,17%. Pada tahun 2025, akan dilakukan penanaman pohon oleh DLH Kabupaten Sleman dan CSR BPD DIY sebanyak 2.481 batang, sehingga akan menambah luas tajuk menjadi 3,4255 Ha dan persentase lahan kritis tertanami meningkat menjadi 0,27%.

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

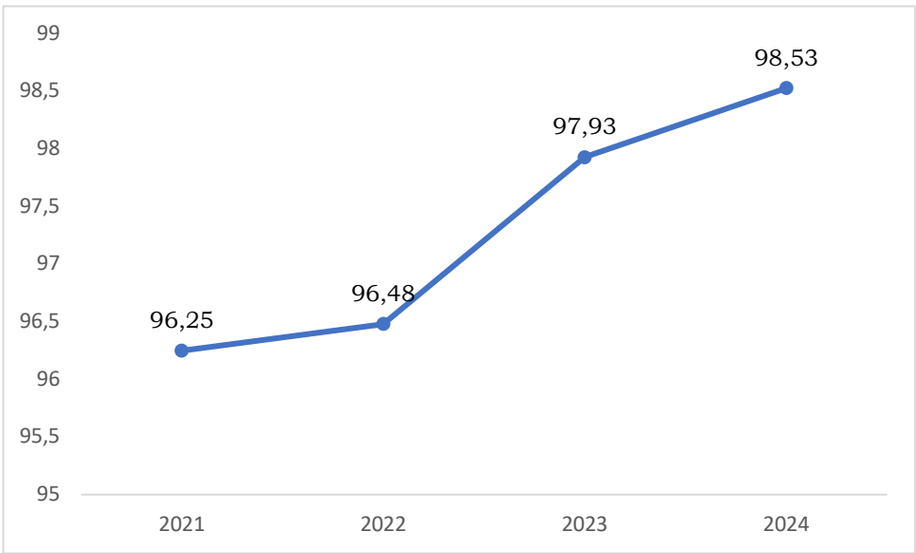
Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan bagian integral dari tugas negara untuk memenuhi hak asasi penduduk dalam mendapatkan identitas yang sah. Identitas ini mencakup berbagai dokumen penting yang mencatat siklus kehidupan individu, mulai dari kelahiran hingga kematian. Pelayanan administrasi kependudukan, meskipun bukan pelayanan dasar, namun hasil dari pelayanan administrasi

kependudukan sering kali menjadi salah satu syarat bagi penduduk untuk mendapatkan pelayanan dasar maupun pelayanan publik lainnya.

Dokumen yang dihasilkan antara lain adalah Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA), akta kelahiran, akta pengakuan anak, akta pengesahan anak, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian, surat keterangan pindah dan surat keterangan tempat tinggal (SKTT) bagi orang asing.

Kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil tercermin melalui Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman. melalui Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil adalah rerata kinerja pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Indeks pengelolaan administrasi kependudukan dihitung dari rata-rata cakupan penerbitan Kartu Keluarga + cakupan KTP-el + cakupan KIA + cakupan akta kelahiran + cakupan akta kematian + cakupan akta pengesahan anak + cakupan akta pengakuan anak + cakupan akta perkawinan + cakupan akta perceraian + cakupan ketersediaan profil kependudukan.

Indeks Pengelolaan administrasi kependudukan dan Catatan Sipil selama empat tahun (2021-2024) terus mengalami peningkatan. Keberhasilan pencapaian Indeks Pengelolaan administrasi kependudukan dan Catatan Sipil didukung oleh pelaksanaan layanan *offline* maupun *online*.



Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Tahun 2024

Grafik 2.62. Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024

Secara umum cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil selama lima tahun terakhir (2020-2024) mengalami peningkatan dan telah mencapai 100%, hanya ada dua yang belum mengalami penurunan di tahun 2023 dan belum mencapai 100% yaitu cakupan dokumen KTP-el dan cakupan dokumen KIA. Cakupan dokumen KTP-elektronik pada tahun 2024 tercapai sebesar 99,99%, hampir mencapai maksimal. Capaian ini belum mencapai target nasional sebesar 100%, yang berarti masih ada sebagian penduduk wajib KTP-el yang belum melakukan perekaman KTP elektronik.

Beberapa indikator belum mencapai 100% karena ada sebagian penduduk Kabupaten Sleman yang berdomisili di luar Kabupaten Sleman yang belum

melakukan perekaman KTP-el, dan adanya penduduk dengan keterbatasan fisik yang perlu difasilitasi dengan pelayanan jemput bola perekaman KTP elektronik. Cakupan dokumen KIA tahun 2024 tercapai sebesar 86,53%, meningkat terus bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berikut capaian kinerja indikator pelayanan kependudukan Kabupaten Sleman tahun 2020-2024.

Tabel 2.84. Capaian Indikator Pelayanan Kependudukan Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (%)

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan dokumen KK	100	100	100	100	100
2	Cakupan dokumen KTP-el	99,8	99,5	99,2	98,39	99,99
3	Cakupan dokumen KIA	56,01	70,69	77,33	82,88	83,00
4	Cakupan dokumen akta kelahiran	97,6	100	100	100	100
5	Cakupan dokumen akta kematian	100	100	100	100	100
6	Cakupan dokumen akta perkawinan	100	100	100	100	100
7	Cakupan dokumen akta perceraian	100	100	100	100	100
8	Cakupan pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak	NA	100	100	100	100
9	Cakupan dokumen akta pengakuan anak	NA	100	100	100	100
10	Cakupan dokumen akta pengesahan anak	NA	100	100	100	100
11	Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan nama	NA	100	100	100	100
12	Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan	NA	100	100	100	100
13	Cakupan ketersediaan data SIAK	NA	88,59	87,39	96,00	98,53
14	Cakupan ketersediaan profil kependudukan	NA	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Tahun 2024

Secara umum peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil di atas disebabkan adanya upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemilikan semua dokumen kependudukan yang gunakan dalam pelayanan publik. Selain itu upaya pemerintah Kabupaten Sleman telah memberikan pelayanan aktif langsung kepada masyarakat, seperti pelayanan keliling administrasi kependudukan dengan jemput bola langsung ke penduduk, sekolah-sekolah, panti sosial, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan (lapas), serta inovasi-inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pasal 126 ayat 1, tujuan pemberdayaan masyarakat desa adalah untuk memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Sejalan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, pemerintah memberikan kewenangan yang yang lebih luas kepada pemerintah desa untuk memberdayakan diri dan masyarakat dengan memberikan dana yang tidak sedikit kepada pemerintah Desa. Pemerintah Kabupaten perlu mengarahkan dan mendampingi agar dana yang diterima kalurahan dimanfaatkan secara optimal untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakatnya.

1. Perkembangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) di Kabupaten Sleman

   Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

   Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa bersama (BUMDes/BUMDesma) memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi lokal karena berpeluang dalam menggerakkan produktivitas perekonomian desa dan melakukan konsolidasi kegiatan usaha masyarakat desa melalui kegiatan ekonomi produktif yang menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha, perluasan akses permodalan dan jaringan pemasaran, serta penyediaan kebutuhan layanan umum bagi masyarakat. Dengan demikian, pengembangan BUMDes/BUMDesma dapat berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

   Terkait kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMDes/BUMDesma, pemeringkatan dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) kategori usaha sebagai berikut: 1) pelayanan publik (misalnya pelayanan listrik , air bersih, pendidikan, kesehatan, internet, pasar dan pelayanan publik lainnya); 2) perdagangan dan jasa umum (kegiatan utama membeli dan menjual kembali untuk mendapatkan keuntungan tanpa mengubah kondisi barang, misalnya keagenan kebutuhan masyarakat desa); 3) budidaya pertanian (kegiatan usaha sub-sektor primer: pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan); 4) pariwisata (kegiatan utama menyediakan/mengusahakan objek dan daya tarik wisata); 5) lembaga keuangan desa/simpan pinjam (kegiatan utama menyediakan layanan pinjaman dana); 6) pengolahan dan manufaktur (kegiatan usaha dalam pengolahan bahan baku primer, dan pengembangan nilai tambah); 7) pertambangan (kegiatan bahan galian C). Namun, kinerja perkoperasian baik yang ada di Kabupaten Sleman maupun di tingkat nasional, cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

   Kedudukan BUMDes/BUMDesama sebagai lokomotif perekonomian Desa semakin dikuatkan dengan pemberian status badan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menegaskan status BUMDes sebagai Badan Hukum dalam sistem hukum di Indonesia dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Sebagai lokomotif yang menggerakkan perekonomian desa, BUMDes menjadi lembaga usaha desa yang memiliki profesionalitas dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Profesionalitas dibangun oleh pengelola yang memiliki kapasitas sumber daya manusia yang handal dan manajemen yang berkualitas.

   Menanggapi hal tersebut, pada tahun 2024 Kementerian Koperasi melaksanakan program reformasi koperasi guna meningkatkan kinerja dan profesionalisme koperasi. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten Sleman untuk meningkatkan kinerja koperasi yang ada, mulai dari peningkatan pembinaan dan

pengawasan, sampai dengan pembentukan koperasi riil. Pembentukan koperasi riil ini sangat penting dan strategis bagi kelangsungan hidup koperasi, karena dengan koperasi riil yang memiliki unit usaha riil, koperasi dan anggota dapat berkembang dengan lebih optimal. Koperasi riil memiliki peran dan posisi strategis untuk dapat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, meningkatkan ketahanan dan swasembada pangan, serta menyerap dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Sejalan dengan peran strategis BUMDes/BUMDesma sebagai penggerak utama perekonomian desa, pada tanggal 27 Maret 2025, Presiden RI mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pembentukan KDMP ini merupakan perwujudan dari Asta Cita ke-enam menuju Indonesia Emas tahun 2045. Tujuan utama dari pembentukan KDMP ini adalah memperkuat upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional dan mempercepat pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan. KDMP ini dibentuk melalui pendirian koperasi baru, pengembangan koperasi yang sudah ada dan revitalisasi koperasi yang ada di desa/kelurahan. Pendirian KDMP yang menjadi program nasional ini menargetkan pendirian KDMP sejumlah 80.000 KDMP yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih melakukan usaha atau kegiatan berupa: 1) Gerai/outlet penyediaan sembako; 2) Gerai/outlet penyediaan obat murah; 3) Penyediaan kantor koperasi; 4) Unit simpan pinjam koperasi; 5) Gerai/outlet klinik desa; 6) Penyediaan *cold storage/cold chain* atau gudang; 7) Logistik (distribusi); 8) dan lain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha.Inpres ini mendorong pembentukan koperasi sebagai entitas ekonomi rakyat yang berbasis gotong royong dan inklusif, yang dapat bersinergi dengan kelembagaan ekonomi lokal seperti BUMDes atau BUMKal (Badan Usaha Milik Kelurahan). Spirit awal pembentukan Koperasi Merah Putih adalah untuk mendorong dan mengakselerasi usaha riil di tingkat akar rumput, seperti yang dilakukan oleh gabungan kelompok tani (Gapoktan) dan BUMKal. Dalam konteks kalurahan, keberadaan BUMKal yang selama ini berperan sebagai lembaga ekonomi lokal perlu diarahkan agar selaras dengan kebijakan nasional tersebut. BUMKal dapat dikembangkan melalui pendekatan kelembagaan yang integratif, koeksistensi sinergis, maupun transformasi penuh agar mampu bersinergi dengan Koperasi Merah Putih sebagai strategi kolektif percepatan kesejahteraan masyarakat.

Di Kabupaten Sleman, telah dibentuk 86 KDMP, dimana 3 diantaranya menjadi KDMP percontohan skala nasional, yaitu KDMP di Kalurahan Sidomoyo Godean, KDMP di Kalurahan Tamanmartani Kalasan, dan KDMP Kalurahan Sinduadi Mlati. Guna meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan program KDMP ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi mengamanatkan pengawasan dan pelaporan berkala oleh pemerintah daerah atas kinerja KDMP di daerah yang akan dilaksanakan setiap enam bulan. Untuk itu, pemerintah daerah melalui instansi teknis melakukan kegiatan peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan, pendampingan, fasilitasi dan pengawasan berkala agar KDMP yang didirikan dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal.

Pertumbuhan BUMDes/BUMKal membutuhkan konsentrasi untuk pengembangannya sebagai lembaga ekonomi desa. Mengingat berdirinya BUMDes/BUMKal mendasarkan pada amanat Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, maka secara umum BUMDes/BUMKal hanya dibangun secara normatif, belum berpijak pada semangat Pembangunan ekonomi secara riil. Akibatnya banyak BUMDes/BUMKal yang bersiri namun belum diikuti dengan aktivitas yang memadai. Perkembangan dan klasifikasi BUMDes/BUMKal di Kabupaten Sleman periode Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel di bawah berikut ini.

Tabel 2.85. Klasifikasi BumDes/BumKal di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

No	Kategori	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Dasar	19	19	26	45	42
2	Tumbuh	31	31	30	12	15
2	Berkembang	4	4	4	9	11
4	Maju	1	1	3	5	7
Jumlah		**55**	**55**	**63**	**71**	**75**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman, 2024

Berdasarkan data, pada tahun 2024 di Kabupaten Sleman terdapat 75 badan usaha milik kalurahan dengan 7 badan usaha klasifikasi maju, 11 badan usaha dengan kriteria berkembang, 15 badan usaha dengan kriteria tumbuh dan 42 badan usaha dengan kriteria dasar. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar badan usaha milik kalurahan di Kabupaten Sleman belum operasional secara efektif. Kelemahan dalam manajemen dan pemasaran menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh BumKal/BumDes di Kabupaten Sleman.

Adapun badan usaha dengan kriteria maju berarti sudah beroperasi, mampu menggerakkan ekonomi desa dan mampu berkontribusi pada pendapatan asli kalurahan.

2. Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama (BUMKalma)

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 mengamanatkan pembentukan BumDes Bersama dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Pasca Program. Di Kabupaten Sleman mendapat PNPM Mandiri Pedesaan di 10 kapanewon yang bertransformasi menjadi BUMKalma pada Tahun 2022. BUMKalma merupakan bentuk integrasi manajemen dari beberapa Bumkal, agar dapat menjadi lebih memiliki kapasitas pelayanan dan bisnis. Dengan adanya integrasi manajemen dan bisnis ini diharapkan ada kemampuan pelayanan yang lebih besar dan lebih Lestari. BUMKalma tersebut disajikan pada tabel dibawah berikut ini.

Tabel 2.86. Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama di Kabupaten Sleman Tahun 2023

No	Nama BUMKalma	Kapanewon	Klasifikasi
1	Mlati Adi Sejahtera	Mlati	Maju
2	Panca Makmur Sejahtera	Gamping	Maju
3	Godean Sido Makmur	Godean	Maju
4	Seyegan Margo Manunggal	Seyegan	Maju
5	Depok Raya	Depok	Maju

No	Nama BUMKalma	Kapanewon	Klasifikasi
6	Poerbaya Kapanewon Berbah	Berbah	Maju
7	Catur Manunggal Martani	Kalasan	Maju
8	Umpak Merapi Cangkringan	Cangkringan	Maju
9	Sendang Sumunar	Minggir	Berkembang
10	Roro Jonggrang Sembada	Prambanan	Maju

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman, 2023

Terdapat 10 BUMKalma di Kabupaten Sleman yang tersebar di 10 Kapanewon. Dari 10 BUMKalma ini semua memiliki predikat maju, sehingga kapasitas ekonominya juga telah lebih mapan, terarah dalam produktivitas dan pemasaran. Karena semua BUMKalma ini sudah berbadan hukum, maka pengembangan lebih lanjut akan menjadi lebih mudah. BUMKalma dapat membangun mitra bisnis yang lebih lluas dan lebih banyak. Namun demikian pemberdayaan BUMKalma tetap diperlukan, agar ke depan dapat melakukan kiprah bisnis yang lebih luas lagi.

3. Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang di bentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa. Indeks ketahanan sosial terdiri dari aspek sosial termasuk kesehatan, pendidikan, modal sosial dan pelayanan dasar. Aspek ini mencerminkan bagaimana penduduk desa mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Indeks ketahanan ekonomi (IKE) dinilai dari aspek ekonomi desa seperti pendapatan, pekerjaan, produktivitas dan akses terhadap pasar. Indeks ini menunjukkan kemampuan desa dalam mengembangkan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja bagi warganya. Indeks ketahanan ekologi dinilai dari aspek lingkungan desa yang meliputi pengelolaan sumber daya alam, kualitas lingkungan hidup dan mitigasi risiko bencana.

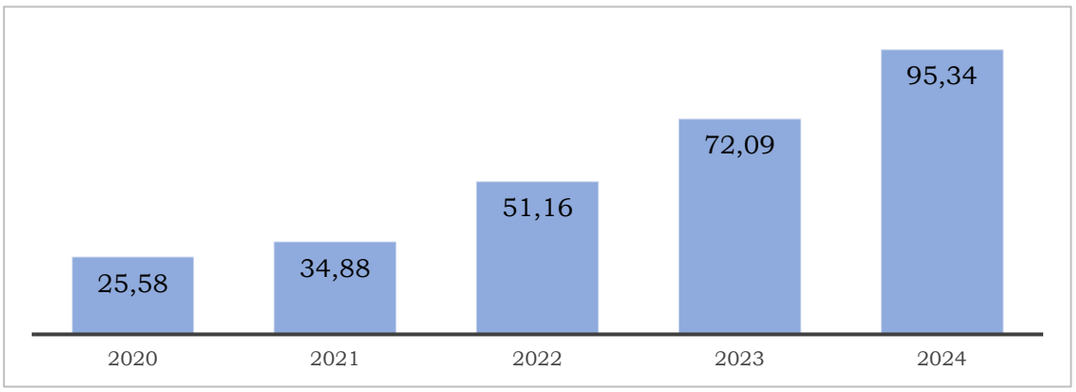
Ada lima status IDM yaitu Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal. Kategori Desa Mandiri merupakan kategori tertinggi dalam IDM. Desa mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya bagi kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Status Indeks Desa Membangun di Kabupaten Sleman disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.87. Status Indeks Desa Membangun di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (Desa)

No	Kategori Desa IDM	2020	2021	2022	2023	2024
1	Mandiri	22	30	44	62	82
2	Maju	50	48	40	24	4
3	Berkembang	14	8	2	0	0
4	Tertinggal	0	0	0	0	0
5	Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0
Jumlah		**86**	**86**	**86**	**86**	**86**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman, 2025

Perkembangan status desa dari tahun 2020-2024 cenderung ke arah yang lebih baik. Pertumbuhan desa mandiri menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2024 terdapat tambahan desa dengan status IDM Desa Mandiri sejumlah 20 Desa sehingga menjadi 82 desa atau sebesar 95,34%.



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman, 2025

Grafik 2.63. Persentase Desa Mandiri Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

Salah satu faktor yang mendorong peningkatan desa mandiri adalah penerapan sistem informasi desa berbasis Web yang terstandar di semua kalurahan di Kabupaten Sleman. Sistem informasi desa telah dilengkapi fitur yang lengkap meliputi profil Kalurahan, Pemerintahan Kalurahan, Lembaga Masyarakat Desa, data desa dan fitur informasi pelayanan publik.

5. Pengelolaan Sistem Informasi Desa

   Semua Kalurahan di Kabupaten Sleman telah memiliki Sistem Informasi Desa berbasis Web yang terstandar. Contoh Sistem Informasi Kalurahan Berbasis Web di Kalurahan Balecatur disajikan di bawah ini.



Sumber: https://balecatursid.slemankab.go.id/ first diakses 27 Mei 2023

Gambar 2.38. Contoh Sistem Informasi Kalurahan Berbasis Web

Fitur informasi pelayanan publik terdiri dari beranda, berita, agenda, produk hukum, perencanaan dan penganggaran, laporan, panduan layanan publik, potensi dan produk usaha. Sistem informasi desa ini juga dilengkapi fitur statistik pengunjung. Sebagian besar kalurahan juga telah memiliki media sosial seperti facebook, twitter, youtube dan instagram. Sistem Informasi Desa di Kabupaten Sleman tergolong lengkap dan mudah diakses oleh masyarakat, namun perlu ditingkatkan dalam hal update informasi terbaru dan kecepatan dalam menanggapi permohonan layanan maupun pengaduan masyarakat.

6. Pasar Desa

   Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan pada desa serta terkelola serta berkembang oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa. Pasar desa sebagai aset desa harapannya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan serta memberikan retribusi yang besar bagi pendapatan desa. Pembangunan pasar desa di suatu daerah merupakan salah satu usaha bagi desa untuk membangun putaran ekonomi internal desa. Maka dari itu, pasar desa menjadi salah satu jenis usaha yang banyak dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di berbagai daerah. Beberapa daerah telah memiliki pasar desa, namun masih kurang dalam pengelolaan secara optimal. Jadi ketika sudah terolah dengan optimal akan minim menimbulkan permasalahan sosial di tengah masyarakat seperti kekumuhan, kemacetan, serta kerumunan.

   Permasalahan sosial tersebut dapat diatasi, dari segi penataan dan pembinaan dalam pengelolaan Pasar desa. Demi terwujudnya desa yang maju, kuat, mandiri dan demokratis serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Maka, pasar desa dalam proses pembangunan masyarakat pedesaan adalah sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat, baik sektor perdagangan, industri, pertanian maupun jasa. Dengan tergeraknya roda perekonomian desa maka kesejahteraan masyarakat pun akan berkembang juga.

   Pembangunan pasar desa dapat terlaksana secara mandiri oleh BUMDes atau melalui kerja sama dengan pihak ketiga atau swasta. Selain bangunan utama pasar yang berisi lapak atau kios tempat usaha, bangunan pasar juga harus terpenuhi dengan sarana pendukung. Contohnya seperti kantor pengelola, area parkir, tempat pembuangan dan pengelolaan sampah sementara, air bersih, sanitasi atau drainase, tempat ibadah, toilet umum, pos keamanan, tempat pengolahan air limbah, *hydrant* dan fasilitas pemadam kebakaran, penerangan, sarana komunikasi, serta area bongkar-muat dagangan.

   Pengelola operasional pasar desa sebaiknya harus terpisah dari pemerintahan desa dan juga terpilih melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Pengelola operasional pasar desa terdiri dari kepala pasar yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh beberapa karyawan yang bertugas menangani bagian umum, keamanan dan parkir, keuangan dan administrasi, serta pemeliharaan desa.

   Penerimaan pendapatan Pasar Desa sendiri selain sewa tempat usaha serta penjualan dan perpanjangan hak pemakaian tempat usaha, dapat berupa berbagai macam, contohnya adalah jasa keamanan dan kebersihan, jasa parkir, jasa mandi, jasa cuci, jasa listrik dan air bersih,

yang besaran tarifnya teratur dalam anggaran rumah tangga BUMDes dan sah melalui peraturan kepala desa. Perkembangan pasar di Kabupaten Sleman disajikan pada Tabel dibawah berikut ini.

Tabel 2.88. Perkembangan Pasar Desa di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

No	Kategori Pengelolaan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Baik	18	18	18	18	18
2	Cukup	17	17	17	17	17
	Jumlah	35	35	35	35	35

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, 2025

Pasar desa merupakan salah satu bentuk wadah perekonomian desa yang menampung UMKM, petani dan industri kecil. Hal ini memberikan Solusi strategis terkait dengan pemasaran hasil produksi pertanian, Perkebunan dan peternakan yang dilakukan secara tradisional atau modern oleh masyarakat. Salah satu kelemahan dalam sistem perekonomian masyarakat adalah pemasaran. Adanya pasar desa memberikan akses penjualan atau pemasaran terdekat bagi warga. Dengan demikian hal ini akan menghemat waktu dan biaya transportasi. Bertemunya penjual dan pembeli di lingkungan pasar desa akan mengefisiensikan pembiayaan dalam perdagangan. Diupayakan peningkatan kualitas pasar desa agar pengelolaan lebih baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli desa.

7. Peran LKK

Pelibatan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, yang meliputi LPMD, PKK, Karang Taruna, posyandu, linmas, RT dan RW dalam perencanaan Kalurahan merupakan bentuk partisipasi masyarakat. Tidak hanya dalam hal perencanaan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan ini juga diharapkan juga membantu program pemberdayaan masyarakat kalurahan yang dilaksanakan oleh kalurahan, maupun tugas pembantuan dari kabupaten, provinsi maupun nasional baik melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan ataupun melalui Perangkat Daerah yang lain. Jumlah dari Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang ada di Kabupaten Sleman periode Tahun 2019 – 2022 ditunjukkan pada Tabel dibawah berikut ini.

Tabel 2.89. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

No	LKK	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PKK	22.276	22.276	22.276	22.276	1.316
2	Karang Taruna	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316
3	RT	7.364	7.364	7.364	7.364	7.364
4	RW	2.933	2.933	2.933	2.933	2.933
5	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	1.302	1.302	1.302	1.302	1.299
6	Satlinmas	345	345	345	345	103
7	Posyandu	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316
Jumlah		36.852	36.852	36.852	36.852	15.647

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, 2025

Selama ini pelaksanaan program dan kegiatan oleh perangkat daerah belum mengikutsertakan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK) secara optimal. Selama ini LKK hanya terlibat dari kegiatan Dinas PMK. Perkembangan indikator pemberdayaan masyarakat dan kalurahan secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini menunjukkan dimana cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik selama tahun 2020-2024. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM tetap yaitu 86 unit. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (unit) pada tahun 2020 menurun. Persentase PKK aktif mencapai 100%. Pada tahun 2021 jumlah posyandu aktif dengan katagori mandiri mengalami penurunan sebesar 20,38% dibanding tahun 2020 namun meningkat kembali menjadi 97,91% pada 2024.

Tabel 2.90. Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	100	100	100	100	100
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM (unit)	86	86	86	86	86
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (unit)	1.309	1.309	1.309	1.315	1.315
4	Persentase PKK aktif (%)	100	100	100	100	100
5	Persentase Posyandu aktif	100	100	100	99,61	99,80
	Pratama (%)	2,47	18,06	18,06	0	0
	Madya (%)	14,48	14,48	14,48	0,39	0,20
	Purna (%)	10,24	15,06	15,06	10,36	1,89
	Mandiri (%)	72,79	52,41	52,41	89,25	97,91

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, 2025

Secara umum informasi data indikator kinerja pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dan kalurahan memperoleh hasil yang sesuai dengan target. Kondisi ini tentu sangat baik, namun penting untuk ditingkatkan kuantitas layanannya sehingga dengan target yang optimal. Bagaimanapun akses pemberdayaan masyarakat dan kalurahan ini sangat penting untuk diratakan pada seluruh wilayah.

8. Bulan Bakti Gotong Royong

Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) merupakan upaya untuk menggelorakan semangat gotong royong dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan yang berlandaskan keswadayaan sebagai sistem nilai sosial budaya yang telah menyatu dalam kehidupan masyarakat. BBGRM adalah suatu gerakan nasional yang telah dicanangkan dan diperingati sejak tahun 2003. BBGRM adalah nilai-nilai gotong royong kerja sama dengan masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan.

Ada 10 kelompok pemberdayaan yang tercatat dari 10 kelompok pemberdayaan tersebut, 9 diantaranya adalah usaha olahan makanan dan satu usaha ternak ayam. Data kelompok pemberdayaan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.91. Kelompok Pemberdayaan di Kabupaten Sleman Tahun 2024

No	Nama Kelompok	Alamat	Usaha
1	Sekar Arum	Malangan, Sumberagung, Moyudan	Olahan Makanan
2	Sekar Arum II	Krandon, Sumberagung, Moyudan	Olahan Makanan
3	Mawar	Sukorejo, Girikerto, Turi	Olahan Makanan
4	Makmur Lestari	Peturen, Somorai, Margoagung	Olahan Makanan
5	Karya Tani	Jowah, Sidoagung, Godean	Olahan Makanan
6	Anggayuh Rukun	Berjo Kulon, Sidoluhurm Godean	Olahan Makanan
7	UP2K PKK Guyangan I	Guyanganm Nogotirto, Gamping	Olahan Makanan
8	Hutama Farm	Dusun Nglampar RT 002 / RW 018, Caturharjo, Sleman	Ternak Ayam
9	Barokah	Dusun Jambon VI RT 002 / RW 012, Sendangagung, Minggir	Olahan Makanan
10	UP2K PKK Guyangan II	Dusun Guyangan RT 010 / RW 003, Nogotirto, Gamping	Olahan Makanan
11	Srikandi Ceria	Bagusan, Sumberadi, Mlati, Sleman	Olahan Makanan
12	UP2K Tambah Jaya	Tambaklelo, Tambakrejo, Tempel, Sleman	Olahan Makanan

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Sleman, 2024

Secara umum kelompok pemberdayaan yang aktif adalah kelompok olahan makanan. Dalam kegiatan UMKM secara luas, kelompok olahan makanan ini yang berkembang dan cukup kreatif, Namun demikian untuk jangkauan pemasaran dan kemampuan pelayanan terhadap omset yang besar masih membutuhkan pembinaan secara berkelanjutan. Masalah branding produk yang belum dipahami secara luas oleh UMKM penting untuk disosialisasi dan dilakukan pendampingan. Demikian juga untuk mendapatkan register pangan industry rumah tangga (PIRT).

Bentuk pemberdayaan lain untuk kelompok peternak, Perkebunan buah, kerajinan, batik, dan lainnya penting untuk dikembangkan. Artinya diversifikasi usaha itu akan memberikan peluang baru bagi masyarakat. Pendampingan secara berkelanjutan menjadi salah satu strategi untuk membesarkan usaha masyarakat, sehingga mampu berkontribusi dalam pertumbuhan perekonomian daerah. Pembinaan dari kelompok ternak ini sangat dibutuhkan.

9. Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

   Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Desa, dicantumkan bahwa pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi dan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa.

   Pengelolaan kekayaan milik desa dibahas oleh kepala desa bersama badan permusyawaratan desa (BPD) berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pengelolaan keuangan dan aset desa belum berjalan dengan baik, penggunaan tanah kas belum mengajukan ijin Gubernur dan penggunaan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) belum optimal.

10. Siklus Tahunan

    Pasal 73 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Rancangan APBDes diajukan dan ditetapkan oleh kepala desa, setelah dimusyawarahkan bersama BPD. Selain itu, pemerintah desa berkewajiban menyusun laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahun dan sudah dilaksanakan dengan baik. Namun baru sebagian yang melakukan rekonsiliasi kas per bulan.

    Penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi belum berjalan tepat waktu disebabkan diantaranya: terbatasnya pamong yang memiliki kompetensi penyusunan anggaran dan laporan dengan baik. Penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) masih semi manual karena keterbatasan pamong yang memiliki kemampuan menggunakan teknologi informasi.

11. Aparatur Kalurahan

    Kabupaten Sleman terdiri dari 86 Kalurahan dengan jumlah pamong kalurahan adalah 2510 orang, rata-rata tiap kalurahan memiliki 29 pamong. Jumlah pamong terbanyak adalah Kalurahan Caturtunggal 47 orang, Wedomartani 46 orang, dan Condongcatur 45 orang. Sedangkan jumlah pamong paling sedikit adalah Kalurahan Wukirharjo 17 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pamong berpendidikan SLTA/sederajat.

    Berdasarkan kodisi dan gambaran mengenai pemerintah kalurahan dan kondisi kalurahan yang telah dijabarkan di atas, perlu adanya penguatan dan transformasi perubahan kalurahan melalui reformasi kalurahan. Reformasi kalurahan adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas Pemerintahan Kalurahan dan keberdayaan masyarakat Kalurahan dalam rangka mewujudkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat, pembangunan yang inklusif, dan pengembangan kebudayaan.

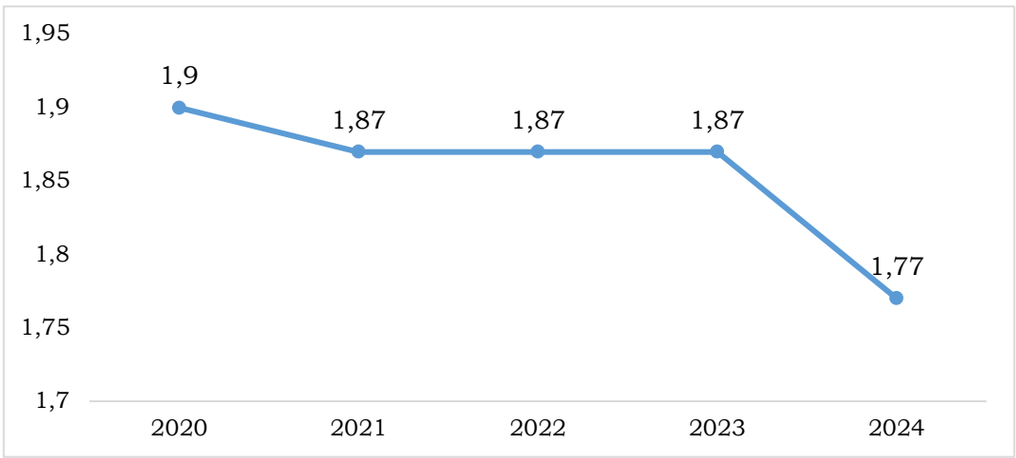
H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penduduk adalah subjek dan objek pembangunan. Jumlah penduduk yang tidak terkendali dapat menghambat proses-proses pembangunan menuju tujuan yang ingin dicapai karena sumber daya pembangunan terserap untuk pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan manusia yang selalu bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan adanya pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan program keluarga berencana. Indikator kinerja daerah pada urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah Indeks Ketahanan Keluarga.

Berdasarkan data analisis ketahanan keluarga pada subbab analisis kesejahteraan sosial dan budaya tercermin bahwa indeks ketahanan keluarga Kabupaten Sleman tergolong dalam kategori baik dengan nilai 3,25. Indeks Ketahanan Keluarga Sleman yang berada dalam kategori "baik" menunjukkan bahwa keluarga-keluarga di wilayah ini memiliki stabilitas dan kesejahteraan yang kuat di berbagai aspek penting. Ini mencerminkan keberhasilan kebijakan dan program pemerintah, akses terhadap fasilitas umum yang baik, serta kesadaran dan pendidikan keluarga yang tinggi. Ketahanan keluarga yang baik memberikan dampak positif pada

kesejahteraan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, dan ketahanan sosial secara keseluruhan.

Total fertility rate (TFR) atau angka kelahiran total adalah rata-rata jumlah anak yang diperkirakan akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa suburnya (biasanya dianggap antara usia 15 dan 49 tahun), berdasarkan tingkat kelahiran saat ini pada setiap usia dalam rentang tersebut. Kondisi ideal yang diharapkan dalam pertumbuhan penduduk adalah penduduk tumbuh seimbang (PTS). Kondisi penduduk tumbung seimbang yaitu kondisi dimana populasi tidak bertambah (atau menurun) dalam jumlah total. Kondisi ini dicirikan oleh TFR sama dengan 2,1 per perempuan atau angka reproduksi bersih/*net reproduction rate* (NRR) sebesar 1 per perempuan. TFR yang ingin dicapai Kabupaten Sleman pada tahun 2025-2045 berada pada rentang nilai 1,8-2,2. Rentang ini dianggap sebagai rentang ideal sesuai dengan tahapan pembangunan kependudukan dalam RPJPN tahun 2020-2024 yang berada pada tahap "bertahannya penduduk yang tumbuh dan seimbang". Kondisi penduduk yang tumbuh dan seimbang tetap harus dipertahankan hingga tahun 2045. Hal ini untuk menghindari masalah kependudukan yang dapat ditimbulkan akibat nilai TFR berada di bawah *replacement level*.



Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Sleman, 2024

Grafik 2.64. *Total Fertility Rate* Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

Sejak tahun 2021 sampai dengan 2024, TFR Kabupaten Sleman relatif menurun diangka 1,77. Angka ini masuk dalam rentang kondisi tumbuh seimbang. Saat ini Kabupaten Sleman berupaya untuk menjaga angka kelahiran tersebut supaya tetap berada pada kondisi tumbuh seimbang. Nilai TFR ini dicapai melalui berbagai program pengendalian penduduk dan program pembinaan keluarga berencana (KB).

Tabel 2.92. Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB (%)	83,33	84	84	87,1	87,1
2	Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (%)	56,25	56,25	56,25	58	58

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
3	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan (%)	56,25	56,25	56,25	56,25	56,25
4	Rata-rata jumlah anak per keluarga (anak)	2,97	2,94	2,88	1,13	3,61
5	Rasio Akseptor KB	77,94	77,67	76,81	61,67	62,79
6	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	7,95	7,57	7,92	17,2	12
7	Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	39,08	39,28	40,04	42	35,74
8	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)	77,34	77,57	76,81	61,67	62,79
9	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	88,55	87,33	87,33	100	100
10	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)	86,79	86,15	86,15	92	75
11	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)	84,40	87,06	87,06	74	100
12	Cakupan penyulih keluarga berencana (PKB)/petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (%)	100	100	100	100	100
13	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan (%)	100	100	100	100	100
14	Persentase fasilitas kesehatan (askes) dan jejaringnya (di seluruh tingkatan wilayah) yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan memberikan pelayanan keluarga berencana dan Kesehatan reproduksi (KBKR) sesuai dengan standarisasi pelayanan (%)	93,2	93,2	79,81	NA	NA

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Sleman, 2025

Rasio Akseptor KB cenderung menurun dan pada tahun 2024 mencapai 62,79. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*) mengalami penurunan menjadi 12 pada tahun 2024. Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cenderung fluktuatif dan menjadi 35,74% pada 2024. Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi cederung menurun menjadi 62,79%. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB dengan data yang cenderung meningkat dan mencapai maksimal.

Berbagai tantangan dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, yaitu (1) Masih rendahnya KB Pasca Persalinan; dan (2) Masih ada Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan metode kontrasepsi tradisional dengan resiko yang dapat berdampak terhadap kesehatan ibu dan anak serta kemungkinan kegagalan KB yang cukup tinggi.

Disisi lain ada beberapa faktor pendukung keberhasilan penyelenggaraan pelayanan urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Sleman, antara lain (1) adanya *Grand Design* Pembangunan

Kependudukan (GDPK) 2022-2045 sebagai acuan pelaksanaan pembangunan kependudukan di Kabupaten Sleman; (2) sinergi lintas sektor untuk mendukung pelaksanaan GDPK; (3) Optimalisasi upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana, Generasi Berencana, Pendewasaan Usia Nikah, Pencegahan Pernikahan Dini atau Kehamilan yang tidak dikehendaki; (4) Pelaksanaan Bhakti Sosial Pelayanan KB; (5) Kecukupan tenaga lini lapangan untuk mendukung sosialisasi dan KIE program KB hingga di lapisan terbawah masyarakat, mulai dari penyuluh KB (PKB), petugas lapangan KB (PLKB), tenaga administrasi Balai Penyuluhan KB, hingga para kader; (6) Penyampaian informasi-informasi terkait Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) melalui media cetak (*leaflet, banner*) dan iklan layanan msyarakat KKBPK melalui media sosial serta media luar ruang lainnya (pertemuan-pertemuan di wilayah bersama masyarakat).

Capaian kinerja dalam urusan pengendalian penduduk dan KB yang masih bervariasi ini membutuhkan upaya yang konsisten dalam permasalahan edukasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk pencapaian kinerja yang tinggi. Dengan demikian sosialisasi dan motivasi khususnya bagi pasangan usia subur sangat penting untuk dilakukan dengan masif dan meluas.

I. Perhubungan

Pada tahun 2024 tercatat jumlah penumpang sebanyak angkutan umum termasuk pelayanan angkutan perkotaan (Trans Jogja) mencapai 2.004.261 penumpang. Jumlah penumpang meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terutama karena relaksasi aturan pasca pandemi. Pada tahun 2022 jumlah arus penumpang cenderung meningkat disebabkan oleh adanya penambahan operasional bus Trans Jogja dan DAMRI dengan penambahan 3 koridor jalur Trans Jogja, yakni jalur Godean, Ngaglik, dan Ngemplak melalui Program *Buy The Service* (BTS). Persentase layanan angkutan darat meningkat pada tahun 2024 sebesar 28,45% dari tahun sebelumnya sebesar 24,22%.

Sampai saat ini, di Kabupaten Sleman terdapat 1 unit bandara serta 4 unit terminal bis. Jumlah terminal bus sesuai kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman empat yang semuanya masuk ke dalam kategori terminal tipe C, yaitu Terminal Condong Catur, Terminal Prambanan, Terminal Pakem, dan Terminal Gamping. Satu terminal yang direncanakan dalam RTRW tetapi belum tersedia adalah Terminal Tempel. Jumlah bandara yang berada di wilayah Kabupaten Sleman hanya ada satu yaitu di Bandara Adisutjipto Yogyakarta. Adapun pasca penurunan status bandara Adisutjipto, dan pemindahan fungsional dan rute penerbangan dari Adisutjipto ke Yogyakarta International Airport (YIA), volume pergerakan baik darat maupun udara di Bandara Adisutjipto menurun.

Perhitungan rasio izin trayek dilihat dari jumlah izin trayek dibagi dengan jumlah penduduk. Pada tahun 2024 pengajuan izin trayek angkutan umum di Dinas Perhubungan hanya sedikit karena masa berlaku izin trayek adalah selama lima tahun dan banyak yang tidak melakukan perpanjangan. Pun dari sisi permintaan, angkutan umum semakin menurun terutama karena adanya suplai pergerakan baik dari mudahnya akses kepemilikan kendaraan pribadi dan jasa pergerakan individual melalui aplikasi ojek *online* maupun

bentuk permukiman di Kabupaten Sleman yang cenderung berbentuk *sprawl* atau terpencar sehingga efisiensi penyelenggaraan angkutan umum menjadi sangat rendah.

Pada tahun 2024, rata-rata kinerja lalu lintas (V/C ratio) di 35 ruas jalan di wilayah Kabupaten Sleman mencapai 0,56. Angka ini menunjukkan arus lalu lintas jalan maupun persimpangan pada ruas jalan tersebut masih stabil. Dari ketiga puluh lima ruas jalan tersebut yang mempunyai kinerja lalu lintas lebih dari 1 dan mempunyai nilai tingkat pelayanan jalan (*level of service*/LOS) E dengan kecepatan sangat rendah, volume lalu lintas mendekati kapasitas, sehingga sering terjadi antrian adalah Jl. Kaliurang dan Jl. Seturan. Secara keseluruhan, persentase ruas jalan dengan tingkat pelayanan C (atau tingkat pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan) di Kabupaten Sleman sebesar 44,87%.

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengatasi ruas jalan yang rawan kemacetan dan kecelakaan pada titik-titik lokasi yang sama dipasang rambu lalu lintas. Pada tahun 2024 pemasangan rambu sebanyak 20 rambu. Selain itu dilakukan rekayasa manajemen lalu lintas dan meningkatkan kualitas pelayanan transportasi umum.

Pada tahun 2024, jumlah kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sleman tercatat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total 2.312 kejadian. Menurut Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sleman, usia 15-19 tahun menjadi kelompok usia dengan jumlah kecelakaan terbanyak kedua, dengan 555 kejadian, sementara usia 10-14 tahun menyumbang 121 kejadian. Anak dan remaja memiliki risiko lebih tinggi terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dibandingkan orang dewasa karena faktor risiko yang tidak dapat diubah, seperti usia dan kematangan kognitif yang belum sempurna, kurangnya pengalaman mengemudi, dan ketiadaan perlengkapan keselamatan. Upaya menekan angka kecelakaan pada anak dan remaja ini, selain dengan perbaikan infrastruktur jalan juga dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi tentang keselamatan berlalu lintas, baik kepada anak dan remaja, orang tua serta masyarakat umum agar tercipta budaya berlalu lintas yang aman dan tertib serta penegakan hukum secara tegas terhadap pelanggaran lalu lintas. Perkembangan capaian indikator urusan perhubungan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.93. Capaian Indikator Urusan Perhubungan di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (tanpa angkutan perkotaan) (penumpang)	62.563	80.793	21.533	18.873	9.827
	Jumlah arus penumpang angkutan umum (dengan angkutan perkotaan) (penumpang)	814.643	1.386.717	1.439.541	1.439.541	2.004.261
2	Jumlah bandara (unit)	1	1	1	1	1
3	Jumlah terminal bis (unit)	4	4	4	4	3
4	Persentase layanan angkutan darat (%)	27,58	12,86	24,22	25,75	28,45
2	Rasio izin trayek (%)	0,00028	0,00027	0,00026	0,00026	0,0000026

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
3	Jumlah uji kir angkutan umum (ijin)	2.021	1.904	1.654	1.968	2.464
4	Persentase terlaksananya pelayanan uji kendaraan berkala %)	45,81	53,14	54,42	89,82	76,59
5	Pemasangan rambu-rambu (unit)	43	1	54	25	20
6	Persentase ketersediaan sarpras perhubungan (%)	NA	25,75	38,46	44,11	51,18
7	Persentase lokasi parkir yang berizin (%)	78,14	82,15	93,33	81,25	82,01
8	Rasio konektivitas kabupaten/kota	NA	50	50	50	50
9	Jumlah kecelakaan lalu lintas (kejadian)	1.526	1.707	2.571	2.142	2.312
10	Accident Rate	2,182	2,417	3,321	3,062	2,182
11	Tingkat pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan	4,49	11	22,44	33,65	44,87
12	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota (V/C ratio)	0,47	0,48	0,49	0,53	0,56

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman, Satlantas Polres Sleman 2025

Permasalahan urusan perhubungan akan semakin kompleks mengingat banyak rencana pembangunan jaringan jalan baru sebagai aliran pergerakan penumpang maupun barang, seperti pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen-YIA dan Yogyakarta-Solo, pembangunan jalur Prambanan-Tawang-Ngalang-Gading, serta rencana pengembangan Jogja Outer Ring Road. Berdasarkan hal tersebut, dalam mengatasi permasalahan harus memperhatikan dinamika tersebut serta mempertimbangkan tiga elemen sistem transportasi yakni sistem jaringan (ketersediaan jaringan jalan), sistem kegiatan (sumber/tujuan pergerakan) dan sistem pergerakan (moda angkutan pergerakan).

J. Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Sleman sebagai kota tujuan pendidikan serta daerah pengembangan pemukiman/perumahan memiliki konsekuensi adanya pertambahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Kabupaten Sleman tumbuh menjadi perkotaan dan turut mengalami banyak tantangan dalam pembangunan. *Smart city* bagi Pemerintah Kabupaten Sleman sudah menjadi suatu keharusan. Sleman *smart regency* merupakan perwujudan dari *smart city* di Kabupaten Sleman.

Kabupaten Sleman sebagai tujuan pendidikan dan daerah pengembangan pemukiman/perumahan tumbuh menjadi perkotaan dengan berbagai tantangan pembangunan. Sleman *Smart Regency* merupakan perwujudan dari *smart city* di wilayah Kabupaten Sleman. Pembangunan *smart regency* tersebut meliputi 6 (enam) elemen, yaitu:

1. *Smart governance*, memiliki sasaran untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu;
2. *Smart branding*, memiliki sasaran untuk peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional;

3. *Smart economy*, memiliki sasaran untuk mewujudkan ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan pada era informasi saat ini, serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *less-cash society*;
4. *Smart living*, memiliki sasaran untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman dan efisien;
5. *Smart society*, memiliki sasaran untuk mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan iteraktif dengan literasi digital yang tinggi; dan
6. *Smart environment*, memiliki sasaran untuk mewujudkan tata Kelola lingkungan hidup Kabupaten Sleman yang baik, bertanggungjawab dan berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan *smart city*, Kabupaten Sleman membangun sarana prasarana untuk mewujudkan *smart governance*, seperti terlihat dalam perkembangan indikator komunikasi dan informatika pada tahun 2021-2024, yang ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.94. Data Sarana Prasarana Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024

No	Elemen	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah titik yang terkoneksi jaringan internet (titik)	1.090	1.763	2.043	2.233
2	Jumlah distribusi jaringan internet di Kabupaten Sleman (perusahaan)	2	5	5	5
3	Jumlah provider seluler di Kabupaten Sleman (operator)	5	4	NA	NA
4	Jumlah lembaga penyiaran di Kabupaten Sleman (Lembaga)				
	- TV	4	6	6	6
	-Radio	8	18	11	11
5	Radio komunikasi/ repeater (unit)	7	7	7	7
6	Radio komunikasi/ base stasuin/ RIG (unit)	22	22	22	22
7	Server (unit)	72	73	70	71
8	Menara telekomunikasi (unit)	547	557	569	569
9	Infrastruktur jaringan *wide area network* (WAN) (lokasi)	359	460	500	589
10	Infrastruktur jaringan *local area network* LAN (titik)	4.661	5.500	6.457	6.384
11	Website domain (buah)	1	1	1	1
12	Subdomain (buah)	231	235	261	201
13	Sistem informasi manajemen (SIM, buah)	91	101	137	138
14	Sistem informasi manajemen terintegrasi (buah)	51	55	84	84
15	Jumlah surat kabar yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sleman (buah)				
	- TV	7	7	7	7
	- Radio	-	3	3	3
16	Jaringan f*iber optic* (FO) (titik)	161	302	345	414
17	Jaringan *wireless* (titik)	124	131	124	120
18	Jaringan *virtual private network* (VPN, titik)	1	1	1	1
19	CCTV (lokasi)	120	140	132	144
	CCTV (unit)	NA	298	NA	245
20	Jumlah kelompok informasi masyarakat (KIM) di Sleman (kelompok)	40	40	40	40
21	Cakupan layanan telekomunikasi (%)	100	100	100	100

No	Elemen	2021	2022	2023	2024
22	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)	89,90	96,75	NA	NA
23	Proporsi rumah tangga dengan akses internet (%)	83,68	81,93	NA	NA
24	Kualitas standar keamanan informasi (jumlah ISO)	1	1	NA	NA
25	Level keterbukaan informasi bagi Badan Publik level kabupaten	Informatif	informatif	informatif	informatif
26	Jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Sleman yang telah menyusun draf informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang	48	46	46	46
27	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi (%)	100	100	100	100
28	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkoneksi jaringan komputer (%)	100	100	100	100
29	Jumlah publikasi informasi melalui media online	360	545	NA	NA
30	Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin (%)	70	37,88	NA	NA
31	Jumlah jejaring informasi dan media massa	30	14	NA	NA
32	Jumlah modul layanan kepemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (layanan)	50	49	NA	NA
33	Jumlah modul layanan publik (masyarakat) yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (layanan)	52	52	NA	NA
34	Jumlah layanan pemda berbasis teknologi informasi yang terintegrasi (layanan)	38	55	NA	NA
35.	Jumlah survey yang dilakukan	2	3	4	0
36	Kompilasi statistik sektoral	3	38	41	54
37	VoIP	791	795	NA	NA

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman, 2025

Cakupan layanan telekomunikasi telah menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sleman, dengan 2.233 unit menara telekomunikasi pada tahun 2024, baik itu menara *macrocell*, menara *microcell* maupun menara *combat*. Alat komunikasi lain seperti radio repeater dan radio komunikasi juga digunakan untuk menambah kekuatan daya pancar. Meskipun demikian, masih ada wilayah di Kabupaten Sleman yang belum terkoneksi sinyal internet, baik sinyal 4G dari operator maupun *wifi* dari pemerintah. Hal ini dikarenakan biaya infrastruktur yang dibutuhkan tidak sebanding dengan potensi pengguna. Mayoritas *blank spot* ada di wilayah perbukitan wilayah barat dan selatan serta lereng Gunungapi Merapi, dengan jumlah penduduk yang sedikit. Kabupaten Sleman juga memfasilitasi kantor pemerintahan, puskesmas, sekolah dan lokasi publik lainnya dalam melakukan komunikasi *online* melalui titik *hotspot* internet.

Dengan adanya jaringan *fiber optic* (FO) sebanyak 414 titik, *access point* (AP) dan infrastruktur komunikasi lainnya, ke depannya perangkat daerah serta kantor pelayanan di seluruh wilayah Kabupaten Sleman dapat menggunakan dalam rangka mempermudah, memperlancar dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan layanan publik memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi tentu harus dimulai dengan melakukan transformasi sistem proses kerja secara manual ke sistem yang berbasis elektronik. Meskipun, tidak semua proses kerja dapat ditransformasi ke dalam sistem elektronik. Ada beberapa yang masih

harus menggunakan sistem manual, tetapi ada sebagian besar lainnya yang dapat dikerjakan dengan lebih cepat, efektif dan efisien melalui bantuan sistem elektronik.

Tabel 2.95. Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024

No	Indikator	2021	2022	2023	2024
1	Persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	100	100	100
2	Persentase padukuhan yang terhubung dengan jaringan internet	35,89	66,01	100	100
3	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	50	52	NA	60,87
4	Persentase ketersediaan infrastuktur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	NA	80,00	85,00	86,00
5	Persentase komunitas binaan perangkat daerah yang dilatih	20,00	20,00	40,00	52,27

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman, 2025

K. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Saat ini koperasi masih menjadi soko guru perekonomian dan masih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Meskipun demikian, terdapat tren yang menurun atas keberadaan koperasi di Kabupaten Sleman. Jumlah koperasi pada tahun 2024 tercatat sebanyak 421 unit, meningkat dari tahun 2022 sebanyak 419 unit. Jumlah koperasi aktif meningkat dari 326 di tahun 2022 menjadi 329 di tahun 2024. Persentase koperasi aktif di Kabupaten Sleman mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir, pada tahun 2024 tercatat sebesar 78,15%.

Sebagaimana koperasi, usaha mikro dan usaha kecil juga mempunyai peran dalam perekonomian daerah baik dalam produksi dan distribusi barang dan jasa maupun dalam penyerapan tenaga kerja dan sumber pendapatan penduduk. Jumlah usaha mikro pada tahun 2024 tercatat sebesar 109.961, meningkat dari 90.535 pada tahun 2022. Adapun jumlah usaha mikro kecil menengah pada tahun 2024 bertambah dibandingkan tahun 2022, dari 89.871 unit usaha menjadi 110.142 unit usaha. Perkembangan koperasi dan usaha mikro kecil di Kabupaten Sleman tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah berikut.

Tabel 2.96. Perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah koperasi aktif (unit)	341	355	326	330	329
2	Jumlah koperasi (unit)	407	421	419	422	421
3	Persentase koperasi aktif (%)	83,78	77,67	77,80	76,30	78,15
4	Usaha mikro (unit)	67.414	89.197	90.535	109,757	109.961
5	Jumlah UMKM (unit)	68.382	89.871	90.557	109,936	110.142
6	Persentase usaha mikro dan kecil (%)	98,58	99,25	99,98	99,84	99,84

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman, 2025

L. Penanaman Modal

Aktivitas penanaman modal atau investasi memperlihatkan peran yang sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak atau efek ganda (*mulitiplier effect*) yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian. Aktivitas investasi pada berbagai sektor memungkinkan perekonomian menghasilkan *output* yang banyak, pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sektor.

Penanaman modal di Kabupaten Sleman dalam 5 tahun terus menunjukkan perkembangan, jika dilihat dari jumlah unit usahanya. Sedangkan jika dilihat dari nilai investasinya cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa gambaran investasi yang ada di Kabupaten Sleman cenderung kondusif. Pertumbuhan penanaman modal di Kabupaten Sleman sampai dengan tahun 2024, meliputi investasi penanaman modal asing (PMA) sebanyak 188 unit dengan nilai investasi US$ 275.948.920 dan investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) 791 unit dengan nilai investasi Rp15.338.395 juta. Adapun rasio daya serap tenaga kerja mengalami penurunan di tahun 2024 sebesar 40,69 dari tahun 2021 sebesar 72,01.

Memperhatikan terjadinya penurunan nilai realisasi PMDN dari 34,49% di tahun 2023 menjadi 15,27% pada tahun 2024, apabila dikaitkan dengan rasio daya serap tenaga kerja, perlu mendapat perhatian di dalam penyusunan rencana kebijakan baik di bidang ketenagakerjaan maupun bidang penanaman modal, sehingga perlu terus didorong upaya peningkatan daya saing tenaga kerja dan penciptaan iklim usaha yang kondusif di wilayah Kabupaten Sleman. Kemampuan maupun keterampilan dari tenaga kerja yang memadai menjadi prasyarat yang utama dalam rangka peningkatan daya serap tenaga kerja di bidang usaha. Perkembangan penanaman modal di Kabupaten Sleman tahun 2020-2024 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.97. Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah investor berskala nasional					
	PMDN (unit)	268	404	541	670	791
	PMA (unit)	109	111	121	162	188
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional					
	PMDN (juta rupiah)	7.034.606	8.802.775	9.895.541	13.308.196	15.338.395
	PMA (US $)	214.463.803	224.937.204	242.632.204	258.533.004	275.948.920
3	Rasio Daya serap tenaga kerja	67,58	72,01	64,94	98,04	40,69
4	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (%)	8,64	25,14	12,41	34,49	15,26
5	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMA (%)	3,28	6,63	7,87	6,55	6,74

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Sleman, 2025

M. Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda merupakan salah satu sumber daya manusia yang penting dalam pembangunan daerah. Baik buruknya perkembangan, peradaban dan kultur suatu masyarakat sangat bergantung pada generasi mudanya. Keberadaan pemuda yang aktif dalam kegiatan masyarakat merupakan salah satu solusi dalam upaya pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa pemuda memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan masyarakat. Berbagai program telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk mendorong peran serta pemuda baik dibidang ekonomi maupun sosial. Kinerja pelayanan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.98. Capaian Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	93,48	95,65	99,71	98,37	96,12
2	Persentase wirausaha muda (%)	16,96	17,27	19,33	20,73	24,15
3	Cakupan pembinaan olahraga (%)	71,79	71,79	97,78	71,11	63,04
4	Cakupan pelatih yang bersertifikasi (%)	90,87	90,87	97,10	97,10	97,1
5	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	29,32	56,80	65,30	77,57	82,25
6	Jumlah atlet berprestasi (atlet)	1	20	6	25	17
7	Jumlah prestasi olahraga (cabor)	30	3	31	32	32

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, 2025

Organisasi kepemudaan merupakan salah satu wadah pemuda untuk melakukan kegiatan yang dapat mendorong majunya pembangunan daerah khususnya pembangunan pemuda. Persentase organisasi pemuda yang aktif dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 selalu mengalami peningkatan tetapi pada tahun 2023-2024 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan ada beberapa organisasi pemuda yang tidak aktif. Pada tahun 2022 ada perubahan penghitungan yaitu bukan hanya organisasi pemuda yang berada di bawah naungan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) saja sehingga terjadi lonjakan jumlah organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP). Akan tetapi, jika dilihat dari pemuda yang aktif berorganisasi di Kabupaten Sleman hanya sebanyak 81.098 orang dari jumlah seluruh pemuda sebanyak 238.523 orang sehingga hanya tercapai 34%. Keaktifan anggota OKP tersebut turun dari capaian tahun 2022 sebesar 41,12%. Hal ini disebabkan karena banyak OKP yang tidak aktif pada tahun 2023-2024.

Wirausaha muda mempunyai arti penting dalam pembangunan ekonomi. Wirausaha muda memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, inovasi, diversifikasi ekonomi, dan peningkatan daya saing. Mereka juga berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sosial, serta menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Selama 2020-2024 persentase wirausaha muda di Kabupaten Sleman terus mengalami kenaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak wirausaha muda yang tercipta di Kabupaten Sleman. Pada tahun 2023 ada 199 orang peserta pelatihan yang dapat mandiri dari 960 orang

peserta yang mengikuti pelatihan kewirausahaan. Dalam rangka mendorong keterlibatan pemuda dan organisasi secara lebih luas dan aktif yang memiliki jiwa wirausaha, Kabupaten Sleman telah menyediakan prasarana pendukung seperti pembangunan *Sleman Creative Space* sebagai wadah bagi penggiat ekonomi kreatif terutama para pemuda untuk menuangkan ide-ide usaha secara kolaboratif serta responsif terhadap tuntutan kebutuhan masa kini.

Pembinaan terhadap kegiatan olahraga juga perlu terus dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan motivasi menuju prestasi. Cakupan pembinaan olahraga selama lima tahun terakhir cukup fluktuatif. Pada tahun 2022 meningkat tajam sebesar 97,78%, namun tahun 2024 turun menjadi 63,04%. Hal ini dikarenakan ada perbedaan metode penghitungan. Cakupan pembinaan olahraga tahun 2023 menggunakan penghitungan jumlah cabang olahraga yang dibina sampai dengan resmi dipertandingkan dalam even pekan olahraga pelajar daerah (POPDA) tahun 2023 yaitu sejumlah 32 cabang olahraga dibandingkan dengan jumlah cabang olahraga yang terdaftar sebanyak 45 cabang olahraga. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah cabang olahraga yang dihitung adalah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam even pekan olahraga daerah (PORDA). Even tersebut dilaksanakan setiap dua tahun sekali.

Sementara terkait pelatih yang bersertifikat sudah lumayan baik. Selama 2020-2024 cakupan pelatihan yang bersertifikat menunjukkan tren yang positif. Cakupan pelatih yang bersertifikasi pada tahun 2024 sebanyak 234 pelatih dari total jumlah pelatih sebanyak 241 pelatih. Dengan demikian, pelatih yang telah bersertifikasi sebesar 97,10%. Pelatih yang belum bersertifikasi terdiri dari cabang olahraga angkat berat sebanyak 2 orang, atletik sejumlah 2 orang dan balap sepeda sebanyak 3 orang.

Cakupan pembinaan atlet muda cukup fluktuatif. Pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan, namun mulai tahun 2021-2023 meningkat secara signifikan. Pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 82,25%. Atlet binaan tersebut meliputi siswa sekolah penyelenggaraan Kelas Khusus Olahraga (KKO), atlet dalam kegiatan pembinaan usia dini, atlet yang tergabung dalam Kelompok Olahraga Pelajar (KOP), atlet yang menjalani latihan di Pusat Latihan Atlet Pelajar Daerah (PLAPD) dan atlet yang tergabung dalam sentra olahraga.

Pembinaan atlet muda juga mempengaruhi jumlah atlet berprestasi. Jumlah atlet tahun 2020 sempat turun drastis di angka 1, namun tahun 2021 kembali meningkat, walaupun tahun 2022 kembali menurun dan tahun 2022 kembali meningkat. Jumlah atlet berprestasi pada tahun 2023 sebanyak 25 atlet yang jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan perolehan tahun 2022 namun turun kembali menjadi 18 pada tahun 2024. Perolehan pada tahun 2023 berasal dari 24 atlet yang berprestasi di tingkat nasional dan 1 atlet memiliki prestasi tingkat internasional. Prestasi tingkat nasional tersebut meliputi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) sebanyak 3 atlet, Gala Siswa Indonesia (GSI) nasional sejumlah 19 atlet dan kejuaraan nasional Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) sebanyak 2 atlet. Prestasi internasional diperoleh dari kejuaraan catur internasional.

Jumlah atlet berprestasi dengan jumlah prestasi olahraga tidak berkorelasi secara linear. Pada tahun 2023 jumlah prestasi olahraga sempat mengalami penurunan yang signifikan, namun tahun 2024 kembali meningkat. Jumlah

prestasi olahraga yang dimenangkan pada tahun 2024 sebanyak 32 cabang olahraga. Rincian cabang olahraga tersebut terdiri dari 28 cabang olahraga di even Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), 3 cabang olahraga di even Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan 1 cabang olahraga di even Gala Siswa Indonesia (GSI).

Kabupaten Sleman memiliki banyak prestasi di bidang olahraga baik untuk kejuaraan olahraga profesional maupun kejuaraan olahraga pelajar. Dalam kejuaraan PORDA DIY, bahkan Kabupaten Sleman telah menjadi juara umum sebanyak 3 kali berturut-turut pada tahun 2017, 2019 dan 2022. Perolehan medali pada PORDA DIY tahun 2022, yaitu mendapatkan 164 medali emas, 159 medali perak dan 155 medali perunggu.

Pada tahun 2021 POPDA DIY tidak diselenggarakan karena masih adanya pandemi *Covid-19*. Kabupaten Sleman berhasil menjadi juara umum pada pelaksanaan POPDA DIY tahun 2024 dengan total perolehan medali sebanyak 233 medali dengan rincian 75 medali emas, 67 medali perak dan 91 medali perunggu. Cabang olahraga yang dipertandingkan dalam even tersebut sejumlah 29 cabang olahraga definitif dan 1 cabang olahraga eksibisi.

Tabel 2.99. Perolehan Medali Dalam POPDA DIY Tahun 2020-2024

Medali	2020	2021	2022	2023	2024
Emas	68	-	53	53	75
Perak	63	-	71	65	67
Perunggu	93	-	89	88	91
Jumlah	224	-	213	206	233

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, 2025

N. Statistik

Penyelenggaraan statistik sektoral mulai dilaksanakan sesuai dengan kaidah penyelenggaraan statistik yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan naiknya Indeks Pembangunan Statistik tahun 2023 sebesar 2,31 (predikat cukup) menjadi 2,99 (predikat baik) pada tahun 2024. Ada 5 (lima) domain yang dinilai, dan semua domain tersebut nilainya mengalami peningkatan. Dan saat ini telah terbit Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan statistik sektoral di seluruh lini perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Sleman melaksanakan penilaian penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral perangkat daerah sejak tahun 2024. Rata-rata Indeks Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral (IPKS) di Kabupaten Sleman masih dalam kategori kurang. Oleh karena itu, penilaian ini diharapkan dapat mendorong perangkat daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan statistik sektoral di unit kerja masing-masing.

Indeks Satu Data Indonesia (SDI) dilaksanakan di tingkat kabupaten mulai tahun 2024. Pada tahun tersebut Kabupaten Sleman meraih nilai 75,24. Dari 3 (tiga) domain dan 8 (delapan) aspek yang dinilai, aspek paling rendah terdapat pada aspek perencanaan dengan nilai 49,51. Berdasarkan hal tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai koordinator dan Sekretariat SDI harus mengambil peran penting tersebut bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) sebagai

Walidata, dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) sebagai Pembina Data Spasial dan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai Pembina Data Statistik. Namun demikian, penyelenggaraan evaluasi SDI ini belum ditetapkan dengan produk hukum tersendiri, masih masuk dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas tentang Penetapan Rencana Aksi 2022-2024, sehingga keberlanjutan evaluasi ini masih belum jelas.

Terkait dengan data perencanaan pembangunan dalam e-walidata, ada beberapa tahapan yang dilalui, yaitu perencanaan yang dilaksanakan oleh Bappeda, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data. Data yang dihasilkan, sesuai dengan prinsip SDI, dengan menyertakan metadata. Hal ini juga menjadi perhatian bagi SDM statistik maupun pengelola data, agar data yang dihasilkan dapat dianalisis dan diinterpretasikan secara tepat oleh pengguna data. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman untuk meningkatkan komitmen terhadap penyelenggaraan statistik sektoral yaitu bimbingan teknis statistik sektoral, monitoring dan evaluasi pelaksanaan statistik sektoral, dan kegiatan desk pada bidang statistik kepada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman. Hal ini cukup efektif dalam meningkatkan pengetahuan statistik kepada pengelola data, sehingga diharapkan komitmen perangkat daerah terhadap penyelenggaraan statistik sektoral meningkat.

Pemeriksaan dan penyebarluasan data dilaksanakan oleh Dinas Kominfo. Selain Dinas Kominfo, tahap pemeriksaan data, dilakukan juga oleh BPS selaku Pembina Data Statistik. Tahun 2023 dan 2024 telah dilakukan penyebarluasan data dengan Keputusan Bupati Nomor 51.4/Kep.KDH/A/2024 tentang Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah Tahun 2019-2023 dan Keputusan Bupati Nomor 43.7/Kep.KDH/A/2025 tentang Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah Tahun 2024. Penyebarluasan data dilakukan dengan media buku, *leaflet*, infografis, *e-book*, dan portal data. Portal data yang semestinya merupakan sumber dari seluruh data terbuka saat ini masih perlu dikembangkan, dan perlu terintegrasi dengan aplikasi pengumpulan data. Selanjutnya diperlukan koordinasi antara Bappeda dengan Dinas Kominfo terutama terkait dengan sinkronisasi data dengan subkegiatan untuk perencanaan.

Kabupaten Sleman juga telah menyusun Roadmap Penyelenggaraan Statistik Tahun 2025-2045 dan sedang dilakukan penetapan dalam bentuk peraturan bupati. Roadmap ini tentunya akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan statistik sektoral secara menyeluruh di Pemerintah Kabupaten Sleman yang perlu didukung oleh seluruh lini.

Terkait capaian indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang statistik pada tahun 2024, hampir sebagian besar telah mencapai 100%, hanya persentase perangkat daerah yang berkomitmen terhadap penyelenggaraan statistik sektoral yang baru mencapai 93,48%. Berikut hasil capaian indikator pelayanan urusan statistik Kabupaten Sleman tahun 2021-2024.

Tabel 2.100. Capaian Indikator Urusan Statistik Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024

No	Indikator	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Persentase perangkat daerah yang berkomitmen terhadap penyelenggaraan statistik sektoral (%)	N/A	N/A	70	93,48
2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	100	100	100	100
3	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	100	100	100	100
4	Persentase pelaksanaan dan pengelolaan Satu Data Sleman tepat waktu (%)	100	100	100	100

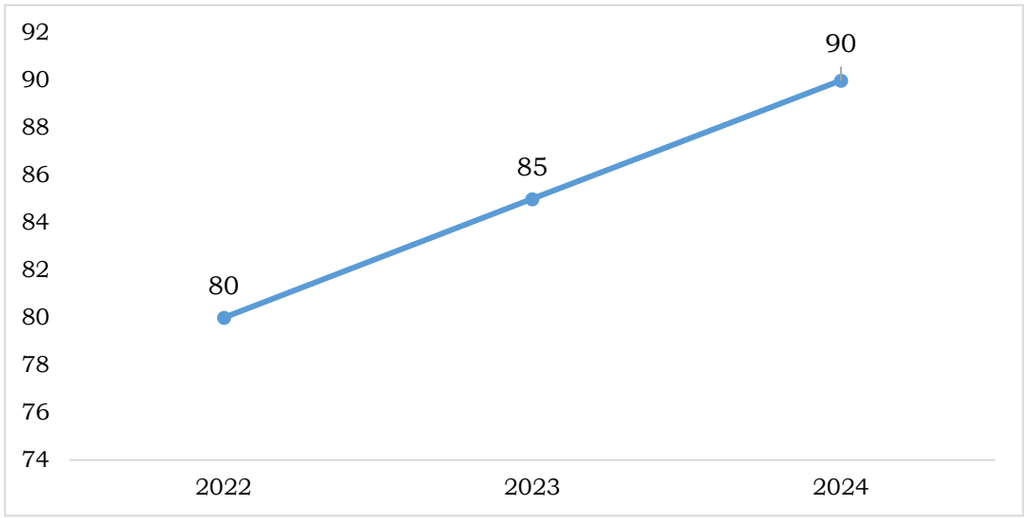
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman, 2025

O. Persandian

Dalam era transformasi digital saat ini dimana seluruh informasi terkoneksi dalam sistem jaringan, keamanan akan data dan informasi menjadi sangat penting. Potensi serangan *cyber* terhadap data dan informasi sangat besar. Insiden *cyber* merupakan kejadian yang mengganggu berjalannya sistem elektronik, misalnya serangan virus, pencurian data, informasi pribadi, hak kekayaan intelektual perusahaan, *web defacement* dan gangguan akses terhadap layanan elektronik. Persiapan terhadap kejadian insiden siber akan memperkecil kerugian akibat pencurian informasi atau gangguan pada layanan dan insiden *cyber* berkembang menjadi lebih luas. Pemulihan sistem dan data elektronik yang terdampak insiden perlu dilakukan sesegera mungkin sehingga organisasi dapat melanjutkan proses bisnis dan kegiatannya. Untuk mengantisipasi terhadap serangan *cyber* diperlukan pengamanan persandian.

Penyelenggaraan pengamanan persandian meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakekat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan Sistem Persandian Negara. Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era serba teknologi informasi saat ini.

Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (*e-office*), perencanaan (*e-planning*), keuangan (*e-budgeting*) dan fungsi pemerintahan lainnya. Tingkat keamanan informasi pemerintah di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan menjadi 90% (2024). Pada tahun 2025 dan seterusnya, perhitungan tingkat keamanan informasi pemerintah merupakan perbandingan dengan Indeks Kami, sehingga hasilnya akan berbeda dengan tahun sebelumnya



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman Tahun 2025

Grafik 2.65. Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2022-2024

Beberapa upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk meningkatkan tingkat keamanan informasi pemerintah yaitu integrasi 257 sertifikat elektronik untuk tanda tangan elektronik, perbaruan lisensi keamanan *data center* dan penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah.

P. Kebudayaan

Kebijakan yang diambil pada pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kebudayaan adalah peningkatan pelestarian terhadap cagar budaya melalui pengelolaan warisan budaya dan peningkatan pelestarian nilai tradisi, kekayaan budaya dan keragaman budaya melalui pengelolaan nilai tradisi, kekayaan budaya dan keragaman budaya.

Capaian kinerja urusan pemerintahan bidang kebudayaan tergambar pada capaian indikator daerah yaitu persentase pelestarian warisan budaya dan jumlah pelestarian rincian obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya. Berdasarkan analisis di kesejahteraan sosial dan budaya, tercermin bahwa porsentase pelestarian warisan budaya di Kabupaten Sleman masih rendah. Pelestarian warisan budaya meliputi: (1) sejarah, bahasa, sastra dan permuseuman; (2) pelestarian cagar, budaya dan warisan budaya; (3) sarana prasarana keistimewaan urusan kebudayaan; (4) adat, seni, tradisi dan lembaga budaya; serta (5) pengelolaan museum kabupaten/kota. Hal ini selaras dengan pencapaian jumlah pelestarian rincian obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang juga masih rendah. Pelestarian warian budaya khususnya terkait nilai-nilai budaya Sleman perlu ditingkatkan terutama kepada generasi muda,

Tabel 2.101. Capaian Indikator Urusan Kebudayaan di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kegiatan)	393	399	436	1.204	530
2	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya (unit)	800	800	800	800	800

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (unit)	290	153	178	203	228
4	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%)	36,25	19,13	22,30	25,38	28,50
5	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (unit)	1	1	2	2	2
6	Tingkat kepuasan pengunjung Museum Gunung Merapi	NA	78,77	86,85	NA	NA
7	Jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi	NA	3	3	3	3
8	Jumlah karya bahasa dan sastra yang dilestarikan	NA	1	1	1	3
9	Rasio kunjungan museum dibanding ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) lain	NA	NA	NA	0,022	0,058
10	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan	NA	19,13	22,25	25,38	28,5
11	Nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi	NA	1	2	2	2

Sumber: Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, 2025

Secara umum capaian kinerja urusan kebudayaan selama lima tahun terakhir (2020-2024) mengalami peningkatan, hanya ada 2 indikator yang cukup fluktuatif dan sempat mengalami penurunan signifikan pada tahun 2021 yaitu jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya serta persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Penyelenggaraan festival seni dan budaya pada tahun 2024 ada 530 kegiatan dan sempat diselenggarakan 1.204 kegiatan pada 2023. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan meningkat dari 153 pada tahun 2021 menjadi 228 pada tahun 2024.

Hal ini meningkatkan capaian persentase benda, situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan dari 19,13% pada tahun 2021 menjadi 22,30% pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 28,50% pada tahun 2024. Jumlah karya budaya tahun 2022-2024 yang direvitalisasi dan diinventarisasi sejumlah 2 unit. Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kebudayaan didukung oleh capaian indikator kinerja program, sebagai berikut:

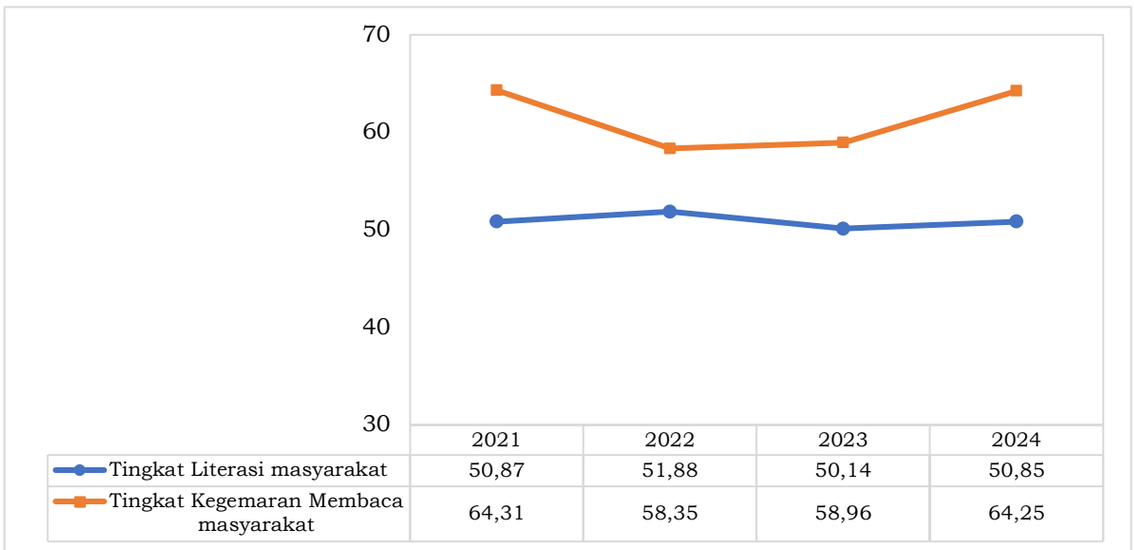
Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 3 Tahun 2017, kebudayaan memiliki peran penting dan mendasar dalam tatanan kehidupan, dengan objek kebudayaan yang meliputi nilai-nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda dan seni. Kabupaten Sleman memiliki nilai luhur yang khas dan membudaya di masyarakat seperti gotong-royong, tolong-menolong, ramah, santun, toleran, dan peduli terhadap sesama yang termuat dalam nilai-nilai budaya Sleman. Namun, masuknya pengaruh budaya asing telah mengakibatkan pelunturan nilai-nilai kebudayaan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, nilai-nilai luhur harus terus disuarakan untuk menangkal pengaruh eksternal-negatif, salah satunya dengan cara melestarikan, memajukan, dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan serta menginternalisasinya di masyarakat, khususnya generasi muda.

Q. Perpustakaan

Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Kinerja urusan pemerintahan bidang perpustakaan berkaitan dengan kemampuan literasi masyarakat. Literasi merupakan bentuk *cognitive skill* meningkatkan kemampuan manusia untuk mengidentifikasi, mengerti, memahami, dan mencipta yang diperoleh dari kegiatan membaca yang kemudian ditransformasikan dalam kegiatan-kegiatan yang produktif yang memberikan manfaat sosial, ekonomi dan kesejahteraan. Perpustakaan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca serta memperluas wawasan, dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan pengetahuan. Perpustakaan merupakan sumber informasi dan sarana strategis dalam peningkatan sumber daya manusia. Keberadaan perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan tingkat literasi dan minat baca di masyarakat.

Tingkat literasi masyarakat dihitung dengan indikator persentase perpustakaan berstandar nasional, persentase pemanfaatan perpustakaan, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan, rasio ketercukupan tenaga perpustakaan, dan rasio ketercukupan koleksi perpustakaan. Tingkat kegemaran membaca masyarakat adalah tingkat perilaku atas kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu

Tingkat literasi masyarakat selama 3 tahun terakhir cenderung fluktuatif, begitu pula dengan tingkat kegemaran membaca masyarakat juga fluktuatif. Tingkat literasi masyarakat dan tingkat kegemaran membaca masyarakat pada tahun 2024 mengalami peningkatan, mencapai 50,85 dan 64,25.



	2021	2022	2023	2024
Tingkat Literasi masyarakat	50,87	51,88	50,14	50,85
Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat	64,31	58,35	58,96	64,25

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman, 2025

Grafik 2.66. Tingkat Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat di Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024

Jumlah pengunjung perpustakaan selama lima tahun terakhir cukup fluktuatif. Meskipun sempat turun akibat pandemi *Covid-19*, namun kembali meningkat pada tahun 2023. Dan pada tahun 2024 jumlah pengunjung perpustakaan mencapai 855 orang.

Begitu pula dengan koleksi buku perpustakaan yang fluktuatif, dan pada tahun 2024 mencapai 49.760 judul. Secara umum untuk kunjungan perpustakaan terjadi penurunan pada masa pandemi, dan tahun 2023 sudah mulai mengalami peningkatan. Disisi lain jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat mulai tahun 2021-2022 mengalami penurunan. Hal ini kemungkinan karena banyaknya pegawai yang purna tugas. Namun pada tahun 2023 mulai meningkat lagi. Berikut capaian kinerja urusan pemerintahan bidang perpustakaan Kabupaten Sleman tahun 2020-2024.

Tabel 2.102. Capaian Indikator Urusan Perpustakaan di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	0,13380	0,1579	0,1395	0,1577	0,2269
2	Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (%)	0,6408	0,6745	0,6638	0,6178	0,6157
3	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	0,6936	0,6297	0,6831	0,6785	0,774
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan / tahun (orang)	640	597	540	617	855
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan (judul)	32.568	38.989	40.206	30.174	49.760
6	Persentase jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (%)	50,00	58,33	23,08	26,92	34,62
7	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan (%)	NA	5,16	6,05	9,59	10,32
8	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan (%)	NA	24,42	26,74	30,23	44,19
9	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	NA	2,13	2,14	1,95	1,76
10	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan jumlah penduduk	NA	0,00047	0,000464	0,000709	0,0007
11	Pesentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat (%)	NA	12,15	13	15,77	24,05
12	Jumlah pemasyarakat gemar membaca di masyarakat (kali)	NA	1	5	8	16
18	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar dalam wilayahnya (naskah kuno)	NA	0	1	1	1

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman, 2025

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perpustakaan melalui program pembinaan perpustakaan dan program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno.

R. Kearsipan

Kearsipan memainkan peran yang krusial dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah. Arsip tidak hanya berfungsi sebagai pusat ingatan dan sumber informasi, tetapi juga mendukung berbagai aspek pemerintahan, mulai dari perumusan kebijakan hingga pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pengelolaan arsip yang baik dan benar sangat penting untuk memastikan bahwa arsip dapat berfungsi secara optimal dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan mengikuti norma, standar, dan pedoman yang berlaku, serta membangun sistem kearsipan yang komprehensif dan terpadu, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa arsip dikelola dengan cara yang efisien dan efektif.

Penyelenggaraan Urusan Kearsipan mempunyai fungsi strategis bagi perkembangan daerah karena ketersediaan arsip secara utuh, autentik dan terpercaya pada setiap Pemerintah Daerah akan memberikan dukungan nyata bagi pelaksanaan reformasi birokrasi utamanya untuk kemanfaatan penilaian kinerja, pertanggungjawaban kinerja, pelayanan publik serta penyediaan alat bukti bagi kepentingan lainnya.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan diantaranya melakukan penyusunan kebijakan, pembinaan, pengawasan, pelayanan, pengembangan sumber daya kearsipan, pembangunan sistem informasi kearsipan berbasis teknologi informasi untuk mewujudkan budaya tertib arsip dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman. Upaya tersebut dilakukan untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sehingga pengelolaan kearsipan berjalan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penanganan arsip menjadi kebutuhan penting dalam upaya penyelamatan arsip-arsip aktif maupun in aktif, diperlukan ada upaya bersama dari para pejabat administratif untuk memulai dan melaksanakan secara optimal dalam penyelamatan arsip-arsip penting. Penyelenggaraan kearsipan yang baik harus sesuai dengan Prinsip, Kaidah, Norma, Standar Kearsipan. Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) selama 4 tahun terakhir (2021-2024) sangat fluktuatif, bahkan pada tahun 2023 sempat mengalami penurunan menjadi 93,10% dan meningkat lagi ke 95,86%. Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) adalah laporan yang disusun berdasarkan laporan hasil audit penyelenggaraan kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan daerah.

Tabel 2.103. Capaian Indikator Urusan Kearsipan di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) (%)	NA	85,28	93,58	93,1	95,86
2	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	100	93,75	97,92	93,75	95,83
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (%)	NA	74,92	75,02	75	76,31

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (%)	NA	93,75	100	100	105,56
5	Persentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten/ kota (%)	NA	100	100	100	100
6	Pelestarian arsip (kali)	2	2	1	2	2
7	Jumlah SDM pengelola kearsipan (orang)	327	333	333	222	229

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman, 2025

Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku lima tahun terakhir juga sangat fluktuatif, pada tahun 2023 sempat turun dan 2024 meningkat Kembali menjadi 95,83%. Begitu pula jumlah sumber daya manusia pengelola kearsipan juga mengalami penurunan dan pada tahun 2024 menjadi 229 orang. Kondisi ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sleman untuk meningkatkan kepedulian perangkat daerah dalam mengelola kearsipan secara baku sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja bidang kearsipan melalui program pengelolaan arsip, program perlindungan dan penyelamatan arsip, dan program perizinan penggunaan arsip. Data perkembangan arsip dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.104. Data Perkembangan Arsip Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Arsip dinamis (berkas)	475.747	504.988	290.908	329.111	351.992
2	Arsip vital (berkas)	17.662	18.328	18.328	18.328	18.328
3	Arsip aktif (berkas)	228.499	228.499	253.970	293.449	313.960
4	Arsip inaktif (berkas)	19.124	17.115	18.610	17.334	19.704
5	Arsip statis (berkas)	25.733	25.939	26.317	31.505	34.849
6	Arsip tekstual (boks)	2.088	2.088	1.858	1.903	10.878
7	Arsip audio (unit)	20	20	68	53	66
8	Arsip audio visual (unit)	109	109	323	311	311
9	Arsip foto (lembar)	1.685	1.685	3.514	7.173	7.309
10	Arsip peta atau kartografi dan kearsitekturan (lembar)	1.017	1.017	1.726	1.660	1.660

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman, 2025

2.1.4.4.1 Urusan Pemerintah Pilihan

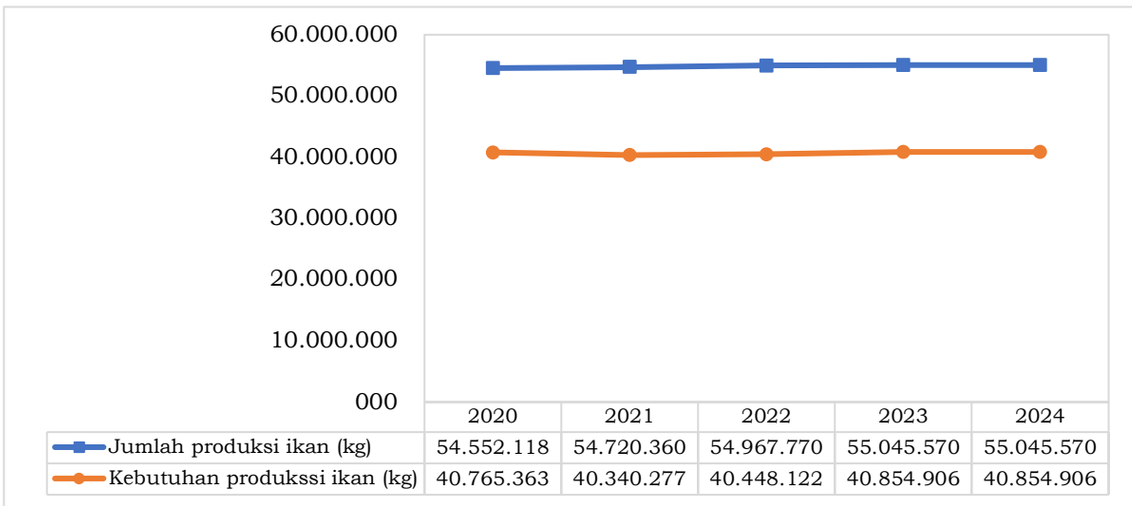
A. Kelautan dan Perikanan

Sebagai wilayah yang tidak memiliki wilayah laut di DIY, sektor perikanan di Kabupaten Sleman mengandalkan perikanan budidaya. Perikanan budidaya di Kabupaten Sleman memanfaatkan beragam teknologi, seperti kolam

budidaya biasa, bioflok, hingga mina padi dimana perikanan budidaya diintegrasikan dengan kegiatan budidaya pertanian.

Sektor perikanan Kabupaten Sleman merupakan salah sektor potensial dimana hal ini ditunjukkan pada data PDRB Kabupaten Sleman Tahun 2023 yaitu sektor perikanan, kehutanan dan perikanan Kabupaten Sleman berada pada persentase 8,06 persen atau berada pada peringkat 6 besar dari 17 sektor dalam PDRB Kabupaten Sleman.

Namun berdasarkan data, jumlah produksi sektor perikanan tercatat masih belum optimal dan dinamis naik dan turun, sementara kebutuhan dari konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Sleman cenderung terus naik. Berikut adalah grafik penggambaran gap antara jumlah produksi ikan dan jumlah kebutuhan ikan di Kabupaten Sleman.

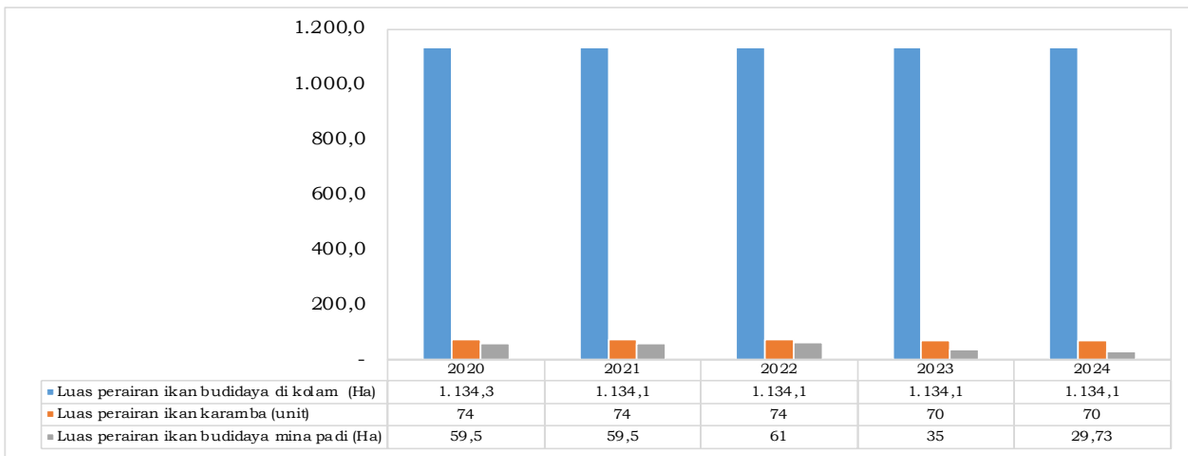


	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah produksi ikan (kg)	54.552.118	54.720.360	54.967.770	55.045.570	55.045.570
Kebutuhan produkssi ikan (kg)	40.765.363	40.340.277	40.448.122	40.854.906	40.854.906

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, 2025

Grafik 2.67. Jumlah Produksi Ikan dan Kebutuhan Ikan di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

Tingkat ketersediaan ikan adalah sebesar 37,36 kg/kapita/tahun lebih tinggi dari tingkat konsumsi ikan sebesar 37,13 kg/kapita/tahun. Meskipun sudah mencukupi kebutuhan konsumsi ikan bagi masyarakat Kabupaten Sleman namun hal ini menjadi perhatian mengingat jumlah penduduk Kabupaten Sleman yang terus meningkat sementara lahan atau kegiatan budidaya perikanan masyarakat yang cenderung menurun dari tahun ke tahun.



	2020	2021	2022	2023	2024
Luas perairan ikan budidaya di kolam (Ha)	1.134,3	1.134,1	1.134,1	1.134,1	1.134,1
Luas perairan ikan karamba (unit)	74	74	74	70	70
Luas perairan ikan budidaya mina padi (Ha)	59,5	59,5	61	35	29,73

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2025

Grafik 2.68. Luas Perairan Ikan Budidaya Kolam, Keramba dan Mina Padi di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

Tantangan penyediaan produksi perikanan ini juga harus menjadi perhatian oleh seluruh *stakeholders* karena salah satu faktor produksi juga dipengaruhi oleh adanya perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Sleman terutama penggunaan lahan perikanan budidaya.

B. Pariwisata

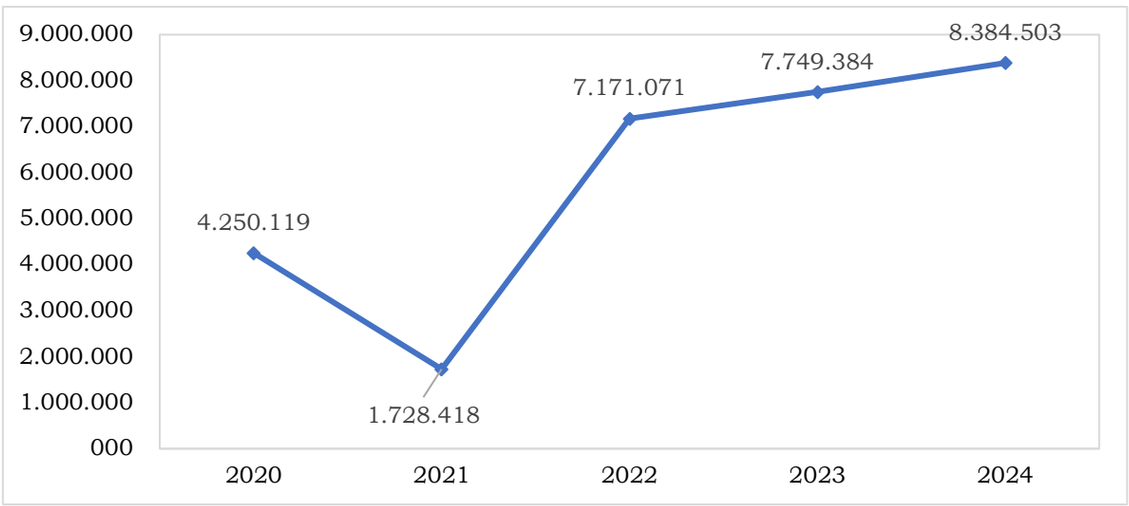
Kabupaten Sleman memiliki beragam potensi pada sektor pariwisata baik itu pariwisata alam yang meliputi wisata ekologi dan wisata petualangan, wisata budaya yang meliputi wisata warisan budaya dan sejarah serta wisata kota dan desa, hingga wisata buatan seperti wisata kuliner, wisata *meeting, incentives, conventions and exhibitions* (MICE), wisata olahraga dan beragam pariwisata lainnya. Potensi ini ditunjukkan dengan munculnya minat wisatawan untuk berkunjung dan berwisata. Potensi wisata di Kabupaten Sleman secara lebih rinci jumlahnya dijabarkan pada tabel di bawah.

Tabel 2.105. Potensi Objek Wisata Di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Wisata alam	8	12	18	18	18
2	Wisata candi (jenis)	9	9	10	10	10
3	Wisata museum	8	8	20	20	20
4	Kegiatan luar (even)	1	1	2	2	3
5	Kategori desa wsata	53	53	80	80	81
6	Wisata buatan	0	0	10	6	8

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, 2025

Perkembangan kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Sleman terus meningkat pasca *Covid-19* menjadi 8.384.503 orang pada tahun 2024. Dinamika jumlah kunjungan wisatawan dijabarkan melalui grafik dibawah berikut.

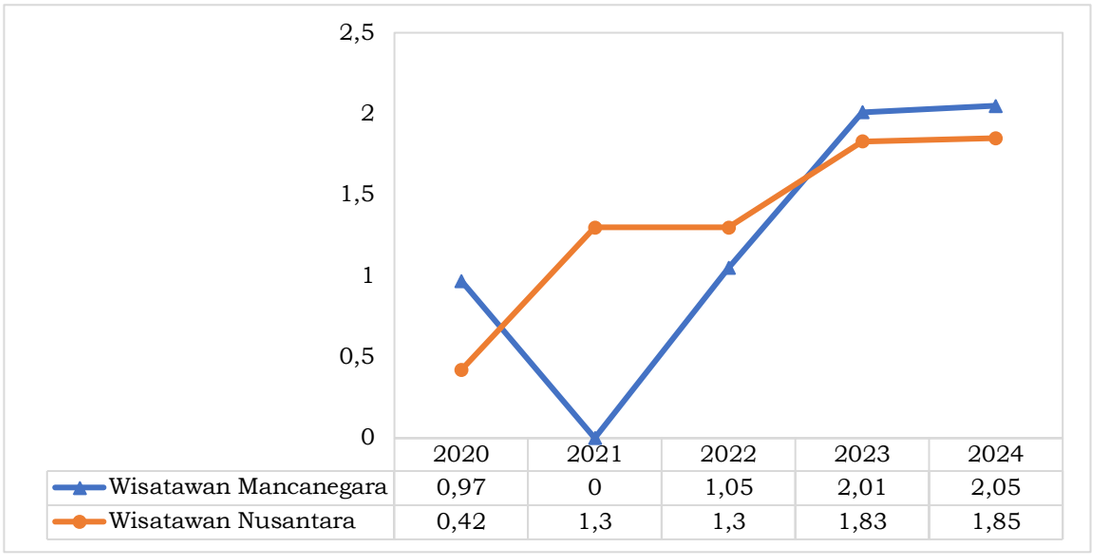


Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, 2025

Grafik 2.69. Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (orang)

Untuk meningkatkan jumlah wisatawan di Kabupaten Sleman, kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Sleman perlu terus dikembangkan melalui

revitalisasi maupun pengembangan obyek daya tarik wisata (ODTW) serta penataan yang menyeluruh termasuk fasilitas pendukung wisata. Selain itu, penyediaan akomodasi berkualitas, aksesibilitas dan keamanan bagi para wisatawan juga dapat meningkatkan *length of stay* wisatawan baik nusantara maupun mancanegara yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam lima tahun terakhir, lama tinggal wisatawan mancanegara di Kabupaten Sleman berada pada rentang waktu 1 (satu) hari sedangkan wisatawan nusantara rata–rata 1,3 hari. Untuk mendukung *length of stay* dapat dilakukan dengan penerapan aplikasi berbasis mobile *global positioning system* (GPS) untuk melakukan perencanaan wisata satu hari di Kabupaten Sleman dimana dengan aplikasi tersebut dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi tempat wisata, restoran, tempat ibadah, stasiun pompa bensin umum (SPBU), dan sarana transportasi yang bisa digunakan oleh wisatawan. Keberadaan aplikasi seperti ini diharapkan mampu mendukung Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka memaksimalkan potensi pariwisata dan meningkatkan pendapatan UMKM di Kabupaten Sleman. Untuk lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut.

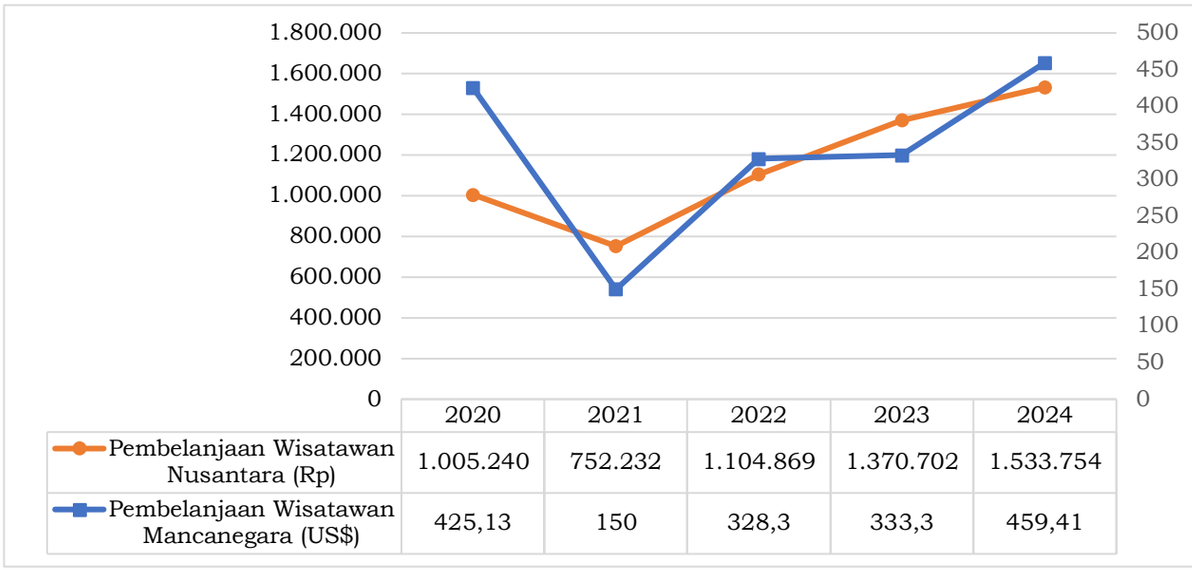


	2020	2021	2022	2023	2024
Wisatawan Mancanegara	0,97	0	1,05	2,01	2,05
Wisatawan Nusantara	0,42	1,3	1,3	1,83	1,85

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, 2025

Grafik 2.70. Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara dan Nusantara di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (Hari)

Lama tinggal wisatawan di Kabupaten Sleman merupakan salah satu indikator penting dalam menilai daya tarik destinasi wisata. Peningkatan jumlah wisatawan dan lama tinggal wisatawan dapat meningkatkan pendapatan daerah, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Indikator lain yang digunakan adalah pembelanjaan wisatawan. Pembelanjaan wisatawan adalah total uang yang dibelanjakan oleh wisatawan selama melakukan perjalanan wisata, termasuk biaya akomodasi, transportasi, makanan, aktivitas, dan pembelian barang atau jasa lainnya terkait perjalanan tersebut. Jumlah pembelanjaan wisatawan mancanegara rata-rata sebesar US$ 459 dan pembelanjaan wisatawan nusantara rata-rata sebesar Rp1.533,754,00. Berikut adalah grafik pembelanjaan wisatawan di Kabupaten Sleman rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2024.

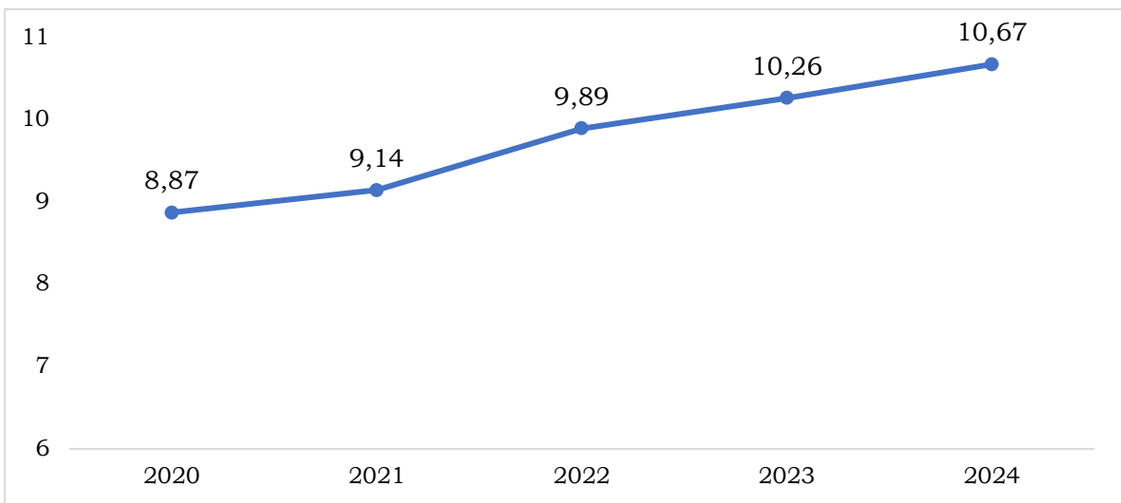


	2020	2021	2022	2023	2024
Pembelanjaan Wisatawan Nusantara (Rp)	1.005.240	752.232	1.104.869	1.370.702	1.533.754
Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara (US$)	425,13	150	328,3	333,3	459,41

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, 2025

Grafik 2.71. Pembelanjaan Wisatawan Mancanegara (US$) dan Wisatawan Nusantara (Rp) di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

Adapun kontribusi sektor pariwisata di Kabupaten Sleman yang tercermin dari lapangan usaha akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Kabupaten Sleman rentang waktu tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah.



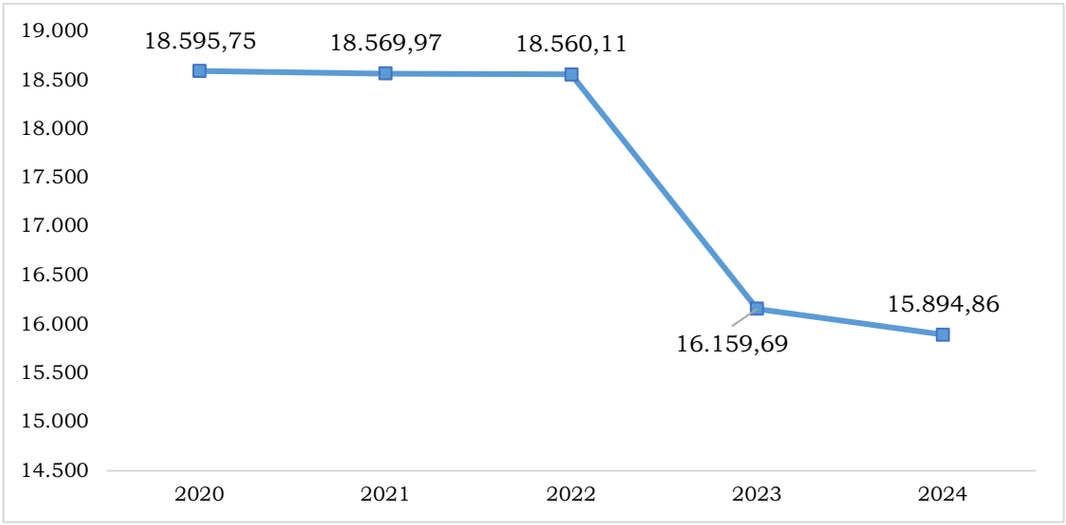
Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, 2023

Grafik 2.72. Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

C. Pertanian

Sektor pertanian Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun mengalami penekanan dari sektor pembangunan kota yang cenderung masif. Lahan pertanian yang ada tergerus oleh perubahan lahan pertanian menjadi permukiman, komersial, jasa maupun pemanfaatan lahan lain yang cenderung berorientasi pada ekonomi-komersial. Hal ini tentu menjadikan perhatian bersama dimana lahan pertanian sebagai salah satu sumber utama dari ketahanan pangan suatu daerah. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman luas lahan sawah Kabupaten Sleman cenderung mengalami penyusutan dimana pada tahun

2020 luas lahan sawah Kabupaten Sleman seluas 18.595,75 Ha kemudian pada tahun 2024 menurun menjadi 15.894,86 Ha.



Sumber: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman, 2025

Grafik 2.73. Luas Sawah Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

Suatu daerah memiliki ketahanan pangan yang baik tentu memperhatikan sektor pertanian dari hulu hingga ke hilir proses produksinya dimana hal ini ditunjukkan dengan adanya arahan pembangunan pertanian di Kabupaten Sleman diarahkan untuk dapat mewujudkan masyarakat pertanian yang mandiri, memiliki daya saing serta sejahtera. Berdasarkan data Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman pada tahun 2024, produktivitas padi atau bahan pangan utama yaitu sebesar 60,36 kw/ha meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 60,22 kw/ha. Produktivitas padi dan bahan pangan utama dipengaruhi faktor pola tanam, penggunaan bibit yang berkualitas dan penggunaan pupuk organik.

D. Perdagangan

Sarana prasarana perdagangan tradisional, pasar dengan pengelolaan sampah baru terdapat di Pasar Cebongan dan Pasar Sleman. Pedagang kaki lima yang menempati lokasi yang telah ditentukan sebanyak 1.633 PKL. Jumlah usaha perdagangan cenderung meningkat setiap tahunnya, seperti terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.106. Jumlah Sarana Perdagangan di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pasar desa	41	34	34	36	36
2	Pasar lokal/kabupaten	37	37	37	35	32
3	Pasar hewan	2	2	2	2	2
4	Usaha perdagangan milik pemerintah kabupaten	6	5	5	5	5
5	Toko modern					
	- Minimarket cabang/waralaba nasional	219	226	281	307	320
	- Toko modern lokal	212	213	215	231	241
	- Pusat perbelanjaan	4	6	5	5	5

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	- Perkulakan/grosir	2	2	2	2	2
	- *Hypermarket*	5	8	5	5	5
	- Supermarket	14	21	19	17	19
	- *Department store*	8	3	7	7	11
6	Usaha pergudangan	190	199	204	213	234

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2025

Jumlah pasar desa relatif stabil dari tahun 2020 hingga 2024, dengan sedikit variasi.. Hal ini disebabkan oleh perkembangan ekonomi lokal dan faktor-faktor seperti pertumbuhan penduduk di desa dan kapasitas pengelolaan pasar desa. Jumlah pasar lokal atau kabupaten mengalami penurunan selama periode 2020-2024. Adapun jumlah pasar hewan tetap konstan. Kebutuhan lokal akan pangan hewan dan perdagangan hewan hidup mungkin berperan dalam menjaga kestabilan ini

Jumlah sarana usaha perdagangan milik pemerintah kabupaten mengalami penurunan pada tahun 2021. Penurunan ini disebabkan oleh kebijakan atau restrukturisasi dari pemerintah kabupaten terkait pengelolaan sarana perdagangan. Jumlah minimarket cabang atau waralaba nasional mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan bisnis minimarket cabang atau waralaba nasional yang kuat selama periode tersebut. Jumlah toko modern lokal mengalami peningkatan. Hal ini dapat mencerminkan daya saing dan popularitas toko modern lokal di komunitas setempat.

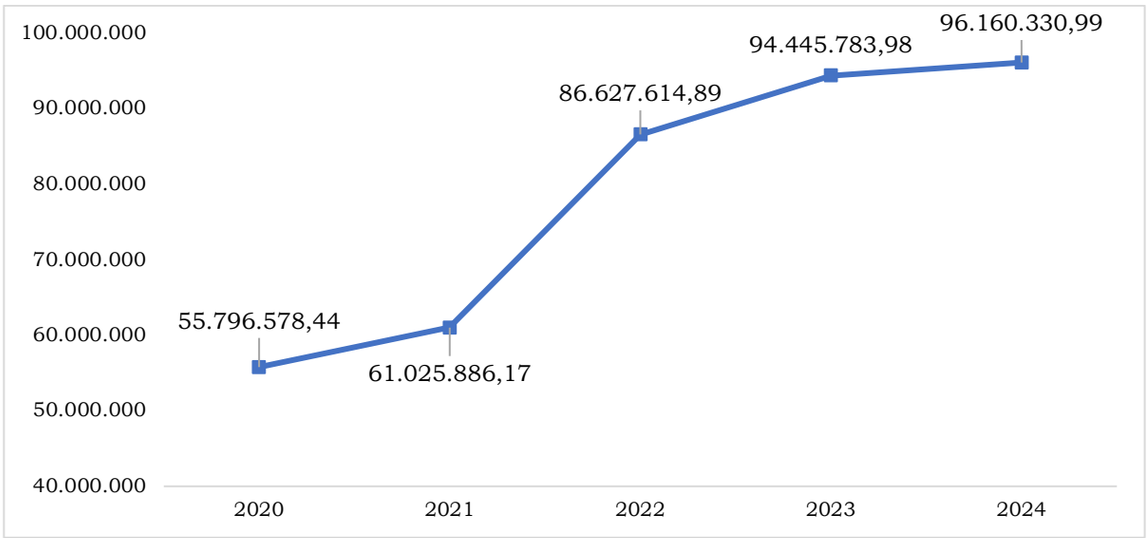
Jumlah pusat perbelanjaan cenderung stabil selama periode tersebut, dengan peningkatan sedikit pada tahun 2021. Pusat perbelanjaan umumnya berfungsi sebagai tempat berkumpulnya berbagai toko dan restoran, sehingga jumlahnya cenderung lebih stabil. Jumlah perkulakan atau grosir tetap stabil sepanjang periode tersebut. Ini menunjukkan kebutuhan akan pusat distribusi grosir yang konstan dalam pasokan barang bagi bisnis lokal. Jumlah *hypermarket* sempat meningkat pada tahun 2021 namun turun kembali pada tahun berikutnya. Ini mencerminkan pergeseran animo masyarakat untuk berbelanja dalam skala besar secara fisik dan beberapa mulai mengarah pada perbelanjaan secara daring.

Jumlah supermarket mengalami peningkatan yang signifikan. Supermarket umumnya menyediakan berbagai produk dalam skala menengah, dan pertumbuhan ini dapat mencerminkan adanya pertumbuhan pasar baru bagi supermarket, yakni kawasan *real estate* atau perumahan pengembang baru. Jumlah *departemen store* mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2021, pada saat pandemic *Covid-19*.

Analisis ini memberikan gambaran tentang bagaimana berbagai jenis sarana perdagangan berkembang dari tahun ke tahun. Fluktuasi dan perubahan dalam jumlah sarana perdagangan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perkembangan ekonomi, perubahan perilaku belanja masyarakat, dan kebijakan pemerintah.

Geliat sektor perdagangan dapat pula dilihat dari kinerja ekspor yang meningkat dalam 5 tahun terakhir. Dimana pada tahun 2024 meningkat menjadi 96.160.330,99. Kenaikan ekspor pada tahun 2023 ini dikarenakan adanya kenaikan ekspor untuk *wearpack safety* atau pakaian keselamatan

kerja ke Korea Selatan. Pada tahun 2024, negara tujuan ekspor terbesar dari Kabupaten Sleman adalah Jepang dan Amerika.



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2025

Grafik 2.74. Nilai Ekspor di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

Kenaikan ekspor ini mengalami peningkatan yang signifikan antara tahun 2020 dan 2024 mencapai 72,34%. Mulai tahun 2023, jika dilihat dari nilai ekspor, terlihat bahwa dampak positif dari gerakan anti impor produk Cina yang dilakukan oleh Amerika dan beberapa negara Eropa mulai pudar. Permintaan ekspor dari negara-negara tersebut mulai turun atau kembali ke kondisi permintaan sebelum adanya pandemi *Covid-19*, sehingga dapat berdampak pada penurunan nilai ekspor. Untuk itu perusahaan berorientasi ekspor di Sleman perlu untuk membuka pasar dan peluang baru.

E. Urusan Pilihan Perindustrian

Pengembangan kegiatan industri sangat bermanfaat di dalam proses pembangunan terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja dan perputaran arus modal. Sampai tahun 2024, sektor industri di Kabupaten Sleman berkontribusi sebesar 12,37% terhadap PDRB atas dasar harga berlaku mengalami penurunan dari tahun sebelumnya tahun 2023 sebesar 12,44%. Ini terjadi karena nilai produksi pada sektor industri yang fluktuatif. Industri kecil dan rumah tangga yang mendominasi kegiatan masyarakat di tingkat lokal mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2024 tercatat sebanyak 12.341 unit dibandingkan pada tahun 2022 sebanyak 11.353 unit. Data perkembangan indikator Perindustrian tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.107. Capaian Indikator Urusan Perindustrian Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)	13,44	13,06	12,6	12,44	12,37
2	Jumlah usaha industri	11.362	11.445	11.571	12.070	12.565
3	Pertumbuhan industri (%)	-34	2.1	2,20	2,6	2,75
4	Jumlah industri kecil & rumah tangga (unit)	11.153	11.233	11.353	11.847	12.341

Sumber: BPS, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2025

Pendampingan dan pemberdayaan industri kecil merupakan prioritas pembangunan di tahun 2024 dalam rangka pengembangan potensi ekonomi lokal. Diharapkan dengan adanya pembinaan, pemberdayaan dan penguatan modal pada pelaku industri kecil dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR), sehingga dapat menurunkan indeks gini yang semakin tinggi di Kabupaten Sleman.

F. Urusan Pilihan Transmigrasi

Program penempatan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sasaran penyelenggaraan transmigrasi adalah meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian dan mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi, sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Melalui transmigrasi diharapkan kemiskinan yang disebabkan oleh terbatasnya kesempatan kerja dan ketidakberdayaan penduduk untuk memperoleh tempat tinggal yang layak dapat teratasi.

Tabel 2.108. Realisasi Penempatan Transmigrasi Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

Transmigrasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
a. Pendaftaran seleksi (KK)	17	15	25	31	41
b. Pemberangkatan					
- KK	0	0	12	5	6
- Jiwa	0	0	48	8	21
c. Transmigran yang kembali	0	0	0	0	0
d.Daerah tujuan (kabupaten)	0	0	4	2	3

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman, 2025

Pada tahun 2020, Kabupaten Sleman tidak memberangkatkan transmigran karena adanya keputusan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk tidak melakukan penempatan transmigrasi terkait pandemi *Covid-19*. Pada tahun 2020, Kabupaten Sleman mendapatkan kuota penempatan sejumlah 15 KK. Selanjutnya pada pertengahan tahun 2021, Kemendes PDTT melakukan pengurangan alokasi penempatan transmigrasi karena adannya kebijakan *refocusing* dan realokasi belanja kementerian/lembaga tahun 2021. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Nomor 593/PKT.04.01/VII/2021 Tahun 2021 tentang Revisi Alokasi Penempatan Transmigrasi Tahun 2021. Dengan adanya kebijakan tersebut, untuk Kabupaten Sleman tidak memperoleh kuota penempatan dan tidak memberangkatkan transmigrasi.

2.1.4.4.2 Unsur Pendukung dan Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

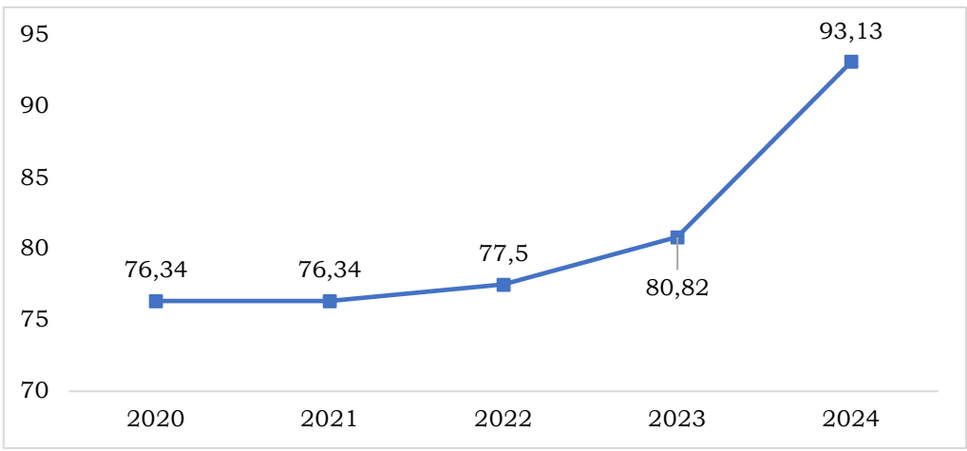
1. Unsur Sekretariat Daerah

Pelaksanaan unsur pendukung urusan pemerintahan, yaitu sekretariat daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.

Sekretariat Daerah adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah, dan pelayanan administratif perangkat daerah.

a. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Sleman yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2023 atas pelaksanaan reformasi brokrasi Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2022 telah dilakukan oleh KemenPAN-RB sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sleman tahun 2024 adalah 93,13 dengan kategori "A". Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan.



Sumber: KemenPAN-RB, 2021-2025

Grafik 2.75. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

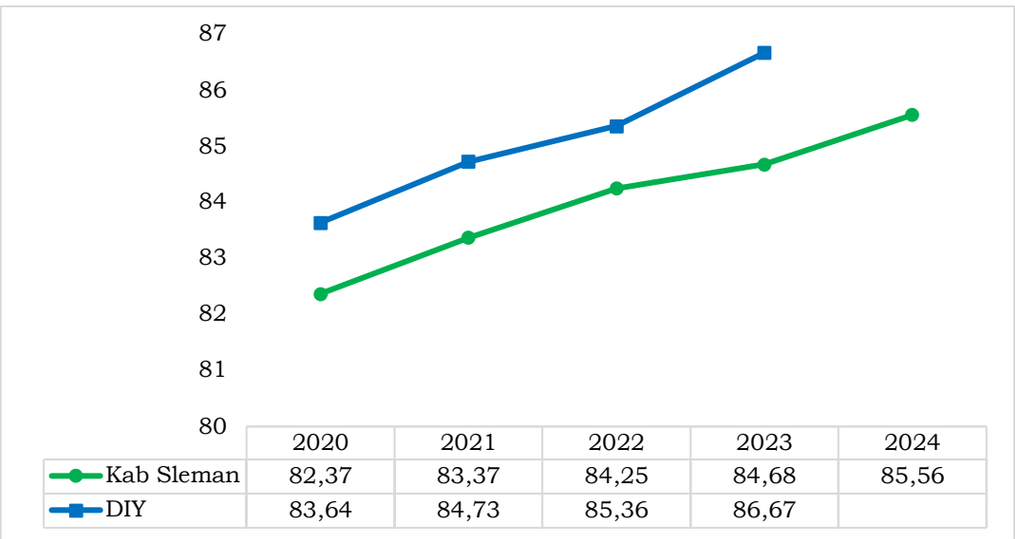
Meskipun demikian, hasil evaluasi tidak dapat diperbandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan parameter penilaiannya. Sebelum tahun 2023, nilai reformasi birokrasi Kabupaten Sleman masih di level BB, namun dengan parameter perhitungan yang baru di tahun 2024 naik di level AA. Tahun 2025 diprediksi juga akan ada perubahan parameter penilaian, sehingga tidak dapat digunakan untuk proyeksi tahun berikutnya.

b. Indeks Kepuasan Masyarakat

Pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan

kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu faktor yang mendorong terwujudnya teta kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sleman juga dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM adalah hasil survei kepuasan masyarakat yang merupakan predikat kualitas dan kinerja pelayanan publik tingkat kabupaten berdasarkan nilai IKM yang dicapai oleh semua perangkat daerah dan UPT. IKM diperoleh dari survei kepuasan masyarakat. IKM selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang positif, walaupun peningkatannya tidak signifikan. IKM pada tahun 2023 mencapai angka 84,68, lebih rendah daripada DIY. Kondisi ini menegaskan kembali bahwa kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sleman belum optimal.



	2020	2021	2022	2023	2024
Kab Sleman	82,37	83,37	84,25	84,68	85,56
DIY	83,64	84,73	85,36	86,67	

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, 2025

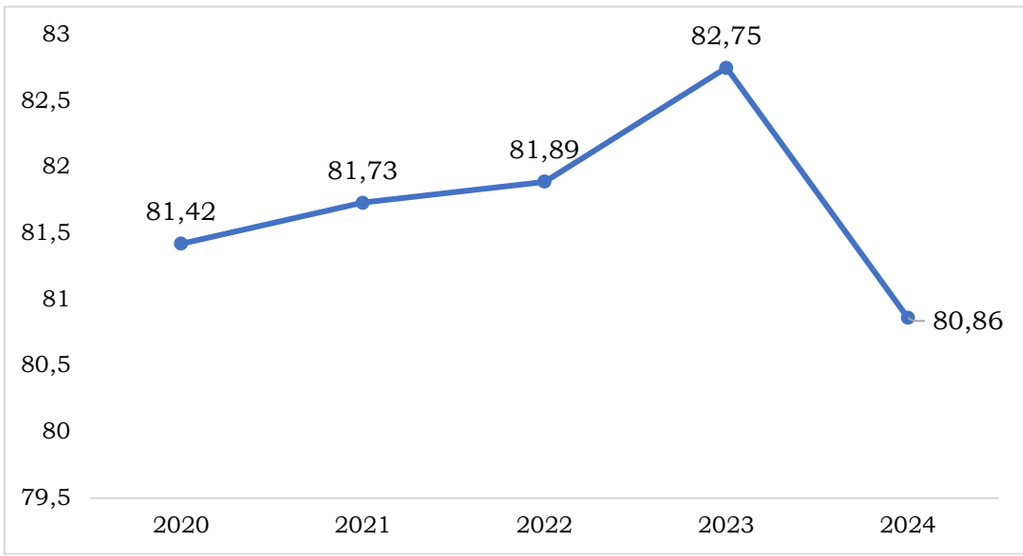
Grafik 2.76. Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

Apabila dilihat dari kondisi layanan publik, maka ada beberapa faktor yang menyebabkan pelayanan publik kurang optimal yaitu pengelolaan lapor Sleman sebagai wadah pengaduan masyarakat terhadap layanan publik belum optimal; belum semua unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman menerapkan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); sebagian besar Unit Pelayanan Publik (UPP) belum menginternalisasi dan mempublikasikan secara elektronik dan *non elektronik core value* ASN berakhlak, kode etik, kode perilaku pelaksana dan budaya pelayanan instansi; sarana dan prasarana yang inklusif terkait dengan standar kelayakan masih perlu ditingkatkan; serta kualitas pelayanan publik di tingkat kapanewon sebagai garda depan pelayanan terhadap masyarakat belum optimal dikarenakan keterbatasan kompetensi SDM pelayanan.

c. Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Predikat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah predikat yang diberikan oleh Kementerian PAN RB atas hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di setiap instansi pemerintah. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* dan *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.



Sumber : KemenPAN-RB, 2021-2025

Grafik 2.77. Nilai AKIP Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

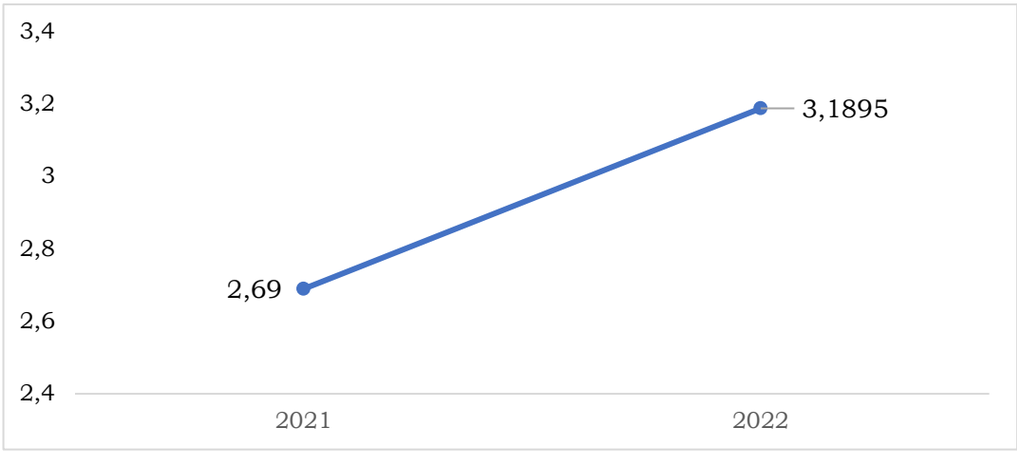
Berdasarkan data di atas, nilai AKIP Kabupaten Sleman empat tahun terakhir menunjukkan tren yang positif, meskipun menunjukkan nilai yang fluktuatif namun masih masuk pada predikat "A". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "memuaskan", yaitu instansi pemerintah dan unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Walaupun demikian, predikat "A" yang dicapai ada pada level A rendah sehingga masih ada beberapa catatan yang perlu ditingkatkan baik pada komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja.

Struktur organisasi yang masih terfragmentasi menyebabkan pohon kinerja yang disusun masih dibatasi kewenangan/struktur yang ada sehingga belum adaptif berdasarkan *critical success* dan *logical framework* yang lebih komprehensif. Dari segi pengukuran kinerja, penyusunan indikator kinerja pada level perangkat daerah belum sepenuhnya dilengkapi definisi operasional, formulasi perhitungan dan sumber data. Sedangkan dari segi pelaporan kinerja, analisis terhadap kinerja pemerintah daerah masih perlu dielaborasi lebih dalam terhadap faktor penghambat dan pendukung keberhasilan kinerja pembangunan daerah serta *refocusing* program atau kegiatan.

d. Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Status kinerja pemerintah daerah adalah nilai yang diperoleh pemerintahan daerah berdasarkan hasil penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun n-2 oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur dengan EPPD atas LPPD. Skor ini diperoleh melalui akumulasi

capaian kinerja makro dan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK), baik IKK *outcome* maupun IKK *output*. Sejak *Covid-19*, Kementerian Dalam Negeri baru 2 (dua) kali melaksanakan EPPD, yaitu pada tahun 2022 atas LPPD tahun 2021 dan tahun 2023 atas LPPD tahun 2022. Hasil status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2022 secara skor mengalami peningkatan namun masih dalam predikat sedang.



Sumber : Kemendagri, 2022-2023

Grafik 2.78. Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2022

Capaian indikator unsur sekretariat daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.109. Capaian Indikator Unsur Sekretariat Daerah di Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024

No	Uraian	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Persentase kinerja perangkat daerah dengan predikat "Baik" berdasarkan indikator penilaian kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100	100
2	Tingkat kepuasan terhadap protokoler dan komunikasi pimpinan (%)	83,83	85,98	85,85	85,88
3	Persentase dokumen LPPD tersedia tepat waktu (%)	100	100	100	100
4	Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat (%)	100	100	100	100
5	Persentase raperda yang diundangkan menjadi peraturan daerah (%)	100	100	100	100
6	Persentase kerja sama yang aktif (%)	100	100	100	100
7	Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian (%)	100	100	100	100
8	Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang pembangunan (%)	100	100	100	100
9	Persentase pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (%)	100	100	100	100
10	Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional (%)	100	100	98	100

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, 2025

2. Unsur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Sekretariat DPRD memainkan peran kunci dalam mendukung DPRD melaksanakan tugas dan fungsinya dengan efektif melalui penyusunan rencana kerja tahunan yang terintegrasi dengan RPJMD dan RKPD, serta penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran yang komprehensif. Sekretariat DPRD memastikan bahwa fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran dapat dijalankan dengan optimal. Integrasi dan koordinasi yang baik antara Sekretariat DPRD dan alat-alat kelengkapan DPRD memungkinkan terwujudnya sinergi dalam pelaksanaan program-program kerja dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Ada beberapa kendala dalam menyelenggarakan kinerja unsur sekretariat DPRD antara lain belum optimalnya fasilitasi legislasi terhadap peraturan daerah yang dihasilkan pada program legislasi daerah melalui pembahasan panitia khusus, adanya jadwal kegiatan dewan yang sering berubah, keterbatasan waktu dalam menyelesaikan kegiatan anggota DPRD dan belum optimalnya penyelesaian kinerja Sekretariat DPRD sebagai akibat dari menurunnya jumlah kualitas sumber daya aparatur. Berikut capaian indikator kinerja program pada urusan Sekretariat DPRD Tahun 2021-2024.

Tabel 2.110. Capaian Indikator Unsur Sekretariat DPRD di Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024

No	Indikator	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Persentase raperda inisiatif DPRD yang disetujui DPRD dengan Bupati (%)	113,33	100	133,33	150
2	Persentase raperda dalam Propemperda yang dibahas (%)	100	90,5	100	100
3	Persentase nota kesepakatan KUA PPAS yang terselesaikan tepat waktu (%)	100	100	100	100
4	Persentase pengawasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan (%)	100	100	80,35	100
5	Indeks Kepuasan DPRD atas fasilitasi layanan kehumasan, protocol dan layanan administrasi (%)	86	97,5	80,35	85,75

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman, 2025

B. Unsur Pendukung Non Urusan Pemerintahan

1. Unsur Perencanaan

Urusan perencanaan adalah unsur penunjang yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta integrasi antara pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, serta pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial, perencanaan pembangunan di Kabupaten Sleman diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD, dan Renja PD menjadi panduan strategis dalam

melaksanakan pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan mampu menghadapi tantangan masa depan. Hasil capaian kinerja unsur perencanaan Kabupaten Sleman tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.111. Capaian Indikator Unsur Perencanaan di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan (%)	100	100	100	100	100
2	Persentase dokumen bahan pengambilan kebijakan komunikasi, informasi, perpustakaan, dan kearsipan tersedia tepat waktu (%)	100	100	100	100	100
3	Persentase konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah (%)	NA	95,6	95,74	97,5	96
4	Persentase dokumen bahan pengambilan kebijakan kesejahteraan rakyat dan pemerintahan tersedia tepat waktu (%)	100	100	100	100	100
5	Persentase dokumen bahan pengambilan kebijakan perekonomian tersedia tepat waktu (%)	100	100	100	100	100
6	Persentase dokumen bahan pengambilan kebijakan fisik dan prasarana tersedia tepat waktu (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Bappeda Kabupaten Sleman, 2025

2. Unsur Keuangan

Unsur keuangan merupakan unsur penunjang yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan secara efisien dan efektif. Dalam konsep otonomi daerah, pengelolaan keuangan yang baik memungkinkan pemerintah daerah untuk menggali potensi sumber penerimaan, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), dan mengalokasikan anggaran secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, tujuan utama otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik, dapat tercapai dengan lebih cepat dan tepat.

Pemerintah Kabupaten Sleman telah memiliki laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan sebanyak 14 kali berturut-turut sejak tahun 2011. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dan cerminan dari profesionalitas aparatur sipil negara (ASN) yang dimiliki.

Pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai pengelolaan keuangan daerah adalah Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). IPKD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2020 adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. Penilaian IPKD dapat memacu dan memotivasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Pengukuran IPKD pemerintah kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah propinsi.

Terdapat 6 (enam) dimensi yang digunakan untuk mengukur indeks pengelolaan keuangan daerah. Keenam dimensi tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1) Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran pada dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan anggaran
   Pengukuran dilakukan pada kesesuaian nomenklatur program pada RPJMD dan RKPD. Selanjutnya nomenklatur RKPD dan KUA PPAS dan KUA PPAS dengan APBD. Sedangkan kesesuaian pagu program pada RKPD dan KUA PPAS, dilanjutkan KUA PPAS dengan APBD.
2) Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD
   Pada dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD mencakup penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar minimal 20%, untuk fungsi kesehatan sebesar minimal 10% di luar gaji dan minimal 25% untuk infrastruktur dari dana transfer serta alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
3) Transparansi pengelolaan keuangan daerah
   Pada dimensi ini, publikasikan dokumen-dokumen produk dari pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun dituntut tepat waktu dan dapat diakses oleh semua, termasuk laporan keuangan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Pemerintah Kabupaten Sleman. Terdapat 29 (dua puluh sembilan) jenis dokumen yang harus dipublikasikan mulai dari dokumen perencanaan, penganggaran baik itu pemerintah daerah maupun perangkat daerah, dokumen rencana umum pengadaan, dokumen laporan keuangan pemerintah daerah maupun perangkat daerah, laporan akuntabilitas Pemerintah daerah dan opini BPK.
4) Penyerapan anggaran
   Dimensi penyerapan anggaran mencakup indikator sebagaimana struktur pada APBD yaitu penyerapan atas anggaran belanja operasional, penyerapan atas belanja modal, penyerapan atas belanja tidak terduga dan penyerapan atas belanja transfer.
5) Kondisi keuangan daerah
   Dimensi ini mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian tak terduga, dan untuk mengeksekusi secara efisien dan efektif. Indeks dimensi kondisi keuangan daerah dilihat dari 6 (enam) indikator pembentuk kondisi keuangan daerah. Keenam indikator tersebut adalah
   a) kemampuan keuangan daerah,
   b) *Fleksibilitas* keuangan,
   c) *Solvabilitas* operasional,

d) *Solvabilitas* jangka pendek,
e) *Solvabilitas* jangka panjang dan
f) *Solvabilitas* layanan.

6) Dari hasil pengukuran indikator diperoleh Opini BPK atas LKPD
Pada dimensi ini, opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang menjadi pengukuran adalah diperolehnya opini WTP selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Tabel 2.112. Capaian Indikator Unsur Keuangan di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks pengelolaan keuangan daerah (predikat)	B	B	B	A	B
2	Opini BPK terhadap laporan keuangan (opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Persentase dokumen anggaran yang disusun tepat waktu (%)	100	100	100	100	100
4	Persentase ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan (%)	100	100	100	100	100
5	Persentase ketepatan waktu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD (%)	100	100	100	100	100
6	Persentase perangkat daerah yang tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kategori A (%)	80	82	84	86	88
7	Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah (%)	9,91	1,81	26,1	22,28	25,58
8	Indeks kepuasan terhadap layanan pajak daerah	78,23	82,85	81,94	84,54	85

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa IPKD Kabupaten Sleman tahun 2023 memperoleh predikat A dengan skor 80,06 yang sebelumnya hanya mendapatkan predikat B dengan skor 73. Namun demikian, pada 2024 kembali lagi menjadi predikat B. Hal ini dikarenakan komponen nilai dimensi 5, yaitu kondisi keuangan daerah yang relatif rendah.

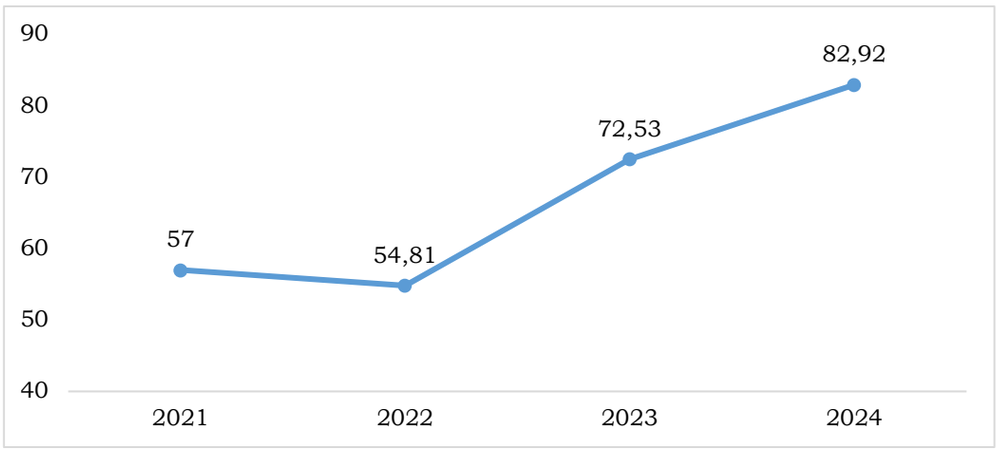
Persentase pengelolaan asset kategori A masih di bawah 90%. Hal ini banyak aset yang secara administrasi belum tertib, baik menyangkut status kepemilikan maupun penatausahaannya. Kemajuan teknologi sangat membantu meningkatkan pelayanan serta meningkatkan mutu data dan pelaporan. Pada sisi lain kemajuan teknologi menjadi tantangan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk lebih peka terhadap potensi-potensi pendapatan agar dapat tergali maksimal.

3. Unsur Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan. Pegawai ASN memainkan peran yang sangat strategis dalam tata kelola pemerintahan, dari pelaksanaan kebijakan hingga pemberian layanan publik. Untuk memastikan peran ini

dijalankan secara efektif, diperlukan manajemen ASN yang tepat, yang mencakup rekrutmen dan seleksi yang adil, pengembangan kapasitas berkelanjutan, penilaian kinerja yang objektif, serta pengembangan karier dan kesejahteraan yang memadai. Dengan manajemen yang tepat, ASN dapat berkontribusi secara maksimal dalam mencapai tujuan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

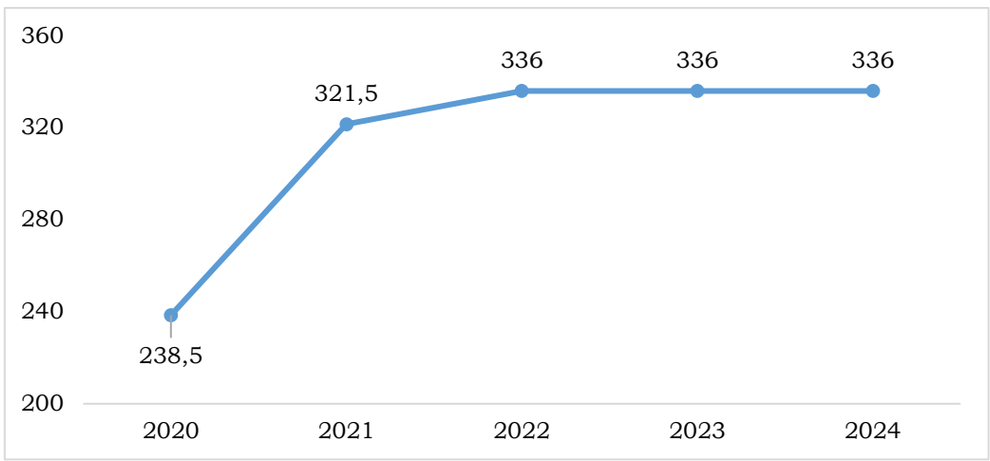
Kinerja manajemen ASN di Kabupaten Sleman dapat dilihat dari capaian indeks profesional ASN dan indeks sistem merit. Indeks profesionalitas ASN Kabupaten Sleman tahun 2021-2024 cukup meningkat. Tahun 2022 sempat mengalami penurunan namun tahun 2024 kembali meningkat cukup signifikan menjadi 82,92. Hal ini karena masih banyak ASN dengan tingkat pendidikan SLTA ke bawah sehingga memberikan kontribusi dalam skor pendidikan yang rendah.



Sumber: BKPP Kabupaten Sleman, 2025

Grafik 2.79. Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024

Indeks Sistem Merit Kabupaten Sleman selama 4 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan, walaupun pada tahun 2023 tetap stagnan dibandingkan tahun 2022. Peningkatan ini didorong dengan salah satunya dengan adanya penyusunan dan penetapan kebijakan internal tentang pola karier serta penyelenggaraan diklat, praktik kerja dan pertukaran pegawai magang, *coaching, counseling* dan *mentoring*, untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja.



Sumber: BKPP Kabupaten Sleman, 2025

Grafik 2.80. Indeks Sistim Merit Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

Meskipun capaian pada tahun 2024 sudah tinggi, namun belum mencapai optimal. Hal ini menunjukkan manajemen ASN di Kabupaten Sleman belum optimal. Hal ini disebabkan karena kompetensi ASN yang cenderung rendah baik secara teknis, manajerial maupun sosial kultural ditunjukkan dengan masih rendahnya penguasaan teknologi informasi, bahasa asing dan *networking* bagi sebagian besar ASN. Di samping itu ketidakmerataan pengembangan kompetensi di berbagai tingkatan atau jenis jabatan yang disebabkan manajemen talenta belum dilaksanakan dengan baik dan digunakan sebagai dasar untuk penguatan kapasitas ASN serta rekrutmen ASN yang belum sesuai dengan formasi juga menjadi faktor penyebabnya.

Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengadakan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kompetensi pegawai. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Namun pada tahun 2023 meningkat cukup signifikan menjadi 61,15%. Secara kumulatif, ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal selama lima tahun terakhir juga cenderung fluktuatif. Namun selaras dengan capaian indikator sebelumnya pada tahun 2024 persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal meningkat cukup signifikan menjadi 54,83% dari sebelumnya yang mencapai 18,39%. Adapun pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 yaitu menjadi 15,15%.

Sedangkan untuk jumlah jabatan pimpinan tinggi pratama pada instansi pemerintah Kabupaten Sleman yang terisi sebanyak 29 jabatan di tahun 2024, lebih sedikit dari tahun sebelumnya. Begitu pula jumlah jabatan administrasi yang terdiri administrator, pengawas dan pelaksana pada instansi pemerintah menurun turun menjadi 1882 jabatan. Kondisi yang sama juga terjadi pada jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada tahun 2024 terdapat sedikit peningkatan menjadi 7.346 jabatan dari yang sebelumnya 6.138 jabatan. Perkembangan indikator kepegawaian serta lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.113. Capaian Indikator Unsur Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan Pendidikan dan pelatihan (%)	13,51	56,1	36,8	61,15	89,45
2	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal (%)	3,6	12,9	7,05	18,39	54,83
3	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan struktural (%)	81,85	78,6	53,07	12,14	15,15
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	30	28	35	35	29
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	688	793	2470	2470	1882
6	Jumlah pemangku jabatan	5739	6115	6138	6138	7346

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	fungsional tertentu pada instansi pemerintah					
7	Tingkat kualitas pengadaan ASN (aspek)	NA	19	18	17	19
8	Persentase kesesuaian penempatan PNS dalam jabatan sesuai kualifikasi jenjang pendidikan (%)	NA	99,28	99,62	99	99
9	Persentase kualifikasi pendidikan ASN (%)	NA	1,05	1,23	1,3	0,89
10	Tingkat kualitas perencanaan dan pengembangan karier ASN (%)	NA	40	61,25	61,25	61,25
11	Persentase kinerja ASN (%)	NA	99	99,89	99,84	99,9
12	Persentase disiplin ASN (%)	NA	0,19	0,11	0,067	0,08
13	Persentase aplikasi kepegawaian yang dikembangkan (%)	NA	100	100	100	100
14	Persentase pemberian pelayanan dan penghargaan bagi pegawai ASN (%)	NA	72,09	72,67	108,13	118,9

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman, 2025

4. Unsur Penelitian dan Pengembangan

Sebagai upaya mengembangkan kapasitas inovasi dan memperkuat daya saing daerah, Pemerintah Kabupaten Sleman telah melaksanakan berbagai program riset dan inovasi daerah yang melibatkan perguruan tinggi, lembaga litbang, pelaku usaha, serta komunitas masyarakat. Program-program ini diarahkan untuk menjawab tantangan lokal, mengoptimalkan potensi sumber daya daerah, dan mempercepat hilirisasi hasil penelitian ke dalam bentuk produk, layanan, maupun kebijakan.

Tabel 2.114. Data Kajian/Penelitian di Kabupaten Sleman Tahun 2022 - 2024

No	Tahun	Jumlah Penelitian/Kajian di Bappeda	Jumlah Penelitian/Kajian di OPD
1	2022	5	18
2	2023	5	20
3	2024	6	19

Sumber : Bappeda Kabupaten Sleman, 2025

Pemerintah Kabupaten Sleman mendorong berbagai pihak untuk terus berinovasi dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 78 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah. Jumlah inovasi di Kabupaten Sleman tahun 2021-2024 berdasarkan bentuknya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.115. Data Inovasi di Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024

No	Bentuk Inovasi	2021	2022	2023	2024
1	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	6	16	31	40
2	Inovasi Pelayanan Publik	40	34	46	49
3	Inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	103	58	73	85
	Jumlah	**149**	**108**	**150**	**174**

Sumber: Bappeda Kabupaten Sleman, 2025

Unsur penelitian dan pengembangan dimaksudkan untuk melaksanakan ketugasan yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten Sleman. Selama tahun tahun terakhir, hasil penelitian dan pengembangan mulai sudah dimanfaatkan oleh berbagai pihak, bahkan pada tahun 2024 tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan naik menjadi 100%.

Tabel 2.116. Capaian Indikator Unsur Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024

No	Indikator	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Persentase inovasi yang diimplementasikan (%)	100	100	100	100
2	Persentase inovasi daerah yang telah ditetapkan dengan keputusan dan atau peraturan lainnya (%)	91,33	100	100	100
3	Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan (%)	50	50	80	100
4	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan (%)	NA	42,59	47,33	50,00

Sumber: Bappeda Kabupaten Sleman, 2024

C. Unsur Pengawasan

Unsur pengawasan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Sleman adalah komponen vital untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan sesuai rencana dan aturan yang berlaku. Dengan pendekatan yang konsultatif dan preventif, serta kebijakan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas, pengawasan dapat membantu menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien.

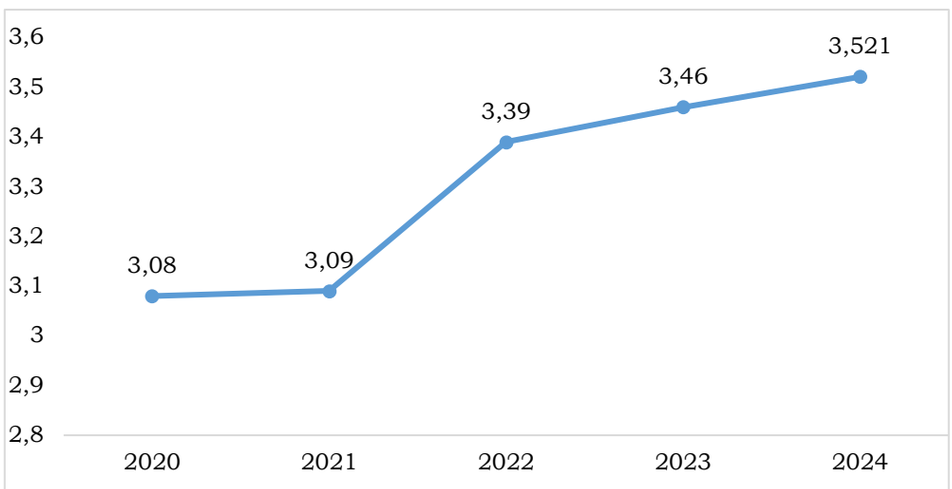
Pengawasan yang baik juga meningkatkan kepercayaan publik dan mencegah terjadinya penyimpangan, sehingga tujuan-tujuan pembangunan dapat dicapai dengan lebih baik. Pengawasan dilaksanakan dalam berbagai bentuk yaitu audit kinerja, audit keuangan, pengawasan desa, pengawasan dengan tujuan tertentu, reviu, pendampingan dan asistensi. Hasil capaian kinerja unsur pengawasan dapat dilihat dari capaian kinerja beberapa indikator antara lain maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pemerintah Kabupaten Sleman, tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

1. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sleman

Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Karakteristik Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP dikelompokkan menjadi 5 tingkatan yaitu Level 1 (Rintisan), Level 2 (Berkembang), level 3 (Terdefinisi), Level 4 (Terkelola dan Terukur), dan Level 5 (Optimum).

Sesuai dengan peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraa SPIP Terintegrasi pada Kementrian/Lembaga /Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP. APIP melakukan Penjaminan Kualitas (PK) atas hasil Penilaian Mandiri yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Kemudian BPKP melakukan Evaluasi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP yang telah dijamin kualitasnya oleh APIP. Evaluasi dilaksanakan untuk meyakinkan hasil penilaian mandiri K/L/D dan penjaminan kualitas telah sesuai dengan pedoman, sehingga dapat digunakan untuk menyusul aksi atas *Area of Improvement* (AoI).

Nilai capaian maturitas SPIP selama lima tahun terakhir (2020-2024) menunjukkan peningkatan namun masih tetap pada level 3 (terdefinisi). Tahun 2024, nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kabupaten Sleman meningkat menjadi 3,521 namun juga masih pada level 3 (terdefinisi). Kondisi mencerminkan bahwa penyelenggaraan SPIP di Kabupaten Sleman telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi. Sementara itu, Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) telah memenuh karakteristik manajemen risiko indeks (MRI) pada Level 3 dengan skor 3,232 dan nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) mencapai angka 3,110.



Sumber: Inspektorat Kabupaten Sleman, 2025

Grafik 2.81. Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Sleman telah sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, sebagaimana ditetapkan dalam pedoman (Peraturan

BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D.

2. Tingkat kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)

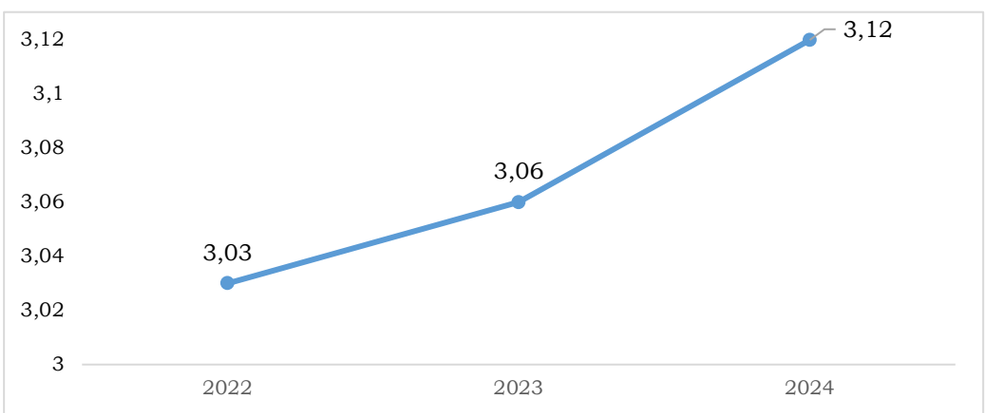
Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Penilaian atas penerapan tata kelola APIP di Indonesia mengacu kepada *Internal Audit Capability Model* (IACM) mencakup penilaian terhadap enam elemen yaitu:

a. Peran dan layanan APIP (*Services and Role of Internal Auditing*)
b. Pengelolaan SDM (*people management*)
c. Praktik profesional (*professional practice*)
d. Akuntabilitas dan management kinerja (*performance management and accountability*)
e. Budaya dan hubungan organisasi (*organizational relationship and culture*)
f. Struktur tata kelola (*governance structures*).

Tingkat kapabilitas APIP dikelompokkan ke dalam lima tingkatan (level) yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Delivered*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*). Tingkat kapabilitas APIP Kabupaten Sleman tahun 2023 mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan dan masih pada level 3 (*Delivered*).

Level 3 atau "*Delivered*" dalam konteks kapabilitas APIP menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Sleman telah mencapai tahap dimana fungsi pengawasan dilaksanakan secara sistematis dan terintegrasi dengan kegiatan manajerial lainnya. Pada level ini, APIP tidak hanya melakukan audit dan pengawasan secara rutin tetapi juga mulai memberikan nilai tambah melalui identifikasi dan mitigasi risiko, serta memastikan bahwa kegiatan pengawasan selaras dengan tujuan strategis organisasi.



Sumber: Inspektorat Kabupaten Sleman, 2025

Grafik 2.82. Nilai Kapabilitas APIP Kabupaten Sleman Tahun 2022-2024

Pencapaian Level 3 (*Delivered*) dengan skor 3,12 oleh Inspektorat Kabupaten Sleman merupakan indikator positif bahwa pengawasan internal telah mencapai tingkat yang lebih matang dan efektif. Dengan

terus melakukan peningkatan dan perbaikan, Inspektorat dapat mencapai level kapabilitas yang lebih tinggi, sehingga semakin mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP Kabupaten Sleman Tahun 2022-2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.117. Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP Kabupaten Sleman Tahun 2022-2024

No	Elemen	Hasil Penilaian Mandiri						Hasil Evaluasi					
		Level			Skor			Level			Skor		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*)													
1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	4	4	0,54	0,72	0,72	3	3	3	0,54	0,54	0,54
2	Praktik Profesional	4	4	4	0,72	0,72	0,72	3	3	3	0,54	0,54	0,54
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	4	4	4	0,24	0,24	0,24	3	4	4	0,21	0,24	0,24
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	4	4	0,18	0,24	0,24	3	3	3	0,18	0,18	0,24
5	Struktur Tata Kelola	4	4	4	0,48	0,48	0,48	3	3	3	0,36	0,36	0,2
Komponen Aktivitas Pengawasan (*Delivery*) dan dan Kualitas Pengawasan (*Result)*													
6	Peran dan Layanan	3	4	4	1,2	1,6	1,6	3	3	3	1,2	1,2	1,2
Simpulan Entitas		**3**	**3**	**4**	**4**	**3,36**	**4**	**4**	**3**	**3**	**3**	**3,03**	**3,06**

Sumber: Inspektorat Kabupaten Sleman, 2025

3. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

   Jumlah temuan inspektorat lima tahun terakhir cukup fluktuatif, pada tahun 2020-2021 sempat turun, namun tahun 2022-2024 kembali meningkat. Hal ini disebabkan karena jumlah objek pemeriksaan yang diperiksa juga cukup fluktuatif. Hasil temuan inspektorat pada tahun 2022 naik cukup signifikan dibandingkan tahun 2021 dikarenakan pada tahun 2021 masih dalam situasi pandemi *Covid-19* sehingga pelaksanaan pemeriksaan cenderung masih dibatasi, sedangkan untuk pelaksanaan pemeriksaan tahun 2022 di samping karena bertambahnya jumlah objek pemeriksaan yang diperiksa juga karena situasi pandemi *Covid-19* yang sudah membaik dan kegiatan pemeriksaan dapat berjalan normal sehingga dapat mengungkap kelemahan/temuan lebih banyak. Secara umum temuan didominasi oleh kesalahan dalam pengadministrasian keuangan.

   Hasil temuan inspektorat tersebut belum semua dapat ditindaklanjuti. Persentase jumlah tindak lanjut bahkan belum sampai 90%. Hal ini disebabkan karena kepatuhan sebagian auditan masih rendah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan terutama bila terkait dengan pihak ketiga. Pemerintah Kabupaten Sleman telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong unit kerja menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan antara lain dengan mengajak pimpinan auditan untuk berkomitmen segera menyelesaikan seluruh temuan/kelemahan hasil pemeriksaan internal dan eksternal, serta mengoptimalkan penggunaan aplikasi Sistem Pengawasan dan Tindak Lanjut (SPTL) oleh perangkat daerah dan kalurahan dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Inspektorat.

   Sementara itu, jumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam lima tahun terakhir (2020-2024) terus mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan BPK melaksanakan pemeriksaan lebih banyak dari tahun sebelumnya, yaitu Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah, Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah, Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah

Rumah Tangga, serta Pemeriksaan Penanganan Pandemi *Covid-19*. Sama halnya dengan tindak lanjut temuan inspektorat, untuk tindak lanjut rekomendasi BPK setiap tahunnya juga belum dapat mencapai 100%, tahun 2024 turun dan mencapai 95,27%. Hasil capaian indikator unsur pengawasan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.118. Capaian Indikator Unsur Pengawasan di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah objek pemeriksaan (obyek)	71	56	73	57	67
2	Jumlah temuan inspektorat (temuan)	22	15	38	42	41
3	Jumlah temuan inspektorat yang ditindaklanjuti (temuan)	18	12	30	33	34
4	Persentase jumlah tindak lanjut temuan (%)	81,81	80	78,95	78,57	82,92
5	Jumlah temuan BPK (temuan)	461	481	491	502	522
6	Jumlah rekomendasi BPK (rekomendasi)	902	940	965	998	1057
7	Jumlah tindak lanjut sesuai rekomendasi BPK (tindak lanjut)	787	868	917	957	1007
8	Persentase jumlah tindak lanjut sesuai rekomendasi BPK (%)	87,25	92,34	95,03	95,89	95,27
9	Persentase catatan/saran hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditindaklanjuti (%)	NA	100	100	100	100
10	Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	84,53	86,39	86,99	87,33	89,09
11	Persentase nilai hasil audit kinerja perangkat daerah dengan kategori sangat baik (%)	NA	66,67	46,88	NA*	NA
12	Persentase kasus/pengaduan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	100
13	Persentase Perangkat daerah dengan tingkat maturitas SPIP ≥ 3 (%)	100	100	100	100	100
14	Persentase tingkat capaian *Monitoring Center of Prevention* (MCP) Kabupaten (%)	85	89	94	94	97,38

**Catatan: Indikator "Persentase nilai hasil audit kinerja PD dengan kategori sangat baik" tidak dapat diperhitungkan karena perubahan dalam kategori maupun skala penilaiannya.*

Sumber: Inspektorat Kabupaten Sleman, 2025

D. Unsur Pemerintahan Umum

Pelaksanaan Unsur Pemerintahan Umum di wilayah kabupaten dimaksudkan untuk meningkatkan kesatuan bangsa dan stabilitas politik dalam negeri di daerah. Untuk dapat menciptakan lingkungan yang stabil, harmonis dan partisipatif tersebut dibutuhkan kolaborasi bersama antara pemerintah, masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.

Indikator yang digunakan pada unsur ini adalah angka kejadian konflik. Konflik sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan

disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Angka kejadian konflik sosial merupakan jumlah konflik sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Sleman dalam kurun waktu satu tahun.

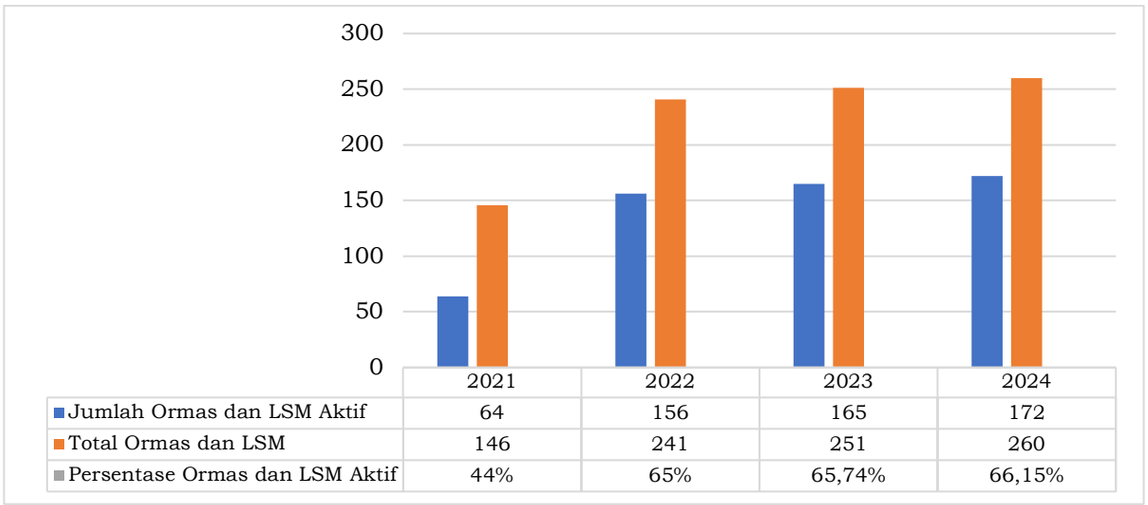
Selama tiga tahun terakhir (2021-2024) terakhir tercatat 0 kasus, artinya tidak ada konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Sleman. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa potensi konflik sosial. Pada tahun 2022 telah terjadi 108 kejadian berpotensi konflik, namun telah tertangani dengan baik berkat sinergitas berbagai unsur terkait. Tahun 2023 terdapat 115 kejadian yang berpotensi konflik. Pada tahun tersebut terdapat kerawanan politik terkait dengan kerawanan penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan data dari Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (BAWASLU RI) Kabupaten Sleman menduduki peringkat 25 dari 85 Kabupaten/Kota se-Indonesia dengan kategori kategori RAWAN TINGGI. Hal ini dilihat pada dimensi penyelenggaraan pemilu, subdimensi penyelenggaraan pemilu dan subdimensi pelaksanaan kampanye. Potensi kerawanan ini disebabkan karena Kabupaten Sleman termasuk dalam daerah dengan tingkat mobilitas penduduk tinggi, sehingga rawan pergeseran jumlah daftar calon pemilih terutama yang berasal dari luar daerah. Selain itu, di Kabupaten Sleman terdapat dua partai politik yang sejak jaman dahulu telah memiliki riwayat hubungan yang kurang harmonis. Adapun pada pemilu tahun 2024, kedua partai memiliki jadwal kampanye yang sama karena mendukung pasangan calon presiden yang sama. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menjadwalkan bahwa kampanye rapat umum dijadwalkan sesuai dengan dukungan terhadap calon presiden.

Pemerintah Kabupaten Sleman juga melakukan upaya konkret revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila melalui pembentukan Kalurahan Berkarakter Pancasila. Sampai dengan tahun 2023, Kabupaten Sleman telah membentuk 29 Kalurahan Berkarakter Pancasila, meliputi Margodadi, Madurejo, Sumberadi, Ambarketawang, Maguwoharjo, Tridadi, Sendangmulyo, Umbulmartani, Sardonoharjo, Sidoagung, Hargobinangun, Pandowoharjo, Pondokrejo, Sendangtirto, Tamanmartani, Umbulharjo, Trihanggo, Margomulyo, Caturtunggal, Minomartani, Sumbersari, Girikerto, Kalitirto Wukirharjo, Merdikorejo, Wukirsari, Sukoharjo, Sendangadi dan Nogotirto. Dan pada tahun 2025, bertambah 6 kalurahan. Selain itu, pada tahun 2023, membangun SIM Kala Ber-Pancasila. Dengan adanya SIM tersebut diharapkan mampu memotret profil kalurahan berkarakter Pancasila dan memberikan informasi terkait dengan indeks kalurahan berkarakter Pancasila.

Inovasi lain yang dilakukan adalah SIDENI SIDATIN sebagai salah satu sistem untuk memperkuat deteksi dini cegah dini di wilayah Kabupaten Sleman. Dalam rangka untuk mendorong peningkatan daya tanggap dalam sistem deteksi cegah dini tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Sleman saat ini juga menyusun Rancangan Peraturan Bupati Pusat Komunikasi dan Informasi.

Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan juga sangat penting dalam upaya menjaga iklim daerah agar tetap kondusif. Dengan semakin banyaknya organisasi masyarakat (ormas)/Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang aktif, menunjukkan bahwa kanal-kanal aspirasi dan

kebebasan berserikat, berkumpul dijamin dengan baik. Pada tahun 2024, terdapat 260 ormas dan LSM dengan 172 yang aktif.

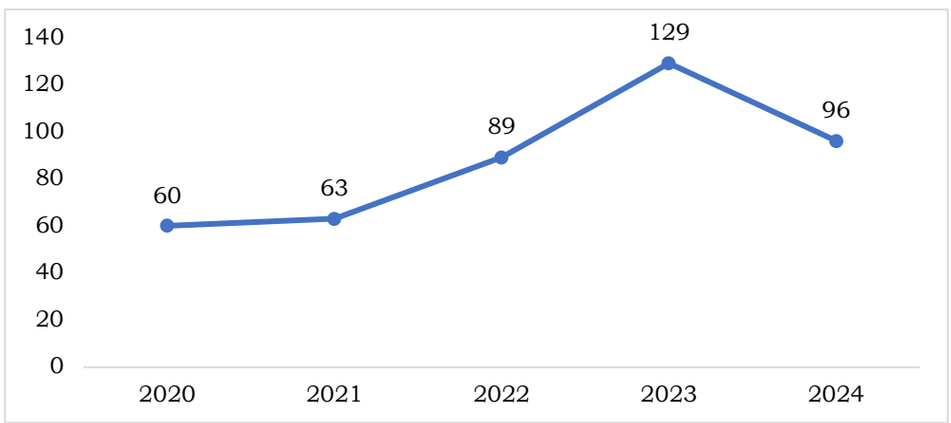


	2021	2022	2023	2024
Jumlah Ormas dan LSM Aktif	64	156	165	172
Total Ormas dan LSM	146	241	251	260
Persentase Ormas dan LSM Aktif	44%	65%	65,74%	66,15%

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman, 2024

Grafik 2.83. Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024

Permasalahan lainnya yang dihadapi adalah meningkatnya prevalensi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain (NAPZA) di masyarakat. Hal ini dibuktikan dari peningkatan jumlah kasus NAPZA dari tahun 2020 terdapat 60 kasus, dan naik di tahun 2023 sebanyak 129 kasus, meskipun turun kembali menjadi 96 kasus pada 2024. Perkembangan jumlah kasus NAPZA di Kabupaten Sleman tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman, 2024

Grafik 2.84. Jumlah Kasus NAPZA di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

Pencegahan penyalahgunaan NAPZA diwujudkan dengan pembentukan Desa Bersinar (Desa Bersih Narkoba). Tahun 2022 telah dibentuk 8 (delapan) Desa Bersinar dan telah disiapkan 5 kalurahan sebagai Rintisan Desa Bersinar. Sedangkan Desa Bersinar yang dibentuk pada tahun 2023 sebanyak 17 (tujuh belas) kalurahan yaitu Kalurahan Condongcatur, Banyuraden, Margomulyo, Tlogoadi, Tamanmartani, Wedomartani, Sumberrejo, Purwomartani, Sinduadi, Sinduarjo, Tridadi, Sariharjo, Caturtunggal, Maguwoharjo, Margorejo, Bangunkerto, Sidomulyo.

Sampai dengan tahun 2024 sudah ada 4.237 tempat ibadah yang telah berizin. Ragam kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya kerukunan umat

beragama yaitu FGD Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pembinaan Aliran Kepercayaan, Seminar Forum Kerukunan Umat Beragama, Sosialisasi FKUB, Monev Wali Kerukunan, Pemantauan tempat Ibadah, Sosialisasi FKUB, Verifikasi Rumah Ibadah dan Kemah Forum Pemuda Lintas Agama. Untuk lebih detail, tabel di bawah menyajikan capaian indikator pada unsur pemerintahan umum.

Tabel 2.119. Capaian Indikator Unsur Pemerintahan Umum di Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024

No	Indikator	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kalurahan Berkarakter (kalurahan)	10	10	22	90
2	Persentase penanganan kasus kerawanan bidang politik (%)	100	100	100	100
3	Persentase partai politik penerima bantuan keuangan partai politik dengan kesimpulan laporan hasil pemeriksaan (LHP) sesuai dengan kriteria yang berlaku (%)	100	100	100	100
4	Persentase ormas dan LSM yang aktif (%)	44	65	65,73	66,15
5	Persentase penanganan kasus kerawanan bidang ekonomi, sosial dan budaya (%)	100	100	100	100
6	Persentase realisasi kinerja rencana aksi daerah (RAD) penanganan konflik sosial (PKS) (%)	70	80	90	90

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Sleman, 2025

E. Unsur Kewilayahan

Kabupaten Sleman mempunyai 17 wilayah kecamatan, yang disebut dengan kapanewon. Kapanewon ini mempunyai tugas pokok fungsi, meliputi mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana pelayanan umum, serta penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kapanewon. Kapanewon juga melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa (kalurahan), dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Untuk mengukur keberhasilan kinerja kapanewon, Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman melaksanakan evaluasi kinerja kapanewon, menggunakan empat komponen penilaian, yaitu kinerja perangkat daerah, kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, *sambang* kapanewon serta kepemimpinan panewu. Komponen penilaian ini dimungkinkan akan dinamis setiap tahunnya. Pada tahun 2024, rata-rata hasil evaluasi kinerja kapanewon mencapai 85,82, dengan nilai tertinggi diraih oleh Kapanewon Depok (94,67), Kapanewon Mlati (93,00) dan Kapanewon Minggir (90,11).

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Kinerja keuangan suatu Pemerintahan menggambarkan bagaimana pengelolaan keuangan dalam kaitannya dengan aktivitas dan strategi pembangunan. Selain itu, bagi Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Kabupaten, analisis kinerja

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menunjukkan kapasitas keuangan atau pembiayaan Daerah tersebut dalam mencapai target pembangunan. Secara teori, kapasitas ini disebut sebagai Kapasitas Fiskal. Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu.

Analisis kinerja keuangan daerah sangat diperlukan dalam menyusun rancangan pembangunan ke depan, terutama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Analisis Kapasitas Fiskal Daerah berperan sebagai *budget constrain* dalam penetapan target-target pembangunan daerah. Dengan mengetahui bagaimana kondisi Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat menyusun target-target yang realistis, dan menjamin bahwa target-target yang sudah ditetapkan memiliki potensi ketercapaian dan berkinerja optimal dalam pembangunan daerah.

2.2.1 Realisasi Keuangan Daerah

Realisasi APBD Kabupaten Sleman mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran, kecuali tahun 2020. Pada tahun tersebut, APBD Sleman mengalami penurunan karena adanya pandemi *Covid-19*. Perkembangan realisasi APBD Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.120. Realisasi APBD Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (Milyar Rp)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rerata Pertum-buhan (%)
I	**Pendapatan Daerah**	**2.541,05**	**2.793,33**	**3.005,98**	**3.083,61**	**3.238,13**	**6,28**
A	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**788,25**	**803,68**	**1.061,06**	**1.130,16**	**1.184,13**	**11,32**
	Pajak Daerah	499,96	511,41	763,13	833,22	851,52	15,72
	Retribusi Daerah	40,97	38,70	40,44	41,79	250,86	125,64
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	47,57	38,16	38,87	38,70	43,66	-1,38
	Lain-lain PAD yang Sah	199,75	215,41	218,63	216,45	38,10	-18,51
B	**Pendapatan Transfer**	**1.617,14**	**1.968,38**	**1.938,61**	**1.943,93**	**2.045,61**	**6,43**
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**1.271,98**	**1.366,61**	**1.411,09**	**1.400,01**	**1.523,73**	**4,69**
	Dana Bagi hasil Pajak	60,00	71,91	58,94	63,15	67,70	4,04
	Dana Bagi hasil Sumber Daya Alam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dana Alokasi Umum	938,35	925,96	921,38	971,71	1.047,03	2,85
	Dana Alokasi Khusus	273,63	368,74	430,77	365,16	409,00	12,09
	Transfer pemerintah pusat lainnya	**73,46**	**147,54**	**139,14**	**172,80**	**175,95**	**30,29**
	Dana Insentif Daerah	73,46	36,99	33,64	48,59	0,00	
	Dana otonomi khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dana Desa	0,00	110,56	105,50	124,20	125,83	

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rerata Pertum-buhan (%)
	Dana Insentif Fiskal					50,12	
	Transfer Pemerintah Provinsi	**223,29**	**233,85**	**273,79**	**294,69**	**284,55**	**6,50**
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	223,29	233,85	273,79	294,69	284,55	6,50
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pendapatan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Bantuan Keuangan	**48,42**	**220,37**	**114,59**	**76,43**	**61,37**	**63,53**
	Bantuan Keuangan	48,42	220,37	114,59	76,43	61,37	63,53
C	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**135,66**	**21,27**	**6,31**	**9,52**	**8,39**	**-28,89**
	Pendapatan Hibah	135,66	10,92	6,31	9,52	8,39	-23,77
	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan	**2.541,05**	**2.793,33**	**3.005,98**	**3.083,61**	**3.238,13**	**6,28**
II	**Belanja Daerah**						
A	**Belanja Operasi**	**1.952,37**	**1.949,95**	**2.195,79**	**2.284,95**	**2.487,58**	**6,35**
	Belanja Pegawai	1.147,36	1.023,35	1.088,28	1.069,36	1.201,78	1,55
	Belanja Barang dan Jasa	597,78	809,14	892,77	950,84	1.004,36	14,46
	Belanja Bunga	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belanja Hibah	153,74	98,35	185,01	227,75	243,36	20,51
	Belanja Bantuan Sosial	53,40	19,10	29,74	37,00	38,08	4,70
B	**Belanja Modal**	**361,07**	**433,65**	**466,44**	**348,28**	**295,78**	**-3,19**
	Belanja Modal Tanah	45,18	201,82	111,48	0,89	0,03	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90,67	85,58	97,86	76,72	104,55	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	148,41	37,99	113,37	129,86	71,68	
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	38,91	101,03	134,60	132,21	109,06	
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	37,91	7,22	9,13	7,91	8,01	
	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,69	2,45	
C	**Belanja Tidak Terduga**	**20,16**	**27,61**	**18,23**	**14,59**	**14,17**	**-4,97**
	Belanja Tidak Terduga	20,16	27,61	18,23	14,59	14,17	-4,97
D	**Belanja Transfer**						
	Transfer/Bagi Hasil Ke Desa	**50,70**	**56,64**	**78,33**	**80,34**	**92,50**	**16,93**
	Belanja Bagi Hasil Pajak	50,70	56,64	78,33	80,34	92,50	16,93
	Bagi hasil pendapatan lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Transfer/Bantuan Keuangan	**147,87**	**246,47**	**281,68**	**384,55**	**397,50**	

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rerata Pertum-buhan (%)
	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,29	0,91	0,17	0,40	
	Bantuan Keuangan ke Desa	147,77	246,05	280,63	384,26	397,10	30,21
	Bantuan Keuangan Lainnya	0,11	0,12	0,13	0,12	0,00	-20,46
	Jumlah Transfer	**198,57**	**303,10**	**360,00**	**464,89**	**490,00**	**26,49**
	JUMLAH BELANJA	**2.532,17**	**2.714,31**	**3.040,47**	**3.112,71**	**3.287,53**	**6,80**
	SURPLUS/DEFISIT	**8,88**	**79,02**	**-34,49**	**-29,09**	**-49,40**	
III	**Pembiayaan Daerah**						
A	**Penerimaan Pembiayaan**	**398,58**	**380,55**	**445,47**	**286,04**	**231,94**	**-10,54**
	Penggunaan SILPA	398,58	380,55	445,47	286,04	231,94	-10,54
	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Penerimaan	**398,58**	**380,55**	**445,47**	**286,04**	**231,94**	**-10,54**
B	**Pengeluaran Pembiayaan**						
	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Penyertaan Modal Daerah	23,04	14,10	124,94	25,00	29,10	170,98
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	3,88	0,00	0,00	0,00		
	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah Pengeluaran	**26,92**	**14,10**	**124,94**	**25,00**	**29,10**	**168,77**
	PEMBIYAAN NETTO	**371,66**	**366,45**	**320,53**	**261,04**	**202,84**	**-13,70**
	SILPA	**380,55**	**445,47**	**286,04**	**231,94**	**153,44**	**-17,87**

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, 2025

Berdasarkan tabel di atas, selama lima tahun terakhir (tahun 2020-2024), realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sleman mengalami pertumbuhan rata-

rata 6,28%. Angka pertumbuhan ini relatif tinggi bila dibandingkan pertumbuhan ekonomi maupun laju inflasi.

Hal yang cukup menarik adalah pertumbuhan belanja dan transfer hampir sama dengan pertumbuhan pendapatan yaitu sebesar 6,8%. Belanja sendiri hanya tumbuh 4,73%, sementara transfer mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan yaitu tumbuh 26,49%.

2.2.1.1 Tingkat Capaian Keuangan

Selain realisasi, analisis bagaimana pencapaian target atau anggaran dalam realisasi APBD perlu dilakukan untuk memberikan gambaran, apakah realisasi selalu bisa mencapai target anggaran yang sudah ditetapkan. Dalam hal pendapatan, seandainya pencapaian realisasi di bawah target anggaran, maka berarti potensi terjadinya defisit fiskal adalah besar. Untuk memberikan gambaran bagaimana capaian target anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Sleman dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.121. Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (%)

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	**Pendapatan**	100,11	103,56	101,08	102,10	100,19
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	116,48	104,28	102,90	103,79	98,71
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	125,44	104,76	101,37	106,52	97,99
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	119,37	98,15	129,26	110,04	107,32
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	97,65	98,55	100,54	97,20	101,79
1.1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	102,36	105,42	104,92	94,55	70,59
I.2.	Pendapatan Transfer	93,77	102,52	100,14	101,19	101,07
1.2.1.	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	99,21	101,31	98,64	101,25	100,78
1.2.2.	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	41,16	100,00	100,00	99,88	100
1.2.3.	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	102,91	107,25	106,06	101,58	102,93
I.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	99,01	164,12	94,80	92,98	98,5
2	**BELANJA**	87,07	88,59	92,30	94,87	95,71
2.1.	Belanja Operasi	91,07	86,58	92,15	94,37	95,92
2.2.	Belanja Modal	90,87	94,87	92,79	95,27	90,02
2.3.	Belanja Tak Terduga	34,95	56,28	42,33	58,39	71,15
2.4.	Belanja Transfer	64,22	99,20	98,46	99,11	99,36
	SURPLUS/DEFISIT					
3	**PEMBIAYAAN**					
3.1.	Penerimaan Pembiayaan					
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan					
	PEMBIAYAAN NETTO	100,52	100,00	100,00	100,00	100
	SILPA					

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, 2025

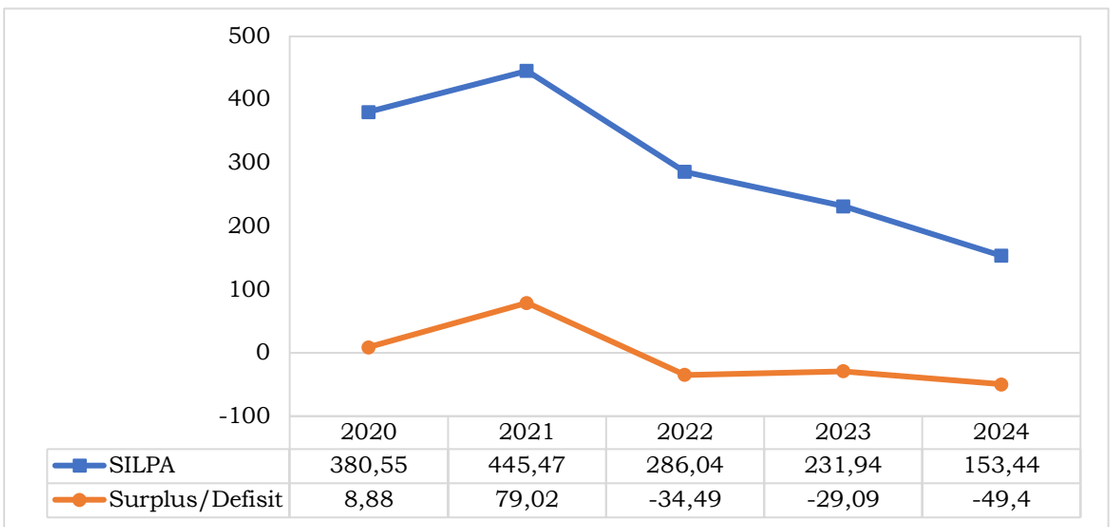
Dari tabel di atas, realisasi pendapatan APBD Kabupaten Sleman selalu di atas target, dengan capaian rata-rata 101,96%. Capaian PAD mencapai 107,33%, sedangkan capaian target dana transfer hanya mencapai 99,88%. Capaian dana transfer yang kurang dari 100%, terjadi antara tahun 2020. Sementara capaian tahun 2021-2024 pada kisaran 100-102%. Dari angka-angka capaian ini, maka dapat ditunjukkan bahwa capaian penerimaan PAD di Kabupaten Sleman justru selalu di atas target, atau memiliki tingkat kepastian capaian yang relatif tinggi.

Agak berbeda dengan pendapatan, dalam hal belanja, realisasi belanja Kabupaten Sleman hanya pada kisaran 88% sampai dengan 95%. Dari kondisi ini, maka Kabupaten Sleman selalu memiliki SILPA. Dari data yang ada SILPA digunakan sebagai sumber pembiayaan daerah pada tahun berikutnya.

2.2.1.2 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

Pengelolaan keuangan Pemerintah (APBN maupun APBD) berbeda dengan pengelolaan keuangan rumah tangga ataupun perusahaan, dimana prinsip efisiensi pengeluaran atau pengeluaran minimal akan meningkatkan nilai perusahaan melalui laba, atau bagi rumah tangga akan meningkatkan nilai tabungan. Atas dasar ini maka efisiensi pengeluaran bagi perusahaan dan rumah tangga akan menghasilkan kinerja keuangan yang baik. Sedangkan bagi Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah, pengeluaran yang dilakukan akan menghasilkan pergerakan ekonomi masyarakat, karena adanya efek pengganda (*multiplier effect*). Oleh karena itu Pemerintah wajib senantiasa melakukan pengeluaran atau belanja yang disebut sebagai *Government Expenditure*. Dalam formula *aggregate demand*, yaitu Y = C + I + G + X – M, dimana G adalah *Government Expenditure*. Dengan formula ini maka semakin besar G akan semakin besar PDB ataupun PDRB bagi Daerah.

Dari konsep teori di atas, apabila APBD tidak terserap dengan optimal, maka akan mengakibatkan kurang optimalnya *multiplier effect* dalam menghasilkan bangkitan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan PDRB. Bagaimana perkembangan SILPA APBD Kabupaten Sleman selama beberapa tahun terakhir ditunjukkan pada grafik berikut.



	2020	2021	2022	2023	2024
SILPA	380,55	445,47	286,04	231,94	153,44
Surplus/Defisit	8,88	79,02	-34,49	-29,09	-49,4

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, 2025

Grafik 2.85. SILPA dan Surplus (Defisit) Realisasi APBD Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (Milyar Rp)

Dari grafik di atas dapat ditunjukkan nilai SILPA APBD Sleman tertinggi pada tahun 2021, yaitu sebesar Rp445,47 Milyar. Sementara pada tahun 2022 nilai

SILPA mengalami penurunan dan semakin menurun sampai tahun 2024, dimana nilai SILPA sebesar Rp153,44 Milyar.

Penurunan SILPA Kabupaten Sleman cukup terkait dengan kondisi surplus atau defisit APBD. Pada tahun 2022 dan 2023, dimana terjadi penurunan SILPA yang cukup tajam, ternyata sejalan dengan kondisi defisit APBD, dimana pada tahun 2022 APBD Sleman mengalami defisit sebesar Rp34,49 Milyar, pada tahun 2023 defisit Rp29,09 Milyar, dan pada tahun 2024 defisit Rp49,40 Milyar. Dari angka kin maka dapat disimpulkan bahwa defisit APBD Sleman dibiayai dengan menggunakan dana SILPA. Hal ini diperkuat dengan deskripsi Neraca Kabupaten Sleman, yang akan dijelaskan pada subbab berikutnya.

2.2.1.3 Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian Keuangan Daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan.

Tabel 2.122. Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

Komponen	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Dana Bagi hasil Pajak (M Rp)	60,00	71,91	58,94	63,15	67,70
Dana Alokasi Umum (M Rp)	938,35	925,96	921,38	971,71	1.047,03
Dana Alokasi Khusus (M Rp)	273,63	368,74	430,77	365,16	409,00
Dana Perimabangan (M Rp)	1.271,98	1.366,61	1.411,09	1.400,01	1.523,73
PAD (M Rp)	788,25	803,68	1.061,06	1.130,16	1.184,13
Kemandirian keuangan daerah Rasio PAD/Dana Perimbangan	0,62	0,59	0,75	0,81	0,78

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, 2025, diolah

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman memiliki tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) yang terus meningkat. Pada tahun 2024 mencapai 0,78 angka ini agak menurun dibanding tahun 2023. Hal ini sejalan dengan hasil evaluasi BPK atas Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) dengan metode yang berbeda, pada tahun 2022 status Kemandirian Fiskal sedang tahun 2024 status Kemandirian Fiskal tinggi. Tingginya tingkat kemandirian fiskal ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal Kabupaten Sleman cukup tinggi.

2.2.1.4 Derajat Desentralisasi Fiskal

Selain Kemandirian Keuangan Daerah, rasio yang dijadikan indikator kemandirian Pemerintah Daerah adalah Derajat Desentralisasi Fiskal. Formula Derajat Desentralisasi Fiskal adalah:

$$DDF = (PAD/APBD) \times 100\%$$

Berdasarkan angka DDF, selanjutnya dapat ditentukan bagaimana Kemampuan Keuangan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut:

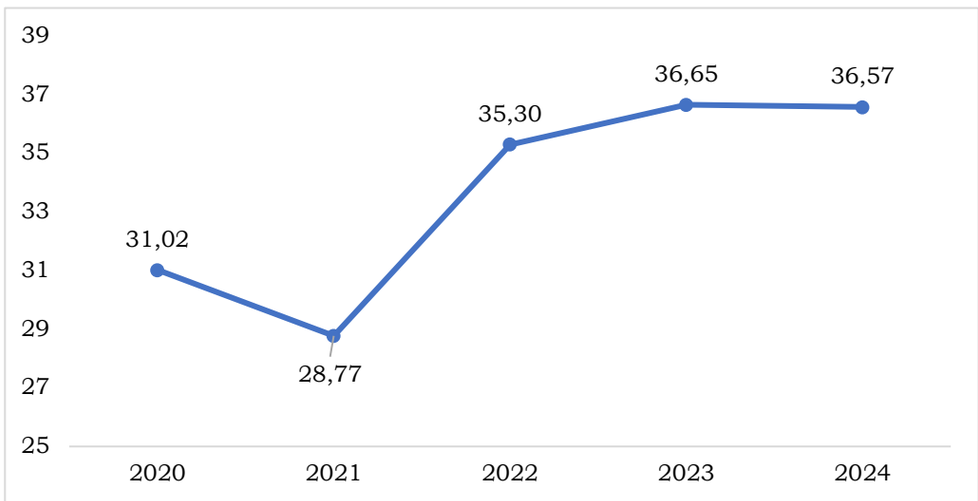
Tabel 2.123. Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

No	Persentase Rasio PAD terhadap APBD (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
1	0,00-10,00	Sangat Kurang
2	10,01-20,00	Kurang
3	20,01-30,00	Cukup
4	30,01-40,00	Sedang
5	40,01-50,00	Baik
6	>50,00	Sangat baik

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, 2020

Dari tabel di atas, Derajat Desentralisasi Fiskal berdasarkan rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bagi Kabupaten Sleman, rasio PAD terhadap APBD atau Derajat Desentralisasi Fiskal selama beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat. Pada masa pandemi Covid-19, yaitu tahun 2020, angka Desentralisasi Fiskal sebesar 31,02%, dan tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 28,77%.

Jika dilihat secara rinci, rendahnya angka Desentralisasi Fiskal ini karena penurunan PAD, khususnya penurunan pajak daerah yang cukup signifikan. Hal ini bisa dipahami, mengingat pajak daerah untuk Pemerintah Kabupaten Sleman yang paling potensial adalah pajak hotel dan restoran. Pada masa Covid-19, aktivitas pariwisata dilarang oleh Pemerintah sehingga hampir semua usaha jasa wisata mengalami penurunan dan bahkan ada yang tutup. Berdasarkan hal ini, maka sangat rasional bila pendapatan pajak Pemerintah Kabupaten Sleman mengalami penurunan yang cukup signifikan. Secara rinci, bagaimana perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kabupaten Sleman dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, 2025, diolah

Grafik 2.86. Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Sleman Tahun 2020 – 2024

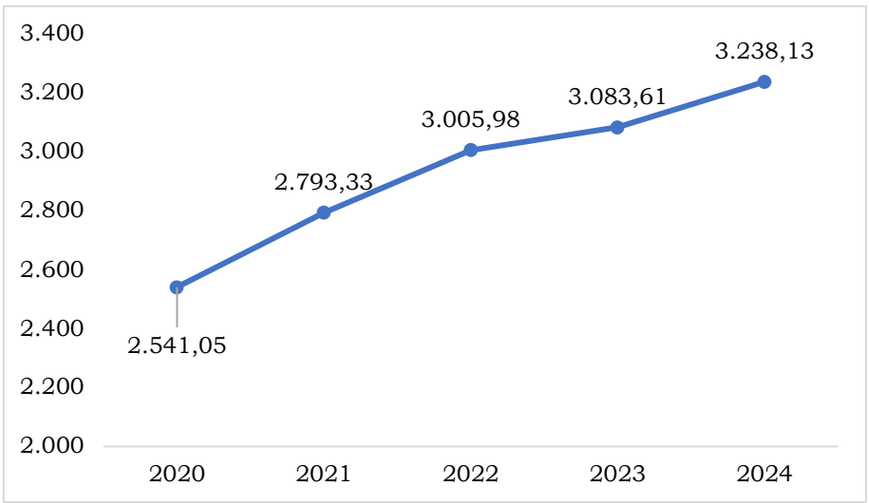
Dari grafik di atas, rata-rata Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Sleman sebesar 33,66% masuk dalam kategori sedang. Pada tahun 2024 adalah 36,57% menurun sedikit dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 36,65%. Nilai ini cenderung naik dan melebihi pada masa sebelum pandemi Covid-19 yaitu sebesar 28,77%. Hal ini menunjukkan bahwa geliat ekonomi di wilayah

Kabupaten Sleman sudah pulih dan bahkan lebih tinggi dibanding masa sebelum Covid-19, sehingga PAD mengalami peningkatan.

2.2.1.5 Pendapatan Daerah

2.2.1.5.1 Gambaran Umum Pendapatan Daerah

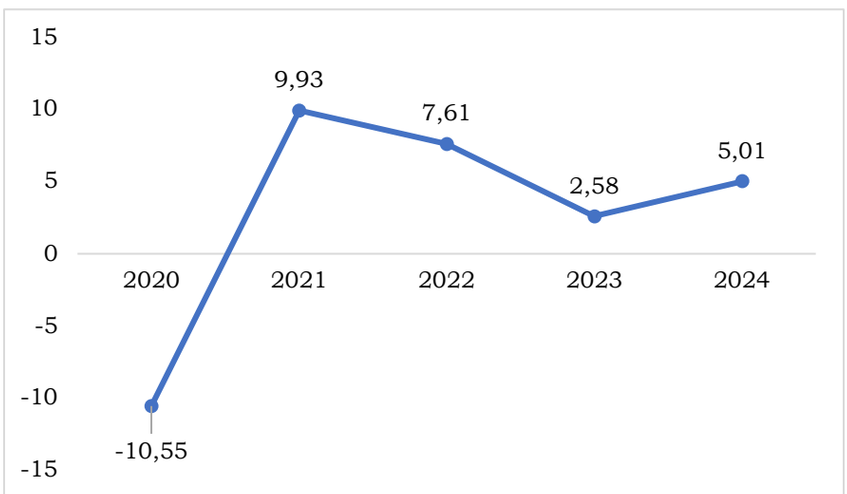
Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman mengalami peningkatan secara konsisten, setelah mengalami penurunan pada masa pandemi *Covid-19* pada tahun 2020. Tahun 2020 Pendapatan Daerah sebesar 2.541,05 Milyar Rupiah, dan mulai tahun 2022 Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman sudah pulih, bahkan lebih tinggi dari masa sebelum *Covid-19*. Secara rinci, perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Sleman selama beberapa tahun terakhir ditunjukkan dalam grafik berikut.



Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, 2025

Grafik 2.87. Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

Dari perkembangan pendapatan tersebut, jika diukur dengan pertumbuhan pendapatan dari tahun ke tahun, yang dapat ditunjukkan pada grafik berikut:



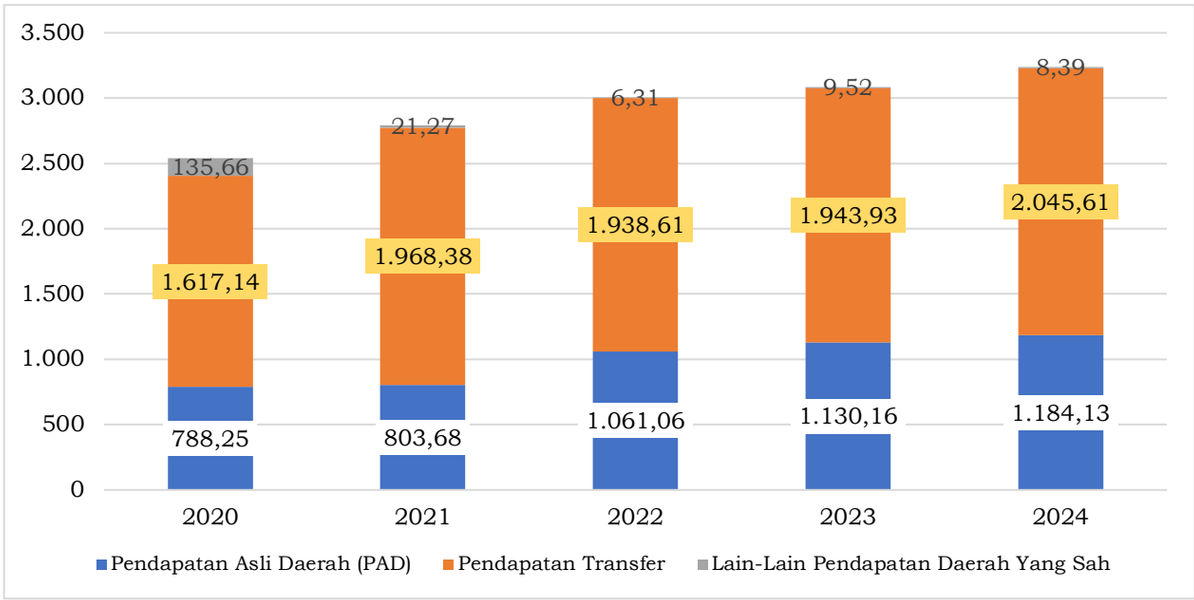
Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, 2025

Grafik 2.88. Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

Dari grafik di atas, tahun 2024 pertumbuhan pendapatan Kabupaten Sleman relatif tinggi dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2024, Pendapatan Kabupaten Sleman tumbuh 5,01%, sementara tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023, Pendapatan Kabupaten Sleman tumbuh 2,58%. Pertumbuhan pendapatan

Sleman ini bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan sebelum masa pandemi *Covid-19*, dimana pada tahun 2019, pendapatan Kabupaten Sleman tumbuh sebesar 4,71%. Sedangkan pada masa pandemi *Covid-19* pada tahun 2020, pendapatan Kabupaten Sleman merosot hingga -10,55%.

Pendapatan Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-lain yang syah. Bagaimana kontribusi dari masing-masing komponen tersebut dapat ditunjukkan pada grafik berikut:



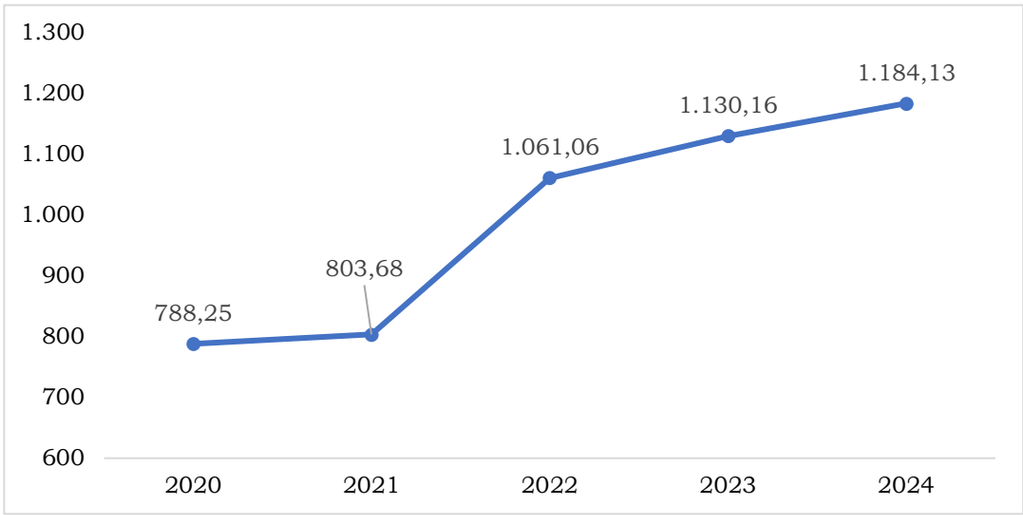
Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, 2025

Grafik 2.89. Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

Dari grafik di atas dapat ditunjukkan bahwa komponen tertinggi adalah pendapatan transfer, dimana kontribusi rata-ratanya pada 64,76%. Sementara komponen tertinggi kedua adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana kontribusi rata-ratanya adalah sebesar 33,15%. Komponen ketiga, yaitu pendapatan lain-lain, hanya memiliki kontribusi rata-rata sekitar 2% dan cenderung menurun dari waktu ke waktu.

2.2.1.5.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

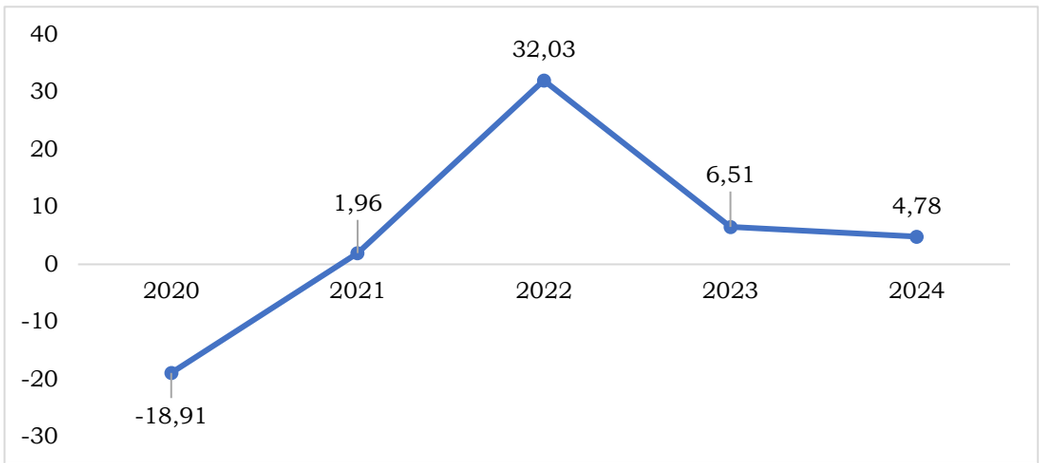
Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki posisi strategis dalam APBD suatu wilayah. Posisi strategis ini dikarenakan, Pemerintah Kabupaten mempunyai kebebasan dalam penggunaan PAD, sehingga lebih fleksibel dalam mendukung program-program unggulan khas daerah. Selain itu, PAD juga mencerminkan kemandirian Pemerintah Daerah, baik dari sisi kemandirian fiskal maupun desentralisasi fiskal. Untuk melihat bagaimana perkembangan PAD Kabupaten Sleman selama 6 tahun terakhir dapat ditunjukkan pada grafik berikut:



Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, 2025

Grafik 2.90. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (Milyar Rp)

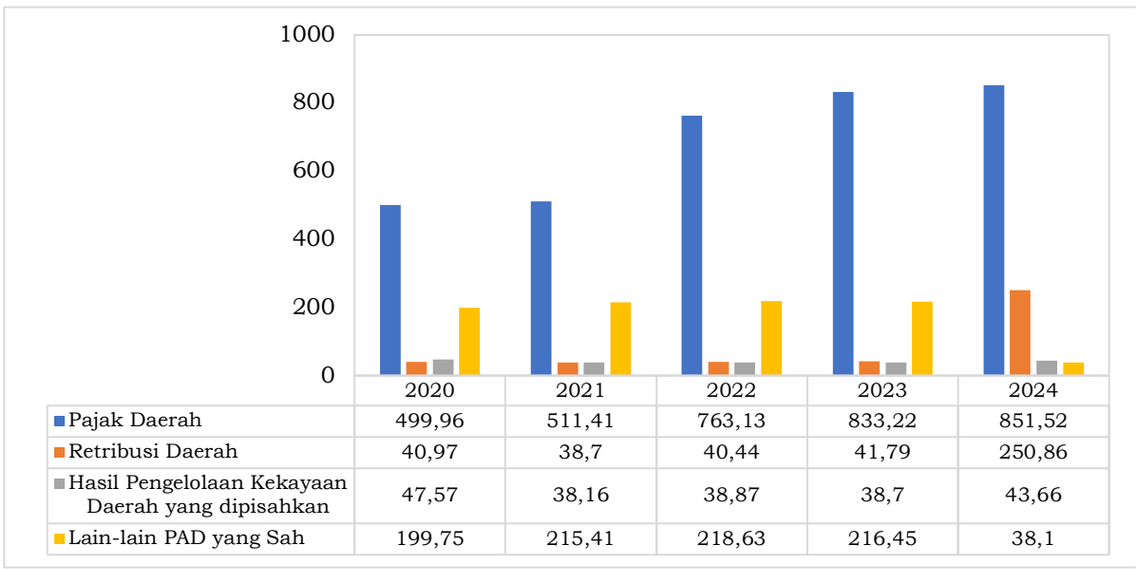
Dari grafik di atas dapat ditunjukkan bahwa meskipun berfluktuasi, namun PAD Kabupaten Sleman cenderung tumbuh positif dalam jangka panjang. Pada masa sebelum pandemi *Covid-19* nilai PAD Kabupaten Sleman masih di bawah 1 Milyar Rupiah per tahun. Pada masa pandemi *Covid-19* mengalami penurunan dan selanjutnya pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, mencapai lebih dari 1 Milyar Rupiah, yang berarti sudah melebihi dari masa sebelum pandemi *Covid-19*. Pada tahun 2024 meningkat lagi hingga mencapai 1.184,13 Milyar.



Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, 2025

Grafik 2.91. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (%)

Jika dilihat dari pertumbuhannya, PAD Kabupaten Sleman pada 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata 5,27%. Akibat *Covid-19* PAD Kabupaten Sleman mengalami kontraksi dan tumbuh -18,91. Pada masa setelah *Covid-19* PAD Kabupaten Sleman sudah kembali tumbuh positif, tahun 2022 tumbuh sangat signifikan mencapai 32,03%. Pertumbuhan yang signifikan ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di Kabupaten Sleman pada tahun 2022 sudah kembali normal kembali dan bahkan melebihi sebelum masa *Covid-19*. Sampai pada tahun 2024, tumbuh 4,78%. Selain pertumbuhan, hal yang cukup penting untuk dianalisis adalah komponen PAD Kabupaten Sleman, seperti tercantum dalam grafik di bawah.



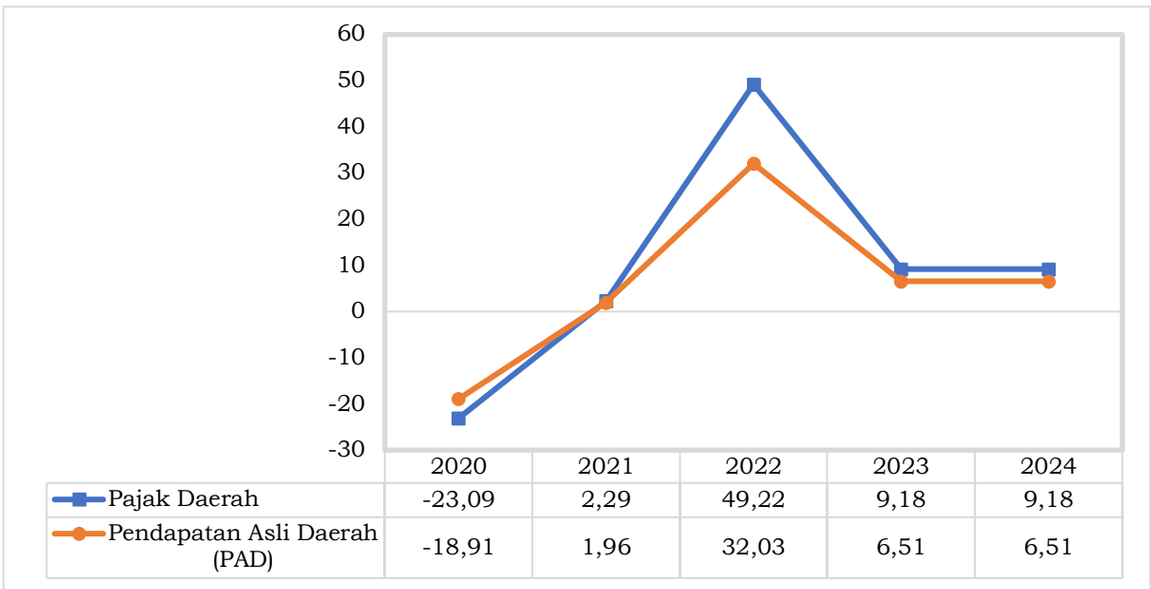
	2020	2021	2022	2023	2024
Pajak Daerah	499,96	511,41	763,13	833,22	851,52
Retribusi Daerah	40,97	38,7	40,44	41,79	250,86
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	47,57	38,16	38,87	38,7	43,66
Lain-lain PAD yang Sah	199,75	215,41	218,63	216,45	38,1

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, 2025

Grafik 2.92. Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

Dari grafik di atas dapat ditunjukkan bahwa terdapat empat komponen PAD Kabupaten Sleman, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Dari empat komponen tersebut, pajak daerah memiliki *share* yang paling tinggi. Sementara yang kedua justru komponen Lain-lain PAD yang sah. Retribusi dan Hasil Pengelolaan Aset Daerah yang dipisahkan hanya memiliki *share* yang relatif kecil. Dua komponen ini memiliki kontribusi kurang dari 10% dari total PAD.

Selain memiliki *share* yang paling tinggi dalam pembentukan PAD, pajak daerah memiliki pola pertumbuhan yang seiring dengan PAD. Grafik berikut menunjukkan bagaimana pertumbuhan pajak daerah dan PAD Kabupaten Sleman.



	2020	2021	2022	2023	2024
Pajak Daerah	-23,09	2,29	49,22	9,18	9,18
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-18,91	1,96	32,03	6,51	6,51

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, 2025

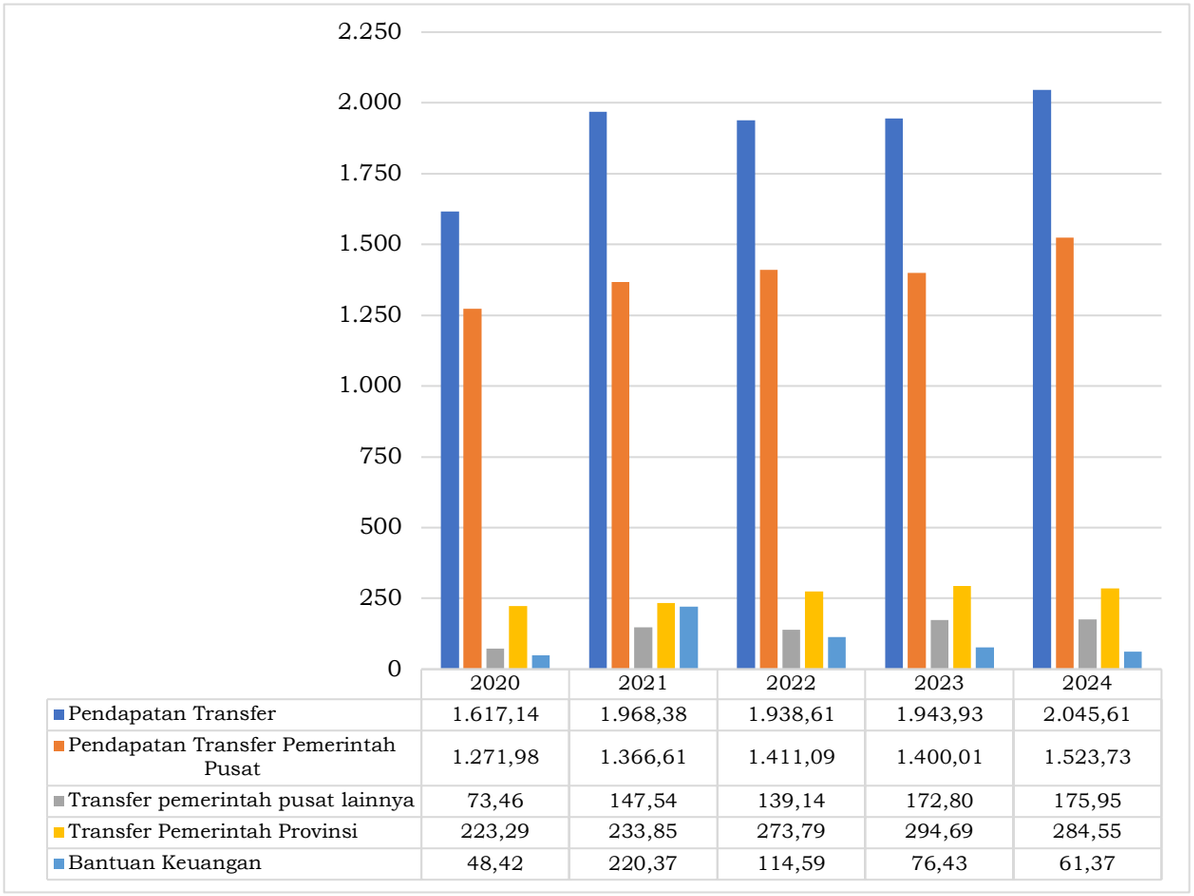
Grafik 2.93. Pertumbuhan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

Dari grafik di atas dapat ditunjukkan bahwa ketika pajak daerah mengalami penurunan pertumbuhan, maka PAD juga akan mengalami penurunan.

Sebaliknya bila pajak daerah mengalami peningkatan maka PAD juga akan meningkat. Pada kondisi normal pertumbuhan pajak daerah dan PAD hampir sama. Hal ini menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Sleman nilainya sangat tergantung dari pajak daerah. Pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah dan retribusi daerah, kurang berkontribusi secara signifikan. Hal ini justru menjadi tantangan bagi Kabupaten Sleman, mengingat aset Kabupaten Sleman yang cukup tinggi (aset daerah dijelaskan dalam bagian neraca daerah). Selain itu, jika PAD didominasi hanya dari satu sumber, maka akan berisiko terjadinya fluktuasi.

2.2.1.5.3 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat, transfer Pemerintah Pusat lainnya, transfer Pemerintah Provinsi, bantuan keuangan. Selanjutnya masing-masing komponen dirinci lagi. Nilai pendapatan transfer selama beberapa tahun terakhir dapat dicermati dalam grafik berikut.



	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Transfer	1.617,14	1.968,38	1.938,61	1.943,93	2.045,61
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.271,98	1.366,61	1.411,09	1.400,01	1.523,73
Transfer pemerintah pusat lainnya	73,46	147,54	139,14	172,80	175,95
Transfer Pemerintah Provinsi	223,29	233,85	273,79	294,69	284,55
Bantuan Keuangan	48,42	220,37	114,59	76,43	61,37

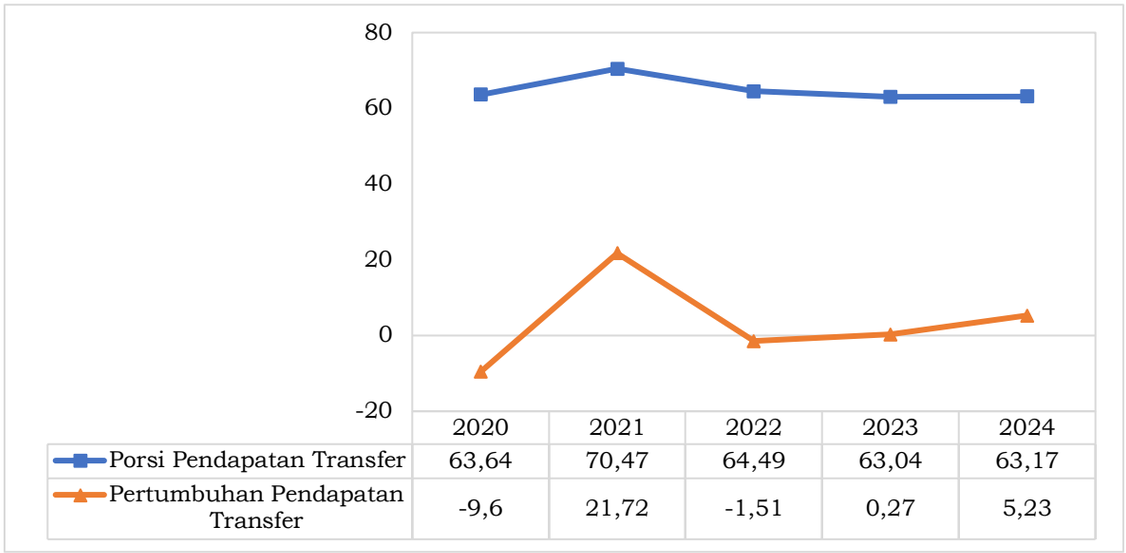
Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, 2025

Grafik 2.94. Rincian Pendapatan Transfer APBD Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (Milyar Rp)

Dari grafik di atas dapat ditunjukkan bahwa nilai pendapatan transfer Kabupaten Sleman mengalami peningkatan kecuali tahun 2020 saat pandemi *Covid-19*. Secara tren pendapatan transfer selama beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan, pada tahun 2023 pendapatan transfer sebesar Rp1.943,93 Milyar, sementara tahun 2024 meningkat menjadi Rp2.045,61 Milyar.

Pendapatan transfer tersebut merupakan sumber pendapatan yang paling dominan dalam APBD Kabupaten Sleman. Kontribusi pendapatan transfer pada

kisaran 60-70%, dari keseluruhan APBD. Porsi pendapatan transfer selalu di atas 63%. Fluktuasi terjadi pada masa krisis pandemi *Covid-19*, sementara untuk tahun 2024, porsi sudah sama dengan tahun 2019 (sebelum krisis) yaitu 63%. Demikian juga dengan pertumbuhan, pada tahun 2020, pendapatan dana transfer Kabupaten Sleman tumbuh sebesar -9,6%, selanjutnya tahun 2023 hanya tumbuh 0,3%, dan tahun 2024 tumbuh sebesar 5,23%. Secara rinci porsi dan pertumbuhan pendapatan transfer Kabupaten Sleman ditunjukkan pada grafik berikut.



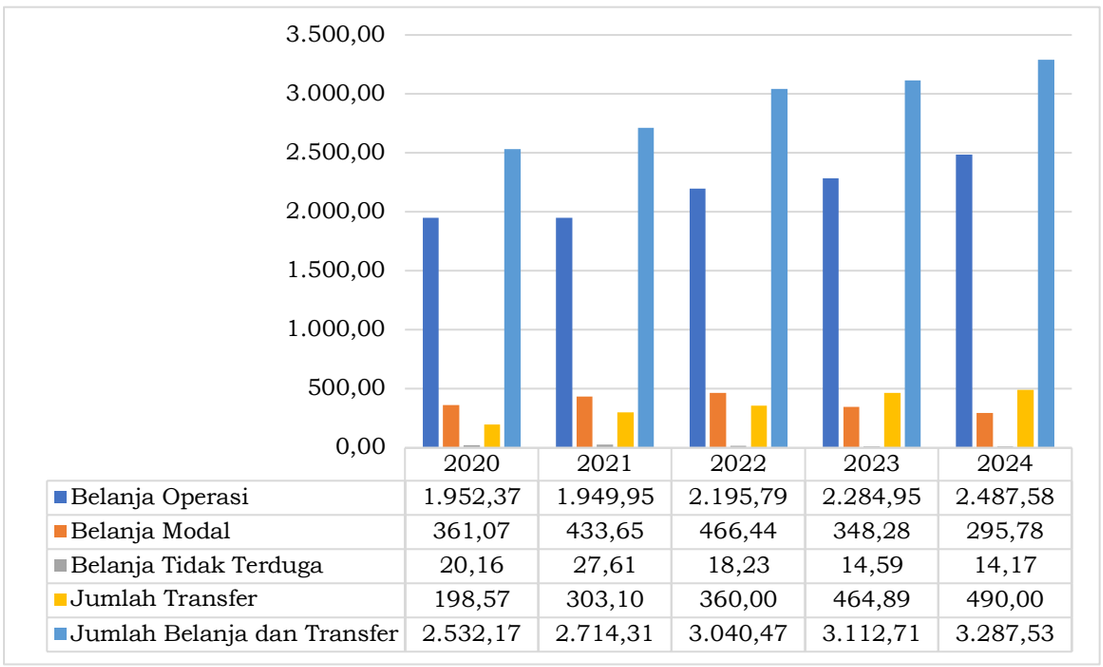
	2020	2021	2022	2023	2024
Porsi Pendapatan Transfer	63,64	70,47	64,49	63,04	63,17
Pertumbuhan Pendapatan Transfer	-9,6	21,72	-1,51	0,27	5,23

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, 2025

Grafik 2.95. Persentase *Share* dan Pertumbuhan Pendapatan Transfer Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (%)

2.2.1.6 Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan cerminan aktivitas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Melalui belanja daerah ini diperoleh informasi prioritas belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dalam APBD, Pemerintah Daerah dapat merencanakan defisit atau surplus APBD, dan dapat diketahui mengapa dan bagaimana terjadinya surplus ataupun defisit.



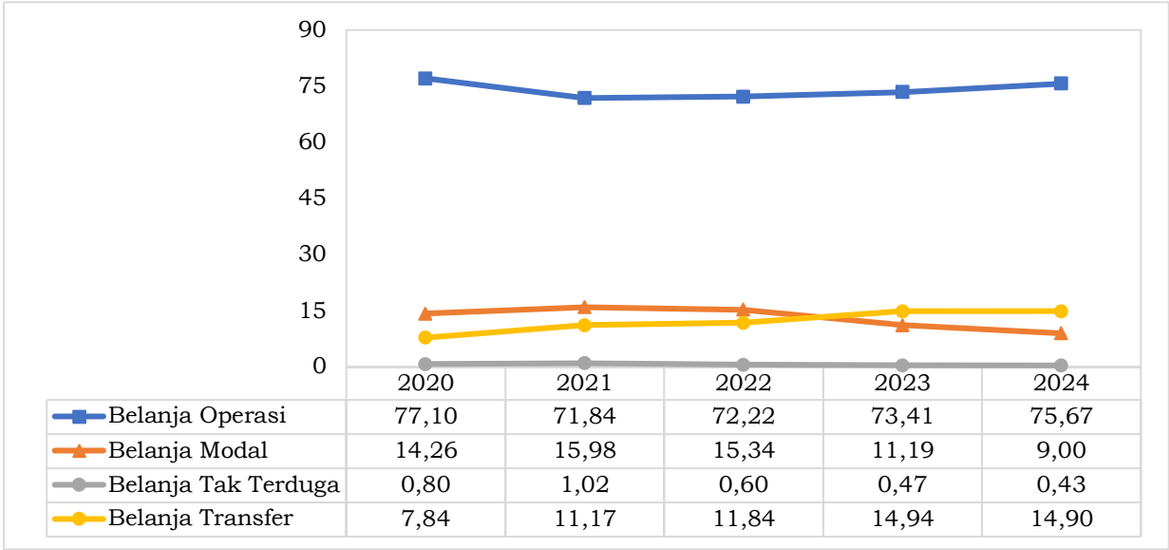
	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Operasi	1.952,37	1.949,95	2.195,79	2.284,95	2.487,58
Belanja Modal	361,07	433,65	466,44	348,28	295,78
Belanja Tidak Terduga	20,16	27,61	18,23	14,59	14,17
Jumlah Transfer	198,57	303,10	360,00	464,89	490,00
Jumlah Belanja dan Transfer	2.532,17	2.714,31	3.040,47	3.112,71	3.287,53

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, 2025

Grafik 2.96. Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020- 2024 (Milyar Rp)

Belanja daerah terdiri dari belanja operasional, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Belanja daerah Kabupaten Sleman mengalami peningkatan kecuali tahun 2020. Belanja tahun 2022 meningkat cukup tinggi, mencapai Rp3.040,47 Milyar.

Dari grafik di atas, dapat ditunjukkan bahwa komponen belanja operasi dalam APBD Kabupaten Sleman memiliki porsi yang paling dominan. Secara rinci porsi dari masing-masing komponen belanja dapat ditunjukkan pada grafik berikut.



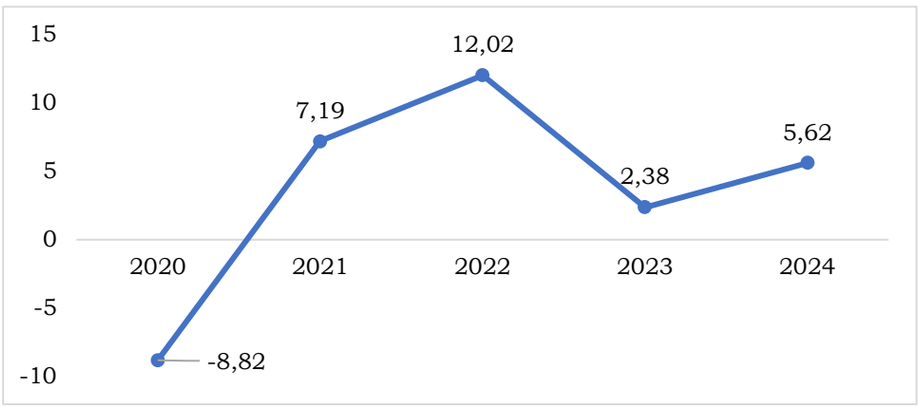
	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Operasi	77,10	71,84	72,22	73,41	75,67
Belanja Modal	14,26	15,98	15,34	11,19	9,00
Belanja Tak Terduga	0,80	1,02	0,60	0,47	0,43
Belanja Transfer	7,84	11,17	11,84	14,94	14,90

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, 2025

Grafik 2.97. Proporsi Komponen Belanja Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

Data pada grafik diatas menunjukkan bahwa porsi belanja operasional memiliki porsi selalu di atas 70%, dan bahkan pernah mencapai kisaran 77%, yaitu pada masa pandemi *Covid-19*. Tahun 2024 porsi belanja operasional mencapai 75,67%, dan angka ini relatif tinggi dibanding masa normal lainnya.

Tingginya porsi belanja rutin tersebut diikuti dengan penurunan belanja modal, yang pada tahun 2022 porsi belanja modal lebih dari 15%, menurun menjadi kisaran 9% pada tahun 2024. Disisi lain, belanja transfer justru semakin meningkat. Pada tahun 2022 porsi belanja transfer hanya pada kisaran 11%, meningkat menjadi hampir 15%.

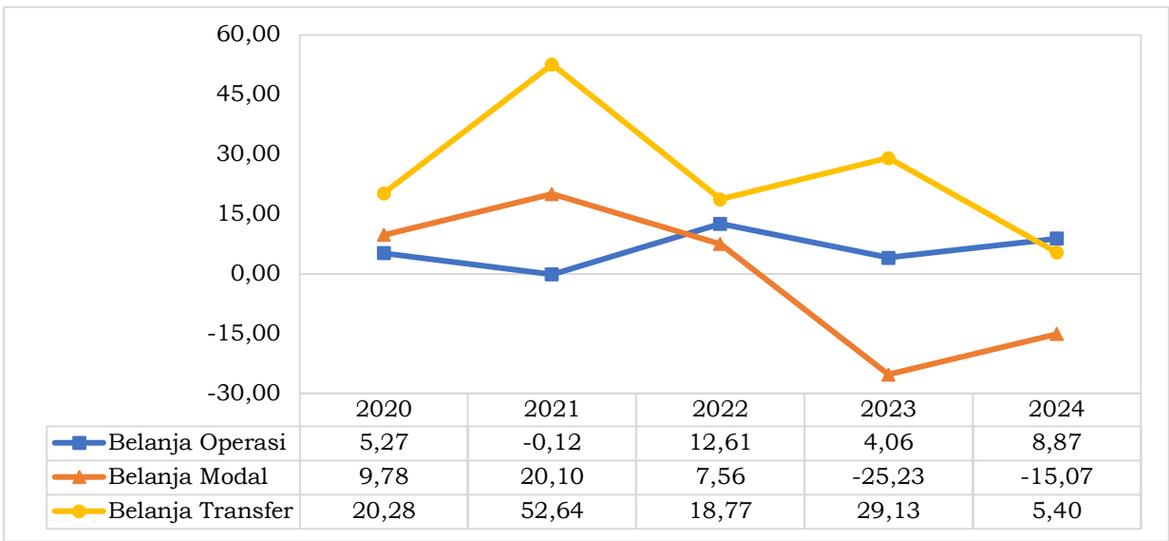


Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, 2025

Grafik 2.98. Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (%)

Dari sisi pertumbuhan seperti pada grafik di atas, dapat ditunjukkan bahwa pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Sleman mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Jika dihitung secara rata-rata, belanja daerah mengalami pertumbuhan rata-rata 6,8% per tahun. Pertumbuhan ini tidak jauh berbeda dengan pertumbuhan pendapatan. Pertumbuhan belanja daerah tertinggi adalah sebesar 12,02%, terjadi pada tahun 2022. Sementara tahun 2023 pertumbuhan belanja kembali turun menjadi 2,38%, dan tahun 2024 kembali naik menjadi 5,62%.

Komponen belanja yang memiliki pertumbuhan relatif stabil adalah komponen belanja operasional. Selama lima tahun terakhir, belanja operasional Kabupaten Sleman tumbuh rata-rata 6,35% per tahun. Rata-rata pertumbuhan belanja operasional ini sedikit lebih rendah dibanding rata-rata belanja daerah. Pertumbuhan komponen belanja daerah selama lima tahun terakhir dapat ditunjukkan pada grafik berikut.



	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Operasi	5,27	-0,12	12,61	4,06	8,87
Belanja Modal	9,78	20,10	7,56	-25,23	-15,07
Belanja Transfer	20,28	52,64	18,77	29,13	5,40

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, 2025

Grafik 2.99. Pertumbuhan Komponen Belanja Kabupaten Sleman Tahun 2020 – 2024

2.2.1.7 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah yang diarahkan pada:

a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
b. Penyertaan modal kepada BUMD; dan
c. Persentase SiLPA diupayakan tidak meningkat dengan semakin efektifnya perencanaan anggaran.

Realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Sleman tahun 2020 – 2024 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.124. Pembiayaan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (Milyar RP)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Penerimaan Pembiayaan	398,58	380,55	445,47	286,04	231,94
Penggunaan SILPA	398,58	380,55	445,47	286,04	231,94
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan	398,58	380,55	445,47	286,04	231,94
Pengeluaran Pembiayaan					
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	23,04	14,10	124,94	25,00	29,10
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran	26,92	14,10	124,94	25,00	29,10
PEMBIYAAN NETTO	371,66	366,45	320,53	261,04	202,84
SILPA	380,55	445,47	286,04	231,94	153,44

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, 2025

Dari tabel di atas dapat ditunjukkan sumber penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Sleman satu-satunya hanya dari SILPA. Sementara pengeluaran pembiayaan digunakan untuk Penyertaan Modal Daerah dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

2.2.1.8 Neraca Daerah

Selain APBD, kinerja keuangan lain yang perlu diamati adalah Neraca Daerah. Neraca Daerah adalah laporan keuangan yang berisi posisi aset (kekayaan) yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, posisi utang, dan modal (ekuitas) pada periode waktu tertentu. Neraca Daerah memberikan gambaran apa yang dimiliki dan dihutang oleh Pemerintah Daerah serta jumlah yang investasi yang dilakukan. Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap pemerintah daerah. Laporan keuangan dimaksud sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah.

Neraca daerah merupakan data dan informasi tentang gambaran berbagai hal tentang Aset (aset lancar, aset tetap dan aset lainnya), Kewajiban (jangka pendek) dan Ekuitas (ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi) pemerintah daerah. Penyusunan neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Dengan demikian, Neraca Daerah juga memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Tabel berikut menunjukkan neraca daerah Kabupaten Sleman tahun 2020 – 2024.

Tabel 2.125. Neraca Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Pertumbuhan Rata-rata
	31-Des-2020	31-Des-2021	31-Des-2022	31-Des-2023	31-Des-2024	
ASET						
ASET LANCAR						
Kas dan Setara Kas	380,55	445,47	286,04	231,95	153,43	-17,87
Kas di Kas Daerah	337,37	381,89	227,93	187,44	106,02	-22,08
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,01	0,09	0,00	0,00	0,00	
Kas di Bendahara Penerimaan	0,01	0,03	0,06	0,10	0,03	57,86
Kas di BLUD	37,15	62,34	57,87	43,18	45,57	10,20
Kas Dana BOS	6,00	1,11	0,19	0,38	0,00	-39,88
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kas Lainnya	0,00	0,00	0,01	0,86	0,00	
Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kas Dana BOK Puskesmas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Piutang Pajak	189,55	195,35	197,86	207,51	152,15	-4,36
Piutang Retribusi	7,92	8,76	9,14	9,50	9,81	5,53
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	38,72	42,15	39,59	40,79	0,15	-23,46
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	8,53	31,32	9,80	10,57	8,70	47,17
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Pertumbuhan Rata-rata
	31-Des-2020	31-Des-2021	31-Des-2022	31-Des-2023	31-Des-2024	
Piutang Transfer Antar Daerah	8,41	6,59	2,73	0,58	18,42	723,13
Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Penyisihan Piutang	-124,28	-135,70	-141,88	-151,44	-91,91	-4,71
Beban Dibayar di Muka	0,05	0,06	0,16	0,20	1,68	238,45
Persediaan	72,80	77,71	65,24	65,35	60,16	-4,27
Jumlah Aset Lancar	582,26	671,71	468,70	415,02	312,59	-12,75
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Non Permanen						
Investasi kepada BUMN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investasi kepada BUMD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dana Bergulir	51,55	50,99	51,56	51,49	51,52	-0,01
Penyisihan Piutang Dana Bergulir Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investasi Non permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jumlah Investasi Non Permanen	51,55	50,99	51,56	51,49	51,52	-0,01
Investasi Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	619,04	633,63	761,52	800,90	849,65	8,45
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jumlah Investasi Permanen	619,04	633,63	761,52	800,90	849,65	8,45
Jumlah Investasi Jangka Panjang	670,59	684,62	813,08	852,40	901,17	7,85
ASET TETAP						
Tanah	929,78	1.572,57	1.682,78	1.863,57	2.189,68	26,10
Peralatan dan Mesin	1.005,73	1.107,31	1.195,23	1.236,70	1.351,27	7,69
Gedung dan Bangunan	1.491,94	1.580,86	1.629,20	1.818,46	1.878,94	5,99
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.720,95	1.900,93	2.068,18	2.203,40	2.352,43	8,14
Aset Tetap Lainnya	107,17	106,88	108,89	96,91	104,86	-0,30
Konstruksi dalam Pengerjaan	92,70	23,24	75,42	32,58	55,15	40,52
Akumulasi Penyusutan	-1.597,11	-1.861,11	-2.085,93	-2.287,81	-2.576,85	12,73
Jumlah Aset Tetap	3.751,18	4.430,68	4.673,77	4.963,82	5.355,49	9,42
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASET LAINNYA						
Tagihan Jangka Panjang	0,37	0,13	0,13	0,13	0,13	-16,12
Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tuntutan Ganti Rugi	0,37	0,13	0,13	0,13	0,13	-16,12

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Pertumbuhan Rata-rata
	31-Des-2020	31-Des-2021	31-Des-2022	31-Des-2023	31-Des-2024	
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,00
Aset Tak Berwujud	23,71	26,54	27,79	30,19	31,94	7,77
Aset Lain-lain	138,70	85,84	94,85	221,19	159,96	19,47
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-9,93	-12,74	-13,54	-15,62	-17,52	15,54
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-97,47	-66,96	-75,34	-136,80	-112,73	11,30
Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	
Jumlah Aset Lainnya	55,66	33,08	34,18	99,36	62,12	28,99
PROPERTI INVESTASI						
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	
Jumlah Properti Investasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	
JUMLAH ASET	5.059,68	5.820,09	5.989,73	6.330,60	6.631,54	7,10
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pendapatan Diterima di Muka	1,53	0,79	1,20	1,14	1,34	4,16
Utang Belanja	3,55	2,16	2,00	2,15	1,04	-22,72
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	5,07	2,95	3,21	3,29	2,39	-14,52
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Utang kepada Masyarakat (Obligasi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Premium (Diskonto) Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUMLAH KEWAJIBAN	5,07	2,95	3,21	3,29	2,39	-14,52
EKUITAS						
EKUITAS	5.054,61	5.817,14	5.986,52	6.327,31	6.629,15	7,12
JUMLAH EKUITAS	5.054,61	5.817,14	5.986,52	6.327,31	6.629,15	7,12
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5.059,68	5.820,09	5.989,73	6.330,60	6.631,54	7,10

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, 2025

Dari tabel di atas, dapat ditunjukkan bahwa nilai aset Pemerintah Kabupaten Sleman mengalami kenaikan secara konsisten dengan pertumbuhan rata-rata 7,10% per tahun. Namun aset lancar mengalami penurunan rata-rata -17,87% per tahun. Sementara kewajiban juga mengalami penurunan bahkan dengan nilai penurunan yang lebih besar. Penurunan kewajiban (*passive*) rata-rata -14,52% per tahun. Berdasarkan pertumbuhan aset dan kewajiban ini, maka ekuitas mengalami peningkatan rata-rata 7,10% per tahun.

Untuk mengetahui bagaimana kemampuan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, maka perlu diketahui rasio likuiditas. Rasio likuiditas yaitu rasio antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kabupaten Sleman memiliki rasio kas (*cash ratio*) yang sangat aman. Namun demikian nilai kas rasio cenderung menurun, dimana tahun 2021 nilai rasio kas sebesar 129,33. Adapun tahun 2024 turun menjadi 44,44. Selain itu perlu diketahui pula rasio likuiditas (*liquidity ratio*) yaitu rasio yang mencerminkan posisi aset lancar dibanding kewajiban jangka. Rasio likuiditas Kabupaten Sleman pada kisaran 114,81 sampai dengan 227,47. Sementara untuk tahun 2024, rasio likuiditas sebesar 131,03. Dari angka-angka rasio ini maka Kabupaten Sleman cukup *liquid* dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik. Berikut adalah rasio likuiditas dan *cash ratio* Kabupaten Sleman selam lima tahun terakhir.

Tabel 2.126. Rasio Kas dan Rasio Likuiditas Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio kas (c*ash ratio*)	66,52	129,33	71,06	56,95	44,44
2	Rasio likuiditas	114,81	227,47	146,12	126,10	131,03

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, 2025, diolah

2.2.1.9 Kebijakan Pengelolaan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Sleman diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan transfer selama periode 2020-2024 menempati proporsi yang paling besar terhadap pendapatan daerah, yakni rata-rata 64,96%.

Pendapatan Asli Daerah perlu ditingkatkan, guna meningkatkan kemandirian daerah. Sumber-sumber pendapatan yang lainnya juga perlu ditingkatkan, untuk meningkatkan kemampuan keuangan guna pendanaan pembangunan. Terkait dengan hal itu, Kebijakan Umum pendapatan daerah dapat diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat di samping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.

Berdasarkan penjabaran kondisi keuangan serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perekonomian daerah sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui: (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM pengelola pendapatan daerah; (3) Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan; dan (4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Untuk itu ditetapkan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, yaitu:

1. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah.
2. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, SKPD penghasil.
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
6. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah.
7. Meningkatkan kinerja pendapatan dan pengelolaan pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
8. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Selanjutnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dengan demikian, arah kebijakan belanja Kabupaten Sleman, pada prinsipnya adalah agar belanja dapat mendukung kebutuhan dana seluruh kegiatan. Belanja yang tidak strategis dan tidak memiliki nilai tambah (*non value-added*) harus diminimalisir.

Pada tahap berikutnya, untuk menutup semua kebutuhan belanja, APBD harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu menutup seluruh kebutuhan belanja. Kebijakan pendapatan diarahkan agar sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD selama ini diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

Mengingat bahwa komponen anggaran menggunakan struktur surplus/defisit maka selisih antara pendapatan dan belanja dihitung sebagai surplus/defisit dan dialokasikan ke pembiayaan. Dalam hal suatu APBD mengalami defisit maka jumlah pembiayaan *netto* (penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan) harus dapat menutup defisit tersebut. Sebaliknya, apabila APBD mengalami selisih lebih, maka surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan.

2.2.1.9.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Dampak APBD terhadap masyarakat tidak saja ditentukan oleh besarnya APBD, tetapi juga pola penggunaa. Pola penggunaan anggaran yang didominasi belanja pegawai pada umumnya kurang berdampak pada pembangunan, sehingga pengadaan dan perawatan infrastruktur menjadi kurang optimal, termasuk pengeluaran untuk pengembangan, fasilitas, dan investasi publik lainnya. Proporsi rata-rata belanja pegawai Kabupaten Sleman sebesar 44,07%. Angka proporsi ini mengalami penurunan dari waktu ke waktu, dimana pada tahun 2024 kembali naik mencapai 42,96%. Untuk lebih detail, dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.127. Proporsi Penggunaan Anggaran APBD Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 (Milyar Rp)

Tahun	Belanja Pegawai	Jumlah Belanja (Tanpa Transfer)	Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Jumlah Belanja (%)
2020	1.147,36	2.333,60	49,17
2021	1.023,35	2.411,21	42,44
2022	1.088,28	2.680,47	40,60
2023	1.069,36	2.647,82	40,39
2024	1.201,78	2.797,53	42,96
Rata-rata			**43,11**

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, 2025, diolah

Kondisi di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman mempunyai ruang fiskal yang cukup tinggi untuk melaksanakan pembangunan. Selain itu dengan semakin menurunnya porsi belanja pegawai, menunjukkan bahwa porsi penggunaan dana APBD di Kabupaten Sleman semakin baik. Kapasitas fiskal Kabupaten Sleman secara rinci akan dianalisis pada bagian berikut.

2.2.1.9.2 Kapasitas Fiskal

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan no. 084 Tahun 2023, kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan suatu daerah yang dihitung dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Rumusan untuk menghitung kapasitas fiskal adalah sebagai berikut:

KFD = [pendapatan + pencairan dana cadangan] - [pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan + belanja tertentu + pengeluaran pembiayaan tertentu]

RKFD = (KFD/Belanja Pegawai)

Dalam penghitungan kapasitas fiskal Kabupaten Sleman, beberapa asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan hanya dari pendapatan APBD, karena Kabupaten Sleman tidak memiliki dana cadangan

b. Belanja yang sudah pasti: belanja pegawai
c. Belanja mengikat, terdiri dari: gaji tenaga honorer, wifi ruang publik untuk masyarakat, penerangan jalan umum, jaminan kesehatan untuk masyarakat, hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), pramuka, Palang Merah Indonesia (PMI), kelompok masyarakat (pokmas), organisasi masyarakat (ormas), partai politik (parpol), bantuan keuangan khusus (BKK) Desa, BKK reguler, anggaran untuk Sekretariat Dewan antara lain untuk reses. Belanja mengikat ini proporsinya sekitar 24,5% dari pendapatan APBD.

Tabel 2.128. Kapasitas Fiskal Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan APBD (M Rp)	2.541,05	2.793,33	3.005,98	3.083,61	3.238,13
Belanja pegawai (M Rp)	1.147,36	1.023,35	1.088,28	1.069,36	1.201,78
Belanja mengikat (24,5% Pendapatan) (M Rp)	622,56	684,37	736,47	755,49	793,44
Kapasitas fiskal (M Rp)	771,14	1.085,61	1.181,24	1.258,77	1.242,90
Persentase kapasitas fiskal terhadap APBD (%)	30,35	38,86	39,30	40,82	38,38
Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD)	0,67	1,06	1,09	1,18	1,03

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, 2025, diolah

Selama periode 2020–2024, Kabupaten Sleman menunjukkan capaian positif dalam hal kemandirian fiskal. Rasio kapasitas fiskal meningkat signifikan dari 0,67 pada tahun 2020 menjadi 1,18 pada tahun 2023, mencerminkan pergeseran dari ketergantungan terhadap transfer pusat menuju kemandirian keuangan daerah. Pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan ke angka 1,03, yang disebabkan adanya peningkatan belanja pegawai dari periode sebelumnya. Meskipun demikian, posisi ini tetap menandakan bahwa Sleman memiliki kapasitas fiskal yang kuat untuk membiayai program pembangunan secara mandiri.

2.2.1.9.3 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan menunjukkan berapa besar pembiayaan yang dikeluarkan secara riil. Belanja Daerah terdiri dari pembiayaan riil dan transfer ke Pemerintah Desa. Pembiayaan riil merupakan pembiayaan yang dibelanjakan oleh Pemerintah Kabupaten. Sedangkan dana transfer ke Desa dibelanjakan oleh Pemerintah Desa. Tabel berikut menunjukkan bagaimana defisit riil Kabupaten Sleman selama beberapa tahun terakhir:

Tabel 2.129. Defisit Riil APBD Kabupaten Sleman 2020-2024 (Milyar Rp)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan Daerah	2.541,05	2.793,33	3.005,98	3.083,61	3.238,13
2	Belanja Daerah	2.333,60	2.411,21	2.680,47	2.647,82	2.797,53
3	Pembiayaan Daerah	26,92	14,10	124,94	25,00	29,10
4	Defisit Riil*)	180,53	368,02	200,57	410,80	411,50

*Keterangan: *)Defisit Riil = Pendapatan Daerah – Belanja Daerah – Pengeluaran Pembiayaan Daerah*
Sumber : Analisis, 2025

Dari tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa pada dasarnya Kabupaten Sleman tidak pernah mengalami defisit riil. Defisit yang terjadi pada tahun 2023 dan 2024, disebabkan oleh tingginya transfer ke Desa.

2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah

Proyeksi APBD dilakukan untuk memberikan gambaran bagaimana prospek pendanaan aktivitas pembangunan Kabupaten Sleman pada masa RPJMD mendatang. Bagian ini akan menguraikan bagaimana hasil proyeksi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan.

Untuk Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman dilakukan dengan metode *constant annually growth rate* (CAGR), dimana angka pertumbuhan diambil dari hasil kesepakatan dengan melihat potensi pendapatan di masa mendatang. Untuk beberapa komponen dilakukan penyesuaian, seperti misalnya komponen PAD ada pertumbuhan relatif tinggi di tahun 2025 karena adanya perubahan ketentuan tentang pajak kendaraan bermotor, dimana semula pembagian porsi lebih besar ke Provinsi sementara untuk tahun 2025 dan selanjutnya porsi lebih besar ke Kabupaten/Kota. Pendapatan Daerah merupakan penjumlahan dari hasil proyeksi PAD ditambah hasil proyeksi pendapatan transfer. Pendapatan lain-lain PAD yang syah merupakan selisih antara hasil proyeksi PAD dengan hasil proyeksi komponen-komponen pembentuknya.

Pendapatan transfer salah satunya berasal dari dana keistimewaan. Realisasi dana keistimewaan nantinya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat serta penilaian kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat.

Selaras dengan proyeksi pendapatan, proyeksi belanja juga dilakukan dengan metode CAGR, dengan beberapa penyesuaian. Adapun pembiayaan, masih digunakan SILPa untuk menyeimbangkan antara surplus/defisit dengan pembiayaan *netto* yang digunakan untuk membiayai penyertaan modal. Penyertaan modal sudah dihitung berdasarkan peraturan bupati dengan penyesuaian. Tabel berikut menunjukkan hasil proyeksi pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan Kabupaten Sleman tahun 2025 sampai dengan tahun 2030.

Tabel 2.130. Proyeksi Kerangka Pendanaan Kabupaten Sleman Tahun 2025-2030 (Milyar Rp)

No	Uraian	Baseline 2024	Tahun Proyeksi					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	PENDAPATAN							
	Pendapatan Asli Daerah	1.184,13	1.466,13	1.630,75	1.679,67	1.730,06	1.781,96	2.000,05
	Pendapatan Transfer	2.045,61	1.805,69	1.792,99	1.780,58	1.784,82	1.789,65	1.828,46
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	8,39	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN	3.238,13	3.271,82	3.423,74	3.460,25	3.514,89	3.571,61	3.828,51
2	BELANJA							
	Belanja Operasi	2.487,58	2.507,85	2.566,77	2.483,65	2.525,21	2.567,90	2.683,59
	Belanja Modal	295,78	333,91	437,05	411,31	441,42	445,83	481,89
	Belanja Tidak Terduga	14,17	21,90	21,09	21,09	21,30	21,51	22,16
	Belanja Transfer	490,00	508,80	537,85	560,93	565,54	570,29	575,17
	JUMLAH BELANJA	3.287,53	3.372,46	3.562,76	3.476,98	3.553,47	3.605,54	3.762,81
	SURPLUS/DEFISIT	-49,40	-100,64	-139,02	-16,73	-38,58	-33,92	65,70

No	Uraian	Baseline 2024	Tahun Proyeksi					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	PEMBIAYAAN							
	Penerimaan Pembiayaan	231,94	153,42	237,94	138,16	129,71	125,86	27,32
	- Penggunaan SILPa	231,94	153,42	192,94	138,16	129,71	125,86	27,32
	- Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	45,00	0	0	0	0
	Pengeluaran Pembiayaan	29,1	52,78	98,92	121,43	91,13	91,94	93,02
	- Penyertaan Modal	29,1	52,78	98,92	121,43	91,13	91,94	93,02
	PEMBIAYAAN NETTO	202,84	100,64	139,02	16,73	38,58	33,92	-65,70

Sumber: Analisis, 2025

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1.1 Permasalahan Pengembangan Ekonomi

Kabupaten Sleman merupakan salah satu daerah yang strategis di DIY dengan potensi ekonomi yang beragam, mulai dari sektor pertanian yang berbasis lokal hingga pariwisata berbasis alam dan budaya. Struktur perekonomiannya mencerminkan keberagaman potensi di sektor primer, sekunder maupun tersier, yang memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sektor primer yang meliputi pertanian, peternakan, dan perikanan memberikan kontribusi signifikan dalam memenuhi kebutuhan regional. Namun sektor ini menghadapi tantangan berupa alih fungsi lahan, fluktuasi harga panen, serta terbatasnya adopsi teknologi modern oleh pelaku usaha. Sektor sekunder terutama industri pengolahan dan manufaktur memiliki peran penting dalam menciptakan nilai tambah bagi produk lokal. Meskipun demikian, beberapa kendala seperti keterbatasan akses bahan baku, minimnya inovasi teknologi, dan rendahnya daya saing menjadi isu yang perlu mendapat perhatian khusus. Sementara itu sektor tersier yang meliputi perdagangan jasa dan pariwisata telah menjadi motor penggerak utama ekonomi juga masih menghadap tantangan dalam mengelola destinasi wisata berkelanjutan dan penguatan kualitas pengelola. Disisi lain, investasi menjadi elemen yang sangat penting mendukung pengembangan ketiga sektor ini. Kabupaten Sleman memiliki peluang besar untuk menarik investor melalui perbaikan dalam berbagai aspek. Namun, diperlukan upaya lebih lanjut untuk menciptakan ekosistem investasi yang kondusif dan menjawab berbagai permasalahan yang ada.

A. Kinerja sektor primer khususnya sektor pertanian dan perikanan masih rendah

Sektor pertanian di Kabupaten Sleman memiliki peranan strategis. Pertama, memiliki kontribusi dalam pembentukan PDRB dan kedua sebagai sektor yang menopang ketahanan pangan daerah. Berdasarkan data PDRB sektor pertanian menyumbang kontribusi yang relatif tinggi dan stabil, namun pertumbuhannya selalu di bawah pertumbuhan pertumbuhan PDRB secara umum.

Sektor pertanian dalam arti luas yang menjadi kewenangan Kabupaten Sleman terdiri dari subsektor tanaman pangan, subsektor hortikultura, subsektor peternakan, dan tanaman perkebunan, dan subsektor perikanan. Kelima subsektor tersebut merupakan penghasil pangan. Sesuai dengan

konsep ketahanan pangan yang menopang ketahanan wilayah termasuk di dalamnya pemenuhan gizi yang berdampak pada kesehatan.

Terlepas dari dua peran strategis tersebut, perubahan iklim memberikan dampak variatif pada bidang pertanian. Fenomena El Nino, yang menyebabkan meningkatnya musim kering, dan La Nina, yang menyebabkan meningkatnya curah hujan berdampak pada jadwal tanam, penurunan produktivitas, tingginya potensi gagal panen dan ketersediaan air untuk usaha tani dan ternak. Gangguan pada jadwal tanam, produksi, dan produktivitas berdampak pada ketersediaan stok dan pemenuhan bahan pangan.

Berdasarkan analisis terhadap kinerja sektor primer di Kabupaten Sleman, teridentifikasi bahwa kinerja sektor pertanian dan perikanan secara umum belum mencapai kondisi optimal. Akar permasalahan utama yang melatarbelakangi kondisi ini meliputi rendahnya kesejahteraan petani dan kesejahteraan petani ikan yang masih menjadi isu krusial, meskipun Nilai Tukar Petani (NTP) sepanjang tahun 2024 lebih dari 100. Selain itu, ketersediaan pangan tahun 2024 lebih rendah dari tren 2020-2023 menandakan upaya penguatan ketahanan pangan daerah masih bergantung pada cadangan dan belum ditopang oleh produksi lokal yang kuat. Ketika kesejahteraan petani secara umum memadai, nantinya kinerja sektor pertanian juga nantinya akan mengalami peningkatan yang berkualitas dan berketahanan.

Permasalahan yang berkontribusi terhadap rendahnya kesejahteraan petani meliputi pengelolaan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang terkendala oleh keterbatasan pendampingan, persaingan lahan, dan risiko yang tinggi. Alih fungsi lahan pertanian menjadi isu serius, yang mengancam produktivitas panen dan mata pencaharian petani. Pada tahun 2024, alih fungsi lahan pertanian yang tercatat seluas 56,95 Ha.

Pengelolaan komoditas peternakan masih menghadapi inefisiensi produksi dan kerentanan terhadap fluktuasi harga pakan serta wabah penyakit. Pelayanan kesehatan ternak yang belum merata, penanganan hama dan penyakit tanaman yang masih belum efektif, kapasitas penyuluh pertanian yang belum merata, kelembagaan pertanian yang masih lemah dalam mendukung pembangunan sektor pertanian secara menyeluruh, dan rendahnya jumlah petani muda turut menjadi faktor penghambat. Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman mencatat bahwa jumlah petani milenial masih di bawah 10% dari total petani di Kabupaten Sleman.

Pada sektor perikanan, kekeringan menjadi salah satu faktor yang berdampak negatif. Pada tahun 2024, sekitar 171,1 hektar kolam budidaya di Sleman terdampak oleh kekurangan air akibat kekeringan. Rendahnya kesejahteraan petani ikan juga disebabkan oleh pengelolaan komoditas perikanan yang belum efisien, mutu olahan perikanan yang belum berstandar baik, serta pengelolaan perairan umum yang belum optimal.

Sementara itu, peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat menyebabkan permintaan terhadap produk pertanian dan pangan semakin meningkat. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan upaya peningkatan peningkatan produksi dan nilai tambah sektor pertanian. Upaya tersebut terus dilakukan oleh pemerintah antara lain dengan kebijakan revitalisasi dan hilirisasi produk pertanian dan pangan. Kebijakan ini dilakukan selain untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah sektor pertanian, juga

dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja baru serta mendorong kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian.

Dari beberapa hal tersebut di atas, dapat disimpulkan permasalahan utama sektor pertanian (termasuk perikanan, peternakan dan perkebunan) yang menghambat dan menjadi tantangan pengembangan sektor pertanian. Pertama, produsen produk pertanian termasuk petani masih jauh dari kata sejahtera, sehingga menyebabkan generasi muda jarang yang berminat terjun di sektor pertanian. Akibatnya terjadi *lack of employment* di sektor pertanian. Permasalahan kedua adalah ketersediaan lahan pertanian yang produktif semakin berkurang. Hal ini disebabkan oleh banyaknya konversi lahan pertanian menjadi peruntukan lain seperti perumahan dan industri. Selain itu, masih terdapat lahan menganggur yang belum dioptimalkan, meskipun sebagian besar lahan menganggur tersebut kurang produktif, namun bisa didaya gunakan dengan berbagai inovasi teknologi pertanahan. Permasalahan adalah input sektor pertanian seperti benih, pupuk serta sarana dan prasarana pertanian sering mengalami kelangkaan pasokan dan harga yang masih cukup tinggi. Akibatnya, produktivitas hasil pertanian menjadi tidak maksimal dan petani sering mengalami kerugian. Permasalahan lain adalah pemanfaatan alat dan teknologi pertanian yang masih rendah. Sebagian besar produksi pertanian masih dilakukan secara manual dan belum memanfaatkan teknologi pertanian. Hal ini menyebabkan sektor pertanian dan pangan kurang bisa bersaing.

Upaya ketahanan pangan daerah yang kurang efektif, tercermin dari menurunnya ketersediaan pangan utama serta pengelolaan cadangan pangan daerah yang belum memadai. Ketahanan pangan yang juga didukung oleh indikator pola pangan harapan perlu memperhatikan penurunan PPH pada tiga tahun terakhir. Dukungan ketahanan pangan melalui kelompok wanita tani untuk pengelolaan dan pemberdayaan pangan daerah masih terbatas. Yang tidak kalah penting adalah adanya ketidakseimbangan produksi pangan antar wilayah serta ketidaktepatan penangan pangan mulai panen sampai dengan pengolahan dan berlanjut pada pemasaran.

Identifikasi permasalahan-permasalahan ini menjadi dasar penting dalam penyusunan strategi dan program pembangunan ekonomi sektor primer di Kabupaten Sleman. Intervensi yang terarah dan komprehensif dibutuhkan untuk mengatasi akar dan serabut permasalahan tersebut, dengan tujuan meningkatkan kinerja sektor pertanian dan perikanan, meningkatkan kesejahteraan pelaku utama, serta memperkuat ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.

B. Kinerja sektor sekunder khususnya industri pengolahan belum optimal

Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang memiliki kontribusi yang paling tinggi dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sleman. Namun, pertumbuhan setor industri semakin menurun, dan pada tahun 2023 hanya tumbuh pada kisaran 3%. Selain itu, sektor Industri juga lebih banyak ditopang oleh industri kecil dan menengah.

Dalam hal investasi, salah satu permasalahan adalah belum meratanya jenis investasi yang masuk baik dari sisi sektoral maupun spasial. Jenis investasi yang masuk terkait perindustrian manufaktur masih sangat terbatas, dimana selama lima tahun terakhir porsi investasi di sektor industri manufaktur rata-rata sekitar 20%. Dalam sektor industri, ada kendala terkait lokasi mengingat kawasan yang diperuntukkan industri di Kabupaten Sleman relatif terbatas.

Di Kabupaten Sleman sangat sulit ditemukan kawasan peruntukan industri dengan hamparan yang luas. Selain itu, harga tanah di Kabupaten Sleman cukup mahal dibanding wilayah lain.

Dalam konteks industri, kinerja yang belum memadai terlihat dari masih rendahnya industri kecil yang naik kelas. Lambatnya pertumbuhan industri menengah dan besar di Kabupaten Sleman menjadi penanda bahwa sedikit sekali industri kecil yang kemudian naik kelas menjadi industri menengah. Hal ini kemudian juga diakibatkan oleh aktivitas sentra industri yang belum berfokus pada kenaikan kelas ini. Di sisi lain, kepatuhan pelaku usaha industri yang masih rendah menurunkan peluang mereka pada pasar yang lebih luas, terutama pasar global. Pengelolaan basis data industri yang masih terbatas juga menjadi salah satu kendala tambahan untuk bisa membuat kebijakan pengembangan industri sesuai profil industri.

Permasalahan lain yang terjadi antara lain adalah kurang efektifnya pengelolaan kelembagaan ekonomi lokal yang meliputi koperasi dan UMKM.

1. Profesionalitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil (UMK) yang masih rendah
   Profesionalitas koperasi dan UMK masih menghadapi tantangan signifikan yang menghambat pertumbuhan dan kontribusi mereka terhadap perekonomian. Keterbatasan dalam manajemen, kurangnya keterampilan, dan minimnya akses terhadap teknologi serta sumber daya menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat profesionalitas di sektor ini. Manajemen yang kurang terstruktur sering kali menyebabkan ketidakmampuan dalam mengelola operasional secara efektif, mengakibatkan inefisiensi dan kehilangan peluang bisnis. Banyak koperasi dan UMK yang masih menggunakan metode tradisional dalam operasional harian mereka, yang menghambat kemampuan mereka untuk bersaing di pasar yang semakin dinamis dan teknologi yang berkembang pesat.
2. Daya saing Koperasi dan UMK di Tingkat regional – global
   Daya saing koperasi dan Usaha Mikro Kecil (UMK) di tingkat regional dan global masih belum memadai, menghambat potensi pertumbuhan ekonomi dan kontribusi mereka dalam pasar yang lebih luas. Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap rendahnya daya saing ini meliputi keterbatasan dalam manajemen, akses teknologi, serta sumber daya keuangan (permodalan) dan pengetahuan.
3. Kolaborasi dan penguatan ekosistem Koperasi dan UMK
   Kolaborasi dan penguatan ekosistem koperasi dan UMK adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing mereka di pasar lokal, regional, dan global. Dengan menciptakan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, koperasi dan UMK dapat memanfaatkan sumber daya dan peluang yang lebih luas untuk berkembang dan berinovasi. Kolaborasi dan penguatan ekosistem koperasi dan UMK bukan hanya penting untuk meningkatkan daya saing mereka, tetapi juga untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

C. Kinerja sektor tersier khususnya perdagangan dan pariwisata yang belum optimal

Sektor perdagangan Kabupaten Sleman merupakan salah satu pilar utama perekonomian daerah. Bersama dengan sektor pariwisata, sektor ini

menyumbang 22,77% dari total PDRB tahun 2024. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang ada di sektor ini:

1. Perlunya meningkatkan kinerja ekspor daerah terutama terletak pada kurangnya diversifikasi produk ekspor, yang masih didominasi oleh produk tertentu seperti pakaian jadi tekstil, sarung tangan kulit, dan produk tekstil lainnya. Ketergantungan pada pasar dan komoditas tertentu membuat ekspor rentan terhadap fluktuasi permintaan global. Selain itu, persaingan dengan daerah lain dan standar kualitas yang semakin ketat dari pasar internasional menjadi tantangan tersendiri. Infrastruktur dan aksesibilitas logistik untuk mendukung ekspor juga perlu ditingkatkan, termasuk penguatan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan UMKM. Dukungan terhadap inovasi produk dan promosi pasar global perlu dioptimalkan untuk memperluas pangsa pasar serta meningkatkan daya saing produk ekspor Sleman di tingkat internasional.
2. Produk dalam negeri masih mengalami keterbatasan baik dalam penggunaan dan pemasaran, terutama ketika bersaing dengan produk-produk dari luar daerah maupun luar negeri. Produksi daerah masih perlu perkuatan kapasitas, baik dari sisi promosi, penggunaan teknologi, digitalisasi baik dalam pemasaran dan pembayaran serta standarisasi produk.
3. Masih perlunya pengelolaan dan penataan pasar tradisional. Infrastruktur pasar tradisional di beberapa lokasi belum memadai, seperti fasilitas sanitasi, aksesibilitas yang terbatas, dan kondisi bangunan yang membutuhkan renovasi. Selain itu, pengelolaan pasar sering kali menghadapi tantangan dalam hal pengaturan tata letak, kebersihan, dan manajemen operasional yang efisien. Persaingan dengan pusat perbelanjaan modern juga menekan daya saing pasar tradisional, sementara pelatihan dan pemberdayaan pedagang untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta adaptasi terhadap teknologi digital masih sepenuhnya berjalan.
4. Koefisien variasi harga antar waktu kebutuhan pokok di Sleman mencerminkan fluktuasi harga yang signifikan, yang dapat berdampak pada ketidakstabilan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar. Variasi harga yang tinggi sering kali disebabkan oleh gangguan pada rantai pasok, seperti keterbatasan logistik, distribusi yang tidak merata, serta ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Selain itu, faktor musiman, perubahan cuaca, dan permintaan yang tidak terduga turut memengaruhi kestabilan harga. Fluktuasi ini berisiko lebih besar bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, yang mengalokasikan proporsi pendapatan lebih besar untuk kebutuhan pokok. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem distribusi, pengawasan pasar, dan stabilisasi harga melalui kebijakan strategis yang terintegrasi di tingkat daerah.

Pengelolaan pariwisata yang masih perlu untuk dioptimalkan. Kabupaten Sleman mendapatkan dampak dari kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara ke beberapa objek warisan budaya seperti candi-candi yang tersebar di wilayah Sleman berupa semakin berkembangnya industri jasa wisata. Terlepas dari hal itu, masih banyak terdapat destinasi dan komunitas kreatif yang dikelola oleh masyarakat. Berbagai permasalahan atas pengelolaan tersebut antara lain:

1. Masih banyaknya pariwisata berbasis *mass tourism* yang memberikan tekanan pada lingkungan dan masyarakat. Sebagian besar pariwisata di Kabupaten Sleman masih berorientasi pada pariwisata masal, yang meskipun menarik banyak pengunjung dan berkontribusi signifikan secara ekonomi, sering menimbulkan tekanan terhadap lingkungan. Sebaliknya, *quality tourism* menawarkan dampak lingkungan yang lebih rendah serta nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi, meski target pasarnya berbeda. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menjaga lingkungan, diperlukan keseimbangan antara pariwisata masal dan *quality tourism*, sambil mengembangkan pariwisata bertanggung jawab yang berfokus pada pelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat lokal, dan pelestarian budaya.
2. Pengelolaan pariwisata yang belum berbasis ekosistem
   Pengelolaan pariwisata di Sleman cenderung belum berbasis ekosistem. Pengelolaan pariwisata yang berbasis ekosistem mencoba menggabungkan upaya berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan destinasi wisata yang kompetitif, berkelanjutan, dan memberikan pengalaman yang luar biasa bagi wisatawan. Kolaborasi ini melibatkan pemerintah, sektor swasta, komunitas lokal, lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, serta peran penting pemasaran pariwisata dan agen wisata. Kolaborasi ini juga turut dikembangkan dalam upaya-upaya akomodasi teknologi baik dalam pembuatan destinasi wisata maupun pemasaran wisata.
3. Kolaborasi pemasaran pariwisata yang belum berjalan dengan baik
   Kolaborasi pemasaran pariwisata merupakan kunci untuk meningkatkan *feasibility* dan daya tarik suatu destinasi di tengah persaingan global yang semakin ketat. Namun, di banyak wilayah, kolaborasi ini belum optimal, menghambat potensi destinasi wisata untuk berkembang dan bersaing secara efektif di pasar internasional. Hal tersebut antara lain kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, terbatasnya sumber daya, dan kurangnya strategi pemasaran yang terpadu.

Di Kabupaten Sleman, memiliki potensi produk unggulan daerah (PUD). Salah satu PUD yang prospektif dapat dikembangkan, menurut hasil kajian dalam proses penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek di Daerah (RPIJP-PID), adalah ekonomi kreatif, khususnya sektor kuliner, seni pertunjukan; film, animasi, dan video; fesyen; aplikasi; design interior; arsitektur; periklanan; fotografi; dan kriya. Hanya saja, ekonomi kreatif ini cenderung belum terkelola dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan spesifik terkait kinerja industri kreatif di Kabupaten Sleman, sehingga bisa mendapatkan panggung yang layak, terutama dalam memasuki pasar global dan menjadi industri pendukung pariwisata.

D. Daya saing daerah perlu dioptimalkan

Dalam hal investasi, salah satu permasalahan adalah belum meratanya jenis investasi yang masuk baik dari sisi sektoral maupun spasial. Jenis investasi yang masuk terkait perindustrian manufaktur masih sangat terbatas, dimana selama lima tahun terakhir porsi investasi di sektor industri manufaktur rata-rata sekitar 20%. Beberapa permasalahan yang mempengaruhi penanaman modal antara lain adalah:

1. Daya tarik investasi yang belum cukup kuat
   Daya tarik investasi merupakan hal yang sangat penting untuk menarik investor masuk. Kendala daya tarik biasanya terletak pada infrastruktur, regulasi dan perizinan yang belum sepenuhnya mendukung. Potensi

penanaman modal yang berbasis pada kemitraan masih dapat diolah lebih lanjut.

2. Regulasi dan perizinan belum efektif
   Kabupaten Sleman memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dapat menyederhanakan proses perizinan, namun tantangan kompleksitas regulasi dan prosedur perizinan masih perlu terus diatasi untuk mencapai peringkat *Ease of Doing Business* (EoDB) yang lebih baik.

2.3.1.2 Permasalahan Pembangunan Sumber Daya Manusia

Manusia merupakan unsur utama dalam sebuah proses pembangunan untuk mencapai kesejahteraan yang diinginkan. Memiliki sumber daya alam yang banyak tidak akan menjamin kesejahteraan berkelanjutan. Sebaliknya bahkan dengan sumber daya alam yang miskin sebuah wilayah atau negara akan mampu menciptakan kesejahteraan jika memiliki sumber daya manusia yang berkualitas.

Hingga saat ini kualitas pembangunan manusia masih diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan sebuah indeks komposit untuk mengukur kualitas pembangunan manusia melalui 3 dimensi yakni dimensi pengetahuan, dimensi sehat dan umur panjang serta dimensi hidup layak. Dimensi pengetahuan mendiskusikan mengenai kualitas pendidikan penduduk, berapa lama rata-rata penduduk bersekolah dan bagaimana kualitas atau hasil dari bersekolah itu. Dimensi sehat dan umur panjang mendiskusikan berapa rata-rata lama hidup penduduk di suatu wilayah dan bagaimana kondisi fisiknya. Umur Panjang tidak akan berarti ketika dalam keadaan sakit. Dimensi terakhir adalah dimensi hidup layak, artinya penduduk secara ekonomi harus dalam keadaan tercukupi kebutuhan dasarnya baik papan, sandang maupun pangan.

Berdasar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dicapai, hingga tahun 2024, IPM kabupaten Sleman sangat tinggi, lebih tinggi dibandingkan capaian DIY, apalagi Nasional. Capaian IPM yang tinggi memiliki tantangan tersendiri yakni untuk membuat IPM meningkat pesat sudah menjadi sangat sulit, itulah mengapa pertumbuhan IPM yang dicapai Sleman dalam 5 tahun terakhir cenderung lebih lambat dari DIY maupun Nasional. Pada saat pencapaian IPM sudah sangat tinggi, data kesetaraan antara laki-laki dan perempuan menunjukkan terjadinya ketidaksetaraan gender. Pada tahun 2024, IPM laki laki mencapai angka 87,32, namun IPM perempuan baru mencapai angka 84,8. Demikian pula, dengan pembangunan generasi muda yang baru pada tingkat sedang yang ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) baru mencapai 66,67. Angka-angka ini menunjukkan bahwa secara kuantitas kabupaten Sleman telah mencapai kinerja yang sangat baik, namun secara kualitas masih belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh seluruh penduduk. Sebagai bagian dari wilayah DIY dengan karakter unik yang mengedepankan isu kebudayaan sebagai bagian dari nilai yang menjadi dasar kualitas manusia, maka kabupaten Sleman mengintegrasikan isu kebudayaan itu dalam konteks pengembangan sumber daya manusia (SDM). Hasil akhir dari integrasi nilai budaya ke dalam pembangunan manusia dapat dilihat dari berbagai aspek baik pendidikan, kesehatan maupun ekonomi. Indikator makro pengembangan kebudayaan tercermin dari indeks pembangunan kebudayaan, namun demikian hingga naskah ini disusun belum terdapat data indeks Pembangunan kebudayaan. Namun secara keseluruhan Pembangunan kebudayaan di kabupaten Sleman masih membutuhkan pengelolaan secara baik.

Kualitas pembangunan manusia yang dicapai suatu wilayah berhubungan erat dengan komponen pembentuk IPM, yakni pengetahuan masyarakat, hidup sehat dan umur panjang serta hidup layak yang di dalamnya terkandung pembangunan kebudayaan. Pada dimensi pengetahuan capaian kinerja rata-rata lama sekolah maupun harapan lama sekolah Sleman sudah sangat tinggi (mencapai angka berturut-turut 11,33 dan 16,79 tahun), namun pada saat yang sama masih teridentifikasi anak-anak yang tidak menempuh pendidikan pada berbagai golongan umur. Pada tahun 2024, tercatat sekitar 124 anak usia 5 sampai 15 tahun yang tidak menempuh pendidikan. Pada aspek sehat dan umur panjang, penduduk Sleman telah mencapai angka yang sangat baik. Pada tahun 2024, usia harapan hidup Kabupaten Sleman telah mencapai 75,48 tahun, jauh lebih tinggi dari Nasional. Pada dimensi hidup layak teridentifikasi bahwa pendapatan per kapita penduduk Sleman relatif rendah yang diikuti dengan ketimpangan pendapatan yang tinggi (rasio gini mencapai 0,431).

Pembangunan kebudayaan memang belum memiliki data, namun secara umum pembangunan kebudayaan belum sepenuhnya menjadi nilai dasar pembangunan manusia. Hal ini dapat dicermati masih adanya anak tidak sekolah, masih terjadinya konflik dalam masyarakat, masih terdapat angka kematian ibu melahirkan dan bayi adalah beberapa situasi yang menunjukkan pembangunan kebudayaan masih membutuhkan pengelolaan yang lebih baik.

A. Kualitas pengetahuan penduduk belum sepenuhnya merata

Sebagaimana diuraikan di atas, pada dimensi pengetahuan, data menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan kualitas pendidikan di kabupaten Sleman. Adalah rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah sebagai angka untuk mendeteksi kinerja pengetahuan. Berdasarkan data rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sleman selama lima tahun terakhir terus meningkat, hampir mencapai 12 tahun. Namun demikian capaian kinerja ini diikuti dengan data yang menunjukkan bahwa masih terdapat anak tidak sekolah. Data-data ini menyampaikan pesan bahwa tingkat pendidikan masyarakat sudah sangat tinggi, namun demikian kualitas dan pemerataan yang dicapai masih membutuhkan pengelolaan. Terdapat beberapa aspek yang menjadi penyebab kinerja yang kurang memuaskan ini, baik dari aspek pendidikan itu sendiri, kesejahteraan anak, pembangunan literasi maupun peran pemuda.

Kualitas pendidikan belum merata

Berdasarkan data di subbab sebelumnya, terlihat bahwa angka harapan lama sekolah anak di Sleman telah cukup baik, namun demikian kualitas pendidikan yang dilihat dari indeks literasi membaca maupun indeks numerasi masih menunjukkan permasalahan. Indeks literasi yang dicapai Sleman dalam 4 tahun terakhir memang meningkat namun menuju pada stagnasi di tingkat SMP pada tahun 2024. Sementara itu indeks numerasi telah menunjukkan tren peningkatan, namun secara tahunan terlihat fluktuatif dan dalam level sedang.

Kualitas pendidikan ditentukan oleh tenaga kependidikan, sarana dan prasarana serta sistim belajar mengajar yang dijalankan. Dari data dan informasi pada sub bab sebelumnya, dapat dilihat bahwa secara kuantitas jumlah tenaga kependidikan sudah terpenuhi, namun dari segi kualitas jumlah guru ASN yang memenuhi kualifikasi yang bersertifikat pendidik cenderung menurun. Adapun, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan secara umum telah terpenuhi, namun demikian pemerataannya

yang menjadi masalah. Perkembangan penduduk yang menua membuat keberadaan anak menjadi bergeser ke wilayah yang berbeda. Ada beberapa sekolah yang harus mengalami *regrouping* karena berkurangnya anak usia sekolah. *Regrouping* ini menjadi masalah tersendiri bagi anak yang lokasi sekolahnya jauh dari tempat tinggalnya. Pendidikan pada dasarnya adalah transformasi pengetahuan dari lingkungan kepada individu. Transformasi pengetahuan akan baik jika metode yang digunakan tepat. Metode pembelajaran ini memiliki kontribusi penting pada kompetensi untuk literasi membaca dan numerasi yang dicapai anak. Mengamati indeks literasi baca dan numerasi yang dicapai Sleman, maka sistim pembelajaran yang dilakukan tentu masih berhadapan dengan masalah.

Pembangunan literasi masyarakat menurun

Indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM) tahun 2024 mencapai angka 76,97, lebih rendah dari indeks pembangunan literasi DIY yang mencapai 86,39. Bahkan selama dua tahun ini capaian indeks pembangunan literasi Kabupaten Sleman nomor dua terendah di DIY. Beberapa faktor terindikasi menjadi penyebab antara lain pengunjung perpustakaan per hari masih sangat rendah yaitu 0,01% dari jumlah penduduk. Kunjungan yang rendah ini menandakan bahwa metode pelayanan yang dijalankan oleh perpustakaan tidak cukup efektif untuk menarik pengunjung. Masalah selanjutnya yang menjadi sebab dari rendahnya kunjungan adalah koleksi perpustakaan yang masih terbatas. Manusia yang mengelola perpustakaan menjadi kunci keberhasilan pembangunan literasi, dengan demikian tenaga pemustaka dan pengelola perpustakaan menjadi faktor berikutnya yang mempengaruhi kinerja pembangunan literasi masyarakat.

Literasi digital masyarakat masih kurang

Pada era disrupsi teknologi saat ini literasi digital sangat dibutuhkan. Dengan literasi digital, masyarakat dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi, memanfaatkan peluang ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi non-profit, dan sektor swasta perlu bekerja sama untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat termasuk literasi digital guna mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Dari data yang tersedia dapat dilihat bahwa angka indeks literasi digital masyarakat Sleman dari tahun 2021 hingga 2023 justru menunjukkan penurunan dari 4,56 menjadi 3,60. Penurunan literasi digital masyarakat itu berkaitan dengan dua sisi pembangunan literasi digital. Pada sisi pertama pelayanan dan akses digital yang menunjukkan penurunan. Angka ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah di bidang digital belum dapat mengimbangi pertumbuhan kebutuhan masyarakat akan digitalisasi. Pada sisi lain perilaku dan etika masyarakat pengguna teknologi informasi (TI) juga mengalami penurunan. Permasalahan etika saat ini menjadi krusial. TI sesungguhnya adalah pisau bermata dua yang di satu sisi dapat menjadi alat untuk menjadi lebih baik, lebih cepat dan lebih efisien, namun jika pemanfaatan teknologi tidak dilandasi etika, teknologi justru menjadi senjata untuk melakukan kejahatan.

Masih terdapat anak yang belum sejahtera

Ketika seorang anak belum sejahtera (mengalami permasalahan) tanpa intervensi yang tepat, dapat dipastikan anak ini tidak akan pergi ke sekolah. Sampai tahun 2024 Kabupaten Sleman masih mencatat anak yang tidak bersekolah pada berbagai tingkatan pendidikan. Berbagai faktor dapat menjadi penyebab anak tidak sekolah antara lain kurangnya minat/motivasi melanjutkan sekolah, keterbatasan ekonomi dan pengaruh lingkungan pergaulan. Pada dasarnya alasan anak tidak sekolah sangat variatif dan spesifik kasus per kasus, tidak hanya keterbatasan secara ekonomi, namun karena anak tersebut merupakan anak berkebutuhan khusus, tidak ingin sekolah, anak telah bekerja dan menikah, anak berhadapan dengan bantuan hukum, anak mengalami kekerasan, terkena dampak bencana, serta anak berada pada kondisi sosial dan pergaulan yang kurang mendukung. Narasi ini didukung oleh kinerja perlindungan anak yang hingga saat ini masih terdapat anak yang mengalami berbagai permasalahan.

Spesifik kesejahteraan anak, di Sleman tahun 2021 tercatat 66 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan, angka ini meningkat lebih dua kali lipat di tahun 2024 mencapai angka 134 kasus. Anak-anak yang mengalami permasalahan semacam ini tentunya sangat berpengaruh terhadap aktivitas sekolahnya. Anak tidak sejahtera/ mengalami kekerasan secara umum bersumber dari dua hal. Pertama adalah kemampuan keluarga dalam mengasuh anak (pola asuh yang salah). Kesalahan pola asuh bisa bersumber dari berbagai sebab, kemiskinan adalah salah satunya. Keluarga miskin terlalu sibuk dengan memenuhi kebutuhan fisik sehingga dapat melupakan aspek non fisik, dalam hal ini pendidikan anak. Hal lainnya adalah keluarga yang dibangun dalam situasi yang tidak ideal ataupun keluarga dengan pengetahuan dan pendidikan yang rendah. Pada sisi lain intervensi pemerintah terhadap masalah kesejahteraan anak juga perlu untuk dievaluasi seberapa tepat intervensi yang dilakukan untuk dapat mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan mengatasi anak yang terlanjur mengalami kekerasan.

Pembangunan pendidikan pemuda cukup tinggi

Pemuda merupakan generasi emas yang akan menjadi penerima estafet pembangunan. Untuk itu maka kualitas pemuda juga menjadi fokus penting untuk diperhatikan. Pada aspek pembangunan pemuda dimensi pendidikan Kabupaten Sleman pada tahun 2024 telah mencapai angka 83,33. Capaian yang tinggi itu berkaitan dengan pendidikan penduduk yang memang rata-rata sudah cukup tinggi. Sleman sebagai rumah berbagai universitas besar memiliki penduduk berpendidikan tinggi yang cukup banyak dan akan terus meningkat. Hal ini bukan menjadi masalah, namun justru menjadi peluang bagi kabupaten Sleman untuk memanfaatkan potensi ini.

B. Kualitas kesehatan keluarga belum baik

Kualitas kesehatan menjadi salah satu indikator penting dalam memberikan gambaran kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah tertentu. Semakin sehat kondisi masyarakat maka akan semakin baik dalam mendukung proses pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu, untuk menciptakan kemampuan dan daya saing guna memperoleh kualitas hidup yang bernilai, perlu pula dibangun kualitas kesehatan yang baik. Derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah dilihat dari aspek umur panjang dan hidup sehat dilihat melalui indikator Usia Harapan Hidup (UHH). Semakin

tinggi usia harapan hidup saat lahir di suatu wilayah, maka semakin tinggi pula tingkat kesehatan di wilayah tersebut.

Namun UHH tinggi belum tentu diikuti dengan Indeks Keluarga Sehat (IKS) yang merata. Pada tahun 2024, tercatat IKS Kabupaten Sleman baru berada pada angka 0,362. Beberapa variabel pada IKS di Kabupaten Sleman, seperti indikator penyakit yang bersumber dari gaya hidup, cenderung berada pada angka rendah. Angka ini menunjukkan bahwa keluarga di Sleman dalam kondisi tidak sehat, sebuah capaian yang cukup bertentangan. Menyandingkan kedua angka ini muncul hipotesis bahwa umur penduduk memang panjang, namun belum tentu berkualitas.

Mortalitas penduduk usia muda cenderung meningkat

Angka mortalitas adalah ukuran yang mencerminkan jumlah kematian dalam suatu populasi dalam periode waktu tertentu akibat berbagai kondisi, seperti penyakit atau sebab lainnya. Angka kematian ini menjadi indikator penting bagi kesehatan masyarakat dalam suatu periode tertentu. Tingkat kematian di suatu daerah dapat mencerminkan ketersediaan layanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan juga keberhasilan pembangunan kesehatan dalam kurun waktu tertentu. Tingkat kematian yang tinggi atau rendah secara umum dipengaruhi oleh tingkat kesakitan diantara kelompok bayi, balita, dan ibu hamil, melahirkan, atau nifas. Dengan demikian, masih adanya tingkat kematian pada bayi dan ibu dapat menunjukkan adanya permasalahan kesehatan masyarakat di suatu daerah.

Angka kematian bayi, balita dan ibu ini memiliki kecenderungan meningkat selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, angka kematian bayi (AKB) meningkat menjadi 6,44 per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian balita sebanyak 6,86 per 1000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu juga meningkat menjadi 67,69 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024. Kematian bayi dan ibu ini lebih disebabkan adanya peningkatan ibu hamil dengan riwayat pre-eklamsia dan Hipertensi serta kehamilan tidak diinginkan (KTD). Permasalahan kesehatan ibu dan bayi yang terlambat tertangani menimbulkan kematian sehingga menyebabkan derajat kesehatan di Kabupaten Sleman belum baik.

Permasalahan ini sedikit banyak diakibatkan karena faktor-faktor ketersediaan pelayanan kesehatan, baik dari sisi tenaga medis dan paramedis hingga sarana dan prasarana yang kualitas dan keterjangkauannya belum sepenuhnya merata. Diperlukan sebuah metode pelayanan kesehatan yang lebih mudah menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, pola hidup bersih dan sehat belum sepenuhnya terlembagakan di masyarakat. Salah satu aspek yang diangkat adalah belum meratanya pembangunan olah raga pada masyarakat.

Angka morbiditas cenderung meningkat dan cenderung bergeser ke penyakit tidak menular

Morbiditas adalah ukuran jumlah kasus sakit di suatu daerah pada periode waktu tertentu, baik itu jumlah kasus baru (insiden) maupun jumlah kasus secara keseluruhan (prevalensi) dari suatu penyakit. Semakin tinggi angka penyakit di wilayah tertentu, semakin rendah tingkat kesehatan masyarakat di sana.

Kondisi morbiditas penduduk di Kabupaten Sleman selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan, dicerminkan dari Angka Kematian Ibu yang terus merangkak naik menembus angka 65 dari tren pra-*Covid* yang berada di bawah angka 60. Hal tersebut juga ditunjukkan dari tingginya jumlah kasus penyakit menular dan tidak menular. Penyakit tidak menular tertinggi tahun 2024, yakni penyakit hipertensi esensial sebanyak 156.536 kasus dan penyakit diabetes melitus sebanyak 79.168 kasus. Dari sisi penyakit menular tertinggi yakni penyakit diare, penyakit pneumonia, penyakit tifus dan penyakit tuberkulosis.

Penyebab masih adanya morbiditas penduduk di Kabupaten Sleman antara lain kondisi lingkungan dan sanitasi yang masih kurang sehat dikarenakan lingkungan yang padat penduduknya serta akses air bersih dan sanitasi yang masih kurang. Perilaku hidup sehat masyarakat yang belum sepenuhnya terlaksana dan adanya pergerakan penduduk yang tinggi (mobilitas tinggi). Pergeseran jenis penyakit dari penyakit menular ke penyakit tidak menular (degeneratif) menunjukkan pola hidup dan pola konsumsi masyarakat yang cenderung memburuk. Kondisi seperti ini mengakibatkan derajat kesehatan di Kabupaten Sleman menjadi belum baik. Pola hidup dan pembangunan olahraga juga menjadi penyebab dari permasalahan ini.

Masih adanya permasalahan gizi masyarakat

Kualitas individu sangat dipengaruhi oleh asupan gizi yang diterima. Asupan gizi yang seimbang memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak serta berpotensi mempengaruhi tingkat kesehatan seluruh masyarakat. Jika asupan gizi rendah, ini dapat menimbulkan berbagai masalah terkait, termasuk kesehatan yang buruk, kualitas sumber daya manusia yang menurun, dan bahkan daya saing yang terpengaruh. Kondisi kurangnya gizi atau gizi yang buruk biasanya diidentifikasi melalui indeks berat badan menurut usia (BB/U). Perbaikan gizi sangat diperlukan untuk mencapai standar kesehatan yang diinginkan, terutama pada kelompok balita.

Pada tahun 2024, walaupun telah mengalami penurunan terkait kasus gizi kurang atau gizi buruk, namun masih ada prevalensi ketidakcukupan gizi pada anak sebesar 0,88%. Di samping itu, masih ada juga kasus *stunting* sebesar 17,3% menurut SKI, meskipun menurut EPPBGM tinggal 4,41%. Kondisi ini mencerminkan bahwa masih terdapat permasalahan gizi masyarakat di Kabupaten Sleman yang mengakibatkan derajat kesehatan masyarakat belum baik.

Berbagai faktor menjadi penyebab munculnya masalah gizi kurang atau gizi buruk ini antara lain penyakit yang diderita balita, kemiskinan, akses air bersih dan sanitasi lingkungan yang buruk, pendidikan dan pengetahuan tentang gizi yang kurang, pola asuh balita yang buruk, masalah sosial, penelantaran anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak, meningkatnya perkawinan dini, pergaulan bebas, serta meningkatnya kehamilan tidak diinginkan. Faktor determinan tertinggi penyebab *stunting* adalah pengetahuan tentang gizi dan kepedulian terhadap kesehatan belum baik.

Status perempuan dalam keluarga masih timpang

Status Perempuan dalam keluarga sangat berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat. Perempuan yang berdaya memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengurus anggota keluarganya secara lebih baik.

Implikasi dari itu adalah pola asuh dan pola konsumsi keluarga yang baik dan pada akhirnya kesehatan ibu dan anak dan seluruh masyarakat akan baik.

Pada tahun 2024, kasus kekerasan terhadap perempuan tercatat 244 kasus dan angka ini dari tahun ke tahun terus meningkat. Kekerasan terhadap perempuan ini terjadi karena berbagai faktor. Budaya patriarki dapat menjadi salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Selanjutnya adalah faktor ekonomi. Kurangnya sumber daya ekonomi dapat membuat perempuan rentan terhadap kekerasan. Kemiskinan dapat memicu destabilisasi emosi pada pasangan suami-istri, sehingga memudahkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Rendahnya kesadaran hukum, pernikahan dini dan dugaan adanya perselingkuhan adalah beberapa faktor lain yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap Perempuan.

Ketidakberdayaan perempuan dalam keluarga ini tidak terjadi tiba-tiba namun berjalan dalam waktu yang panjang. Dalam kasus di Sleman tampak bahwa pembangunan kesetaraan gender dalam keluarga ini masih membutuhkan perhatian yang serius. IPP komponen gender dan diskriminasi baru menunjukkan angka 70, yang artinya baru tingkat sedang. Teridentifikasi dari angka ini bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sudah terjadi pada penduduk usia muda.

Perempuan yang tidak berdaya dalam keluarga akan berdampak buruk bagi kualitas kesehatan masyarakat secara langsung. Perempuan yang tidak berdaya rentan terhadap kematian ibu maupun bayi. Perempuan yang tidak berdaya dalam keluarga juga memiliki peluang yang kecil untuk dapat mengelola kesehatan keluarganya. Itulah mengapa keberdayaan perempuan dalam keluarga penting menjadi arus utama Pembangunan kesehatan.

Kesehatan penduduk usia muda sedang

Penduduk usia muda adalah penduduk usia produktif yang sangat penting. Berdasar data yang tersedia, saat ini kondisi kesehatan penduduk usia muda yang dapat dideteksi dari IPP komponen kesehatan dan kesejahteraan yang baru mencapai angka 60 atau dalam kategori sedang. Pada komponen tersebut terdapat indikator angka kesakitan pemuda, persentase pemuda korban kejahatan, persentase pemuda yang merokok serta persentase remaja perempuan yang sedang hamil. Apabila diperbandingkan dengan nilai DIY, angka kesakitan pemuda di Kabupaten Sleman masih di atas DIY. Angka kesakitan ini merupakan ukuran derajat kesehatan penduduk usia muda, yang mengindikasikan prevalensi penyakit atau masalah kesehatan di kalangan pemuda.

Dilihat dari capaian lainnya, Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) penduduk Sleman baru mencapai angka 0,386, dengan dimensi kebugaran baru mencapai 0,157. Hal ini menunjukkan bahwa olahraga belum menjadi arus utama penduduk dalam meningkatkan kesehatannya. Pada sisi lain kesehatan pemuda juga ditentukan oleh pola perilaku konsumsi. Arus deras industri makanan cepat saji dengan berbagai janjinya membuat generasi muda memilih jalan mudah untuk mengonsumsi makanan cepat saji atau makanan yang sedang menjadi tren tanpa memikirkan akibatnya bagi kesehatan. Aspek lain adalah kecenderungan merokok yang cenderung terus meningkat pada penduduk usia muda.

Angka fertilitas baik, namun keberlanjutannya menunjukkan adanya ancaman

Angka fertilitas penduduk menjadi salah satu faktor penting untuk dikelola. Fertilitas yang terlalu tinggi akan membuat penduduk bertumbuh terlalu cepat yang implikasinya adalah penyediaan layanan juga harus berjalan dengan sangat cepat. Sebaliknya pertumbuhan penduduk yang terlalau lambat juga akan menimbulkan masalah beban ketergantungan yang tinggi di masa depan.

Total fertility rate (TFR) Kabupaten Sleman mulai tahun 2022-2023 stagnan di angka 1,87 dan turun menjadi 1,77 pada tahun 2024. Hal ini menandakan Kabupaten Sleman telah memasuki fase *demografic winter* dimana kelahiran/fertilitas mengalami penurunan. Namun demikian, capaian angka fertilitas ini terancam rasio akseptor KB yang mencapai angka 62,79%, meskipun layanan keluarga berencana masih terbatas. Adapun cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi mencapai 12%. Penggunaan kontrasepsi jangka panjang baru mencapai angka 35,74%. Angka-angka ini menjadi indikasi terancamnya kinerja tingkat kelahiran yang stabil di masa depan.

C. Kesejahteraan penduduk belum merata

Dimensi hidup layak dalam pembentukan IPM berkaitan dengan kesejahteraan penduduk. Kesejahteraan penduduk adalah tingkat kehidupan yang berkualitas, dimana baik individu maupun rumah tangga memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi dan sosial yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang layak. Salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat adalah adanya tingkat kemiskinan di suatu wilayah.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Sleman terus menunjukkan penurunan menjadi 7,46% pada tahun 2024, sebuah penurunan yang relatif lambat. Jumlah penduduk miskin sebanyak 97,94 ribu penduduk miskin, naik 440 orang dari tahun sebelumnya. Adanya penduduk miskin mencerminkan masih adanya penduduk yang belum mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka atau masuk dalam kategori tidak sejahtera. Melihat jumlah penduduk miskin yang semakin bertambah menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin memburuk, walaupun pada sisi lain pendapatan per kapita kabupaten Sleman semakin menunjukkan perbaikan.

Kesejahteraan yang memburuk itu secara tidak langsung berhubungan dengan angka kesenjangan pendapatan yang sangat tinggi di kabupaten Sleman. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sleman cenderung meningkat terus lima tahun terakhir ini, walaupun sempat turun pada tahun 2022 namun kembali meningkat pada tahun 2024 mencapai angka 0,431, berada di atas rasio gini Nasional. Ketimpangan pendapatan yang tinggi berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat dengan pendapatan rendah sering kali memiliki akses terbatas pada pendidikan yang berkualitas, modal dan sumber daya ekonomi lainnya, layanan kesehatan yang berkualitas serta perlindungan hukum dan akses keadilan yang memadai. Kurangnya akses pendidikan yang lebih baik ataupun sumber daya lainnya untuk pengembangan usaha mempersempit kesempatan masyarakat berpendapatan rendah untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Begitu pula kurangnya akses pada layanan kesehatan yang

berkualitas mengakibatkan kesehatan menjadi buruk dan berdampak langsung pada produktivitas dan kualitas hidup, yang pada akhirnya memperparah kondisi kemiskinan. Kondisi kesejahteraan yang belum merata disebabkan oleh berbagai faktor.

Masih terdapat kelompok rentan yang belum tertangani

Masyarakat kelompok rentan adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam menikmati kehidupan yang layak. Faktor aksesibilitas terhadap sumber-sumber pemenuhan kesejahteraan sosial merupakan salah satu faktor penghambat kelompok rentan dalam meningkatkan kehidupan yang layak. Kelompok masyarakat rentan adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dikelompokkan dalam 25 jenis berdasarkan klasifikasi hambatan yang dialami. Data menunjukkan bahwa secara keseluruhan PPKS yang tercatat dari tahun ke tahun menunjukkan jumlah yang relatif tetap. PPKS tertinggi di Kabupaten Sleman adalah fakir miskin, penyandang disabilitas, lansia terlantar dan anak terlantar. Ada empat hal yang dihadapi dalam permasalahan PPKS ini, kemiskinan, keterlantaran, disabilitas dan ketunaan sosial. Permasalahan-permasalahan tersebut saling bersinggungan satu dengan yang lainnya

Kemiskinan sebagaimana dijelaskan di atas sampai saat ini menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Sleman. Banyak keluarga di Kabupaten Sleman masih hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini berdampak pada akses terbatas mereka terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Faktor utama penyebab kemiskinan meliputi rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya kesempatan kerja, dan pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Keterlantaran menjadi persoalan dalam kelompok rentan ini. Anak-anak terlantar dan lansia yang tidak mendapatkan perawatan yang layak merupakan masalah serius di Sleman. Anak-anak terlantar sering kali tidak memiliki akses ke pendidikan dan kesehatan, sementara lansia terlantar hidup dalam kondisi yang tidak layak. Keterlantaran anak dan lansia sering disebabkan oleh faktor ekonomi, disintegrasi keluarga, dan kurangnya dukungan sosial. Persoalan lain terkait kelompok rentan adalah penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas menghadapi berbagai hambatan, termasuk akses yang terbatas ke fasilitas umum, pendidikan, dan peluang kerja. Diskriminasi dan stigma sosial juga memperburuk kondisi mereka. Faktor penyebab kurangnya kesejahteraan bagi penyandang disabilitas adalah kurangnya fasilitas yang ramah disabilitas, kurangnya kesadaran masyarakat, dan minimnya program pemberdayaan untuk penyandang disabilitas.

Ketunaan sosial, termasuk tunawisma, pecandu narkoba, dan korban kekerasan, adalah masalah yang memerlukan perhatian khusus. Orang-orang ini sering kali tidak memiliki akses ke tempat tinggal yang layak, rehabilitasi, dan dukungan sosial. Masalah ketunaan sosial sering disebabkan oleh kemiskinan, kurangnya akses ke layanan kesehatan mental, dan sistem dukungan yang tidak memadai.

Terdapat dua sisi penyebab dari semakin meningkatnya PPKS di sebuah wilayah. Pada satu sisi, kemampuan pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap PPKS terbatas. Alasan klasik kurangnya anggaran sering menjadi variabel penyebab. Oleh karena itu, diperlukan metode intervensi

yang tepat, dimana intervensi itu tidak selalu bermakna anggaran. Sebagai contoh intervensi terhadap anak terlantar, disediakan rumah singgah untuk mereka, namun demikian kebutuhan anak terlantar sesungguhnya bukan hanya rumah, tetapi kehangatan keluarga. Dengan demikian yang dibutuhkan bukan hanya bangunan dengan petugasnya, melainkan petugas yang berkualitas. Di sisi lain, intervensi yang salah juga menciptakan *moral hazard* dalam masyarakat. Banyak kajian yang menghasilkan kesimpulan bahwa intervensi dalam bentuk bantuan uang secara langsung kepada penduduk usia produktif dan sehat hanya akan menciptakan mental yang salah. Itulah mengapa ketika dilakukan pendataan, apalagi melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), maka penduduk tidak miskin pun dengan sukarela mendaftar sebagai orang miskin.

Masih terdapat kesenjangan antar gender

Kesenjangan dalam kualitas hidup antar gender masih menjadi isu signifikan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ketidaksetaraan ini tidak hanya mempengaruhi wanita, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Ketika setengah dari populasi tidak dapat sepenuhnya berpartisipasi dalam ekonomi dan kehidupan sosial, potensi pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat akan terganggu.

Pembangunan yang responsif terhadap gender adalah upaya pembangunan yang bertujuan menciptakan kesetaraan dan keadilan bagi semua anggota masyarakat. Indeks Pembangunan Gender (IDG) berfokus pada mengukur ketimpangan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Semakin tinggi nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG), semakin kecil kesenjangan pembangunan antara kedua jenis kelamin. Sementara itu, IDG digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perempuan terlibat dan berperan dalam bidang ekonomi dan politik.

Pada tahun 2024, IPG Kabupaten Sleman sebesar 97,11. Meskipun angka ini lebih tinggi dari DIY dan Nasional, namun angka ini menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan perempuan masih di bawah laki-laki. Secara konseptual, capaian ini merefleksikan masih adanya disparitas pembangunan manusia antar gender di Kabupaten Sleman.

Kualitas hidup perempuan yang relatif lebih rendah dibanding laki-laki pada dasarnya mengindikasikan lebih terbatasnya akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, lebih lemahnya kontrol perempuan terhadap sumber daya pembangunan, dan lebih minimnya manfaat yang diperoleh perempuan dari pembangunan. Kesempatan dan perlakuan setara dalam bagi perempuan sangat penting untuk dapat berkontribusi dalam pembangunan. Kemiskinan, isolasi geografis, status minoritas, kecacatan, pernikahan dini dan kehamilan, kekerasan berbasis gender, dan kepercayaan tradisional tentang status dan peran perempuan merupakan beberapa hambatan yang menghalangi hak perempuan dan anak perempuan untuk menjalankan hak mereka untuk berpartisipasi dan mendapatkan haknya dalam segala bidang.

Salah satu hal yang memengaruhi kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan adalah pemberdayaan perempuan yang belum optimal. IDG lebih fokus untuk melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di sektor publik, pengambilan keputusan, dan ekonomi. Pada tahun 2024, naik menjadi 81,49. Komponen yang mendukung ketercapaian IDG adalah keterlibatan perempuan di parlemen (26%),

perempuan sebagai tenaga professional 51,74% serta sumbangan pendapatan perempuan sebesar 39,62%. Secara lebih makro partisipasi kerja perempuan yang menunjukkan keterlibatan perempuan di sektor publik menunjukkan angka yang rendah dan terus menurun. Intervensi kebijakan terhadap permasalahan perempuan yang seharusnya menjadi perhatian. Data capaian kinerja menunjukkan bahwa intervensi terhadap masalah perempuan lebih bersifat kuratif dibandingkan preventif.

Tidak semua penduduk terlibat dalam aktivitas ekonomi

Tingkat partisipasi kerja (TPAK) merupakan sebuah angka yang menunjukkan banyaknya penduduk usai produktif yang aktif secara ekonomi. Makin tinggi TPAK maka makin banyak penduduk terlibat dalam aktivitas ekonomi. Pada tahun 2024, TPAK Kabupaten Sleman berada pada angka 71,85. Angka ini menunjukkan terdapat kecenderungan penurunan penduduk untuk terlibat di bidang ekonomi. Terdapat beberapa kemungkinan ketidakterlibatan penduduk usia kerja di bidang ekonomi, pertama adalah karena masih bersekolah dan yang ke dua menjadi ibu rumah tangga. Jika data ini dikonfirmasi dengan TPAK perempuan maka tampaknya penduduk yang tidak berpartisipasi dalam bidang ekonomi ini adalah para perempuan yang memasuki area rumah tangga (menjadi ibu rumah tangga). TPAK yang semakin menurun dipengaruhi oleh angka pengangguran terbuka yang memiliki kecenderungan lebih tinggi dari DIY. Pada tahun 2024, TPT Sleman mencapai angka 4,13. Penduduk yang tidak terlibat aktif di bidang ekonomi dan pengangguran terbuka tentu tidak memiliki pendapatan, sehingga menimbulkan ketergantungan pada penduduk yang bekerja. Dampak selanjutnya adalah pendapatan rata-rata yang tercatat menjadi rendah, dengan pendapatan yang rendah membuat daya beli menjadi rendah.

Penduduk tidak bekerja setidaknya disebabkan oleh 2 aspek. Pada sisi tenaga kerja, tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dunia kerja. Aspek ini secara ideal diintervensi oleh pemerintah agar tenaga kerja memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja atau menciptakan lapangan kerja sendiri. Pada sisi lain penduduk yang telah bekerja bisa meninggalkan pekerjaan akibat dari konflik ketenagakerjaan yang terjadi. Konflik ketenagakerjaan dari tahun ke tahun tercatat terjadi secara konstan sekitar 30 kasus. Kasus-kasus ini menjadi sumber orang kehilangan pekerjaan ketika negara kurang mampu menyelesaikan konflik. Data menunjukkan tingkat penyelesaian konflik tenaga kerja dari tahun ke tahun justru mengalami penurunan, pada tahun 2024 hanya dapat terselesaikan sebesar 44,73%.

Kesejahteraan generasi muda sedang

Kesejahteraan masyarakat secara umum juga mendapatkan kontribusi dari penduduk usia muda. Dalam komponen IPP terdapat beberapa komponen yang berkaitan dengan isu kesejahteraan penduduk usia muda ini. Berdasar IPP komponen lapangan dan kesempatan kerja, angkanya baru mencapai angka 70,00. Sebuah angka yang cukup tinggi, namun masih harus ditingkatkan. Capaian yang belum memuaskan itu bersumber dari beberapa faktor. Tingkat Pengangguran terbuka generasi muda ternyata lebih tinggi dibandingkan TPT secara umum. Jika TPT secara umum berkisar pada angka 4% maka angka pengangguran terbuka pada penduduk usia muda ini dapat mencapai angka 7%. Angka ini mengirimkan pesan yang cukup penting

untuk mengatakan kemungkinan terjadinya pengangguran terbuka pada level penduduk yang berpendidikan. Terdapat berbagai kemungkinan penduduk berpendidikan tidak bekerja, kemungkinan pertama adalah rendahnya jiwa kewirausahaan. Dari data yang sama tercatat bahwa kewirausahaan kerah putih pada pemuda di Sleman sangat rendah. Angka ini menjadi pesan bahwa sangat mungkin penduduk berpendidikan ini justru berharap menjadi pegawai, sementara pada sisi lain kesempatan kerja formal (menjadi pegawai) terbatas. Ketika penduduk usia muda tidak bekerja tentu menurunkan daya beli secara keseluruhan. Kesejahteraan penduduk usia muda juga dipengaruhi bidang kerja yang dimasuki. Dalam indeks yang sama tercatat bahwa masih terdeteksi banyaknya penduduk remaja perempuan yang bekerja di sektor informal. Angka ini menjadi penting untuk diperhatikan karena secara umum pekerjaan informal memiliki tingkat kerentanan yang tinggi, baik secara ekonomi maupun sosial. Secara ekonomi pekerja di sektor informal memiliki pendapatan yang relatif lebih rendah dan tidak stabil. Inilah juga yang menjadi sumber kesejahteraan penduduk usia muda yang belum baik.

Kinerja transmigrasi yang belum terpadu

Program pembangunan kawasan transmigrasi pada tahun 2024 menunjukkan indikator keberhasilan yang signifikan, ditandai dengan realisasi yang didukung oleh alokasi anggaran yang memadai, antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap program tersebut, serta sinergi yang efektif dengan pemerintah daerah penerima. Namun, implementasi program ini tidak terlepas dari sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian. Salah satu kendala utama adalah adanya daftar tunggu calon transmigran akibat keterbatasan kuota penempatan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yang menyebabkan disparitas antara permintaan dan ketersediaan lahan. Selain itu, penundaan jadwal keberangkatan karena ketidaksiapan lokasi penempatan mengakibatkan beberapa calon transmigran mengundurkan diri, yang berpotensi mengurangi efektivitas program. Permasalahan lain terletak pada mekanisme penentuan kuota penempatan yang diumumkan pada awal tahun berjalan, sehingga proses penganggaran kurang terencana dengan baik, yang dapat mempengaruhi kelancaran operasional program. Selanjutnya, animo masyarakat untuk bertransmigrasi terdistribusi secara tidak merata, dengan minat yang sangat tinggi pada lokasi tertentu seperti Sumatra, yang mengindikasikan perlunya strategi sosialisasi yang lebih terarah dan merata. Terakhir, kurangnya komitmen dari sebagian daerah penempatan terhadap pelaksanaan Kerja sama Antar Daerah (KSAD) menjadi tantangan yang memerlukan penguatan koordinasi dan pengawasan.

2.3.1.3 Permasalahan Internalisasi Nilai Budaya Dalam Pengembangan Manusia Belum Optimal

Hasil akhir dari internalisasi nilai budaya dalam masyarakat tercermin dari ketertiban dan keamanan. Dari data yang tersaji pada sub bab sebelumnya, teridentifikasi bahwa tingkat ketertiban dan keamanan di kabupaten Sleman belum kondusif. Internalisasi nilai budaya yang masih belum baik di merupakan hasil interaksi berbagai aspek dalam kehidupan, mulai dari aspek kebudayaan itu sendiri sampai pada hasil dari pengembangan kebudayaan itu, baik bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan sampai gender.

Pada aspek kebudayaan dapat dilihat dari subbab sebelumnya bahwa pelestarian budaya baru mencapai angka 52,21% pada 2024. Pelestarian budaya yang masih rendah berdampak pada internalisasi nilai yang relatif rendah. Internalisasi itu dapat diamati dari berbagai aspek ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, budaya literasi dan gender. Berdasar data dan hasil diskusi yang dilakukan dapat diketahui bahwa cukup banyak penduduk Sleman yang bekerja di bidang kebudayaan, namun masih menjadi sumber pendapatan tambahan, bukan sumber pendapatan utama.

Pendidikan adalah salah satu cara utama untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal. Muatan lokal dalam kurikulum adalah kesempatan bagi siswa untuk belajar tentang warisan budaya mereka, memahami nilai-nilai tradisional, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan data di Bab II, terlihat bahwa pelestarian warisan budaya masih rendah. Salah satu komponen pendukungnya adalah persentase kinerja pelestarian objek pemajuan kebudayaan yang mencakup warisan budaya tak benda berupa nilai-nilai budaya lokal baru sebesar 7,37%. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pelestarian budaya lokal, termasuk dalam konteks pendidikan, masih sangat terbatas. Artinya integrasi nilai budaya Sleman dalam kurikulum muatan lokal masih rendah. Saat ini muatan lokal yang wajib dalam kurikulum sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 64 Tahun 2013 adalah bahasa Jawa. Namun pada implementasinya di sekolah belum semua nilai-nilai budaya lokal Sleman dapat tersampaikan dalam kurikulum muatan lokal tersebut. Banyak siswa belum paham terhadap budaya mereka sendiri atau nilai-nilai budaya Sleman.

2.3.1.4 Permasalahan Pemerataan Kualitas Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur dan sarana prasarana merupakan salah satu instrumen penting dalam penyediaan pelayanan wilayah permukiman dan non permukiman bagi masyarakat. Masih adanya permasalahan kinerja transportasi, kebutuhan penyediaan infrastruktur baik dasar maupun pendukung serta bagi wilayah non permukiman, terkait dengan infrastruktur pengelolaan sumber daya air.

Pelayanan infrastruktur di Kabupaten Sleman pada lokasi-lokasi yang strategis pada kawasan perkotaan memang terlihat sudah baik dan cukup memadai. Namun kualitas pelayanan ini cenderung belum merata dan belum memiliki keandalan yang diperlukan. Infrastruktur ini terbagi menjadi infrastruktur transportasi, air minum, air limbah, persampahan, drainase dan sumber daya air. Selain infrastruktur utama tersebut, diperlukan juga pemerataan infrastruktur pelayanan pendukung. Beberapa penjabaran permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Jalan dan jembatan dengan kondisi baik cenderung menurun

Pada tahun 2024 panjang jalan Kabupaten Sleman adalah sepanjang 699,50 km dengan kondisi secara spesifik yaitu kondisi jalan yang baik sepanjang 199,90 km, kondisi jalan sedang sepanjang 337,75 km, dan kondisi jalan kabupaten yang rusak sepanjang 161,85 km. Sedangkan jumlah jembatan di Kabupaten Sleman 368 buah, 25,7% berada dalam kondisi rusak berat / kritis. Kondisi ini dapat disebabkan oleh dampak dari pengawasan kendaraan yang belum optimal. Banyaknya kendaraan angkutan yang *Over Dimension dan Over Load* (ODOL) menjadi faktor kerusakan jalan. Selain itu, banyaknya angkutan pertambangan yang masih belum baik dalam melaksanakan pengangkutan hasil tambang berdampak pada menurunnya kualitas jalan. Hal ini akan berdampak pada efisiensi pemanfaatan jalan yang

semakin rendah dan jika terjadi pada kawasan rawan bencana, akan mengurangi fungsi evakuasi dari jalan-jalan tersebut.

Permasalahan transportasi banyak berkisar pada kualitas jaringan jalan dan perlengkapan jalan yang imbasnya mulai dari tingkat pelayanan jalan (*level of service*) hingga tingkat keselamatan lalu lintas. Selain kualitas jaringan jalan, kualitas pengelolaan lalu lintas yang belum maksimal masih memberikan keterbatasan bagi tingkat pelayanan jalan. Masih minimnya tingkat keterisian angkutan umum, rasio izin trayek, dan kebutuhan akan rambu-rambu masih bisa ditingkatkan untuk lebih jauh meningkatkan tingkat pelayanan jalan dan tingkat keselamatan lalu lintas.

Tingginya kepadatan lalu lintas yang hampir melampaui kapasitasnya pada beberapa ruas tertentu, pada waktu tertentu (jam puncak, *peak season*) seperti pada ruas Jalan Affandi (Gejayan-Demangan), Jalan Kaliurang (Kentungan-Blimbingsari dan Yogyakarta-Kaliurang), Jalan Seturan (Sapen-Seturan), Jalan Monjali (Nandan-Blunyah) merupakan ruas jalan dengan kepadatan lalu lintas dan V/C rasio cukup tinggi antara 0,80-0,90, bahkan V/C rasio Jalan Affandi pernah tercatat sebesar 1,2 (segmen Jembatan Gejayan-simpang *ringroad)*. Permasalahan ini hendaknya perlu diperbaiki, antara lain dengan melengkapi rambu lalu lintas serta mengupayakan sistem pergerakan yang lebih kondusif.

Dalam ilmu perencanaan transportasi, diketahui bahwa terdapat tiga elemen yang harus bersinergi yakni sistem jaringan, sistem kegiatan dan sistem pergerakan. Dari sisi sistem jaringan (ketersediaan jalan), Kabupaten Sleman sudah cukup memadai meski kualitas belum merata. Dari sisi sistem pergerakan, Kabupaten Sleman cenderung memiliki opsi moda pergerakan yang terbatas sehingga perlu ada upaya untuk meningkatkan pilihan transportasi umum. Sistem yang terakhir ini memerlukan kerja sama dengan urusan penataan ruang, dimana sistem kegiatan akan berbicara ruang-ruang yang menjadi bangkitan dan tarikan bagi kegiatan transportasi sehingga sistem transportasi perlu diberi peran yang memadai pada penyelenggaraan penataan ruang.

Kemudahan dalam mendapatkan akses kepemilikan kendaraan pribadi bermotor menyebabkan pergeseran paradigma perjalanan masyarakat yang ada di Kabupaten Sleman. Ketidakterjangkauan trayek dari angkutan umum ini mengakibatkan perpindahan moda transportasi umum.

B. Pelayanan infrastruktur dasar yang belum memadai

Permasalahan infrastruktur dasar banyak berbicara mengenai drainase, air minum, air limbah, sumber daya air dan irigasi. menjadi permasalahan keandalan infrastruktur sumber daya air.

Permasalahan pengelolaan drainase di Kabupaten Sleman dipengaruhi oleh dua masalah utama yakni masalah keterpaduan sistem jaringan drainase dan penyesuaian terhadap kondisi perubahan iklim. Sebagai contoh, ketika cuaca ekstrem terjadi, masih banyak jaringan jalan yang tergenang limpasan, bahkan terjadi aliran yang deras di jalan. Hal ini menunjukkan jaringan drainase tidak berfungsi optimal. Dari sisi keterpaduan, pengelolaan jaringan drainase masih memerlukan komunikasi antar kewenangan drainase sehingga sistem drainase bisa terpadu antar kewenangan. Tidak hanya masalah sistem, keterpaduan juga perlu ditekankan pada proses pemeliharaan jaringan drainase. Masih dijumpai drainase yang tersumbat,

terutama pada peralihan jaringan drainase terbuka menuju drainase tertutup. Pengelolaan jaringan drainase perlu ditingkatkan keterpaduannya. Drainase yang berada dalam kondisi baik di Kabupaten Sleman baru berada di kisaran 71,68%.

Persebaran air minum perpipaan di Kabupaten Sleman baru mencapai 23,63%, baik melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan NonPDAM. Adapun cakupan PDAM sebesar 12,92% (50.606 SR). Meskipun angka ini selalu meningkat, namun capaian masih rendah. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang enggan beralih dari air sumur menuju perpipaan. Selain itu, harga penyambungan sistem perpipaan masih dianggap terlalu tinggi oleh masyarakat. Beban penyediaan jaringan air perpipaan juga menjadi masalah mengingat persebaran permukiman yang terlalu terpencar dan kurang terkonsentrasinya pusat-pusat yang berperan sebagai kawasan perkotaan. Pada beberapa daerah juga dijumpai kendala keandalan. Tingkat kehilangan air PDAM Sleman masih tinggi. Kualitas air pun tidak konsisten. Ketika sistem jaringan air perpipaan memerlukan perbaikan, belum tersedia jaringan air cadangan untuk menjamin keberlanjutan air perpipaan.

Terkait dengan sumber air, pemanfaatan air di kawasan hulu perlu untuk dikendalikan, mengingat pada level tengah dan hilir terjadi banyak gesekan terkait pemanfaatan air. Selain itu, penyediaan air untuk irigasi juga menjadi penting untuk memastikan ketersediaan daya dukung pertanian (baik pertanian tanaman pangan, hortikultura maupun perikanan). Sebagai contoh, adanya pemanfaatan air untuk fungsi pengisian tangki air perlu untuk diperhitungkan secara rinci dampaknya terhadap daya dukung air di kawasan bawahannya.



Sumber : Google Images, diakses Juli 2024

Gambar 2.39. Stasiun Pengisian Tangki Air di Wilayah Sleman Utara

Pengelolaan jaringan sumber daya air yang belum optimal ini juga terkait erat dengan pengelolaan irigasi. Seperti disampaikan pada bagian ekonomi, pengelolaan kondisi pengelolaan jaringan irigasi memang meningkat, akan tetapi ada potensi terputusnya jaringan irigasi pada kawasan-kawasan yang beralih fungsi sebagai permukiman. Pertumbuhan permukiman juga semakin menggeser posisi jaringan irigasi sehingga tidak jarang jaringan irigasi juga difungsikan sebagai jaringan drainase. Kondisi ini juga berpengaruh pada persentase kondisi jaringan irigasi baik, yang tahun 2024 masih berada pada angka 82,66% dan belum merata di seluruh wilayah.

Selain itu, masih bercampurnya antara saluran drainase dan irigasi, terutama di kawasan permukiman perkotaan, sebagian saluran drainase

berubah fungsi, sebagian berfungsi ganda (sebagai irigasi dan drainase), padahal dimensi saluran irigasi dan drainase berbeda, akibatnya prasarana irigasi maupun drainase menjadi kurang optimal. Terkait dengan kondisi daya dukung air, kondisi kelestarian sumber daya air di Kabupaten Sleman yang semakin terancam serta permasalahan irigasi ini perlu dikoordinasikan pada level provinsi dan nasional, mengingat memang ada beberapa Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Provinsi dan Nasional.

Permasalahan jaringan air limbah lebih banyak berupa permasalahan pengelolaan, dimana banyak instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang sudah beroperasi pada berbagai skala namun belum banyak yang memilih untuk ikut pada jaringan IPAL terpusat maupun belum memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola IPAL komunal. Cakupan sanitasi layak di Kabupaten Sleman memang sudah mencapai 99,38%, namun untuk sanitasi aman baru mencapai 29,34%. Permasalahan jaringan air limbah ini banyak kemudian merembet pada permasalahan lingkungan dimana kualitas air di Kabupaten Sleman cenderung tidak mencerminkan kondisi yang baik bagi sebuah wilayah hulu.

C. Infrastruktur pendukung belum berkembang sesuai kemajuan zaman

Infrastruktur pendukung yang dimaksud adalah infrastruktur digital, sarana perdagangan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana gedung pemerintah, dan infrastruktur penanggulangan bencana, dan sebagainya. Banyak ditemukan beberapa infrastrukutr pendukung yang saat ini dalam kondisi kurang baik. Selain itu, baliho, papan reklame dan kabel ducting yang berpotensi menjadi salah satu sumber pendapatan, namun apabila tidak diatur dengan baik dapat menimbulkan sampah visual yang mengganggu.

1. Infrastruktur digital

   Untuk mendukung kemajuan zaman, infrastruktur digital adalah infrastruktur yang paling esensial untuk ditingkatkan. Infrastruktur ini kemudian akan mewarnai sarana pendidikan dan kesehatan serta akan dapat mendukung sarana perdagangan dan penanggulangan bencana. Infrastruktur digital disini tidak hanya berupa jaringan telekomunikasi tetapi termasuk juga sistem telekomunikasi, akses pelayanan digital, sistem pengolahan data, dukungan terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik serta sistem keamanan digital. Elemen-elemen ini penting untuk mendukung transisi industri dan pemerintahan. Khusus untuk keamanan digital, muatan ini akan penting untuk menjamin keamanan data digital yang dikelola pemerintah dan pengguna layanan pemerintah. Harapannya adalah bahwa tidak terjadi permasalahan sejenis seperti yang pernah terjadi pada tingkat nasional dimana terjadi kebocoran data kependudukan pada tahun 2023 dan kegagalan sistem pemerintahan elektronik yang berakibat lumpuhnya sistem layanan pemerintah yang berbasis digital pada tahun 2024.

2. Sarana perdagangan

   Untuk mendukung sistem perniagaan dan peningkatan sektor ekonomi, diperlukan sarana perdagangan yang memadai. Kondisi di Kabupaten Sleman adalah bahwa pemerataan ketersediaan pasar sudah terjadi. Yang masih menjadi permasalahan adalah kualitas dan kondisi pasar yang relatif tidak merata. Memang terdapat variasi sesuai dengan besaran

peran dan kewenangan pasar, tetapi cenderung terdapat perbedaan kualitas yang relatif besar antar pasar.

3. Sarana pendidikan

   Ketersediaan sarana pendidikan di Kabupaten Sleman secara umum sudah merata, meskipun beberapa dalam kondisi rusak sedang dan ringan. Yang belum merata adalah kualitas dari sarana pendukung pendidikan ini. Upaya pemerataan kualitas pendidikan diharapkan mampu membuka kesempatan yang merata bagi setiap warga untuk mengemban pendidikan dengan kualitas yang memadai sebagai dukungan pembentukan SDM yang siap menghadapi masa depan.

4. Sarana kesehatan

   Ketersediaan sarana kesehatan di Kabupaten Sleman secara umum juga sudah merata. Yang belum merata adalah kualitas dari sarana pendukung kesehatan ini. Kawasan Sleman Barat misalnya, belum memiliki RSUD yang dapat menjadi rujukan fasilitas kesehatan, seperti Kawasan Sleman Timur yang sudah msemiliki RSUD Prambanan. Selain itu, sebagian sarana kesehatan belum sesuai standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024, sehingga memerlukan relokasi dan/atau pengembangan. Upaya pemerataan kualitas sarana kesehatan diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi setiap warga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan baik pencegahan maupun pengobatan sebagai dukungan pembentukan SDM yang berdaya saing.

5. Infrastruktur penanggulangan bencana

   Infrastruktur penanggulangan bencana di Kabupaten Sleman masih membutuhkan pemerataan yang diawali dengan kejelasan konsep kerawanan bencana. Masih adanya pembangunan di Area Terdampak Langsung (ATL) bencana menjadi sebuah beban tambahan bagi proses mitigasi bencana. Dalam kaitan pengembangan wilayah dan upaya penyejahteraan masyarakat, penataan ruang memang memperbolehkan adanya pemanfaatan ruang di wilayah-wilayah ini. Akan tetapi kaidah-kaidah pembangunan di kawasan rawan bencana perlu untuk diperhatikan, seperti tertuang dalam Ketentuan Umum Zonasi dalam RTRW Kabupaten Sleman yang dimana adanya ketentuan bahwa kegiatan hunian tidak diperbolehkan serta adanya ketentuan kaidah-kaidah evakuasi bencana yang perlu ditaati.

   Selain bencana erupsi Gunungapi Merapi, di Sleman juga terdapat bencana lain seperti gempa bumi, angin, kekeringan, banjir dan juga kebakaran. *Respon time* penanganan kebakaran saat belum sesuai standar karena kurangnya pos damkar dan mobil pemadam. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sleman untuk meningkatkan *respon time*.

2.3.1.5 Permasalahan Kualitas Lingkungan Hidup yang Belum Berkategori Baik dan Kelestarian Lingkungan

Permasalahan terkait lingkungan hidup di Kabupaten Sleman ditinjau dari dua elemen utama, yakni kacamata kondisi kualitas lingkungan hidup yang belum baik serta posisi Kabupaten Sleman dalam kebencanaan melalui pemanfaatan ruang yang sesuai tata ruang. Kondisi kualitas lingkungan hidup yang belum baik akan berpotensi berdampak secara regional dimana Kabupaten Sleman

termasuk dalam hulu dari sistem Daerah Aliran Sungai (DAS). Sementara kondisi kebencanaan cenderung adalah kondisi yang cenderung merupakan turunan kondisi alam yang disertai dengan kondisi lingkungan alami, yang kemudian perlu dikaitkan dengan penataan ruang untuk bisa memitigasi dampak bencana.

Permasalahan terkait kualitas lingkungan hidup sebetulnya bersumber dari berbagai kondisi lingkungan, terutama dari kondisi drainase, pengelolaan air limbah dan pengelolaan persampahan. Pengelolaan air limbah dikategorikan pada permasalahan infrastruktur. Pengelolaan persampahan yang kemudian akan dibahas lebih mendalam sebagai aspek yang berdampak pada kualitas lingkungan hidup.

Selain persampahan sebagai sumber dampak kondisi lingkungan hidup, terdapat juga kondisi eksisting kualitas udara, air dan tutupan lahan yang perlu dikelola. Kondisi kualitas udara di Kabupaten Sleman cenderung sudah baik meski masih memiliki ruang perbaikan. Kondisi kualitas udara yang berada pada kategori baik masih dapat dikembangkan menjadi kategori sangat baik. Sementara itu, kondisi kualitas air dan tutupan lahan cenderung belum berada pada kategori baik sehingga masih terdapat permasalahan sistematis yang perlu diperbaiki. Perbaikan ini perlu berangkat dari perbaikan kualitas tutupan lahan.

A. Kualitas Lingkungan Hidup belum termasuk dalam kategori baik

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Sleman, secara normatif mungkin akan dirasakan tinggi, terutama dikarenakan ada pembanding-pembanding di wilayah sekitar yang memiliki kondisi lebih buruk. Namun jika ditinjau dari kondisi indeks lingkungan hidup, posisi Sleman sebetulnya masih terbatas terutama dari aspek kualitas air dan kualitas tutupan lahan. Dengan tekanan pada kualitas udara yang masih minim, indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Sleman cukup terangkat. Beberapa kontributor dari kondisi ini adalah sebagai berikut

1. Belum memadainya ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan

   Ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Sleman belum memadai untuk masyarakat. Standar ruang terbuka hijau, baik yang didasarkan pada Standar Nasional Indonesia (SNI) Perencanaan Lingkungan Perumahan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, maupun Peraturan Menteri ATR/BPN belum sepenuhnya dilaksanakan. Memang terjadi peningkatan pada capaian RTH, tetapi kebutuhan RTH terutama yang bersifat publik masih belum terpenuhi.

   RTH publik, selain berfungsi secara lingkungan yakni sebagai resapan air, penyedia oksigen, pengaturan iklim hingga fungsi rekreasi, juga memiliki fungsi-fungsi sosial, yakni ruang interaksi sosial, ruang publik untuk tumbuh kembang anak terutama di kawasan perumahan yang saat ini cenderung tidak mengarah pada tumbuh kembang anak, hingga sebagai ruang kedaruratan masyarakat yaitu untuk titik kumpul ketika terjadi kedaruratan, misal pada kerawanan bencana. Dengan rendahnya jumlah RTH publik yang benar-benar menyentuh masyarakat, maka manfaat-manfaat RTH publik di atas belum akan terasa secara penuh oleh masyarakat.

   Faktor penghambat penyediaan RTH publik antara lain terkait dengan pengelolaan pemanfaatan ruang yang masih terbatas serta belum tercapainya pengarusutamaan valuasi manfaat RTH publik. Pengelolaan

pemanfaatan ruang di Kabupaten Sleman masih banyak bersifat mengakomodasi kondisi eksisting dan belum berani berinovasi bersama masyarakat untuk mewujudkan ruang yang asri, lestari dan sehat bagi masyarakat.

Intervensi penyediaan RTH publik sering kali dibebankan pada tanah-tanah milik pemerintah daerah maupun tanah milik desa sehingga aspek fungsi publik akan sangat tergantung pada ketersediaan tanah tersebut. Adapun pemerintah daerah juga dirasa belum memiliki sikap yang tegas untuk berinvestasi pada pengadaan lahan untuk RTH publik.

2. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup masih perlu ditingkatkan.

   Keterlibatan masyarakat merupakan peran penting dalam mengelola lingkungan. Keterlibatan ini mendorong masyarakat untuk aktif mengelola lingkungan, tidak hanya peran secara individu namun juga meliputi peran serta kelompok dan organisasi dalam masyarakat. Keterlibatan masyarakat juga sangat penting karena pengelolaan lingkungan perlu berangkat dari pengelolaan di hulu, tengah, dan hilir.

3. Pengendalian pengelolaan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam perlu ditingkatkan

   Pengendalian pengelolaan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam merupakan komponen penting dalam menciptakan keberlanjutan lingkungan. Pada saat ini, rendahnya indeks kualitas air dan tutupan lahan menjadi sebuah tanda bahwa pengelolaan lingkungan belum memadai. Indeks Kualitas Lahan (IKL) ini mempunyai andil meningkatkan kualitas air dan kualitas udara yang baik. Dengan posisi IKL yang masih rendah dan masih maraknya alih fungsi lahan, baik pertanian maupun tutupan lahan dengan vegetasi tinggi, maka aspek kualitas air dan kualitas udara masih berpotensi juga untuk menurun.

   Kualitas air sungai dapat dilihat dari hasil uji kualitas air sumur yang menunjukkan 92% sampel yang diuji tidak memenuhi kualitas. Rendahnya kualitas air ini diperkirakan berasal dari cemaran limbah rumah tangga sebetulnya bermakna bahwa ada risiko lingkungan yang muncul dari pengelolaan limbah rumah tangga. Dengan demikian, sistem pengelolaan limbah rumah tangga, baik kebocoran septik tank atau instalasi pengolahan air limbah (IPAL) maupun sumber pencemar lain, pada pengelolaan individu maupun komunal, sebaiknya diawasi dengan lebih maksimal. Bila diperlukan, maka bisa diupayakan ada pembiayaan yang muncul bagi pengawasan pengelolaan limbah rumah tangga ini, harapannya supaya nilai kualitas lingkungan dapat meningkat. Permasalahan terkait prasarana limbah lain adalah masih banyak usaha dan/atau kegiatan yang belum mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dengan baik dan benar.

   Pengendalian masih perlu ditingkatkan untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang terjadi. Kerusakan lingkungan di Kabupaten Sleman terjadi akibat dua hal utama yakni adanya pertambangan di lahan dan adanya alih fungsi lahan yang sebelumnya bersifat tutupan vegetasi menjadi area terbuka. Pertambangan lahan saat ini sedang marak terjadi di wilayah-wilayah perbukitan, meski tidak dengan skala yang masif. Perlu ada sistem pengawasan lebih ketat karena kegiatan pertambangan

lahan ini, selain tidak sesuai dengan tata ruang, juga sering bersifat *irreversible* atau tidak dapat dikembalikan seperti semula kecuali pada jangka yang cukup panjang.

Pada konteks alih fungsi lahan, alih fungsi lahan untuk permukiman juga sedang sering terjadi pada kawasan-kawasan yang seharusnya tidak diperuntukkan sebagai permukiman-hunian. Beberapa lahan sawah produktif, lahan yang memiliki tegakan tinggi, dan bahkan beberapa perbukitan mulai dibuka dan diolah menjadi permukiman, dengan justifikasi untuk bisa membangun hunian yang lebih terjangkau. Pada kasus yang ekstrem, bentukan alami lingkungan berupa bukit dan memiliki identitas lokal berupa gunung bisa diolah melalui proses penyiapan lahan (*cut and fill* meskipun dominasinya ada pada cut saja) sehingga bentukan alami ini berubah dan hilang, tidak lagi menyisakan identitas lokalnya.

Kondisi-kondisi seperti inilah yang perlu diberi pengawasan dan pemahaman, supaya tidak terjadi kerusakan lingkungan hidup dan juga tidak terjadi pergeseran nilai peradaban, dimana perusakan lingkungan akan dianggap umum demi kesejahteraan.

4. Masih terdapat timbulan sampah yang belum tertangani

Pengelolaan sampah berada pada posisi transisi, dimana pengelolaan akhir sudah tidak lagi di TPA Piyungan, namun diserahkan untuk ditangani daerah. Kabupaten Sleman memang menjadi salah satu kabupaten yang pengelolaan sampah internalnya sudah berjalan dengan baik, terutama pada TPST Tamanmartani Kalasan dan TPST Sendangsari Minggir. TPST Donokerto Turi berada pada tahap persiapan untuk operasional. Namun, prasarana dan sarana tersebut belum cukup untuk dapat mengelola sampah secara menyeluruh, dan masih menyisakan residu kurang lebih 20% dari total timbulan sampah. Dengan potensi timbulan sampah yang besar, Kabupaten Sleman masih memerlukan kapasitas pemrosesan sampah yang juga lebih besar.

Pada tingkat hulu, masyarakat seharusnya bisa memiliki kesadaran pengelolaan sampah, dimana produksi sampah dikurangi melalui pemilihan produksi dan penggunaan produk kebutuhan rumah tangga yang lebih sedikit sampahnya. Jika memang ada pun, potensi produk yang akan menjadi sampah sebaiknya dimanfaatkan ulang hingga nilai kemanfaatannya habis. Baru kemudian jika memang sampah terproduksi, pengelolaan paling minimal adalah pemilahan sampah sehingga nantinya pengelolaan sampah bisa dilaksanakan secara spesifik. Pada tingkat rumah tangga pun sebetulnya proses pengelolaan sampah bisa dilakukan, misal dengan upaya komposting.

Pada pengelolaan di tengah, kelompok masyarakat dan pemerintah seharusnya membuat sistem pengelolaan sampah yang sudah menyadari pentingnya pemilahan sampah dan membuat pengelolaan sampah di level tengah, semisal bank sampah, pengelolaan sampah organik melalui komposting atau pemanfaatan *magot* dari lalat BSF (*black soldier fly*) hingga distribusi dari produk sampingan yang dibentuk dari pengelolaan sampah organik maupun bank sampah tersebut. Hal ini tentu akan mengurangi residu sampah di pengelolaan sampah di hilirnya.

Pada level hilir, pemilahan sampah hendaknya bisa dikelola pemerintah atau pihak swasta untuk bisa lebih jauh mengurangi volume sampah yang harus diproses secara akhir. Proses-proses seperti pengolahan menjadi *Refuse Derived Fuel* (RDF) atau daur ulang plastik menjadi materi yang lain, misal bahan bangunan, dapat dilaksanakan pada level hilir. Proses akhirnya nanti adalah pemusnahan sampah akhir melalui *incinerator* atau proses *sanitary landfill* yang meski memang belum sepenuhnya hijau tapi setidaknya, ketika sudah ada proses pengelolaan sampah di level hulu dan tengah, hanya timbul dalam volume kecil saja.

Penanganan sampah juga menjadi program prioritas yang diselesaikan menggunakan pendekatan ekosistem riset dan inovasi. Penanganan sampah membutuhkan sinergi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, dan media, untuk menciptakan ekosistem yang kondusif. Tanpa kolaborasi, pendekatan yang diambil akan bersifat sektoral, parsial, dan pada akhirnya tidak mampu menjawab akar persoalan secara komprehensif.

B. Ruang wilayah layak huni yang masih terbatas

Pembahasan ruang wilayah layak huni perlu berangkat dari narasi ruang hunian atau lebih dikenal sebagai perumahan dan kawasan permukiman. Untuk mewujudkan ruang wilayah layak huni, tersedianya rumah hunian yang layak huni menjadi elemen mendasar. Jika rumah sudah layak huni maka pembahasan berikutnya adalah pada skala lebih luas yakni kawasan permukiman. Kondisi kawasan permukiman di Kabupaten Sleman belum sepenuhnya memadai. Menurunnya cakupan rumah layak huni, masih adanya kawasan kumuh serta penanganan kawasan kumuh yang belum mencakup seluruh wilayah perkotaan menjadi permasalahan utama. Konteks lain yang menjadi penyebab permasalahan in juga dinarasikan melalui penyelenggaraan penataan ruang yang belum prima. Penyelenggaraan penataan ruang yang belum sepenuhnya berkualitas mengakibatkan adanya ruang-ruang yang belum nyaman-aman-produktif-berkelanjutan.

Untuk mewujudkan ruang permukiman yang berkualitas ini, terdapat beberapa tantangan yang berada di luar kewenangan pemerintah namun perlu untuk dijadikan perhatian dalam perwujudannya. Tantangan yang paling utama adalah adanya kapasitas daya beli masyarakat yang terbatas bila dibandingkan dengan harga lahan dan rumah sehingga terjadi *backlog* perumahan dan rumah-rumah tidak layak huni yang masih digunakan. Tantangan lainnya adalah bagaimana pemerintah bisa bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan ruang yang nyaman dan inklusif. Inklusi menjadi sebuah narasi yang diangkat dalam Sejalan dengan konsep *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang mencoba meningkatkan kemitraan antar pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan, perwujudan ruang wilayah layak huni perlu lebih dukungan berbagai pemangku kepentingan.

Perspektif pertama ini juga terpengaruh oleh perspektif kedua dimana infrastruktur pendukung juga menjadi elemen-elemen yang bisa meningkatkan kelayakan kawasan hunian.

Berdasarkan data terkait akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan menunjukkan masih terdapat rumah yang masih belum layak huni di Kabupaten Sleman. Rumah tidak layak huni di Kabupaten Sleman masih ada sekitar 2,32% yang belum mendapat penanganan, sehingga Pemerintah Kabupaten Sleman masih memiliki tugas cukup besar untuk menangani rumah yang belum layak huni untuk menaikkan kesehatan tempat tinggal, sanitasi yang aman dan mengurangi penyebaran penyakit. Selain itu, penanganan rumah tidak layak huni harus memperhitungkan arah perkembangan kota untuk merencanakan area permukiman dan akses hunian layak untuk penduduk Kabupaten Sleman hingga tahun 2045.

Dari sisi lebih luas, kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Sleman masih memiliki kawasan kumuh yang belum tertangani. Penyelenggaraan jaringan prasarana lingkungan serta perbaikan kondisi lingkungan hunian masyarakat terutama pada beberapa bagian yang tercakup dalam kawasan perkotaan perlu untuk segera ditangani. Penanganan kawasan kumuh menjadi salah satu modal penting untuk menopang kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni, diperlukan perhatian pada aspek yang lebih makro yakni tata ruang.

Baik tidaknya perumahan dan kawasan permukiman juga memerlukan perencanaan tata ruang yang baik. Untuk itu, permasalahan perumahan dan kawasan permukiman memerlukan partisipasi penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman pada proses penyelenggaraan penataan ruang.

Dari sisi penyelenggaraan penataan ruang, pengelolaan pemanfaatan ruang dinilai belum efektif. Hal ini digambarkan oleh perwujudan pemanfaatan ruang yang masih belum sesuai rencana pola ruang dalam tata ruang dan perwujudan struktur ruang yang belum sesuai bobot pada rencana sistem perkotaan di dalam rencana tata ruang. Permasalahan pemanfaatan ruang sendiri juga berangkat dari belum efektifnya perencanaan tata ruang, dimana terdapat beberapa kebutuhan pemanfaatan ruang yang belum diakomodasi oleh rencana tata ruang, meski pada rencana tata ruang sendiri terdapat muatan-muatan pertimbangan yang belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman masyarakat juga penting untuk bisa mewujudkan sistem penyelenggaraan penataan ruang yang baik.

1. Perencanaan tata ruang yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan ruang

   Perencanaan tata ruang idealnya membutuhkan kesepakatan antara pihak yang merencanakan, pihak yang meregulasi serta pihak yang akan dikenai perencanaan tersebut. Untuk itu seharusnya terjadi konsolidasi ketiga pihak tersebut selama proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang. Meskipun prerogatif utama ada di pemerintah untuk menentukan rencana tata ruang, namun ketika rencana tata ruang disusun tanpa *input* dari pelaku pemanfaatan ruang, maka tingkat perwujudan pemanfaatan ruang akan relatif rendah.

   Permasalahan ini terjadi pada perencanaan tata ruang di Kabupaten Sleman dimana responsivitas perencanaan tata ruang masih belum sepenuhnya baik. Ruang-ruang yang ditempatkan dengan fungsi utama tertentu tidak jarang justru dimohonkan untuk ruang dengan fungsi lain, sebagai contoh kasus yang terjadi adalah rencana kawasan peruntukan industri dimohonkan untuk fungsi perumahan.

   Penyelesaian permasalahan di tahapan perencanaan ini merupakan pintu gerbang menuju penyelesaian permasalahan pada tahap-tahap lain. Ketika terjadi kesepahaman antara perencana dan pelaksana rencana, maka kemungkinan perwujudan ruang yang sesuai akan meningkat dan diharapkan pelanggaran pemanfaatan ruang tidak terjadi.

2. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penataan ruang

   Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pertanahan dan penataan ruang berpotensi berakibat pada adanya pemanfaatan ruang yang melanggar ketentuan rencana tata ruang. Hal ini tercermin dari pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana yang mencapai 765,66 Ha atau 1,44% pada Kawasan budidaya. Ketidaksesuaian ini berpotensi mengubah struktur keruangan, baik pada lahan pertanian maupun pada lahan yang bersifat lindung atau lahan alami lainnya.

   Peningkatan pemahaman masyarakat terkait tata ruang sebetulnya tidak harus berangkat dari segi teknis perencanaan penataan ruang. Pemahaman ini dapat diangkat dari kebutuhan-kebutuhan lingkungan, semisal mengaitkan tata ruang dengan fungsi-fungsi lingkungan.

Peningkatan pemahaman ini pada level ideal dapat dengan memberikan panduan singkat tentang konsep-logika dalam perencanaan tata ruang supaya nantinya masyarakat bisa berperan dalam perencanaan hingga pengendalian pemanfaatan ruang. Dengan adanya peran masyarakat ini, diharapkan dapat terjadi *community driven planning* yang nantinya akan bermanfaat bagi upaya perwujudan tujuan penataan ruang.

3. Pengendalian pemanfaatan ruang, tanah dan bangunan yang belum tegas

   Pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan yang belum tertata baik di Kabupaten Sleman cenderung belum tegas. Banyaknya alih fungsi lahan yang terjadi yang rata-rata melanggar rencana tata ruang tidak diikuti dengan penertiban atau penanganannya yang tegas. Ketegasan ini penting dalam pengendalian pemanfaatan ruang untuk bisa mengirimkan sinyal urgensi dan esensi dari tujuan penataan ruang. Esensi paling mendasar dari perencanaan tata ruang adalah upaya untuk meningkatkan atau melindungi kondisi lingkungan hidup.

   Pendekatan pengendalian pemanfaatan ruang juga bisa dikaitkan dengan pemahaman masyarakat yang masih rendah. Aspek preventif dalam pemanfaatan ruang perlu untuk diupayakan lagi melalui pembinaan dan kesepakatan bersama dalam perencanaan tata ruangnya.

   Selain pemanfaatan ruang dan bangunan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Tanah Kalurahan juga masih terkendala. Berdasarkan temuan di lapangan banyak didapati bahwa ada penyelewengan tanah kas desa (TKD) yang dilakukan oleh oknum hingga diperjual belikan menjadi perumahan.

   Pentingnya pengawasan dan pengendalian TKD di Kabupaten Sleman menjadi sebuah solusi untuk menekan penyelewengan pemanfaatan penggunaan TKD. Selain itu dari sisi birokrasi, pemerintah dapat menyediakan fasilitasi penyelesaian permasalahan dan pemanfaatan Tanah Kalurahan dan pengetatan pengeluaran izin pemanfaatan TKD secara lebih tepat dan teliti didukung oleh pengawasan dari masyarakat untuk mengawasi pemanfaatan tanah TKD apabila terindikasi terdapat ketidaksesuaian pemanfaatan tanah TKD.

   Dua aspek yang masih perlu diperhatikan terkait dengan ruang layak huni adalah pengendalian reklame dan kabel telekomunikasi yang tidak teratur karena belum ada regulasi yang mengatur khusus serta daya dukung prasarana yang masih terbatas. Oleh karena itu, permasalahan terkait reklame dan penataan kabel ini perlu menjadi perhatian. Meski menjadi salah satu sumber penerimaan daerah, reklame menjadi kendala tersendiri yang butuh untuk ditata dan dikendalikan. Proses penataan telah ada melalui perencanaan masterplan, akan tetapi proses pengendalian masih memerlukan upaya penguatan. Daya dukung prasarana masih di Kabupaten Sleman secara makro masih memadai. Namun demikian, upaya untuk menilai secara aktif dari proses perhitungan daya dukung prasarana ini belum dapat dilakukan. Proses pengendalian daya dukung prasarana masih terkendala.

C. Pengelolaan Risiko Bencana Yang Belum Memadai

Di Kabupaten Sleman terdapat dua sumber bencana geologi besar, yakni Gunungapi Merapi dan patahan Opak. Selain itu kondisi hidrometeorologi yang semakin bergeser. Risiko bencana di Kabupaten Sleman yang secara

intrinsik memang memiliki risiko yang tinggi perlu untuk dikelola lebih baik. Masih adanya upaya-upaya aktivitas di kawasan rawan bencana menempatkan pengelolaan risiko bencana pada level yang tinggi, dimana aktivitas-aktivitas ini betul-betul perlu untuk diseimbangkan antara kebutuhan perkembangan perekonomian masyarakat dan upaya perlindungan masyarakat serta perlindungan lingkungannya. Beberapa penjabaran permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

Permasalahan lebih lanjut tentang pengelolaan kerawanan bencana adalah sebagai berikut:

1. Adanya pergeseran paradigma kawasan rawan bencana

   Masih adanya pembangunan di Area Terdampak Langsung (ATL) bencana menjadi sebuah beban tambahan bagi proses mitigasi bencana. Dalam kaitan pengembangan wilayah dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, penataan ruang memang memperbolehkan adanya pemanfaatan ruang di wilayah-wilayah ini, dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan. Karena hal ini juga akan mempengaruhi kualitas ruang wilayah layak huni bagi masyarakat di kawasan tersebut.

   Dalam kaitannya juga dengan perencanaan hunian tetap (huntap) sebagai pengganti bagi warga terdampak bencana, huntap dikhususkan untuk masing-masing keluarga dengan luasan unit yang terbatas dan relatif kecil bila dibandingkan luas lahan milik masyarakat yang termasuk dalam ATL. Hal ini mengakibatkan permasalahan, yaitu ketika penghuni huntap yang sejatinya memiliki cita-cita lahan yang luas untuk dijadikan hunian bagi anak dan keturunannya ternyata dibatasi oleh luasan pada huntap dan belum memiliki kemampuan untuk menyediakan lahan lebih lanjut. Hal tersebut mengakibatkan perkembangan keluarga penghuni huntap kembali ke lokasi lahan mereka yang terdampak bencana tersebut untuk membangun hunian sehingga kembali menimbulkan paparan atau kerawanan terhadap bencana.

   Pergeseran paradigma untuk bisa menciptakan mitigasi bencana yang mempertimbangkan sifat organik dan inklusif dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan kesuksesan proses mitigasi bencana.



Sumber : Google Images, diakses Juli 2024

Gambar 2.40. Perkembangan Kegiatan Pariwisata di Area Terdampak Langsung

2. Kecepatan merespons bencana kebakaran belum sesuai standar di beberapa lokasi

Cakupan pelayanan bencana kebakaran baru tersedia di Sleman tengah dan di Sleman Barat dengan penyediaan terbatas pada Sleman Timur. Penyediaan ini memang direncanakan untuk dikembangkan namun hingga saat ini belum terealisasi. Dengan cakupan yang terbatas ini, standar pelayanan minimal belum dapat mencakup seluruh wilayah kabupaten. Permasalahan yang ditemui adalah bahwa peralatan dan aset pendukung untuk merespons bencana kebakaran belum sepenuhnya tersedia.

3. Peningkatan mitigasi bencana untuk menurunkan jumlah korban dan kerugian ekonomi

   Peningkatan mitigasi bencana secara umum diperlukan untuk lebih jauh mengurangi korban bencana. Dari sisi kinerja, mitigasi bencana di Kabupaten Sleman memang terus membaik. Akan tetapi dampak bencana masih terjadi sehingga perlu ada pengupayaan untuk bisa mengurangi korban bencana hingga mendekati 0. Pengupayaan ini juga perlu untuk memperhatikan jenis bencana yang ada di Kabupaten Sleman, mulai dari bencana geologi seperti erupsi gunung api dan gempa bumi hingga bencana hidrometeorologi seperti cuaca ekstrem dan kekeringan.

2.3.1.6 Permasalahan Bidang Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan (*governance*) merupakan konsep yang mencakup semua proses, struktur, dan mekanisme yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola sumber daya dan urusan publik meliputi pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, pengawasan dan akuntabilitas. Tata kelola pemerintahan yang baik memastikan bahwa pemerintah bekerja secara efisien, transparan, akuntabel serta responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Akselerasi tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Sleman dilaksanakan melalui penerapan reformasi birokrasi sesuai dengan *road map* reformasi birokrasi Kabupaten Sleman yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.5 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024.

Kinerja tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sleman direpresentasikan dengan Indeks Reformasi Birokrasi. Berdasarkan data capaian di Bab II terlihat bahwa kinerja reformasi birokrasi menunjukkan tren positif pada tahun 2018-2022, dan pada tahun 2023 mencapai nilai 80,82 dengan predikat A. Hasil nilai reformasi birokrasi tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena adanya perubahan parameter komponen pengukurannya. Penilaian evaluasi reformasi birokrasi pada tahun 2023 lebih ditekankan pada reformasi birokrasi yang berdampak dan kolaboratif.

Pada tahun 2024, Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 93,13 dengan predikat A. Capaian kinerja ini walaupun sudah tinggi namun perlu dijaga untuk dapat dipertahankan dan ditingkatkan kembali, karena pada tahun berikutnya *roadmap* reformasi birokrasi akan berubah, sehingga ke depannya Pemerintah Kabupaten Sleman perlu melakukan langkah adaptasi dan antisipatif terhadap perubahan penilaian maupun menjalankan roda pemerintahan ke arah transformasi yang transparan, akuntabel, tangkas dan adaptif.

A. Akuntabilitas kinerja dan keuangan belum sepenuhnya baik

Akuntabilitas kinerja suatu daerah bisa dilihat dari capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan capaian

data nilai AKIP Kabupaten Sleman empat tahun terakhir cenderung meningkat, bahkan pada tahun 2023 mencapai angka 82,75 dengan predikat A. Namun pada tahun 2024 kembali turun menjadi 80,86 tetap dengan predikat A. Meskipun telah mencapai kriteria A, namun dari skor yang didapat masih perlu ditingkatkan untuk menyentuh nilai di atas 90 atau AA. Hal ini mencerminkan bahwa akuntabilitas kinerja di Kabupaten Sleman belum sepenuhnya baik. Beberapa faktor menjadi penyebab permasalahan akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya baik yaitu:

1. Kualitas perencanaan kinerja belum sepenuhnya baik

   Kualitas perencanaan kinerja dapat dilihat pada capaian komponen perencanaan kinerja masih diangka 27,58 dari bobot maksimal 30 dan pengukuran kinerja masih diangka 22,76 dari bobot maksimal 30. Hal ini mencerminkan bahwa kualitas perencanaan kinerja di Kabupaten Sleman belum sepenuhnya baik. Dari sisi keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan sudah baik, namun keselarasan dengan dokumen lainnya masih perlu diperbaiki seperti pohon kinerja dan dokumen lainnya. Pohon kinerja yang disusun masih dibatasi oleh kewenangan/struktur organisasi, sehingga belum sepenuhnya tersusun berdasarkan *critical success factor* dan *logical framework* yang lebih komprehensif. Kondisi ini menceminkan bahwa struktur kelembagaan masih terfragmentasi sehingga belum tangkas dan adaptif terhadap kebutuhan publik.

   Di samping itu, manual indikator kinerja utama (IKU) pada level perangkat daerah belum seluruhnya dilengkapi dengan definisi operasional, formulasi perhitungan, dan sumber data untuk mengetahui cara pengumpulan dan perhitungan indikator kinerja; serta laporan kinerja pada level perangkat daerah belum seluruhnya menyajikan analisis mengenai faktor penghambat dan pendukung, analisis detail terkait keberhasilan program/kegiatan, dan analisis terkait upaya *refocusing* program/kegiatan.

   Dari sisi ketercapaian sasaran daerah, selama tiga tahun terakhir ini cukup fluktuatif. Berdasarkan data di bab II, tingkat ketercapaian sasaran daerah pada tahun 2023 mencapai 90% mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 93,55%. Namun pada tahun 2024 turun, hanya mencapai 80%. Beberapa indikator sasaran daerah yang tidak tercapai adalah persentase penduduk miskin, harapan lama sekolah, pembelanjaan wisatawan mancanegara, Indeks Pembangunan Olahraga, Indeks Ketahanan Keluarga, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, dan predikat AKIP. Hal ini karena beberapa perhitungan indikator sangat dipengaruhi eksternalitas yang tidak dapat diintervensi pelaksanaannya.

2. Kualitas inovasi daerah yang belum sepenuhnya baik

   Perkembangan kualitas inovasi daerah tercermin dalam pencapaian nilai indeks inovasi daerah. Berdasarkan data di Bab II, Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sleman selama tiga tahun terakhir ini mengalami penurunan. Dan pada tahun 2024, Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sleman mencapai angka 62,82. dengan predikat “Sangat Inovatif” dan menempati peringkat 58 untuk kluster kabupaten dari 415 Kabupaten yang ada di Indonesia. Artinya Kabupaten Sleman memiliki tingkat inovasi yang cukup baik tetapi belum optimal. Meskipun inovasi sudah diterapkan,

dampaknya terhadap pembangunan, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan masih terbatas. Kualitas inovasi daerah berperan penting dalam mendukung akuntabilitas kinerja pemerintah, terutama dalam pelayanan publik, pengelolaan sumber daya, dan transparansi.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas inovasi daerah adalah kualitas hasil penelitian daerah. Kualitas hasil penelitian daerah Kabupaten Sleman tercermin dari tingkat kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan. Pada tahun 2024, semua hasil penelitian daerah telah dimanfaatkan sepenuhnya oleh pemangku kepentingan baik untuk perencanaan, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintah daerah maupun pembangunan daerah. Tingkat kemanfaatan hasil penelitian daerah adalah salah satu dasar bagi terciptanya inovasi daerah yang efektif dan relevan, yang pada gilirannya mendorong akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Selain itu, implementasi inovasi daerah yang komprehensif akan semakin memperkuat kualitas inovasi dan mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dengan demikian, penelitian yang aplikatif dan inovasi yang sukses berperan penting dalam memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah .

3. Keterbatasan Pengawasan Internal

Keterbatasan pengawasan internal Kabupaten Sleman tercermin dari tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi masih di level 3 (terdefinisi) dengan angka 3,521 dari level maksimal 5. Keterbatasan dalam pengawasan internal dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja daerah. Ada beberapa faktor penyebab keterbatasan pengawasan internal diantaranya keterbatasan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia dan teknologi serta kurangnya sistem pengawasan yang terintegrasi. Berdasarkan data di Bab II terlihat bahwa kapabilitas APIP Kabupaten Sleman tahun 2024 berada pada Level 3 (*Delivered*) dengan skor 3,120 dari level maksimal 5. Artinya APIP telah mencapai tingkat kematangan yang signifikan dalam hal proses dan prosedur pengawasan internal. Namun hal ini belum cukup untuk Kabupaten Sleman mengingat begitu kompleksitas permasalahan dan risiko ke depan yang dihadapi oleh Kabupaten Sleman. Beragamnya program, kegiatan dan layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman memerlukan tingkat pengawasan yang lebih tinggi untuk mengelola risiko dan memastikan akuntabilitas dengan baik serta penggunaan teknologi dan data analitik yang lebih tinggi.

Di sisi lain tingkat pengawasan terintegrasi yang tergambar dalam tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi juga masih di level 3. Artinya proses dan kebijakan SPIP telah didefinisikan dengan baik, terdokumentasi, dan disosialisasikan di seluruh organisasi. Namun, penerapan dan pengendaliannya belum sepenuhnya konsisten atau terintegrasi sepenuhnya dengan pengelolaan risiko dan tujuan strategis organisasi. Kurangnya pengawasan yang terintegrasi akan mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Pengawasan yang terintegrasi memastikan bahwa semua aspek operasional, kebijakan, dan prosedur dalam suatu organisasi atau pemerintahan diawasi secara menyeluruh dan konsisten. Tanpa pengawasan

terintegrasi, berbagai masalah dapat muncul yang berdampak negatif pada akuntabilitas kinerja.

Faktor lain yang juga menjadi penyebab keterbatasan pengawasan internal adalah efektivitas pengawasan kinerja perangkat daerah yang tercermin pada persentase tindak lanjut temuan serta efektivitas pencegahan korupsi yang dapat terlihat dari nilai indeks efektivitas pencegahan korupsi (Nilai IEPK). Berdasarkan data di Bab II, persentase tindak lanjut temuan inspektorat selama empat tahun terakhir ini terus mengalami penurunan, masih di bawah 85%. Hal ini disebabkan karena kepatuhan sebagian auditan masih rendah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan terutama bila terkait dengan pihak ketiga. Lain halnya dengan persentase tindak lanjut temuan BPK, walaupun pada tahun 2024 turun dari 2023, setelah naik dari 2022, baru mencapai angka 95,27%. Tingkat tindak lanjut terhadap temuan ini tentunya sangat mempengaruhi kualitas pengawasan internal di Kabupaten Sleman.

Sementara itu, efektivitas pencegahan korupsi di Kabupaten Sleman juga belum sepenuhnya baik. Hal ini tercermin dengan perolehan nilai indeks efektivitas pencegahan korupsi (Nilai IEPK) tahun 2024 di Kabupaten Sleman baru mencapai angka 3,090. Meskipun turun dari 2023, angka ini menunjukkan bahwa pengendalian korupsi di Kabupaten Sleman berada dalam kategori cukup efektif, tetapi belum sepenuhnya baik. Pengendalian korupsi di Kabupaten Sleman sudah ada, tetapi masih banyak ruang yang perlu perbaikan. Dalam hal ini, meskipun ada upaya yang dilakukan, pengendalian korupsi di Kabupaten Sleman belum sepenuhnya efektif dan masih perlu peningkatan dalam aspek-aspek seperti transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum, dan efektivitas mekanisme pengawasan. Hal ini ditandai masih adanya kasus korupsi di Kabupaten Sleman seperti korupsi pemanfaatan tanah kas desa, korupsi dana hibah pariwisata, korupsi dana hibah dana desa (DD) dan sebagainya. Kondisi ini tentunya akan mempengaruhi terhadap kualitas pengawasan internal di Kabupaten Sleman.

4. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang masih perlu ditingkatkan

   Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Sleman tercermin dari status kinerja pemerintah daerah, yang ditentukan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Status ini juga menjadi indikator penting dalam menilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, karena mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya secara transparan, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

   Berdasarkan data di Bab II, nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (EPPD) terakhir mencapai angka 3,1895 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang masih pada angka 2,690, namun statusnya masih tetap stagnan pada level sedang. Skor tersebut diperoleh melalui akumulasi capaian kinerja makro dan capaian indikator kinerja kunci (IKK), baik IKK *outcome* maupun IKK *output*. Apabila dilihat dari capaian indikator non makro pada komponen Indeks Reformasi Birokrasi

belum mencapai 100% masih pada angka 90,5%. Hal ini dikarenakan masih ada 2 indikator dari 21 indikator kinerja yang belum tercapai targetnya. Status kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sleman pada level sedang artinya kinerja pemerintah daerah cukup memadai, namun masih ada beberapa hal yang perlu perbaikan baik pada aspek perencanaan, pelaksanaan program, pelayanan publik dan pengawasan. Di samping itu juga masih ada beberapa kelemahan dalam integrasi kebijakan, efektivitas pengawasan dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah yaitu kinerja perangkat daerah yang masih perlu ditingkatkan, kualitas kebijakan yang belum sepenuhnya baik, dan kualitas reformasi hukum yang perlu ditingkatkan. Kinerja perangkat daerah di Kabupaten Sleman tercermin dari capaian indikator non makro pada komponen indeks reformasi birokrasi. Berdasarkan data di bab II, terkait dengan capaian kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa kinerja perangkat daerah belum sepenuhnya baik.

Sementara itu kualitas kebijakan pemerintah daerah juga menunjukkan hal yang sama. Indeks kualitas kebijakan tahun 2022 mencapai angka 36,64 dari skala 0-100. Angka ini masih tergolong cukup rendah, bahkan tahun 2023 tidak keluar nilainya. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas kebijakan belum sepenuhnya baik. Beberapa faktor menjadi penyebab yaitu rendahnya efektivitas proses kebijakan, keterbatasan implementasi kebijakan, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses kebijakan dan kurangnya partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan.

Dari sisi reformasi hukum, walaupun Indeks Reformasi Hukum telah mencapai angka 99,3, namun angka ini belum memenuhi skor maksimal yaitu 100. Artinya pelaksanaan reformasi hukum belum sepenuhnya baik, masih ada ruang yang perlu perbaikan. Tantangan terbesar dalam pelaksanaan reformasi hukum adalah kebijakan pusat yang sangat dinamis dan keterbatasan kapasitas SDM bidang hukum di Kabupaten Sleman.

5. Kinerja pemerintah kapanewon perlu ditingkatkan

   Pemerintah kapanewon merupakan perangkat daerah di tingkat paling bawah yang langsung berhubungan dengan masyarakat, sehingga kinerja pemerintah kapanewon menjadi sangat penting untuk mendukung akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Rata-rata hasil evaluasi kinerja pemerintah kapanewon tahun 2023 adalah 84,35 dengan predikat baik, dan tahun 2024 mencapai 85,82. Artinya kinerja pemerintah kapanewon sudah baik, namun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Ada beberapa aspek yang menjadi penyebabnya yaitu kinerja pemerintahan umum belum sepenuhnya baik, pelayanan publik belum sepenuhnya baik dan ketertiban dan keamanan masyarakat kapanewon yang belum sepenuhnya kondusif. Koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah kalurahan termasuk dukuh dalam rangka pemantauan kinerja pemerintahan kalurahan masih perlu ditingkatkan. Di samping itu kapanewon masih hanya menyelenggarakan kegiatan rutin saja, belum banyak inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di wilayah. Sementara itu dalam hal pelayanan publik, masih ada persepsi dari mitra dan pengguna layanan bahwa pelayanan publik di kapanewon kurang cepat, serta kurang agresif dalam

melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan mediasi. Disisi lain keamanan dan ketertiban di wilayah kapanewon di lingkungan Kabupaten Sleman juga belum sepenuhnya kondusif. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya kasus-kasus kejahatan yang terjadi di wilayah. Kondisi ini akan mempengaruhi penyelenggaraan pemerintah yang berdampak pada akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

6. Kemandirian desa belum merata

   Perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Sleman tercermin pada capaian indeks desa mandiri. Berdasarkan data di Bab II, persentase desa mandiri pada tahun 2024 meningkat menjadi 82 kalurahan. Namun, angka ini menunjukkan bahwa masih ada desa/kalurahan di Kabupaten Sleman yang belum mencapai status desa mandiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian desa di Kabupaten Sleman masih belum merata. Beberapa faktor penyebabnya antara lain belum optimalnya kinerja tata kelola pemerintahan kalurahan dan kualitas pemberdayaan masyarakat yang masih perlu diperkuat. Kondisi ini dipengaruhi oleh ketidakpatuhan administrasi, pengelolaan keuangan dan aset desa yang belum optimal serta kompetensi aparatur kalurahan yang masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, kualitas pemberdayaan masyarakat yang belum optimal ditandai dengan masih adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang belum terfasilitasi serta peran Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK) yang belum maksimal dalam mendukung program di tingkat kalurahan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kapasitas pemerintahan kalurahan serta penguatan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam percepatan pencapaian desa mandiri di Kabupaten Sleman.

7. Kualitas pengelolaan keuangan daerah masih perlu ditingkatkan

   Kualitas pengelolaan daerah Kabupaten Sleman tercermin dari perolehan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta indeks pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan data di Bab II, sejak tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Sleman telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 14 kali berturut-turut. Selain itu, pada tahun 2024, indeks pengelolaan keuangan daerah tahun juga telah mencapai kategori B, meskipun turun dari tahun 2023. Dari aspek ketepatan waktu baik, penyusunan dokumen anggaran, penatausahaan keuangan dan laporan keuangan telah berjalan dengan baik. Namun, masih terdapat catatan pada tingkat kemandirian fiskal khususnya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan pengelolaan aset yang perlu ditingkatkan. Kondisi ini mencerminkan bahwa kualitas pengelolaan daerah masih perlu ditingkatkan.

   Analisis di bab III menunjukkan bahwa tingkat kemandirian maupun desentralisasi fiskal Kabupaten Sleman pada tingkat menengah sebesar 36,57%. Derajat Desentralisasi Fiskal ini dihitung berdasarkan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Sleman adalah pengelolaan PAD, yang mencerminkan tingkat kemandirian fiskal maupun desentralisasi fiskal daerah. Untuk mendukung realisasi dari program pembangunan, maka peningkatan kemandirian fiskal perlu dilakukan melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Peningkatan PAD merupakan strategi utama dalam

memperkuat kemandirian fiskal, mengingat pengelolaannya sepenuhnya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah, baik dalam aspek peningkatan penerimaan maupun alokasinya. Dengan tingkat kemandirian fiskal yang lebih tinggi, Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menentukan strategi pembangunan serta mewujudkan visi dan misi daerah.

PAD Kabupaten Sleman terdiri dari empat komponen utama, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan analisis di Bab III, kontribusi terbesar berasal dari pajak daerah, sementara retribusi dan pengelolaan aset daerah yang dipisahkan hanya menyumbang kurang dari 10% dari total PAD. Ketergantungan yang tinggi terhadap pajak daerah membuat struktur PAD kurang seimbang dan rentan terhadap fluktuasi pendapatan. Di sisi lain, Kabupaten Sleman memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, termasuk aset daerah yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan. Data di bab II menunjukkan bahwa belum semua perangkat daerah tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) kategori A, dengan tingkat kepatuhan administrasi masih berada di angka 86%. Kondisi ini mencerminkan bahwa kualitas pengelolaan aset daerah masih perlu ditingkatkan. Optimalisasi aset daerah melalui pengelolaan yang lebih efektif dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi daerah. Selain itu, potensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga perlu dimaksimalkan dalam meningkatkan kontribusi terhadap PAD. Dengan BUMD yang bergerak di berbagai sektor usaha, terdapat peluang besar untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru guna memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Sleman.

B. Kualitas Pelayanan Publik Berbagai Sektor Belum Prima

Kualitas pelayanan publik sangat penting untuk mendorong terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sleman mengalami sedikit penurunan ditunjukkan dengan menurunnya nilai indeks pelayanan publik dari 4,54 (2023) menjadi 4,63 (2024). Penilaian ini hanya diambil beberapa perangkat daerah sebagai sampling, sehingga pada penilaian menyeluruh perangkat daerah oleh Bagian Organisasi, INdeks Pelayanan Publik hanya mencapai 2,77.

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman lima tahun terakhir menunjukkan tren yang positif dan secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik, pada tahun 2024 mencapai 85,56 meskipun lebih rendah dari DIY. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik berbagai sektor di Kabupaten Sleman belum prima. Berbagai persoalan yang menyebabkan kualitas pelayanan publik belum prima adalah:

1. Layanan informasi dan komunikasi publik masih perlu ditingkatkan

   Kualitas layanan informasi dan komunikasi publik Kabupaten Sleman tercermin pada Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan data di Bab II, Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Sleman tahun 2024 mengalami peningkatan mencapai angka 90 dengan predikat informatif. Namun, nilai ini masih berada pada batas minimal kategori

informatif dan lebih rendah dibandingkan Kabupaten Bantul (94) dan Kota Yogyakarta (92).Kondisi ini menunjukkan bahwa layanan informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Sleman masih perlu ditingkatkan. Salah satu penyebabnya adalah belum optimalnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Sistem lapor sleman sebagai platform pengaduan masyarakat belum terintegrasi dengan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N), sehingga respon terhadap berbagai keluhan masyarakat belum tertangani secara maksimal. Selain itu, belum semua informasi wajib tersedia di website setiap organisasi perangkat daerah secara lengkap dan penggunaan e-PPID masih belum optimal pada beberapa perangkat daerah. Kondisi ini mengakibatkan layanan informasi publik menjadi belum berjalan secara efektif.

2. Kualitas pelayanan perangkat daerah masih perlu ditingkatkan.

   Kualitas pelayanan perangkat daerah Kabupaten Sleman tercermin pada nilai rata-rata hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di perangkat daerah. Berdasarkan data di Bab II, indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada semua perangkat daerah dan UPT di lingkungan Kabupaten Sleman menunjukkan tren positif, dengan capaian 85,56 pada tahun 2024. Meskipun demikian, angka ini masih lebih rendah dibandingkan DIY. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan perangkat daerah di Kabupaten Sleman masih perlu ditingkatkan. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kondisi ini adalah belum optimalnya implementasi standar pelayanan publik. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala antara lain digitalisasi pelayanan publik yang belum sepenuhnya terintegrasi sehingga data masih tersebar di berbagai aplikasi, keterbatasan SDM pelayanan yang berkualitas terutama di tingkat kapanewon serta masih kurangnya kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik di tingkat lini, yang berdampak pada kenyamanan serta aksesibilitas masyarakat dalam memperoleh layanan. Hasil survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik di Kabupaten Sleman juga menunjukkan bahwa terdapat tiga unsur utama yang memperoleh nilai rendah dalam pengukuran standar pelayanan yaitu waktu penyelesaian pelayanan, mekanisme pengaduan dan produk pelayanan. Berbagai permasalahan pelayanan publik di tingkat perangkat daerah ini tentunya akan berimplikasi pada kualitas pelayanan publik secara keseluruhan di Kabupaten Sleman.

3. Kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan masih perlu ditingkatkan

   Pelayanan perizinan dan non perizinan merupakan bagian dari pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Sleman dan memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing daerah. Faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan adalah digitalisasi layanan, yang saat ini belum sepenuhnya terintegrasi dan data masih tersebar di berbagai aplikasi, sehingga proses pelayanan perizinan maupun non perizinan menjadi kurang maksimal.

4. Kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil masih perlu ditingkatkan

   Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil bukan termasuk layanan dasar namun hasil dari pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil digunakan untuk memperoleh pelayanan dasar dan pelayanan publik lainnya. Kualitas pelayanan administrasi

kependudukan dan catatan sipil dicerminkan dengan nilai indeks administrasi kependudukan dan catatan sipil. Berdasarkan data di Bab II, indeks administrasi kependudukan dan catatan sipil sudah cukup baik dengan capaian 98,53% pada tahun 2024. Namun, angka ini belum mencerminkan pencapaian yang sepenuhnya optimal karena masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Berbagai permasalahan tersebut antara lain belum semua masyarakat memiliki kartu kependudukan seperti KTP-el (99,99%) dan KIA (83%). Artinya masih ada 0,01% masyarakat yang belum memiliki KTP-el. Meskipun angkanya kecil, kepemilikan KTP-el sangat krusial karena menjadi syarat utama dalam berbagai pelayanan publik lainnya. Di sisi lain, sekitar 17% anak-anak belum memiliki KIA, Padahal KIA penting untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan perlindungan anak. Sementara itu, pemanfaatan data kependudukan oleh pemangku kepentingan juga masih sangat rendah. Kendala utama yang dihadapi dalam pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil adalah kualitas sarana dan prasarana pendukung layanan publik yang masih belum optimal. Beberapa sarana pendukung layanan administrasi dan kependudukan telah memasuki masa *out of product* dan *out of service*. Selain itu, bangunan gedung yang kurang memadai sebagai tempat pelayanan administrasi kependudukan terintegrasi juga menjadi kendala

5. Pelayanan administrasi pertanahan masih perlu ditingkatkan

   Hasil pelayanan administrasi pertanahan ini menjadi dasar bagi berbagai pelayanan publik lainnya, termasuk dalam proses perizinan. Permasalahan utamanya adalah rendahnya ketertiban administrasi penatausahaan dan pemanfaatan tanah desa. Sampai dengan 2024, tanah desa yang bersertifikat baru mencapai 42,53% dari seluruh bidang tanah kas desa. Selain itu, proses sertifikasi tanah secara keseluruhan di Kabupaten Sleman baru mencakup sekitar 80% dari total luas wilayah, yang menunjukkan bahwa masih ada sebagian tanah yang belum memiliki kepastian hukum. Dari sisi jumlah kasus pertanahan, permasalahan pertanahan yang muncul pada tahun 2024 sebanyak 107 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan pertanahan sangat kompleks, mencakup masalah administrasi pertanahan yang buruk, ketidaksesuaian peraturan, hingga konflik agraria yang dipicu oleh kepentingan ekonomi seperti pertambangan, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur. Penyebab utamanya adalah lemahnya sistem pendaftaran tanah, data yang tidak akurat, serta ketimpangan dalam penguasaan dan kepemilikan tanah, yang membuat masyarakat rentan kehilangan hak atas tanah mereka. Keterlambatan dalam fasilitasi pemanfaatan tanah ini dapat berdampak pada efektivitas pemanfaatan lahan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, berbagai tantangan dalam administrasi pertanahan ini berpengaruh terhadap kualitas pelayanan administrasi pertanahan dan berdampak pada pelayanan publik secara lebih luas.

C. Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan masih perlu ditingkatkan

Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu keharusan dalam era digital saat ini. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) menawarkan solusi yang komprehensif untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan mengintegrasikan

teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan, SPBE memungkinkan optimalisasi penggunaan sumber daya, transparansi dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan kualitas layanan publik. Otomatisasi dan digitalisasi berbagai proses administratif juga berkontribusi dalam mempercepat waktu pelayanan, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sleman dapat dilihat dari perolehan indeks SPBE. Berdasarkan data di Bab II, indeks SPBE Kabupaten Sleman mengalami peningkatan, mencapai angka 4,3 dari skala 5 dengan predikat memuaskan pada tahun 2024. Meskipun angka ini sudah menunjukkan kinerja yang baik, namun belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, karena masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain adalah tata kelola teknologi informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi, layanan SPBE yang belum sepenuhnya terintegrasi di seluruh perangkat daerah, tingkat keamanan informasi pemerintah yang masih perlu diperkuat, pengelolaan data statistik yang belum optimal, pengelolaan kearsipan yang masih belum maksimal dan manajemen ASN yang belum sepenuhnya baik.

Pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan melalui SPBE di Kabupaten Sleman masih perlu ditingkatkan agar tepat sasaran, mengurangi redundansi, serta meningkatkan integrasi dan kecepatan pemrosesan informasi antar instansi. Meskipun pengembangan berbagai sistem informasi sudah berjalan, namun belum maksimal dalam mempermudah permasalahan dan peningkatan pelayanan daerah.

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Kinerja manajemen ASN di Kabupaten Sleman dapat dilihat dari indeks profesional ASN dan indeks sistem merit. Indeks Profesionalitas ASN tahun 2024 mencapai 82,92. Sementara itu, Indeks Sistem Merit Kabupaten Sleman tahun 2024 juga masih stagnan di angka 336, mencerminkan bahwa manajemen ASN belum optimal. Hal ini disebabkan karena kompetensi ASN yang masih terbatas, terutama dalam penguasaan teknologi informasi, bahasa asing dan berjejaring. Disamping itu ketidakmerataan pengembangan kompetensi di berbagai jenjang dan jabatan, akibat manajemen talenta yang belum berjalan optimal serta rekrutmen ASN yang belum sesuai dengan kebutuhan formasi, sehingga berdampak pada efektivitas kerja.

Berbagai kondisi diatas menunjukkan bahwa penguatan tata kelola digital, integrasi layanan serta peningkatan kompetensi ASM dalam mendukung SPBE masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien.

D. Tingginya tingkat kriminalitas

Faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja tata kelola pemerintahan adalah kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat suatu daerah. Berdasarkan data di Bab II, angka kriminalitas di Kabupaten Sleman selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Bahkan pada tahun 2023, Kabupaten Sleman menjadi daerah dengan kasus kriminalitas tertinggi di DIY. Pada tahun 2024, angka kejahatan per 100.000 penduduk di Kabupaten Sleman mencapai angka 418 dan tindak kejahatan dilaporkan

sebanyak 4.832 kasus dengan jenis kejahatan terbesar pada penipuan, pencurian biasa, penganiayaan, penggelapan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian dengan pemberatan. Hampir meningkat dua kali lipat dari tahun 2023.

Di samping itu kejahatan jalanan di Kabupaten Sleman lima tahun terakhir juga terus meningkat dengan jenis kejahatan jalanan yang terdiri dari perampasan, pencurian motor (curannmor), pencopetan, penodongan, pemalakan, penganiayaan dan pengrusakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sleman belum kondusif. Beberapa aspek teridentifikasi menjadi penyebab kondisi tersebut yaitu kualitas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum memadai yang disebabkan masih adanya pelanggaran keamanan dan ketertiban dan penegakan perda belum maksimal. Di samping itu, mitigasi potensi konflik sosial yang masih perlu ditingkatkan terlihat dari masih adanya potensi rawan konflik juga menjadi aspek yang mempengaruhi kondusifitas keamanan dan ketertiban daerah. Tahun 2023 terdapat 30 kasus aduan pelanggaran keamanan dan ketertiban, walaupun sudah dapat tertangani, namun menjadi potensi ketidakamanan di masyarakat Kabupaten Sleman. Begitu pula penegakan perda yang belum maksimal dari 19 perda, baru 10 perda yang ditegakkan. Hal ini menimbulkan berbagai pelanggaran perda seperti pelanggaran perizinan tempat usaha, pertambangan pasir ilegal, prostitusi berkedok salon spa, reklame ilegal, pemondokan (kost) tidak berizin serta penjualan minuman keras tidak berizin.

Masyarakat Sleman yang multikultur dan banyaknya perguruan tinggi berlokasi di wilayah Kabupaten Sleman memiliki potensi rawan konflik berbau SARA, aksi terorisme dan separatisme. Kondisi ini menjadi salah satu potensi timbulnya kerawanan dan kriminalitas di wilayah Kabupaten Sleman. Berbagai kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban, adanya pelanggaran perda dan potensi rawan konflik diatas mengakibatkan kondusifitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sleman belum baik.

Keamanan dan ketertiban yang belum kondusif memiliki dampak luas terhadap proses penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Dari gangguan terhadap pelayanan publik hingga pengelolaan anggaran dan sumber daya, menurunnya kepercayaan publik, dan dampak negatif pada investasi dan pertumbuhan ekonomi, semuanya berkontribusi pada kemunduran kinerja pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, memastikan keamanan dan ketertiban merupakan prasyarat penting untuk tata kelola pemerintahan yang efektif dan pembangunan yang berkelanjutan.

2.3.2 Isu Strategis Daerah

Isu strategis memberikan gambaran aspek-aspek eksternal penyelenggaraan pemerintahan yang perlu diperhatikan baik sebagai tantangan atau sebagai kesempatan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan pelayanan pemerintahan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

2.3.2.1 Isu Strategis Tingkat Global

Sebagai warga dunia, beberapa muatan yang telah menjadi kebijakan dari forum global yang relevan dengan Kabupaten Sleman perlu untuk menjadi pertimbangan dalam perumusan isu strategis. Selain kebijakan global, dinamika yang terjadi di skala internasional perlu untuk menjadi pembahasan.

2.3.2.1.1 Telaah Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) atau yang dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau *"No-one Left Behind"*. TPB terdiri atas 17 Tujuan dan 169 target. Dalam penerapan TPB di Indonesia, Pemerintah menyusun indikator pencapaian TPB sebanyak 319 indikator yang mengacu pada 241 indikator TPB yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tujuan SDGs tersebut adalah:

1. Tanpa Kemiskinan: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana saja.
2. Nol Kelaparan: Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3. Kesehatan dan Kesejahteraan: Menjamin hidup sehat dan mendorong kesejahteraan untuk semua di segala usia.
4. Pendidikan Berkualitas: Menjamin bahwa semua orang memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas, adil, dan inklusif, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat.
5. Kesetaraan Gender: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.
6. Air Bersih dan Sanitasi: Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7. Energi Bersih dan Terjangkau: Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi: Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang produktif dan layak, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur: Membangun infrastruktur yang tangguh, mendorong industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. Pengurangan Ketimpangan: Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara.
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan: Membuat kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab: Mendorong terciptanya pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
13. Aksi untuk Mengatasi Perubahan Iklim: Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Di Bawah Laut: Melindungi dan melestarikan lautan dan sumber daya laut untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Ekosistem Daratan: Melindungi, memulihkan, dan mendorong pemanfaatan secara berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan serta membalikkan degradasi lahan dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat: Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses kepada keadilan bagi semua, dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif pada semua tingkatan.

17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan: Menguatkan sarana pelaksanaan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

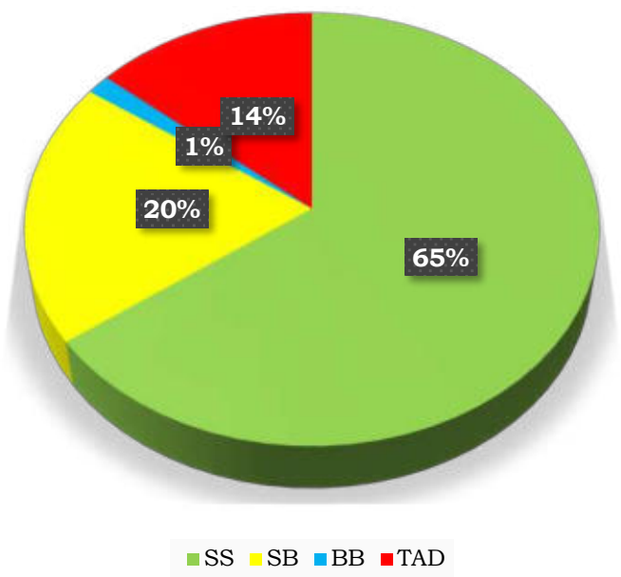
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang kewenangannya di tingkat kabupaten berjumlah sebanyak 220 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dari keseluruhan indikator tersebut dilakukan penapisan sesuai dengan kondisi geografis maupun aspek lainnya sesuai kondisi daerah. Di Kabupaten Sleman terdapat 203 indikator yang relevan dengan kondisi daerah.

Penilaian dan analisis capaian indikator TPB di Kabupaten Sleman akan dijelaskan dalam bagian ini. Terlebih dahulu akan dibahas capaian indikator TPB secara keseluruhan di Kabupaten Sleman. Kategori capaian indikator TPB Kabupaten Sleman berdasarkan hasil analisis data terbagi atas 4 (empat) kategori yaitu: **(SS)** sudah dilaksanakan dan sudah mencapai indikator nasional. **(SB)** sudah dilaksanakan namun belum mencapai indikator nasional, **(BB)** belum dilaksanakan dan belum mencapai indikator nasional, dan **(TAD)** belum ada data. Pencapaian TPB di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.131. Persentase Pencapaian TPB di Kabupaten Sleman

No	Indikator	Jumlah Capaian	Persentase (%)
1	Indikator-SS	132	65
2	Indikator-SB	40	20
3	Indikator-BB	3	1
4	Indikator-TAD	28	14
	Jumlah	203	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, 2024



Sumber: Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, 2024

Grafik 2.100. Persentase Capaian Indikator TPB

Secara umum Kabupaten Sleman sudah sangat baik dalam pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dimana jika dilihat dari persentase capaian TPB untuk indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target memiliki porsi terbanyak sebesar 65% (132 indikator) dari 203 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Sleman. Tantangan yang dihadapi

Kabupaten Sleman kedepan adalah indikator yang memiliki capaian belum mencapai target dan indikator yang tidak ada data, yang memiliki persentase sebanyak 14% (28 indikator) dan 20% (40 indikator) yang diharapkan indikator tersebut dapat mencapai target nasional dan dapat disediakan pada tahun-tahun mendatang.

Tabel 2.132. Capaian Indikator TPB di Kabupaten Sleman

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	SS	SB	BB	TAD	Grand Total	Persentase Capaian (%)
TPB 1. Tanpa Kemiskinan	16	7	0	0	23	69,57
TPB 2. Tanpa Kelaparan	7	2	0	2	11	63,64
TPB 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	22	7	0	5	34	64,71
TPB 4. Pendidikan Berkualitas	8	3	0	2	13	61,54
TPB 5. Kesetaraan Gender	10	1	0	3	14	71,43
TPB. 6 Air Bersih	13	2	0	2	17	76,47
TPB 8. Pertumbuhan Ekonomi	10	6	0	3	19	52,63
TPB 9. Inovasi Industri Infrastruktur	7	2	0	2	11	63,64
TPB 10. Berkurangnya Kesenjangan	5	1	0	1	7	71,43
TPB 11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan	3	4	0	1	8	37,50
TPB 12. Produksi Berkelanjutan	2	0	0	3	5	40,00
TPB 13. Perubahan Iklim	1	1	0	0	2	50,00
TPB 15. Ekosistem Daratan	1	0	1	2	4	25,00
TPB 16. Perdamaian dan Keadilan	17	2	0	2	21	80,95
TPB 17. Kemitraan Berkelanjutan	10	2	2	0	14	71,43
Grand Total	**132**	**40**	**3**	**28**	**203**	**65,02**

Sumber: DLH Kabupaten Sleman, 2024

Jika dilihat dari capaian pada setiap tujuan, persentase capaian terendah ada pada TPB terkait Ekosistem Daratan, Kota dan Permukiman Berkelanjutan, Produksi Berkelanjutan dan Perubahan Iklim. Meninjau dari kondisi ini, Kabupaten Sleman selayaknya sudah memiliki modal baik untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dimana tujuan pada nomor yang lebih kecil umumnya digunakan sebagai tahap dasar untuk mencapai tujuan pada nomor yang lebih besar. Setelah meninjau capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berbasis nomor tujuan, berikutnya telah dianalisis capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berbasis perangkat daerah. Secara keseluruhan terdapat 25 perangkat daerah Kabupaten Sleman yang memiliki kewenangan terhadap capaian indikator TPB. Berikut merupakan rekapitulasi analisis capaian TPB pada masing-masing OPD Kabupaten Sleman.

Tabel 2.133. Capaian TPB Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Sleman

No	OPD	SS	SB	BB	TAD	Jumlah Total Indikator	Persentase Ketercapaian (%)
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2	1	2	1	6	1,52
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	0	0	0	1	0,76

No	OPD	SS	SB	BB	TAD	Jumlah Total Indikator	Persentase Ketercapaian (%)
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3	2	0	0	5	2,27
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	5	0	0	11	4,55
5	Inspektorat	2	0	0	0	2	1,52
6	P3AP2KB	13	7	0	4	24	9,85
7	Perusahaan Daerah Air Minum	0	1	0	0	1	0,00
8	Sekretariat Daerah	2	0	0	0	2	1,52
9	Bagian Organisasi	1	0	0	0	1	0,76
10	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1	0	0	0	1	0,76
11	Badan Pusat Statistik	13	5	0	2	20	9,85
12	Dinas Kesehatan	29	5	0	6	40	21,97
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	1	0	1	3	0,76
14	Dinas Pariwisata	2	1	0	1	4	1,52
15	Dinas Pendidkan	10	3	0	2	15	7,58
16	Dinas Perhubungan	2	0	0	0	2	1,52
17	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	1	0	0	0	1	0,76
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2	0	0	1	3	1,52
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	1	0	0	0	1	0,76
20	Dinas Sosial	6	1	0	1	8	4,55
21	Dinas Tenaga Kerja	7	5	0	0	12	5,30
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	0	0	1	5	3,03
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	8	0	0	0	8	6,06
24	Dinas Lingkungan Hidup	10	2	1	7	20	7,58
25	DPUPKP	5	1	0	1	7	3,79

Sumber: DLH Kabupaten Sleman, 2024

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang paling banyak menjadi pengampu atau pelaksana indikator TPB yaitu sebanyak 40 indikator TPB. Disusul DP3AP2KB sebanyak 24 Indikator, Badan Pusat Statistik dan Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 20 Indikator, dan Dinas Pendidikan sebanyak 15 Indikator. Perangkat daerah yang paling banyak sudah melaksanakan dan sudah mencapai target adalah Dinas Kesehatan yaitu sebanyak 29 Indikator TPB. Di sisi lain, Dinas Kesehatan juga memiliki indikator tidak ada data paling banyak yaitu sebanyak 6 indikator TPB. DP3AP2KB mempunyai 7 Indikator terbanyak untuk kategori Sudah melaksanakan namun belum mencapai target. Bappeda menjadi perangkat daerah yang paling banyak belum melaksanakan dan belum mencapai target indikator sebanyak 2 indikator TPB. Persentase ketercapaian tertinggi diperoleh Dinas Kesehatan sebesar 21,97%, dan ketercapaian terendah terdapat pada Perusahaan Daerah Air Minum sebesar 0,00%.

2.3.2.1.2 Telaah Global Megatrends

Secara global, berbagai daerah di dunia sedang mengalami transformasi signifikan karena pengaruh *global megatrends*. *Megatrends* ini, yang mencakup perubahan besar dalam teknologi, demografi, lingkungan, dan ekonomi global, memiliki dampak langsung terhadap perencanaan pembangunan daerah, terutama dalam penyikapan dalam mempengaruhi target-target jangka menengah – panjang mengingat *global megatrends* menjadi pertimbangan pasca SDGs/TPB. Uraian *global megatrends* serta dampaknya pada Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

A. Digitalisasi dan Transformasi Teknologi:

1. Penjelasan: Perkembangan teknologi digital dan *Internet of Thing*s (IoT) berdampak pada semua sektor kehidupan.
2. Dampak pada Kabupaten Sleman: Digitalisasi memacu Sleman untuk mengembangkan infrastruktur teknologi informasi yang kuat, termasuk jaringan internet berkecepatan tinggi. Perencanaan pembangunan harus memperhatikan peningkatan akses dan keterampilan digital untuk masyarakat, serta mendorong inovasi berbasis teknologi, seperti *smart farming* dan layanan publik digital. Lebih jauh, perlu ada pertimbangan lebih matang dalam kebijakan pengembangan sosial, mengingat proses digitalisasi dan transformasi teknologi tidak hanya berakibat pada struktur perekonomian dan pelayanan tetapi juga berpengaruh pada pembentukan struktur sosial dan bersifat *intergenerational disruptive*.

B. Perubahan Demografi:

1. Penjelasan: Perubahan demografi global, termasuk pertumbuhan populasi, migrasi, dan penuaan penduduk, mempengaruhi kebutuhan akan layanan publik.
2. Dampak pada Kabupaten Sleman: Sleman perlu merencanakan pembangunan yang berfokus pada penyediaan layanan bagi populasi yang semakin tua, seperti layanan kesehatan dan kesejahteraan. Peningkatan migrasi juga memerlukan perencanaan terkait perumahan, infrastruktur transportasi, dan integrasi sosial. Selain pelayanan secara umum, struktur sosial juga perlu ditata kembali untuk mengembangkan konsep produktivitas (secara ekonomi) untuk kelompok masyarakat usia lanjut, antara lain melalui penguatan pengetahuan finansial dan struktur peran *capital ownership* terkait kelompok masyarakat (masyarakat usia lebih muda menyumbang produktivitas melalui kinerja riil, masyarakat usia lanjut menyumbang produktivitas melalui arahan dan penyediaan modal).

C. Perubahan Iklim dan Keberlanjutan

1. Penjelasan: Perubahan iklim global menuntut tindakan berkelanjutan untuk melindungi lingkungan dan masyarakat.
2. Dampak pada Kabupaten Sleman: Kabupaten Sleman harus merencanakan pembangunan yang berkelanjutan, seperti penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang baik, dan mitigasi dampak perubahan iklim. Pengembangan kawasan pertanian yang ramah lingkungan dan ketahanan pangan juga penting. Lebih dalam, konteks perubahan iklim dan keberlanjutan akan selalu membawa pada masalah keadilan lingkungan, bahwa mitigasi perubahan iklim dan upaya

perlindungan keberlanjutan bukan menjadi subjek yang diminati masyarakat, terutama karena output ekonomi secara nominal-riil yang relatif belum diregulasikan dengan baik. Kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian tersandera oleh kebutuhan global ini rawan menjadi kelompok termarginalkan atau korban dari keberlanjutan, kecuali tersedia kesadaran holistik dari sistem ekonomi bahwa valuasi keberlanjutan perlu diadopsi dalam sistem keseimbangan pasar.

D. Ekonomi Global dan Ketidakpastian:

1. Penjelasan: Perubahan ekonomi global dan ketidakpastian ekonomi menuntut fleksibilitas dan adaptasi dalam perencanaan pembangunan.
2. Dampak pada Kabupaten Sleman: Pembangunan Sleman harus mencakup strategi untuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal, seperti mendukung UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong investasi. Diversifikasi ekonomi juga penting untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu. Dalam konteks ketidakpastian dan ekonomi global, satu aspek yang paling penting dipertimbangkan adalah menyediakan *minimum local subsistence* atau kemampuan swadaya minimal. Penyediaan pangan dan kebutuhan dasar selayaknya dipenuhi secara minimal oleh komoditas setempat sehingga ketika terjadi ketidakpastian ekonomi global, subsistensi tetap terjaga dari pemenuhan produksi setempat. Dalam konteks lain, perubahan ekonomi global dan ketidakpastian ekonomi cenderung menuntut tiap-tiap perekonomian memiliki pasar ekonomi cadangan dan memastikan bahwa sektor perekonomian yang dipilih untuk diunggulkan memiliki *economic ketangkasan* yang baik sehingga ketika disrupsi terjadi, akan tetap tersedia peluang untuk peralihan sektor ekonomi.

E. Mobilitas dan Urbanisasi:

1. Penjelasan: Tren urbanisasi dan mobilitas manusia yang semakin cepat berdampak pada struktur kota dan layanan publik.
2. Dampak pada Kabupaten Sleman: Kabupaten Sleman harus merencanakan pengembangan kawasan perkotaan dan pedesaan secara seimbang. Perencanaan transportasi publik, perumahan yang terjangkau, dan fasilitas umum menjadi prioritas penting. Untuk tidak menjatuhkan beban peran ini murni pada Kabupaten Sleman maka sebaiknya terlaksana juga sistem perencanaan perkotaan dan perdesaan yang tepat. Dalam perjalanan pemanfaatan ruang, Kabupaten Sleman dalam koridor Kawasan Perkotaan Yogyakarta memiliki banyak sekali kendala yang bercampur aduk dan menjadikan kondisi pemanfaatan ruang seperti saat ini.

   Kabupaten Sleman adalah salah satu kawasan yang lebih asri dan lebih diminati oleh investor dan pemukim. Kestrategisan ini muncul karena tiga faktor utama, yakni ketersediaan fasilitas pelayanan umum yang lebih lengkap (sekolah, kesehatan, hiburan, dll), ketersediaan infrastruktur (aksesibilitas regional yang cenderung lebih baik, dan jaringan prasarana yang lebih memadai) dan juga keterjangkauan harga lahan jika ditinjau dari daya beli nasional. Poin terakhir ini semakin dipicu oleh lebih rendahnya daya beli masyarakat setempat bila dibandingkan dengan daya beli nasional sehingga kemampuan masyarakat setempat untuk menyediakan hunian umumnya tidak lagi

berada di lokasi perkotaan. Hal lain yang semakin memicu fenomena ini adalah banyaknya Sumber Daya Pendidikan tingkat nasional-internasional yang kemudian menjadikan Kabupaten Sleman "terpantau" oleh pemegang modal tingkat nasional-internasional. Dampak dari kondisi-kondisi tersebut adalah bahwa permukiman di Kabupaten Sleman sangat terpencar-pencar (*leapfrog development* atau pembangunan lompat katak), termarginalkan oleh daya beli rata-rata lokal dengan daya beli nasional-internasional.

Kondisi ini kemudian lebih jauh perlu untuk dipertimbangkan dalam penyediaan mobilitas masyarakat karena sejatinya, pengembangan transportasi perlu adalah kaitan antara ketiga sistem yakni sistem kegiatan (penggunaan lahan), sistem jaringan (ketersediaan jaringan baik jalan, rel maupun udara), dan sistem perangkutan (sistem moda angkutan baik kendaraan pribadi, angkutan umum, jalan kaki, sepeda). Dengan sistem kegiatan yang terbentuk, maka efisiensi dari sistem perangkutan umum berpotensi menjadi lebih rendah sehingga penyediaan angkutan umum oleh pemerintah menjadi kebijakan yang sangat berat dan hampir tidak mungkin dilirik oleh swasta.

Mobilitas regional-internasional juga semakin perlu dipertimbangkan mengingat gaya hidup *digital nomad* telah muncul di beberapa belahan dunia, dengan Indonesia berada di Bali. Gaya hidup nomaden digital ini memberikan keleluasaan dalam bekerja (w*ork from anywhere*) dengan standar sesuai tempat pemberi kerja namun dengan kesempatan bahwa pekerja kemudian membelanjakan pemasukannya di lokasi tempat bermukim saat ini.

Untuk menghadapi tantangan dan peluang yang dihadirkan oleh *megatrends* global ini, Sleman perlu mengadopsi pendekatan perencanaan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan. Koordinasi lintas sektor, partisipasi masyarakat, dan kerja sama dengan berbagai pihak menjadi kunci dalam merespons perubahan dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Sleman.

F. Pertumbuhan Kecerdasan Buatan dan Otomasi

1. Penjelasan**:** Perkembangan pesat dalam kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi mengubah industri, menggeser lapangan pekerjaan, dan menimbulkan pergeseran dalam peran sumber daya manusia.
2. Dampak Potensial**:**
   a. Perubahan Pasar Kerja: Otomatisasi dapat menggantikan pekerjaan manual di sektor pertanian, pariwisata, dan manufaktur. Pemerintah Kabupaten Sleman perlu fokus pada program pelatihan dan pendidikan vokasi untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dan mempersiapkan mereka untuk pekerjaan masa depan.
   b. Peluang Pertumbuhan Ekonomi Baru: AI dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, seperti pengelolaan lalu lintas, pertanian cerdas, dan pariwisata berbasis data.

G. Pergeseran Geopolitik

1. Penjelasan**:** Meningkatnya ketegangan geopolitik, perang dagang, dan kebangkitan nasionalisme menciptakan ketidakpastian dan ketidakstabilan dalam ekonomi global.

2. Dampak Potensial**:**
    a. Kerentanan Ekonomi: Perubahan kebijakan perdagangan internasional dapat berdampak pada sektor ekspor Kabupaten Sleman, seperti kerajinan tangan dan produk pertanian.
    b. Pentingnya Diversifikasi Ekonomi: Penting untuk mengembangkan sektor ekonomi lokal yang lebih beragam dan mandiri, mengurangi ketergantungan pada ekspor.

2.3.2.2 Isu Strategis Tingkat Nasional

Isu strategis tingkat nasional akan membahas mengenai telaah RPJPN, RPJMN dan peraturan perundangan yang membahas mengenai Proyek Strategis Nasional. RPJPN dan RPJMN menjadi penting dipertimbangkan untuk diterjemahkan sebagai potensi dukungan di tingkat nasional sekaligus pandangan terhadap potensi internal maupun tantangan dari luar. Sementara peraturan mengenai Proyek Strategis Nasional dianggap esensial untuk memberikan gambaran kegiatan di level nasional yang akan memberikan dampak bagi Kabupaten Sleman dan kawasan sekitarnya.

2.3.2.2.1 Telaah RPJPN Tahun 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 menitikberatkan pada adanya prestasi pertumbuhan pendapatan per kapita yang meningkat dengan pesat, penurunan kemiskinan dan ketimpangan, pengaruh dan kepemimpinan Indonesia yang meningkat di kancah internasional, daya saing sumber daya manusia yang semakin baik serta emisi gas rumah kaca yang semakin menurun. Sementara isu dan tantangan pembangunan ke depan disampaikan berupa:

1. Produktivitas rendah
2. IPTEKIN dan riset lemah
3. Deindustrialisasi dini
4. Pariwisata di bawah potensinya
5. Ekonomi laut belum optimal
6. Kontribusi UMKM dan koperasi kecil
7. Infrastruktur dan literasi digital rendah
8. Pembangunan belum berkelanjutan
9. Integrasi domestik terbatas
10. Kualitas SDM yang makin rendah
11. Tata kelola pemerintahan yang belum optimal
12. Kepastian dan penegakan hukum yang masih lemah
13. Demokratisasi belum optimal
14. Kesenjangan Jawa dan luar Jawa

Dari isu dan tantangan yang disampaikan di atas, relevansi dengan Kabupaten Sleman cukup tinggi. Tiga poin yang tidak relevan dengan Kabupaten Sleman adalah poin 5, poin 6 dan poin 14.

Pertimbangan dalam perencanaan jangka panjang pada RPJPN meliputi megatren, modal dasar Indonesia serta perubahan iklim, daya tampung dan daya dukung. Adanya megatren skala global telah menjadi pertimbangan dalam penyusunan RPJPN, untuk itu pemerintah daerah juga hendaknya memiliki pertimbangan terhadap tren tersebut. Modal dasar Indonesia disampaikan berupa modal kependudukan, modal sosial dan budaya, modal kekayaan alam dan modal kelautan maritim. Modal kependudukan berupa jumlah penduduk yang diproyeksi sejumlah 324 juta jiwa pada tahun 2045. Modal sosial budaya

berupa gotong royong, musyawarah mufakat, kekeluargaan, solidaritas sosial dan kesukarelawanan, jiwa berdikari serta keragaman budaya. Modal kekayaan alam yang relevan dengan Kabupaten Sleman berupa kehutanan dan keanekaragaman hayati. Kondisi perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung yang relevan dengan Kabupaten Sleman telah tercermin dalam muatan bab sebelumnya, dimana daya dukung dan daya tampung mengalami penurunan dan perubahan iklim lambat laun akan menggeser kondisi klimatologi sehingga perlu ada proses adaptasi terhadap perubahan-perubahan ini.

Visi Indonesia Emas 2045 yaitu NKRI yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Indonesia Bersatu pada Tahun 2045, dengan wujud kesatuan yang lebih kuat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, sesuai dengan UUD 1945. Keragaman budaya, bahasa, dan adat istiadat serta elemen lainnya akan dipersatukan oleh identitas nasional dan Pancasila sebagai dasar negara. Pembangunan ekonomi akan dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan kesejahteraan seluruh rakyat, dengan kebijakan ekonomi nasional yang menciptakan pemerataan dan keadilan sosial, untuk mewujudkan keseimbangan dan kesetaraan sehingga timbul kesatuan yang kuat di seluruh wilayah Indonesia.

Indonesia Berdaulat yaitu sebagai Indonesia yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayahnya. Berdaulat dalam arti berketahanan, memiliki kesatuan yang baik, mandiri dan aman baik secara internal maupun eksternal.

Indonesia Maju yaitu pada tahun 2045, Indonesia sebagai negara maju, perekonomiannya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang bertumpu pada nilai budaya Indonesia. Indonesia menjadi negara beradab, berkarakter, berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil, sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Indonesia Berkelanjutan yaitu pada tahun 2045, Indonesia berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi dan berkualitas, seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik.

Sasaran utama dari RPJPN 2025-2045 adalah:
1. Pendapatan per kapita setara negara maju
2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat
5. Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*

Kerangka perwujudan visi ini melalui delapan Misi Pembangunan 2045 yang bertemakan transformasi:
1. Transformasi Indonesia
    a. Transformasi Sosial
    b. Transformasi Ekonomi
    c. Transformasi Tata Kelola
2. Landasan Transformasi
    a. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

b. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
3. Kerangka Implementasi Transformasi
   a. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
   b. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
   c. Kesinambungan Pembangunan

Tiga belas upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) untuk kerangka suplementasi Transformasi Indonesia adalah sebagai berikut:

Transformasi Sosial
1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) serta efektivitas pengalokasian dan pemanfaatan anggaran wajib pendidikan.
2. Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan.
3. Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan.
4. Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan *stunting*, serta eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta).
5. Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi

Transformasi Ekonomi
6. Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh Industri.
7. Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor.
8. Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau.
9. Superplatform untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital.
10. Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi.
11. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Transformasi Tata Kelola
12. Transformasi manajemen ASN (terutama sistem penggajian tunggal dan pensiun), pemberantasan korupsi, dan pembentukan lembaga pengelola tunggal regulasi.
13. Penguatan tata kelola partai politik.

Tujuh upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) untuk Landasan Transformasi adalah sebagai berikut:

Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
1. Transformasi Sistem Penuntutan menuju *Single Prosecution System* dan Transformasi lembaga Kejaksaan sebagai *Advocaat Generaal*.
2. Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional.
3. Transformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi perencanaan dan fiskal.

4. Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
5. Penguatan karakter dan jati diri bangsa.
6. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.
7. Ketahanan energi dan air serta kemandirian menuju kedaulatan pangan dengan pendekatan terpadu FEW *nexus* (*food, energy, water*)

Pentahapan dari perwujudan Indonesia Emas 2045 diskenariokan untuk diawali dengan upaya penguatan landasan transformasi yang kemudian diakselerasi, diekspansi secara global hingga pencapaian Indonesia Emas pada 2045.

2.3.2.2.2 Telaah RPJMN Tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menjadi fondasi kuat bagi pemerintah daerah dalam merumuskan RPJMD. Dokumen ini memberikan kerangka acuan yang jelas bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Dengan demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan di daerah akan selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Dokumen ini menjadi landasan yang kuat bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah yang lebih terarah dan efektif.

Transformasi ekonomi Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti deindustrialisasi, rendahnya produktivitas tenaga kerja, dan kompleksitas produk. Sektor pariwisata perlu perhatian terhadap degradasi lingkungan dan amenitas, sedangkan ekonomi kreatif membutuhkan peningkatan dalam sistem kekayaan intelektual dan daya saing. Dalam sektor ekonomi biru, fokus pada produktivitas dan pembangunan berkelanjutan sangat penting. Keterkaitan UMKM dengan rantai nilai produksi dan penggunaan teknologi juga perlu ditingkatkan. Kepemimpinan yang berkualitas dan supremasi hukum yang kuat sangat penting dalam proses transformasi ini. Rencana pembangunan mencakup pengembangan energi terbarukan, infrastruktur, dan promosi pariwisata yang berkelanjutan, dengan tujuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan keberagaman budaya.

Poin-poin utama yang perlu diperhatikan dalam RPJMN ini antara lain:
1. Tantangan utama transformasi ekonomi Indonesia termasuk deindustrialisasi dini dan rendahnya produktivitas.
2. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memerlukan perhatian khusus untuk meningkatkan kualitas dan daya saing.
3. Keterkaitan UMKM dengan rantai nilai produksi masih lemah dan memerlukan peningkatan teknologi.
4. Kepemimpinan yang visioner dan integritas dalam pemerintahan sangat penting untuk mendorong perubahan positif.
5. Kebijakan dan regulasi perlu direvisi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pembangunan.

Arahan spesifik RPJMN bagi DIY sebagai provinsi yang menaungi Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:
1. Penuntasan dan pencegahan *stunting;*
2. Penguatan pendidikan tinggi STEAM dan inovasi bertaraf global;
3. Pengembangan kepariwisataan terutama pada Kawasan Prioritas Pariwisata Nasional Prambanan-Kalasan, Perkotaan Yogyakarta, dan Merapi-Merbabu;

4. Penguatan produktivitas industri padat karya terampil di Kawasan Perkotaan Yogyakarta;
5. Pembangunan Tol Trans Jawa, baik pada ruas Bawen-Yogyakarta-YIA dan Kartasura-Yogyakarta;
6. Pengembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum di Kawasan Perkotaan Yogyakarta;
7. Penguatan infrastruktur perkotaan Metropolitan Yogyakarta, antara lain melalui penguatan infrastruktur perkotaan Metropolitan Yogyakarta, *city beautification* dalam rangka membangun citra, karakter dan *dignity* kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata *urban tourism;*
8. Penguatan tata kelola dan kelembagaan perkotaan di Metropolitan Yogyakarta;
9. Pengaturan kembali dan penyempurnaan pelaksanaan Otonomi Khusus Yogyakarta;
10. Pengendalian inflasi dengan prioritas di Kota Yogyakarta;
11. Optimalisasi penanganan sampah domestik di hulu dan hilir, serta penerapan ekonomi sirkular;
12. Peningkatan sistem pemantauan kualitas udara di Kawasan Perkotaan Yogyakarta;
13. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air;
14. Perlindungan dan pelestarian warisan budaya terutama warisan dan cagar budaya pada Kawasan Prioritas Pariwisata Nasional Prambanan – Kalasan; dan
15. Pembangunan dan konservasi sumber daya air pada DAS Progo dan DAS Opak.

Pada pengembangan Kawasan Perkotaan Prioritas, Kabupaten Sleman sebagai bagian dari Kawasan Perkotaan Yogyakarta juga mendapatkan peran sebagai berikut:

1. Pengembangan/pemenuhan sarana dan prasarana transportasi angkutan umum hijau perkotaan (*green public transport*) dengan pemenuhan amenitas perkotaan (antara lain ruang terbuka hijau, ruang terbuka publik, jalur pedestrian, landmark kota);
2. Urban renewal/penataan kawasan, terutama dalam rangka pengembangan TOD atau peningkatan fungsi kawasan dengan penyediaan hunian layak huni vertikal perkotaan dan penataan permukiman kumuh perkotaan;
3. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan perkotaan;
4. Percepatan revisi/penyesuaian/penyusunan rencana tata ruang (RTR), rencana detail tata ruang (RDTR), dan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL)/panduan rancang kota (PRK) kawasan perkotaan prioritas, serta penyusunan masterplan kawasan perkotaan prioritas;
5. Penguatan pengelolaan dan kelembagaan kawasan perkotaan, termasuk penguatan kolaborasi multi pihak dalam pembiayaan pembangunan perkotaan;
6. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui peningkatan kelas rumah sakit regional;
7. Pengembangan/peningkatan perguruan tinggi akademik/vokasi STEAM, termasuk pengembangan program studi pada rumpun ilmu kesehatan;
8. Pengembangan sekolah menengah unggul terintegrasi; dan
9. Pengembangan pusat-pusat agropolitan sebagai kota pengembangan pangan dan agrikultur terintegrasi hulu-hilir dan menjadi *logistic hub* guna akses ke pasar

Adapun peran Kabupaten Sleman sebagai kontributor dalam swasembada pangan di DIY juga mendapatkan beberapa arahan dari RPJMN. Untuk mencapai swasembada pangan, diperlukan peningkatan produktivitas pertanian padi dan komoditas pangan lainnya (hortikultura, peternakan, perkebunan), antara lain melalui:

1. Pendekatan pengembangan pertanian holistik closed loop model;
2. Pengelolaan dengan sistem *integrated farm management* yang modern dan *digitalized*; dan
3. Penyediaan irigasi dan/atau irigasi presisi/*smart irrigation* sesuai kebutuhan komoditas.

Untuk penguatan kepariwisataan dan ekonomi kreatif unggulan, diperlukan pengembangan ekosistem dan destinasi kepariwisataan holistik 6A (*attractions, accesibilities, amenities, available packages, activities, ancillary services*) guna mewujudkan *quality & sustainable tourism* sesuai klasterisasi keunggulan aktivitas kepariwisataan. Strategi yang digunakan di Kabupaten Sleman antara lain adalah pengembangan koridor Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Merapi-Merbabu dan sekitarnya dan KSPN Prambanan-Kalasan dan sekitarnya (dengan aktivitas utama cagar budaya, wisata alam, dan agrowisata). Selain itu, dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dilakukan strategi penguatan ekonomi lokal berbasis ekonomi hijau pada Kawasan konservasi/rawan bencana di Taman Nasional Merbabu-Merapi.

2.3.2.2.3 Telaah Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian mengenai Proyek Strategis Nasional

Dalam pembangunan Kabupaten Sleman, perlu diperhatikan juga kebijakan-kebijakan strategis nasional yang berpotensi turut mengubah tataran kebijakan lokal, sebagaimana Proyek Strategis Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional yang diperbaharui oleh Peraturan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Nomor 12 Tahun 2024. Proyek Strategis Nasional ini merupakan elemen yang dapat mengubah salah satu kebijakan induk lokal jangka panjang yakni Rencana Tata Ruang dimana kebijakan Proyek Strategis Nasional ini termasuk dalam perubahan lingkungan strategis yang dapat menjadi pertimbangan pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang.

Berdasarkan daftar Proyek Strategis Nasional yang terdapat dalam peraturan menteri koordinator bidang ekonomi yang telah disebutkan, terdapat enam Proyek Strategis Nasional yang penting untuk dipertimbangkan sebagai dinamika eksternal. Enam Proyek Strategis Nasional tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jalan Tol Yogyakarta – Bawen
   Jalan Tol ini telah melalui proses pembebasan lahan dan saat ini sedang berada dalam proses konstruksi. Pembangunan jalan tol ini melintasi wilayah Sleman Barat dengan posisi berada di sekitar Jaringan Irigasi Selokan Mataram. Dengan dua pintu tol yang berada di Banyurejo dan Trihanggo, pembangunan jalan tol ini perlu menjadi pertimbangan isu regional.
2. Jalan Tol Solo – Yogyakarta – Kulon Progo
   Seperti halnya Jalan Tol Yogyakarta – Bawen, Jalan Tol Solo – Yogyakarta – Kulon Progo sudah melewati masa pembebasan lahan. Untuk proses

pembangunan, sudah dimulai meskipun masih tertinggal dibandingkan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen dimana Jalan Tol Yogyakarta – Kulon Progo belum terlihat proses pembangunannya. Jalan Tol ini akan memiliki pintu tol di Maguwoharjo dan Bokoharjo di sisi timur Kota Yogyakarta, serta pintu tol Ambarketawang di sisi barat Kota Yogyakarta. Ketiga lokasi ini perlu dipertimbangkan sebagai isu regional.

3. Bandar Udara Baru Yogyakarta – Kulon Progo
   Bandar Udara Baru Yogyakarta ini berlokasi di Kabupaten Kulon Progo. Bandar ini tidak memberikan dampak langsung melainkan memberikan dampak tidak langsung berupa penurunan tingkat pelayanan Bandara Adisucipto yang terdapat di Kabupaten Sleman.
4. Kereta Api Bandar Udara Baru Yogyakarta – Kulon Progo
   Kereta api ini telah berjalan dan melayani rute Stasiun Tugu – Wates – YIA. Masih terdapat potensi pengembangan stasiun yang diakses menuju bandara ini.
5. Double Track Jawa Selatan
   Double Track Jawa Selatan telah terbangun dan cenderung tidak banyak memberikan dampak selain meningkatkan volume pergerakan regional.
6. Pembangunan Jaringan Gas Kota
   Pembangunan jaringan gas perkotaan tidak secara eksplisit disampaikan di Kabupaten Sleman, tetapi posisi Kabupaten Sleman sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional Kawasan Perkotaan Yogyakarta perlu untuk dipertimbangkan mendapatkan peran jaringan ini, terutama mengingat perkembangan di Kabupaten Sleman yang cenderung pesat dibandingkan seluruh Kawasan Perkotaan Yogyakarta.

Pembangunan jalan tol seperti yang disebutkan di atas dapat memberikan peningkatan volume pergerakan dan menjadi infrastruktur penguat perekonomian. Di sisi lain, peningkatan aksesibilitas ini akan semakin meningkatkan aksesibilitas Kabupaten Sleman pada tataran Pulau Jawa. Dengan peran Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang sebagian berada di Kabupaten Sleman sebagai kawasan pendidikan tingkat internasional, tekanan terhadap kondisi lingkungan dan kondisi sosial akan terus meningkat. Perekonomian berpotensi untuk meningkat jika terdapat pengelolaan yang baik, terutama pengelolaan daya saing sumber daya manusia untuk bisa bersaing pada level nasional-internasional. Perubahan kondisi daya saing sumber daya manusia ini yang memang membutuhkan banyak pertimbangan, baik dari sisi budaya dimana Kabupaten Sleman masih termasuk dalam provinsi yang memiliki keistimewaan yang perlu dipertahankan hingga sisi finansial semisal dari aspek daya beli masyarakat.

Pembangunan bandar udara baru dan pelayanan kereta apinya perlu dipertimbangkan dalam dua arah yakni reorientasi pergerakan nasional-internasional serta penempatan ulang peran wilayah sekitar Bandara Adisucipto yang direncanakan hanya melayani pergerakan transportasi udara skala tertentu. Pelayanan kereta api bandara juga perlu dipertimbangkan dimana terdapat Stasiun Maguwoharjo yang telah melayani pergerakan untuk ke Bandara Adisutjipto yang nantinya dapat direorientasikan ke Bandara Yogyakarta Internatinal Airport (YIA) dan terdapat juga stasiun dan Stasiun Patukan yang saat ini tercakup dalam Kawasan Perkotaan Yogyakarta namun belum diberi peran memadai terkait pergerakan menuju YIA. Pertimbangan lainnya adalah tentang amenitas pariwisata yang cenderung akan terkonsentrasi

di sekitar stasiun pelayanan Bandara YIA ini dan membatasi pelayanan amenitas pariwisata di wilayah Kabupaten Sleman yang sebelumnya mendapatkan peran di Stasiun Maguwoharjo.

Pembangunan jaringan gas perkotaan dinilai akan memberikan dampak baik positif maupun negatif yang besar. Ketersediaan jaringan gas adalah salah satu bentuk amenitas perkotaan yang dianggap modern dan mampu menjadi insentif besar bagi perkembangan *real estate*, baik untuk fungsi hunian maupun sebagai fungsi komersial – perkantoran. Dengan posisi Kabupaten Sleman yang tercakup dalam Kawasan Perkotaan Yogyakarta, pembangunan jaringan gas perkotaan ini akan menjadi faktor esensial dalam menentukan modernitas perkembangan kawasan.

2.3.2.3 Isu Strategis Tingkat Provinsi

2.3.2.3.1 RPJPD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045 dan RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027

DIY memiliki peran strategis sebagai salah satu pusat pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata di Indonesia. Namun, di balik keunggulan tersebut, DIY juga menghadapi sejumlah isu regional yang memengaruhi pembangunan di tingkat kabupaten/kota. Isu-isu strategis yang dihadapi mencerminkan tantangan lintas sektor. Isu strategis dalam lingkup regional ditelaah dari RPJMD DIY 2022-2027 dan RPJPD DIY 2025-2045.

Secara lebih mendalam, isu strategis regional DIY yang relevan dengan kondisi Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

1. Reformasi Kalurahan dan Percepatan Pembangunan Pedesaan

   Kemajuan desa/kalurahan di DIY menunjukkan perkembangan signifikan berdasarkan penilaian Indeks Desa Membangun (IDM), yang mengukur kemandirian desa melalui tiga dimensi: ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi. Ranking IDM DIY masih di posisi atas. Jumlah desa mandiri bertambah signifikan, sementara desa tertinggal telah hilang. Namun, tantangan masih ada, seperti tingkat kemiskinan yang lebih tinggi di wilayah pedesaan dibandingkan perkotaan. Kesenjangan pembangunan ini menegaskan perlunya percepatan pembangunan pedesaan. Intervensi yang dilakukan Pemerintah Daerah DIY sering terkendala oleh kelembagaan kalurahan yang kurang optimal, seperti lemahnya akuntabilitas, rendahnya kualitas SDM, dan belum maksimalnya pemanfaatan teknologi.

2. Perkembangan teknologi informasi

   Perekonomian DIY memiliki struktur yang didominasi oleh sektor pertanian dan industri pengolahan, dengan kontribusi besar juga dari informasi dan komunikasi**,** akomodasi dan makan minum, serta konstruksi. Sektor pertanian tidak hanya menjadi penopang utama ekonomi tetapi juga menyerap tenaga kerja terbanyak, diikuti oleh perdagangan dan industri pengolahan. Meskipun demikian, sektor perdagangan dan industri pengolahan mengalami penurunan serapan tenaga kerja, sedangkan sektor jasa akomodasi dan pendidikan menunjukkan pertumbuhan positif.

   Dari segi teknologi, revolusi industri 4.0 membuka peluang besar bagi DIY untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Namun, tantangan signifikan muncul, terutama dalam adaptasi teknologi di sektor industri kecil dan mikro yang masih didominasi tenaga kerja berpendidikan rendah dan balas jasa rendah. Di sektor pertanian, penggunaan mekanisasi dan teknologi

masih minim (44,56% belum menggunakan teknologi), dengan rendahnya keterlibatan generasi muda.

Di sisi lain, literasi digital di DIY terus meningkat. Lebih dari 70% penduduk menggunakan internet, didukung dengan tingginya transaksi uang elektronik. Namun, terdapat kesenjangan literasi antara kawasan perkotaan dan pedesaan, yang perlu dijembatani untuk mendukung petani meningkatkan nilai tambah produk melalui teknologi.

3. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia

   Generasi Milenial, Z, dan X mendominasi kelompok usia produktif, menjadi potensi percepatan pertumbuhan ekonomi. Pengangguran lebih tinggi di perkotaan, terutama di kalangan berpendidikan tinggi. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan, meskipun didominasi oleh pekerja berpendidikan SD ke bawah.

   DIY berada pada posisi medium dari 34 provinsi dalam indeks daya saing nasional. Aspek unggulan meliputi kualitas hidup dan infrastruktur, serta adanya kesetaraan gender yang ditunjukkan dengan IDG yang semakin meningkat. Aspek terbaik adalah peran perempuan sebagai tenaga profesional. Faktor pendukung peningkatan IDG mencakup program pendidikan, peningkatan kompetensi perempuan, dan sinergi antar lembaga. Hambatan utama mencakup budaya patriarki dan implementasi regulasi yang belum optimal.

   Stunting menjadi salah satu masalah kesehatan utama di DIY. Prevalensi *stunting* di DIY masih di bawah Nasional, tetapi masih di atas target nasional 2024 sebesar 14%. Penanganan *stunting* memerlukan upaya kolaboratif lintas sektor karena bersifat multidimensi. Pemerintah telah menetapkan *stunting* sebagai Proyek Strategis Nasional dalam RPJMN 2020-2024 untuk memastikan penurunan prevalensi secara efektif dan efisien.

4. Percepatan penanggulangan kemiskinan

   Kemiskinan masih menjadi isu utama pembangunan di DIY. Pemerintah Daerah DIY menetapkan 15 lokus kapanewon prioritas untuk penanganan kemiskinan, mencakup wilayah di Kulon Progo, Bantul, Sleman, dan Gunungkidul. Sesuai Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2019, strategi penanggulangan kemiskinan mencakup perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pemenuhan akses terhadap sumber daya.

   Program-program penanggulangan meliputi bantuan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, pelatihan keterampilan, pengelolaan usaha mikro, pemberdayaan perempuan, akses air bersih, sanitasi, listrik, infrastruktur pemasaran, dan pinjaman modal murah. Dengan pendekatan berbasis lokus dan individu, diharapkan jumlah penduduk miskin dapat berkurang secara signifikan.
   Pemda DIY juga fokus pada penghapusan kemiskinan ekstrem, menargetkan angka 0% pada 2024 sesuai Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022. Empat kabupaten di DIY menjadi prioritas Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) menggunakan data desil 1–4. Program ini diintegrasikan melalui APBN, APBD, APBDes, dan anggaran nonpemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2023. Langkah-langkah ini bertujuan memastikan intervensi yang efektif dalam mengurangi kemiskinan ekstrem di DIY.

5. Upaya pemajuan kebudayaan

   Kebudayaan merupakan urusan penting dalam keistimewaan DIY sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Meskipun DIY meraih IPndeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang tinggi, mempertahankan status tersebut memerlukan koordinasi dan konsolidasi agar nilai budaya dapat diterapkan dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Penguatan kebudayaan diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat posisi DIY sebagai pusat kebudayaan.

   Beberapa langkah yang perlu dilakukan termasuk mengembalikan tata nilai budaya Yogyakarta yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, menguatkan nilai kebudayaan yang terpengaruh oleh perubahan zaman, serta mengembangkan nilai-nilai keistimewaan budaya DIY untuk menjawab tantangan masa depan. Dalam jangka panjang, kebudayaan di DIY diarahkan pada empat target utama:
   a. Yogyakarta sebagai City of Philosophy dengan identitas budaya maju, unggul, dan berbudaya.
   b. Pencapaian kedaulatan pangan dengan karakter kultur pangan berkelanjutan.
   c. Peningkatan budaya kerja tinggi dengan dukungan komponen desa/kalurahan untuk kesejahteraan rakyat.
   d. Pengembalian budaya maritim sebagai budaya bangsa.

   Kebudayaan juga harus dipandang sebagai kekuatan substansial masyarakat, bukan sekadar komoditas. Dalam beberapa tahun ke depan, pemajuan kebudayaan akan difokuskan pada:
   a. Pariwisata: Kebudayaan dan pariwisata saling mendukung untuk pelestarian dan promosi kebudayaan lokal.
   b. Pendidikan Karakter: Internalisasi nilai-nilai Pancasila dan penguatan pendidikan berbasis budaya.
   c. Pemberdayaan Masyarakat: Penguatan desa/kalurahan sebagai basis pemberdayaan ekonomi, sosial, dan budaya, serta peningkatan kapasitas SDM melalui etos solidaritas dan kolegialitas.

   Dengan mengintegrasikan kebudayaan dalam pembangunan, DIY diharapkan dapat menjadi kota ramah dan mandiri, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi lokal dan budaya maritim.

6. Mitigasi Bencana dan adaptasi perubahan iklim

   Perubahan iklim merujuk pada perubahan jangka panjang dalam pola cuaca dan intensitas iklim, seperti suhu dan curah hujan, yang berdampak luas pada berbagai sektor kehidupan manusia. Penyebab utama perubahan iklim adalah efek rumah kaca, dimana gas-gas seperti karbondioksida (CO_2) menahan panas matahari, mengakibatkan peningkatan suhu bumi. Dampaknya mencakup peningkatan suhu, perubahan curah hujan yang ekstrem (seperti banjir dan kekeringan), kerusakan terumbu karang, serta pergeseran musim yang memengaruhi sektor pertanian. Perubahan iklim juga dapat memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan angin kencang.

   DIY yang memiliki sektor pertanian yang dominan, perubahan iklim mengarah pada zona yang lebih kering, yang dapat menurunkan kualitas kesuburan tanah dan mengurangi produktivitas pertanian. Fenomena ENSO

(El Niño dan La Niña) juga mempengaruhi pola cuaca, yang dapat menyebabkan kekeringan atau hujan ekstrem. Untuk mengurangi dampak perubahan iklim ini, Indonesia, termasuk DIY, berkomitmen untuk melakukan mitigasi melalui berbagai peraturan dan tindakan, seperti pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor lahan, energi, dan pengelolaan limbah.

Adaptasi terhadap perubahan iklim penting untuk mengurangi kerentanannya. Beberapa langkah adaptasi yang dilakukan termasuk peningkatan layanan kesehatan terkait penyakit yang dipengaruhi iklim, seperti malaria, serta perbaikan sistem pengairan dengan pendekatan berbasis ekosistem. Selain itu, sistem produksi pangan juga perlu disesuaikan, misalnya dengan mengubah pola tanam dan memperkenalkan tanaman lokal untuk mengatasi dampak perubahan iklim.

7. Kesesuaian pemanfaatan ruang

   Selama periode 2019-2021, peningkatan ketidaksesuaian terlihat pada pola ruang sempadan sungai, lahan pangan beririgasi, dan lahan pangan tidak beririgasi. Hal ini disebabkan oleh perubahan pemanfaatan ruang di wilayah-wilayah tersebut menjadi kawasan permukiman, yang tidak sesuai dengan arahan peruntukan zonasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kawasan Industri menjadi sektor yang paling dominan, dengan 63,74% dari peruntukannya belum terwujud. Faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah kurangnya jumlah investor yang masuk dan infrastruktur yang belum optimal. Kesesuaian pemanfaatan ruang yang belum optimal ini juga ditandai dengan berkurangnya RTH publik dan semakin menurunnya area terbuka hijau yang beralih fungsi menjadi lahan terbangun, yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

8. Kualitas lingkungan hidup

   Kualitas lingkungan hidup di DIY menunjukkan penurunan yang tercermin dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya kualitas air yang menurun akibat pencemaran domestik dan pertanian. Ketersediaan air di berbagai DAS di DIY menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pasokan dan kebutuhan, meskipun secara keseluruhan ketersediaan air lebih dari cukup. Namun, suplai air di beberapa lokasi tidak mencukupi kebutuhan pada waktu tertentu. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan ketersediaan air setempat atau mencari sumber suplai dari wilayah lain. Kualitas tutupan hutan dan lahan di DIY juga mengalami penurunan.

   Terkait lahan kritis, luas lahan kritis di Kabupaten Sleman tahun 2024 sebesar 1.276,37 Ha. Penanganan lahan kritis dilakukan dengan penanaman pohon per tahun sejumlah 1.900-2.200 bibit tanaman (2 Ha per tahun, dengan asumsi satu pohon luas tajuk 5 m^2), sehingga persentase penanganannya kecil. Dan penanganan lahan kritis baru mencapai 3,47% dari total lahan kritis yang ada.

   Penegakan hukum lingkungan hidup di DIY masih rendah. Penanganan sampah dan limbah B3 juga belum optimal. TPA Piyungan sudah habis masa teknisnya dan kapasitasnya terbatas, sehingga diperlukan langkah pengurangan volume sampah atau pengembangan sel baru untuk pengolahan sampah.

9. Pengelolaan Taman Bumi DIY

Lebih jauh, terdapat isu strategis tingkat provinsi yang memerlukan perhatian besar bagi perencanaan RPJMD Kabupaten Sleman yakni kehadiran taman bumi (*geopark*). Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 71 tahun 2022 tentang Pengelolaan Taman Bumi (*Geopark)* di DIY, Taman Bumi adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi (Geosite) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi (Geoheritage), Keragaman Geologi (Geodiversity), Keanekaragaman Hayati (Biodiversity), dan Keragaman Budaya (Cultural Diversity), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten/kota, serta pihak lain yang melakukan aktivitas pengelolaan situs warisan bumi, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya. Taman Bumi ini nantinya akan memberikan pengaruh bagi pengembangan wilayah, baik dari sisi fungsi lindung alami maupun dari sisi pariwisata – budaya.

Taman Bumi yang berada di Kabupaten Sleman meliputi:

1. Kompleks Perbukitan Intrusi Godean, di Kapanewon Godean
2. Kompleks Batuan Merapi Tua Turgo – Plawangan di Kapanewon Pakem
3. Aliran Piroklastik Bakalan di Kapanewon Cangkringan
4. Tebing Breksi Piroklastik Purba Sambirejo di Kapanewon Prambanan
5. Rayapan Tanah Nglepen di Kapanewon Prambanan
6. Lava Bantal Berbah di Kapanewon Berbah
7. Batugamping Eosen di Kapanewon Gamping

Biosite

8. Taman Nasional Gunung Merapi – Segmen Sleman
9. Cagar Alam Batu Gamping di Kapanewon Gamping
10. Taman Wisata Alam Batu Gamping di Kapanewon Gamping

Culturesite

11. Labuan Merapi, Warisan Budaya nir-benda di Kapanewon Cangkringan

Geodiversity Site

12. Kekar Kolom Lava Watu Grojogan Kalikuning di kapanewon Cangkringan
13. Danau Purba di Kapanewon Minggir dan
14. Watu Kapal di Kapanewon Berbah yang bersandingan dengan wilayah Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul.

Pengelolaan Taman Bumi di DIY mengacu pada area program pengembangan UNESCO *Global Geopark* yaitu:

1. Konservasi geologi
2. Sumber daya alam
3. Bencana geologi
4. Perubahan iklim
5. Pendidikan
6. Ilmu Pengetahuan
7. Budaya
8. Perempuan
9. Pembangunan Berkelanjutan; dan
10. Pengetahuan lokal dan adat

Pendanaan pengelolaan Taman Bumi di DIY dapat bersumber dari APBN, APBD DIY, APBD Kabupaten, APBDesa dan sumber lain yang sah. Pengelolaan Taman Bumi dilakukan melalui kelembagaan Komite *Geopark* DIY. Kabupaten Sleman mendapat amanat untuk membentuk Forum *Geoheritage* Kabupaten Sleman sebagai bagian dari Komite *Geopark* DIY yang mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan dan pemantauan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Geosite di tingkat Kabupaten, serta pelaksanaan koordinasi dan integrasi Pengelolaan Geosite.

2.3.2.3.2 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki status istimewa, tidak hanya dari segi pemerintahan, tetapi juga dari sisi sejarah, budaya, dan identitas masyarakatnya. Keistimewaan DIY diakui secara hukum melalui Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menegaskan posisi unik provinsi ini dalam struktur pemerintahan Indonesia. Selain itu Grand Design Keistimewaan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 Tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 merupakan haluan, arahan, dan pedoman pelaksanaan urusan keistimewaan DIY yang dapat digunakan oleh berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan arah kebijakan, strategi, dan pokok program keistimewaan sesuai dengan tujuan keistimewaan, dalam hal ini termasuk Pemerintah Kabupaten Sleman. Selain itu, berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penugasan Urusan Keistimewaan maka Kabupaten Sleman menjadi salah satu Kabupaten yang diberi Amanah untuk menjalankan Urusan Keistimewaan. Pelaksanaan kewenangan dan penugasan Urusan Keistimewaan kepada Kabupaten menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan. Adapun penugasan Urusan Keistimewaan meliputi:

1. Urusan Kelembagaan

   Urusan keistimewaan kelembagaan dapat ditugaskan, meliputi:
   a. penyusunan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, tata laksana, pola hubungan, beban kerja, nomenklatur untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana), (Kapanewon), dan Pemerintah Kalurahan;
   b. penyusunan regulasi untuk pelaksanaan tugas Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
   c. pengelolaan sumber daya manusia;
   d. peningkatan budaya pemerintahan; dan
   e. penyediaan sarana dan prasarana penunjang program/kegiatan urusan keistimewaan kelembagaan.

2. Urusan Kebudayaan

   Urusan keistimewaan kebudayaan dapat ditugaskan, meliputi:
   a. perumusan dan penetapan regulasi /kebijakan pemeliharaan dan pengembangan objek kebudayaan secara rinci peringkat kabupaten/kota atau dalam wilayah kabupaten/kota;
   b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pemeliharaan dan pengembangan objek kebudayaan untuk peringkat kabupaten/kota atau dalam wilayah kabupaten/kota, Kalurahan dan Masyarakat;

c. perumusan dan penetapan mekanisme pelibatan masyarakat dan lembaga kebudayaan dalam pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan pada wilayah kabupaten/kota;
d. perumusan dan penetapan pedoman teknis pemeliharaan dan pengembangan objek kebudayaan pada wilayah kabupaten/kota; dan
e. penyediaan sarana dan prasarana penunjang program/kegiatan urusan kebudayaan.

3. Urusan Pertanahan

Urusan keistimewaan pertanahan yang dapat ditugaskan, meliputi:
a. inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pengajuan peta bidang, dan pendaftaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten;
b. inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pengajuan peta bidang, dan pendaftaran tanah desa/kalurahan;
c. pendaftaran pencatatan perubahan data sertifikat tanah desa/kalurahan;
d. rekomendasi pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten;
e. rekomendasi pemanfaatan tanah kalurahan;
f. pendampingan penyusunan peraturan kalurahan tentang pemanfaatan tanah kalurahan;
g. fasilitasi penanganan permasalahan tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah kalurahan;
h. pengawasan terhadap tanah kalurahan;
i. pengawasan terhadap tanah kasultanan dan tanah kadipaten;
j. pendampingan pemeliharaan dokumen tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah kalurahan;
k. pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan pertanahan;
l. fasilitasi peremajaan data tanah kasultanan dan tanah kadipaten; dan
m. penegasan batas kalurahan.

4. Urusan Tata Ruang

Urusan Keistimewaan tata ruang yang dapat ditugaskan, meliputi:
a. penyusunan rencana rinci tata ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis Kadipaten;
b. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis Kadipaten;
c. penyusunan rencana induk pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis Kadipaten;
d. penyiapan bahan pertimbangan teknis izin pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis Kadipaten yang berada dalam kabupaten/kota sesuai kewenangannya;
e. pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis Kadipaten;
f. audit tata ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis Kadipaten;
g. pengenaan sanksi pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis Kadipaten; dan
h. pemenuhan standar pelayanan bidang penataan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis Kadipaten.

Terkait dengan pelaksanaan dana keistimewaan, pada tahun 2023, telah dilakukan rehabilitasi Museum Gunungapi Merapi (MGM) dengan anggaran Rp6.248.584.000.00. Kegiatan ini dalam rangka mengembalikan fungsi bangunan Museum Gunungapi Merapi di Kabupaten Sleman menjadi lebih optimal. Museum Gunungapi Merapi merupakan museum bersejarah yang dibangun pada tahun 2005 atas kerja sama antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten Sleman. Pembangunan Museum Gunungapi Merapi ini diharapkan dapat menumbuhkan apresiasi dan kepedulian masyarakat terhadap ekosistem pegunungan sebagai penyangga sumber daya yang vital.

Museum Gunungapi Merapi yang digadang menjadi geo-wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan menjadi wahana edukasi konservasi yang berkelanjutan serta pengembangan ilmu kebencanaan gunungapi, gempabumi, dan bencana alam lainnya.

Selain itu, Museum Gunungapi Merapi dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan, penyebarluasan informasi aspek kegunungapian khususnya dan kebencanaan geologi lainnya yang bersifat rekreatif-edukatif untuk masyarakat luas dengan tujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman tentang aspek ilmiah, maupun sosial-budaya dan lain-lain yang berkaitan dengan gunungapi dan sumber kebencanaan geologi lainnya. Museum Gunungapi Merapi diharapkan dapat menjadi solusi alternatif sebagai sarana yang sangat penting dan potensial sebagai pusat layanan informasi kegunungapian dalam upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat, serta sebagai media dalam meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat tentang manfaat dan ancaman bahaya letusan gunungapi serta bencana geologi lainnya.

Di sisi lain gedung Museum Gunungapi Merapi diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat terhadap syarat keandalan bangunan seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018, yaitu memenuhi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan sesuai persyaratan teknis kinerja bangunan gedung.

Pada tahun 2023 juga dilaksanakan pembangunan sarana prasarana persampahan dengan sebesar Rp14.232.767.500,00. Bagi Kabupaten Sleman, sarana prasarana ini membantu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah di masyarakat untuk mendukung budaya bersih sehingga menciptakan lingkungan yang sehat. Selain itu, untuk mendukung desa/kalurahan mandiri budaya dalam pengelolaan sampah sebagai sarana pendukung untuk meningkatkan daya tarik desa sesuai dengan potensi dan budaya lokal yang dimiliki oleh desa wisata tersebut.

Dalam penggunaan tanah kas desa dan tanah kasultanan, Kabupaten Sleman mendapat anggaran Rp4.362.496.325,00. Manfaat yang diambil bagi Kabupaten Sleman antara lain:

1. Tertib Hukum Pertanahan;
2. Tertib Administrasi Pertanahan;
3. Tertib Penggunaan Tanah;
4. Tertib Pemanfaatan Tanah dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
5. Mendapatkan kepastian batas wilayah kalurahan secara administratif, yuridis dan fisik di lapangan, sehingga terdapat kejelasan atas kewenangan pengelolaan dan pemanfaatannya;

6. Memberikan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Kasultanan dan Kadipaten;
7. Mengamankan Asset Tanah Kasultanan dan Kadipaten;
8. Sebagai sumber informasi terhadap data tanah Kasultanan dan Kadipaten kepada pihak-pihak yang berkepentingan; dan
9. Terciptanya tertib administrasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Pada tahun 2022, telah dilaksanakan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo dengan anggaran Rp84.430.125.630,00. Kegiatan ini dilakukan menilik potensi adanya aksesibilitas arus manusia yang akan melalui *exit tol* Prambanan maka akan sangat dibutuhkan penataan area di sekitar *exit tol* Prambanan guna menata kondisi kawasan tersebut. Dengan adanya penataan kawasan tersebut, tentunya diharapkan agar kawasan menjadi tertata sesuai dengan peraturan Pemerintah Kabupaten Sleman. Dalam hal ini tentunya diharapkan dapat menimbulkan dampak perekonomian yang cukup besar bagi masyarakat sekitar. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan merupakan panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/ kawasan sesuai dengan peraturan Pemerintah Kabupaten Sleman. Dengan adanya perencanaan dan penataan kawasan tentunya akan meningkatkan potensi perekonomian kawasan tersebut yang berdampak positif bagi dunia usaha.

2.3.2.4 Isu Strategis Tingkat Daerah

Isu strategis daerah diangkat melalui penelaahan muatan dan arahan kebijakan yang muncul pada dokumen yang setara atau lebih tinggi dari RPJMD. Muatan yang akan dibahas adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2024 tentang RPJPD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041, serta dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029.

2.3.2.4.1 RPJPD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045

RPJPD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045 telah ditetapkan pada tahun 2024. RPJPD ini memberikan gambaran isu strategis serta arahan makro pentahapan pembangunan pada tahun 2025-2029. Gambaran isu strategis yang diangkat pada dokumen RPJPD adalah sebagai berikut:

A. Kemiskinan dan Kerentanan Sosial

Kemiskinan dan kerentanan sosial adalah isu strategis mendasar yang memerlukan perhatian karena kemiskinan merupakan akumulasi dari berbagai permasalahan pokok dan pelayanan dasar yang tidak terselesaikan, seperti misalnya permasalahan kesehatan, kerawanan bencana, kesempatan kerja dan permasalahan lainnya, yang akan bermuara pada kemiskinan. Kerentanan sosial juga menjadi strategis karena golongan masyarakat ini hanya berada satu langkah dari kemiskinan.

1. Kemiskinan dan kerentanan sosial merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi. Masalah ini tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga faktor sosial, politik, dan budaya. Oleh karena itu,

diperlukan pendekatan yang komprehensif dan holistik untuk mengatasi masalah ini.

2. Kemiskinan dan kerentanan sosial memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat miskin itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terkoordinasi dan sinergis dari berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini.
3. Kemiskinan dan kerentanan sosial dapat menghambat pembangunan daerah. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya daya beli masyarakat, yang pada akhirnya akan mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa.

B. Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul (Transformasi Sosial)

Isu strategis terkait kualitas sumber daya manusia yang unggul menjadi aspek penting yang diposisikan sebagai modal dasar pembangunan. Agenda pembangunan nasional yakni transformasi sosial juga telah diarahkan sebagai upaya perbaikan fondasi pembangunan. Beberapa bahasan sumber daya manusia unggul yang relevan dengan kondisi Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

1. Tata kelola dan profesionalitas penyelenggaraan pendidikan vokasi untuk mewujudkan harapan lama sekolah menjadi rata-rata lama sekolah secara nyata, serta menyiapkan tenaga kerja terampil dan setengah ahli yang berdaya saing guna mewujudkan kesejahteraan sosial yang ditunjang oleh jaminan sosial ketenagakerjaan dan pendapatan yang memadai.
2. Pengembangan sistem kesehatan terpadu terintegrasi dengan pelibatan *stakeholder*s dan partisipasi aktif masyarakat baik dalam pencegahan maupun penanganan masalah Kesehatan yang ditunjang oleh kesadaran dan komitmen masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. Perwujudan kesehatan secara umum juga ditunjang melalui peningkatan gizi anak, baik dari dalam kandungan hingga pada masa emas tumbuh kembang anak, baik pertumbuhan otak ataupun masa percepatan tumbuh kembang anak.
3. Kesetaraan gender dalam konteks sosial, budaya, ekonomi dan politik dengan memperbesar inisiatif dan partisipasi perempuan untuk berkembang dengan pencapaian harmonisasi, keseimbangan dan keselarasan. Pembangunan dan pemberdayaan gender menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesetaraan gender ini. Dengan Pembangunan dan pemberdayaan gender dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas , sehingga wanita dapat berkontribusi dalam bidang sosial, budaya, ekonomi dan politik secara seimbang dan setara.

Dalam konteks bahasan permasalahan di atas, terdapat satu aspek yang menjadi elemen penyatu dari keseluruhan yakni peran keluarga dalam pembangunan. Pengembangan keluarga yang mengutamakan nilai - nilai pembangunan sosial mendasar akan sangat penting sebagai fondasi dasar pembangunan manusia lebih lanjut. Sebagai unit kelompok manusia terkecil, indikator - indikator terkait ketahanan keluarga seyogyanya dijadikan target kinerja dasar untuk membangun masyarakat dari unit terkecil hingga masyarakat umum.

C. Ketahanan Budaya

Pengupayaan pengembangan budaya perlu didekati dari dua sisi yakni dari budaya sebagai hasil tradisi (budaya tradisional) dan budaya sebagai hasil olah pikir manusia saat ini untuk menghadapi keseharian kehidupan, baik secara individual yang kemudian dilaksanakan oleh banyak orang maupun secara keseharian dalam bermasyarakat. Pengembangan kebudayaan ini seharusnya diarahkan melalui peningkatan interaksi non-patron, dimana interaksi yang terjadi lebih mengeksplorasi konsep, pandangan dan peminatan, bukan pada proses kebutuhan penyejahteraan. Oleh karena itu, seperti halnya dalam aspek transformasi sosial, ketahanan budaya juga perlu untuk diberi ruang berkualitas di dalam masyarakat.

Masalah ketahanan budaya ditentukan oleh sikap, respons dan semangat pelestarian budaya baik yang mencakup benda dan non benda. Budaya yang menyangkut benda membutuhkan pemeliharaan, perawatan, dan pemugaran. Sedangkan hal-hal yang bersifat non benda membutuhkan edukasi dan peningkatan kesadaran dan ketekunan serta komitmen Masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan, sosialisasi, internalisasi dan pemanfaatan serta pengamalannya.

Manajemen dan pemajuan budaya yang bersifat komprehensif mencakup semua aspek kebudayaan. Melalui internalisasi budaya, manajemen dan pemajuan budaya dapat berdampak pada meningkatnya integritas sosial, komitmen dan perilaku sadar dalam pengamalan nilai-nilai budaya yang positif dan adiluhung ke dalam tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

D. Transformasi Ekonomi

Dalam pembangunan Kabupaten Sleman, salah satu isu strategis yang perlu diangkat adalah perubahan mendasar mengenai paradigma perekonomian dan penyesuaian arah pembangunan perekonomian menuju keberlanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, bahasan-bahasan isu strategis yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Modernisasi perekonomian
2. Mengoptimalkan ekonomi kreatif
3. Target Menuju Indonesia Emas
    a. Pendapatan per kapita yang setara dengan negara maju;
    b. Tidak ada lagi kemiskinan;
    c. Perekonomian modern, dengan struktur yang kuat;
    d. Berwawasan lingkungan; dan
    e. Tingkat akses masyarakat pada infrastruktur dasar sebesar 100%.
4. Pembangunan ekonomi inklusif dan ekonomi hijau
5. Investasi berkelanjutan

E. Penguatan Ketahanan Pangan

Pangan selalu menjadi isu strategis dalam pembangunan baik di tingkat global, nasional maupun regional, karena pemenuhan pangan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin kuantitas dan kualitasnya, aman dan bergizi. Upaya perkuatan ketahanan pangan merupakan upaya untuk menghasilkan sumber daya manusia yang sehat, aktif dan produktif, serta berdaya saing sesuai amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012. Kabupaten Sleman yang selama ini menjadi salah satu lumbung pangan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan adalah kondisi

terpenuhinya pangan bagi semua orang dan daerah/wilayah yang tercermin dari ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan.

Ketersediaan pangan yang bersumber dari pertanian, peternakan, dan perikanan harus dapat memenuhi kebutuhan penduduk di suatu wilayah dalam jangka panjang dan lintas generasi. Ketersediaan pangan akan dapat dicapai dan dijamin keberlanjutannya jika pembangunan memperhatikan sarana prasarana pertanian, konversi lahan/alih fungsi lahan yang terkendali, peningkatan produktivitas, diversifikasi pangan, dan *up-skilling* sumber daya manusia pertanian.

Faktor penting lainnya adalah memastikan keterjangkauan pangan oleh masyarakat yang dicerminkan oleh distribusi yang lancar dari produsen ke konsumen antar waktu antar wilayah, stok pangan dan harga yang selalu terjaga. Selain itu perlu upaya yang lebih konkret bahwa pangan yang tersedia dan dapat dijangkau oleh setiap penduduk memiliki manfaat bagi tubuhnya. Hal ini dapat didukung dengan pola konsumsi yang seimbang dan beraneka ragam, kecukupan gizi, keamanan dan mutu pangan serta pengembangan pengolahan pangan lokal. Selain itu diperlukan pengembangan pertanian dalam arti luas sesuai dengan karakteristik dan potensi unggulan masing-masing daerah.

F. Pemanfaatan Tanah dan Tata Ruang

Dalam dua dekade terakhir, Kabupaten Sleman mengalami perkembangan wilayah yang sangat pesat. Perubahan tata guna lahan menjadi respons terhadap pertumbuhan penduduk dan aktivitas sosial ekonomi serta kepentingan pembangunan. Konversi lahan hijau terbuka, khususnya lahan pertanian terus meningkat yang menyebabkan penurunan luas lahan pertanian.

Kondisi dilematik dan strategis serta pilihan yang sulit, karena di satu sisi, Kabupaten Sleman memiliki kesuburan dan produktivitas lahan tinggi dengan suplai air sangat bagus dan menjadi lumbung pangan, serta memiliki nilai fungsi lindung lingkungan yang tinggi. Di sisi lain, desakan kebutuhan lahan untuk pengembangan wilayah tidak terhindarkan. Perumahan, permukiman, fasilitas hotel perdagangan dan industri terus meningkat yang menggerus keberadaan lahan pertanian.

Alih fungsi ini telah memberikan dampak yang luas terkait dengan lingkungan hidup, seperti gangguan sistem tata air dengan banyak hilangnya lahan irigasi, meningkatkannya kerentanan pangan, penurunan kualitas udara dan iklim makro. Secara sosial, banyak Masyarakat lokal Sleman kehilangan aset dan sistem penghidupan khususnya pertanian dan komunitas sosial, termasuk melambungnya harga properti dan perubahan kehidupan sehari hari. Dalam beberapa kasus, meningkatnya intensitas perubahan penggunaan lahan ini juga menciptakan konflik pemanfaatan ruang dan tanah bahkan konflik sosial.

Isu alih fungsi lahan pertanian adalah tantangan kompleks masa mendatang yang membutuhkan perencanaan yang matang, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan, dengan memahami dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari perubahan tata guna lahan, guna mengembangkan solusi yang mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Peningkatan pesat intensitas pemanfaatan tanah dan ruang di Kabupaten Sleman akan terus meningkat dalam masa mendatang, hal ini disebabkan semakin naiknya pertumbuhan penduduk, level urbanisasi, Persaingan antar pemanfaatan tanah antara sektor pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan perumahan dengan kawasan hijau akan memicu ketegangan antar komunitas lokal, pemerintah dan swasta. Kasus banyaknya aset tanah desa yang lepas ke pihak tidak bertanggungjawab semakin mempersulit penyelesaian kasus pertanahan.

Pada sisi tata ruang, masih banyak penggunaan tanah dan ruang tidak sesuai dengan ketentuan perencanaan tata ruang yang berlaku, sehingga berpotensi menimbulkan dan meningkatkan intensitas konflik. Di lain pihak masih ditemukan rendahnya kesadaran masyarakat akan tertib penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Kabupaten Sleman harus mampu mengatasi permasalahan ini melalui perbaikan kebijakan, perencanaan tata ruang yang lebih baik, dan promosi praktik-praktik pengelolaan lahan atau tanah yang berkelanjutan. Tantangan ini masih memerlukan upaya bersama dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai pemanfaatan lahan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

G. Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur

Dalam pembangunan Kabupaten Sleman, masih terdapat isu strategis terkait dengan pemerataan dan kualitas infrastruktur. Infrastruktur menjadi modal dasar pembangunan, dimana tanpa pancingan infrastruktur, pembangunan akan susah terwujud atau setidaknya memiliki kapasitas yang kecil. Adapun untuk pemerataan menjadi penting untuk kemudian menyelesaikan permasalahan ketimpangan baik kesejahteraan maupun ketimpangan wilayah. Beberapa bahasan yang perlu dipertimbangkan sebagai isu strategis terkait infrastruktur adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan infrastruktur dasar

   Target Indonesia emas tahun 2045 menuju Negara Nusantara yang berdaulat, maju dan berkelanjutan, perlu mempertimbangkan dan merencanakan arah perkembangan pertumbuhan penduduk dengan baik untuk menunjang kehidupan dan kebutuhan masyarakat. Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator negara yang makmur dan menandakan potensi keberlanjutan suatu negara. Pertumbuhan penduduk juga menjadi salah satu *driving factor* bagi negara untuk membuat perencanaan arah pembangunan dan pengembangan negara yang berkelanjutan. Akan tetapi, pertambahan penduduk berpotensi memberikan beban ke lingkungan untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan menerima buangan hasil aktivitasnya. Pertumbuhan penduduk akan berdampak kepada peningkatan akses infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi layak, kebutuhan pangan, dan energi. Sehingga, untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut pemerintah daerah khususnya Kabupaten Sleman memiliki peranan penting untuk menjamin semua masyarakat memiliki kesempatan akses sama.

   Peningkatan infrastruktur sarana dasar seperti kebutuhan air bersih, pengolahan air limbah dan pengelolaan sampah menjadi pertimbangan khusus sebagai akibat pertumbuhan penduduk. Peningkatan akses air bersih menyebabkan meningkatnya sumber air baku untuk diolah

menjadi air yang bisa dimanfaatkan secara langsung atau tidak langsung. Sisa buangan air bersih menjadi air limbah yang harus diolah sebelum dibuang ke lingkungan. Selain itu, pertumbuhan penduduk juga berdampak terhadap peningkatan pengelolaan sampah mulai dari infrastruktur pengelolaan sampah, sumber daya manusia, dan kelembagaan pengelola.

Sebagai perwujudan *Sustainable Development Goals* (SDG's) mengenai lingkungan terutama akses air bersih dan sanitasi layak menjadi pertimbangan yang sangat penting untuk menjamin keberlanjutan lingkungan yang sehat, asri, dan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Oleh karena itu, Kabupaten Sleman perlu membuat strategi dan kebijakan untuk menjamin peningkatan dan pemerataan infrastruktur dasar sanitasi di Kabupaten Sleman seperti meningkatkan instalasi pengolahan air bersih, pengolahan air limbah, manajemen dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, serta akses distribusi air bersih dan penyaluran air limbah ke sistem terpusat. Sehingga, diperlukan perencanaan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dalam perancangan infrastruktur sanitasi.

Selain permasalahan sanitasi, satu kelompok isu infrastruktur wilayah yang masih perlu diangkat adalah isu tentang ruang terbuka hijau. Salah satu peruntukan ruang yang penting adalah keberadaan ruang terbuka hijau dalam arti yang luas. Perlindungan kawasan lindung dan pemantapan serta penambahan ruang terbuka hijau diharapkan dapat menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati, pengendalian suhu dan iklim mikro, peningkatan kualitas udara, serta mengurangi pencemaran udara dan tentu saja konservasi air.

2. Konektivitas wilayah

   Kendala utama dari konektivitas wilayah adalah kualitas dan kuantitas pelayanan dari pergerakan, salah satunya terkait kemacetan. Meskipun belum bisa dibandingkan dengan kemacetan di kota sekelas metropolitan, sebagian Kabupaten Sleman yang termasuk wilayah Pusat Kegiatan Nasional Yogyakarta mulai mengalami kemacetan. Selain itu, terdapat juga kendala kualitas pelayanan dasar perkotaan yang masih perlu ditingkatkan untuk bisa setara dengan Kota Yogyakarta. Selain itu terdapat juga isu konektivitas dalam artian volume besaran. Sub-isu ini akan dibahas di dalam sub pembahasan pada bagian berikutnya.

   Selain ketidakseimbangan antara volume kendaraan yang tinggi dan infrastruktur jalan yang kurang memadai. Kemacetan juga berhubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas, dan gagalnya transportasi publik. Tidak kalah penting adalah hubungannya dengan sistem perencanaan kota dan wilayah, baik internal Kabupaten Sleman maupun hubungannya dengan daerah-daerah lainnya.

3. Pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah

   Tantangan Kabupaten Sleman masa mendatang adalah penyediaan dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur wilayah yang cukup dan terdistribusi secara merata, tidak hanya di perkotaan, namun sampai pelosok perdesaan. Pengembangan infrastruktur wilayah adalah suatu usaha untuk meningkatkan dan memperbaiki berbagai fasilitas dan sarana di suatu wilayah tertentu. Hal ini dapat mencakup berbagai

sektor, seperti transportasi, energi, air dan sanitasi, pendidikan, kesehatan, dan teknologi informasi.

H. Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Sleman menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan masa depan yang lebih sulit dan kompleks. Intensitas pemanfaatan ruang dan sumber daya yang terus meningkat, diikuti dengan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Indeks Kualitas Air yang menurun akibat aktivitas domestik dan ekonomi yang meningkatkan pencemaran air terutama di perkotaan. Kualitas udara juga sulit membaik, dikarenakan semakin padatnya transportasi, kegiatan ekonomi yang menambah polutan udara terus meningkat. Sedangkan kualitas lahan juga menurun dan waspada akibat semakin tingginya konversi lahan hijau khususnya lahan pertanian.

Penurunan kualitas lingkungan, dapat menurunkan tingkat kenyamanan bahkan kualitas hidup yang lebih baik. Tantangan lain terkait dengan pemanasan global, dampak perubahan iklim juga telah memberikan tekanan besar bagi keberlanjutan penghidupan masyarakat Kabupaten Sleman pada masa mendatang. Disisi lain, temuan-temuan inovasi teknologi ramah lingkungan termasuk energi terbarukan berpeluang meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Mengatasi isu-isu kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Sleman masa mendatang memerlukan upaya serius dan kebersamaan dari pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan individu untuk mengimplementasikan kebijakan yang berkelanjutan, meningkatkan kesadaran, dan mengadopsi praktik-praktik peningkatan kualitas lingkungan.

1. Pengendalian degradasi lingkungan (pengembangan ekonomi hijau)

   Peningkatan pemanfaatan air bersih sebagai kebutuhan sehari-hari berpotensi meningkatnya degradasi kualitas lingkungan disebabkan pencemaran akibat aktivitas manusia seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk per tahunnya. Pembuangan air limbah ke badan air akan menyebabkan pencemaran air baik di sungai, air tanah, dan laut. Pencemaran air limbah berdampak tidak hanya penurunan kualitas badan air, tetapi juga menurunkan kondisi sanitasi yang berpotensi terjadi penyebaran penyakit melalui air yang tidak bersih.

   Selain itu, peningkatan jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan dan pengelolaan sampah. Hal ini akan menyebabkan peningkatan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir tidak merusak lingkungan. Pembuangan sampah sembarangan akan menyebabkan penurunan estetika lingkungan, mencemari air tanah melalui produksi air lindi dari sampah, penyebaran penyakit, dan lainnya. Tidak hanya permasalahan sampah, peningkatan jumlah penduduk juga menyebabkan naiknya kebutuhan energi untuk memutar roda perekonomian. Kenaikan penggunaan energi berpotensi merusak lingkungan baik secara langsung atau tidak langsung. Eksplorasi sumber energi di dalam tanah seperti minyak bumi, batu bara, dan sumber energi nuklir menyebabkan kerusakan langsung terhadap di daerah pertambangan. Dan, pemanfaatan bahan alam sebagai sumber energi seperti bahan bakar fosil, transportasi, dan

lainnya berpotensi menyebabkan penurunan kualitas udara, menipisnya lapisan ozon, *climate change*, dan meningkatnya efek gas rumah kaca.

Salah satu pendekatan yang menjanjikan untuk mengatasi degradasi lingkungan adalah melalui penerapan konsep ekonomi hijau. Ekonomi hijau berfokus pada pembangunan yang memperhitungkan aspek lingkungan dan sosial, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Ini dapat dicapai melalui berbagai cara, seperti pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, daur ulang, dan promosi teknologi ramah lingkungan.

Tantangan untuk mewujudkan visi ekonomi hijau, adalah diperlukan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Dukungan kebijakan yang tepat, insentif untuk inovasi, serta kesadaran dan partisipasi masyarakat yang aktif akan menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan ekonomi hijau.

2. Pelestarian lingkungan hidup berbasis batas ekologis

   Di tengah perubahan iklim global dan degradasi lingkungan yang semakin memprihatinkan, Kabupaten Sleman menghadapi tantangan besar dalam pelestarian lingkungan hidup. Salah satu pendekatan yang menjadi perhatian utama adalah pendekatan hulu-hilir dan pemanfaatan jasa lingkungan. Kabupaten Sleman memiliki posisi hulu dan hilir tengah, dimana beberapa wilayah menjadi hulu bagi seluruh wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Yogyakarta serta sebagian menjadi hilir tengah dari CAT tersebut. Dari hulu ke hilir, Kabupaten Sleman memiliki ekosistem yang kaya dan beragam, mulai dari kawasan pegunungan di bagian utara hingga daerah dataran rendah di sepanjang pesisir selatan. Tetapi, perkembangan pembangunan yang cepat dan tidak terkendali telah menimbulkan tekanan besar terhadap lingkungan, mulai dari kerusakan lingkungan (misal pada pertambangan lahan) hingga pencemaran air. Posisi ini memberikan penekanan bahwa pelestarian lingkungan hidup perlu ditanggapi serius karena Kabupaten Sleman adalah pemeran utama dari kondisi lingkungan hidup ini.

3. Pengelolaan lingkungan hidup berbasis kesadaran dan partisipasi masyarakat

   Pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama yang tidak hanya menjadi urusan pemerintah, tetapi juga melibatkan aktivitas dan kesadaran seluruh masyarakat. Di zaman ini, kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup semakin penting dan menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan planet ini.

   Kesadaran lingkungan bukanlah sesuatu yang dapat ditanamkan secara paksa, melainkan perlu dibangun melalui pendidikan, informasi, dan contoh nyata dari lingkungan sekitar. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang mendalam mengenai dampak dari aktivitas manusia terhadap lingkungan, serta pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem untuk kelangsungan hidup semua makhluk hidup di bumi ini.

   Partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Ketika masyarakat merasa memiliki peran dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan, mereka akan lebih termotivasi untuk bertindak secara proaktif dalam menjaga kebersihan, mengurangi sampah, dan mengelola sumber daya alam dengan bijak.

I. Ketangguhan Menghadapi Bencana

Kabupaten Sleman merupakan wilayah dengan ciri multi risiko bencana. Beberapa bencana yang berpotensi diantaranya gempa bumi, letusan gunung berapi (mengingat adanya Gunung Merapi di sekitar daerah ini), banjir, longsor, dan lainnya. Pada masa depan diperlukan perubahan pendekatan tidak hanya pada pengurangan risiko bencana namun membentuk sistem ketangguhan wilayah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Ketangguhan menghadapi bencana adalah kemampuan individu, kelompok, atau komunitas untuk pulih kembali, beradaptasi, dan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tekanan, tantangan bencana. Diperlukan upaya perencanaan dan pengelolaan bencana dengan dukungan kerja sama dan keterlibatan aktif dari pemerintah, masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta dalam membangun ketangguhan terhadap bencana

Dalam menghadapi bencana, terdapat dua pendekatan yang bisa dijadikan pedoman dasar yakni pendekatan menghindari bencana dalam arti tidak melaksanakan pembangunan permanen pada kawasan yang akan terkena bencana dan pendekatan adaptasi kehidupan dalam kerawanan bencana, yakni pendekatan yang mengarahkan pada tetap terlaksananya kegiatan-kegiatan pada kawasan bencana dengan pengaturan-pengaturan, pelatihan, peningkatan kapasitas serta penyediaan infrastruktur evakuasi bencana yang sigap.

Umumnya jika kondisi bencana bersifat vektor/memiliki arah seperti erupsi gunung berapi, kerawanan longsor, kerawanan banjir dan tsunami, maka pendekatannya adalah penghindaran dari bencana alam. Namun ketika kondisi bencananya jangkauannya luas atau tidak tentu, maka diperlukan adaptasi dalam menghadapi kondisi bencana, contohnya adalah bencana gempa bumi, kekeringan, dan cuaca ekstrem dan pergeseran tren cuaca akibat perubahan iklim. Dalam jangka panjang, seharusnya dapat ditekankan dua jenis pendekatan ini sesuai dengan kondisi ruang-ruang yang ada di Kabupaten Sleman, khususnya pada kawasan rawan bencana erupsi gunung berapi.

J. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah dituntut mampu beradaptasi, tangkas dan dikelola secara dinamis. Transformasi tata kelola pemerintahan di bidang kelembagaan, sumber daya manusia aparatur sipil negara, pelayanan publik melalui digitalisasi diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan di atas. Transformasi tata kelola diperlukan dalam rangka memungkinkan pemerintah untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas.

Permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Sleman dalam bidang tata kelola pemerintahan daerah adalah masih belum tangkas, adaptif, akuntabel dan transparan. Ketangkasan tata kelola pemerintahan diharapkan mampu merespons perubahan khususnya untuk meningkatkan pembangunan yang inklusif, transformatif dan berkelanjutan. Aspek akuntabilitas dan transparansi secara menyeluruh masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dikembangkan terutama akuntabilitas kinerja dan

keuangan, manajemen sumber daya manusia, pelayanan publik dan keterlibatan publik dalam *governance*. Struktur yang masih terfragmentasi menyebabkan struktur kelembagaan kurang tangkas dan adaptif.

Rendahnya pengawasan di level perangkat daerah dan pemerintah daerah dapat menyebabkan kurangnya akuntabilitas yang pada gilirannya dapat mereduksi efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik. Dukungan keuangan yang belum diselaraskan dengan kinerja pemerintah dari level organisasi sampai dengan individu, kemandirian fiskal yang masih rendah dan pemanfaatan aset yang belum optimal menyebabkan kurangnya akuntabilitas keuangan. *Clean government* juga perlu ditingkatkan agar mitigasi terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme bisa ditekan dan ditiadakan, dari level pemerintah kabupaten sampai pada level pemerintahan desa/kalurahan. Perputaran perekonomian daerah yang ditopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diharapkan mampu menumbuhkan ekonomi lokal yang akan berkontribusi pada pendapatan daerah. Akuntabilitas kinerja dan keuangan secara holistik perlu ditingkatkan dengan meningkatkan peran publik yang lebih menyeluruh.

Disisi lain kompetensi ASN di Kabupaten Sleman masih rendah, pengembangan kompetensi aparatur sipil negara belum berbasis manajemen talenta dan rekrutmen aparatur sipil negara belum sesuai formasi menghambat jalannya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Proses digitalisasi pelayanan yang belum terintegrasi, pengelolaan aduan masyarakat yang belum optimal dan integrasi data yang belum berjalan secara efektif mengakibatkan kurangnya kualitas pelayanan publik. Transformasi tata kelola pemerintahan di bidang manajemen aparatur sipil negara dan digitalisasi pelayanan publik menjadi isu strategis yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di masa depan. Transformasi digital masih dihadapkan pada persoalan mendasar yaitu dukungan infrastruktur telekomunikasi dan informasi, rendahnya literasi digital, tingkat kematangan sistem pemerintahan berbasis elektronik, tata kelola keamanan siber, keterpaduan data dan informasi serta rendahnya literasi digital. Transformasi teknologi dan informasi menjadi kunci dalam pelayanan publik di masa mendatang. Sebagai landasan transformasi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup adalah transformasi tata kelola pemerintahan. Aparatur yang kompeten dan memiliki komitmen melayani publik harus dibangun berbasis *merit system*.

Tantangan keterlibatan publik juga perlu ditingkatkan agar pembangunan inklusif dapat terwujud. Tingkat partisipasi publik tidak hanya ditunjukkan melalui keterlibatan musyawarah perencanaan pembangunan saja, tetapi juga dalam pengawasan yang partisipatif. Potensi ini juga dapat dimanfaatkan untuk membentuk kohesivitas sosial dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban yang kondusif di Kabupaten Sleman, sehingga angka pelanggaran ketertiban umum bisa diminamilisir semaksimal mungkin.. Iklim investasi tentunya sangat didukung oleh atmosfer sosial yang stabil dan tertib. Peningkatan literasi masyarakat tidak hanya pada tataran budaya baca yang dikembangkan oleh urusan perpustakaan daerah, tetapi mengarah pada literasi advokatif yang mendorong pemahaman publik dalam sistem pemerintahan, pengelolaan dan pemanfaatan keuangan dan aset daerah, serta jalannya pembangunan yang tepat mengarah pada penyelesaian permasalahan di masyarakat. Rendahnya literasi digital di era akselerasi digitalisasi ini akan dapat

mereduksi akses dan tingkat partisipasi publik dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah. Mewujudkan masyarakat yang inklusif perlu dibangun dan dibudayakan.

Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan diantaranya segala proses mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, keuangan, pelaporan dan pelayanan publik telah diadaptasi ke dalam sistem digital. Langkah maju ini terlihat dalam penerapan masterplan *smart city*, yang telah diterapkan dalam berbagai aplikasi umum dan khusus untuk kebutuhan pemerintah daerah.

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengadopsi teknologi untuk meningkatkan layanan publik dan mengoptimalkan efisiensi administrasi pemerintahan. Kabupaten Sleman juga memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, terutama karena wilayah ini merupakan rumah bagi beberapa perguruan tinggi ternama di Indonesia. Sumber daya manusia yang berkualitas ini dapat menjadi modal penting dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintah serta implementasi kebijakan yang lebih efektif dan inovatif.

Berbagai potensi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dapat dioptimalkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel dan transparan melalui transformasi tata kelola pemerintahan di bidang kelembagaan, manajemen aparatur sipil negara, dan pelayanan publik dengan transformasi digital yang berpusat pada manusia. Transformasi tata kelola pemerintahan melalui transformasi digital dalam layanan publik akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa depan.

K. Pemanfaatan Inovasi dan Teknologi

Pemanfaatan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas sumber daya (sumber daya alam, sumber daya manusia). Seperti telah disinggung pada isu strategis sebelumnya, isu strategis selanjutnya yang perlu mendapat perhatian selama periode perencanaan adalah isu pengupayaan inovasi dan pemanfaatan teknologi. Secara konsep, pemanfaatan teknologi memiliki dimensi yang cukup luas. Terjadinya lompatan teknologi informasi, menjadikan bahwa akses teknologi dalam aspek apapun menjadi lebih mudah. Hal ini dikarenakan, dengan majunya teknologi informasi banyak sumber-sumber pembelajaran yang murah, bahkan gratis. Hal yang perlu ditangani selanjutnya adalah bagaimana perkembangan teknologi dapat dikuasai untuk menyelesaikan berbagai persoalan.

2.3.2.4.2 RTRW Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041

Berikut adalah telaah dan penjabaran dari beberapa isu yang diangkat dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman berbasis Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 tahun 2021.

A. Isu Bencana Dalam Tata Ruang

Dalam integrasi pengurangan risiko bencana terhadap perencanaan tata ruang di masa mendatang, terdapat sekurangnya tiga permasalahan yang

muncul dari adanya dinamika perkembangan wilayah di Kabupaten Sleman. Permasalahan tersebut adalah :

1. Kabupaten Sleman masih mengalami kendala dalam sumber informasi yang memiliki perbedaan format atau satuan. Berdasarkan ketiga komponen untuk menyusun rencana tata ruang yang terintegrasi, Kabupaten Sleman masih mengalami kekurangan baik dari segi data kejadian bencana, peta risiko bencana, dan peta elemen risiko;
2. Kabupaten Sleman belum memiliki peta risiko bencana dan belum memiliki peta yang menunjukkan kegiatan yang mengancam terjadinya bahaya bencana secara spesifik; dan
3. Data kejadian bencana, jenis kejadian bencana belum terekam secara komprehensif terkait lokasi kejadian dan dampak yang diperoleh baik terhadap manusia maupun secara fisik.

Isu yang ke-2 adalah mengenai penanganan bencana di Kabupaten Sleman. Penanganan bencana dinilai masih fokus pada aspek tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi saja, bukan pada pengurangan risiko bencana. Proses identifikasi, kajian dan pemantauan risiko bencana serta penetapan sistem peringatan dini masih belum optimal. Pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana juga belum dimaksimalkan. Sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana masih kurang (pengembangan jalur evakuasi bencana, ruang evakuasi bencana, serta hunian sementara/ huntara dan hunian tetap/huntap). Penanganan bencana dirasa masih semata-mata tanggung jawab pemerintah saja, bukan menjadi urusan bersama (antara pemerintah dengan masyarakat). Permasalahan - permasalahan tersebut di atas merupakan simpulan dari telaah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan kebencanaan.

Isu yang ke-3 adalah mengenai Kawasan Merapi yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Wilayah di Kabupaten Sleman yang tercakup dalam Kawasan TNGM adalah sebagian wilayah Kapanewon Turi, sebagian wilayah Kapanewon Pakem, dan sebagian wilayah Kapanewon Cangkringan. Selain itu, terdapat pula kawasan sekitar TNGM dan berada di wilayah Kabupaten Sleman, meliputi seluruh wilayah Kapanewon Tempel, sebagian wilayah Kapanewon Turi, sebagian wilayah Kapanewon Pakem, sebagian wilayah Kapanewon Cangkringan, dan sebagian wilayah Kapanewon Ngemplak. Disebutkan pula kawasan rawan bencana geologi yang berada di kantung (*enclave*) kawasan permukiman, yaitu Kapanewon Turi, Kapanewon Pakem, Kapanewon Cangkringan, dan Kapanewon Ngemplak di Kabupaten Sleman.

B. Isu Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

RTRW Kabupaten Sleman mencantumkan fokusnya pada masalah ketahanan pangan. Hal ini terlihat pada kebijakan penataan ruang Kabupaten Sleman dalam RTRW Kabupaten Sleman untuk mengembangkan kawasan pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Sleman. Selain itu masalah lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) juga harus tertuang dalam peta rencana pola ruang Kabupaten Sleman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang

(ATR/BPN) Nomor 19 Tahun 2016, wilayah kabupaten bisa menetapkan LP2B dan cadangan LP2B menggunakan peraturan bupati dengan mempertimbangkan peraturan RTRW Provinsi dan RTRW Nasional serta ketentuan dan keputusan penetapan lahan LP2B di tingkat nasional dan provinsi.

LP2B merupakan salah satu sarana/ alat yang bisa digunakan untuk konservasi lahan pertanian yang ada di suatu wilayah. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki fokus pada hal ini untuk menjaga kestabilan pangan dan lingkungan. Permasalahan implementasi LP2B yang ada secara umum, yaitu:

1. Keraguan dalam memberi alokasi sektor pertanian (LP2B) sebagai pemanfaatan terbaik (the best use), terkait kompetisi dengan sektor lain terkait juga dengan pemikiran tentang daya saing daerah.
2. Kompetisi misalnya dengan kebutuhan lahan untuk perumahan
3. Kesiapan "deliniasi", sesuai potensi lahan dan ruang, sesuai penerimaan sosial
4. Keharmonisan dengan penggunaan lahan lainya dalam bentuk optimalitas infrastruktur wilayah yang memerlukan integrasi Sistem Informasi Geospasial (SIG).

C. Isu Infrastruktur Wilayah

Isu Infrastruktur Wilayah di Kabupaten Sleman lebih berkutat pada kondisi jaringan dan pemerataan kualitas pelayanannya. Prasarana, sarana, utilitas dan fasilitas sosial perkotaan belum sepenuhnya memadai, seperti jaringan jalan, drainase, air mium, air limbah, persampahan, gedung pelayanan publik, dan sebagainya.

D. Isu Implementasi dan Pengendalian/Perizinan

Isu pengendalian pemanfaatan ruang menjadi penting untuk perencanaan tata ruang dimana ketika rencana tidak dikendalikan maka *outcome* maupun *impact* yang ingin dicapai cenderung tidak akan tercapai. Dinamika pemanfaatan ruang dan pembangunan infrastruktur yang sangat pesat di Kabupaten Sleman memberikan tekanan pada upaya implementasi dan pengendalian pemanfaatan ruang ini.

E. Isu Penyediaan Perumahan

Belum adanya perhitungan ketersediaan perumahan dibandingkan kebutuhan rumah per segmen masyarakat (kalangan pendapatan tinggi; kalangan pendapatan menengah, masyarakat berpenghasilan rendah/MBR) mengakibatkan belum meratanya perkembangan penyediaan perumahan. Terjadinya perkembangan pembangunan perumahan yang tidak terarahkan berdasar RTRW cenderung akibat dari kinerja harga lahan dan potensi investasi, dimana pengembangan perumahan tidak lagi murni diarahkan untuk penyediaan hunian, namun menjadi investasi yang terkait dengan peran Kabupaten Sleman dalam tataran nasional-internasional. Overlay sebaran perumahan-perumahan baru dengan peta zona nilai tanah menunjukkan sebaran perumahan yang terjangkau cenderung mencari lahan dengan harga yang murah di wilayah transisi perdesaan-perkotaan, bahkan beberapa di perdesaan.

Adanya pertumbuhan hunian vertikal oleh pengembangan swasta (terutama pasarnya adalah mahasiswa, juga sangat bagus untuk kalangan muda/pasangan usia subur) sudah marak, tetapi berpotensi bersifat

sprawl, kurang mendukung pembentukan struktur ruang wilayah dengan multinukleus dengan penggunaan lahan *mixed use* yang kompak.

F. Isu Kinerja Kawasan Strategis dan Keterkaitan dengan Proyek Strategis Nasional

Kawasan strategis yang ditetapkan dalam RTRW tidak sepenuhnya diposisikan sebagai kebijakan strategis. Akibatnya, posisi kawasan strategis yang seharusnya menjadi corong utama pengarahan pemanfaatan ruang belum terakomodasi dengan baik.

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya

   Kawasan ini dikembangkan dengan basis utama berupa wisata budaya dan fasilitas pendukungnya sebagai dukungan terhadap pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Prambanan. Berbagai amenitas pendukung wisata dikembangkan di kawasan ini bersamaan dengan dukungan pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan seni, sosial dan budaya yang dikembangkan oleh masyarakat. Isu-isu yang berkembang di kawasan ini adalah sebagai berikut:
   a. Perkembangan jeep wisata yang massif serta jalur pelayanannya yang menggunakan jalan-jalan lingkungan permukiman;
   b. Wisatawan kurang berminat mengambil amenitas hotel dan penginapan di area ini karena lebih tertarik pada area di tengah perkotaan;
   c. Perkembangan wisata baru oleh pihak swasta, seperti Obelix hill serta wisata berbasis masyarakat seperti wisata tebing breksi.

2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi

   Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ini memiliki beberapa fungsi. Kawasan yang dikembangkan dengan berbasis pertanian dan pariwisata dengan memanfaatkan daya tarik sektor pertanian terdapat di Kapanewon Moyudan, Kapanewon Minggir, Kapanewon Seyegan, Kapanewon Godean, Kapanewon Mlati dan Kapanewon Tempel. Isu pembangunan yang berkembang di kawasan ini adalah sebagai berikut:
   a. Banyaknya area pertanian yang mulai terancam oleh perubahan guna lahan untuk hunian maupun perdagangan dan jasa;
   b. Penetapan lahan ketahanan pertanian pangan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah DIY;
   c. Menurunnya atensi generasi muda terhadap sektor pertanian yang mengancam regenerasi petani.

   Kawasan strategis agropolitan di luar Kawasan Rawan Bencana (KRB) III dan Area Terdampak Langsung (ATL) berada di kaki Gunungapi Merapi yang memiliki lahan subur dengan potensi keberlimpahan air di sekitar kaki Gunungapi Merapi. Kondisi ini sangat baik untuk pengembangan perkebunan dengan memanfaatkan potensi agropolitan berbasis tanaman pangan dan hortikultura serta pengembangan wisata agropolitan di luar KSN Kawasan Taman Nasioal Gunung Merapi (TNGM) sebagai dukungan terhadap kawasan tersebut. Pengembangan kawasan

agropolitan dan minapolitan ini juga agar menjadi buffer antara KSN Gunung Merapi dengan perkembangan permukiman perkotaan yang ada di bawahnya Isu pembangunan yang berkembang di kawasan ini adalah sebagai berikut:

a. Perkembangan pertambangan pasir yang mengancam menggeser pengembangan perkebunan;
b. Menurunnya pengembangan hortikultura andalan seperti komoditas salak akibat kurang minatnya masyarakat karena harga komoditas yang rendah;
c. Banyaknya area perkebunan yang terancam perubahan guna lahan untuk hunian, maupun perdagangan dan jasa.

Kawasan strategis minapolitan merupakan kawasan yang memiliki kondisi air yang sangat baik dan berlimpah sehingga sangat sesuai untuk pengembangan sektor perikanan, meliputi Kapanewon Cangkringan, Kapanewon Kalasan, Kapanewon Ngaglik, Kapanewon Ngemplak dan Kapanewon Pakem. Isu pembangunan di kawasan ini antara lain sebagai berikut:

a. Belum terintegrasinya antara kegiatan produksi, promosi dan konsumsi;
b. Ketimpangan antara kebutuhan lokal dengan komoditas ikan yang masuk ke Kabupaten Sleman dari daerah lain.

Berkaitan dengan rencana Pemerintah Pusat mengenai pembangunan jalan tol yang melalui Kabupaten Sleman, terdapat beberapa pintu tol yang tersebar di Kabupaten Sleman. Kawasan ini diarahkan untuk dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan memanfaatkan pelayanan jalan tol tersebut. Kawasan ini diarahkan untuk pengembangan infrastruktur permukiman, perdagangan, jasa dan penguatan ekonomi daerah. Isu pembangunan di kawasan ini antara lain sebagai berikut:

a. Kerusakan jalan akibat proses pembangunan jalan tol;
b. Perlunya proses integrasi antara jaringan jalan dan pergerakan menyesuaikan dengan sistem jalan tol.

Namun ada beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang belum terakomodasi dalam RTRW Kabupaten Sleman dan memberikan dampak-pengaruh sebagai berikut:

1. Belum terdapat ketetapan terkait adanya Rencana Jalan Tol Yogyakarta-Bawen dan Jalan Tol Yogyakarta-Solo mengakibatkan perlunya reorientasi pembangunan;
2. Belum adanya perhitungan mengenai dampak secara spasial terhadap Kabupaten Sleman dalam proyek Kereta Api Akses Bandara Baru terutama pada kondisi dan kapasitas jalan akses menuju Stasiun Tugu, Stasiun Lempuyangan, dan Stasiun Maguwo juga berpotensi pada perlunya reorientasi pembangunan terutama terkait kepariwisataan;
3. Perlunya memperhatikan batasan kegiatan dalam zona cagar budaya yang telah ditetapkan agar tercapai kedua fungsi wisata dan konservasi dalam proyek percepatan infrastruktur di KSPN Candi Borobudur-Prambanan.

G. Isu Ekonomi Wilayah

Isu ekonomi wilayah menjadi salah satu isu utama dalam penyusunan RTRW Kabupaten Sleman. Penyediaan ruang memang bertujuan dalam penyejahteraan masyarakat, dimana kesejahteraan juga tidak terpisah dari pengembangan ekonomi wilayah. Beberapa topik utama terkait Isu Ekonomi Wilayah adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Lokasi Industri
2. Persebaran sarana prasarana pendukung
3. Optimalisasi Sektor Ekonomi Prioritas

H. Isu Lingkungan

Isu lingkungan menjadi salah satu isu utama dalam penyusunan RTRW terutama karena posisi Kabupaten Sleman yang berada di hulu wilayah DIY. Dua isu utama terkait lingkungan dalam konteks rencana tata ruang adalah terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan, daya dukung lahan dan air serta perkembangan pulau bahang perkotaan (*urban heat island*).

I. Isu Mobilitas (Permasalahan Sistem Kota, Struktur Ruang, dan Transportasi)

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi jaringan prasarana Kabupaten Sleman, terdapat empat indikator yang penting untuk dibahas. Indikator pertama yaitu tingkat aksesibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan kemudahan akses suatu kawasan, baik masuk maupun keluar. Tingkat aksesibilitas dapat diketahui dengan melihat pola jaringan jalan yang melewatinya. Kawasan yang dilalui jaringan jalan yang baik dan kelas jalan yang tinggi maka tingkat aksesibilitas kawasan tersebut juga baik, begitupula sebaliknya. Masih terdapat kesenjangan antara kawasan yang memiliki aksesibilitas tinggi dengan kawasan yang memiliki aksesibilitas rendah.

Indikator kedua yaitu mobilitas menunjukkan banyaknya pergerakan barang dan manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kabupaten Sleman masih memiliki jaringan transportasi antar simpul yang cukup efektif berdasarkan indikator tersebut.

Indikator selanjutnya yaitu interaksi adalah perhitungan yang dilakukan untuk mengetahui berapa banyaknya interaksi yang terjadi pada dua lokasi (dua simpul layanan) pada Kabupaten Sleman. Berdasarkan hasil perhitungan didapat bahwa interaksi paling tinggi terdapat pada simpul antar Kapanewon Depok dengan Kapanewon Berbah. Interaksi tersebut dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan keadaan geografis wilayah Kabupaten Sleman itu sendiri. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa banyaknya penduduk dan tingkat aksesibilitas menciptakan aglomerasi perkotaan, terutama pada kedua kapanewon tersebut. Sehingga terjadi kesenjangan interaksi antar kapanewon di Kabupaten Sleman.

Indikator terakhir merupakan konektivitas. Analisis ini dapat dilakukan dengan menggunakan Beta Index sebagai parameter konektivitas wilayah. Nilai Beta Index berbanding lurus dengan konektivitas wilayah. Apabila nilai Beta Index semakin baik, maka konektivitas antar simpul dari suatu wilayah tersebut akan lebih baik. Dari hasil perhitungan Beta Index, ditemukan bahwa konektivitas antar simpul di Kabupaten Sleman sudah cukup memadai.

Tingginya kepemilikan kendaraan pribadi di Kabupaten Sleman menjadi salah satu aspek pergerakan di Kabupaten Sleman cenderung tidak efisien. Keterbatasan angkutan umum, baik jalur atau rute transportasi maupun jumlah armada atau modanya juga menjadi faktor penghambat manfaat yang berpotensi didapatkan dari penyediaan angkutan umum. Perlu adanya keterpaduan fisik layanan transportasi, sehingga antar moda transportasi dan antar kawasan (perdesaaan-perkotaan) dapat saling terintegrasi. Keterpaduan fisik layanan transportasi juga memudahkan dalam perpindahan rute antar moda transportasi, misalnya berupa *interchange* dari moda kereta api dengan moda bus.

2.3.2.4.3 KLHS RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029

Berdasarkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 yang sudah tervalidasi, kesepakatan isu pembangunan berkelanjutan paling strategis adalah sebagai berikut:

1. **Alih fungsi lahan yang tidak sesuai tata ruang**

   Isu pembangunan berkelanjutan paling strategis alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang merupakan kelompok isu terkait perubahan penggunaan lahan dari fungsi yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang menjadi fungsi lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti degradasi lingkungan, penurunan kualitas tanah, dan hilangnya ruang terbuka hijau atau lahan pertanian. Selain itu, alih fungsi lahan yang tidak sesuai dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengurangi kemampuan lahan untuk mendukung kehidupan manusia dan satwa. Oleh karena itu, penting untuk mengendalikan dan mengawasi alih fungsi lahan agar sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

   Beberapa isu terkait alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang di Kabupaten Sleman antara lain: Masih adanya masyarakat yang membangun rumah di daerah rawan bencana; alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan, permukiman atau kegiatan lainnya; ruang terbuka berubah fungsi menjadi perkerasan dan menghasilkan *runoff*; Banyaknya usaha/kegiatan yang menggunakan area sempadan sungai.

2. **Pola pikir SDM yang belum sejalan dengan pembangunan berkelanjutan**

   Pola pikir sumber daya manusia (SDM) yang belum sejalan dengan pembangunan berkelanjutan sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya prinsip-prinsip keberlanjutan. SDM dengan pola pikir seperti ini cenderung fokus pada keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial jangka panjang. Hal ini dapat menghambat implementasi praktik-praktik ramah lingkungan dan inovasi yang mendukung keberlanjutan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang pembangunan berkelanjutan, serta integrasi nilai-nilai keberlanjutan dalam budaya masyarakat dan kebijakan pemerintah.

   Beberapa isu terkait pola pikir SDM yang belum sejalan dengan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sleman antara lain: Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah dan sampah; Angka *stunting* atau anak penderita gizi buruk yang masih tinggi; Adanya Anak putus sekolah; Belum terdapat kurikulum lingkungan di institusi

pendidikan; Peningkatan permasalahan kerawanan sosial (konflik antar suku, kejahatan jalanan, prostitusi dan penyakit sosial lainnya; Kurangnya kesadaran masyarakat terkait dokumen kependudukan.

3. Belum efektifnya tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum

Belum efektifnya tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum sering kali disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk korupsi, kurangnya transparansi, dan akuntabilitas yang rendah. Meskipun berbagai regulasi dan lembaga penegak hukum telah dibentuk, kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum tidak cukup meningkat. Selain itu, remunerasi yang diberikan kepada aparat penegak hukum belum mampu meningkatkan kinerja secara signifikan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem hukum dan tata kelola pemerintahan, termasuk penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang lebih ketat.

Beberapa isu terkait belum efektifnya tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum di Kabupaten Sleman antara lain: belum adanya aturan jelas terkait pelanggaran lingkungan; keterbatasan personil pengawasan dibandingkan dengan luasan wilayah; kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga terkait penyelesaian isu lingkungan; pengawasan pertambangan pada bangunan pengendali daya rusak air; belum optimalnya penyelenggaraan *e-gov* (*smart city*); bantuan kepada yang masyarakat miskin masih banyak yang salah sasaran dan kurang transparan.

4. Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi

Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi adalah dua masalah yang saling terkait dan berdampak signifikan pada stabilitas sosial dan ekonomi suatu negara. Kemiskinan terjadi ketika individu atau kelompok tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya dasar seperti makanan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Di sisi lain, kesenjangan ekonomi merujuk pada ketidakmerataan distribusi pendapatan dan kekayaan diantara berbagai kelompok sosial. Faktor-faktor seperti rendahnya mobilitas sosial, sistem pajak yang tidak adil, dan kurangnya kesempatan kerja yang layak memperburuk situasi ini. Akibatnya, kesenjangan ekonomi dapat memperdalam kemiskinan, menciptakan ketidakpuasan sosial, dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Beberapa isu terkait kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di Kabupaten Sleman antara lain: ketimpangan pendapatan warga pendatang (menengah atas) dengan warga setempat (menengah bawah); laju peningkatan pendapatan masyarakat menengah bawah tidak secepat kelompok masyarakat menengah atas; pembangunan antar wilayah yang masih belum merata; rendahnya daya saing ekonomi lokal; belum optimalnya desa-desa wisata atau objek wisata sebagai salah satu aset peningkatan pendapatan daerah.

5. Tingginya kerawanan bencana alam

Tingginya kerawanan bencana alam di Indonesia secara umum disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kondisi geografis dan morfologi yang rawan bencana seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Selain itu, kerusakan lingkungan, kemiskinan, urbanisasi, perubahan budaya, dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk memperoleh informasi tentang mitigasi bencana juga berkontribusi terhadap tingginya kerawanan ini.

Indonesia, yang terletak di Cincin Api Pasifik, memiliki risiko tinggi terhadap berbagai jenis bencana alam, menjadikannya salah satu negara dengan tingkat risiko bencana tertinggi di dunia.

Beberapa isu terkait tingginya kerawanan bencana alam di Kabupaten Sleman antara lain: masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bangunan tahan gempa; masih banyak bangunan yang didirikan di kawasan rawan bencana; belum adanya pendataan/pemetaan kawasan bencana non alam (bencana sosial); masih kurangnya sosialisasi terhadap bencana baik bencana alam maupun bencana sosial; Jalur evakuasi dan jalur pertambangan yang masih bercampur.

6. Kerusakan Lingkungan

Kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan terjadi akibat berbagai faktor, baik alami maupun aktivitas manusia. Aktivitas seperti deforestasi, polusi udara dan air, serta penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan degradasi ekosistem. Polusi dari limbah industri dan domestik memperburuk kualitas udara, air, dan tanah, mengancam kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain itu, perubahan iklim yang dipicu oleh emisi gas rumah kaca mempercepat kerusakan lingkungan, mengakibatkan cuaca ekstrem dan kenaikan permukaan laut. Upaya penanggulangan diperlukan untuk memulihkan dan melestarikan lingkungan demi keberlanjutan kehidupan di bumi.

7. Penurunan kualitas lingkungan

Beberapa isu terkait kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan di Kabupaten Sleman antara lain: Kurangnya daerah resapan air berdampak pada ketersediaan air baik tanah maupun permukaan; Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan tumbuhan dan satwa; Kegiatan pembangunan belum memperhatikan kelestarian lingkungan berkelanjutan; Penanganan dan pengelolaan limbah serta persampahan belum optimal; Penurunan kualitas lingkungan akibat polusi suara (kebisingan), udara, air, sampah dan permukiman kumuh serta alih fungsi lahan; Masih kurangnya wawasan pelestarian lingkungan berkelanjutan pada pengembangan desa wisata; dan lain-lain.

8. Infrastruktur yang belum berkonsep pembangunan berkelanjutan

Infrastruktur yang belum berkonsep pembangunan berkelanjutan sering kali mengabaikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial. Proyek-proyek ini cenderung fokus pada keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan efisiensi energi, penggunaan sumber daya yang bijak, atau dampak terhadap ekosistem. Akibatnya, infrastruktur tersebut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, peningkatan emisi karbon, dan ketidakadilan sosial. Selain itu, kurangnya perencanaan yang matang dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan sering kali menimbulkan konflik dan resistensi dari komunitas lokal. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, penting bagi setiap proyek infrastruktur untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Beberapa isu terkait infrastruktur yang belum berkonsep pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sleman antara lain: Dukungan infrastruktur pengelolaan lingkungan hidup belum optimal; sistem pengumpulan sampah

kurang memenuhi kebutuhan masyarakat; kurangnya ruang terbuka untuk kegiatan olahraga; adanya masyarakat di perdesaan masih belum memiliki kloset sehingga sering membuang langsung di sungai; pengelolaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal memerlukan pengupayaan; sarana prasarana untuk disabilitas berupa fasilitas yang inklusif bagi penyandang disabilitas masih kurang; akses terhadap air bersih yang belum merata; kurangnya sarana prasarana pendukung pertanian.

2.3.2.5 Isu Strategis RPJMD

2.3.2.5.1 Isu Strategis Daerah Pengembangan Ekonomi

1. Pengembangan sektor primer penguatan ketahanan pangan lokal hingga pengembangan rantai nilai global melalui revitalisasi dan hilirisasi produk pertanian dan pangan

   Isu strategis daerah yang pertama berangkat dari sektor primer. Sektor yang terdiri atas pertanian, peternakan dan perikanan yang saat ini kondisinya belum optimal perlu ditempatkan dalam tataran penyelesaian permasalahan pertanian lokal, regional dan global.

   Sektor primer, khususnya pertanian, peternakan, dan perikanan, merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Sektor ini kerap menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari skala lokal maupun global. Keterkaitan antara permasalahan sektor primer dengan isu-isu regional, nasional, dan internasional membentuk suatu jaringan yang saling mempengaruhi.

   Salah satu kendala utama dalam meningkatkan kinerja sektor primer di Kabupaten Sleman adalah terbatasnya integrasi ke dalam rantai nilai global. Keterbatasan akses terhadap pasar yang lebih luas, informasi pasar, teknologi modern, serta kendala regulasi, menghambat pengembangan produk yang berdaya saing tinggi. Akibatnya, produktivitas dan pendapatan petani, peternak, dan nelayan cenderung stagnan. Kondisi ini semakin diperparah dengan fluktuasi ekonomi global, perang dagang, dan ketidakpastian politik yang dapat mempengaruhi harga komoditas pertanian, mengganggu rantai pasok, dan menghambat investasi. Perubahan dalam lanskap geopolitik juga dapat mempengaruhi kebijakan perdagangan, investasi, dan kerja sama internasional. Hal ini dapat berdampak pada akses pasar bagi produk pertanian, peternakan, dan perikanan.

   Salah satu kesempatan yang dapat diambil dalam kaitannya dengan Perkembangan teknologi digital menawarkan peluang besar bagi sektor primer. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pertanian, peternakan, dan perikanan dapat meningkatkan efisiensi produksi, memperluas akses pasar, dan meningkatkan kualitas produk. Namun, digitalisasi juga membutuhkan infrastruktur yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten. Sejalan dengan perkembangan teknologi, kecerdasan buatan (*artificial intelengence*/AI) dan otomasi menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi produksi di sektor pertanian. Namun, penerapan teknologi ini bagaikan pedang bermata dua yang perlu dikaji secara hulu hilir, terutama dalam penyediaan tenaga kerja. Menurunnya jumlah petani menempatkan posisi teknologi dan otomasi dalam posisi yang menjadi jalan keluar, meskipun kebijakan pemerintah juga masih mempertahankan regenerasi petani. Pemanfaatan teknologi

otomasi ini memerlukan kebijakan yang seimbang dan berkeadilan bagi petani.

Konsep konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab semakin relevan dalam konteks perubahan iklim. Sektor pertanian, peternakan, dan perikanan memiliki peran penting dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Praktik pertanian berkelanjutan, seperti pertanian organik dan agroforestri, dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan pangan. Namun, perubahan iklim juga membawa tantangan baru, seperti perubahan pola curah hujan, peningkatan suhu, dan munculnya hama dan penyakit baru yang dapat mengganggu produksi.

Perubahan struktur penduduk, seperti urbanisasi dan penuaan penduduk, juga berdampak pada sektor primer. Permintaan terhadap produk pertanian, peternakan, dan perikanan akan berubah seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat. Minat untuk menekuni pertanian sebagai budaya (*agriculture*) cenderung semakin menurun dan dengan demografi petani yang semakin menua, kearifan lokal yang telah berkembang turun temurun juga berpotensi tenggelam dalam konsep pengembangan pertanian yang murni sebagai bisnis sehingga perlu ada kebijakan yang tepat untuk bisa menyeimbangkan kedua sisi agrikultur dan agribisnis.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan kemitraan yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan lembaga penelitian. Kemitraan ini penting untuk membangun sistem produksi yang berkelanjutan, meningkatkan akses terhadap teknologi dan informasi, serta mengembangkan produk-produk yang bernilai tambah. Idealnya, konsep kemitraan ini perlu ditekankan dalam skala regional-global, dimana terjadi tidak hanya globalisasi saja yang terjadi, tetapi prinsip kembali ke akar budaya perlu untuk dikuatkan, sehingga globalisasi terjadi dengan akar budaya yang kuat, tidak hanya menjadi statistik tambahan dalam produksi pertanian tetapi menjadi proses penguatan nilai budaya berbasis pertanian.

Salah satu kebijakan pertanian yang mendukung sektor primer adalah adanya kebijakan perlindungan pertanian pangan berkelanjutan atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Kebijakan ini menempatkan komitmen perlindungan lahan pertanian yang ditetapkan oleh daerah dan disepakati dalam skala nasional. Namun demikian, kendala utama yang dihadapi dalam kebijakan ini adalah terbatasnya pengembangan kebijakan turunan yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan Nilai Tukar Petani terutama di komoditas padi yang cenderung rendah justru akan menghambat petani untuk meraih kemapanan dan kesejahteraan. Kebijakan pertanian pangan berkelanjutan harus didiskusikan dalam skala nasional untuk kemudian mengangkat kembali komoditas lokal dan komoditas yang bernilai jual dengan tidak meninggalkan nilai budaya pertanian yang sudah ada.

Kinerja sektor primer di Kabupaten Sleman sangat dipengaruhi oleh dinamika global. Untuk mengatasi tantangan yang ada, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Dengan mengadopsi teknologi modern, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan membangun kemitraan yang kuat, sektor primer di Kabupaten Sleman dapat tumbuh lebih berkelanjutan dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

2. Peran kinerja sektor kekunder pada berbagai skala di panggung regional dan global

   Isu strategis daerah yang kedua berangkat dari sektor sekunder. Sektor sekunder, khususnya industri pengolahan, merupakan pilar penting dalam perekonomian Kabupaten Sleman. Optimalisasi kinerja sektor ini sering kali terkendala oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Isu-isu global yang kompleks saling terkait dan memberikan dampak signifikan terhadap dinamika sektor sekunder di tingkat lokal.

   Profil ekonomi sektor sekunder di Kabupaten Sleman yang cenderung merupakan UMKM, meskipun memiliki daya lenting yang baik, memiliki keterbatasan atau keengganan untuk menjadi sebuah unit usaha yang cenderung formal dengan kapasitas yang memadai. Perkembangan UMKM menjadi unit usaha menengah atau besar tentunya menjadi sebuah kebutuhan terutama untuk memaksimalkan potensi mengupayakan kesejahteraan pekerja dan pemilik UMKM.

   Dalam konteks internasional, tantangan pengembangan sektor sekunder adalah masih terbatasnya integrasi ekonomi domestik dan global yang terbatas. Keterbatasan akses terhadap pasar yang lebih luas, informasi pasar, teknologi modern, serta kendala regulasi menghambat pengembangan produk yang berdaya saing tinggi. Akibatnya, produktivitas dan pendapatan pelaku usaha di sektor sekunder cenderung stagnan. Ekonomi global yang dinamis dan penuh ketidakpastian juga mempengaruhi kinerja sektor sekunder. Fluktuasi nilai tukar, perang dagang, dan ketidakstabilan politik dapat mengganggu rantai pasok dan meningkatkan risiko bisnis. Pergeseran geopolitik memiliki implikasi bagi sektor industri terutama bagi sektor industri yang terkena dampak dari kebijakan dumping dari negara-negara produsen. Perubahan kebijakan perdagangan dan investasi di tingkat global dapat mempengaruhi akses pasar dan biaya produksi.

   Dari sisi lingkungan, terdapat beberapa tantangan dari khalayak internasional yang perlu untuk diperhatikan. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab mendorong sektor industri untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam seluruh rantai nilai. Hal ini mencakup penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan, pengurangan limbah, dan peningkatan efisiensi produksi. Peralihan menuju energi bersih dan terjangkau menjadi isu global yang mendesak. Sektor industri, sebagai salah satu konsumen energi perlu melakukan efisiensi energi dan beralih ke sumber energi terbarukan. Tantangan ini sekaligus menjadi peluang bagi pengembangan industri berbasis energi terbarukan di Sleman.

   Di sisi lain, dengan bentuk sektor sekunder di Kabupaten Sleman yang beberapa masih bersifat tradisional terkadang terdampak oleh terjadinya perubahan iklim. Kenaikan suhu, perubahan pola curah hujan, dan peningkatan frekuensi bencana alam dapat mengganggu proses produksi dan meningkatkan biaya produksi. Prinsip-prinsip mitigasi-adaptasi terhadap perubahan iklim perlu segera menjadi pertimbangan bagi seluruh pelaku ekonomi industri secara umum.

   Dalam penempatan kegiatan sektor sekunder, sering terjadi singgungan keterkaitan dengan konsep kota dan permukiman yang berkelanjutan. Kegiatan industri cenderung menjadi pelengkap dan sumber penghidupan dari beberapa masyarakat perkotaan. Di sisi lain, kegiatan industri yang berskala besar cenderung memerlukan timbal balik dengan kegiatan

permukiman yang ada di perkotaan. Pertumbuhan industri perlu untuk ramah lingkungan dan berupaya pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara umum. Oleh karena itu, dampak-dampak langsung sektor sekunder selayaknya dimonitor dan dikendalikan. Dalam jangka panjang, pembangunan kawasan industri yang ramah lingkungan dan berorientasi pada ekonomi sirkular menjadi penting.

Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol akan menjadi sebuah jembatan penting bagi akses regional komoditas sektor sekunder di Kabupaten Sleman. Pergerakan barang diharapkan akan semakin lancar yang jika diikuti dengan penempatan Kawasan Peruntukan Industri yang tepat akan semakin meningkatkan daya tarik sektor sekunder di Kabupaten Sleman. Adanya isu pengembangan jaringan gas perkotaan juga dapat meningkatkan daya saing pengembangan sektor sekunder ini.

Digitalisasi dan transformasi teknologi membuka peluang baru bagi sektor industri. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat meningkatkan efisiensi produksi, memperluas akses pasar, dan mendorong inovasi. Namun, digitalisasi juga membutuhkan investasi yang besar dan sumber daya manusia yang kompeten. Pertumbuhan kecerdasan buatan dan otomasi akan mengubah lanskap industri. Penggunaan robot dan sistem otomasi dapat meningkatkan produktivitas namun juga menimbulkan tantangan baru, seperti pengangguran dan perubahan keterampilan yang dibutuhkan tenaga kerja.

Lebih lanjut, kerja sama antara pemerintah dan pelaku industri menjadi penting untuk menempatkan tujuan-tujuan induk dari kegiatan industri yakni penyejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan sektor sekunder terutama dalam skala besar diharapkan mampu memenuhi kaidah-kaidah ESG (*Environmental, Social dan Government*).

Kinerja sektor sekunder di Kabupaten Sleman sangat dipengaruhi oleh dinamika global. Untuk mengatasi tantangan yang ada, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Dengan memperhatikan isu-isu global dan melakukan adaptasi yang tepat, sektor sekunder di Kabupaten Sleman dapat tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

3. Posisi dan peran sektor tersier di Kabupaten Sleman dalam tatanan ekonomi regional dan global

   Sektor tersier, yang meliputi perdagangan dan pariwisata, merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian modern. Di Kabupaten Sleman, sektor ini memiliki potensi yang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Namun, optimalisasi kinerja sektor tersier ini sering kali terkendala oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal.

   Keterbatasan integrasi ekonomi, baik di tingkat domestik maupun global, menjadi salah satu tantangan utama bagi sektor perdagangan dan pariwisata di Sleman. Penempatan komoditas perdagangan dalam nilai rantai global sangat terbatas mengingat produk sektor sekunder di Kabupaten Sleman cenderung bersifat UMKM dengan banyaknya perdagangan dimana Kabupaten Sleman menjadi konsumen akhir tanpa menciptakan rantai yang lebih panjang. Inovasi-inovasi sektor sekunder

dalam mendukung sektor perdagangan penting untuk bisa memperpanjang rantai nilai ini.

Fluktuasi ekonomi global, perang dagang, dan ketidakstabilan politik berpotensi semakin jauh mempengaruhi kinerja sektor perdagangan. Perubahan lanskap geopolitik dapat mempengaruhi kebijakan visa, tarif bea cukai, dan perjanjian perdagangan. Terpilihnya Presiden Donald Trump di Amerika dengan berbagai kebijakan internasional yang berbeda arah dari kebijakan presiden sebelumnya dapat berdampak pada arus perdagangan internasional.

Di sisi lain, sektor pariwisata di Kabupaten Sleman cenderung berada dalam kondisi lebih baik, dengan nilai budaya yang sangat baik dan mampu untuk menjadi daya tarik ekonomi sektor tersier. Namun demikian, posisi Kabupaten Sleman (dan DIY secara regional) cenderung belum memiliki posisi sebagai destinasi utama sehingga lama waktu tinggal wisatawan di Kabupaten Sleman masih belum setinggi Bali.

Perubahan iklim dapat berdampak signifikan terhadap sektor pariwisata. Kenaikan suhu, perubahan pola curah hujan, dan peningkatan frekuensi bencana alam dapat merusak destinasi wisata dan mengurangi minat wisatawan sehingga perlu ada intervensi untuk bisa meningkatkan nilai jual daya tarik wisata Kabupaten Sleman secara makro.

Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan jaringan transportasi umum dapat meningkatkan aksesibilitas ke destinasi wisata dan mempercepat pertumbuhan sektor pariwisata dan perdagangan. Namun, pembangunan infrastruktur yang tidak terencana dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Adapun bergesernya bandara utama DIY ke Yogyakarta *International Airport* menjadi sebuah tantangan untuk bisa mempertahankan fondasi pariwisata dan perdagangan yang sudah tersedia di sekitar Bandara Adisutjipto.

Perkembangan teknologi digital membuka peluang baru bagi sektor pariwisata dan perdagangan. Platform digital dapat digunakan untuk mempromosikan destinasi wisata, melakukan transaksi daring, dan meningkatkan efisiensi operasional. Namun, digitalisasi juga membutuhkan infrastruktur yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten. Tekanan terhadap daya beli masyarakat akibat kondisi ekonomi berpotensi mengurangi kinerja sektor tersier.

Kinerja sektor tersier di Kabupaten Sleman dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Untuk meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Dengan memperhatikan tren global dan melakukan adaptasi yang tepat, sektor pariwisata dan perdagangan di Kabupaten Sleman dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

4. Peningkatan daya saing daerah

   Untuk mengakhiri narasi isu strategis yang terkait dengan perekonomian, selain pengembangan spesifik sektoral, diperlukan juga pengembangan daya saing daerah untuk bisa meningkatkan posisi tiap-tiap sektor dalam mata rantai ekonomi nasional maupun global. Kabupaten Sleman, sebagai salah satu daerah dengan potensi pertumbuhan yang tinggi, perlu secara serius memperhatikan upaya peningkatan daya saing daerah. Daya saing daerah tidak hanya ditentukan oleh faktor internal seperti kualitas sumber daya

manusia, infrastruktur, dan iklim investasi, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika global yang kompleks.

Demokratisasi dalam pembangunan daerah menjadi esensial untuk meningkatkan daya saing daerah. Dengan transparansi dari pengembangan kebijakan daerah terutama dalam upaya penanaman modal, investasi akan berpotensi meningkat. Salah satu kendala yang besar terkait pelaksanaan investasi di Kabupaten Sleman adalah terkait kejelasan regulasi, dimana Kabupaten Sleman sebagai bagian dari DIY memiliki regulasi tambahan bila dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia.

Daya saing daerah juga dapat tercermin dari kesiapan daerah untuk mengikuti standar-standar internasional. Standar yang umumnya diperhatikan adalah standar ESG. Dengan kebijakan produksi dan konsumsi yang baik, komitmen dalam mitigasi perubahan iklim serta pengembangan infrastruktur serta kota yang berkelanjutan, maka daya saing daerah diharapkan akan semakin meningkat.

Digitalisasi dan transformasi teknologi juga membuka peluang baru bagi peningkatan produktivitas dan efisiensi. Adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat mempercepat proses bisnis, meningkatkan akses pasar, dan menarik investasi. Adopsi kecerdasan buatan dan otomasi dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi berbagai sektor. Namun, hal ini juga dapat menimbulkan tantangan baru, seperti perubahan pola kerja dan kebutuhan akan keterampilan baru.

Selebihnya, pengembangan sumber dya manusia secara umum akan meningkatkan juga daya saing daerah. Peningkatan daya saing daerah merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan upaya yang berkelanjutan. Dengan memperhatikan dinamika global dan melakukan adaptasi yang tepat, Kabupaten Sleman dapat menjadi daerah yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.

2.3.2.5.2 Isu Strategis Daerah Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Kualitas pengetahuan penduduk sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan dan daya saing global

   Kualitas pengetahuan penduduk merupakan aset yang sangat berharga bagi suatu daerah. Tingkat pengetahuan yang memadai akan memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan, membuat keputusan yang rasional, serta beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Namun, di banyak daerah, termasuk Kabupaten Sleman, kualitas pengetahuan penduduk masih belum merata.

   Dalam era globalisasi, persaingan ekonomi semakin ketat. Peningkatan kualitas pengetahuan penduduk menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing daerah. Tenaga kerja yang terampil dan memiliki pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan pasar akan mampu menciptakan produk dan jasa yang bernilai tambah tinggi. Dengan perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan, terjadi ancaman bagi penggantian kegiatan ekonomi yang padat karya menjadi padat modal (mekanisasi dan otomasi). Perkembangan pendidikan masyarakat perlu diarahkan untuk dapat bisa menempatkan manusia sebagai pengguna teknologi. Kemampuan untuk bisa mempelajari bagaimana mesin belajar, memecahkan masalah kompleks dan sistemik, dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan tepat sasaran menjadi kecerdasan yang banyak dibutuhkan untuk era digital ini. Fondasi

dasar dari kemampuan ini adalah kemampuan literasi, baik literasi, numerasi hingga literasi digital. Dengan maraknya konten sosial media yang semakin merambah gaya hidup masyarakat terutama pada konten-konten yang berbentuk tayangan singkat menjadi disinsentif bagi upaya literasi yang umumnya memerlukan ketahanan dalam mempelajari masalah yang dalam dan kompleks. Kemampuan rentang fokus masyarakat perlu ditingkatkan untuk bisa lebih mendalam menelaah permasalahan sistemik dan pembelajaran-literasi mendalam. Harapannya adalah bahwa masyarakat Kabupaten Sleman memiliki daya saing SDM yang baik.

Peningkatan pendidikan selain sebagai upaya peningkatan daya saing secara ekonomi, juga perlu menekankan upaya pendidikan lingkungan hidup. Sebagai contoh, Perubahan iklim sebagai ancaman global yang membutuhkan tindakan kolektif. Masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang perubahan iklim akan lebih siap menghadapi dampaknya dan berpartisipasi dalam upaya mitigasi dan adaptasi. Transisi menuju energi bersih dan terbarukan juga memerlukan pemahaman masyarakat tentang pentingnya energi berkelanjutan. Pendidikan dan penyuluhan yang efektif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghemat energi dan menggunakan sumber energi terbarukan. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab juga membutuhkan kesadaran masyarakat akan dampak lingkungan dari aktivitas konsumsi mereka. Pendidikan yang memadai dapat mendorong masyarakat untuk memilih produk yang ramah lingkungan dan mengurangi limbah. Secara keseluruhan, pendidikan lingkungan nantinya akan mampu menjadi fondasi utama pembentuk kota yang berkelanjutan.

Untuk membentuk kondisi masyarakat seperti ini, upaya pendidikan dan peningkatan pengetahuan memerlukan kemitraan yang baik. Kemitraan yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk meningkatkan kualitas pengetahuan penduduk. Melalui program-program pendidikan dan pelatihan, masyarakat dapat memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan masa depan.

Salah satu kendala bagi pembangunan pendidikan dan pengetahuan adalah pergeseran struktur demografi, dimana kelas menengah semakin terbebani dengan rasio angka ketergantungan penduduk yang semakin meningkat serta tekanan terhadap kondisi ekonomi kelas menengah yang nantinya semakin mengurangi waktu dan perhatian terhadap pendidikan anak. Dengan meningkatnya harga kebutuhan pokok yang tidak diikuti dengan daya beli menempatkan kedua orang tua untuk harus bekerja mencari uang dan mengurangi perhatian terhadap pendidikan anak, baik pendidikan dalam keluarga maupun pendidikan di institusi pendidikan secara umum.

Salah satu aspek yang harus ditekankan dalam pendidikan adalah pendidikan yang mengajarkan nilai moralitas dan bersifat inklusif. Prinsip tidak ada seorang pun yang ditinggalkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjadi sebuah prinsip yang juga harus disampaikan pada dunia pendidikan. Selain itu, pendidikan yang hanya berorientasi pada nilai skor perlu untuk dihindari dan memulai pada peningkatan nilai moral sehingga pendidikan bersifat sebagai fasilitator bagi pendidikan anak untuk bisa memahami bagaimana sistem dalam kehidupan mereka bekerja. Pendidikan juga harus memuat nilai-nilai budaya supaya terwujud upaya internalisasi nilai budaya pada pendidikan anak.

Kualitas pengetahuan penduduk merupakan faktor kunci dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan meningkatkan kualitas pengetahuan penduduk, Kabupaten Sleman dapat meningkatkan daya saing daerah, mengatasi berbagai tantangan, dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

2. Kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Sleman

   Kualitas kesehatan masyarakat merupakan indikator penting bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan suatu daerah. Di Kabupaten Sleman, seperti halnya daerah lain di Indonesia, kualitas kesehatan masih menghadapi berbagai tantangan. Keterkaitan antara kualitas kesehatan keluarga dengan isu-isu eksternal pemerintahan semakin kompleks, sehingga membutuhkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan.

   Kabupaten Sleman yang mulai melewati masa keemasan bonus demografi dan mulai mengalami peningkatan populasi usia tua, memiliki implikasi yang signifikan terhadap kesehatan. Peningkatan populasi lansia, menghadirkan tantangan unik dalam penyediaan layanan kesehatan. Pergeseran demografi ini menuntut sistem kesehatan untuk beradaptasi dan memberikan pelayanan yang lebih komprehensif dan spesifik bagi kelompok usia ini. Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan masyarakat usia lanjut antara lain berupa peningkatan prevalensi penyakit kronis dimana lansia cenderung memiliki lebih banyak penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung, keterbatasan fungsi fisik seiring bertambahnya usia, kesehatan mental dan kebutuhan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang memerlukan pelayanan tambahan mengingat keterbatasan mobilitas dari para lansia.

   Tantangan lain terkait kesehatan usia muda adalah terkait dengan perubahan pola konsumsi dan produksi masyarakat yang kurang menekankan pada nilai kesehatan dan cenderung menekankan pada efisiensi ekonomi. Bergesernya pola konsumsi masyarakat yang semakin tidak sehat cenderung berakibat pada peningkatan penyakit gaya hidup dan kegagalan tumbuh kembang pada anak. Kesehatan juga banyak terkait dengan bentuk kota dan permukiman yang cenderung belum berkelanjutan untuk kesehatan. Sistem pergerakan yang sangat dimanjakan oleh akses kendaraan individu dan sistem perkotaan dan permukiman yang belum memperhatikan fenomena pulau bahang (*urban heat island*) cenderung mengurangi kebugaran masyarakat. Ruang terbuka baik hijau maupun non hijau yang sejatinya dibutuhkan untuk tumbuh kembang, kebugaran dan kesehatan mental juga cenderung terbatas. Lebih jauh, beberapa jenis hunian yang cenderung menekankan harga murah tetapi minim luas juga memberikan batasan pada ruang tumbuh kembang anak sehingga seharusnya adopsi luasan kaveling minimal perumahan dan kelayakan bangunan juga memperhatikan ruang untuk tumbuh kembang dan kebugaran-kesehatan.

   Tantangan lain bagi kesehatan juga berangkat dari pemenuhan gizi yang bergantung pada kondisi ekonomi dan pengetahuan masyarakat. Dengan keterbatasan daya beli masyarakat dengan disertai dengan keterbatasan pengetahuan, akses terhadap gizi masyarakat juga cenderung terbatas. Muatan informasi di media sosial yang cenderung mudah diakses tetapi tidak tepat sasaran juga sering mengarahkan stigma yang tidak tepat, terutama terkait dengan asupan makanan bergizi. Disinformasi mengenai gizi ini

kadang menjadi sebab kejadian *stunting*, sehingga meskipun sebetulnya tersedia daya beli, namun asupan gizi yang tidak tepat menyebabkan pertumbuhan anak terhambat.

Beberapa kesempatan untuk meningkatkan situasi ini antara lain adalah dengan pemanfaatan perkembangan teknologi digital. Perkembangan teknologi digital membuka peluang baru dalam bidang kesehatan, seperti *telemedicine* dan pemantauan kesehatan jarak jauh.

Lebih lanjut, kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Kolaborasi yang kuat dapat menghasilkan solusi yang inovatif dan berkelanjutan.

Kualitas kesehatan keluarga merupakan isu yang kompleks dan saling terkait dengan berbagai faktor. Untuk meningkatkan kualitas kesehatan keluarga di Kabupaten Sleman, diperlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan memanfaatkan teknologi, upaya peningkatan kualitas kesehatan keluarga dapat mencapai hasil yang lebih optimal.

3. Pemerataan kesejahteraan

   Ketidakmerataan kesejahteraan merupakan masalah kompleks yang dihadapi oleh banyak daerah, termasuk Kabupaten Sleman. Kesenjangan sosial ekonomi yang masih lebar menjadi tantangan dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Keterkaitan antara ketidakmerataan kesejahteraan dengan isu-isu eksternal semakin kompleks, sehingga membutuhkan pendekatan yang multi perspektif dan multi sektoral.

   Ekonomi global yang semakin tidak pasti dapat memperlebar kesenjangan antara kelompok masyarakat. Globalisasi sering kali menguntungkan kelompok masyarakat tertentu, sementara kelompok lainnya justru terpinggirkan. Hal ini dapat memperparah ketimpangan pendapatan dan akses terhadap sumber daya. Fluktuasi ekonomi global dan ketidakpastian politik dapat berdampak negatif terhadap kelompok masyarakat yang rentan, seperti pekerja informal dan masyarakat miskin. Krisis ekonomi global, misalnya, dapat menyebabkan peningkatan pengangguran dan kemiskinan.

   Pertumbuhan kelas menengah dapat mendorong peningkatan permintaan akan barang dan jasa, namun juga dapat meningkatkan ketimpangan jika tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan kelompok masyarakat yang lebih rendah. Tekanan kebijakan pemerintahan saat ini juga cenderung semakin menekan kondisi ekonomi kelas menengah.

   Perkembangan teknologi digital membuka peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kesenjangan digital dapat memperlebar kesenjangan sosial. Masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi akan sulit untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital.

   Urbanisasi yang pesat sering kali disertai dengan pertumbuhan kumuh dan pemukiman informal. Hal ini dapat memperparah ketimpangan akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan pendidikan. Pembentukan perkotaan dan permukiman yang tidak inklusif juga cenderung meningkatkan biaya yang tidak diperlukan, seperti biaya energi, rekreasi dan biaya transportasi. Oleh karena itu pembangunan perkotaan

yang berkelanjutan dapat menjadi sebuah upaya tambahan bagi penguatan kesejahteraan masyarakat.

Ketidakmerataan kesejahteraan merupakan masalah kompleks yang membutuhkan solusi yang komprehensif. Dengan mengidentifikasi akar permasalahan dan membangun kemitraan yang kuat, Kabupaten Sleman dapat mencapai pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

2.3.2.5.3 Isu Strategis Daerah Internalisasi Budaya Lokal

Internalisasi budaya lokal merupakan upaya sadar untuk menanamkan nilai-nilai, norma, dan praktik budaya pada generasi muda. Dalam konteks perkembangan global yang begitu cepat, upaya ini menjadi semakin penting untuk menjaga identitas dan keberagaman budaya. Kabupaten Sleman, sebagai daerah yang kaya akan budaya, memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga kelestarian budaya lokal di tengah arus globalisasi.

Perubahan demografi, seperti urbanisasi dan migrasi, dapat menggeser nilai-nilai budaya. Interaksi dengan budaya lain yang intens dapat memunculkan fenomena akulturasi yang tidak selalu positif. Generasi muda, yang lebih terpapar budaya populer global, cenderung mengadopsi gaya hidup modern yang dapat menggeser nilai-nilai tradisional. Arus media informasi yang cepat dan interaksi antar kelompok usia yang tidak lagi intens cenderung tidak memberi kesempatan untuk terjadinya estafet nilai budaya.

Lebih lanjut, dalam upaya internalisasi budaya lokal, penanaman nilai budaya lokal pada simbol perkotaan dan permukiman, pengembangan produk budaya lokal serta nilai-nilai budaya yang melestarikan lingkungan menjadi penting. Konsep kota yang berkelanjutan tidak hanya mencakup aspek lingkungan, tetapi juga aspek sosial dan budaya. Pembangunan kota yang berkelanjutan harus memperhatikan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Integrasi antara nilai-nilai budaya dengan perencanaan tata ruang dapat menciptakan lingkungan yang lebih hidup dan berkarakter. Ruang-ruang publik yang dapat menjadi etalase budaya yang bersifat seni pertunjukan maupun seni yang dapat dipaparkan dan pembentukan ruang publik yang menjadi ruang interaksi budaya dan tradisi antar generasi perlu turut dikembangkan.

Di sisi lain, perkembangan perkotaan yang tidak memperhatikan nilai budaya justru berpotensi merusak tatanan kebudayaan. Dengan adanya jalan tol yang berpotensi meningkatkan pergerakan dan urbanisasi, jika nilai-nilai budaya tidak turut disematkan dalam simbol kehidupan sehari-hari, pergeseran nilai budaya sangat mungkin terjadi. Urbanisasi yang pesat dapat mengancam kelestarian budaya lokal. Pembangunan yang tidak terkendali dapat merusak situs-situs budaya dan mengubah lanskap sosial.

Nilai-nilai kearifan lokal juga dapat dikembangkan untuk melestarikan budaya lokal. Tradisi produksi pangan maupun produk industri lainnya yang merupakan hasil kearifan budaya lokal perlu lebih lanjut dilestarikan, tidak hanya sebagai produk tapi sebagai narasi cerita mengapa sebuah produk menjadi sebuah tradisi yang dapat hidup turun temurun. Selain itu, kearifan lokal terkait lingkungan hidup juga perlu untuk bisa diterapkan dan disampaikan secara turun temurun untuk memastikan adanya kesinambungan makna dalam tradisi yang melindungi lingkungan.

Digitalisasi dapat menjadi alat yang ampuh untuk melestarikan dan mempromosikan budaya. Melalui media sosial dan platform digital lainnya, budaya lokal dapat diakses oleh masyarakat yang lebih luas.

Untuk menjaga kelestarian budaya lokal, Kabupaten Sleman perlu melakukan beberapa upaya, antara lain:

a. Pendidikan budaya: Memperkuat pendidikan budaya di sekolah-sekolah dan masyarakat.
b. Pelestarian warisan budaya: Melindungi dan melestarikan situs-situs budaya dan benda-benda cagar budaya.
c. Pengembangan ekonomi kreatif: Mengembangkan industri kreatif berbasis budaya untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
d. Kemitraan dengan masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses pelestarian budaya.
e. Pemanfaatan teknologi: Menggunakan teknologi untuk mempromosikan dan melestarikan budaya.

Internalisasi budaya lokal merupakan tantangan yang kompleks, namun juga merupakan investasi jangka panjang. Dengan upaya yang berkelanjutan, Kabupaten Sleman dapat menjaga kelestarian budaya lokal dan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2.3.2.5.4 Isu Strategis Daerah Pengembangan dan Pemerataan Infrastruktur

1. Penguatan infrastruktur untuk peningkatan daya lenting dan daya saing

   Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu daerah. Kabupaten Sleman, sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang dinamis, tak luput dari tantangan terkait keterbatasan infrastruktur. Keterbatasan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan dinamika isu-isu global dan regional yang terus berkembang.

   Peningkatan mobilitas penduduk dan urbanisasi membutuhkan infrastruktur transportasi yang memadai. Sistem angkutan penduduk dalam konteks transportasi cenderung bersifat individual. Dengan kapasitas yang ada saat ini, barangkali kemacetan dan inefisiensi pergerakan masih belum begitu terlihat. Namun seiring dengan perkembangan kepadatan perkotaan, perlu ada pemikiran mengenai sistem angkutan yang lebih efisien. Salah satu faktor pendorong segera diperlukannya sistem angkutan ini adalah adanya pembangunan jalan tol yang dapat meningkatkan volume pergerakan kendaraan. Meskipun demikian, seperti disampaikan pada bahasan ekonomi, jalan tol ini dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas.

   Dari sisi perkembangan perkotaan, infrastruktur menjadi salah satu elemen yang penting untuk dicakup. Perkembangan perkotaan yang berpusat tapi tidak terbatas pada sekitar Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) menyebabkan diperlukannya keandalan infrastruktur perkotaan terutama dalam menopang perekonomian dan daya dukung daya tampung lingkungan. Konsep kota berkelanjutan menuntut adanya infrastruktur yang mendukung mobilitas rendah karbon, pengelolaan sampah yang efektif, dan aksesibilitas terhadap ruang terbuka hijau.

   Pengembangan infrastruktur juga tentunya memerlukan pertimbangan pada infrastruktur yang lebih mengintegrasikan konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan melibatkan berbagai aspek, seperti perencanaan tata ruang yang terintegrasi, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta partisipasi masyarakat.

Infrastruktur yang dibangun harus mendukung mobilitas yang berkelanjutan, akses terhadap layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi, serta pengelolaan limbah yang efektif. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga harus mempertimbangkan aspek sosial, seperti keadilan sosial dan inklusivitas.

Salah satu tantangan dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan adalah adanya *trade-off* antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Namun, dengan perencanaan yang matang dan inovasi teknologi, kedua hal tersebut dapat dicapai secara simultan. Misalnya, pembangunan transportasi umum yang efisien dapat mengurangi kemacetan lalu lintas dan emisi gas rumah kaca, sekaligus meningkatkan aksesibilitas masyarakat.

Masih terkait dengan infrastruktur yang berkonsep pembangunan berkelanjutan, untuk mencapai salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, diperlukan infrastruktur yang mendukung pengelolaan limbah dan daur ulang. Pembangunan permukiman dan industri yang dilengkapi dengan infrastruktur pengolahan limbah yang memadai dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pembangunan infrastruktur pengelolaan limbah yang memadai merupakan langkah krusial dalam mewujudkan prinsip konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Keterkaitan antara keduanya sangat erat, dimana infrastruktur yang baik mendukung terciptanya sistem pengelolaan limbah yang efektif, sehingga meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Dalam konteks perubahan iklim dan ketidakpastian ekonomi global, infrastruktur diharapkan juga memberikan potensi daya lenting yang baik bagi kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, perubahan iklim meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Infrastruktur yang tidak tahan bencana dapat menyebabkan kerugian yang besar dan menghambat pemulihan pasca bencana. Selain itu, pengembangan infrastruktur pendukung yang menjadi kunci bagi mitigasi bencana tetap menjadi esensial bagi pembangunan daerah.

Dari sisi ekonomi, integrasi ekonomi domestik dan global yang semakin erat menuntut peningkatan kualitas infrastruktur. Jalan tol, pelabuhan, bandara, dan jaringan telekomunikasi yang memadai menjadi prasyarat bagi mobilitas barang dan jasa, serta menarik investasi. Keterbatasan infrastruktur di suatu daerah dapat menghambat konektivitas dengan pusat-pusat ekonomi lainnya, sehingga mengurangi daya saing produk lokal.

Tidak lupa, dalam konteks perkembangan dunia digital, digitalisasi menuntut ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang memadai. Jaringan internet yang cepat dan stabil menjadi prasyarat bagi pengembangan ekonomi digital dan *e-government*. Pemanfaatan teknologi diharapkan dapat menjadi tumpuan dalam pengembangan kota cerdas, sehingga nantinya dapat dilakukan pemanfaatan kecerdasan buatan dan teknologi otomasi yang nantinya akan lebih cermat dan membantu kinerja pemerintah dalam mengelola infrastruktur.

Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks global yang semakin kompleks, Kabupaten

Sleman perlu secara proaktif mengatasi tantangan infrastruktur untuk dapat bersaing dan berkembang secara berkelanjutan.

2. Perwujudan ruang wilayah huni yang manusiawi dan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan yang berkelanjutan

   Keterbatasan ruang wilayah layak huni merupakan permasalahan kompleks yang dihadapi oleh banyak daerah, termasuk Kabupaten Sleman. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan pembangunan infrastruktur yang pesat semakin mempersempit ruang gerak untuk pengembangan wilayah.

   Konsep kota berkelanjutan menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keterbatasan ruang wilayah dapat menghambat upaya menciptakan kota yang berkelanjutan. Pembangunan yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kemacetan lalu lintas, dan penurunan kualitas hidup.

   Konsep yang paling mengekang dan tidak berkelanjutan dari ruang wilayah permukiman di Kabupaten Sleman adalah terkait dengan segregasi yang terkait dengan daya beli masyarakat. Harga lahan di Kabupaten Sleman yang bervariatif dan terkadang tidak sesuai dengan daya beli masyarakat cenderung menempatkan masyarakat yang berpenghasilan upah minimum regional (UMR) DIY hanya mampu membeli hunian di pinggiran Kabupaten Sleman. Pengembangan hunian dalam bentuk vertikal memang sudah mulai dilaksanakan, namun demikian masyarakat belum sepenuhnya mengadopsi gaya hidup permukiman vertikal.

   Peningkatan mobilitas penduduk mendorong urbanisasi dan sementara keterbatasan daya beli mendorong suburbanisasi. Perkembangan infrastruktur transportasi, seperti pembangunan jalan tol dan jaringan transportasi umum, dapat memperluas akses ke ruang dan mengurangi kepadatan di pusat kota, namun jika tidak direncanakan dengan baik, dapat memicu *urban sprawl* dan memperburuk masalah kemacetan serta memperburuk masalah keterbatasan ruang. Dalam konteks demokrasi, keterbatasan ruang wilayah layak huni dapat memicu konflik kepentingan antara berbagai kelompok masyarakat. Perencanaan tata ruang yang tidak partisipatif dapat memicu ketidakadilan dan ketidakpuasan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pemanfaatan ruang. Untuk mengatasi permasalahan keterbatasan ruang, diperlukan kemitraan yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Kolaborasi ini penting untuk merumuskan kebijakan tata ruang yang komprehensif dan berkelanjutan.

   Perubahan demografi, seperti peningkatan urbanisasi, memberikan tekanan yang besar terhadap ketersediaan ruang. Pertumbuhan penduduk yang pesat di perkotaan membutuhkan penyediaan perumahan, infrastruktur, dan fasilitas publik yang memadai. Sementara itu perlu ada pertimbangan juga profil demografi pertumbuhan masyarakat dan jenis pelayanan infrastruktur yang ada. Infrastruktur yang ada diharapkan semakin inklusif dengan menyesuaikan perubahan struktur demografi. Pertumbuhan kelas menengah meningkatkan permintaan akan perumahan yang berkualitas dan fasilitas publik yang memadai, termasuk di dalamnya kebutuhan akan RTH baik ruang terbuka hijau maupun ruang terbuka non hijau.

Keterbatasan ruang wilayah merupakan tantangan serius yang dihadapi oleh Kabupaten Sleman. Namun, dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi yang baik, tantangan ini dapat diubah menjadi peluang. Melalui pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, Kabupaten Sleman dapat membangun kota yang lebih baik dan berkelanjutan.

2.3.2.5.5 Isu Strategis Daerah Pelestarian Lingkungan Hidup

1. Perbaikan kualitas lingkungan hidup sebagai fondasi dasar pembangunan dan kontribusi peran dalam pembangunan berkelanjutan

   Kualitas lingkungan hidup merupakan isu krusial yang tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga pada keberlanjutan pembangunan. Kabupaten Sleman, sebagai salah satu daerah yang mengalami pertumbuhan pesat, menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Keterkaitan antara kualitas lingkungan dengan isu-isu global semakin kompleks dan memerlukan pendekatan yang komprehensif. Dengan cerminan kondisi lingkungan hidup yang berbasis pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berupa Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan, maka diharapkan ada upaya riil untuk menyelesaikan permasalahan ini.

   Dengan kapasitas daya dukung air dan lahan yang terbatas, perlu ada upaya untuk mengembalikan jasa ekosistem yang nantinya dapat mendukung perbaikan daya dukung air dan lahan. Perlindungan ini akan banyak terkait dengan pengaturan tata ruang wilayah. Penyediaan ruang-ruang hijau yang dapat memurnikan air dan ruang yang berfungsi pengaturan tata air dan banjir diharapkan dapat meningkatkan suplai kualitas dan kuantitas air. Sementara dari sisi lahan, dengan adanya perlindungan pertanian berkelanjutan dan lahan sawah yang dilindungi, sebetulnya sudah terdapat mekanisme perlindungan ini. Namun demikian, masih terjadi juga kegiatan-kegiatan perusakan lingkungan, umumnya berupa perubahan bentang alam dimana bukit-bukit yang ada di Kabupaten Sleman diubah menjadi perumahan ataupun dilakukan pertambangan. Kegiatan-kegiatan *irreversibel* ini yang nantinya menjadi tantangan terutama dalam penegakan hukum sebagai proses pengendaliannya.

   Perubahan iklim telah menjadi tantangan global yang semakin mendesak. Kenaikan suhu rata-rata global, perubahan pola curah hujan ekstrem, dan peningkatan frekuensi serta intensitas bencana alam adalah beberapa dampak nyata dari perubahan iklim. Fenomena ini tidak hanya mengancam ekosistem alami, tetapi juga berdampak signifikan terhadap kualitas hidup manusia dan keberlanjutan pembangunan.

   Salah satu faktor pendorong utama perubahan iklim adalah pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan. Pembangunan perekonomian dalam skala besar telah menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca, alih fungsi lahan, dan degradasi lahan. Pertumbuhan populasi dan peningkatan permintaan akan sumber daya alam semakin memperparah situasi. Pertumbuhan kelas menengah di Kabupaten Sleman juga mendorong peningkatan pola konsumsi. Konsumsi yang berlebihan ini, terutama untuk barang-barang yang tidak esensial dan berumur pendek, telah berkontribusi pada peningkatan produksi limbah, penggunaan sumber daya alam yang tidak efisien, dan peningkatan emisi karbon.

Keterkaitan antara perubahan iklim, konsumsi berlebih, dan degradasi lingkungan membentuk suatu siklus yang saling memperkuat. Perubahan iklim dapat mengganggu ekosistem dan mengurangi produktivitas pertanian, sehingga berdampak pada ketersediaan pangan dan mendorong perubahan pola konsumsi. Di sisi lain, upaya untuk mengatasi perubahan iklim, seperti pembangunan infrastruktur energi terbaru, juga dapat menimbulkan dampak lingkungan jika tidak direncanakan dengan baik.

Konsep kota berkelanjutan menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kualitas lingkungan yang buruk dapat menghambat upaya membangun kota yang berkelanjutan. Pencemaran udara, air, dan tanah, serta pengelolaan sampah yang tidak memadai, adalah beberapa contoh permasalahan lingkungan yang sering dihadapi oleh perkotaan. Urbanisasi yang pesat dapat meningkatkan tekanan terhadap lingkungan, terutama di daerah perkotaan. Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi dapat menyebabkan peningkatan produksi limbah, polusi udara, dan kerusakan lahan. Pengembangan permukiman di Kabupaten Sleman betul-betul perlu memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang ada sehingga ketika dibutuhkan, pengembangan daya dukung dan daya tampung rekayasa seperti penyediaan infrastruktur air minum, sampah dan limbah dapat menjadi solusi yang meningkatkan kualitas lingkungan.

Untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang baik dan mendukung berbagai kebijakan lingkungan hidup di skala dunia yang telah disepakati, kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting. Kolaborasi yang kuat dapat menghasilkan solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan sangat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup.

Sebagai pelengkap dalam upaya teknis menyelesaikan permasalahan, perkembangan teknologi digital membuka peluang baru untuk pengelolaan lingkungan yang lebih efektif. Sistem informasi geografis (SIG), sensor, dan *big data* dapat digunakan untuk memantau kualitas lingkungan, mengidentifikasi masalah, dan mengevaluasi dampak kebijakan. Adanya sistem monitor lingkungan sejenis kota cerdas dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas kebijakan sebagai respons terhadap kondisi lingkungan hidup.

Kualitas lingkungan hidup merupakan isu yang kompleks dan saling terkait dengan berbagai aspek kehidupan. Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Kabupaten Sleman perlu mengembangkan kebijakan dan program yang inovatif untuk mengatasi tantangan lingkungan yang dihadapi.

2. Ketangguhan terhadap bencana

   Kabupaten Sleman, seperti banyak daerah lainnya di Indonesia, rentan terhadap berbagai jenis bencana alam. Mulai dari bencana geologi seperti gempa bumi, erupsi gunung api dan tanah longsor hingga bencana hidrometeorologi seperti banjir dan angin kencang. Penting untuk memahami bahwa risiko bencana bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan saling terkait dengan berbagai isu global dan lokal. Perubahan iklim semakin meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam

khususnya bencana hidrometeorologi. Kenaikan suhu global, perubahan pola curah hujan, dan kenaikan permukaan air laut meningkatkan risiko banjir, kekeringan, dan kejadian ekstrem lainnya.

Adanya peningkatan frekuensi dan intensitas bencana ini perlu untuk didekati melalui dua pendekatan yakni pendekatan kapasitas dan pendekatan infrastruktur fisik. Sebagai pendekatan fisik, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah menyampaikan Konsep kota berkelanjutan yang menekankan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dan resilien terhadap bencana. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dapat mengurangi risiko bencana dan mengurangi keekstreman bencana. Peningkatan mobilitas penduduk dan urbanisasi dapat meningkatkan kerentanan terhadap bencana, terutama di daerah perkotaan yang padat penduduk. Perlu ada pertimbangan akibat perubahan struktur demografi dimana penduduk kelas menengah dengan daya beli terbatas cenderung yang akan terlokasi di kawasan pinggiran dan membentuk kepadatan baru yang nantinya perlu memerlukan pelayanan mitigasi bencana. Adapun, perkembangan pembangunan fisik baik untuk hunian dan pariwisata di wilayah lereng Merapi yang semakin membutuhkan perhatian dan tindakan tegas untuk bisa memastikan tidak ada kegiatan yang berdampak pada kehidupan masyarakat.

Dari sisi kapasitas, pendidikan dan peningkatan pengetahuan umum masyarakat terhadap bencana di Kabupaten Sleman memang sudah berada pada level yang cukup baik, dengan adanya berbagai permohonan untuk penyesuaian pohon yang rawan terkena angin kencang dan berbagai upaya pembangunan yang mulai menyediakan sistem peresapan air yang lebih berkelanjutan. Namun demikian, tetap diperlukan kemitraan lebih jauh untuk bisa memastikan meningkatkan kapasitas dan ketahanan masyarakat. Kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting dalam upaya pengurangan risiko bencana. Kolaborasi yang kuat dapat meningkatkan efektivitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi upaya penanggulangan bencana.

Dari sisi peningkatan kapasitas, perkembangan teknologi digital membuka peluang baru dalam pengelolaan bencana. Sistem peringatan dini berbasis teknologi, pemantauan bencana melalui satelit, dan penggunaan *big data* dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam merespons bencana.

Keterbatasan ruang wilayah, pertumbuhan penduduk, dan perubahan iklim menjadi tantangan utama dalam pengelolaan risiko bencana di Kabupaten Sleman. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif, antara lain:

a. Peningkatan kesadaran masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana dan pentingnya upaya pencegahan.
b. Penguatan sistem peringatan dini: Membangun sistem peringatan dini yang efektif untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat.
c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia: Melakukan pelatihan bagi petugas penanggulangan bencana dan masyarakat.
d. Pengembangan rencana kontingensi: Menyusun rencana kontingensi yang komprehensif untuk berbagai jenis bencana.
e. Kerja sama antar sektor: Membangun kerja sama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam upaya penanggulangan bencana.

f. Pengembangan infrastruktur yang tahan bencana: Membangun infrastruktur yang tahan terhadap bencana dan dapat berfungsi sebagai tempat evakuasi.

Pengelolaan risiko bencana merupakan tantangan kompleks yang membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan memanfaatkan teknologi yang ada, Kabupaten Sleman dapat meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan mengurangi dampak negatifnya.

2.3.2.5.6 Isu Strategis Daerah Transformasi Tata Kelola Pemerintahan

Transformasi tata kelola pemerintahan merupakan suatu keharusan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. Di Kabupaten Sleman, upaya transformasi tata kelola pemerintahan menjadi semakin mendesak mengingat dinamika global yang semakin kompleks dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas layanan publik. Beberapa perspektif yang perlu diperhatikan dalam transformasi tata kelola pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Demokratisasi dan tata kelola pemerintahan

   Demokratisasi yang belum optimal dapat menghambat proses transformasi tata kelola pemerintahan. Partisipasi masyarakat yang terbatas dalam pengambilan keputusan dapat menyebabkan kebijakan publik yang kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dapat memicu praktik korupsi dan kolusi. Ketersediaan aplikasi digital, seperti E-Lapor Sleman telah menjadi sarana untuk meningkatkan kesenjangan ini. Namun demikian, aplikasi ini lebih digunakan sebagai bentuk pengendalian / aduan, belum sebagai upaya untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan. Adapun forum-forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang telah dilaksanakan memang menjadi sebuah forum demokrasi. Namun demikian, dalam proses musrenbang, tidak pelak terjadi pengerucutan atau generalisasi dari isu permasalahan sehingga terkadang permasalahan daerah tidak sepenuhnya terakomodasi. Sistem pengaduan dan sistem perencanaan ini sebaiknya digunakan sebagai komplementer untuk meningkatkan kapasitas pelayanan pemerintahan daerah.

2. Penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan

   Penegakan hukum yang tidak konsisten dan ketidakpastian hukum dapat menciptakan iklim investasi yang tidak kondusif dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, lemahnya penegakan hukum dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tidak semua pelanggaran peraturan perundangan ditindak oleh pemerintah. Sering kali aspek sosial dan lingkungan hidup menjadi korban dari pelanggaran-pelanggaran ini. Adanya penegakan hukum yang nantinya perlu bertindak dalam dua arah yakni preventif dan kuratif diharapkan mampu untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum.

3. Pengembangan SDM dan tata kelola pemerintahan

   Kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) sangat menentukan keberhasilan reformasi birokrasi. Peningkatan kompetensi dan

profesionalisme ASN menjadi kunci dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. SDM Pemerintahan di Kabupaten Sleman cenderung berada di kondisi yang baik. Akan tetapi peningkatan kapasitas lebih lanjut dari SDM pemerintahan terutama di dalam sistem berpikir dinamis dan holistik nantinya akan menjadi terobosan untuk bisa memastikan interkoneksi antar sektor menjadi lebih baik.

4. Pemanfaatan teknologi informasi dan tata kelola pemerintahan

   Pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. SPBE sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan saat ini memang sudah dilaksanakan, tetapi masih terdapat kendala-kendala seperti keamanan digital serta pengelolaan data dan informasi pemerintahan yang diharapkan dapat berguna juga untuk kepentingan masyarakat, baik dalam penggunaan data maupun penelitian lebih lanjut terkait pengembangan daerah.

5. Reformasi kalurahan

   Reformasi kalurahan merupakan bagian penting dari upaya untuk meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa. Upaya mengungkit inisiatif kepada pemerintah kalurahan diharapkan dapat meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.

Transformasi tata kelola pemerintahan merupakan proses yang berkelanjutan dan membutuhkan komitmen dari semua pihak. Dengan melakukan reformasi birokrasi yang komprehensif, Kabupaten Sleman dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

Isu strategis RPJMD merupakan hasil penyelarasan serta pengintegrasian dari isu-isu yang tertuang di dalam dokumen perencanaan lainnya sebagaimana telah diuraikan pada sub bab sebelumnya. Adapun isu strategis lingkungan hidup sebagaimana tertuang di dalam Dokumen KLHS RPJMD, juga telah dilakukan proses integrasi sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.134 Persandingan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 dan KLHS RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029

No	RPJMD Tahun 2025-2029		Isu dalam KLHS
1	Pengembangan ekonomi	1. Pengembangan sektor primer dalam penguatan ketahanan pangan lokal hingga pengembangan rantai nilai global	(No. 1) Pola pikir sumber daya manusia yang belum sejalan dengan pembangunan berkelanjutan; (No. 4) Alih fungsi lahan yang tidak sesuai tata ruang; (No. 5) Infrastruktur yang belum berkonsep pembangunan berkelanjutan
		2. Peran kinerja sektor sekunder pada berbagai skala di panggung regional dan global	(No. 1) Pola pikir sumber daya manusia yang belum sejalan dengan pembangunan berkelanjutan; (No. 4) Alih fungsi lahan yang tidak sesuai tata ruang;

			(No. 5) Infrastruktur yang belum berkonsep pembangunan berkelanjutan
		3. Posisi dan peran sektor tersier di Kabupaten Sleman dalam tatanan ekonomi regional dan global	(No. 1) Pola pikir sumber daya manusia yang belum sejalan dengan pembangunan berkelanjutan; (No. 4) Alih fungsi lahan yang tidak sesuai tata ruang; (No. 5) Infrastruktur yang belum berkonsep pembangunan berkelanjutan
		4. Peningkatan daya saing daerah	(No. 1) Pola pikir sumber daya manusia yang belum sejalan dengan pembangunan berkelanjutan; (No. 3) Kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan (No. 4) Alih fungsi lahan yang tidak sesuai tata ruang; (No. 5) Infrastruktur yang belum berkonsep pembangunan berkelanjutan
2	Pengembangan sumber daya manusia	1. Kualitas pengetahuan penduduk sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan dan daya saing global	(No. 1) Pola pikir sumber daya manusia yang belum sejalan dengan pembangunan berkelanjutan; (No. 5) Infrastruktur yang belum berkonsep pembangunan berkelanjutan
		2. Kualitas kesehatan masyraakat di Kabupaten Sleman	(No. 1) Pola pikir sumber daya manusia yang belum sejalan dengan pembangunan berkelanjutan; (No. 3) Kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan; (No. 5) Infrastruktur yang belum berkonsep pembangunan berkelanjutan; (No. 7) Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi
		3. Pemerataan kesejahteraan	(No. 1) Pola pikir sumber daya manusia yang belum sejalan dengan pembangunan berkelanjutan; (No. 5) Infrastruktur yang belum berkonsep pembangunan berkelanjutan; (No. 7) Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi
3	Internalisasi budaya lokal		(No. 1) Pola pikir sumber daya manusia yang belum sejalan dengan pembangunan berkelanjutan

4	Pengembangan dan pemerataan infrastruktur	1. Penguatan infrastruktur untuk peningkatan daya lenting dan daya saing	(No. 3) Kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan; (No. 4) Alih fungsi lahan yang tidak sesuai tata ruang (No. 5) Infrastruktur yang belum berkonsep pembangunan berkelanjutan; (No. 6) Tingginya kerawanan bencana alam
		2. Perwujudan ruang wilayah huni yang manusiawi	(No. 3) Kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan; (No. 4) Alih fungsi lahan yang tidak sesuai tata ruang; (No. 5) Infrastruktur yang belum berkonsep pembangunan berkelanjutan;
5	Pelestarian lingkungan hidup	1. Perbaikan kualitas lingkungan hidup sebagai fondasi dasar pembangunan dan kontribusi peran dalam pembangunan berkelanjutan	(No. 1) Pola pikir sumber daya manusia yang belum sejalan dengan pembangunan berkelanjutan; (No. 3) Kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan; (No. 4) Alih fungsi lahan yang tidak sesuai tata ruang;
		2. Ketangguhan terhadap bencana	(No. 1) Pola pikir sumber daya manusia yang belum sejalan dengan pembangunan berkelanjutan (No. 3) Kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan; (No. 5) Infrastruktur yang belum berkonsep pembangunan berkelanjutan; (No. 6) Tingginya kerawanan bencana alam
6	Transformasi tata kelola pemerintahan	1. Demokratisasi dan tata kelola pemerintahan	(No. 2) Belum efektifnya tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum
		2. Penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan	(No. 2) Belum efektifnya tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum
		3. Pengembangan SDM dan tata kelola pemerintahan	(No. 2) Belum efektifnya tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum
		4. Pemanfaatan teknologi informasi dan tata kelola pemerintahan	(No. 2) Belum efektifnya tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum
		5. Reformasi kalurahan	(No. 2) Belum efektifnya tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi kepala daerah dan wakil daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 tahun mendatang. Visi harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Visi Kabupaten Sleman mengacu pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" serta Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2027 yaitu "Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi".

Adapun visi yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045 adalah "Sleman yang Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan". Untuk menguatkan fondasi pembangunan serta memastikan ketercapaian Visi pada akhir tahun RPJPD, serta mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi dan isu-isu strategis, maka Visi Kabupaten Sleman pada Tahap Pertama RPJPD pada periode tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut:

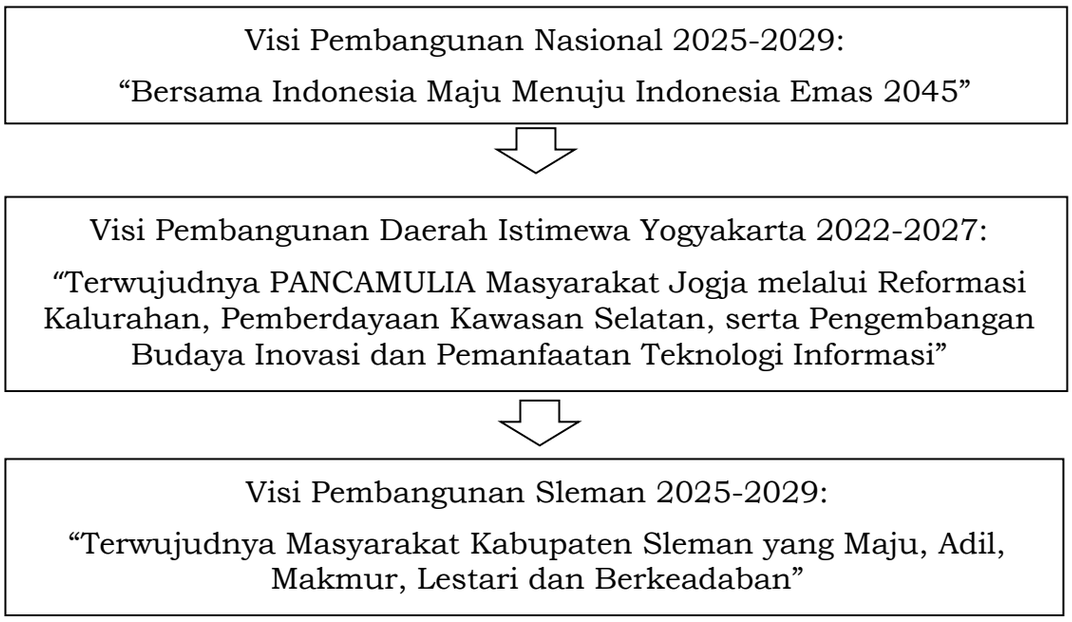
"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sleman yang Maju, Adil, Makmur, Lestari dan Berkeadaban"

Penjelasan dari visi tersebut adalah:

Maju	:	Perwujudan kondisi masyarakat Sleman yang memiliki tingkat ekonomi yang merata, teknologi yang tinggi, dan standar hidup yang tinggi dengan mengoptimalkan segala bentuk potensi ekonomi daerah sebagai penopang perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi yang dituju bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi semata, namun pertumbuhan ekonomi yang inklusif atau pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya mampu dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Sleman.
Adil	:	Perwujudan kondisi masyarakat Sleman yang mendapat perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, dan memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang, tanpa adanya ketimpangan sosial dan ekonomi yang tinggi.

Makmur	:	Pembangunan di Kabupaten Sleman dilaksanakan dalam rangka peningkatan akses kebutuhan dasar masyarakat, yaitu 6 layanan dasar wajib, yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman, ketenteraman dan ketertiban dan sosial masyarakat menuju kondisi kehidupan yang lebih sejahtera secara lahir dan batin.
Lestari	:	Pembangunan yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan, sehingga tercipta kondisi lingkungan yang terjaga keseimbangan ekologis dan sumber daya alam untuk dapat mendukung keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
Berkeadaban	:	Perwujudan karakter utama masyarakat Sleman yang senantiasa percaya diri dalam bertindak, memiliki rasa kekeluargaan, tolong-menolong dan bekerja sama dengan sukarela untuk mencapai cita-cita yang diinginkan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Keterkaitan visi sebagaimana dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1. Keterkaitan Visi RPJMN, RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta, dan RPJMD Kabupaten Sleman

3.1.2 Misi

Misi merupakan penjabaran dari visi, yang terdiri dari upaya-upaya yang harus dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Sleman 5 (lima) tahun ke depan, dirumuskan 6 (enam) Misi sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui peningkatan

kualitas pendidikan, pengetahuan dan kesehatan masyarakat, serta kehidupan yang layak.

Misi 2 : Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana guna menjamin pembangunan yang berkeadilan.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas prasarana dan sarana wilayah yang merata dan terintegrasi di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

Misi 3 : Menjamin akses kesehatan yang adil dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Misi 4 : Mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor-sektor ekonomi yang mengedepankan kreativitas dan adaptasi terhadap teknologi guna kemandirian ekonomi lokal dan daya saing daerah.

Misi 5 : Mewujudkan reformasi birokrasi bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menjunjung tinggi tegaknya hukum.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang yang baik (*good governance*) yang berbasis pada akuntabilitas, profesionalitas, transparansi, partisipasi publik, efektifitas, efisiensi, dan supremasi hukum serta layanan publik yang dinamis dan tangkas menjawab kebutuhan dan permasalahan yang terjadi di lapangan dengan didukung birokrasi yang bersih.

Misi 6 : Pemajuan kebudayaan dalam semangat kebhinekaan, toleransi, dan keistimewaan.

Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat budaya masyarakat Sleman berupa prinsip hidup yang dilandasi sikap saling menghargai dan menghormati terhadap perbedaan dan keberagaman sehingga terwujud rasa damai, aman, tentram, dan nyaman.

RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 ini mengacu dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sleman tahun 2025-2045 dalam rangka penyelarasan untuk ketercapaian target indikator pada RPJPD, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1. Keselarasan Misi Pada RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 dengan Misi Pada RPJPD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045

No	Misi RPJMD 2025-2029	Misi RPJPD 2025-2045
1	Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian	Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul
2	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana guna menjamin pembangunan yang berkeadilan	Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas, merata, ramah lingkungan dan berkesinambungan

No	Misi RPJMD 2025-2029	Misi RPJPD 2025-2045
3	Menjamin akses kesehatan yang adil dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	
4	Mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat	Mewujudkan pemerataan kesejahteraan
5	Mewujudkan reformasi birokrasi bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menjunjung tinggi tegaknya hukum	Memantapkan tata kelola pemerintahan yang tangkas, inovatif, dan akuntabel
6	Pemajuan kebudayaan dalam semangat kebhinekaan, toleransi, dan keistimewaan	Menguatkan sosial budaya masyarakat yang berbudi luhur dan saling menghargai

3.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Sasaran menggambarkan hal yang akan dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut:

Tabel 3.2. Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kabupaten Sleman

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sleman yang Maju, Adil, Makmur, Lestari dan Berkeadaban

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target						Sumber Data
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Misi 1: Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian Misi 6; Pemajuan kebudayaan dalam semangat kebhinekaan, toleransi, dan keistimewaan	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, meliputi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup	IPM dihitung menggunakan rata-rata geometrik dari indeks kesehatan (UHH), indeks pengetahuan (rata-rata dari indeks HLS dan RLS), dan indeks pengeluaran	-	85,71	85,73-85,90	85,74-86,02	85,76-86,14	85,78-86,26	85,79-86,32	85,81-86,40	Badan Pusat Statistik
		Meningkatnya masyarakat terdidik dan berpengetahuan yang merata	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani	$RLS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$ P_{15+}= jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas; x_i= lama sekolah penduduk ke-i	tahun	11,33	11,34-11,39	11,35-11,40	11,36-11,41	11,37-11,42	11,38-11,43	11,39-11,44	Badan Pusat Statistik
			Harapan Lama Sekolah (HLS)	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang	$HLS = FK \sum_{i=7}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$ FK= faktor koreksi pesantren; E_i^t= jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t; P_i^t= jumlah penduduk usia i pada tahun t; i= usia (7, 8, …, n)	tahun	16,79	16,80-16,82	16,81-16,83	16,82-16,84	16,83-16,85	16,84-16,86	16,85-16,87	Badan Pusat Statistik

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target						Sumber Data
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya kesehatan masyarakat untuk kehidupan berkualitas	Usia Harapan Hidup (UHH)	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.	UHH idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate*/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis* (MCPDA) atau *Mortpack*	tahun	75,48	75,59	75,65	75,80	76,00	76,10	76,22	Badan Pusat Statistik
		Menurunnya kemiskinan dan meratanya pendapatan	Tingkat Kemiskinan	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan	$P_0 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}\left[\frac{z-y_i}{z}\right]^{\alpha}$ z= garis kemiskinan; yi= rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i=1,2,3 …,q), yi<z; q= banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan;	%	7,46	6,98-7,45	6,29-6,99	5,69-6,56	5,09-6,12	4,49-5,69	4,09-5,25	Badan Pusat Statistik

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target						Sumber Data
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
					n= jumlah penduduk									
			PDRB per Kapita	PDRB per kapita menunjukkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kepala atau per satu orang penduduk.	PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun	Rp Juta	54,501	57,75-61,56	60,88-65,46	63,97-69,30	67,01-73,08	70,02-76,82	73,22-81,26	Badan Pusat Statistik
		Meningkatnya internalisasi kebudayaan dalam masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan, diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: dimensi ekonomi budaya; dimensi pendidikan; dimensi ketahanan sosial budaya; dimensi warisan budaya; dimensi ekspresi budaya; dimensi budaya literasi; dan dimensi kesetaraan gender	$IPK = \sum_{j=1}^{7} (W_j \times indeks\ D_j)$ W_j= bobot dimensi ke-j; D_j= dimensi ke-j Indeks D_j= $= \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} SX_{ji}}{n_j}\right) \times 100$ SX_{ji}= nilai indikator i pada dimensi ke j yang sudah dinormalisasi; n_j= jumlah indikator dimensi ke j	-	NA	70,37	70,44	70,51	70,58	70,65	70,72	Dinas Kebudayaan
Misi 2: Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana guna menjamin pembangunan yang berkeadilan Misi 4: Mewujudkan keadilan sosial	Terwujudnya perekonomian yang berkualitas		Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu	Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan membandingkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada periode tertentu dengan PDRB periode sebelumnya, kemudian dibagi dengan PDRB	%	5,19	5,11-5,74	5,15-5,99	5,19-6,20	5,23-6,45	5,27-6,70	5,32-6,90	Badan Pusat Statistik

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target						Sumber Data
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
ekonomi masyarakat					periode sebelumnya dan dikalikan 100%									
			Rasio Gini	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva *Lorenz* dan aspek matematis.	Rasio gini= 1- $\sum_{i=1}^{n}(p_i - p_{i-1})(Y_i - Y_{i-1})$ p_i= proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i; Y= proporsi kumulatif pengeluaran per kapita i; n= jumlah observasi	-	0,431	0,425-0,430	0,423-0,429	0,421-0,428	0,419-0,427	0,417-0,426	0,415-0,425	Badan Pusat Statistik
		Meningkatnya kinerja sektor unggulan dan potensial	Kontribusi PDRB Sektor Unggulan dan Potensial	Kontribusi PDRB sektor unggulan dan potensial adalah kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari ekonomi yang memiliki peran penting dan potensi besar dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Sektor unggulan dan potensial di Kabupaten Sleman adalah sektor pertanian dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	Kontribusi PDRB sektor unggulan dan potensial dihitung dari nilai tambah PDRB sektor unggulan dan potensial dibagi nilai PDRB dikalikan 100%	%	38,37	37,15-40,24	37,32-40,90	37,53-41,61	37,64-42,19	37,80-42,85	38,47-43,49	Badan Pusat Statistik

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target						Sumber Data
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	IDSD adalah suatu ukuran yang menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing, baik di tingkat domestik maupun internasional, demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan	Angka nilai hasil penilaian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	-	4,11	4,13	4,15	4,17	4,19	4,22	4,25	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: penduduk yang aktif mencari pekerjaan, penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah	TPT dihitung dari jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikalikan 100%	%	4,13	4,13-5,08	4,11-5,05	4,08-5,02	4,05-4,99	4,02-4,96	3,98-4,93	Badan Pusat Statistik

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target						Sumber Data
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.										
Misi 2: Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana guna menjamin pembangunan yang berkeadilan Misi 3: Menjamin akses kesehatan yang adil dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Terwujudnya lingkungan hidup yang lestari		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL)	IKLH= (0,376×IKA) + (0,405×IKU) + (0,219×IKL)	-	NA	66,96	67,14	67,31	67,49	67,67	67,84	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Air (IKA)	Suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu	Menghitung masing-masing status mutu di setiap titik pantau: $IKA\ Titik\ Pantau = \sum_{i}^{n} w_i I_i$ dimana: w = faktor pembobot; I = sub-indeks (Q-Nilai) Kemudian menghitung status mutu IKA keseluruhan: IKA = $\frac{\sum_i^n IKA\ Titik\ Pantau_i}{Jumlah\ Titik\ Pantau}$	-	NA	75,23	75,43	75,63	75,83	76,03	76,23	Dinas Lingkungan Hidup
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	Ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Dalam hal ini pengambilan sampel	IKU = $100 - \left(\frac{50}{0,99}(I_{INA} - 0,01)\right)$ I_{INA} = Rata-rata Indeks NO_2 + Indeks SO_2 + Indeks $PM_{2.5}$	-	NA	71,09	71,34	71,59	71,84	72,09	72,34	Dinas Lingkungan Hidup

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target						Sumber Data
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				dilakukan pengambilan sampel udara ambien dengan metode *passive sampler*. Parameter yang diukur SO2 dan NO2.	Indeks NO_2 = $\frac{Rata-rata\ NO_2}{Baku\ Mutu\ INA}$ Indeks SO_2 = $\frac{Rata-rata\ SO_2}{Baku\ Mutu\ INA}$ Indeks $PM_{2.5}$ = $\frac{Rata-rata\ PM_{2.5}}{Baku\ Mutu\ INA}$ Rata-rata NO_2= rerata hasil pengukuran NO_2 dari 4 lokasi; Rata-rata SO_2= rerata hasil pengukuran SO_2 dari 4 lokasi									
			Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Suatu nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan	IKL= 100- $\left((84{,}3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{51{,}3}\right)$ TL= tutupan lahan TL = $\frac{\sum_{i=1}^{22} (Luas\ Kelas\ Tutupan}{\sum_{i=1}^{22} (Luas\ Kelas\ Tutup}$ C = Koefisien Kelas Tutupan Lahan	-	NA	45,115	45,117	45,120	45,122	45,125	45,127	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang adalah terwujudnya pola ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	Luas wilayah pemanfaatan pola ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibagi luas rencana tata ruang yang telah ditetapkan dikalikan 100%	%	86,33	87,5	89,00	90,5	92,00	93,5	95,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target						Sumber Data
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menjunjung tinggi tegaknya hukum	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel dan transparan		Indeks Reformasi Birokrasi	IRB adalah gambaran sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.	Hasil evaluasi pelayanan RB Pemerintah Daerah diberikan oleh KemenPAN-RB	-	NA	83,5	85,3	87,15	88,9	90,7	92,4	KemenPAN-RB
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan keuangan daerah	Nilai AKIP	Nilai AKIP adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan	Nilai AKIP Pemerintah Daerah diberikan oleh KemenPAN-RB	-	A 80,86	A 81,72	A 82,16	A 82,75	A 83,19	A 83,63	A 84,07	KemenPAN-RB
			Opini BPK	Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; efektivitas	Opini BPK Pemerintah Daerah yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pemeriksa Keuangan

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target						Sumber Data
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				sistem pengendalian intern										
		Meningkatnya kualitas pelayanan	Indeks Pelayanan Publik	IPP adalah sebuah sistem pengukuran kinerja pelayanan publik yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. IPP mengukur berbagai aspek pelayanan publik, seperti kebijakan, sumber daya manusia, sarana prasarana, sistem informasi, dan konsultasi, untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja pelayanan	IPP Pemerintah Daerah dihitung mandiri oleh Bagian Organisasi Kabupaten Sleman	-	2,77	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	Bagian Organisasi
		Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintah	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Sistem pemerintahan berbasis elektronik merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Nilai tingkat kematangan pelaksanaan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang memanfaatkan teknologi informasi	Indeks merupakan hasil penilaian evaluasi yang dilakukan oleh KemenPAN-RB	-	4,3	4,3	-	-	-	-	-	KemenPAN-RB

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target						Sumber Data
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE, yang terdiri dari domain kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE, manajemen SPBE serta layanan SPBE.										
			Indeks Pemerintahan Digital	Perubahan/ transformasi indeks SPBE menjadi indeks pemerintahan digital. Terjadi perubahan indikator dalam penilaian. Suatu alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah mengintegrasikan teknologi digital dalam berbagai aspek operasional dan pelayanannya. Indeks ini mencakup berbagai dimensi, seperti infrastruktur digital, layanan publik berbasis digital, partisipasi masyarakat dalam ekosistem digital, dan kemampuan pemerintah dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas	Indeks merupakan hasil penilaian evaluasi yang dilakukan oleh KemenPAN-RB, penilaian wajib dilakukan 2 tahun sekali, sedangkan tahun berikutnya adalah pemantauan	-	NA	-	1,5	1,5	1,6	1,6	1,8	KemenPAN-RB

Tabel 3.3. Keselarasan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Asta Cita

Kabupaten Sleman		Nasional	DIY	
Tujuan	**Sasaran**	**Asta Cita**	**Tujuan**	**Sasaran**
Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	Meningkatnya masyarakat terdidik dan berpengetahuan yang merata	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Terwujudnya kualitas hidup kehidupan penghidupan masyarakat	Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan
	Meningkatnya kesehatan masyarakat untuk kehidupan berkualitas			
	Menurunnya kemiskinan dan meratanya pendapatan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan		Semakin kecilnya tingkat kemiskinan
	Meningkatnya internalisasi kebudayaan dalam masyarakat	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur		Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan
Terwujudnya perekonomian yang berkualitas	Meningkatnya kinerja sektor unggulan dan potensial	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya kualitas hidup kehidupan penghidupan masyarakat	Penghidupan ekonomi yang layak
		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri		

Kabupaten Sleman		Nasional	DIY	
Tujuan	**Sasaran**	**Asta Cita**	**Tujuan**	**Sasaran**
	Meningkatnya daya saing daerah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi		
	Menurunnya pengangguran			
Terwujudnya lingkungan hidup yang lestari	Meningkatnya kualitas lingkungan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Lingkungan Hidup yang lebih baik (IKLH)	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang
	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang			Menurunnya risiko bencana
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel dan transparan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan keuangan daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya *good governance*
	Meningkatnya kualitas pelayanan			
	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintah			

3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1 Strategi Daerah

Dalam upaya mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, diperlukan langkah-langkah strategis yang perlu dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi internal baik kelemahan dan kekuatan daerah serta mempertimbangkan berbagai kesempatan yang hadir dan ancaman yang berpotensi mengintervensi proses pencapaian Tujuan dan Sasaran daerah.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai Tujuan Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas adalah:

a. Pada tahun pertama:
    1) Membangun kerja sama penta-helix untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi (*ecosystem digital learning and innovation hub*);
    2) Mengadvokasi kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pengurangan kekerasan di sekolah;
    3) Membangun jaringan pendidikan yang kuat antara lembaga pendidikan, swasta, pemerintah, dan masyarakat;
    4) Membangun kurikulum pendidikan berbasis talenta, karakter, literasi digital, kondisi lokal, dan berdaya saing global;
    5) Memastikan akses pendidikan dan pelatihan yang merata untuk semua lapisan masyarakat, guna mengurangi angka perkawinan dini, menuntaskan stunting dan meningkatkan kualitas hidup;
    6) Mendorong pengembangan lembaga pendidikan berbasis komunitas yang inklusif dan berkelanjutan dengan pendekatan multikultural dan teknologi;
    7) Membangun jaringan sosial yang kuat untuk mendukung penanggulangan kemiskinan berbasis lokal;
    8) Melibatkan peran swasta atau *non-government organization* (NGO) guna memperluas akses, promosi dan pengembangan sistem informasi kesehatan;
    9) Mengembangkan kemandirian masyarakat dalam manajemen kesehatan berbasis komunitas;
    10) Pemetaan kemiskinan berbasis data *real-time* dan partisipatif;
    11) Meningkatkan kesempatan kerja dengan kerja sama berbasis *penta-helix*;
    12) Mendorong pendidikan informal untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja;
    13) Kolaborasi multi-pihak untuk pengentasan kemiskinan;
    14) Mengembangkan kualitas kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
    15) Pemberdayaan ekonomi berbasis teknologi dan kearifan lokal;
    16) Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam rangka memperkuat kemampuan pengasuhan dan penumbuh kembangan anak dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
    17) Meningkatkan promosi kebudayaan dan museum;
    18) Menguatkan Pemanfaatan sebaran pelaku seni budaya guna mendukung penguatan kalurahan/desa budaya;
    19) Meningkatkan pemanfaatan teknologi infromasi dalam internalisasi budaya; dan
    20) Meningkatkan kualitas penggerak kebudayaan untuk mendukung pemanfaatan *world heritage*.

b. Pada tahun kedua:
   1) Melakukan penguatan dan pemerataan infrastruktur pendidikan berbasis teknologi dan digital;
   2) Mengadvokasi kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pengurangan kekerasan di sekolah;
   3) Membangun kurikulum pendidikan berbasis talenta, karakter, literasi digital, kondisi lokal, dan berdaya saing global;
   4) Mendorong pengembangan lembaga pendidikan berbasis komunitas yang inklusif dan berkelanjutan dengan pendekatan multikultural dan teknologi;
   5) Menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi dalam pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik;
   6) Memastikan akses pendidikan dan pelatihan yang merata untuk semua lapisan masyarakat, guna mengurangi angka perkawinan dini, menuntaskan stunting dan meningkatkan kualitas hidup;
   7) Mempercepat transformasi digital dalam pelayanan kesehatan;
   8) Penguatan kolaborasi riset dan pendidikan kesehatan untuk mendukung mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
   9) Membangun sistem pemantauan dan pengendalian kesehatan masyarakat;
   10) Perluasan layanan dan akses kesehatan;
   11) Mengembangkan kemandirian masyarakat dalam manajemen kesehatan berbasis komunitas;
   12) Pemetaan kemiskinan berbasis data *real-time* dan partisipatif;
   13) Meningkatkan kesempatan kerja dengan kerja sama berbasis *penta-helix*;
   14) Mendorong pendidikan informal untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja;
   15) Kolaborasi multi-pihak untuk pengentasan kemiskinan;
   16) Mengembangkan kualitas kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
   17) Pemberdayaan ekonomi berbasis teknologi dan kearifan local;
   18) Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam rangka memperkuat kemampuan pengasuhan dan penumbuh-kembangan anak dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
   19) Meningkatkan promosi kebudayaan dan museum;
   20) Menguatkan pemanfaatan sebaran pelaku seni budaya guna mendukung penguatan kalurahan/desa budaya;
   21) Meningkatkan pemanfaatan teknologi infromasi dalam internalisasi budaya;
   22) Membangun kemitraan pentahelix dalam upaya pelestarian, pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), cagar budaya dan museum; dan
   23) Meningkatkan kualitas penggerak kebudayaan untuk untuk mendukung pemanfaatan *world heritage*.

c. Pada tahun ketiga:
   1) Melakukan penguatan dan pemerataan infrastruktur pendidikan berbasis teknologi dan digital;
   2) Mengadvokasi kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pengurangan kekerasan di sekolah;
   3) Membangun kurikulum pendidikan berbasis talenta, karakter, literasi digital, kondisi lokal, dan berdaya saing global;
   4) Memperkuat lembaga pendidikan berbasis komunitas yang inklusif dan berkelanjutan dengan pendekatan multikultural dan teknologi;

5) Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder untuk penyediaan pelayanan publik ramah kelompok rentan;
6) Mempercepat transformasi digital dalam pelayanan kesehatan;
7) Melibatkan peran swasta atau *non-government organization* (NGO) guna memperluas akses, promosi dan pengembangan sistem informasi kesehatan;
8) Penguatan mitigasi dampak perubahan iklim terhadap kesehatan masyarakat melalui adaptasi pola hidup bersih dan sehat;
9) Penguatan pelayanan geriatric/lansia guna menurunkan angka penyakit tidak menular;
10) Pemetaan kemiskinan berbasis data *real-time* dan partisipatif;
11) Kolaborasi multi-pihak untuk pengentasan kemiskinan;
12) Mengembangkan kualitas kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
13) Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam rangka memperkuat kemampuan pengasuhan dan penumbuh-kembangan anak dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
14) Menguatkan pemanfaatan sebaran pelaku seni budaya guna mendukung penguatan kalurahan/desa budaya;
15) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan lembaga kebudayaan untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat;
16) Memanfaatkan teknologi informasi dalam menyebarluaskan kebudayaan
17) Meningkatkan kualitas penggerak kebudayaan untuk untuk mendukung pemanfaatan *world heritage*;
18) Membangun kemitraan *penta-helix* dalam upaya pelestarian, pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), cagar budaya dan museum; dan
19) Mempercepat digitalisasi Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), museum dan cagar budaya.

d. Pada tahun keempat:
1) Melakukan penguatan dan pemerataan infrastruktur pendidikan berbasis teknologi dan digital;
2) Mengadvokasi kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pengurangan kekerasan di sekolah;
3) Membangun kurikulum pendidikan berbasis talenta, karakter, literasi digital, kondisi lokal, dan berdaya saing global;
4) Memperkuat lembaga pendidikan berbasis komunitas yang inklusif dan berkelanjutan dengan pendekatan multikultural dan teknologi;
5) Melibatkan peran swasta atau *non-government organization* (NGO) guna memperluas akses, promosi dan pengembangan sistem informasi kesehatan;
6) Penguatan mitigasi dampak perubahan iklim terhadap kesehatan masyarakat melalui adaptasi pola hidup bersih dan sehat;
7) Penguatan pelayanan geriatric/lansia guna menurunkan angka penyakit tidak menular;
8) Mempercepat transformasi digital dalam pelayanan kesehatan;
9) Kolaborasi multi-pihak untuk pengentasan kemiskinan;
10) Mengembangkan kualitas kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
11) Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam rangka memperkuat kemampuan pengasuhan dan penumbuh kembangan anak dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;

12) Menguatkan pemanfaatan sebaran pelaku seni budaya guna mendukung penguatan kalurahan/desa budaya;
13) Menguatkan investasi pariwisata berbasis budaya;
14) Memantapkan potensi lokal untuk pemberdayaan dan pelestarian kebudayaan;
15) Meningkatkan kualitas penggerak kebudayaan untuk untuk mendukung pemanfaatan world heritage; dan
16) Mempercepat digitalisasi Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), museum dan cagar budaya.

e. Pada tahun kelima:
1) Melakukan penguatan dan pemerataan infrastruktur pendidikan berbasis teknologi dan digital;
2) Mengadvokasi kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pengurangan kekerasan di sekolah;
3) Membangun kurikulum pendidikan berbasis talenta, karakter, literasi digital, kondisi lokal, dan berdaya saing global;
4) Memperkuat lembaga pendidikan berbasis komunitas yang inklusif dan berkelanjutan dengan pendekatan multikultural dan teknologi
5) Melibatkan peran swasta atau *non-government organization* (NGO) guna memperluas akses, promosi dan pengembangan sistem informasi kesehatan;
6) Memantapkan sistem ketahanan kesehatan yang responsif terhadap perubahan iklim;
7) Kolaborasi multi-pihak untuk pengentasan kemiskinan;
8) Mengembangkan kualitas kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
9) Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam rangka memperkuat kemampuan pengasuhan dan penumbuh-kembangan anak dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
10) Menguatkan pemanfaatan sebaran pelaku seni budaya guna mendukung penguatan kalurahan/desa budaya;
11) Memanfaatkan museum guna mendukung peningkatan investasi dan industri pariwisata;
12) Meningkatkan kualitas penggerak kebudayaan untuk untuk mendukung pemanfaatan *world heritage*;
13) Memantapkan potensi lokal untuk pemberdayaan dan pelestarian kebudayaan;
14) Memantapkan Pelibatan generasi muda untuk pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK);
15) Memantapkan optimalisasi Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) untuk meredam dan proses akulturasi budaya; dan
16) Memantapkan nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari.

f. Pada tahun keenam:
1) Melakukan penguatan dan pemerataan infrastruktur pendidikan berbasis teknologi dan digital;
2) Mengadvokasi kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pengurangan kekerasan di sekolah;
3) Membangun kurikulum pendidikan berbasis talenta, karakter, literasi digital, kondisi lokal, dan berdaya saing global;
4) Melibatkan peran swasta atau *non-government organization* (NGO) guna memperluas akses, promosi dan pengembangan sistem informasi kesehatan;
5) Memantapkan sistem ketahanan kesehatan yang responsif terhadap perubahan iklim;

6) Pemetaan kemiskinan berbasis data *real-time* dan partisipatif;
7) Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam rangka memperkuat kemampuan pengasuhan dan penumbuh-kembangan anak dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
8) Mengembangkan kualitas kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
9) Menguatkan pemanfaatan sebaran pelaku seni budaya guna mendukung penguatan kalurahan/desa budaya;
10) Meningkatkan kualitas penggerak kebudayaan untuk untuk mendukung pemanfaatan *world heritage*;
11) Memantapkan optimalisasi Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) untuk meredam dan proses akulturasi budaya; dan
12) Memantapkan nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai Tujuan Terwujudnya Perekonomian yang Berkualitas adalah:

a. Pada tahun pertama:
   1) Penguatan ketahanan air dan ketahanan pangan berkelanjutan melalui perlindungan terhadap lahan pertanian yang terintegrasi dengan tata ruang;
   2) Peningkatan produktivitas melalui peningkatan intensifikasi atau diversifikasi, sinergitas dan aksesibilitas teknologi produksi;
   3) Penguatan ekosistem wirausaha dan regenerasi industri kecil menengah (IKM);
   4) Penguatan daya tarik destinasi dan promosi wisata;
   5) Penguatan kapasitas pelaku usaha melalui pengembangan keterampilan sesuai kebutuhan pasar;
   6) Mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat;
   7) Meningkatkan kapasitas dan jangkauan sistem pemantauan harga berbasis teknologi digital;
   8) Meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur dasar dan transportasi dengan konsep berkelanjutan;
   9) Meningkatkan pelayanan infrastruktur melalui optimalisasi skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan pembiayaan alternatif lainnya;
   10) Mengoptimalkan potensi asset daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang aneka usaha;
   11) Mengoptimalkan pemanfaatan modal sosial dan kelembagaan masyarakat dalam deteksi dini konflik;
   12) Mensinergikan regulasi dan kebijakan untuk mengantisipasi urbanisasi dan konflik; dan
   13) Memperkuat sistem keamanan dan ketertiban wilayah berbasis komunitas.

b. Pada tahun kedua:
   1) Penguatan ketahanan air dan ketahanan pangan berkelanjutan melalui perlindungan terhadap lahan pertanian yang terintegrasi dengan tata ruang;
   2) Memperkuat branding "Produk Pertanian Sleman” dan pangan sehat;
   3) Peningkatan produktivitas melalui peningkatan intensifikasi atau diversifikasi, sinergitas dan aksesibilitas teknologi produksi;
   4) Penguatan ekosistem wirausaha dan regenerasi industri kecil menengah (IKM);
   5) Penguatan daya tarik destinasi dan promosi wisata;

6) Penguatan kapasitas pelaku usaha melalui pengembangan keterampilan sesuai kebutuhan pasar;
7) Mendorong kemandirian masyarakat melalui peningkatan kemampuan penciptaan nilai tambah;
8) Mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat;
9) Meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur dasar dan transportasi moda transportasi dengan konsep berkelanjutan;
10) Mengembangkan infrastruktur yang handal di pusat-pusat permukiman (pusat kegiatan nasional (PKN), pusat kegiatan lokal (PKL), pusat pelayanan Kawasan (PPK));
11) Meningkatkan pelayanan infrastruktur melalui optimalisasi skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan pembiayaan alternatif lainnya;
12) Mengoptimalkan potensi asset daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang aneka usaha;
13) Mengoptimalkan pemanfaatan modal sosial dan kelembagaan masyarakat dalam deteksi dini konflik;
14) Mensinergikan regulasi dan kebijakan untuk mengantisipasi urbanisasi dan konflik; dan
15) Memperkuat sistem keamanan dan ketertiban wilayah berbasis komunitas.

c. Pada tahun ketiga:
1) Penguatan ketahanan air dan ketahanan pangan berkelanjutan melalui perlindungan terhadap lahan pertanian yang terintegrasi dengan tata ruang;
2) Mendorong digitalisasi dan transformasi pertanian berbasis teknologi untuk meningkatkan daya saing;
3) Memperkuat branding "Produk Pertanian Sleman" dan pangan sehat;
4) Peningkatan produktivitas melalui peningkatan intensifikasi atau diversifikasi, sinergitas dan aksesibilitas teknologi produksi;
5) Penguatan ekosistem wirausaha dan regenerasi industri kecil menengah (IKM);
6) Penguatan daya tarik destinasi dan promosi wisata;
7) Pengembangan jaringan pasar dan kemitraan;
8) Peningkatan kualitas sarana pendukung pariwisata, jasa dan perdagangan;
9) Penguatan kapasitas pelaku usaha melalui pengembangan keterampilan sesuai kebutuhan pasar;
10) Mendorong kemandirian masyarakat melalui peningkatan kemampuan penciptaan nilai tambah;
11) Mendorong inovasi untuk penguatan produksi dan ekonomi digital;
12) Mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat;
13) Mendorong pertumbuhan investasi yang berkelanjutan;
14) Meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur dasar dan transportasi dan moda transportasi dengan konsep berkelanjutan;
15) Meningkatkan pelayanan infrastruktur melalui optimalisasi skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan pembiayaan alternatif lainnya;
16) Mengembangkan titik-titik prioritas penanganan infrastruktur;
17) Mengoptimalkan potensi aset daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang aneka usaha;

18) Mengoptimalkan pemanfaatan modal sosial dan kelembagaan masyarakat dalam deteksi dini konflik;
19) Mensinergikan regulasi dan kebijakan untuk mengantisipasi urbanisasi dan konflik; dan
20) Membangun sistem keamanan dan ketertiban wilayah berbasis teknologi.

d. Pada tahun keempat:
1) Penguatan ketahanan air dan ketahanan pangan berkelanjutan melalui perlindungan terhadap lahan pertanian yang terintegrasi dengan tata ruang;
2) Mendorong digitalisasi dan transformasi pertanian berbasis teknologi untuk meningkatkan daya saing;
3) Memperkuat branding "Produk Pertanian Sleman" dan pangan sehat;
4) Menarik minat generasi muda di sektor pertanian;
5) Mengembangkan sektor pertanian melalui hilirisasi pertanian untuk penciptaan nilai tambah bersinergi dengan edukasi dan wisata;
6) Penguatan ekosistem wirausaha dan regenerasi industri kecil menengah (IKM);
7) Pengembangan jaringan pasar dan kemitraan;
8) Pengembangan industri berbasis potensi lokal ramah lingkungan;
9) Pengembangan jaringan pasar dan kemitraan;
10) Penguatan daya tarik destinasi dan promosi wisata;
11) Peningkatan kualitas sarana pendukung pariwisata, jasa dan perdagangan;
12) Optimalisasi pengelolaan destinasi pariwisata yang bertanggung jawab;
13) Penguatan interkonektivitas dan integrasi pariwisata yang tangguh terhadap bencana;
14) Mendorong kemandirian masyarakat melalui peningkatan kemampuan penciptaan nilai tambah;
15) Mendorong inovasi untuk penguatan produksi dan ekonomi digital;
16) Mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat;
17) Mendorong pertumbuhan investasi yang berkelanjutan;
18) Mengembangkan infrastruktur kawasan sekitar titik transit multimoda untuk mempertahankan aksesibilitas wilayah;
19) Meningkatkan konektivitas dan infrastruktur pendukung sekitar kawasan *exit toll*;
20) Meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur dasar dan transportasi dengan konsep berkelanjutan;
21) Meningkatkan kualitas dan persebaran sarana prasarana pendukung baik di perkotaan dan pedesaan;
22) Mengembangkan transportasi publik hijau;
23) Meningkatkan pelayanan infrastruktur melalui optimalisasi skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan pembiayaan alternatif lainnya;
24) Mengoptimalkan potensi asset daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang aneka usaha;
25) Mengoptimalkan pemanfaatan modal sosial dan kelembagaan masyarakat dalam deteksi dini konflik;
26) Mensinergikan regulasi dan kebijakan untuk mengantisipasi urbanisasi dan konflik; dan
27) Memperkuat sistem keamanan dan ketertiban wilayah berbasis teknologi.

e. Pada tahun kelima:
   1) Penguatan ketahanan air dan ketahanan pangan berkelanjutan melalui perlindungan terhadap lahan pertanian yang terintegrasi dengan tata ruang;
   2) Mendorong digitalisasi dan transformasi pertanian berbasis teknologi untuk meningkatkan daya saing;
   3) Memperkuat branding "Produk Pertanian Sleman" dan pangan sehat;
   4) Menarik minat generasi muda di sektor pertanian;
   5) Mengembangkan sektor pertanian melalui hilirisasi pertanian untuk penciptaan nilai tambah bersinergi dengan edukasi dan wisata;
   6) Pengembangan jaringan pasar dan kemitraan
   7) Pengembangan industri berbasis potensi lokal ramah lingkungan;
   8) Peningkatan kualitas sarana pendukung pariwisata, jasa dan perdagangan;
   9) Optimalisasi pengelolaan destinasi pariwisata yang bertanggung jawab;
   10) Penguatan interkonektivitas dan integrasi pariwisata yang tangguh terhadap bencana;
   11) Mendorong inovasi untuk penguatan produksi dan ekonomi digital;
   12) Mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat;
   13) Mendorong pertumbuhan investasi yang berkelanjutan;
   14) Mengembangkan infrastruktur kawasan sekitar titik transit multimoda untuk mempertahankan aksesibilitas wilayah;
   15) Meningkatkan konektivitas dan infrastruktur pendukung sekitar kawasan *exit toll*;
   16) Meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur dasar dan transportasi dengan konsep berkelanjutan;
   17) Meningkatkan kualitas dan persebaran sarana prasarana pendukung baik di perkotaan dan pedesaan;
   18) Mengembangkan transportasi publik hijau;
   19) Mengembangkan kualitas pelayanan infrastruktur dasar yang lebih inklusif;
   20) Meningkatkan pelayanan infrastruktur melalui optimalisasi skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan pembiayaan alternatif lainnya;
   21) Mengoptimalkan potensi aset daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang aneka usaha;
   22) Mengoptimalkan pemanfaatan modal sosial dan kelembagaan masyarakat dalam deteksi dini konflik;
   23) Mensinergikan regulasi dan kebijakan untuk mengantisipasi urbanisasi dan konflik; dan
   24) Memantapkan sistem keamanan dan ketertiban wilayah berbasis teknologi dan komunitas.

f. Pada tahun keenam:
   1) Penguatan ketahanan air dan ketahanan pangan berkelanjutan melalui perlindungan terhadap lahan pertanian yang terintegrasi dengan tata ruang;
   2) Mendorong digitalisasi dan transformasi pertanian berbasis teknologi untuk meningkatkan daya saing;
   3) Menarik minat generasi muda di sektor pertanian;
   4) Mengembangkan sektor pertanian melalui hilirisasi pertanian untuk penciptaan nilai tambah bersinergi dengan edukasi dan wisata;
   5) Pengembangan jaringan pasar dan kemitraan;
   6) Pengembangan industri berbasis potensi lokal ramah lingkungan;

7) Peningkatan kualitas sarana pendukung pariwisata, jasa dan perdagangan;
8) Optimalisasi pengelolaan destinasi pariwisata yang bertanggung jawab
9) Penguatan inter konektivitas dan integrasi pariwisata yang tangguh terhadap bencana;
10) Mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat;
11) Mendorong pertumbuhan investasi yang berkelanjutan;
12) Meningkatkan konektivitas dan infrastruktur pendukung sekitar kawasan *exit toll*;
13) Membangun sistem manajemen infrastruktur dasar di wilayah perkotaan;
14) Meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur dasar dan transportasi dengan konsep berkelanjutan;
15) Mengembangkan transportasi publik hijau;
16) Mengembangkan kualitas pelayanan infrastruktur dasar yang lebih inklusif;
17) Meningkatkan pelayanan infrastruktur melalui optimalisasi skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan pembiayaan alternatif lainnya;
18) Mengoptimalkan potensi asset daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang aneka usaha;
19) Mengoptimalkan pemanfaatan modal sosial dan kelembagaan masyarakat dalam deteksi dini konflik;
20) Mensinergikan regulasi dan kebijakan untuk mengantisipasi urbanisasi dan konflik; dan
21) Memantapkan sistem keamanan dan ketertiban wilayah berbasis teknologi dan komunitas.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai Tujuan Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Lestari adalah:

a. Pada tahun pertama:
   1) Mengembangkan pelayanan jaringan air limbah dan persampahan untuk mengurangi pencemaran air tanah dan sungai;
   2) Mengembangkan ruang terbuka hijau (RTH) untuk meningkatkan kualitas tutupan lahan;
   3) Meningkatkan peran masyarakat dan *stakeholder* dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup untuk menghadapi perubahan iklim;
   4) Meningkatkan peran masyarakat dan *stakeholder* dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
   5) Membangun sistem pemantauan kualitas dan pencemaran lingkungan;
   6) Mengembangkan layanan kawasan permukiman layak dan terjangkau
   7) Membangun koordinasi antar level pemerintahan dalam tindak lanjut ketidaksesuaian pemanfaatan ruang; dan
   8) Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mengurangi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang.

b. Pada tahun kedua:
   1) Mengembangkan sistem pengolahan sampah berbasis komunitas dan menerapkan ekonomi sirkuler;
   2) Mengembangkan pelayanan jaringan air limbah dan persampahan untuk mengurangi pencemaran air tanah dan sungai;
   3) Mengembangkan ruang terbuka hijau (RTH) untuk meningkatkan kualitas tutupan lahan

4) Menguatkan peran masyarakat dan *stakeholder* dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup untuk menghadapi perubahan iklim;
5) Menguatkan peran masyarakat dan *stakeholder* dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
6) Menguatkan sistem pemantauan kualitas dan pencemaran lingkungan;
7) Mengembangkan layanan kawasan permukiman layak dan terjangkau
8) Membangun koordinasi antar level pemerintahan dalam tindak lanjut ketidaksesuaian pemanfaatan ruang; dan
9) Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mengurangi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang.

c. Pada tahun ketiga:
1) Mengembangkan sistem pengolahan sampah berbasis komunitas dan menerapkan ekonomi sirkuler;
2) Mengembangkan pelayanan jaringan air limbah dan persampahan untuk mengurangi pencemaran air tanah dan sungai;
3) Konservasi air di kawasan hulu cekungan air tanah (CAT) Yogyakarta;
4) Mengembangkan ruang terbuka hijau (RTH) untuk meningkatkan kualitas tutupan lahan, amenitas perkotaan, dan mengurangi dampak pulau bahang perkotaan;
5) Meningkatkan peran masyarakat dan *stakeholder* dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup untuk menghadapi perubahan iklim;
6) Meningkatkan peran masyarakat dan *stakeholder* dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
7) Meningkatkan sistem pemantauan kualitas dan pencemaran lingkungan;
8) Mengembangkan layanan kawasan permukiman layak dan terjangkau
9) Membangun koordinasi antar level pemerintahan dalam tindak lanjut ketidaksesuaian pemanfaatan ruang; dan
10) Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mengurangi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang.

d. Pada tahun keempat:
1) Mengembangkan pelayanan jaringan air limbah dan persampahan untuk mengurangi pencemaran air tanah dan sungai;
2) Konservasi air di kawasan hulu cekungan air tanah (CAT) Yogyakarta;
3) Mengembangkan ruang terbuka hijau (RTH) untuk meningkatkan kualitas tutupan lahan, dan mengurangi dampak pulau bahang perkotaan;
4) Mengembangkan peran masyarakat dan *stakeholder* dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup untuk menghadapi perubahan iklim;
5) Mengembangkan peran masyarakat dan *stakeholder* dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
6) Mengembangkan sistem pemantauan kualitas dan pencemaran lingkungan;
7) Mengembangkan kawasan sekitar satuan ruang strategis (SRS) di kawasan pedesaan dengan mempertahankan pertanian lokal;
8) Meningkatkan ketahanan air pada kawasan prioritas dan strategis;
9) Mengembangkan kawasan prioritas dan strategis dengan konsep sensitif air (*water sensitive city*);
10) Mengembangkan layanan kawasan permukiman vertikal terjangkau di wilayah perkotaan; dan
11) Mengembangkan amenitas perkotaan hijau.

e. Pada tahun kelima:
   1) Mengembangkan pelayanan jaringan air limbah dan persampahan untuk mengurangi pencemaran air tanah dan sungai;
   2) Mengkonservasi air di kawasan hulu cekungan air tanah (CAT) Yogyakarta;
   3) Mengembangkan ruang terbuka hijau (RTH) untuk meningkatkan kualitas tutupan lahan, dan mengurangi dampak pulau bahang perkotaan;
   4) Meningkatkan tutupan lahan hijau untuk mempertahankan jasa lingkungan;
   5) Memantapkan peran masyarakat dan *stakeholder* dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup untuk menghadapi perubahan iklim;
   6) Memantapkan peran masyarakat dan *stakeholder* dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
   7) Memantapkan sistem pemantauan kualitas dan pencemaran lingkungan;
   8) Mengembangkan kawasan sekitar satuan ruang strategis (SRS) di kawasan pedesaan dengan mempertahankan pertanian lokal;
   9) Meningkatkan ketahanan air pada kawasan prioritas dan strategis;
   10) Mengembangkan kawasan prioritas dan strategis dengan konsep sensitif air (*water sensitive city*);
   11) Mengembangkan layanan kawasan permukiman vertikal terjangkau di wilayah perkotaan; dan
   12) Mengembangkan amenitas perkotaan hijau.

f. Pada tahun keenam:
   1) Mengembangkan pelayanan jaringan air limbah dan persampahan untuk mengurangi pencemaran air tanah dan sungai;
   2) Meningkatkan tutupan lahan hijau untuk mempertahankan jasa lingkungan;
   3) Memantapkan peran masyarakat dan *stakeholder* dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup untuk menghadapi perubahan iklim;
   4) Memantapkan peran masyarakat dan *stakeholder* dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
   5) Memantapkan sistem pemantauan kualitas dan pencemaran lingkungan;
   6) Meningkatkan ketahanan air pada kawasan prioritas dan strategis;
   7) Mengembangkan kawasan prioritas dan strategis dengan konsep sensitif air (*water sensitive city*); dan
   8) Mengembangkan layanan kawasan permukiman vertikal terjangkau di wilayah perkotaan.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai Tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Tangkas, Adaptif, Akuntabel dan Transparan adalah:

a. Pada tahun pertama:
   1) Memperkuat fleksibilitas tata kelola pemerintahan melalui regulasi dan digitalisasi;
   2) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah;
   3) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui transformasi manajemen aparatur sipil negara (ASN);
   4) Mengintegrasikan digitalisasi layanan dan sistem informasi publik;
   5) Meningkatkan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat yang responsif dan terintegrasi;
   6) Memperkuat keamanan siber pada sistem informasi pemerintahan;

7) Penataan kelembagaan yang tepat fungsi sesuai kebutuhan;
8) Meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dan tanggap bencana masyarakat berdasarkan risiko kerawanan bencana;
9) Mengurangi kerentanan masyarakat dan kawasan dalam menghadapi bencana; dan
10) Mengembangkan koordinasi data kebencanaan antar tingkatan pemerintah.

b. Pada tahun kedua:
1) Memperkuat fleksibilitas tata kelola pemerintahan melalui regulasi dan digitalisasi;
2) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah;
3) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui transformasi manajemen aparatur sipil negara (ASN);
4) Mengintegrasikan digitalisasi layanan dan sistem informasi publik;
5) Meningkatkan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat yang responsif dan terintegrasi;
6) Memperkuat keamanan siber pada sistem informasi pemerintahan
7) Penataan kelembagaan yang tepat fungsi sesuai kebutuhan;
8) Meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dan tanggap bencana masyarakat berdasarkan risiko kerawanan bencana;
9) Mengurangi kerentanan masyarakat dan kawasan dalam menghadapi bencana; dan
10) Mengembangkan koordinasi data kebencanaan antar tingkatan pemerintah.

c. Pada tahun ketiga:
1) Memperkuat fleksibilitas tata kelola pemerintahan melalui regulasi dan digitalisasi;
2) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah;
3) Meningkatkan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat yang responsif dan terintegrasi;
4) Memperkuat keamanan siber pada sistem informasi pemerintahan;
5) Mengintegrasikan seluruh sistem digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
6) Mengembangkan *smart governance* melalui digitalisasi dan automasi layanan publik;
7) Mengembangkan inovasi layanan publik berbasis digital;
8) Mengembangkan adaptasi masyarakat dan infrastruktur dalam menghadapi bencana hidrometeorologi;
9) Meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dan tanggap bencana masyarakat berdasarkan risiko kerawanan bencana;
10) Mengurangi kerentanan masyarakat dan kawasan dalam menghadapi bencana; dan
11) Mengembangkan koordinasi data kebencanaan antar tingkatan pemerintah.

d. Pada tahun keempat:
1) Memperkuat fleksibilitas tata kelola pemerintahan melalui regulasi dan digitalisasi;
2) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah;
3) Meningkatkan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat yang responsif dan terintegrasi;
4) Mengembangkan sistem digitalisasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

5) Mengembangkan *smart governance* melalui digitalisasi dan automasi layanan publik;
6) Mengembangkan inovasi layanan publik berbasis digital;
7) Memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang lebih terintegrasi;
8) Meningkatkan kemandirian desa melalui digitalisasi, reformasi kalurahan dan pemberdayaan ekonomi;
9) Mengembangkan adaptasi masyarakat dan infrastruktur dalam menghadapi bencana hidrometeorologi; dan
10) Mengembangkan koordinasi data kebencanaan antar tingkatan pemerintah.

e. Pada tahun kelima:
1) Memperkuat fleksibilitas tata kelola pemerintahan melalui regulasi dan digitalisasi;
2) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah;
3) Mengembangkan sistem digitalisasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4) Mengembangkan inovasi layanan publik berbasis digital;
5) Memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang lebih terintegrasi;
6) Memperkuat keamanan siber pada sistem informasi pemerintahan;
7) Memperkuat mitigasi risiko bencana alam dan adaptasi terhadap perubahan iklim;
8) Memperkuat adaptasi masyarakat dan infrastruktur dalam menghadapi bencana hidrometeorologi;
9) Memperkuat infrastruktur penanggulangan bencana; dan
10) Memantapkan ketangguhan masyarakat dan infrastruktur wilayah dalam menghadapi bencana.

f. Pada tahun keenam:
1) Memperkuat fleksibilitas tata kelola pemerintahan melalui regulasi dan digitalisasi;
2) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah;
3) Memperkuat sistem digitalisasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4) Mengembangkan inovasi layanan publik berbasis digital;
5) Memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang lebih terintegrasi;
6) Memperkuat mitigasi risiko bencana alam dan adaptasi terhadap perubahan iklim;
7) Memperkuat adaptasi masyarakat dan infrastruktur dalam menghadapi bencana hidrometeorologi;
8) Memperkuat infrastruktur penanggulangan bencana;
9) Memantapkan ketangguhan masyarakat dan infrastruktur wilayah dalam menghadapi bencana; dan
10) Penataan kelembagaan yang tepat fungsi sesuai kebutuhan.

Dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah, disusun pula penahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan.

Tabel 3.4. Penahapan Pembangunan Jangka Menengah

Tahap I (Tahun 2025)	Tahap II (Tahun 2026)	Tahap III (Tahun 2027)	Tahap IV (Tahun 2028)	Tahap V (Tahun 2029)	Tahap VI (Tahun 2030)
Membangun kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan lingkungan dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah	Memperkuat kemitraan berbagai stakeholder untuk pertumbuhan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah	Meningkatkan daya saing ekonomi melalui transformasi digital	Meningkatkan pemerataan pembangunan/ kesejahteraan ekonomi melalui pemantapan transformasi digital	Pemantapan pembangunan berkelanjutan dan tangguh melalui tata kelola terintegrasi	Pemantapan pembangunan ekonomi, sumber daya manusia (SDM) dan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berbasis nilai budaya

3.2.2 Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan RPJPD pada tahap pertama adalah “Menguatkan Potensi Daerah”. “Menguatkan” berarti meningkatkan kemampuan, meningkatkan kualitas maupun memperkuat fondasi. Mengingat dokumen RPJMD sebagai rincian dari dokumen RPJPD, maka arah kebijakan RPJPD diterjemahkan secara kontekstual dalam RPJMD. RPJPD memberikan arah kebijakan yang bersifat makro. Beberapa arah kebijakan RPJPD memerlukan penerapan yang tepat, terutama dengan melihat dinamika kebijakan baik nasional maupun internasional yang tidak terprediksi pada kurun waktu antara penyusunan RPJPD dengan RPJMD.

Berdasarkan hal tersebut, keenam Misi RPJMD difokuskan pada penguatan transformasi pada seluruh aspek sebagai landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta memastikan bahwa kebijakan pembangunan yang diterapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan fondasi yang kokoh, pembangunan dapat berjalan secara terencana, terintegrasi, serta mampu menghadapi tantangan di masa depan untuk mencapai visi daerah pada akhir tahun perencanaan.

Tabel 3.5. Arah Kebijakan Berdasarkan Misi RPJMD

No	Misi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian	Membangun kapasitas *stakeholder* untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
		Memperkuat peran *stakeholder* dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM).
		Memperkuat jejaring *stakeholder* dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM).
		Mempercepat transformasi digital untuk penguatan jejaring *stakeholders*.
		Pemantapan kerja sama penta helix untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM).

No	Misi	Arah Kebijakan
		Kerja sama *penta-helix* yang berkelanjutan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM).
2	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana guna menjamin pembangunan yang berkeadilan	Membangun infrastruktur dan jaringan untuk peningkatan kualitas layanan infrastruktur.
		Pengembangan infrastruktur dan jaringan transportasi untuk peningkatan kualitas layanan infrastruktur.
		Pengembangan infrastruktur dasar dan jaringan transportasi yang berkelanjutan pada titik prioritas penanganan infrastruktur untuk peningkatan layanan infrastruktur.
		Peningkatan infrastruktur, konektivitias sekitar kawasan exit toll, dan kawasan titik transit yang berkelanjutan dan sensitif air untuk meningkatkan layanan infrastruktur.
		Pemantapan transportasi publik dan infrastruktur yang berkelanjutan untuk mewujudkan wilayah yang berdaya saing.
		Mewujudkan infrastruktur dan transportasi publik berkelanjutan dan inklusif melalui sistem manajemen infrastruktur untuk mewujudkan peningkatan kualitas layanan infrastruktur.
3	Menjamin akses kesehatan yang adil dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pengembangan layanan persampahan dan air limbah serta peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman melalui penataan ruang.
		Peningkatan layanan persampahan dan air limbah serta peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman melalui penataan ruang.
		Peningkatan pemantauan pencemaran lingkungan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan permukiman melalui penataan ruang yang berkualitas
		Penguatan tutupan lahan hijau dan sistem pemantauan pencemaran lingkungan serta perwujudan ruang untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan permukiman.
		Pengembangan ruang terbuka hijau (RTH), pengolahan sampah berbasis masyarakat dan penyelenggaraan permukiman dan penataan ruang menuju penerapan ekonomi sirkuler.
		Mewujudkan pelayanan jaringan air limbah dan persampahan yang handal, ketaatan usaha dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, dan ruang wilayah layak dan aman.
4	Mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat	Membangun daya saing ekonomi melalui ketahanan air dan pangan, peningkatan produktivitas, penguatan daya tarik dan promosi wisata, peningkatan kapasitas pelaku usaha, dan penciptaan iklim usaha yang sehat, serta optimalisasi aset daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
		Mengembangkan daya saing ekonomi melalui penguatan *branding* dan ekosistem wirausaha, serta kemandirian masyarakat untuk menciptakan nilai tambah, serta optimalisasi aset daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
		Meningkatkan daya saing ekonomi melalui digitalisasi dan transformasi, sarana pendukung berkualitas, jaringan pasar dan kemitraan, pengembangan ekonomi kreatif, dan pertumbuhan investasi berkelanjutan, serta intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

No	Misi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan kemandirian ekonomi melalui regenerasi pelaku usaha, optimalisasi sumber daya dan penguatan nilai tambah lintas sektor berwawasan lingkungan.
		Memantapkan kemandirian ekonomi melalui konektivitas dan integrasi ekonomi serta percepatan transformasi dan globalisasi.
		Mewujudkan perekonomian yang berkualitas melalui ekosistem ekonomi yang resilien, berkelanjutan, dan berdaya saing global.
5	Mewujudkan reformasi birokrasi bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menjunjung tinggi tegaknya hukum	Penataan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan berbasis regulasi adaptif, digitalisasi layanan, keamanan siber, dan mendorong inovasi dan riset daerah .
		Penguatan tata kelola pemerintahan melalui regulasi adaptif, digitalisasi layanan publik terintegrasi, penguatan keamanan siber, penyempurnaan sistem pengaduan masyarakat yang responsif.
		Percepatan tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui pemanfaatan teknologi cerdas, penguatan keamanan siber, inovasi layanan publik, secara berkelanjutan.
		Pemantapan pemerintahan digital terintegrasi melalui smart governance, inovasi layanan publik, sistem pengaduan yang responsif, serta digitalisasi untuk kemandirian desa dan reformasi kalurahan.
		Pengembangan inovasi layanan publik dan integrasi digitalisasi pemerintahan yang didukung keamanan siber, sinergi regulasi, serta ketahanan wilayah dalam menghadapi bencana.
		Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan, adaptif, dan akuntabel melalui regulasi dinamis, digitalisasi terpadu dan inovasi layanan berkelanjutan.
6	Pemajuan kebudayaan dalam semangat kebhinekaan, toleransi, dan keistimewaan	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai media promosi dan internalisasi budaya.
		Membangun kemitraan *penta-helix* sebagai penguatan kalurahan/desa budaya dalam internalisasi budaya.
		Memperkuat pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dalam internalisasi budaya.
		Mempercepat pemanfaatan potensi budaya local sebagai pendorong investasi.
		Memantapkan pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan cagar budaya dalam pelestarian nilai budaya.
		Pengejawantahan nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan.

3.2.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran dari setiap Misi yang telah disusun serta memperhatikan Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan, dirumuskan program-program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan berdasarkan keenam belas Program Strategis Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman periode tahun 2025-2029, seperti dijabarkan pada tabel di bawah.

Tabel 3.6. Program Strategis Bupati

No	Program Strategis Bupati	Deskripsi
1	Pengentasan Kemiskinan	Pengentasan kemiskinan merupakan upaya multidimensional yang melibatkan intervensi terstruktur dalam dimensi ekonomi, sosial, dan budaya.
2	Jaminan Sosial Dan Kesehatan Untuk Difabel, Lansia, Dan Keluarga Miskin	Program jaminan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko sosial dan ekonomi, serta memastikan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai.
3	Jaminan Gizi Ibu Hamil Dan Anak	Program ini mencakup penyediaan makanan bergizi seimbang, suplemen mikronutrien, serta edukasi gizi, yang secara sinergis berkontribusi pada pencegahan stunting, peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta pengembangan potensi kognitif dan fisik.
4	Jaminan Pendidikan Untuk Anak Di Sleman	Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan kondusif, sehingga setiap anak di Sleman memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi diri secara optimal.
5	Sleman Tuntas Sampah (Sleman Resik)	Program ini mengimplikasikan tercapainya siklus pengelolaan sampah yang komprehensif, mencakup pengurangan produksi, optimalisasi daur ulang, dan penanganan residu secara bertanggung jawab, yang disertai penguatan kapasitas masyarakat guna mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan.
6	Peningkatan Kualitas Jalan Dan Penerangan Umum (Sleman Alus dan Sleman Padhang)	Program ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas, mobilitas, serta keamanan publik, yang secara simultan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan efisiensi aktivitas ekonomi masyarakat.
7	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kesehatan Dan Pendidikan	Program ini bertujuan meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan, yang secara signifikan berkontribusi pada peningkatan indeks pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat.
8	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Ekonomi	Program ini memberi penekanan pada penguatan infrastruktur fisik dan digital untuk mencapai peningkatan produktivitas, efisiensi distribusi, serta daya saing sektor-sektor ekonomi strategis.
9	Mewujudkan Ekosistem Pariwisata, Kebudayaan, Keolahragaan, Dan Ekonomi Kreatif	Program ini sebagai upaya komprehensif dalam membangun sinergi antara sektor pariwisata, kebudayaan, keolahragaan, dan ekonomi kreatif, dengan fokus pada penciptaan ekosistem yang berkelanjutan dan terintegrasi berbasis kemitraan.
10	Peningkatan Akses Dan Kapasitas UMKM, Dan Penciptaan Wirausaha Muda	Program ini bertujuan untuk memperkuat struktur ekonomi lokal melalui peningkatan kapabilitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mengakses sumber daya dan pasar, serta menstimulasi generasi muda untuk mengembangkan potensi kewirausahaan.
11	Menjaga Ketahanan Pangan Dan Kesejahteraan Petani	Program ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi seluruh populasi, dengan turut serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup petani untuk memastikan keberlanjutan produksi pangan.
12	Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	Program ini merupakan strategi krusial dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan mengintegrasikan konservasi ekosistem dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan ruang rekreasi, edukasi, dan mitigasi perubahan iklim.
13	Penciptaan Pelayanan Perizinan Yang Responsif	Program ini merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi, dengan mengedepankan kecepatan, ketepatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat.

No	Program Strategis Bupati	Deskripsi
14	Penciptaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif, Transparan, Akuntabel Dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi, Dan Nepotisme (KKN)	Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang diwujudkan melalui inovasi sistem, transparansi informasi, akuntabilitas kinerja, serta eliminasi praktik KKN dalam rangka membangun kepercayaan publik dan efektivitas pelayanan negara.
15	Penciptaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat	Program ini merupakan proses multidimensional yang melibatkan penegakan hukum, pencegahan kriminalitas, dan pembangunan lingkungan sosial yang kondusif sebagai upaya untuk menciptakan stabilitas sosial yang esensial daya saing daerah.
16	Pembangunan Padukuhan	Program ini merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di tingkat dusun melalui analisis kebutuhan lokal, perencanaan partisipatif, dan implementasi program yang berfokus pada peningkatan aksesibilitas, fasilitas publik, dan pemberdayaan ekonomi komunitas melalui hibah ke kalurahan.

Adapun sandingan Program Strategis Bupati dan Program Prioritas Pembangunan tercantum dalam tabel di bawah.

Tabel 3.7. Penyandingan Program Strategis Bupati dan Program Prioritas Pembangunan Dalam Pencapaian Visi Misi

Misi	Tujuan	Sasaran	Program Strategis Bupati	Program Prioritas	Perangkat Daerah Pelaksana
Misi 1: Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian Misi 6: Pemajuan kebudayaan dalam semangat kebhinekaan, toleransi, dan keistimewaan	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	Meningkatnya masyarakat terdidik dan berpengetahuan yang merata	Jaminan pendidikan untuk anak di Sleman	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Meningkatnya kesehatan masyarakat untuk kehidupan berkualitas	Jaminan gizi ibu hamil dan anak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan		
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas P3AP2KB
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
			Mewujudkan ekosistem pariwisata, kebudayaan, keolahragaan, dan ekonomi kreatif	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda dan Olahraga

Misi	Tujuan	Sasaran	Program Strategis Bupati	Program Prioritas	Perangkat Daerah Pelaksana
		Menurunnya kemiskinan dan meratanya pendapatan	Pengentasan kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
				Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas P3AP2KB
				Program Perberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
			Jaminan sosial dan kesehatan untuk difabel, lansia, dan keluarga miskin	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
			Jaminan pendidikan untuk anak di Sleman	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
		Meningkatnya internalisasi kebudayaan dalam masyarakat	Mewujudkan ekosistem pariwisata, kebudayaan, keolahragaan, dan ekonomi kreatif	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
				Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Misi	Tujuan	Sasaran	Program Strategis Bupati	Program Prioritas	Perangkat Daerah Pelaksana
Misi 2: Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana guna menjamin pembangunan yang berkeadilan Misi 4 : Mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat	Terwujudnya perekonomian yang berkualitas	Meningkatnya kinerja sektor unggulan dan potensial	Menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan petani	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
				Pengelolaan Perikanan Budidaya	
			Peningkatan sarana dan prasarana ekonomi	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Tertentu	
			Mewujudkan ekosistem pariwisata, kebudayaan, keolahragaan, dan ekonomi kreatif	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
				Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Misi	Tujuan	Sasaran	Program Strategis Bupati	Program Prioritas	Perangkat Daerah Pelaksana
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Meningkatnya daya saing daerah	Peningkatan kualitas jalan dan penerangan umum	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPKP
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	DPUPKP
			Menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan petani	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUPKP
			Peningkatan akses dan kapasitas UMKM, dan penciptaan wirausaha muda	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
				Program Pengembangan UMKM	
				Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Misi	Tujuan	Sasaran	Program Strategis Bupati	Program Prioritas	Perangkat Daerah Pelaksana
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Penciptaan keamanan dan ketertiban masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Penciptaan pelayanan perizinan yang responsif	Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
				Program Promosi Penanaman Modal	
		Menurunnya pengangguran	Peningkatan akses dan kapasitas UMKM, dan penciptaan wirausaha muda	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
				Program Penempatan Tenaga Kerja	

Misi	Tujuan	Sasaran	Program Strategis Bupati	Program Prioritas	Perangkat Daerah Pelaksana
Misi 3: Menjamin akses kesehatan yang adil dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Terwujudnya lingkungan hidup yang lestari	Meningkatnya kualitas lingkungan	Pelestarian lingkungan hidup dan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
			Sleman tuntas sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Pelestarian lingkungan hidup dan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
				Program Kawasan Permukiman	DPUPKP
Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menjunjung tinggi tegaknya hukum	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel dan transparan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan keuangan daerah	Pembangunan padukuhan; Penciptaan tata kelola pemerintahan yang inovatif, transparan, akuntabel dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN)	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan

Misi	Tujuan	Sasaran	Program Strategis Bupati	Program Prioritas	Perangkat Daerah Pelaksana
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
				Program Pengelolaan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Meningkatnya kualitas pelayanan	Penciptaan tata kelola pemerintahan yang inovatif, transparan, akuntabel dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN)	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja

Misi	Tujuan	Sasaran	Program Strategis Bupati	Program Prioritas	Perangkat Daerah Pelaksana
				Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintah	Penciptaan tata kelola pemerintahan yang inovatif, transparan, akuntabel dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

Program prioritas pembangunan daerah di bawah telah mencakup tematik yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi kreatif dan penanganan sampah sesuai dengan analisis pemajuan IPTEK daerah. Di luar program prioritas pembangunan daerah, masih terdapat 10 program yaitu Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Program Pengendalian Izin Usaha Industri, Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Program Perekonomian dan Pembangunan, Program Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Program Riset dan Inovasi Daerah yang mendukung tematik tersebut.

Kemudian, dalam rangka penyelarasan dan dukungan kabupaten terhadap pembangunan DIY, Kabupaten Sleman juga menyelaraskan indikator program keistimewaan yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Sleman dengan program keistimewaan yang tercantum dalam RPJMD DIY Tahun 2022-2027. Penyandingan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.8. Penyandingan Indikator Program Keistimewaan

Urusan/Program	DIY		Kabupaten Sleman	
	Indikator	PD Penanggung Jawab	Indikator	PD Penanggung Jawab
Urusan Kelembagaan				
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Kematangan perangkat daerah	Biro Organisasi	Persentase perangkat daerah pengampu keistimewaan dengan kinerja berkualitas baik	Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Paniradya Kaistimewan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Paniradya Kaistimewan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Paniradya Kaistimewan	Persentase laporan pendampingan pelaksanaan Reformasi Kalurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Paniradya Kaistimewan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan	17 Kapanewon
Urusan Kebudayaan				
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan	Dinas Kebudayaan	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan	Dinas Kebudayaan
	Realisasi pelaksanaan		Persentase penduduk yang terlibat sebagai	

Urusan/Program	DIY		Kabupaten Sleman	
	Indikator	PD Penanggung Jawab	Indikator	PD Penanggung Jawab
	program kegiatan urusan kebudayaan		pelaku/pendukung kegiatan kebudayaan	
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya	DPUPESDM	persentase ketersedian dokumen pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya	DPUPKP
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Dinas Kebudayaan	Persentase pelaksanaan kegiatan keistimewaan kebudayaan	Dinas Pariwisata
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Dinas Kebudayaan DIY	Persentase pelaksanaan kegiatan keistimewaan kebudayaan	17 Kapanewon
Urusan Pertanahan				
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Persentase kinerja fasilitasi pengelolaan tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Persentase kinerja fasilitasi pengelolaan tanah kasultanan, dan tanah desa	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Urusan Tata Ruang				
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Persentase kawasan ruang strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Persentase penyediaan prasarana lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) di kawasan strategis	Dinas Perhubungan	Persentase intervensi penyediaan prasarana lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) di kawasan strategis	Dinas Perhubungan

Disclaimer: Dana keistimewaan pada program keistimewaan tergantung pada kemampuan keuangan negara atau alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat serta penilaian kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat. Perangkat daerah yang tidak tercantum dalam RPJMD ini bisa mendapatkan dana keistimewaan bergantung pada penugasan dari Pemerintah Daerah DIY dan dinamisasi kondisi keuangan Pemerintah Pusat maupun pencapaian target Pemerintah Daerah DIY.

3.3 Lokus Pembangunan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025–2029

Dalam mewujudkan visi "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sleman yang Maju, Adil, Makmur, Lestari dan Berkeadaban", penyusunan lokus pembangunan mengacu pada prinsip pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan strategis yang digunakan adalah klasterisasi spasial melalui penetapan lokus pengembangan wilayah.

Pendekatan ini bertujuan untuk menjawab isu-isu strategis daerah seperti ketimpangan wilayah, tekanan konversi lahan pertanian, kebutuhan infrastruktur yang merata, serta adaptasi perubahan iklim. Dengan mempertimbangkan arahan RTRW Kabupaten Sleman dan tahap awal implementasi RPJPD Kabupaten Sleman Tahun 2025–2045, wilayah Kabupaten Sleman dibagi menjadi empat kawasan pengembangan utama.

Berdasarkan karakteristik geografis dan potensi perekonomian, Kabupaten Sleman dibagi menjadi empat kawasan utama sebagai berikut:

1. Kawasan Sleman Utara

   Kawasan Sleman Utara memiliki fungsi penting dalam pelestarian lingkungan, mitigasi bencana dan wisata alam. Fokus pengembangan pada kawasan ini adalah perlindungan kawasan untuk mengoptimalkan resapan air, penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, dan mengembangkan wisata alam berkelanjutan dan adaptif terhadap bencana.

2. Kawasan Sleman Tengah

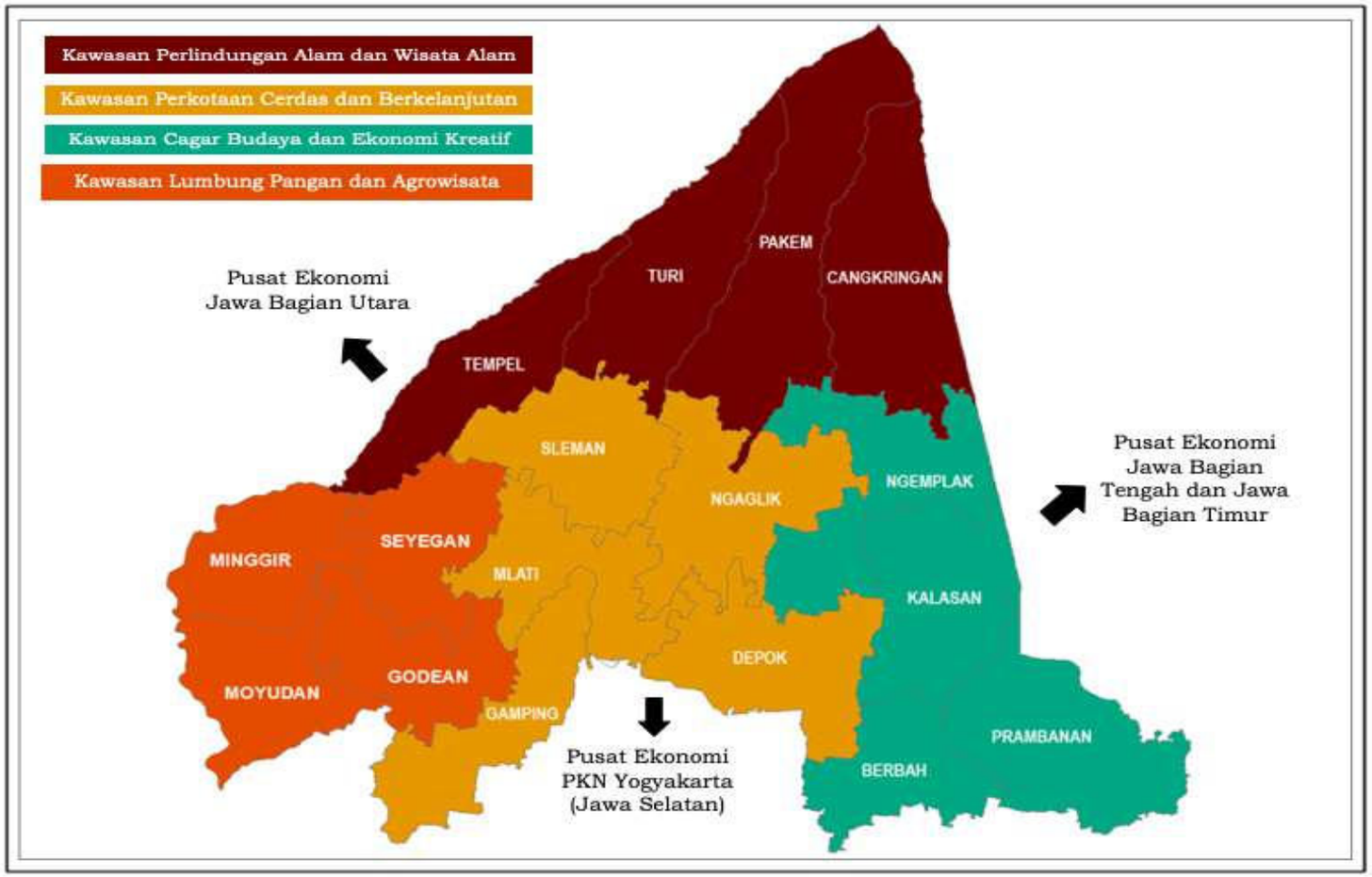
   Kawasan Sleman Tengah merupakan kawasan perkotaan yang menjadi limpasan pengembangan Perkotaan Yogyakarta. Pengembangan yang dilakukan di kawasan ini adalah pengembangan perkotaan cerdas pendukung jasa pendidikan dan pariwisata.

3. Kawasan Sleman Timur

   Kawasan Sleman Timur merupakan kawasan yang memiliki warisan budaya dengan keunggulan aksesibilitas. Pengembangan yang dapat dilakukan di kawasan ini adalah pengembangan pariwisata budaya, pelestarian cagar budaya dan situs purbakala, serta pengembangan kawasan di sekitar rencana *exit toll*.

4. Kawasan Sleman Barat

   Kawasan Sleman Barat merupakan kawasan yang memiliki sumber daya pertanian dan permukiman dengan corak pedesaan. Pengembangan yang dilakukan pada kawasan ini adalah pengembangan lumbung pangan melalui pertanian modern dan agrowisata.



Gambar 3.2. Kawasan Pembangunan Kabupaten Sleman

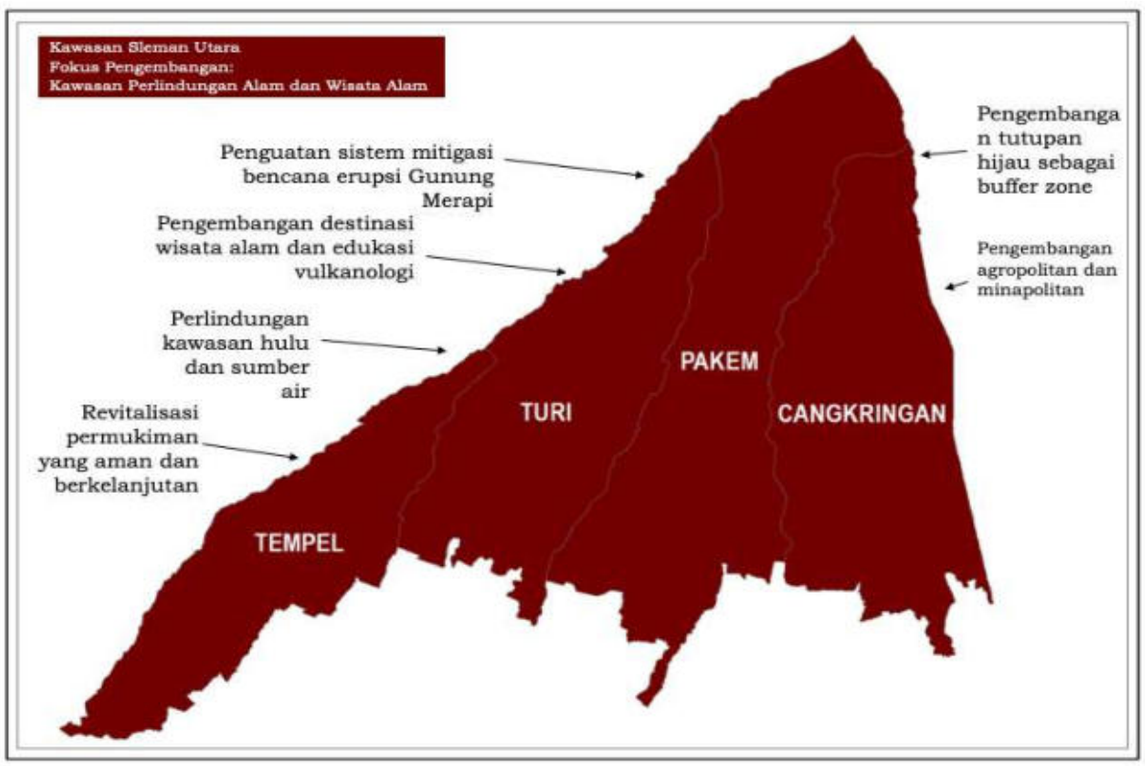
Strategi pengembangan wilayah ini telah menyesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah dengan mendorong keterpaduan antar sektor untuk dapat mewujudkan fungsi masing-masing wilayah. Pengembangan yang telah menyesuaikan dengan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman 2021-2041 yang mengintegrasikan antara pusat kegiatan, infrastruktur dan pemanfaatan lahan dengan rencana pengembangan sektoral diharapkan mampu mewujudkan Kabupaten Sleman seimbang antara pelestarian alam dan pertumbuhan ekonomi.

Pendekatan klasterisasi spasial dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025–2029 merupakan langkah penting dalam memastikan pembangunan yang lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan. Dengan membagi wilayah menjadi empat kawasan utama, masing-masing dengan tema dan fokus pengembangan yang spesifik, maka RPJMD dapat lebih mudah diimplementasikan dan diukur capaiannya secara spasial. Secara lebih rinci, kawasan dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:

1. Kawasan Sleman Utara

Kawasan Sleman Utara meliputi empat kapanewon yaitu Kapanewon Tempel, Turi, Pakem, Cangkringan. Kawasan ini berfokus pada pelestarian lingkungan dengan penekanan pada mitigasi bencana, wisata alam, minapolitan dan agropolitan.

a. **Kapanewon Tempel** berfungsi sebagai wilayah transisi antara perkotaan dan perdesaan serta penyangga kawasan rawan bencana.
b. **Kapanewon Turi** berfungsi sebagai kawasan agrowisata dan minapolitan serta permukiman pedesaan.
c. **Kapanewon Pak**em sebagai pusat pariwisata alam, edukasi vulkanologi dan permukiman tangguh bencana.
d. **Kapanewon Cangkringan** sebagai kawasan wisata alam, edukasi kebencanaan dan permukiman tangguh bencana.



Gambar 3.3. Fokus Pengembangan Kawasan Sleman Utara Sebagai Kawasan Perlindungan Alam dan Wisata Alam

Wilayah Sleman Utara merupakan kawasan yang memiliki risiko bencana vulkanik Gunung Merapi yang tinggi, namun sekaligus menyimpan potensi besar dalam bidang wisata alam dan edukasi vulkanologi. Kawasan ini juga merupakan bagian penting dari sistem perlindungan sumber air dan hutan lindung di Kabupaten Sleman.

Dalam konteks RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025–2029, pengembangan wilayah di kawasan ini difokuskan pada upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana, perlindungan kawasan di lereng gunung, serta optimalisasi destinasi pariwisata yang tangguh bencana. Hal ini selaras dengan **Misi 3** RPJMD, yaitu "Menjamin Akses Kesehatan yang Adil dan Pelestarian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan", serta mendukung arah kebijakan RPJPD tentang peningkatan ketahanan terhadap bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Fokus pengembangan wilayah di Sleman Utara meliputi:
a. Penguatan sistem mitigasi bencana erupsi Gunung Merapi;
b. Pengembangan destinasi wisata alam dan edukasi vulkanologi;
c. Perlindungan kawasan hulu dan sumber air;
d. Revitalisasi permukiman yang aman dan berkelanjutan;
e. Pengembangan tutupan hijau sebagai buffer zone; serta
f. Pengembangan agropolitan dan minapolitan.

2. Kawasan Sleman Tengah

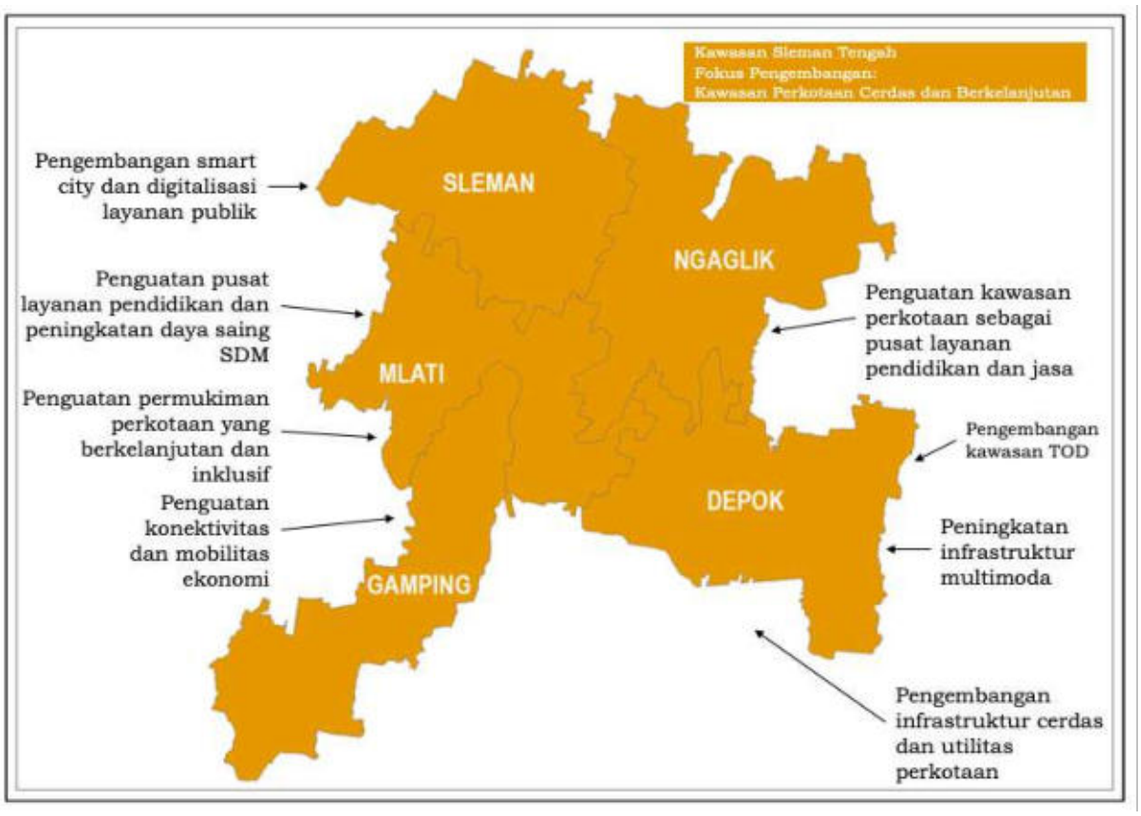
Kawasan Sleman Tengah meliputi lima kapanewon yaitu Kapanewon Sleman, Ngaglik, Mlati, Depok, Gamping. Kawasan ini diproyeksikan untuk pengembangan kawasan perkotaan cerdas dengan penekanan pada jasa pendidikan dan pariwisata.

a. **Kapanewon Sleman** berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan layanan tingkat kabupaten yang didukung pengembangan kota kompak dengan integrasi transportasi dan permukiman.
b. **Kapanewon Ngaglik** berfungsi sebagai pengembangan permukiman perkotaan berkelanjutan dan pendidikan.
c. **Kapanewon Mlati** berfungsi sebagai pusat permukiman perkotaan, pendidikan dan riset, dan simpul transportasi darat dan konektivitas regional.
d. **Kapanewon Depok** berfungsi sebagai kawasan simpul transportasi udara, permukiman perkotaan dan sentra ekonomi dan bisnis di sekitar kawasan bandara.
e. **Kapanewon Gamping** berfungsi sebagai permukiman perkotaan kepadatan menengah dan simpul konektivitas transportasi darat.

Sleman Tengah merupakan pusat administrasi dan perkembangan perkotaan di Kabupaten Sleman. Kawasan ini menjadi simpul utama dalam penyediaan layanan publik, pendidikan, transportasi, serta pusat aktivitas ekonomi dan bisnis.

Pengembangan kawasan di Sleman Tengah ditujukan untuk meningkatkan konektivitas, mobilitas, dan produktivitas ekonomi melalui pendekatan TOD (*Transit Oriented Development*), *smart city*, dan digitalisasi layanan publik. Fokus utama juga diberikan pada peningkatan kualitas SDM dan penyediaan sarana prasarana yang mendukung transformasi perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan **Misi 1, 2** dan **Misi 5** RPJMD Sleman yaitu "Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas dan Berkepribadian.", "Meningkatkan Kualitas Sarana dan

Prasarana Guna Menjamin Pembangunan yang Berkeadilan", dan "Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Menjunjung Tinggi Tegaknya Hukum"



Gambar 3.4. Fokus Pengembangan Kawasan Sleman Tengah Sebagai Kawasan Perkotaan Cerdas dan Berkelanjutan

Fokus pengembangan wilayah di Sleman Tengah meliputi:

a. Penguatan kawasan perkotaan sebagai pusat layanan pendidikan dan jasa;
b. Pengembangan kawasan TOD (*Transit Oriented Development*), terutama di koridor lintas kereta api dan terminal;
c. Peningkatan infrastruktur multimoda;
d. Pengembangan smart city dan digitalisasi layanan publik;
e. Penguatan pusat layanan pendidikan dan peningkatan daya saing SDM;
f. Penguatan permukiman perkotaan yang berkelanjutan dan inklusif;
g. Penguatan konektivitas dan mobilitas ekonomi; serta
h. Pengembangan infrastruktur cerdas dan utilitas perkotaan.

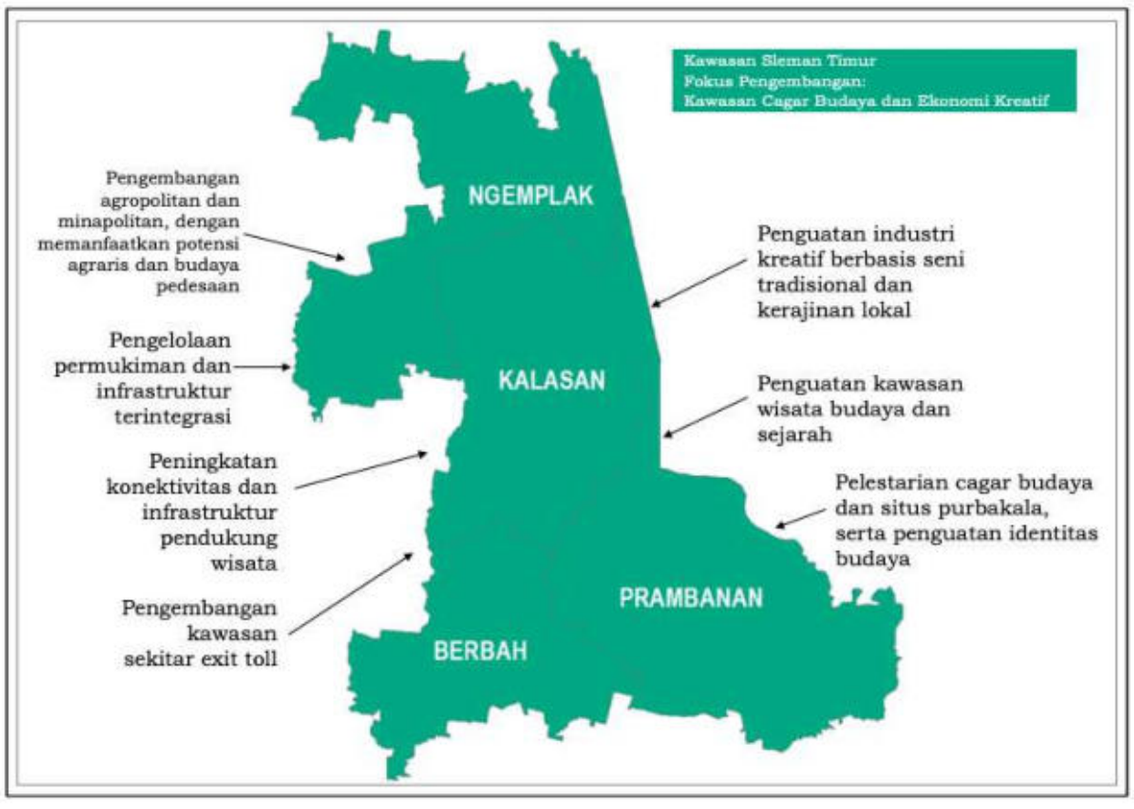
3. Kawasan Sleman Timur

Kawasan Sleman Timur meliputi empat kapanewon yaitu Kapanewon Ngemplak, Kalasan, Prambanan, Berbah. Kawasan ini diproyeksikan untuk pelestarian warisan budaya dengan mengembangkan wisata budaya dan sejarah, minapolitan dan agropolitan.

Sleman Timur memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata budaya, khususnya di sekitar kompleks Candi Prambanan yang merupakan salah satu warisan budaya nasional dan dunia. Selain itu, wilayah ini juga memiliki potensi pengembangan agrowisata dan minapolitan di kawasan timur Sleman.

a. **Kapanewon Ngemplak** berfungsi sebagai kawasan permukiman kepadatan menengah, pengembangan agrowisata dan perlindungan lingkungan.
b. **Kapanewon Kalasan** berfungsi sebagai kawasan perlindungan warisan budaya, wisata budaya, permukiman kepadatan menengah, kawasan pendukung bandara dan simpul konektivitas darat dengan adanya exit toll.
c. **Kapanewon Prambanan** berfungsi sebagai Kawasan Strategis Nasional Candi Prambanan dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya.
d. **Kapanewon Berbah** berfungsi sebagai permukiman kepadatan menengah transisi antara perkotaan perdesaan dengan fungsi pendukung pariwisata dan pertanian.

Dalam RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025–2029 kawasan Sleman Timur ditempatkan sebagai kawasan yang menjadi pusat pelestarian budaya, promosi destinasi sejarah, serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni tradisional dan kerajinan lokal. Hal ini sejalan dengan **Misi 6** dan **Misi 4** RPJMD Sleman, yaitu "Pemajuan Kebudayaan Dalam Semangat Kebhinekaan, Toleransi, dan Keistimewaan." serta "Mewujudkan Keadilan Sosial Ekonomi Masyarakat".



Gambar 3.5. Fokus Pengembangan Kawasan Sleman Timur Sebagai Kawasan Cagar Budaya dan Ekonomi Kreatif

Fokus pengembangan wilayah di Sleman Timur meliputi:

a. Penguatan kawasan wisata budaya dan sejarah;
b. Pelestarian cagar budaya dan situs purbakala, serta penguatan identitas budaya;
c. Penguatan industri kreatif berbasis seni tradisional dan kerajinan lokal;
d. Pengembangan agropolitan dan minapolitan, dengan memanfaatkan potensi agraris dan budaya pedesaan;

e. Peningkatan konektivitas dan infrastruktur pendukung wisata;
f. Pengelolaan permukiman dan infrastruktur terintegrasi;
g. Pengembangan kawasan sekitar exit toll;

4. Kawasan Sleman Barat

Kawasan Sleman Barat terdiri dari empat kapanewon meliputi Kapanewon Godean, Seyegan, Moyudan, Minggir. Kawasan Sleman Barat merupakan kawasan pertanian dengan penekanan pada pengembangan pertanian modern dan agrowisata.

Kawasan Sleman Barat merupakan wilayah yang dominan agraris dengan potensi besar dalam pengembangan pertanian modern, agrowisata, dan desa wisata. Wilayah ini juga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan agropolitan berbasis komoditas unggulan.

a. **Kapanewon Godean** berfungsi sebagai pusat permukiman kepadatan menengah yang selaras dengan perlindungan lingkungan agraris.
b. **Kapanewon Seyegan** berfungsi sebagai kawasan pertanian dan pengembangan agrowisata.
c. **Kapanewon Moyudan** berfungsi sebagai sentra produksi pangan dan holtikultura, pengembangan agrowisata dan minapolitan
d. **Kapanewon Minggir** sebagai kawasan pertanian dan kerajinan tradisional dan UMKM

Dalam RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025–2029, pengembangan wilayah di Sleman Barat difokuskan pada penguatan basis agraris, pengembangan desa wisata berbasis produk lokal, serta revitalisasi irigasi dan infrastruktur pendukung pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan. Upaya ini selaras dengan **Misi 4** dan **Misi 6** RPJMD, yaitu "Mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat" dan "Pemajuan kebudayaan dalam semangat kebhinekaan, toleransi, dan keistimewaan".



Gambar 3.6. Fokus Pengembangan Kawasan Sleman Barat Sebagai Kawasan Lumbung Pangan dan Agrowisata

Fokus pengembangan wilayah di Sleman Barat meliputi:

a. Penguatan sektor pertanian melalui kawasan lumbung pangan berkelanjutan;
b. Pengembangan agrowisata dan desa wisata berbasis produk lokal;
c. Peningkatan infrastruktur pertanian dan utilitas perdesaan;
d. Revitalisasi infrastruktur pendukung pertanian (jaringan irigasi dan Jalur Usaha Tani) untuk mendukung ketahanan pangan;
e. Pengembangan sentra distribusi hasil pertanian dan UMKM;
f. Penguatan permukiman agraris yang harmonis dan berkelanjutan;
g. Pengembangan ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal; serta
h. Penguatan fungsi zona lindung dan daya dukung lingkungan.

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan, maka disusun program-program pembangunan perangkat daerah yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan, berdasarkan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Sleman. Adapun program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, sebagai pijakan penyusunan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya.

Selain itu, penyusunan program pembangunan Kabupaten Sleman juga memperhatikan kapasitas riil fiskal sebagaimana disajikan dalam bab sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar penentuan target dan anggaran selama periode ini akan dapat didukung dengan kemampuan dan kapasitas fiskal daerah. Pagu indikatif merupakan wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program tahunan.

Perumusan indikasi program pembangunan yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Program pembangunan yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Renstra PD, termasuk menjabarkan ke dalam kegiatan/sub kegiatan.

Program-program perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama periode 2025-2030 beserta indikasi kebutuhan pendanaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah Kabupaten Sleman

Kode	Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan perencanaan dan keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	582.425.965.095	-	588.533.159.513	-	577.844.045.000	-	576.090.679.000	-	578.675.635.000	-	590.582.592.000	Dinas Pendidikan
			Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan	%	100	-		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Persentase pemenuhan layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	%	100	-		100		100		100		100		100		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya kualitas satuan pendidikan	Persentase satuan pendidikan PAUD terakreditasi A	%	34	34	343.915.244.085	-	343.753.163.417	-	303.734.815.000	-	306.251.815.000	-	314.541.415.000	-	349.461.900.000	Dinas Pendidikan
			Persentase satuan pendidikan non formal dan kesetaraan yang penyelenggaraannya sudah berizin	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Persentase sarpras PAUD, SD, SMP, dan pendidikan kesetaraan dalam kondisi baik	%	90,63	90,64		-		-		-		-		-		
			Persentase satuan pendidikan PAUD yang terakreditasi minimal B	%	87,70	-		87,70		87,71		87,71		87,71		87,72		
			Persentase satuan pendidikan SD terakreditasi A	%	69,53	69,55		69,54		69,54		69,55		69,55		69,56		
			Persentase satuan pendidikan SMP terakreditasi A	%	82,08	82,26		82,10		82,10		82,11		82,11		82,12		
			Persentase satuan pendidikan nonformal/kesetaraan yang terakreditasi minimal B	%	70,00	-		70,00		71,00		71,00		72,00		72,00		
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase guru yang memperoleh hasil penilaian kinerja guru dengan nilai minimal baik	%	99,95	99,96	31.642.000	-	31.642.000	-	31.500.000	-	31.500.000	-	31.500.000	-	31.700.000	Dinas Pendidikan
			Persentase guru ASN yang memenuhi kualifikasi pendidikan terakhir S1/D4 yang bersertifikat pendidik	%	75,38	85,00		-		-		-		-		-		
			Persentase pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) SD	%	99,69	-		99,70		99,70		99,71		99,71		99,72		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan perencanaan dan keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	482.794.972.155	-	463.103.643.159	-	385.057.374.606	-	398.614.051.836	-	436.531.667.863	-	444.303.938.989	Dinas Kesehatan
			Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan	%	100	-		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Persentase capaian standar pelayanan minimal rumah sakit Bagian Tata Usaha (RSUD Sleman)	%	95,43	97		-		-		-		-		-		
			Persentase capaian standar pelayanan minimal rumah sakit Bagian Keuangan dan Aset (RSUD Sleman)	%	84,18	85,5		-		-		-		-		-		
			Persentase capaian standar pelayanan minimal rumah sakit Bagian Perencanaan dan Pengembangan (RSUD Sleman)	%	88,34	88,5		-		-		-		-		-		
			Persentase capaian Indikator standar pelayanan minimal rumah sakit Bagian Tata Usaha (RSUD Prambanan)	%	97,22	100		-		-		-		-		-		
			Persentase pemenuhan layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	%	100	-		100		100		100		100		100		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase cakupan pelayanan Sleman Emergency Services (SES)	%	100	100	129.272.796.558	-	119.129.220.988	-	178.775.255.094	-	171.049.691.864	-	134.304.106.505	-	149.106.064.094	Dinas Kesehatan
			Angka penemuan penderita tuberkulosis (TB) *case detection rate* (CDR)	%	96,33	94		-		-		-		-		-		

Kode	Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan Bidang Kesehatan Masyarakat	%	97,79	100		-		-		-		-		-		
			Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	%	98,09	100		-		-		-		-		-		
			Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduuduk	-	3,09	2,92		-		-		-		-		-		
			Rerata indeks kepuasan layanan medis dan indikator mutu rumah sakit yang tercapai	-	90,97	91		-		-		-		-		-		
			Rerata pencapaian mutu asuhan keperawatan baik dan indeks kepuasan layanan penunjang	%	88,84	90,5		-		-		-		-		-		
			Rerata pemenuhan sarana pelayanan kesehatan dan pemenuhan jenis sistem informasi manajemen rumah sakit (SIM RS)	%	95,98	86,5		-		-		-		-		-		
			Indeks kepuasan pelayanan medis dan keperawatan	-	89,59	89,65		-		-		-		-		-		
			Indeks kepuasan pelayanan penunjang dan pemenuhan sarana rumah sakit berdasarkan data aplikasi, sarana, prasarana dan alat kesehatan (ASPAK)	-	78,98	82,15		-		-		-		-		-		
			Persentase pemenuhan indikator mutu rumah sakit dan pelaksanaan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIM RS) terintegrasi di unit pelayanan	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Persentase pemenuhan sarana, prasarana, alat kesehatan (SPA) sesuai standar pusat > 60%	%	NA	68,87		69		69,2		69,4		69,5		69,75		
			Persentase ketersediaan obat indikator nasional minimal 95% dan vaksin rutin 100% di UPT POAK	%	100	-		100		100		100		100		100		
			Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	98,56	98,74		99,06		99,12		99,18		99,21		99,33		
			Indeks capaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan	-	97,94	-		100		100		100		100		100		
			Persentase capaian kepatuhan identifikasi pasien (RSUD Sleman)	%	84,75	-		86		87		88		89		90		
			Persentase penulisan resep pasien jaminan kesehatan nasional (JKN) sesuai formularium rumah sakit (RSUD Sleman)	%	95,1	-		100		100		100		100		100		
			Rata-rata persentase capaian standar pelayanan minimal rumah sakit (jenis pelayanan) di bawah ampuan Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan (RSUD Prambanan)	%	89,34	-		89,94		90,24		90,54		90,84		91,14		
			Rata-rata persentase capaian standar pelayanan minimal rumah sakit (jenis pelayanan) di bawah ampuan Bidang Pelayanan Penunjang dan Sarana Pelayanan Kesehatan dengan capaian sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) rumah sakit (RSUD Prambanan)	%	82,71	-		83,31		83,61		83,91		84,21		84,51		
			Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) (%)	%	82,3	-		87		87,5		88		88,5		90		
			Persentase kapanewon melakukan kegiatan forum kapanewon sehat	%	52	-		88		94		100		100		100		
			Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita	%	4,53	-		4,45		4,4		4,35		4,3		4,25		
			Digital maturity indeks (DMI)	-	3	-		3,2		3,3		3,4		3,5		3,75		
			Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	97,79	-		97,8		97,81		97,82		97,83		97,84		
			Persentase akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	%	48	-		65		70		75		80		85		

Kode	Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase praktik tenaga kesehatan yang telah berizin	%	98,36	98,5	1.680.190.825	-	462.421.700	-	1.546.976.700	-	1.648.795.700	-	1.648.795.700	-	1.719.734.640	Dinas Kesehatan
			Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar	%	96,3	93,00		94,50		96,30		96,32		96,34		96,35		
			Persentase praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan memiliki izin praktik	%	98,36	-		98,6		98,7		98,8		98,9		99		
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Pengelolaan sediaan obat yang memenuhi syarat	%	76,56	78	662.415.500	-	369.475.000	-	577.301.000	-	705.578.000	-	705.578.000	-	773.354.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan sediaan makanan yang memenuhi syarat	%	93,23	96		-		-		-		-		-		
			Persentase toko, sarana prasarana kesehatan yang berizin	%	99,04	99,05		-		-		-		-		-		
			Persentase pelayanan kefarmasian di apotek, pengelolaan di toko obat, toko alkes dan optikal, serta cara produksi di usaha mikro obat tradisional (UMOT) sesuai standar/regulasi	%	NA	-		52		54		56		58		60		
			Persentase industri rumah tangga pangan (IRTP) yang produknya telah memiliki ijin edar produk industri rumah tangga (PIRT) terverifikasi dan tempat pengolahan pangan (TPP) siap saji yang telah memiliki sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS) atau stiker pembinaan	%	35,72	-		50,67		53,67		56,67		58,67		60,33		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase rumah tangga (RT) yang tidak merokok di dalam rumah	%	72,81	69,80	1.602.826.950	-	1.788.118.194	-	1.336.570.600	-	1.504.397.600	-	1.554.086.932	-	1.816.617.277	Dinas Kesehatan
			Persentase bayi ASI eksklusif	%	91,17	93,00		-		-		-		-		-		
			Persentase edukasi gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) pada rumah tangga (RT)	%	89,18	87,90		-		-		-		-		-		
			Persentase iklan layanan masyarakat kesehatan yang dipublikasikan	%	NA	-		65		70		75		80		85		
			Persentase posyandu siklus hidup yang aktif	%	NA	-		78		80		82		85		90		
			Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	62,6	-		66,5		68		70		81		82,5		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan perencanaan dan keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	26.204.478.665	-	39.090.473.164	-	39.195.149.300	-	39.943.707.750	-	40.590.221.050	-	41.272.805.050	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman; Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
			Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan	%	100	-		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Persentase pemenuhan layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	%	100	-		100		100		100		100		100		
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	%	82,66	82,88	40.555.182.140	-	39.774.464.394	-	44.215.505.660	-	60.498.296.446	-	59.093.075.991	-	61.506.191.350	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
			Persentase irigasi, bendung, dan bangunan air lainnya kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	%	85,8	-		86,27		86,48		86,69		86,9		87,12		
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui jaringan perpipaan terhadap jumlah rumah tangga di seluruh kabupaten	%	23,63	24,78	14.654.759.907	25,52	12.735.918.689	26,25	12.909.997.100	26,96	14.983.982.400	27,67	15.057.842.000	28,37	15.131.671.100	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
			Akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum	%	100	-		100		100		100		100		100		
			Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	%	19,99	-		20,57		20,85		21,13		21,25		21,36		

Kode	Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100,00	100,00	12.023.718.930	-	17.053.448.200	-	15.619.291.367	-	15.401.293.657	-	15.517.360.083	-	16.473.098.983	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	99,38	-		99,44		99,47		99,49		99,52		99,54		
			Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	%	29,34	-		31,70		33,53		35,35		37,17		38,97		
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Berkurangnya genangan pada kawasan permukiman	%	71,68	72,79	12.693.658.204	-	10.858.681.393	-	15.441.840.800	-	22.704.921.000	-	23.967.893.900	-	25.230.840.800	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
			Persentase drainase dalam kondisi baik	%	71,68	-		73,56		74,05		75,06		76,5		77,59		
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase kondisi gedung pemerintah baik	%	87,31	87,41	73.779.009.925	87,5	115.630.447.600	87,59	107.741.376.340	87,68	99.028.041.054	87,77	100.320.740.409	87,86	101.939.766.650	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase jumlah desa yang diawasi atas perizinan bangunan gedung dan bangunan atau prasarana bangunan	%	66,28	68,6	541.355.025	70,93	717.158.000	73,26	721.329.400	75,58	725.495.500	77,91	729.654.500	80,23	733.811.800	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase jalan mantab dan jembatan dalam kondisi baik (>80%)	%	70,63	71,44	51.110.524.972	72,69	156.497.409.718	73,43	167.004.530.900	74,69	226.880.240.600	75,44	216.827.088.200	76,69	209.031.802.900	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Terselenggaranya sistem informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten	%	100	100	914.378.000	-	894.328.720	-	899.530.600	-	904.726.000	-	909.912.500	-	915.096.800	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
			Persentase kumulatif tenaga konstruksi yang telah mengikuti dan lulus pelatihan	%	97,88	-		98,06		98,21		98,37		98,52		98,69		
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Tersedianya dokumen rencana tata ruang yang telah ditetapkan	Persentase ketersediaan dokumen rencana tata ruang yang telah ditetapkan	%	80	80	1.744.650.725	-	2.075.341.200	-	1.875.559.200	-	1.596.443.150	-	1.538.875.150	-	1.852.228.150	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
		Meningkatnya kinerja pengaturan, pembinaan penataan ruang, penilaian pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Rata-rata nilai kinerja pengaturan dan pembinaan penataan ruang	%	86	-		88		89		90		91		92		
			Rata-rata kinerja penilaian pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang	%	44,05	-		52		56		60		64		68		
		Meningkatnya rekomendasi kesesuaian tata ruang yang diterbitkan	Persentase rekomendasi kesesuaian tata ruang yang diterbitkan	%	86,88	88		-		-		-		-		-		
1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG*)	Meningkatnya kawasan satuan ruang strategis (SRS) yang dikembangkan dan dimanfaatkan	Persentase pemanfaatan ruang pada kawasan satuan ruang strategis (SRS) yang sesuai dengan rencana tata ruang	%	86,66	86,7	748.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perhubungan
			Persentase fasilitasi ruang keistimewaan pada satuan ruang strategis (SRS)	%	66,66	100		-		-		-		-		-		
1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG*)	Meningkatnya kawasan satuan ruang strategis (SRS) yang dikembangkan dan dimanfaatkan	Persentase kawasan ruang strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan	%	100	-	-	100	498.800.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG*)	Terfasilitasinya penyediaan prasarana LLAJ di kawasan strategis	Persentase intervensi penyediaan prasarana lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) di kawasan strategis	%	NA	-	-	33,33	500.000.000	33,33	500.000.000	33,33	500.000.000	33,33	500.000.000	33,33	500.000.000	Dinas Perhubungan
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase perbaikan rumah akibat bencana	%	100	100	3.552.008.730	100	3.402.647.400	100	3.223.602.600	100	3.226.888.500	100	3.265.990.400	100	3.432.453.100	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
			Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program kabupaten	%	100	100		100		100		100		100		100		

Kode	Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha di kabupaten yang ditangani terhadap total luas permukiman kumuh seluruh kabupaten	%	41,22	42,08	12.164.854.350	45,07	7.754.452.000	49,47	8.799.555.700	52,87	9.844.602.800	57,36	9.889.573.300	63,48	9.934.525.200	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
			Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat di dalam kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha	%	38,21	-		58,26		69,15		80,04		90,93		100		
			Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	79,02	-		80,03		81,33		82,84		84,6		86,71		
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	%	42,52	-	-	59,53	5.106.157.200	69,9	7.135.857.100	80,26	10.165.519.800	90,62	10.195.132.000	100	10.224.732.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase kondisi PSU rusunawa dan taman pemakaman umum baik	%	88,19	88,38	3.752.506.496	88,63	4.042.790.045	88,88	4.945.416.700	89,13	5.958.882.500	89,38	5.994.103.200	89,63	6.106.752.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat keampuan menengah	Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi menengah	%	NA	-	-	100	100.000.000	100	100.581.600	100	101.162.500	100	101.742.400	100	102.322.100	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan perencanaan dan keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	25.039.719.562	-	28.414.380.019	-	28.233.308.800	-	28.539.907.950	-	28.946.219.750	-	29.694.849.450	Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan	%	100	-		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Persentase pemenuhan layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	%	100	-		100		100		100		100		100		
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase anggota linmas yang telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	%	69,39	74	12.874.976.900	-	13.318.428.400	-	10.396.894.800	-	13.473.274.200	-	13.550.502.000	-	13.627.607.800	Satuan Polisi Pamong Praja
			Persentase peningkatan kapasitas anggota linmas	%	69,39	-		79		84		89		94		100		
		Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani	%	100	-		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	%	68,42	69		71		73		75		77		80		
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	6.015.112.085	-	5.306.868.994	-	5.018.174.800	-	5.022.461.850	-	5.084.008.250	-	5.349.997.250	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Cakupan penanganan tematik kawasan rawan bencana	%	86	-		90		92		94		96		98		
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Cakupan perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	%	64	-		66		67		68		69		70		
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase warga yang memperoleh layanan penyediaan, rehabilitasi dan rekonstruksi melalui penataan sistem dasar pelaksanaan pasca bencana	%	83,79	84		-		-		-		-		-		

Kode	Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Cakupan pengembangan sistem pemulihan bencana	%	64	-		66		67		68		69		70		
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (*respons time*)	Persentase kasus kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani	%	85,71	95	7.593.720.486	-	5.658.897.447	-	6.183.984.600	-	6.339.883.000	-	5.909.473.000	-	10.464.646.500	Satuan Polisi Pamong Praja
			Respon time WMK	%	85,71	-		100		100		100		100		100		
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan perencanaan dan keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	6.853.514.948	-	7.018.444.689	-	6.636.780.100	-	6.642.520.550	-	6.724.383.800	-	7.076.966.600	Dinas Sosial
			Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan	%	100	-		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Persentase pemenuhan layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	%	100	-		100		100		100		100		100		
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya partisipasi aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif	%	90,57	91	1.766.585.700	-	1.776.596.200	-	1.679.967.150	-	1.681.422.300	-	1.702.144.500	-	1.791.377.500	Dinas Sosial
			Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	90,57	-		92,4		93,6		94,8		95,4		96		
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Meningkatnya perlindungan sosial bagi WNI migran korban kekerasan	Persentase fasilitasi pemulangan warga negara migran Indonesia korban tindak kekerasan	%	100	100	4.050.000	100	2.400.000	100	2.260.000	100	2.271.500	100	2.299.500	100	2.400.000	Dinas Sosial
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya jangkauan layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti.	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang ditangani	%	92,1	100	7.753.479.725	-	7.430.584.600	-	7.026.435.150	-	7.032.521.300	-	7.119.191.500	-	7.492.407.700	Dinas Sosial
			Persentase pelayanan rujukan terpadu penanggulangan kemiskinan	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Persentase penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, dan gelandangan/pengemis yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	-		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas, anak, dan lanjut usia terlantar melalui layanan berbasis keluarga dan komunitas	Persentase keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan sosial	%	95,55	96		-		-		-		-		-		
			Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	92,08	-		100		100		100		100		100		
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya efektivitas penyaluran bantuan sosial kepada penerima manfaat	Persentase pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	%	100	100	18.300.540.075	-	29.508.398.700		27.903.436.900		27.927.606.350		28.271.791.900		29.753.913.700	Dinas Sosial
			Persentase realisasi penyaluran bantuan sosial kepada penerima manfaat	%	NA	-		92,25		93,65		95,45		96,4		96,8		
		Meningkatnya keberdayaan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) usia produktif dalam masyarakat	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) usia produktif yang masih memerlukan pelayanan sosial	%	NA	-		40,5		39,75		38,75		37,5		37,25		
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana	Jumlah kampung siaga yang terbentuk	%	29	31	1.034.015.300	-	1.077.222.900	-	1.018.632.700	-	1.019.516.000	-	1.032.079.800	-	1.086.185.500	Dinas Sosial
			Persentase korban bencana yang memperoleh dukungan pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	-		100		100		100		100		100		

Kode	Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Meningkatnya kualitas dan keberlanjutan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan sesuai dengan standar yang ditetapkan	Cakupan pengelolaan tetenger/monumen/tempat sejarah	%	100	100	8.872.750	-	8.872.590	-	8.390.000	-	8.395.000	-	8.500.000	-	8.900.000	Dinas Sosial
			Persentase taman makam pahlawan yang memperoleh dukungan pemeliharaan sesuai standar	%	100	-		100		100		100		100		100		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan perencanaan dan keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	11.425.084.094	-	11.404.899.725	-	12.633.750.255	-	12.633.826.495	-	13.305.332.165	-	13.640.261.055	Dinas Tenaga Kerja
			Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan	%	100	-		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Persentase pemenuhan layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	%	100	-		100		100		100		100		100		
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase ketersediaan bahan pengambil kebijakan urusan ketenagakerjaan	%	100	100	59.225.000	100	24.372.000	100	26.809.200	100	26.809.200	100	79.758.212	100	33.031.615	Dinas Tenaga Kerja
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya efektivitas pelatihan kerja	Persentase pekerja yang mendapatkan pekerjaan pasca pelatihan	%	63,01	63,05	4.070.380.922	63,06	3.297.593.650	63,07	3.240.249.340	63,08	3.242.303.350	63,09	4.003.181.172	63,1	4.300.581.835	Dinas Tenaga Kerja
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (di dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	%	82,5	82,6	1.581.571.775	82,7	5.765.005.890	82,8	3.297.701.235	82,8	3.313.303.850	82,9	4.346.012.714	83	4.718.683.967	Dinas Tenaga Kerja
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya pekerja yang terlindungi	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	24,6	24,7	635.098.100	24,8	691.342.900	24,9	760.477.190	25	760.477.190	25,1	980.659.110	25,2	1.088.531.612	Dinas Tenaga Kerja
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten / Kota	%	17,55	-		31,41-33,89		33,07-36,75		36,74-39,6		39,40 - 42,44		42,07 - 45,27		
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan perencanaan dan keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	9.477.645.371	-	10.661.065.940	-	10.644.767.561	-	10.650.468.325	-	10.711.451.741	-	11.268.448.033	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan	%	100	-		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Persentase pemenuhan layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	%	100	-		100		100		100		100		100		
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase lembaga PUG yang aktif	%	100	100	893.432.900	-	995.143.200	-	851.901.758	-	851.901.758	-	864.680.284	-	909.643.659	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	34,34	-		45		55		60		65		70		
			Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan	%	63,02-70,85	-		64,05-79,05		64,39-79,39		64,72-79,72		65,06-80,06		65,40-80,40		
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Cakupan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan/ pendampingan perlindungan perempuan	lembaga	54	55	386.192.015	-	247.434.300	-	212.793.498	-	212.793.498	-	215.985.400	-	227.216.641	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	-		100		100		100		100		100		

Kode	Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase pemenuhan atas layanan UPTD PPA terhadap korban kekerasan (lembaga)	%	100	100	42.245.100	-	-	-	86.993.000	-	86.993.000	-	86.993.000	-	86.993.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Jumlah kelompok desa prima dan industri rumahan	desa prima dan industri rumahan	27 dan 26	27 dan 26		-		-		-		-		-		
			Persentase layanan pusat pembelajaran keluarga sesuai standar	%	78,61	-		80		81		82		83		84		
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Cakupan ketersediaan data gender dan anak	%	45,83	47,92	28.680.000	50,00	28.110.000	52,08	24.174.600	54,17	24.174.600	56,25	24.537.219	58,33	25.813.154	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Persentase pemenuhan hak anak	%	100,00	100,00	1.008.210.550	-	1.722.148.600	-	1.376.833.310	-	1.376.833.310	-	1.398.790.705	-	1.476.051.457	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Indeks pemenuhan hak anak	-	68,96*	-		68,97		68,98		68,99		69		69,01		
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan,eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase pemenuhan perlindungan khusus anak	%	53,33	53,33	1.168.579.426	-	1.649.964.400	-	1.404.997.540	-	1.404.997.540	-	1.426.072.503	-	1.506.383.649	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	53,33	-		53,33		60		60		60		60		
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya pengelolaan lumbung pangan masyarakat	Jumlah lumbung pangan masyarakat yang aktif	unit	34	35	150.640.825	-	212.173.000	-	166.081.510	-	144.385.585	-	183.104.864	-	144.385.585	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan
			Persentase lumbung pangan aktif	%	58,62	-		63,79		67,24		70,69		74,14		77,59		
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT)	Peningkatan jumlah kelompok wanita tani (KWT) pengelola pemanfaatan pekarangan	kelompok	5	6	4.963.126.000	-	8.627.348.813	-	4.852.352.881	-	5.095.535.572	-	4.914.034.098	-	5.395.535.572	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan
			Persentase peningkatan jumlah kelompok wanita tani (KWT) pengelola pemanfaatan pekarangan yang aktif	%	88,43	-		89,58		90,28		90,97		91,67		92,59		
		Meningkatnya pengelolaan dan pemberdayaan kelembagaan usaha pangan	Peningkatan jumah toko mitra tani	unit	2	2		-		-		-		-		-		
			Persentase kelembagaan usaha pangan yang aktif	%	83,34	-		86,67		88,17		90		91,34		92,5		
		Meningkatnya pengelolaan cadangan pangan daerah	Penambahan cadangan pangan pemerintah daerah	ton	15,00	15,00		-		-		-		-		-		
			Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah daerah	%	NA	-		154,83		162,47		170,10		177,73		185		
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatnya penanganan kalurahan rentan pangan	Penanganan daerah rawan pangan/ waspada pangan	kalurahan	4	5	91.056.875	-	565.746.035	-	92.020.052	-	96.621.055	-	101.452.108	-	96.621.055	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan
			Cakupan penanganan kalurahan rentan pangan	%	100	-		100		100		100		100		100		
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya ketersediaan pangan segar	Peningkatan jumlah sertifikasi mutu dan keamanan pangan	kelompok	11	12	45.307.800	-	40.188.400	-	49.951.850	-	52.449.442	-	55.071.914	-	52.449.442	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan
			Persentase pangan segar yang aman	%	63,33	-		67,82		70,07		72,31		74,55		76,80		
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																	
2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan perencanaan dan keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	7.845.123.258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
		Meningkatnya layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100	100		-		-		-		-		-		
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Meningkatnya penanganan penyelesaian permasalahan pertanahan	Persentase permasalahan sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota yang tertangani melalui mediasi	%	100	100	29.555.750	-	134.805.600	-	135.000.000	-	145.000.000	-	155.000.000	-	165.000.000	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode	Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Persentase permasalahan tanah yang tertangani	%	100	-		100		100		100		100		100		
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Meningkatnya tertib penguasaan dan kepemilikan tanah	Persentase tertib penguasaan dan kepemilikan tanah	%	16,7	30,6	28.190.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Terfasilitasinya pemanfaatan tanah desa	Persentase terfasilitasinya pemanfaatan tanah desa	%	100	100	223.208.625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Meningkatnya penggunaan tanah kasultanan yang digunakan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman	Persentase penggunaan tanah kasultanan yang digunakan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman	%	100	100	460.763.875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
		Tersedianya data informasi geospasial tematik tentang pertanahan dan tata ruang sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase ketersediaan data dan informasi geospasial tematik tentang pertanahan dan tata ruang sesuai peraturan perundang-undangan	%	100	100		-		-		-		-		-		
		Tersedianya unit produksi yang aktif melaksanakan pengelolaan simpul jaringan dan geoportal dalam Satu Data Sleman	Persentase unit produksi yang aktif melaksanakan pengelolaan simpul jaringan dan geoportal dalam Satu Data Sleman	%	100	100		-		-		-		-		-		
2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN*)	Terfasilitasinya penggunaan tanah kasultanan	Persentase terfasilitasinya penggunaan tanah kasultanan	%	100	100	6.440.526.300	-	6.786.509.000	-	6.924.177.000	-	7.065.212.000	-	7.204.395.000	-	7.344.174.000	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
		Meningkatnya jumlah desa yang memiliki kepastian batas administrasi wilayah	Persentase jumlah desa yang memiliki kepastian batas administrasi wilayah	%	93,02	100		-		-		-		-		-		
		Meningkatnya kinerja fasilitasi pengelolaan tanah kasultanan dan tanah desa	Persentase kinerja fasilitasi pengelolaan tanah kasultanan dan tanah desa	%	82	-		83		84		85		86		87		
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan perencanaan dan keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	20.574.117.589	-	20.927.994.707	-	20.387.480.614	-	20.645.171.561	-	20.963.949.809	-	21.675.426.047	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan	%	100	-		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Persentase pemenuhan layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	%	100	-		100		100		100		100		100		
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup kabupaten/kota	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	%	100	100	475.745.900	-	548.336.500	-	484.879.907	-	482.933.081	-	785.750.208	-	517.667.719	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh kementerian teknis terkait	%	100	-		100		100		100		100		100		
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Menurunnya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	Ketersediaan data kualitas lingkungan dan konservasi lingkungan	%	100	100	1.411.327.480	-	1.796.354.300	-	1.653.970.355	-	1.676.861.530	-	1.469.934.431	-	1.762.537.610	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase parameter kualitas air memenuhi baku mutu	%	74,49	-		75,13		75,25		75,51		75,63		76,01		
			Persentase parameter kualitas udara memenuhi baku mutu	%	100	-		100		100		100		100		100		
			Persentase lahan kritis yang tertangani	%	0,17	-		0,34		0,42		0,5		0,58		0,66		
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase luas RTH yang tersedia	%	6,790	8,950	23.292.517.510	8,960	24.586.735.070	8,970	21.444.220.874	8,980	21.888.609.279	8,990	21.759.704.704	9,000	23.171.584.615	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Meningkatnya upaya usaha kegiatan dalam pengelolaan limbah B3	Persentase layanan pemeriksaan rincian teknis Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 dan persetujuan teknis dan/atau Sertifikat Layak Operasional (SLO) pengumpulan limbah B3 Skala Kabupaten	%	57,14	57,15	6.499.875	57,5	8.000.000	58	6.222.529	58,5	6.238.463	59	5.507.051	59,5	5.874.500	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten	%	22,50	22,55	327.591.775	-	326.850.200	-	289.025.074	-	296.299.282	-	289.268.155	-	308.569.089	Dinas Lingkungan Hidup
			Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan	%	31,66	-		36,3		36,82		37,35		37,87		38,4		
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat yang dilaksanakan	%	100	100	958.062.512	-	994.283.100	-	896.839.030	-	891.028.441	-	879.958.506	-	938.672.265	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase kelompok masyarakat dan/atau kelembagaan bidang lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	%	73	-		75		80		90		95		100		
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase perolehan penghargaan bidang lingkungan hidup	%	75	75	578.901.750	-	728.058.000	-	675.884.806	-	641.218.108	-	644.344.483	-	687.337.291	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	100	-		100		100		100		100		100		
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya penanganan pengaduan lingkungan	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	%	100	100	76.174.350	100	79.350.000	100	70.167.170	100	69.885.444	100	70.226.183	100	74.911.908	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase pengurangan sampah	%	13,69	14,46	51.068.709.496	-	52.005.687.780	-	51.051.859.274	-	50.677.817.153	-	51.680.011.388	-	54.430.128.972	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase penanganan sampah	%	8,96	17,28		-		-		-		-		-		
			Persentase pengurangan sampah	%	13,88	-		16,24		19,68		23,12		26,56		30		
			Persentase penanganan sampah	%	10,17	-		40,59		57,81		62,18		64,31		70		
			Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah	%	47,91	-		51,74		53,63		55,49		57,33		59,15		
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan perencanaan dan keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	13.083.500.753	-	15.078.649.985	-	14.398.760.000	-	14.381.360.500	-	14.542.549.100	-	15.250.390.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan	%	100	-		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Persentase pemenuhan layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	%	100	-		100		100		100		100		100		
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Cakupan dokumen KK	%	100	100	420.405.100	-	628.845.000	-	402.453.000	-	412.491.500	-	423.204.900	-	477.596.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			Cakupan dokumen KTP-el	%	99,99	99,991		-		-		-		-		-		
			Cakupan dokumen KIA	%	86,6	86,61		-		-		-		-		-		
			Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	%	74,88	-		75,62		76,00		76,37		76,75		77,12		
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Cakupan dokumen akta kelahiran	%	100	100	138.984.775	-	244.312.650	-	244.379.000	-	261.097.000	-	278.373.000	-	296.290.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			Cakupan dokumen akta kematian	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Cakupan dokumen akta perkawinan	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Cakupan dokumen akta perceraian	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Cakupan pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Cakupan dokumen akta pengakuan anak	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Cakupan dokumen akta pengesahan anak	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan nama	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%	100	-		100		100		100		100		100		

Kode	Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya ketersediaan data agregat kependudukan	Cakupan ketersediaan data SIAK	%	97,27	97,5	592.989.900	-	612.311.725	-	615.321.000	-	618.390.000	-	621.457.000	-	673.107.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			Persentase ketersediaan data agregat kependudukan	%	100	-		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya pengelolaan SIAK dalam mendukung pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Persentase penanganan permasalahan pengelolaan SIAK	%	100	-		100		100		100		100		100		
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Meningkatnya ketersediaan profil perkembangan kependudukan kabupaten sleman	Cakupan ketersediaan profil kependudukan	%	100	100	22.055.500	-	22.080.000	-	23.184.000	-	24.343.000	-	25.560.000	-	26.838.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			Persentase ketersediaan profil perkembangan kependudukan	%	100	-		100		100		100		100		100		
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan perencanaan dan keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	7.223.935.560	-	7.770.952.055	-	8.342.347.261	-	9.176.581.987	-	10.094.240.185	-	11.103.664.204	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan
			Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan	%	100	-		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Persentase pemenuhan layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	%	100	-		100		100		100		100		100		
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Meningkatnya desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	Presentase desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	%	59,30	61,63	15.000.000	63,95	15.000.000	66,28	16.500.000	68,60	18.150.000	70,93	19.965.000	73,26	21.961.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya cakupan BUMKal dengan kategori maju dan berkembang	Jumlah BUMDes dengan kategori maju	BUMDes	6	7	9.715.074.760	-	9.482.408.045	-	17.870.307.420	-	25.614.440.361	-	17.564.693.198	-	10.791.620.886	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan
			Cakupan BUMKal dengan kategori maju	%	7,04	-		11,27		12,68		14,08		15,49		16,90		
		Meningkatnya kinerja kalurahan/ Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kalurahan	Persentase kalurahan berkinerja baik	%	66,00	68,00		-		-		-		-		-		
			Persentase kalurahan dengan tata kelola pemerintahan yang baik	%	NA	-		73		75		77		79		81		
		Meningkatnya cakupan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang sudah melaksanakan pengawasan kinerja Lurah berbasis indikator	Cakupan pemerintahan kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang tertib administrasi	%	58,00	60,00		-		-		-		-		-		
			Cakupan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang sudah melaksanakan pengawasan kinerja Lurah berbasis indikator	%	NA	-		40,00		60,00		80,00		90,00		100		
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya kalurahan dengan ketahanan sosial dan pemanfaatan potensi sumber daya ekonomi yang baik	Persentase pasar desa dengan kualitas pengelolaan baik	%	59	62	6.629.329.900	-	9.644.621.200	-	4.220.063.320	-	4.642.069.652	-	5.106.276.617	-	5.219.689.411	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan
			Persentase pengembalian pinjaman PNPM mandiri perdesaan pasca program lancar	%	68	70		-		-		-		-		-		
			Persentase lembaga kemasyarakatan kalurahan yang aktif	%	58	60		-		-		-		-		-		
			Persentase kalurahan dengan ketahanan sosial dan pemanfaatan potensi sumber daya ekonomi yang baik	%	NA	-		75,00		80,81		86,63		92,44		100,00		
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita pada usia 15 - 49 tahun	tahun	23,90	23,91	3.062.184.250	-	2.783.969.800	-	2.844.327.428	-	2.855.512.064	-	2.940.454.900	-	3.093.358.554	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Kode	Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Age Specific Fertility Rate (ASFR)	kelahiran per 1000 wanita usia subur (WUS) usia 15-19 tahun	8,60	-		8,50		8,45		8,40		8,35		8,30		
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	35,74	42,00	3.335.956.861	-	374.506.000	-	291.580.000	-	291.580.000	-	295.953.700	-	311.343.292	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate / mCPR)	%	62,79	62,84		62,89		62,94		62,99		63,04		63,09		
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)	%	12	11,95		11,90		11,85		11,80		11,75		11,70		
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase jumlah poktan (kelompok kegiatan) yang mendukung program Bangga Kencana	%	96,36	96,37	6.203.017.875	-	2.943.509.300	-	2.503.246.305	-	2.503.893.905	-	2.543.906.549	-	2.678.728.560	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Cakupan poktan (kelompok kegiatan) bina keluarga sejahtera (BKS) yang mendukung program bangga kencana	%	16,70	-		18,05		18,73		19,41		20,08		20,76		
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan perencanaan dan keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	11.661.428.148	-	12.352.122.735	-	12.352.122.600	-	12.352.122.600	-	12.352.122.600	-	15.892.848.274	Dinas Perhubungan
			Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan	%	100	-		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Persentase pemenuhan layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	%	100	-		100		100		100		100		100		
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya pemerataan kualitas lalu lintas dan angkutan jalan	Persentase ketersediaan sarpras perhubungan	%	51,18	57	76.065.685.082	-	86.621.762.621	-	81.238.698.400	-	81.319.765.400	-	82.474.196.400	-	83.904.642.726	Dinas Perhubungan
			Accident Rate	kejadian per kilometer	2,182	2,180		-		-		-		-		-		
			Tingkat pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan	%	44,87	53		-		-		-		-		-		
			Persentase lokasi parkir yang berizin	%	82,01	82,25		-		-		-		-		-		
			Persentase terlaksananya pelayanan uji kendaraan berkala	%	76,59	79,00		-		-		-		-		-		
			Kinerja lalu lintas kabupaten	%	0,56	0,56		-		-		-		-		-		
			Rasio konektivitas kabupaten/kota	-	0,5	0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		
			Persentase ketersediaan perlengkapan jalan	%	48,74	-		54,03		69,3		84,58		95		100		
			V/C ratio di jalan kabupaten/kota	-	0,56	-		0,56		0,56		0,56		0,56		0,56		
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan perencanaan dan keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	19.022.894.074	-	8.800.778.367	-	9.161.097.590	-	9.214.307.288	-	9.319.258.000	-	9.508.500.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
			Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan	%	100	-		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Persentase pemenuhan layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	%	100	-		100		100		100		100		100		
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya aduan masyarakat terlayani	Persentase aduan masyarakat terlayani	%	100	100	4.786.452.775	-	5.359.972.192	-	4.176.492.077	-	4.049.115.712	-	4.111.000.000	-	4.440.000.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Meningkatnya masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	%	100	100		100		100		100		100		100		

Kode	Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Meningkatnya layanan informasi publik	Persentase perangkat daerah yang informatif	%	10	-		30		40		50		60		70		
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase padukuhan yang telah terhubung dengan jaringan internet	%	100	100	9.026.568.020	-	17.874.187.946	-	16.860.359.333	-	16.982.050.000	-	17.189.050.000	-	18.299.472.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
			Persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	%	100	100		100		100		100		100		100		
			Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	60,87	63		64		65		66		67		68		
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan perencanaan dan keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	6.747.238.517	-	6.782.796.704	-	6.625.580.000	-	6.627.948.000	-	6.661.665.000	-	6.806.852.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
			Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan	%	100	-		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Persentase pemenuhan layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	%	100	-		100		100		100		100		100		
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Persentase KSP/USP koperasi yang memiliki izin	%	32,86	34,01	412.722.200	-	87.752.200	-	80.610.000	-	80.718.000	-	82.250.000	-	88.845.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
			Persentase koperasi simpan pinjam yang berijin	%	6,65	-		10,44		12,61		14,96		17,48		20,17		
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase koperasi yang aktif	%	78,15	78,4	28.871.250	78,65	78.871.200	78,9	72.452.000	79,15	72.549.000	79,4	73.925.000	79,65	79.853.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase KSP/USP koperasi sehat	%	28,57	35,22	118.601.000	-	184.364.769	-	169.360.000	-	169.586.000	-	172.804.000	-	186.660.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
			Persentase KSP/USP koperasi sehat dan cukup sehat	%	NA	-		35,97		36,97		38,22		39,72		41,47		
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase pengelola koperasi yang bersertifikat	%	35,77	37,27	684.138.850	-	1.091.116.850	-	1.002.315.000	-	1.003.652.000	-	1.022.696.000	-	1.104.703.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
			Persentase pengurus/pengawas dan pengelola koperasi yang sudah memiliki sertifikat uji kompetensi	%	38	-		48,73		53,9		58,95		63,98		68,99		
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	%	13,52	13,73	199.132.875	-	299.132.600	-	274.787.000	-	275.154.000	-	280.374.000	-	302.857.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
			Persentase peningkatan volume usaha koperasi	%	4,12	-		9,42		12,62		16,17		20,08		24,34		
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Jumlah pelaku usaha mikro baru yang berizin	pelaku usaha	2675	2680	4.880.775.903	-	5.449.859.684	-	5.006.315.000	-	5.012.994.000	-	5.108.115.000	-	5.517.722.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
			Persentase peningkatan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berizin	%	0,78	-		0,8		0,81		0,82		0,83		0,84		
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	usaha mikro	20	25	2.959.211.325	-	649.968.400	-	597.070.000	-	597.866.000	-	609.211.000	-	658.062.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
			Persentase peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang menjadi wirausaha mapan	%	4,6	-		5,50		6,00		6,50		7,00		7,50		
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan perencanaan dan keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	18.724.271.803	-	13.070.640.783	-	12.192.351.702	-	12.060.712.921	-	12.023.552.507	-	12.677.556.940	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan	%	100	-		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Persentase pemenuhan layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	%	100	-		100		100		100		100		100		
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kinerja pelayanan persyaratan dasar	Persentase izin prinsip, izin lokasi, dan izin usaha yang ditindaklanjuti	%	100	100	441.405.875	-	1.157.502.800	-	1.204.596.726	-	1.264.826.562	-	1.403.067.890	-	1.473.221.284	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Persentase persyaratan dasar yang diselesaikan	%	86,55	-		86,65		86,7		86,75		86,8		86,85		

Kode	Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Tersedianya peraturan penanaman modal dan PTSP yang selaras	Persentase kesesuaian aturan penanaman modal	%	NA	-		37,5		62,5		75		87,5		100		
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya minat calon investor terhadap potensi investasi	Jumlah investor baru	izin	820	825	580.896.800	-	595.939.000	-	573.293.318	-	587.625.651	-	602.316.292	-	617.374.200	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah investor yang bermitra dengan UMKM	UMKM	240	255		-		-		-		-		-		
			Persentase kepeminatan calon investor terhadap potensi investasi yang ditawarkan	%	NA	-		20		30		30		40		40		
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kinerja pelayanan pendaftaran perizinan tepat waktu	Persentase jumlah permohonan izin yang dilayani	%	100	100	1.497.637.850	-	685.261.900	-	680.179.350	-	714.188.318	-	749.897.734	-	787.392.620	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Persentase permohonan perizinan dan nonperizinan yang dilayani	%	100	-		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase peningkatan jumlah bangunan ber-ijin mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten Sleman	%	-0,33	1,00		-		-		-		-		-		
			Persentase ketersediaan bahan pengambilan kebijakan evaluasi perizinan dan non-perizinan	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	%	100	-		100		100		100		100		100		
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten	Persentase izin pemanfaatan ruang yang terselesaikan	%	86,55	86,60	526.096.048	-	469.178.500	-	454.393.485	-	477.113.159	-	500.968.817	-	526.017.258	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Persentase ketercapaian pengendalian pelaksanaan penanaman modal	%	NA	-		90,5		91		91,5		92		92,5		
		Meningkatnya nilai investasi baik PMA maupun PMDN	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	%	14,10	0,77		-		-		-		-		-		
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya ketersediaan dan data pendukung penanaman modal	Persentase izin yang terselesaikan	%	93,09	93,20	173.720.600	-	284.157.400	-	273.359.419	-	287.027.390	-	301.378.759	-	316.447.697	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Persentase ketersediaan dokumen perizinan dan non perizinan	%	100	-		100		100		100		100		100		
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan perencanaan dan keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	6.767.014.349	-	6.974.514.729	-	5.810.284.500	-	6.163.953.924	-	5.826.784.500	-	6.163.953.924	Dinas Pemuda Dan Olahraga
			Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan	%	100	-		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Persentase pemenuhan layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	%	100	-		100		100		100		100		100		
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	18,30	18,34	2.148.335.150	-	2.603.998.650	-	588.032.000	-	2.803.998.650	-	588.032.000	-	3.412.994.857	Dinas Pemuda Dan Olahraga
		Meningkatnya peran pemuda dalam kewirausahaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	3,38	3,55		-		-		-		-		-		
			Indeks pembangunan pemuda (IPP) domain ketenagakerjaan layak	-	70	-		71		71,5		72		72,5		73		
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya prestasi dalam kompetisi olahraga	Persentase prestasi olahraga di tingkat provinsi	%	28,96	30	36.144.945.075	-	16.933.003.965	-	29.734.683.500	-	16.129.758.426	-	29.742.377.500	-	16.632.315.219	Dinas Pemuda Dan Olahraga
			Indeks pembangunan olahraga (IPO) dimensi performa	-	0,181	-		0,19		0,19		0,2		0,2		0,21		
		Meningkatnya kualitas kebugaran masyarakat	Persentase kegiatan olahraga masyarakat yang difasilitasi	%	53,85	75		-		-		-		-		-		
			Indeks pembangunan olahraga (IPO) dimensi kebugaran	-	0,157	-		0,158		0,158		0,159		0,159		0,16		
		Meningkatnya pembangunan sumber daya manusia olahraga	Indeks pembangunan olahraga (IPO) dimensi sumber daya manusia olahraga	-	0,274	-		0,294		0,304		0,314		0,324		0,334		
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatnya peran pemuda dalam partisipasi dan kepemimpinan	Persentase pembina pramuka dengan sertifikasi kursus mahir dasar (KMD)	%	21,9	24	1.364.543.250	-	848.294.250	-	600.000.000	-	1.300.000.000	-	800.000.000	-	1.300.000.000	Dinas Pemuda Dan Olahraga
			Indeks pembangunan pemuda (IPP) domain partisipasi dan kepemimpinan	-	50	-		51,00		51,5		52		52,5		53		

Kode	Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Meningkatnya perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	559.957.250	-	685.685.000	-	721.000.000	-	700.000.000	-	710.000.000	-	720.000.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
			Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100	-		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya pelaksanaan dan pengelolaan Satu Data tepat waktu	Persentase pelaksanaan dan pengelolaan Satu Data Sleman tepat waktu	%	100	100		-		-		-		-		-		
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya tata kelola keamanan informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	90	93	271.560.025	-	272.795.880	-	280.000.000	-	280.500.000	-	281.500.000	-	300.000.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
			Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	NA	-		46,51		54,26		62,02		69,77		77,52		
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan perencanaan dan keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	8.241.169.006	-	11.909.264.395	-	11.258.373.000	-	11.268.130.000	-	11.407.074.000	-	12.005.392.000	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
		Meningkatnya layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan	%	100	-		100		100		100		100		100		
			Persentase pemenuhan layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	%	100	-		100		100		100		100		100		
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Meningkatnya kepuasan pengunjung Museum Gunungapi Merapi (MGM)	Tingkat kepuasan pengunjung Museum Gunungapi Merapi (MGM)	-	0	80	1.824.007.295	80,5	3.000.000	81	6.000.000	81,5	6.000.000	82	6.000.000	82,5	6.000.000	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN*)	Meningkatnya obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi	Jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi	sumber sejarah	3	1	15.894.959.810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan); Dinas Pariwisata; 17 Kapanewon
			Jumlah karya bahasa dan sastra yang dilestarikan	karya	3	0		-		-		-		-		-		
			Rasio kunjungan museum dibanding ke obyek daya tarik wisata (ODTW) lain	rasio	0,058	0,045		-		-		-		-		-		
			Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan	%	28,5	34,42		-		-		-		-		-		
			Pengelolaan taman budaya	taman budaya	0	0		-		-		-		-		-		
			Nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi	event	2	0		-		-		-		-		-		
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN*)	Meningkatnya pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya	Persentase ketersedian dokumen pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya	%	NA	-	-	100	5.772.372.000	100	18.974.399.000	100	22.983.156.000	100	27.578.130.000	100	66.150.827.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN*)	Meningkatnya obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan	%	NA	-		50,82	17.615.588.000	51,92	17.705.588.000	53,01	17.795.588.000	54,11	17.885.588.000	55,21	17.975.588.000	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
		Meningkatnya ekspresi dan apresiasi terhadap kekayaan budaya	Persentase penduduk yang terlibat sebagai pelaku/pendukung kegiatan kebudayaan	%	2,47	-		2,98		3,28		3,61		3,97		4,37		
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN*)	Terlaksananya pelaksanaan kegiatan keistimewaan kebudayaan	Persentase pelaksanaan kegiatan keistimewaan kebudayaan	%	NA	-	-	100	450.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	Dinas Pariwisata

Kode	Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN*)	Terlaksananya pelaksanaan kegiatan keistimewaan kebudayaan	Persentase pelaksanaan kegiatan keistimewaan kebudayaan	%	NA	-	-	100	510.000.000	100	510.000.000	100	510.000.000	100	510.000.000	100	510.000.000	17 Kapanewon
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan perencanaan dan keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	9.559.455.672	-	9.543.539.122	-	9.636.159.800	-	9.570.545.400	-	9.640.003.100	-	9.673.682.200	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
			Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan	%	100	-		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Persentase pemenuhan layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	%	100	-		100		100		100		100		100		
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	-	1,76	2,13	2.982.509.755	-	2.386.526.750	-	1.958.798.800	-	1.966.935.400	-	16.668.537.500	-	2.529.210.700	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
			Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan jumlah penduduk	-	0,000708	0,000711		-		-		-		-		-		
			Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	10,32	10,77		11,36		11,95		12,54		13,13		13,72		
		Meningkatnya kemanfaatan perpustakaan	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	kali	16	17		-		-		-		-		-		
			Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan	%	44,19	44,2		-		-		-		-		-		
			Persentase kemanfaatan perpustakaan	%	24,05	24,06		24,07		24,08		24,09		24,1		24,11		
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Meningkatnya pengolahan naskah kuno	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar dalam wilayahnya	naskah kuno	1	1	49.439.875	-	33.619.800	-	54.481.400	-	58.978.600	-	55.293.800	-	55.608.900	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
			Persentase pengolahan naskah kuno	%	2,7	-		5,4		8,1		8,1		10,81		10,81		
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	95,83	95,85	1.375.013.039	-	1.517.185.096	-	1.266.845.000	-	1.254.229.700	-	1.543.622.200	-	1.507.417.300	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
			Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	76,31	76,32		-		-		-		-		-		
			Nilai rata-rata laporan audit kearsipan internal (LAKI) konsolidasi	-	84,14	-		84,25		84,3		84,35		84,4		84,45		
		Meningkatnya transformasi kearsipan	Persentase perangkat daerah menerapkan e-arsip terintegrasi	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Persentase transformasi kearsipan	%	17,36	-		51,59		63,54		75,48		87,42		100		
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Meningkatnya arsip yang terlindungi dan terselamatkan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	100	100	214.042.925	-	123.091.000	-	121.687.000	-	123.441.900	-	125.235.900	-	125.949.500	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
			Persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan	%	9,09	-		10		10,5		11		11,5		12		
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Meningkatnya kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip	Persentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten/ kota	%	100	100	33.947.850	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.348.500	100	20.464.400	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya ikan lokal di perairan umum	Penambahan populasi ikan lokal di perairan umum	kg	2000	2000	191.603.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi ikan konsumsi	Persentase peningkatan produksi ikan konsumsi	%	0,3	0,31	2.370.891.139	0,65	2.285.142.900	0,8	2.500.000.000	0,95	2.435.000.000	1,15	2.435.000.000	1,30	2.935.000.000	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan

Kode	Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Jumlah total produksi perikanan	ton	55.347,10	55.623,84		55.706,86		55.789,88		55.872,90		55.983,59		56.066,61		
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya mutu olahan perikanan	Peningkatan jumlah produk olahan perikanan yang bersertifikasi	produk	3	4	277.356.216	-	290.297.600	-	257.040.466	-	269.892.490	-	283.387.114	-	269.892.490	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan
			Persentase peningkatan jumlah produk olahan perikanan yang bersertifikat	%	1,68	-		3,96		6,93		9,90		13,86		17,82		
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan perencanaan dan keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	9.813.071.422	-	9.853.122.117	-	10.010.404.050	-	10.121.443.592	-	10.514.649.496	-	11.248.685.738	Dinas Pariwisata
			Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan	%	100	-		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Persentase pemenuhan layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	%	100	-		100		100		100		100		100		
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Lama tinggal wisatawan (LOS)	hari			1.397.904.175		1.553.927.533		1.616.084.634		1.680.728.020		1.747.957.140		1.817.875.426	Dinas Pariwisata
			- Wisatawan mancanegara		2,05	2,05		2,06		2,07		2,08		2,09		2,1		
			- Wisatawan nusantara		1,85	1,85		1,86		1,87		1,88		1,89		1,9		
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya kunjungan wisatawan di kabupaten	Jumlah kunjungan wisatawan	kunjungan			1.404.016.000		606.697.300		630.965.192		656.203.800		682.451.952		709.750.030	Dinas Pariwisata
			- Wisatawan mancanegara		223.643	223.644		-		-		-		-		-		
			- Wisatawan nusantara		8.160.860	9.500.000		-		-		-		-		-		
			Persentase tingkat hunian akomodasi wisman	%	14,86	15,27		-		-		-		-		-		
			Persentase peningkatan perjalanan wisnus yang datang ke Kabupaten	%	47,36	47,5		-		-		-		-		-		
		Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	NA	-		1,010		1,015		1,020		1,025		1,030		
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Meningkatnya ruang ekonomi kreatif di ruang publik dan destinasi wisata	Jumlah ruang ekonomi kreatif di ruang publik dan destinasi wisata	ruang	38	39	60.000.000	-	60.000.000	-	166.400.000	-	173.056.000	-	179.978.240	-	187.177.370	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya kualitas pelaku ekonomi kreatif	Cakupan pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi dalam aktivitas ekonomi kreatif	pelaku	NA	-		7		8		9		10		11		
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya kelompok usaha pariwisata yang dibina	Cakupan kelompok usaha pariwisata yang dibina	kelompok UJP	10	11	2.544.656.175	-	3.518.395.400	-	2.320.252.124	-	2.125.445.589	-	1.813.706.172	-	3.758.403.436	Dinas Pariwisata
			Cakupan kelompok desa wisata/destinasi wisata yang dibina	kelompok desa/destinasi wisata	81	81		-		-		-		-		-		
			Cakupan komunitas ekonomi kreatif yang difasilitasi dalam aktivitas pariwisata	komunitas ekraf	6	7		-		-		-		-		-		
		Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Cakupan Kelompok Usaha Jasa Pariwisata dan ekonomi kreatif Yang Dibina	kelompok	10	-		12		13		14		15		16		
			Cakupan kelompok desa wisata/destinasi wisata yang dibina	%	NA	-		52		54		56		58		60		
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan perencanaan dan keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	38.949.597.520	-	39.550.981.995	-	43.293.991.752	-	43.501.018.813	-	43.718.397.227	-	43.501.018.813	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan
			Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan	%	100	-		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Persentase pemenuhan layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	%	100	-		100		100		100		100		100		
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya produksi komoditas tanaman pangan	Presentase peningkatan produksi tanaman pangan	%	-14,75	1,59	10.959.811.840	-	7.814.403.476	-	7.726.700.972	-	7.392.672.526	-	7.937.895.324	-	9.787.549.526	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan
			Persentase peningkatan produksi tanaman pangan	%	NA	-		0,317		0,421		0,525		0,627		0,729		
		Meningkatnya produksi komoditas hortikultura dan perkebunan	Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura	%	0,5	1,59		-		-		-		-		-		
			Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	%	0,3	0,31		-		-		-		-		-		
			Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura dan perkebunan	%	1,7	-		1,75		1,80		1,85		1,90		1,95		

Kode	Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Meningkatnya produksi komoditas peternakan	Persentase peningkatan produksi komoditas peternakan	%	0,28	0,30		-		-		-		-		-		
			Persentase peningkatan produksi komoditas peternakan	%	NA	-		0,77		0,99		1,11		1,33		1,55		
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya penggunaan alat mesin pertanian (alsintan) pertanian	Peningkatan jumlah kelompok tani hortikutura dan perkebunan yang menerima bantuan alat	kelompok	15	36	3.479.256.474	-	2.972.299.755	-	3.500.000.000	-	3.532.050.000	-	3.532.050.000	-	3.832.050.000	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan
			Peningkatan jumlah kelompok tani tanaman pangan yang menerima bantuan alat	kelompok	5	15		-		-		-		-		-		
			Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan dan Perikanan (BP4) dengan klasifikasi kelas madya	balai	2	8		-		-		-		-		-		
			Persentase lahan tanaman hortikultura dan perkebunan yang terlayani oleh alsintan	%	44	-		46		47		48		49		50		
			Persentase lahan tanaman pangan yang terlayani oleh alsintan	%	61,65	-		62,26		62,64		63,07		63,53		64,06		
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Meningkatnya pelayanan kesehatan ternak	Persentase penanganan pelayanan kesehatan ternak	%	100	100	4.196.990.885	-	5.342.648.451	-	3.700.000.000	-	3.743.000.000	-	3.743.000.000	-	4.243.000.000	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan
			Persentase keberhasilan penanganan kesehatan ternak	%	75	-		81		84		87		90		91		
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Terkendalinya hama dan penyakit tanaman	Persentase luas serangan hama dan penyakit tanaman pangan yang tertangani	%	90	94	940.981.875	94,5	972.371.900	95	1.037.432.517	95,5	1.037.432.517	96	1.143.769.350	96,5	1.037.432.517	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan
			Persentase luas serangan hama dan penyakit tanaman hortikultura dan perkebunan yang tertangani	%	90	94		94,5		95		95,5		96		96,5		
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya kapasitas kelembagaan petani	Peningkatan kinerja penyuluh pertanian sesuai tugas dan fungsinya	%	2	2,20	3.036.850.095	-	3.951.977.735	-	1.500.000.000	-	1.435.000.000	-	1.535.000.000	-	1.935.000.000	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan
			Persentase peningkatan kelompok yang menerapkan SOP cara-cara penanganan/ pengolahan hasil hortikultura dan perkebunan	%	5	7		-		-		-		-		-		
			Kelembagaan petani dengan klasifikasi kelas lanjut	kelompok	16	33		-		-		-		-		-		
			Jumlah wirausaha muda pertanian	orang	200	220		-		-		-		-		-		
			Peningkatan kelas kelembagaan petani	%	0,83	-		1,17		1,33		1,5		1,67		1,83		
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan perencanaan dan keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	32.710.767.350	-	34.442.427.710	-	34.230.476.900	-	34.262.221.400	-	34.739.997.200	-	36.542.485.600	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan	%	100	-		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Persentase pemenuhan layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	%	100	-		100		100		100		100		100		
03.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Meningkatnya pelaku usaha yang memiliki izin berlaku sesuai ketentuan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	%	50,15	51	248.963.055	-	248.196.600	-	345.240.100	-	345.435.200	-	346.936.900	-	366.053.900	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Persentase pedagang pasar yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	%	85,23	86		-		-		-		-		-		
			Persentase pelaku usaha perdagangan yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	%	79,36	-		82,69		84,42		86,14		88,36		90,58		
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya jumlah sarana prasarana perdagangan dalam kondisi baik	Rasio sarana prasarana perdagangan tradisonal dalam kondisi baik	%	0,87	0,88	4.029.375.279	0,89	3.934.853.295	0,9	4.095.011.350	0,91	4.097.575.000	0,91	4.122.030.500	0,93	4.346.905.800	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Terwujudnya keamanan di sarana prasarana perdagangan tradisional	Jumlah kejadian gangguan keamanan yang terjadi di sarana prasarana perdagangan tradisional	kejadian	0	0		-		-		-		-		-		
			Pencegahan gangguan keamanan yang terjadi di sarana prasarana perdagangan tradisional	%	100	-		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya sarana prasarana perdagangan tradisonal yang memiliki sarana prasarana penanganan sampah	Rasio sarana prasarana perdagangan tradisonal yang menerapkan pengelolaan sampah	%	25,64	28,21		-		-		-		-		-		

Kode	Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Persentase pasar rakyat yang memiliki sarana prasarana pengelolaan sampah	%	70	-		77		82		86		90		94		
		Meningkatnya jumlah paguyuban pedagang pasar dan non pasar yang mendapat pembinaan	Cakupan pembinaan pedagang pasar dan sarana usaha milik pemerintah Kabupaten Sleman	%	12,58	12,66		-		-		-		-		-		
			Cakupan pembinaan paguyuban pedagang pasar dan non pasar yang menempati sarana usaha milik pemerintah Kabupaten Sleman	%	100	-		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya jumlah pasar rakyat dan sarana usaha perdagangan milik Kabupaten Sleman tertata	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan tradisional tertata	pasar	23	24		-		-		-		-		-		
			Persentase pasar rakyat dan sarana usaha milik Kabupaten Sleman tertata	%	58,97	-		65,79		68,42		71,05		73,68		76,32		
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Terpenuhinya stok barang kebutuhan pokok daerah	Persentase kecukupan stok barang kebutuhan pokok daerah	%	100	100	503.083.500	100	600.790.000	100	647.041.600	100	647.407.100	100	650.221.700	100	686.050.400	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya jumlah pelaku usaha berorientasi ekspor	Persentase jumlah pelaku usaha berorientasi ekspor	%	32,59	33	141.176.460	-	79.196.400	-	357.031.200	-	357.232.900	-	358.786.000	-	378.556.100	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Persentase jumlah pelaku usaha yang melakukan ekspor	%	32,59	-		35		36		37		38		39		
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya UTTP yang bertanda tera sah	Persentase alat UTTP (ukur takar timbang dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah	%	29,42	29,5	316.966.785	30	522.398.597	30,5	493.986.000	31	494.414.000	31,5	500.508.000	32	526.746.000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya kemitraan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) produk lokal dengan mitra pemasaran produk UMKM	Jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang bermitra dengan pelaku usaha ritel modern	UMKM	45	50	1.411.069.427	-	945.636.600	-	982.749.800	-	983.305.000	-	987.580.000	-	1.041.997.800	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Persentase peningkatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) produk lokal yang bekerjasama dengan mitra pemasaran produk UMKM	%	6	-		18		26		35		44		53		
		Meningkatnya jumlah kunjungan ke pasar kabupaten	Persentase peningkatan kunjungan ke pasar kabupaten	%	5,71	5,73		5,74		5,76		5,77		5,79		5,8		
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya sentra industri aktif	Persentase sentra industri aktif	%	92,31	97	2.323.729.496	100	3.974.905.200	100	1.095.034.150	100	1.095.653.700	100	1.100.420.000	100	1.161.051.800	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Meningkatnya pelaku usaha industri yang memiliki izin berlaku sesuai ketentuan	Jumlah pelaku usaha industri yang mempunyai izin berlaku sesuai dengan ketentuan	pelaku usaha	1248	1276	218.225.900	-	84.899.000	-	124.097.500	-	124.167.800	-	124.707.300	-	131.579.000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Persentase peningkatan pelaku usaha yang mempunyai izin berlaku sesuai dengan ketentuan	%	2,32	-		6,57		8,57		10,58		12,58		14,58		
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya data industri yang dimutakhirkan	Persentase data industri yang dimutakhirkan	%	100	100	70.517.025	100	125.008.000	100	142.419.400	100	142.499.900	100	143.119.400	100	151.005.600	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																	
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya keberhasilan transmigrasi	Persentase calon transmigran yang berangkat	%	85,70	85,80	344.606.975	-	466.997.525	-	513.697.780	-	513.697.915	-	848.002.627	-	919.282.916	Dinas Tenaga Kerja
			Cakupan keberhasilan penempatan transmigran	%	95,65	-		96		96		96		96		96		
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH																	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya capaian kinerja bidang administrasi umum	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	48.931.402.234	-	49.078.105.373	-	45.910.017.000	-	45.953.363.000	-	46.445.722.000	-	49.024.574.000	Sekretariat Daerah
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Tingkat kepuasan terhadap layanan tata usaha, pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan rumah tangga	%	80,47	80,50		-		-		-		-		-		
			Tingkat kepuasan terhadap protokoler dan komunikasi pimpinan	%	85,88	85,89		-		-		-		-		-		

Kode	Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Persentase capaian kinerja bidang administrasi umum	%	92,31	-		95,38		96,92		98,46		100,00		100		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase kinerja Perangkat Daerah dengan predikat "Baik" berdasarkan indikator penilaian kinerja perangkat daerah	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Persentase AKIP perangkat daerah kategori memuaskan (predikat A, nilai 84)	%	43,47	-		49,47		52,47		55,47		58,47		61,47		
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sleman	-	85,56	-		85,66		85,71		85,76		85,81		85,86		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya capaian kinerja bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase dokumen LPPD tersedia tepat waktu	%	100	100	9.666.910.447	-	9.684.563.079	-	10.010.374.000	-	10.015.471.000	-	10.212.886.000	-	10.615.309.000	Sekretariat Daerah
			Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Persentase raperda yang diundangkan menjadi peraturan daerah	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Persentase kerjasama yang aktif	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Persentase capaian kinerja bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	84,42	-		85,71		86,36		87,01		87,66		88,31		
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya capaian kinerja bidang perekonomian, sumber daya alam dan pembangunan	Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian	%	100	100	1.498.232.244	-	1.539.166.600	-	1.101.711.000	-	1.102.662.000	-	1.116.252.000	-	1.163.770.000	Sekretariat Daerah
			Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang pembangunan	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Persentase pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Persentase capaian kinerja bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan pembangunan	%	78,45	-		80,17		81,03		81,9		82,76		83,62		
		Meningkatnya Indeks Zakat Nasional	Indeks Zakat Nasional	-	0,62	0,65		0,68		0,71		0,74		0,77		0,8		
		Meningkatnya penanganan permasalahan kebijakan program kerja kegiatan TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah)	Indeks Akses Keuangan Daerah	-	5,55	5,58		5,59		5,61		5,62		5,63		5,64		
		Meningkatnya rasio kredit	Rasio kredit	%	39,31	-		39,78		39.98		40,17		40,51		40,51		
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN*)	Meningkatnya kinerja perangkat daerah pengampu keistimewaan	Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	%	100	100	2.287.705.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan; Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Sekretariat Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Badan Keuangan Dan Aset Daerah; Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan; 17 Kapanewon
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN*)	Meningkatnya reformasi kalurahan	Persentase laporan pendampingan pelaksanaan reformasi kalurahan	%	NA	-	-	100	127.847.000	100	120.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN*)	Meningkatnya kinerja perangkat daerah pengampu keistimewaan	Persentase perangkat daerah pengampu keistimewaan dengan kinerja berkualitas baik	%	NA	-	-	78	83.243.000	82	104.000.000	86	109.200.000	91	111.000.000	95	116.550.000	Sekretariat Daerah
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN*)	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan	%	NA	-	-	100	558.205.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN*)	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan	%	NA	-	-	100	54.105.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN*)	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan	%	NA	-	-	100	510.000.000	100	510.000.000	100	510.000.000	100	510.000.000	100	510.000.000	17 Kapanewon
4.02	SEKRETARIAT DPRD																	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan perencanaan dan keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	50.343.790.789	-	50.877.668.582	-	50.701.677.400	-	51.789.648.240	-	53.381.391.240	-	57.192.523.000	Sekretariat DPRD
			Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan	%	100	-		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Persentase pemenuhan layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	%	100	-		100		100		100		100		100		
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya Raperda dalam Propemperda yang dibahas tepat waktu	Persentase raperda dalam propemperda yang dibahas	%	100	100	48.765.328.683	-	52.996.182.290	-	47.522.604.600	-	46.519.714.760	-	46.139.555.760	-	47.545.708.000	Sekretariat DPRD
			Persentase nota kesepakatan KUA PPAS yang terselesaikan tepat waktu	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Persentase pengawasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Indeks kepuasan DPRD atas fasilitasi layanan kehumasan, protokol dan layanan administrasi	-	85,75	87,2		-		-		-		-		-		
			Persentase Raperda dalam Propemperda yang dibahas tepat waktu	%	NA	-		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD yang update dan tepat waktu	Persentase publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD yang update dan tepat waktu	%	NA	-		92		94		96		98		100		
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5.01	PERENCANAAN																	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan perencanaan dan keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	10.784.531.445	-	12.632.893.793	-	11.412.052.700	-	11.420.422.800	-	11.508.686.600	-	11.888.434.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan	%	100	-		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Persentase pemenuhan layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	%	100	-		100		100		100		100		100		
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan	%	100	100	2.352.816.650	-	2.144.740.600	-	2.298.157.900	-	2.302.740.600	-	2.357.350.800	-	2.595.234.400	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase dokumen bahan pengambilan kebijakan komunikasi, informasi, perpustakaan, dan kearsipan tersedia tepat waktu	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Persentase konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	%	96	96,5		-		-		-		-		-		
			Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	NA	-		68,18		100		100		100		100		
			Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	NA	-		90,65		92,09		93,53		94,96		96,4		
		Meningkatnya kualitas data perencanaan pembangunan daerah	Persentase dokumen analisis data sebagai bahan pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah tersedia tepat waktu	%	100	-		100		100		100		100		100		
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan sumber daya manusia	Persentase dokumen bahan pengambilan kebijakan kesejahteraan rakyat dan pemerintahan tersedia tepat waktu	%	100	100	1.389.097.670	-	1.631.446.090	-	1.748.908.500	-	1.751.791.200	-	1.793.926.300	-	1.974.595.200	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia	%	NA	-		90		91		92		94		96		
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian	Persentase dokumen bahan pengambilan kebijakan perekonomian tersedia tepat waktu	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian	%	NA	-		90		91		92		94		96		
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana	Persentase dokumen bahan pengambilan kebijakan fisik dan prasarana tersedia tepat waktu	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Fisik dan Prasarana	%	NA	-		90		91		92		94		96		
5.02	KEUANGAN																	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan perencanaan dan keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	53.413.692.833	-	55.525.091.803	-	53.991.638.000	-	55.237.268.000	-	56.516.100.000	-	57.829.213.000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
			Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan	%	100	-		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Persentase pemenuhan layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	%	100	-		100		100		100		100		100		
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya kualitas penganggaran keuangan daerah	Persentase dokumen anggaran yang disusun tepat waktu	%	100	100	536.541.127.990	-	562.141.712.756	-	554.190.517.000	-	530.332.028.000	-	537.397.504.000	-	567.924.549.000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
			Nilai kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	-	10,91	-		11,10		11,20		11,40		11,70		12,00		
		Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan daerah	Persentase ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Persentase kesesuaian pencairan surat perintah pencairan dana (SP2D) dengan surat penyediaan dana (SPD) perangkat daerah	%	91,2	-		91,22		91,23		91,24		91,25		91,26		
		Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang terselesaikan tepat waktu	%	81	-		84		86		88		90		92		
		Ketepatan waktu penyaluran keuangan penunjang urusan keuangan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase ketepatan waktu penyaluran keuangan penunjang urusan keuangan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	%	NA	-		100		100		100		100		100		
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	Persentase perangkat daerah yang tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kategori A	%	88	90	7.511.619.040	-	5.944.138.700	-	5.820.551.000	-	7.396.981.000	-	6.076.769.000	-	6.389.969.000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
			Indeks pengelolaan barang milik daerah (IP BMD)/Indeks pengelolaan aset	-	B (2,49)	-		B (2,70)		A (3,01)		A (3,11)		A (3,22)		A (3,33)		
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	%	25,58	25,75	17.165.355.752	-	17.473.333.375	-	18.023.799.000	-	18.595.322.000	-	19.188.830.000	-	19.805.289.000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
			Indeks kepuasan terhadap layanan pajak daerah	-	85	85,2		-		-		-		-		-		
			Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah	-	85	-		85,3		85,4		85,5		85,6		85,7		
			Rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	%	36,57	-		38		38,5		39		39,5		40		
			Rasio pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)	%	36,02	-		36,73		37,09		37,45		37,82		38,19		
			Rasio pajak daerah terhadap produk domestik regional bruto (PDRB)	%	1,34	-		1,44		1,49		1,54		1,59		1,64		
			Persentase peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah	%	2,2	-		2,3		2,4		2,5		2,6		2,7		
5.03	KEPEGAWAIAN																	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan perencanaan dan keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	12.433.642.125	-	13.076.812.090	-	12.748.356.000	-	12.752.672.000	-	12.891.728.000	-	13.533.990.000	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

Kode	Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan	%	100	-		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Persentase pemenuhan layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	%	100	-		100		100		100		100		100		
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Tingkat kualitas pengadaan ASN	aspek	19	19,1	4.168.277.640	-	4.194.661.600	-	3.676.452.000	-	3.690.030.000	-	3.729.188.000	-	3.943.242.000	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
			Persentase kesesuaian penempatan PNS dalam jabatan sesuai kualifikasi jenjang pendidikan	%	99	99,1		-		-		-		-		-		
			Persentase aplikasi kepegawaian yang dikembangkan	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Persentase pemberian pelayanan dan penghargaan bagi pegawai ASN	%	73,00	80		-		-		-		-		-		
			Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) sesuai dengan perencanaan	%	95	-		96,5		97		97,5		98		98,5		
		Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase kualifikasi pendidikan ASN	%	0,89	1		-		-		-		-		-		
			Tingkat kualitas perencanaan dan pengembangan karir ASN	%	61,25	61,26		-		-		-		-		-		
			Persentase aparatur sipil negara (ASN) yang ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan formal	%	0,89	-		1,01		1,02		1,03		1,04		1,05		
		Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase kinerja ASN	%	99,90	99,91		-		-		-		-		-		
			Persentase disiplin ASN	%	0,08	0,07		-		-		-		-		-		
			Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik	%	99,9	-		99,92		99,93		99,94		99,95		99,96		
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi	Persentase pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN)	%	74,2	66,89	4.267.166.500	-	4.574.213.675	-	4.232.721.000	-	4.232.721.000	-	4.309.315.000	-	4.550.244.000	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
			Persentase aparatur sipil negara (ASN) yang mendapatkan pengembangan kompetensi	%	74,2	-		67		68		69		70		71		
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya pemanfaatan hasil riset serta inovasi daerah dalam pembangunan	Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan	%	100	100	540.404.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Meningkatnya pemanfaatan hasil riset serta inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	%	NA	-	-	52	432.492.900	53	466.462.900	54	464.421.400	56	475.852.300	58	523.456.400	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti	%	NA	-		50		52		54		56		58		
5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN																	
5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Meningkatnya penanganan permasalahan kebijakan di wilayah perbatasan	Persentase fasilitasi penyelesaian permasalahan di wilayah perbatasan	%	100	100	23.941.500	-	29.979.400	-	28.345.000	-	28.367.000	-	28.713.000	-	30.214.000	Sekretariat Daerah
			Persentase permasalahan kawasan perbatasan yang difasilitasi	%	100	-		100		100		100		100		100,00		
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH																	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan perencanaan dan keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	12.031.501.556	-	14.269.774.546	-	13.236.858.600	-	13.204.721.475	-	13.347.931.900	-	14.109.274.425	Inspektorat
			Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan	%	100	-		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Persentase pemenuhan layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	%	100	-		100		100		100		100		100		

Kode	Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase catatan/saran hasil review dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditindaklanjuti	%	100	100	610.203.250	-	724.921.000	-	874.059.100	-	912.822.125	-	951.156.800	-	993.311.175	Inspektorat
			Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklajuti	%	89,09	89,25		-		-		-		-		-		
			Persentase nilai hasil audit kinerja perangkat daerah dengan kategori Sangat baik	%	NA	95		-		-		-		-		-		
			Persentase kasus/pengaduan yang ditindaklanjuti	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	%	89,09	-		89,5		90		90,5		91		91,5		
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase Perangkat daerah dengan tingkat maturitas SPIP ≥ 3	%	100	100	988.587.200	-	1.133.384.000	-	1.139.976.300	-	1.146.560.400	-	1.153.133.300	-	1.159.703.400	Inspektorat
			Persentase tingkat capaian Monitoring Center of Prevention (MCP) Kabupaten	%	97,38	97,4		-		-		-		-		-		
			Persentase satuan/unit kerja yang diusulkan mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK)/wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM)	%	80	-		100		100		100		100		100		
			Indeks efektifitas pencegahan korupsi (IEPK)	-	3,09	-		3,11		3,12		3,13		3,14		3,15		
				-														
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7.01	KECAMATAN																	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan perencanaan dan keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	66.294.548.807	-	68.421.160.125	-	65.082.319.820	-	65.185.308.351	-	66.729.502.995	-	68.762.941.175	17 Kapanewon
			Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan	%	100	-		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Persentase pemenuhan layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	%	100	-		100		100		100		100		100		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya usulan masyarakat yang diakomodir	Persentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam berita acara musrenbang kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam berita acara hasil musrenbang kapanewon	%	31	32	1.717.277.770	-	1.502.618.900	-	1.359.252.572	-	1.365.237.039	-	1.390.071.376	-	1.468.729.075	17 Kapanewon
			Persentase usulan yang termuat dalam BA Musrenbang Kapanewon yang terakomodir	%	NA	-		95		95,5		96		96,5		97		
		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan non perizinan	Persentase pelayanan perizinan selesai tepat waktu	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan non perizinan (di jawatan umum)	-	85,88	86,15		86,28		86,5		86,66		86,81		86,96		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat kalurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	40	45	2.740.313.865	-	3.136.695.322	-	2.873.282.439	-	2.887.440.844	-	2.952.108.130	-	3.244.945.268	17 Kapanewon
			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	100	-		100		100		100		100		100		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tertanganinya pelanggaran ketertiban dan keamanan di wilayah kapanewon	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah kapanewon	%	100	100	2.619.699.425	-	2.854.173.400	-	2.561.228.684	-	2.568.536.143	-	5.456.684.832	-	2.934.702.270	17 Kapanewon
			Persentase pelanggaran ketertiban dan keamanan masyarakat kapanewon yang ditangani	%	NA	-		99,00		99,25		99,50		99,75		100		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya upaya penanganan potensi konflik SARA	Persentase penanganan permasalahan yang terkait isu SARA	%	100	100	2.066.820.955	-	2.193.807.350	-	2.010.350.763	-	2.049.891.198	-	2.083.326.121	-	2.303.442.259	17 Kapanewon
			Persentase upaya penanganan potensi konflik SARA di kapanewon	%	100	-		100		100		100		100		100		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan kalurahan	Persentase kalurahan menetapkan peraturan desa tepat waktu	%	100	100	1.160.926.405	-	1.186.681.100	-	1.103.467.722	-	1.508.445.425	-	1.658.054.546	-	1.248.252.943	17 Kapanewon
			Persentase kalurahan yang melaksanakan siklus tahunan tepat waktu	%	85	100		-		-		-		-		-		

Kode	Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Persentase kalurahan menetapkan peraturan kalurahan tepat waktu	%	100	-		100		100		100		100		100		
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan perencanaan dan keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	8.237.444.425	-	6.971.218.250	-	7.664.060.200	-	8.405.332.900	-	9.219.536.500	-	10.111.569.200	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
			Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan	%	100	-		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Persentase pemenuhan layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	%	100	-		100		100		100		100		100		
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kalurahan berkarakter Pancasila	kalurahan	29	34	3.779.415.275	-	4.664.797.917	-	3.628.269.800	-	2.894.073.100	-	3.060.358.000	-	3.347.894.400	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
			Persentase kalurahan berkarakter pancasila	%	33,72	-		46,51		53,49		60,47		67,44		74,42		
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya peran partai politik dan lembaga pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase penanganan kasus kerawanan bidang politik	%	100	100	4.298.519.050	-	7.280.109.600	-	6.008.431.000	-	5.709.274.000	-	5.096.431.100	-	4.516.611.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
			Persentase partai politik penerima bantuan keuangan partai politik dengan kesimpulan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan kriteria yang berlaku	%	100	100		-		-		-		-		-		
			Persentase partai politik penerima bantuan keuangan partai politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%	100	-		100		100		100		100		100		
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase ormas dan LSM yang aktif	%	65,73	66	171.505.475	-	66.172.000	-	188.656.000	-	207.522.000	-	228.275.000	-	228.275.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
			Persentase organisasi masyarakat yang aktif	%	65,73	-		67		68		69		72		73		
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase penanganan kasus kerawanan bidang ekonomi, sosial dan budaya	%	100	100	609.150.875	-	301.863.800	-	712.066.000	-	998.272.000	-	838.100.000	-	1.231.910.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
			Persentase pembentukan desa bersinar	%	18,60	-		22,09		23,26		24,42		25,58		26,74		
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase realisasi kinerja rencana aksi daerah (RAD) penanganan konflik sosial (PKS)	%	100	100	804.511.875	-	562.030.000	-	565.299.000	-	568.564.000	-	571.823.400	-	575.081.400	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
			Persentase pelaksanaan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial	%	100	-		100		100		100		100		100		

Disclaimer *) : Dana keistimewaan pada program keistimewaan tergantung pada kemampuan keuangan negara atau alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat serta penilaian kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat
Perangkat daerah yang tidak tercantum dalam RPJMD ini bisa mendapatkan dana keistimewaan bergantung pada penugasan dari Pemerintah Daerah DIY dan dinamisasi kondisi keuangan Pemerintah Pusat maupun pencapaian target Pemerintah Daerah DIY

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penetapan kinerja daerah dilaksanakan berdasarkan pada asas spesifik, obyektif, terukur, dapat dicapai, relevan, berkesinambungan, dapat diperbandingkan serta dapat dipertanggungjawabkan. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah diukur melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

4.2.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, yang diperoleh dari indikator Tujuan dan Sasaran yang terseleksi.

Tabel 4.2. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sleman

No	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target						Sumber Data	Alasan Pemilihan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, meliputi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup	IPM dihitung menggunakan rata-rata geometrik dari indeks kesehatan (UHH), indeks pengetahuan (rata-rata dari indeks HLS dan RLS), dan indeks pengeluaran	-	85,71	85,73-85,90	85,74-86,02	85,76-86,14	85,78-86,26	85,79-86,32	85,81-86,40	Badan Pusat Statistik	IPM digunakan untuk menjelaskan pencapaian pembangunan manusia di Sleman yang menggambarkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani	$RLS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$ P_{15+}= beru: duk yang ke atas; x_i= lama sekolah penduduk ke-i	tahun	11,33	11,34-11,39	11,35-11,40	11,36-11,41	11,37-11,42	11,38-11,43	11,39-11,44	Badan Pusat Statistik	RLS menggambarkan sumber daya manusia yang dimiliki dari segi kualitas pendidikan sumber daya manusia pada usia produktif.
3	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang	$HLS = FK \sum_{i=7}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$ FK= faktor koreksi pesantren; E_i^t= jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t; P_i^t= jumlah penduduk usia i pada tahun t; i= usia (7, 8, …, n)	tahun	16,79	16,80-16,82	16,81-16,83	16,82-16,84	16,83-16,85	16,84-16,86	16,85-16,87	Badan Pusat Statistik	HLS digunakan untuk memotret pemerataan pembangunan pendidikan karena HLS mengukur kesempatan pendidikan seorang penduduk dan indikator yang menggambarkan lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.
4	Usia Harapan Hidup (UHH)	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.	UHH idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate*/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program *Micro Computer Program for Demographic*	tahun	75,48	75,59	75,65	75,80	76,00	76,10	76,22	Badan Pusat Statistik	UHH menandakan semakin baik derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah, serta menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

No	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target						Sumber Data	Alasan Pemilihan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			Analysis (MCPDA) atau *Mortpack*										
5	Tingkat Kemiskinan	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan	$P_0 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}\left[\frac{z-y_i}{z}\right]^0$ z= ı; yi= rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i=1,2,3 …,q), yi<z; q= banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan; n= jumlah penduduk	%	7,46	6,98-7,45	6,29-6,99	5,69-6,56	5,09-6,12	4,49-5,69	4,09-5,25	Badan Pusat Statistik	Tingkat kemiskinan menggambarkan jumlah orang miskin secara kuantitatif, tetapi juga mencerminkan ketimpangan akses terhadap kebutuhan dasar, seperti pangan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal yang layak, dan layanan dasar lainnya.
6	PDRB per Kapita	PDRB per kapita menunjukkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kepala atau per satu orang penduduk.	PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun	Rp Juta	54,501	57,75-61,56	60,88-65,46	63,97-69,30	67,01-73,08	70,02-76,82	73,22-81,26	Badan Pusat Statistik	PDRB per kapita untuk mengukur kesejahteraan masyarakat.
7	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan, diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: dimensi ekonomi budaya; dimensi pendidikan; dimensi ketahanan sosial budaya; dimensi warisan budaya; dimensi ekspresi budaya; dimensi budaya literasi; dan dimensi kesetaraan gender	$IPK = \sum_{j=1}^{7}(W_j \times indeks\ D_j)$ W_j= ɛe-j; D_j= dimensi ke-j Indeks D_j= $= \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} SX_{ji}}{n_j}\right) \times 100$ SX_{ji}= nilai indikator i pada dimensi ke j yang sudah dinormalisasi; n_j= jumlah indikator dimensi ke j	-	NA	70,37	70,44	70,51	70,58	70,65	70,72	Dinas Kebudayaan	IPK memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan.
8	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu	Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan membandingkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada periode tertentu dengan PDRB periode sebelumnya, kemudian dibagi dengan PDRB periode	%	5,19	5,11-5,74	5,15-5,99	5,19-6,20	5,23-6,45	5,27-6,70	5,32-6,90	Badan Pusat Statistik	Pertumbuhan ekonomi untuk mengukur kemajuan ekonomi, peningkatan produksi barang dan jasa yang mencerminkan peningkatan pendapatan masyarakat serta membantu pemerintah dalam

No	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target						Sumber Data	Alasan Pemilihan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		daerah dalam periode waktu tertentu	sebelumnya dan dikalikan 100%										merumuskan kebijakan yang efektif.
9	Rasio Gini	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva *Lorenz* dan aspek matematis.	Rasio gini= 1- $\sum_{i=1}^{n}(p_i - p_{i-1})(Y_i - Y_{i-1})$ p_i= proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i; Y= proporsi kumulatif pengeluaran per kapita i; n= jumlah observasi	-	0,431	0,425-0,430	0,423-0,429	0,421-0,428	0,419-0,427	0,417-0,426	0,415-0,425	Badan Pusat Statistik	Rasio gini sebagai dasar untuk membuat kebijakan dalam rangka mengurangi ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat.
10	Kontribusi PDRB Sektor Unggulan dan Potensial	Kontribusi PDRB sektor unggulan dan potensial adalah kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari ekonomi yang memiliki peran penting dan potensi besar dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Sektor unggulan dan potensial di Kabupaten Sleman adalah sektor pertanian dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	Kontribusi PDRB sektor unggulan dan potensial dihitung dari nilai tambah PDRB sektor unggulan dan potensial dibagi nilai PDRB dikalikan 100%	%	38,37	37,15-40,24	37,32-40,90	37,53-41,61	37,64-42,19	37,80-42,85	38,47-43,49	Badan Pusat Statistik	Kontribusi PDRB sektor unggulan dan potensial untuk mengukur keberhasilan lapangan usaha/sektor-sektor unggulan dan potensial dalam menggerakkan pembangunan ekonomi.
11	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	IDSD adalah suatu ukuran yang menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing, baik di tingkat domestik	Angka nilai hasil penilaian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	-	4,11	4,13	4,15	4,17	4,19	4,22	4,25	Badan Riset dan Inovasi Nasional	IDSD memberikan gambaran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang merefleksikan tingkat produktivitas daerah serta mampu mengombinasikan perspektif mikro di level industri dan perspektif.

No	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target						Sumber Data	Alasan Pemilihan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		maupun internasional, demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan											
12	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: penduduk yang aktif mencari pekerjaan, penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.	TPT dihitung dari jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikalikan 100%	%	4,13	4,13-5,08	4,11-5,05	4,08-5,02	4,05-4,99	4,02-4,96	3,98-4,93	Badan Pusat Statistik	TPT digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam rangka menurunkan jumlah penganggur dan menciptakan kesempatan kerja.
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL)	IKLH= (0,376×IKA) + (0,405×IKU) + (0,219×IKL)	-	NA	66,96	67,14	67,31	67,49	67,67	67,84	Dinas Lingkungan Hidup	IKLH merupakan Indikator mandatori dari pusat yang ada dalam RPJPN, RPJMN. Indikator ini menjadi tolok ukur isu strategis lingkungan sehingga menjadi indikator tujuan dalam RPJMD ini
14	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang adalah terwujudnya pola ruang	Luas wilayah pemanfaatan pola ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibagi luas rencana	%	86,33	87,5	89,00	90,5	92,00	93,5	95,00	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang menjadi indikator sasaran dalam RPJMD ini. Indikator ini menggambarkan keselarasan

No	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target						Sumber Data	Alasan Pemilihan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		yang sesuai dengan rencana tata ruang	tata ruang yang telah ditetapkan dikalikan 100%										antara rencana kegiatan pemanfaatan suatu wilayah dengan rencana tata ruang yang berlaku, serta menunjukkan adanya pembangunan yang terstruktur, berkelanjutan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga dapat menggambarkan efisiensi dalam proses perizinan, kepatuhan terhadap hukum, keberlanjutan lingkungan, dan pengurangan potensi konflik penggunaan lahan
15	Indeks Reformasi Birokrasi	IRB adalah gambaran sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.	Hasil evaluasi pelayanan RB Pemerintah Daerah diberikan oleh KemenPAN-RB	-	NA	83,5	85,3	87,15	88,9	90,7	92,4	KemenPAN-RB	IRB menggambarkan tingkat kemajuan dan perbaikan tata kelola yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
16	Nilai AKIP	Nilai AKIP adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan	Nilai AKIP Pemerintah Daerah diberikan oleh KemenPAN-RB	-	A 80,86	A 81,72	A 82,16	A 82,75	A 83,19	A 83,63	A 84,07	KemenPAN-RB	AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
17	Opini BPK	Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi	Opini BPK Pemerintah Daerah yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pemeriksa Keuangan	Opini BPK menggambarkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah

No	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target						Sumber Data	Alasan Pemilihan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		pemerintahan; kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; efektivitas sistem pengendalian intern											
18	Indeks Pelayanan Publik	IPP adalah sebuah sistem pengukuran kinerja pelayanan publik yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. IPP mengukur berbagai aspek pelayanan publik, seperti kebijakan, sumber daya manusia, sarana prasarana, sistem informasi, dan konsultasi, untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja pelayanan	IPP Pemerintah Daerah dihitung mandiri oleh Bagian Organisasi Kabupaten Sleman	-	2,77	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	Bagian Organisasi	IPP menggambarkan kualitas kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh perangkat daerah atau unit pelayanan di daerah dan upaya pemenuhan kualitas pelayanan.
19	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Sistem pemerintahan berbasis elektronik merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Nilai tingkat kematangan pelaksanaan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk	Indeks merupakan hasil penilaian evaluasi yang dilakukan oleh KemenPAN-RB	-	4,3	4,3	-	-	-	-	-	KemenPAN-RB	Indeks SPBE menggambarkan tingkat kematangan suatu instansi pemerintah dalam menerapkan SPBE. Indeks ini merupakan hasil evaluasi sistematis yang mengukur sejauh mana pemerintah telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan yang efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan publik

No	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target						Sumber Data	Alasan Pemilihan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		memberikan layanan kepada pengguna SPBE, yang terdiri dari domain kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE, manajemen SPBE serta layanan SPBE.											
20	Indeks Pemerintahan Digital	Perubahan/ transformasi indeks SPBE menjadi indeks pemerintahan digital. Terjadi perubahan indikator dalam penilaian. Suatu alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah mengintegrasikan teknologi digital dalam berbagai aspek operasional dan pelayanannya. Indeks ini mencakup berbagai dimensi, seperti infrastruktur digital, layanan publik berbasis digital, partisipasi masyarakat dalam ekosistem digital, dan kemampuan pemerintah dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas	Indeks merupakan hasil penilaian evaluasi yang dilakukan oleh KemenPAN-RB, penilaian wajib dilakukan 2 tahun sekali, sedangkan tahun berikutnya adalah pemantauan	-	NA	-	1,5	1,5	1,6	1,6	1,8	KemenPAN-RB	Indeks pemerintahan digital menggambarkan tingkat perkembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dan pelayanan publik. Indeks ini mengukur seberapa efektif sebuah pemerintah dalam menyediakan layanan mengelola data dan berinteraksi dengan masyarakat melalui platform digital untuk mencapai efisiensi transparansi, dan aksesibilitas yang baik

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci. Adapun Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. Indikator ini secara umum dibagi dalam tiga aspek, yaitu :

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
2. Aspek Pelayanan Umum;
3. Aspek Daya saing Daerah

Indikator Kinerja Daerah ini kemudian dituangkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Pada setiap urusan pemerintahan memiliki indikator kinerja masing-masing, namun tidak semua indikator urusan masuk sebagai indikator kinerja daerah yang tercantum dalam dokumen RPJMD. Indikator kinerja yang masuk pada RPJMD adalah indikator kinerja yang bersifat strategis, makro dan memiliki daya ungkit yang tinggi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Indikator kinerja urusan lainnya masuk sebagai indikator kinerja dalam dokumen Renstra PD. Indikator tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk matriks yang akan dipergunakan sebagai acuan dan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Selengkapnya, matriks indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Sleman

No	Indikator		Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
A.	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**										
	1	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of undernourishment* (PoU))	%	8,05	7,76-7,80	7,47-7,55	7,19-7,30	7,69-7,04	6,61-6,79	6,32-6,54	
	2	Akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum	%	100	100	100	100	100	100	100	
	3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	NA	66,96	67,14	67,31	67,49	67,67	67,84	
	4	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	%	29,34	29,86	31,7	33,53	35,35	37,17	38,97	
	5	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	-	51,79	66,72	69,72	72,78	75,91	79,13	82,46	
	6	Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah	%	47,91	49,84	51,74	53,63	55,49	57,33	59,15	
	7	Indeks Risiko Bencana	-	73,35	73,3	73,25	73,2	73,15	73,1	73,05	
	8	Indeks Ketahanan Daerah	-	0,77	0,78	0,79	0,80	0,81	0,82	0,83	
	9	Laju pertumbuhan penduduk	%	0,97	0,93	0,90	0,88	0,85	0,82	0,80	
	10	Rasio penduduk	%	98,17	98,02	97,87	97,71	97,56	97,41	97,26	
	11	Kepadatan penduduk	orang/ km^2	2.033	2.052	2.070	2.088	2.106	2.124	2.141	

No	Indikator		Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
B.	**ASPEK KESEJAHTERAAN RAKYAT**										
	1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,19	5,11-5,74	5,15-5,99	5,19-6,20	5,23-6,45	5,27-6,70	5,32-6,90	
	2	Tingkat Kemiskinan	%	7,46	6,98-7,45	6,29-6,99	5,69-6,56	5,09-6,12	4,49-5,69	4,09-5,25	
	3	PDRB per Kapita	juta rupiah	54,501	57,75-61,56	60,88-65,46	63,97-69,30	67,01-73,08	70,02-76,82	73,22-81,26	
	4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,13	4,13-5,08	4,11-5,05	4,08-5,02	4,05-4,99	4,02-4,96	3,98-4,93	
	5	Rasio Gini	-	0,431	0,425-0,430	0,423-0,429	0,421-0,428	0,419-0,427	0,417-0,426	0,415-0,425	
	6	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	-	5,55	5,58	5,59	5,61	5,62	5,63	5,64	
	7	Indeks Zakat Nasional (IZN)	-	0,62	0,65	0,68	0,71	0,74	0,77	0,80	
	8	Rasio kredit	%	39,31	39,55	39,78	39,98	40,17	40,36	40,51	
	9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	85,71	85,73-85,90	85,74-86,02	85,76-86,14	85,78-86,26	85,79-86,32	85,81-86,40	
	10	Usia Harapan Hidup	tahun	75,48	75,59	75,65	75,80	76,00	76,10	76,22	
	11	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	4,41	4,36	4,31	4,26	4,21	4,16	4,11	
	12	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	11,33	11,34-11,39	11,35-11,40	11,36-11,41	11,37-11,42	11,38-11,43	11,39-11,44	
	13	Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	16,79	16,80-16,82	16,81-16,83	16,82-16,84	16,83-16,85	16,84-16,86	16,85-16,87	
	14	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimal asesmen nasional untuk literasi membaca	%	88,69	88,70-88,90	88,71-89,10	88,72-89,30	88,73-89,50	88,74-89,70	88,75-89,90	

No	Indikator		Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	15	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimal asesmen nasional untuk numerasi	%	81,69	81,70-81,75	81,71-82,00	81,72-82,25	81,73-82,50	81,74-82,75	81,75-83,00	
	16	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	76,97	76,98	76,99	77	77,01	77,02	77,03	
	17	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan kabupaten/kota	%	17,55	28,75-31,00	31,41-33,89	33,07-36,75	36,74-39,6	39,40-42,44	42,07-45,27	
	18	Indeks Pembangunan Kebudayaan	-	NA	70,37	70,44	70,51	70,58	70,65	70,72	
	19	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	-	72,97*	72,98	72,99	73,00	73,01	73,02	73,03	
	20	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	-	65,92	65,97	66,02	66,07	66,12	66,17	66,22	
	21	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	-	0,112	0,116-0,111	0,115- 0,110	0,114-0,109	0,113-0,108	0,112-0,107	0,111-0,106	
	22	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	96,52	96,53	96,54	96,55	96,56	96,57	96,58	
	23	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	-	66,67	66,67	66,68	66,69	66,70	66,71	66,72	
C.	**ASPEK DAYA SAING**										
	1	Kontribusi PDRB kabupaten/kota	%	32,97	32,62	32,50	32,28	32,26	32,14	32,02	

No	Indikator		Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	2	Kontribusi PDRB sektor unggulan dan potensial	%	38,37	37,15-40,24	37,32-40,90	37,53-41,61	37,64-42,19	37,80-42,85	38,47-43,49	
	3	Rasio produk domestik regional bruto industri pengolahan	%	12,37	11,59-12,93	11,64-13,01	11,68-13,08	11,73-13,15	11,77-13,22	11,85-13,29	
	4	Rasio produk domestik regional bruto penyediaan akomodasi dan makan minum	%	10,67	10,33-11,51	10,43-12,04	10,52-12,57	10,60-13,10	10,68-13,63	11,23-14,16	
	5	Rasio kewirausahaan daerah	%	4,56	4,74	4,89	5,02	5,14	5,24	5,34	
	6	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%	2,37	2,38 - 2,51	2,39 - 2,55	2,4 - 2,58	2,41 - 2,61	2,42 - 2,64	2,43 - 2,66	
	7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	73,27	72,66-74,94	73,07-75,37	73,48-75,80	73,89-76,23	74,31-76,66	74,72-77,09	
	8	Indeks Inovasi Daerah	-	62,82	63	63,5	64	65	66	67	
	9	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (% PDRB)	%	41,85	30,81-37,81	30,92-37,92	31,04-38,03	31,15-38,14	31,26-38,26	31,37-38,37	
	10	Persentase peningkatan nilai ekspor	%	0,87	0,90	1,12	1,34	1,56	1,78	2,00	
	11	Persentase layanan infrastruktur	%	83,24	83,82	84,46	84,91	85,59	86,18	86,87	
	12	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	79,02	79,23	80,03	81,33	82,84	84,6	86,71	
	13	Persentase desa mandiri	%	NA	82,558	83,140	83,721	84,302	84,884	85,47	

No	Indikator		Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	14	Rasio pajak daerah terhadap produk domestik regional bruto (PDRB)	%	1,34	1,39	1,44	1,49	1,54	1,59	1,64	
D.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**										
	1	Indeks Reformasi Birokrasi	-	NA	83,5	85,3	87,15	88,9	90,7	92,4	
	2	Nilai AKIP	-	A 80,86	A 81,72	A 82,16	A 82,75	A 83,19	A 83,63	A 84,07	
	3	Opini BPK	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
	4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	4,3	4,3	-	-	-	-	-	
	5	Indeks Pemerintahan Digital	-	NA	-	1,5	1,5	1,6	1,6	1,8	
	6	Indeks Pelayanan Publik	-	2,77	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	
	7	Angka kriminalitas - crime rate	per 100.000 penduduk	120,56	120	119,75	119,50	119,25	119	118,75	
	8	Cakupan pengendalian gangguan ketenteraman, ketertiban umum, penegakan perda dan kapasitas perlindungan masyarakat	%	79,27	81	83,33	85,66	88	90,33	93,33	
	9	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	-	4,11	4,13	4,15	4,17	4,19	4,22	4,25	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
INDIKATOR KINERJA KUNCI										
	Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
1	**Urusan Pendidikan**									
	1.1. Rata-rata lama sekolah (RLS)	tahun	11,33	11,34-11,39	11,35-11,40	11,36-11,41	11,37-11,42	11,38-11,43	11,39-11,44	
	1.2. Harapan lama sekolah (HLS)	tahun	16,79	16,80-16,82	16,81-16,83	16,82-16,84	16,83-16,85	16,84-16,86	16,85-16,87	
2	**Urusan Kesehatan**									
	2.1. Angka kematian ibu	per 100.000 kelahiran hidup	67,79	67,50	67,21	66,92	66,50	66,00	65,50	
	2.2. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	4,41	4,36	4,31	4,26	4,21	4,16	4,11	
	2.3. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*)	%	91,63	91,75	92,25	92,50	93,00	93,25	93,50	
	2.4. Persentase rumah tangga yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	%	65,27	62,50	63,50	64,00	64,50	65,00	66,50	
3	**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**									
	3.1. Persentase layanan infrastruktur	%	83,24	83,82	84,46	84,91	85,59	86,18	86,87	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	3.2. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	86,33	87,5	89,00	90,5	92,00	93,5	95,00	
4	**Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman**									
	4.1. Persentase RTLH dan kawasan kumuh yang tertangani	%	41,76	42,97	47,68	53,10	58,02	63,48	69,76	
5	**Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**									
	5.1. Cakupan pengendalian gangguan ketentraman, ketertiban umum, penegakan perda dan kapasitas perlindungan Masyarakat	%	79,27	81	83,33	85,66	88	90,33	93,33	
	5.2. Tingkat waktu tanggap (respon time rate) di WMK	%	85,71	95	100	100	100	100	100	
	5.3. Indeks Ketahanan Daerah	%	0,77	0,78	0,79	0,8	0,81	0,82	0,83	
6	**Urusan Sosial**									
	6.1. Persentase pemerlu penyandang kesejahteraan social (PPKS) yang memperoleh intervensi Program Perlindungan Sosial	%	92,10	92,60	93,20	93,90	94,70	95,60	96,10	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar										
1	**Urusan Tenaga Kerja**									
	1.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	73,27	72,66-74,94	73,07-75,37	73,48-75,80	73,89-76,23	74,31-76,66	74,72-77,09	
2	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**									
	2.1. Indeks ketimpangan gender (IKG)	-	0,112	0,116-0,111	0,115- 0,110	0,114-0,109	0,113-0,108	0,112-0,107	0,111-0,106	
	2.2. Indeks perlindungan anak (IPA)	-	72,97*	72,98	72,99	73,00	73,01	73,02	73,03	
3	**Urusan Pangan**									
	3.1. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of undernourishment* (PoU))	%	8,05	7,76-7,80	7,47-7,55	7,19-7,30	7,69-7,04	6,61-6,79	6,32-6,54	
4	**Urusan Pertanahan**									
	4.1. Persentase tertib administrasi pertanahan	%	86	87	88	89	90	91	92	
5	**Urusan Lingkungan Hidup**									
	5.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	NA	66,96	67,14	67,31	67,49	67,67	67,84	
	5.2. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	-	62,50	62,80	63,70	64,50	64,70	64,90	65,00	
6	**Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**									

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	6.1. Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan	-	89,95	90,10	90,25	90,40	90,55	90,70	90,85	
7	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**									
	7.1. Persentase desa mandiri	%	NA	82,558	83,140	83,721	84,302	84,884	85,47	
8	**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**									
	8.1. Indeks pembangunan keluarga (IBangga)	-	65,92	65,97	66,02	66,07	66,12	66,17	66,22	
9	**Urusan Perhubungan**									
	9.1. Kinerja lalu lintas dan angkutan jalan	%	47,58	48,53	49,34	54,43	59,53	63,00	64,67	
	9.2. Rasio konektivitas	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
	9.3. V/C ratio	-	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	
10	**Urusan Komunikasi dan Informatika**									
	10.1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	4,3	4,3	-	-	-	-	-	
	10.2. Indeks Pemerintahan digital	-	NA	-	1,5	1,5	1,6	1,6	1,8	
11	**Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**									
	11.1. Rasio pelaku usaha mikro	%	13,99	14,11	14,27	14,41	14,59	14,79	15	

No	Indikator		Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		11.2. Rasio keanggotaan koperasi	%	21,26	22,53	22,54	22,55	22,56	22,57	22,58	
	12	**Urusan Penanaman Modal**									
		12.1. Persentase peningkatan investasi	%	1,01	1,15	1,29	1,42	1,62	1,74	1,01	
	13	**Urusan Kepemudaan dan Olahraga**									
		13.1. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	-	66,67	66,67	66,68	66,69	66,70	66,71	66,72	
		13.2. Indeks pembangunan olahraga (IPO)	-	0,38	0,389	0,392	0,395	0,398	0,401	0,404	
	14	**Urusan Statistik**									
		14.1. Indeks Pembangunan Statistik	-	2,99	2,99	3,01	3,05	3,1	3,15	3,25	
	15	**Urusan Persandian**									
		15.1. Indeks Keamanan Informasi (Indeks Kami)	-	NA	275	300	350	400	450	500	
		15.2. Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	NA	42,64	46,51	54,26	62,02	69,77	77,52	
	16	**Urusan Kebudayaan**									
		16.1. Indeks Pembangunan Kebudayaan	-	NA	70,37	70,44	70,51	70,58	70,65	70,72	
	17	**Urusan Perpustakaan**									
		17.1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	76,97	76,98	76,99	77	77,01	77,02	77,03	
	18	**Urusan Kearsipan**									

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	18.1. Nilai hasil pengawasan kearsipan pada pemerintah kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)	-	95,85	95,85	95,86	95,87	95,88	95,89	95,90	
Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan										
1	**Urusan Kelautan dan Perikanan**									
	1.1. Persentase peningkatan produksi ikan	%	0,3	0,31	0,55	0,70	0,85	0,95	1,1	
2	**Urusan Pariwisata**									
	2.1. Pembelanjaan wisatawan									
	– mancanegara – nusantara	US$ Rp	459,41 1.533.754	460 1.550.000	461 1.560.000	462 1.570.000	463 1.580.000	464 1.590.000	465 1.600.000	
	2.2. Persentase sumber daya manusia (SDM) pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi kompetensi	%	NA	3	6	9	12	15	17	
3	**Urusan Pertanian**									
	3.1. Persentase peningkatan produksi pertanian	%	0,21	0,40	0,60	0,80	1,0	1,2	1,4	
4	**Urusan Perdagangan**									

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	4.1. Persentase peningkatan nilai ekspor	%	0,87	0,90	1,12	1,34	1,56	1,78	2,00	
	4.2. Persentase peningkatan nilai transaksi produk dalam negeri yang dipromosikan	%	1,50	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	
	4.3. Persentase sarana prasarana perdagangan tradisional dikelola dengan baik	%	83,20	84,80	86,40	88,00	89,60	91,20	92,60	
	4.4. Persentase koefisien variasi harga antar waktu	%	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	
5	**Urusan Perindustrian**									
	5.1. Proporsi jumlah industri kecil menengah (IKM) pada level kabupaten/kota	%	2,88	3,24	3,66	4,06	4,44	4,80	5,15	
6	**Urusan Transmigrasi**									
	6.1. Cakupan keberhasilan penempatan transmigran	%	95,65	96	96	96	96	96	96	
Layanan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan										
1	**Sekretariat Daerah**									
	1.1. Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD)	-	3,1895	3,3106	3,3150	3,3250	3,3350	3,3450	3,3550	
2	**Sekretariat DPRD**									

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	2.1. Persentase raperda yang dibahas dan disetujui tepat waktu untuk ditetapkan menjadi perda	%	75	77	79	81	82	83	84	
	Layanan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
1	**Perencanaan**									
	1.1. Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	-	NA	77,24	90,56	91,15	91,74	92,32	92,91	
2	**Keuangan**									
	2.1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	-	B 77,83	B 78	B 78,30	B 78,60	B 79,10	B 79,60	A 80,10	
	2.2. Rasio PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	%	36,02	36,37	36,73	37,09	37,45	37,82	38,19	
3	**Kepegawaian**									
	3.1. Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen ASN	-	95,83	95,87	95,91	95,95	95,99	96,03	96,07	
4	**Pendidikan dan Pelatihan**									
	4.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	-	82,92	82,93	82,94	82,95	82,96	82,97	82,98	
5	**Penelitian dan Pengembangan**									
	5.1. Indeks Inovasi Daerah	-	62,82	63	63,5	64	65	66	67	
6	**Pengelolaan Perbatasan**									

No	Indikator		Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		6.1. Persentase penanganan permasalahan kebijakan di wilayah perbatasan	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Layanan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan										
	1	**Inspektorat Daerah**									
		1.1. Nilai kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)	-	Level 3 3,120	Level 3 3,165	Level 3 3,210	Level 3 3,255	Level 3 3,300	Level 3 3,345	Level 3 3,390	
	Layanan Unsur Kewilayahan										
	1	**Kecamatan**									
		1.1. Nilai evaluasi kinerja pemerintahan kapanewon	-	85,82	86,76	87,76	88,76	89,76	90,76	91,76	
	Layanan Unsur Pemerintahan Umum										
	1	**Kesatuan Bangsa dan Politik**									
		1.1. Persentase penanganan potensi konflik sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V
PENUTUP

RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 merupakan dokumen strategis bagi pembangunan Kabupaten Sleman. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta pencapaian Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan diperlukan keterlibatan dan peran dari seluruh masyarakat Sleman dan swasta, aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Pemerintah Pusat. Selanjutnya, RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam RKPD yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan.

5.1 Pedoman Transisi

Pedoman transisi dalam penyusunan RPJMD ini adalah:

1. RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran serta APBD masa transisi, yaitu tahun pertama pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
2. RPJMD sebagai pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan untuk menyelesaikan permasalahan yang belum dapat terselesaikan pada RPJMD sebelumnya dan masalah yang dihadapi pada periode RPJMD masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
3. RKPD masa transisi pada tahun pertama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD periode Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 ini merupakan panduan melakukan pembangunan selama periode tersebut. Oleh karena itu, RPJMD hendaknya dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab, dengan kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

1. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dan seluruh pemangku kepentingan mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Tujuan, Sasaran, dan Program Pembangunan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029;
2. Setiap perangkat daerah, berkewajiban untuk menyusun Renstra-PD yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029;
3. Dalam menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029, Bupati Sleman dibantu oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
4. Konsep prioritas dalam RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029, baik mengenai aspek program, hanya mempunyai implikasi terhadap konsentrasi intervensi terhadap program prioritas, baik dalam kerangka anggaran maupun jenis kegiatan, dan tidak berimplikasi terhadap peniadaan program non-prioritas; serta

5. Konsep deskripsi program prioritas dan program pembangunan tidak berimplikasi pada besaran pengalokasian belanja, tetapi lebih pada logika alur berpikir mengenai skala prioritas pentingnya sebuah program dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran pembangunan yang diagendakan.

BUPATI SLEMAN,

HARDA KISWAYA



BAPPEDA
SLEMAN

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2025
Alamat : Jl Parasamya No. 1 Sleman Yogyakarta
No. Telp : (0274) 868800
Fax : (0274) 869533
Website : bappeda.slemankab.go.id
Email : perencanaanbappeda@gmail.com